BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perangkat daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

Dipindai dengan CamScanner

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKA PD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaskud pada ayat (1) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD Tahun 2024.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun 2022;
    c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
    d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
    e. bab V memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    e. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    f. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Dipindai dengan CamScanner

g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
h. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiranVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
i. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
l. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
n. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
p. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
r. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
s. Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
u. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
v. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Dipindai dengan CamScanner

w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
x. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
y. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
z. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ff. Kecamatan Kinali sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
gg. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
hh. Kecamatan Talamau sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ii. Kecamatan Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
jj. Kecamatan Gunung Tuleh sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
kk. Kecamatan Lembah Melintang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ll. Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
mm. Kecamatan Sungai Beremas sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Dipindai dengan CamScanner

nn. Kecamatan Sungai Aur sebagaimana tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
oo. Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
pp. Kecamatan Koto Balingka sebagaimana tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Renja PD.
(2) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA PD.
(3) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 November 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Simpang Empat, Juli 2023

K e p a l a,

AGUSLI, S.Pd
NIP. 197508172005010 11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan hukum 1

1. 3. Maksud dan Tujuan 3

1. 4. Sistematika Penyusunan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disdikbud..... 6

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan..... 13

2. 3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 15

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15

2. 5. Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat..... 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD..... 30

3.3 .Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 49

BAB V PENUTUP..... 58

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SOPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Disdik Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pendidikan mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan.

Selanjutnya, Renja Disdik Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dinas Pendidikan menyusun Renja tahun 2024, didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan integrasi program kegiatan yang bersumber dari operasionalisasi program kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang juga diselaraskan dengan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021- 2026.
2. Prioritas terkait pembangunan pertanian dalam RKPD tahun 2024.
3. Review hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun sebelumnya yang dapat menjadi acuan program kegiatan yang akan ditambahkan atau dilanjutkan untuk tahun 2024.

4. Beberapa isu yang berkembang baik pada skala nasional, provinsi ataupun daerah yang perlu diadopsi dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2024.

Berikut gambar yang menyajikan Bagan Alir Proses Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

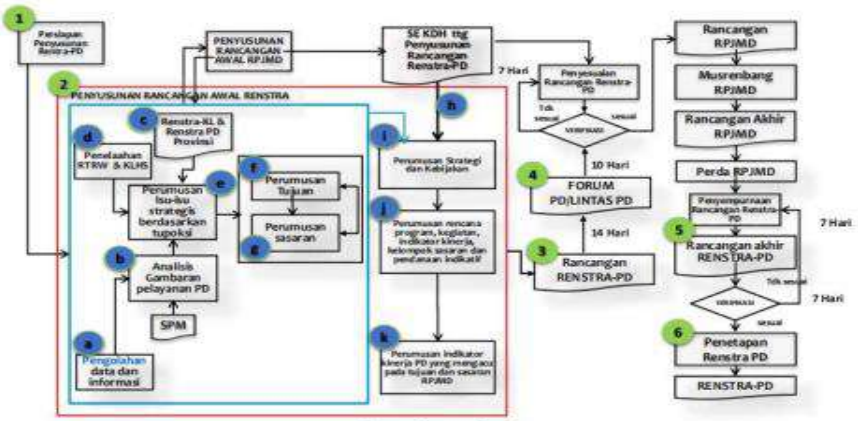

Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat harus berpedoman kepada Renstra maupun RKPD. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada Bab IV Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.

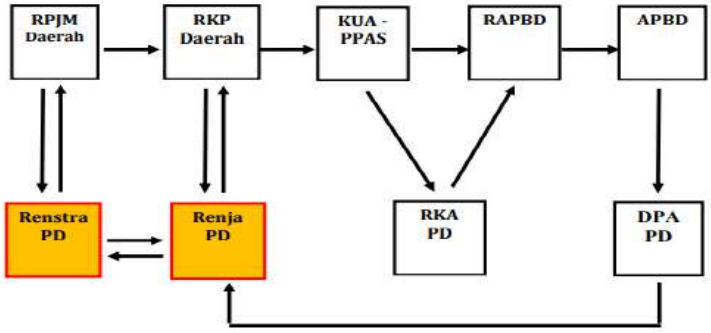

Gambar 1.2
Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dilakukan dengan pen

dekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur dan tupoksi dari beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tersebut adalah Dinas Pendidikan. Mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, terhitung mulai tahun 2023 kewenangan urusan kebudayaan pindah ke Dinas Pariwisata. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Informal (PAUD dan PNFI); Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD); Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selanjutnya, Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Disdik Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Disdik Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Disdik serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan.
b. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .
c. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Pendidikan.
d. Mendukung seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.
a. Untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIK Tahun Lalu dan CapaianRenstra DISDIK

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah . Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*out come*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DISDIK Kabupaten Pasaman Barat yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DISDIK beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi,misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kinerja DISDIK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DISDIK tahun 2022 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan visi dan misi dalam tahun 2024, DISDIK Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 4 Program, 13 kegiatan dan 68 sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi pelaksanaan Renja DISDIK tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja DISDIK tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISDIK pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Operasi
   Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa yang dinggarkan sebesar Rp, 363.365.092.608,- dan terealisasi sebesar Rp. 341.367.465.864,- atau sebesar 85.57 %.
b. Anggaran Belanja Modal
   Belanja Modal pada Dinas Pendidikan pada Tahun 2022 sebesar Rp 35.930.394.141,- dan terealisasi sebesar Rp 32.902.549.709,- atau sebesar 8.25%.

Tidak tercapainya seluruh serapan anggaran disebabkan karena keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/ sumber daya manusia dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana berakibat beberapa kegiatan tidak tuntas dalam penyelesaian spj kegiatan.

Adapun rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (Lkpj) Tahun 2022 terhadap Disdik diantaranya penambahan anggaran bidang kebudayaan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam menggali potensi budaya khas daerah dan sinkron terhadap kegiatan yang ada di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DISDIK tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DISDIK tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
								K	K	K			K	K
3					4	5	6	7	8	13			14=7+13	15=14/6*10
Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
DINAS PENDIDIKAN DAN														
1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1	**01**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**									
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dapat Gaji dan Tunjangan	2478 org	2478 org	2478 org	2478 org	2478 org	2478 org	2478 org	2478 org
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	51 org	51 org	51 org	51 org	51 org	51 org	51 org	51 org
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah petugas pengelola keuangan	32 org	32 org	32 org	32 org	32 org	32 org	32 org	32 org
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan BMD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekolah yang Mengikuti pembinaan BMD	324 SP	324 SP	324 SP	324 SP	324 SP	324 SP	324 SP	324 SP
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek**	**2 ASN**	**2 ASN**	**2 ASN**	**2 ASN**	**2 ASN**	**2 ASN**	**2 ASN**	**2 ASN**
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	2 ASN	2 ASN	2 ASN	2 ASN	2 ASN	2 ASN	2 ASN	2 ASN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

						Dilakukan								
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat (K/L) yang Diikuti	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sarana Prasarana yang Dibangun**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Komunikasi, Listrik dan Air untuk Operasional Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	**2.09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara, Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayar Pajak	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	92 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit
2	01	01	**2.09**	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3	01	01	**2.09**	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
1	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	**2.13**	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Hibah kepada Kwarcab	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD, SMP**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	***Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang RKB SD	17 ruang	17 ruang	17 ruang	17 ruang	17 ruang	17 ruang	17 ruang	17 ruang
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah pembangunan ruang UKS beserta perabotnya tingkat SD	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pustaka Sekolah Dasar	8 SP	8 SP	8 SP	8 SP	8 SP	8 SP	8 SP	8 SP
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet, Pagar, Drainase/Landscape Tingkat SD	12 SP	12 SP	12 SP	12 SP	12 SP	12 SP	12 SP	12 SP
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Tersedianya Rehab Ruang Kelas SD	17 SP	17 SP	17 SP	17 SP	17 SP	17 SP	17 SP	17 SP
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Rehab Sapras Utilitas SD	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Operasional Peserta Didik Sekolah Dasar	Terpenuhinya SPM Bidang Pendidikan	120 Siswa	120 Siswa	120 Siswa	120 Siswa	120 Siswa	120 Siswa	120 Siswa	120 Siswa
					Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel sekolah	15 SP	15 SP	15 SP	15 SP	15 SP	15 SP	15 SP	15 SP
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP

1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Dapodik dan PMP, Operasional Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan UKS dan KSN Tingkat Kabupaten SD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	144 PTK	144 PTK	144 PTK	144 PTK	144 PTK	144 PTK	144 PTK	144 PTK
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Adanya Sosialisasi Guru Penggerak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyusunan Kurikulum dan Validasi	581 SP	581 SP	581 SP	581 SP	581 SP	581 SP	581 SP	581 SP
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima BOS SD	253 SP	253 SP	253 SP	253 SP	253 SP	253 SP	253 SP	253 SP
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah ASN Pengelola BOS SD	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	14 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Tersedianya labor sekolah	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	3 SP	1 SP	1 SP	1 SP
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya Ruang Kelas Baru SMP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya SMP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya dan pagar,Rumdis SMP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Sedang/ringan ruang guru Tingkat SMP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah rehab sedang/ringan ruang guru tingkat SMP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehab Sedang/Berat Sarana Prasarana Utilitas Sekolah SMP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP
1	01	02	2.02	32	Penyediaan biaya personil Peserta Didik Menengah Pertama	Jumlah bantuan kepada peserta didik SMP	110 siswa	110 siswa	110 siswa	110 siswa	110 siswa	110 siswa	110 siswa	110 siswa
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	14 SP	14 SP	14 SP	14 SP	14 SP	14 SP	14 SP	14 SP
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan Sosialisasi PPDB, PIP, Dapodik dan PMP	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kegiatan KOSN, GSI, FL2SN dan UKS Tingkat Kabupaten	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Jasa Penunjang Pembelajaran SMP	101 PTK	101 PTK	101 PTK	101 PTK	101 PTK	101 PTK	101 PTK	101 PTK
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Sekolah Penggerak	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Dibina	70 SP	70 SP	70 SP	70 SP	70 SP	70 SP	70 SP	70 SP
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima BOS SMP	53 SP	53 SP	53 SP	53 SP	53 SP	53 SP	53 SP	53 SP
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ASN Pengelola BOS tingkat SMP	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	13 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan PAUD**	**Persentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah paket pembangunan ruang PAUD	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah paket pembanguan utilitas PAUD	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah paket rehab kelas PAUD	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP

					Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD									
					Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel sekolah	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	jumlah paket APE PAUD	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah peserta sosialisasi Tindak lanjut evaluasi PAUD	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terpenuhinya Tenaga Pendidikan dan Kependidikan PAUD	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta Sosialisasi Guru Penggerak PAUD	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta sosialisasi kelembagaan PAUD	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah Penerima BOP PAUD	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP	300 SP
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan**	**Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**01**	**02**	**2.04**	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta ujian paket A,B dan C	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
1	**01**	**02**	**2.04**	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan PTK Pendukung di Kesetaraan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
1	**01**	**02**	**2.04**	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan non formal/kesetaraan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
1	**01**	**02**	**2.04**	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Penerima BOP Kesetaraan	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB	11 PKBM dan 1 SKB
1	**01**	**05**			**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Persentase PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**jumlah izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Nonformal**	**100 SP**	**100 SP**	**100 SP**	**100 SP**	**100 SP**	**100 SP**	**100 SP**	**100 SP**
1	01	05	**2.01**	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 SP	100 SP	100 SP	100 SP	100 SP	100 SP	100 SP	100 SP
2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2	**22**				**Urusan Pemerintahan Bidang**									
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Cakupan lembaga adat,seni dan budaya yang dibina (%)**	**88%**	**63%**	**68%**	**63%**	**63%**	**68%**	**63%**	**68%**
2	22	02	2.01		**Pengelolaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga adat,seni dan budaya yang dibina**	**88**	**63**	**68**	**63**	**63**	**68**	**63**	**68**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah Objek Pemajuan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	**88**	**63**	68	**63**	**63**	68	**63**	68
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase seni dan budaya yang dilestarikan**	**60%**	**35%**	**40%**	**35%**	**35%**	**40%**	**35%**	**40%**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan**	**60**	**35**	**40**	**35**	**35**	**40**	**35**	**40**
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	**60**	**35**	**40**	**35**	**35**	**40**	**35**	**40**

2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Sejarah lokal yang terdokumentasi**	**10**		**2**			**2**		**2**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	**Jumlah dokumen sejarah lokal yang dibina**	**10**		**2**			**2**		**2**
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (dokumen)	**10**		**2**			**2**		**2**
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase benda,situs,dan kawasan cagar**	**75%**	**63%**	**68%**	**63%**	**63%**	**68%**	**63%**	**68%**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**jumlah cagar budaya yang di tetapkan**	**75**	**63**	**68**	**63**	**63**	**68**	**63**	**68**
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan	75	63	68	63	63	68	63	68

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam pengentrian anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak kegiatan.
4. Kekurangan tenaga teknis pada Dinas Pendidikan khususnya terkait dengan banyaknya dokumen kontrak pekerjaan fisik yang memerlukan waktu, tenaga dan pikiran sementara intensitas pekerjaan fisik yang sangat tinggi sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan keuangan.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berkut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Unit Layanan Pengadaan
4. Menyurati BKPSDM terkait permintaan tenaga teknis khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7 Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antara apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Berdasarkan telaahan terhadap Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pendidikan dan terutama mendukung pencapaian **Misi ke 2** yaitu ***Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing*** .dengan menfokuskan pada tujuan 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mencapai sasaran 3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. indikator utama, yakni:

1) Angka Rata-rata lama sekolah dan
2) Harapan lama sekolah

DISDIK Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perencanaan pelayanan DISDIK setiap tahunnya merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program pendidikan tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan telah menunjukkan hasil - hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2022 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya Analisis terhadap kinerja pelayanan tentang capaian kinerja pelayanan DISDIK Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pendidikan Pasaman Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pendidikan dan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	**Pendidikan**											
	Pendidikan Dasar											
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI			100	100	100	100	98	99	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs			100	100	100	100	88	89	100	100	
	Pendidikan Non-Formal dan Kesetaraan			100	100	100	100	37	67	100	100	
	Angka Melek Huruf			99.41	99.47	99.53	99.58	99,35	99.41	99.47	99.53	
	Angka Partisipasi PAUD			100	100	100	100	54	63	100	100	
	Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan			NA	100	100	100	70	72	100	100	

Berdasarkan Tabel T-C.30 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dari 98 pada tahun 2021 menjadi 99 pada reliasasi capaian tahun 2022. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs juga mengalami kenaikan sebesar 1 % dari 88 pada tahun 2021 menjadi 89 pada capaian tahun 2022. Kenaikan yang sama juga terjadi untuk Angka Melek Huruf dari 99,35 pada tahun 2021 menjadi 99,41 pada tahun 2022.

Kenaikan yang cukup signifikan adalah pada indikator Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 37 naik menjadi 67 pada tahun 2022. Demikian juga dengan Angka Partisipasi PAUD yang mengalami kenaikan dari 54 pada tahun 2021 menjadi 63 pada tahun 2022. Rasio penduduj usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan naik dari 70 pada tahun 2021 menjadi 72 pada tahun 2022.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Pasaman Barat memiliki angka partisipasi yang belum mencapai 100 persen, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan. Maka, alternatif lainnya mengajak masyarakat Pasaman Barat khususnya yang berusia diatas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan yang sudah diberikan bantuan dari pusat yaitu BOP Kesetaraan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 53.650.224.474,-.Anggaran ini tersebar pada program yaitu program pengelolaan pendidikan (4 kegiatan), Dari jumlah anggaran sebesar Rp 53.650.224.474,-.terealisasi sebesar Rp. 51.817.477.444,- atau 96.58%.

2.3. Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan

Realisasi pencapaian SPM pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Target (Jumlah yang harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang belum Terlayani	Persen-tase
I	**Pendidikan Dasar**		**Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)**	**68.894**	**68.894**	**0**	**100%**
	1	Buku teks Pelajaran		68.894	68.894	0	100%
	2	Perlengkapan Belajar		137.756	137.756	0	100%
	3	Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		343	343	0	100%
	4	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenga Lab yang berkualifikasi SMA/sederajat		817	817	0	100%
	5	Jumlah Rombel di satuan pendidikan		343	343	0	100%
	6	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal		343	343	0	100%
	7	Penyediaan biaya personil peserta didik		4.588	4.588	0	100%
	8	Kualitas pendidik yang berkulaifikasi S1/ D IV		4.273	4.273	0	100%

II	**Pendidikan Kesetaraan**		**Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetraaan (SD/MI, SMP/Mts)**	**1.060**	**1.060**	**0**	**100%**
	1	Modul Belajar		1.060	1.060	0	100%
	2	Perlengkapan belajar		2.120	2.120	0	100%
	3	Jumlah Rombel Belajar PKBM		12	12	0	100%
	4	Penyediaan biaya personil peserta didik		100	100	0	100%
	5	Kualitas pendidik yang berkulaifikasi S 1/ D IV		44	44	0	100%
	6	Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		12	12	0	100%
	7	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenga Lab yang berkualifikasi SMA/sederajat		120	120	0	100%
	8	PKBM terakreditasi minimal C		6	6	0	100%
III	**Pendidikan Anak Usia Dini**		**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**9.247**	**9.247**	**0**	**100%**
	1	Buku Gambar		9.247	9.247	0	100%
	2	Alat Mewarnai		18.494	18.494	0	100%
	3	Penyediaan biaya personil peserta didik		200	200	0	100%
	4	Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		298	298	0	100%
	5	Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S1/D.IV		553	553	0	100%

Berdasarkan tabel sebelunnya dapat dilihat bahwa indikator SPM Pendidikan Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara baik dengan tingkat capaian 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejumlah permasalahan dalam membanguan pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar;
3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;
4. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaran pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Belum optimalnya kepastian dan pembinaan pendidikan karakter;

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai institusi pelayanan publik bidang pendidikan, beberapa hal yang menjadi tantangan sekaligus peluang pada upaya peningkatan layanan pendidikan adalah :

1. Tersedianya SDM pengolah PAUD dengan kualitas pendidikan yang tidak sesuai.
2. Adanya program sekolah gratis untuk pendidikan dalam 9 tahun.
3. Masih belum paham tentang ketersediaan pelayanan pendidikan non formal.
4. Dukungan Anggaran untuk peningkatan kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Adanya kebijakan penerapan kurikulum merdeka.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarakan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026 dan Rancangan RKPD Tahun 2024.

Namun dari hasil reviu yang dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dengan rancangan awal Rencana Kerja, hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hai ini APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdik.

Dari rumusan dan program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387,617,804,799	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387,617,804,799	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				301,486,748,234	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				301,486,748,234	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdikbud	Meningkatnya Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perencanaan,keuangan, umum perkantoran	100%	85,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdikbud	Meningkatnya Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perencanaan,keuangan, umum perkantoran	100%	85,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdikbud	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	100%	45,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdikbud	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	100%	45,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdikbud	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdikbud	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	40,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdikbud	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	299,700,363,034	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdikbud	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	299,700,363,034	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasbar	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	297,942,399,034	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasbar	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	297,942,399,034	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasbar	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	4562 ASN	1,227,544,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasbar	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	4562 ASN	1,227,544,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdikbud	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	104 org	460,420,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdikbud	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	104 org	460,420,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdikbud	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	32 org	45,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdikbud	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	32 org	45,000,000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Akuntasi	12 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Akuntasi	12 dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	10,000,000	
2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disdikbud	Jumlah berkas temuan yang ditanggapi	20 temuan	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disdikbud	Jumlah berkas temuan yang ditanggapi	20 temuan	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	5,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdikbud	Jumlah laporan Analisis Prognosis	2 laporan	76,700,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdikbud	Jumlah laporan Analisis Prognosis	2 laporan	76,700,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disdikbud	Persentase pelaporan BMD	100%	1,700,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disdikbud	Persentase pelaporan BMD	100%	1,700,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan BMD	2 laporan	45,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan BMD	2 laporan	45,000,000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdikbud	Jumlah kunjungan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	48 kali	10,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdikbud	Jumlah kunjungan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	48 kali	10,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Rekonsiliasi BMD	12 laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Rekonsiliasi BMD	12 laporan	10,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Penatausahaan BMD	12 laporan	10,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Penatausahaan BMD	12 laporan	10,000,000	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Pemanfaatan BMD	12 laporan	136,400,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Disdikbud	Jumlah laporan Pemanfaatan BMD	12 laporan	136,400,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdikbud	Persentase terpenuhinya administrasi ASN	100%	61,400,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdikbud	Persentase terpenuhinya administrasi ASN	100%	61,400,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disdikbud	Jumlah ASN yang menerima PDH	102 ASN	75,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disdikbud	Jumlah ASN yang menerima PDH	102 ASN	75,000,000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdikbud	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	10 ASN	477,435,200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdikbud	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	10 ASN	477,435,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdikbud	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	194,857,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdikbud	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	194,857,200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdikbud	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	51,578,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdikbud	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	51,578,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdikbud	Jumlah barang cetak dan penggandaan penujnag administrasi	60 berkas	21,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdikbud	Jumlah barang cetak dan penggandaan penujnag administrasi	60 berkas	21,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdikbud	Frekuensi penyediaan makan minum tamu	60 kali	200,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdikbud	Frekuensi penyediaan makan minum tamu	60 kali	200,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupa-ten	Jumlah koordinasi dalam daerah dan luar daerah	400 kali	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupat en	Jumlah koordinasi dalam daerah dan luar daerah	400 kali	10,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdikbud	Jumlah petugas pengelolaan arsip dinamis	1 orang	382,600,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdikbud	Jumlah petugas pengelolaan arsip dinamis	1 orang	382,600,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdikbud	Persentase terpenuhinya BMD	100%	367,800,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdikbud	Persentase terpenuhinya BMD	100%	367,800,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdikbud	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 paket	14,800,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdikbud	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 paket	14,800,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah paket pengadaan taman bermain	2 paket	132,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah paket pengadaan taman bermain	2 paket	132,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdikbud	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	132,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdikbud	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	132,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdikbud	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, kebutuhan listrik dan Sumber Daya air untuk operasional kantor	12 bulan	496,250,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdikbud	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, kebutuhan listrik dan Sumber Daya air untuk operasional kantor	12 bulan	496,250,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdikbud	Jumlah aset Dinas yang dipelihara	90 unit	196,250,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdikbud	Jumlah aset Dinas yang dipelihara	90 unit	196,250,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdikbud	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	90 unit	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdikbud	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	90 unit	150,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah paket pemeliharaan kantor	1 paket	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah paket pemeliharaan kantor	1 paket	150,000,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah petugas kebersihan kantor	4 petugas	85,756,056,565	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah petugas kebersihan kantor	4 petugas	85,756,056,565	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD, SMP	100%	62,580,488,473	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD, SMP	100%	62,580,488,473	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD	100%	2,991,448,400	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD	100%	2,991,448,400	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pasbar	Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar	12 Satuan Pendidikan	92,660,000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pasbar	Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar	12 Satuan Pendidikan	92,660,000	
	Pembangunan Ruang unit Kesehatan sekolah	Guntul	Jumlah Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar	1 Satuan Pendidikan	1,142,572,500	Pembangunan Ruang unit Kesehatan sekolah	Guntul	Jumlah Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar	1 Satuan Pendidikan	1,142,572,500	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pasbar	Jumlah pustaka sekolah dasar	5 Satuan Pendidikan	1,802,475,400	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pasbar	Jumlah pustaka sekolah dasar	5 Satuan Pendidikan	1,802,475,400	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pasbar	Jumlah toilet dan labor komputer tingkat Sekolah Dasar	12 Satuan Pendidikan	252,800,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pasbar	Jumlah toilet dan labor komputer tingkat Sekolah Dasar	12 Satuan Pendidikan	252,800,000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Pasbar	Jumlah mebeleur tingkat Sekolah Dasar	12 Satuan Pendidikan	840,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Pasbar	Jumlah mebeleur tingkat Sekolah Dasar	12 Satuan Pendidikan	840,000,000	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pasbar	Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan Pengadaan media pendidikan tingkat Sekolah Dasar	10 paket	350,000,000	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pasbar	Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan Pengadaan media pendidikan tingkat Sekolah Dasar	10 paket	350,000,000	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pasbar	Jumlah pelaksanaan Ujian Tingkat SD, KKG,	2 kegiatan	400,000,000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pasbar	Jumlah pelaksanaan Ujian Tingkat SD, KKG,	2 kegiatan	400,000,000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah pelaporan , Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah, Operasional Kecamatan	5 kegiatan	1,500,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah pelaporan , Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah, Operasional Kecamatan	5 kegiatan	1,500,000,000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dalam dan Luar Kabupaten	Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FL2SN,UKS tingkat kabupaten,Provinsi,nasional tingkat Sekolah Dasar	5 kegiatan	3,239,350,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dalam dan Luar Kabupaten	Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FL2SN,UKS tingkat kabupaten,Provinsi,nasional tingkat Sekolah Dasar	5 kegiatan	3,239,350,000	

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah honor guru THL bagi sekolah Dasar	312 org	2,300,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah honor guru THL bagi sekolah Dasar	312 org	2,300,000,000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dalam dan Luar Kabupaten	Jumlah kepala sekolah,calon pengawas,program induksi guru pemula (PIGP),bimtek media IT,KKG,MGMP tingkat SD	30 org	1,085,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dalam dan Luar Kabupaten	Jumlah kepala sekolah,calon pengawas,program induksi guru pemula (PIGP),bimtek media IT,KKG,MGMP tingkat SD	30 org	1,085,000,000	
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat Sekolah Dasar	272 Satuan Pendidikan	46,484,182,173	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat Sekolah Dasar	272 Satuan Pendidikan	46,484,182,173	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS SD	272 Satuan Pendidikan	100,000,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS SD	272 Satuan Pendidikan	100,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah ASN pengelola BOS SD	7 ASN	20,593,434,092	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pasbar	Jumlah ASN pengelola BOS SD	7 ASN	20,593,434,092	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP	100%	1,129,908,000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP	100%	1,129,908,000	
	Pembangunan laboratorium	Pasbar	Jumlah Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya tingkat SMP	2 Satuan Pendidikan	159,744,000	Pembangunan laboratorium	Pasbar	Jumlah Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya tingkat SMP	2 Satuan Pendidikan	159,744,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Koto bailng-ka	Jumlah Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya tingkat SMP	1 Satuan Pendidikan	295,967,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Koto bailng-ka	Jumlah Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya tingkat SMP	1 Satuan Pendidikan	295,967,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kinali	Jumlah rehab sedang/ringan ruang guru tingkat SMP	1 Satuan Pendidikan	254,720,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kinali	Jumlah rehab sedang/ringan ruang guru tingkat SMP	1 Satuan Pendidikan	254,720,000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Pasbar	Jumlah pemenuhan Satuan Pendidikan M Pendidikan Dasar	12 Satuan Pendidikan	353,450,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Pasbar	Jumlah pemenuhan Satuan Pendidikan M Pendidikan Dasar	12 Satuan Pendidikan	353,450,000	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kinali	Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) tingkat SMP	1 Satuan Pendidikan	400,000,000	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kinali	Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) tingkat SMP	1 Satuan Pendidikan	400,000,000	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pasbar	Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional SLTP/MTsN,MGMP,guru inti tingkat SMP	3 kegia-tan	350,000,000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pasbar	Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional SLTP/MTsN,MGMP,guru inti tingkat SMP	3 kegia-tan	350,000,000	

	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pasbar	Jumlah pelaporan Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah tingkat SMP	4 kegia-tan	1,500,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pasbar	Jumlah pelaporan Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah tingkat SMP	4 kegia-tan	1,500,000,000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dalam dan Luar Kabupat en	Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FL2SN,UK S tingkat kabupaten,Provinsi,nasion al tingkat SMP	5 kegia-tan	1,580,750,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dalam dan Luar Kabupat en	Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FL2SN,UK S tingkat kabupaten,Provinsi,nasion al tingkat SMP	5 kegia-tan	1,580,750,000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pasbar	Jumlah honor guru BOSDA tingkat SMP	526 org	2,590,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pasbar	Jumlah honor guru BOSDA tingkat SMP	526 org	2,590,000,000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dalam dan Luar Kabupat en	Jumlah sertifikasi guru,cakep, cawas, guru berprestasi,OGN,program induksi guru pemula (PIGP) tingkat SMP	5 kegia-tan	100,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dalam dan Luar Kabupat en	Jumlah sertifikasi guru,cakep, cawas, guru berprestasi,OGN,program induksi guru pemula (PIGP) tingkat SMP	5 kegia-tan	100,000,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Disdikbud	Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat SMP	68 Satuan Pendidik an	11,828,895,0 92	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	isdikbud	Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat SMP	68 Satuan Pendidik an	11,828,895,0 92	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS tingkat SMP	68 Satuan Pendidik an	50,000,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	isdikbud	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS tingkat SMP	68 Satuan Pendidik an	50,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah ASN pengelola BOS tingkat SMP	7 ASN	2,082,134,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah ASN pengelola BOS tingkat SMP	7 ASN	2,082,134,000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdikbud	Persentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD	100%	488,590,000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdikbud	Persentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD	100%	488,590,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Ranah Bata-han, Kinali	Jumlah Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang,Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	2 Satuan Pendidik an	123,544,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Ranah Bata-han, Kinali	Jumlah Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang,Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	2 Satuan Pendidik an	123,544,000	
	Rehabilitasi sedantg/berat gedung/ruang kelas ruang guru PAUD	Kinali	Jumlah Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1 Satuan Pendidik an	20,000,000	Rehabilitasi sedantg/berat gedung/ruang kelas ruang guru PAUD	Kinali	Jumlah Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1 Satuan Pendidik an	20,000,000	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Ranah Bata-han	Jumlah sarana belajar PAUD (APE)	1 Satuan Pendidik an	100,000,000	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Ranah Bata-han	Jumlah sarana belajar PAUD (APE)	1 Satuan Pendidik an	100,000,000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Pasbar	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	5 kegia-tan	650,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Pasbar	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	5 kegia-tan	650,000,000	

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pasbar	Jumlah Pendidik yang mengikuti Pelatihan Diklat Berjenjang PAUD dan Kegiatan Pendidikan Keluarga	50 org, 11 kecamatan	250,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pasbar	Jumlah Pendidik yang mengikuti Pelatihan Diklat Berjenjang PAUD dan Kegiatan Pendidikan Keluarga	50 org, 11 kecamatan	250,000,000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dalam dan Luar Kabupaten	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD	40 org	100,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dalam dan Luar Kabupaten	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD	40 org	100,000,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	240 Satuan Pendidikan	350,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	240 Satuan Pendidikan	350,000,000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOP PAUD	5 Satuan Pendidikan	500,000,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pasbar	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOP PAUD	5 Satuan Pendidikan	500,000,000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	100%	100,000,000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	100%	100,000,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah peserta ujian paket A,B dan C	500 org	50,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah peserta ujian paket A,B dan C	500 org	50,000,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan	Pasbar	Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Nonformal/kesetaraan Kab. Pasaman Barat	10 PKBM	350,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan	Pasbar	Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Nonformal/kesetaraan Kab. Pasaman Barat	10 PKBM	350,000,000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah Biaya personil peserta didik informal	1 SKB N	225,000,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah Biaya personil peserta didik informal	1 SKB N	225,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pasbar	Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	80%	225,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pasbar	Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	80%	225,000,000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah penetapan kurikulum muatan lokal	3 tradisi	125,000,000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah penetapan kurikulum muatan lokal	3 tradisi	125,000,000	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang tersusun	1 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang tersusun	1 Dokumen	25,000,000	
	Penyusunan silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 laporan	75,000,000	Penyusunan silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 laporan	75,000,000	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	jumlah peserta bimtek Penyusunan Kurikulum Mulok	20 org	100,000,000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pasbar	jumlah peserta bimtek Penyusunan Kurikulum Mulok	20 org	100,000,000	

	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pasbar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraannya	90%	100,000,000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pasbar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraannya	90%	100,000,000	
	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	jumlah Peningkatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	90%	50,000,000	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	jumlah Peningkatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	90%	50,000,000	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah pendataan Tenaga kependidikan di Kabupaten	328 Satuan Pendidikan	50,000,000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah pendataan Tenaga kependidikan di Kabupaten	328 Satuan Pendidikan	50,000,000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah pemerataan tenaga kependidikan di Kabupaten	328 Satuan Pendidikan	50,000,000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pasbar	Jumlah pemerataan tenaga kependidikan di Kabupaten	328 Satuan Pendidikan	50,000,000	
	PROGRAM PENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Pasbar	Persentase PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan	100%	50,000,000	PROGRAM PENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Pasbar	Persentase PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan	100%	50,000,000	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pasbar	jumlah izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Nonformal	20 Satuan Pendidikan	50,000,000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pasbar	jumlah izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Nonformal	20 Satuan Pendidikan	50,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pasbar	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 kegia-tan		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pasbar	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 kegia-tan		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,275,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,275,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				450,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				450,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pasbar	Jumlah Database Kabupaten	1 Dokumen	300,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pasbar	Jumlah Database Kabupaten	1 Dokumen	300,000,000	

	Pengelolaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah dokumen Pokok Pikir Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Pengelolaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah dokumen Pokok Pikir Daerah	1 Dokumen	300,000,000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Pasbar	Jumlah dokumen Pokok Pikir Daerah	1 Dok, 8 Nagari	150,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Pasbar	Jumlah dokumen Pokok Pikir Daerah	1 Dok, 8 Nagari	150,000,000	
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah tradisi yang dilestarikan	4 tradisi	150,000,000	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah tradisi yang dilestarikan	4 tradisi	150,000,000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pasbar	Jumlah tradisi yang dilestarikan	4 tradisi	250,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pasbar	Jumlah tradisi yang dilestarikan	4 tradisi	250,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pasbar	Jumlah kesenian tradisonal yang dilestarikan	4 jenis	250,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pasbar	Jumlah kesenian tradisonal yang dilestarikan	4 jenis	250,000,000	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	100%	250,000,000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	100%	250,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pasbar	Jumlah sanggar terbina, jumlah event yang dilaksanakan	11 sanggar 4 event	175,000,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pasbar	Jumlah sanggar terbina, jumlah event yang dilaksanakan	11 sanggar 4 event	175,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pasbar	Jumlah dokumen sejarah yang tersusun	4 Dokumen	175,000,000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pasbar	Jumlah dokumen sejarah yang tersusun	4 Dokumen	175,000,000	
	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pasbar	jumlah dokumen sejarah yang di susun	4 Dokumen	175,000,000	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pasbar	jumlah dokumen sejarah yang di susun	4 Dokumen	175,000,000	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah dokumen sejarah yang tersusun	4 Dokumen	400,000,000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah dokumen sejarah yang tersusun	4 Dokumen	400,000,000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pasbar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10 cagar budaya	250,000,000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pasbar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10 cagar budaya	250,000,000	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pasbar	jumlah cagar budaya yang di tetapkan	10 buah	250,000,000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pasbar	jumlah cagar budaya yang di tetapkan	10 buah	250,000,000	
	Penetapan Cagar Budaya	Pasbar	1. Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan	10 cagar budaya		Penetapan Cagar Budaya	Pasbar	1. Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan	10 cagar budaya		
			2. Jumlah Tim cagar	7 Org				2. Jumlah Tim cagar	7 Org		

			budaya Kabupaten		150,000,000			budaya Kabupaten		150,000,000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pasbar	jumlah cagar budaya yang dipelihara	2 buah	150,000,000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pasbar	jumlah cagar budaya yang dipelihara	2 buah	150,000,000	
					388,892,804,799					388,892,804,799	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan.Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pasaman Barat, seperti tersaji dalam Tabel T.C32.

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Volume	Catt
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	Jumlah RKB	2 Paket	
	Lanjutan pembangunan Gedung Paud	Jorong Bulu Laga Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh	APM PAUD	1 Unit	
	Penambahan Bangunan Lokal/ Mobiler	SD Tanjung Pangka	APM SD	1 Lokal	
	Pembangunan RKB Pondok Pesantren Darul Ulum Muara Kiawai	Jorong Sudirman Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh	APM SMP	1 Unit	
	Bantuan Komputer	SD IT Cahaya Makkah	APM SD	15 Unit	
	Pembuatan Pagar TK	Jorong Tambang Padang Kec. Ranah Batahan	APM PAUD		
	Rehap Lapangan SD 01 Silaping	Kec. Ranah Batahan	APM SD		
	Rabat Beton SMK 1 Parit	Kec. Koto Balngka			
	Gedung Pertemuan Adlaniyah	Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang		1 Unit	
	Pengadaan Komputer/ Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah	RT IV Paraman Ampalu Pasar, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh	APM SMP	30 Unit	
	Pembuatan Pagar TK Batang Lapu	Jorong Batang Lapu Kec. Koto Balingka	APM PAUD		
	Pagar Sekolah	Pagar Ponpes Darul Hanif Air Rao Kec. Kinali	APM SMP		

	Pembangunan MTSS	Sikabau Kec. Koto Balingka	APM SMP		
	Pengadaan AP/PAUD/TK	Kec. Pasaman	APM PAUD	5 Paud/TK	
	Pengadaan Sarana Kesenian Kuda Kepang	Kec. Pasaman	Jumlah Sanggar	4 Kelompok	
	Pagar Paud TK UMI	Simpang Gadang Kec. Sei. Aur	APM PAUD		
	Pengadaan Komputer Pesantren H. Abdullah	Alin Tagak Kec. Sei. Aur	APM SMP		
	Pagar Paud TK Nurul Ilmi	Jorong Kartini Kec. Sei. Aur	APM PAUD		
	Pengadaan Mobiler	SMPN 4 Kinali	APM SMP		
	Pengadaan Mobiler	SDN 03 Kinali	APM SD		
	Pengadaan Mobiler	SDN 11 Kinali	APM SD		
	Pengadaan Mobiler	SDN 39 Kinali	APM SD		
	Pembangunan Ruang Pustaka	SDN 37 Kinali	APM SD		
	Pembangunan Ruang Kantor	SMPN 6 Kinali	APM SMP		
	Pembangunan Laboratorium Komputer	SMP 1 Kinali	APM SMP		
	Mobiler	SDN 08 Sasak Ranah Pasisia	APM SD		
	Pembangunan Gedung PAUD/ TK Darus Syifa	Tangah Padang Batang Biyu	APM PAUD	1 unit	
	Pengadaan Peralatan Pembelajaran (Infokus) SMA Al Istiqamah	Simpang Empat		20 unit	
	Pembangunan Pagar SD 01 Pasaman	Sukamenanti	APM SD	100 meter	
	Pembangunan Gedung PAUD/ TK Darus Syifa	Tangah Padang Batang Biyu	APM PAUD	1 unit	
	Pengadaan Peralatan Pembelajaran (Infokus) SMA Al Istiqamah	Simpang Empat		20 unit	
	Pembangunan Pagar SD 01 Pasaman	Sukamenanti	APM SD	100 meter	
	Ruang Kelas Siswa	SD Negeri 17 Pasaman Jambak Kec. Pasaman	APM SD	1 Ruang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan sesuai dengan rencana Strategis 2019-2024 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan Strategis
1	penguatan peran siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistim Pendidikan
2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan
3	Meningkatkan Akses PAUD, Dikdas, Dikmas, dan Pendidikan Anak berkebutuhan khusus
4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yan Beorientasi pada Pemebentukan Karakter
5	Meningkatkan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Untuk mencapai sasaran strategi sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Perilaku positif siswa	-Rata-rata perilaku siswa PAUD minimal baik -Indek integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 -Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP minimal baik
2	Meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
3	Meningkatkan kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalm kepribadian, spiritual, dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 10%

3.1.1 Kebijakan Pokok

a. Meningkatkan manajemen pendidikan dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah; Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana dan prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

b. Meningkatkan pemerataan tenaga pendidikan, dengan perencanaan yang didukung oleh data yang akurat; Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antar daerah, suku, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.

c. Meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan; Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

d. Meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri dan produktif; Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat Pasaman Barat.

e. Meningkatkan mutu dan sumber daya manusia, sarana kerja dan kesejahteraan yang mandiri dan produktif; Menjamin kepastian bagi masyarakat Pasaman Barat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri

3.1.2 Paradigma Pembangunan Pendidikan

a. Pendidikan Untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manausia" adalah amanat konstitusi . Pendidikan yang harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial ataupu geografis.

b. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibelitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur

c. Pendidikan Sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

d. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dam mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang beatanggungjawab' kreatif dan inofatif. Pendidikan diuapayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampumenyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

e. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada , pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejuruan, beraklak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

f. Sekolah Yang Menyenangkan

Sekolah Sebagai satuan pendidikan yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantunganantara manusia dengan linkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, telah ditetapkan 3 (Tiga) tujuan dan 5 (Lima) sasaran strategis pembangunan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1	**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**
Sasaran 1	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional pendidikan
Sasaran 3	Menurunnya usia penduduk yang tidak bisa baca tulis

Tujuan 2	**Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD**
Sasaran 5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2024 terdiri atas 6 kebijakan, program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 68 sub. kegiatan untuk mencapai 4 sasaran dan 2 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :

Tujuan 1	**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**		
Sasaran Strategis	**Kebijakan**	**Program**	**Kegiatan**
1. Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar	1. Penyediaan sarana dan prasarana tingkat TK, SD dan SMP 2. Penyelenggaraan event dalam rangka peningkatan mutu 3. Pemenuhan dan pemantauan pencapaian SPM urusan pendidikan 4. Perbaikan distribusi dan ketersedaan tenaga pendidik dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan *multisubject teaching*	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Pengelolaan Dana BOP PAUD • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

	5. Pembangunan dan pengembangan SKB,PKBM dan Lembaga kursus		
2. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional pendidikan 3. Menurunnya usia penduduk yang tidak bisa baca tulis		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Tujuan 2	**Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD**		
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	6. Level Maturitas SPIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penataan Organisasi

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan)* tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024(%)
1	Meningkatnya Partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar	1. Angka Partisipasi PAUD	100
		2. Angka Partisipasi SD	100
		3. Angka Partisipasi SMP	100
		4. Persentase serapan BOS-SD	99.28
		5. Persentase serapan BOS-SMP	99.74
2	Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional pendidikan	6. Perentase guru dengan nilai UKG di atas standar nasional	44.22
		7. Persentase guru mismatch SD	0.05
		8. Persentase guru mismatch SMP	15.41
		9. Persentase sekolah yang mencapai komptensi kelulusan minimal SNP 3	78.14
		10. Perrsentase pelayanan manajemen kependidikan	100
3	Menurunnya usia penduduk yang tidak bisa baca tulis	11. Angka Buta Huruf	1.3
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	12. Level Maturitas SPIP	3
		13. Opini terhadap Laporan Keuangan	WTP
		14. Nilai SAKIP	B

Berdasarkan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

TABEL TC-.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Urusan : 1. Urusan Pendidikan

Dinas : Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**489.026.423.622**				**537.929.065.984**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	**360.840.942.348**			100 %	**396.925.036.582**
1	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	6 dokumen	**94.711.500**			6 dokumen	**295.000.000**
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	48.974.400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	53.871.840
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	45.737.100	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	50.310.810
1	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	**359.465.392.158**			100 %	**395.411.931.373**

1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2478 Orang/bulan	358.349.402.158	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2478 Orang/bulan	394.184.342.373
1	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	622.540.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	684.794.000
1	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	493.450.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	542.795.000
1	**01**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Pengadministrasi Barang Milik Daerah	100 %	**37.150.000**			100 %	**40.865.000**
1	01	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	37.150.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	40.865.000
1	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	**213.671.700**			100 %	**235.038.870**
1	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Paket	0

1	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	213.671.700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Orang	235.038.870
1	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	**483.046.500**			100 %	**531.351.150**
1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.637.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	220.701.250
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.409.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	310.649.900
1	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumalah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan	2 paket	**0**			2 paket	**0**
1	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	0
1	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah	100 %	**122.457.490**			100 %	**134.703.239**
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	122.457.490	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	134.703.239
1	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	90 unit	**424.513.000**			90 unit	**466.964.300**

1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	206.445.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 Unit	227.089.500
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	218.068.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	239.874.800
1	**01**	**01**	2,13		**Penataan Organisasi**	Belanja Hibah Uang Kwarcab Pramuka	100 %	**0**			100 %	**0**
1	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	100 %	**128.118.221.824**			100 %	**140.930.044.006**
1	**01**	**02**	2,01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Angka Partisipasi SD	100 %	**78.307.282.874**			100 %	**86.138.011.161**
1	01	12	2,01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Bertambah		15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	7.270.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18 Ruang	7.997.000.000
1	01	02	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Ruang	0

1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	1.050.002.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8 Ruang	1.155.000.000
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	1.454.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	21 Unit	1.599.400.000
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	46 Ruang	8.733.680.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46 Ruang	9.607.048.000
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	109.423.874	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5 Unit	120.366.261
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	229.550.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200 Paket	252.505.000
1	01	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Unit	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Unit	0

1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	120 Peserta Didik	1.477.623.550	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Peserta Didik	1.625.385.905
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	13 Paket	945.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13 Paket	1.039.500.000
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	253 Satuan Pendidikan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	253 Satuan Pendidikan	0
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	464.516.300	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180 Peserta Didik	510.967.930
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	144 Orang	1.404.150.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	144 Orang	1.544.565.000
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 400 Orang	2.789.492.450	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Orang 400 Orang	3.068.441.695

1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	253 Satuan Pendidikan	110.150.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	253 Satuan Pendidikan	121.165.550
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	253 Satuan Pendidikan	49.844.850.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	253 Satuan Pendidikan	54.829.324.000
1	01	02	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14 Orang	273.240.300	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang	300.564.330
1	01	02	2,01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Labor Baru yang Bertambah		1.500.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.650.000.000
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000
1	01	02	2,01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			411,478,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		452.625.800
1	01	02	2,01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000

1	01	02	2,01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000
1	**01**	**02**	2,02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Angka Partisipasi SMP	100 %	**35.323.244.200**			100 %	**38.855.568.620**
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	5.995.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4 Ruang	6.594.500.000
1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.308.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5 Ruang	1.438.800.000
1	01	02	2,02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		327.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		359.700.000
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	2.398.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8 Unit	2.637.800.000
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.569.600.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8 Ruang	1.726.560.000
1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah rehap sedang/ Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 sp 0 Ruang	436.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3 sp 0 Ruang	479.600.000

1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	928.340.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	1.021.174.000
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	400.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2 Paket	440.000.000
1	01	02	2,02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	100 Paket	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Paket	0
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	486.986.400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Peserta Didik	535.685.040
1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	675.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4 Paket	742.500.000
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	71 Satuan Pendidikan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	71 Satuan Pendidikan	0
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	625.165.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	20 Peserta Didik	687.681.500

1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	101 Orang	1.879.199.700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101 Orang	2.067.119.670
1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	399.783.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	250 Orang	439.761.300
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			217.924.700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		239.717.170
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	71 Satuan Pendidikan	16.318.380.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik – BOS Reguler	71 Satuan Pendidikan	17.950.218.000
1	01	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12 Orang	183.697.100	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	202.066.810
`1	01	02	2,02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000

1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			709.168.300	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		780.085.130
1	01	02	2,02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000
1	01	02	2,02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			436.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		479.600.000
1	**01**	**02**	2,03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Angka Partisipasi PAUD	100 %	**11.886.421.050**			100 %	**13.075.063.155**
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1.362.500.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3 Unit	1.498.750.000
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9 Unit	218.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	9 Unit	239.800.000
1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	530.340.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4 Unit	583.374.000

1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		91.820.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		101.002.000
1	01	02	2,03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	172.569.850	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	189.826.835
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	450.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4 Paket	495.000.000
1	01	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	289 Satuan Pendidikan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	289 Satuan Pendidikan	0
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	9 Orang	572.022.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Orang	629.224.200
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 120 Orang	159.872.750	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Orang 120 Orang	175.860.025

1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	289 Satuan Pendidikan	51.925.450	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	289 Satuan Pendidikan	57.117.995
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	289 Satuan Pendidikan	5.407.253.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	289 Satuan Pendidikan	5.947.978.300
1	01	02	2,03	22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			14.997.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.497.250
1	01	02	2,03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			55.118.550	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60.630.405
1	01	02	2,03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			449.999.950	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		494.999.945
1	**01**	**02**	2,04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentasi Angka Partisipasi Kesetaraan	100 %	**2.601.273.700**			100 %	**2.861.401.070**
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik 100 Peserta Didik	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Peserta Didik 100 Peserta Didik	0
1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Orang	47.300.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang	52.030.000

1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 10 Orang	94.475.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Orang 10 Orang	103.923.050
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	2.393.348.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	2.632.682.800
1	01	02	2,04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			66.150.200	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72.765.220
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**36.651.450**				**40.316.595**
1	**01**	**04**	2,01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**36.651.450**				**40.316.595**
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan	36.651.450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	40.316.595

1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal) % sekolah non formal yang memiliki izin operasional	100 % 100 %	**30.610.000**			100 % 100 %	**33.671.000**
1	**01**	**05**	2,02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Jumlah Izin yang diterbitkan	295 sp	**30.610.000**			295 sp	**33.671.000**
1	01	05	2,02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	30.610.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Dokumen	33.671.000
							TOTAL	**489.026.423.622**				**537.929.065.984**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-4 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih focus mendukung pencapaian tujuan Strategis DISDIK Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, Meningkatkan pencegahan Stunting dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DISDIK. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 6 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DISDIK Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala DISDIK, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DISDIK Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 4 Program (Teknis dan Rutin),13 Kegiatan dan 68 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISDIK Tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 489.026.423.622 (Empat ratus delapan puluh sembilan milyar dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DISDIK Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel dibawahini:

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1. Urusan Pendidikan

Dinas : Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**489.026.423.622**		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	**360.840.942.348**		
1	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	6 dokumen	**94.711.500**		
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	48.974.400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	45.737.100	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	**359.465.392.158**		
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2478 Orang/bulan	358.349.402.158	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	622.540.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	493.450.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Pengadministrasi Barang Milik Daerah	100 %	**37.150.000**		
1	01	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	37.150.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	**213.671.700**		
1	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	213.671.700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	**483.046.500**		
1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.637.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.409.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumalah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan	2 paket	**0**		
1	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah	100 %	**122.457.490**		
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	122.457.490	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	90 unit	**424.513.000**		
1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	206.445.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	218.068.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**01**	2,13		**Penataan Organisasi**	Belanja Hibah Uang Kwarcab Pramuka	100 %	**0**		
1	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan	100 %	**128.118.221.824**		

						Dasar				
1	**01**	**02**	2,01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Angka Partisipasi SD	100 %	**78.307.282.874**		
1	01	12	2,01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Bertambah		15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	7.270.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	01	02	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	1.050.002.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	1.454.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	46 Ruang	8.733.680.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	109.423.874	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	229.550.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	01	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Unit	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	120 Peserta Didik	1.477.623.550	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	13 Paket	945.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD

1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	253 Satuan Pendidikan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	464.516.300	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	144 Orang	1.404.150.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 400 Orang	2.789.492.450	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	253 Satuan Pendidikan	110.150.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	253 Satuan Pendidikan	49.844.850.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler
1	01	02	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14 Orang	273.240.300	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Labor Baru yang Bertambah		1.500.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			411,478,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**02**	2,02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Angka Partisipasi SMP	100 %	**35.323.244.200**		
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	5.995.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP

1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.308.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		327.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	2.398.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.569.600.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah rehap sedang/ Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 sp 0 Ruang	436.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	928.340.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	400.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	100 Paket	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	486.986.400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	675.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	71 Satuan Pendidikan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	625.165.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	101 Orang	1.879.199.700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	399.783.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			217.924.700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	71 Satuan Pendidikan	16.318.380.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik – BOS Reguler
1	01	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12 Orang	183.697.100	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
`1	01	02	2,02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			709.168.300	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			15.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			436.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	**01**	**02**	2,03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Angka Partisipasi PAUD	100 %	**11.886.421.050**		
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1.362.500.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9 Unit	218.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	530.340.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD

1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		91.820.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
1	01	02	2,03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	172.569.850	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	450.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
1	01	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	289 Satuan Pendidikan	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	9 Orang	572.022.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	159.872.750	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	289 Satuan Pendidikan	51.925.450	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	289 Satuan Pendidikan	5.407.253.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD
1	01	02	2,03	22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			14.997.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			55.118.550	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			449.999.950	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**02**	2,04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentasi Angka Partisipasi Kesetaraan	100 %	**2.601.273.700**		

1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik 100 Peserta Didik	0	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Orang	47.300.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 10 Orang	94.475.500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	2.393.348.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	01	02	2,04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			66.150.200	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**36.651.450**		
1	**01**	**04**	2,01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**36.651.450**		
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan	36.651.450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal) % sekolah non formal yang memiliki izin operasional	100 % 100 %	**30.610.000**		
1	**01**	**05**	2,02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Jumlah Izin yang diterbitkan	295 sp	**30.610.000**		
1	01	05	2,02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	30.610.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
JUMLAH								**489.026.423.622**		

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DISDIK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DISDIK Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2023

K e p a l a,

AGUSLI, S. Pd
NIP. 19750817 200501 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA
(RENJA)

Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

Jl. M. Natsir No. 2 Simpang Empat ☏/ fax (0753) 7464101

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

VectorStock®
VectorStock.com/23097044

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunannya, Renja ini mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan juga mempertimbangkan isu-1su yang sedang berkembang saat ini. Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk satu tahun berjalan (tahun 2024) melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman Barat

HAJRAN HUDA, SKM
PEMBINA Tk. I/ IV B
NIP. 19760705041987031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 39
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 74
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 79
2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat 107

BAB III. Tujuan dan Sasaran
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 108
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 114
3.3. Program dan Kegiatan 116

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan 367
BAB V. Penutup 646

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Renja berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kesehatan memuat kebijakan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, program dan kegiatan pembangunan kesehatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat untuk menyediakan dokumen perencanaaan satu tahun yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja dinas kesehatan.

Secara khusus penyusunan Renja Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan selama satu tahun

2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan kesehatan yang ada di semua unit dan subunit organisasi yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Pasaman Barat, RSUD D Pratama dan 20 (dua puluh) Puskesmas).
3. Menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan.
4. Memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (AKIP) melalui pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan Kesehatan daerah.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Dinkes*

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkes*

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs *(Suistanable Development Goals)*; Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan Sasaran Renja Dinkes*

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

3.3 Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir), uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes dinilai dengan membandingkan realisasi capaian program pembangunan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. Evaluasi capaian target kinerja juga menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkes memberi gambaran tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dan diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas kesehatan tahun 2021 antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan;

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Dinas Kesehatan

Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program dengan 20 kegiatan dan 84 subkegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2021. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (T.A 2023) disajikan pada Tabel 2.1.1 (T-C.29) dan tabel 2.1.2 di bawah ini

Tabel 2.1.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
1	**02**	**01**			**DINAS KESEHATAN**									
1	**02**	**01**	**01**			**Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan**	**3**	3,	**3**	3,281		3		
1	**02**	**01**	**01**	**01**		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**	B	BB	B	BB		B		
1	**02**	**01**	**01**	**02**		**Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan**	75		75			75		
1	02	01	01	03	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**102,31**			
1	**02**	**01**	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**102,31**			
1	**02**	01	02	45	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%				**97,68**	100%		
1	**02**	01	05	04	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Dinas Kesehatan**		12,00	13,00	14,00	**100,89**			
1	**02**	**01**	**15**			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Dinas Kesehatan	13					**13**	**90.38**	117.38
1	**02**	01	15	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		7,00	7,00	8,00	114,29			
1	**02**	01	15	08		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7					7	79.43	198.57
1	02	01	15	09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun		5,00	6,00	5,25	87,50			
1	**02**	**01**	**16**			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7					**6**	**88.33**	276.04

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
1	02	01	16	09	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Dinas Kesehatan**	100%		100,00	3,00	**100,00**	100		
1	02	01	16	15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		752,00	14,00	14,00	100,00	14		
1	02	01	16	16		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	760							
1	02	01	16	17	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyaluran Honor/ Jasa Honor Daerah Tenaga Harian Lepas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat		454,00	12,00	12,00	100,00	13	454.00	3492.31
1	02	01	16	24		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16							
1	02	01	16	27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyaluran Honor Penatausahaan dan Pengelola Keuangan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat		12,00	12,00	12,00	100,00	12	78.67	655.56
1	02	01	16	28		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1							
1	02	01	16	29	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan**	45			27,00	**87,50**	45	76.94	28.50
1	02	01	16	30	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyaluran Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Kesehatan			12,00	12,00	100,00	12	58.33	486.11
1	**02**	**01**	**17**			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6							
1	02	01	17	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikelola/ dilakukan pemeliharaan oleh dinas kesehatan dan IFK			141,00	27,00	75,00			
1	02	01	18	07		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5							
1	**02**	**01**	**19**			Jumlah barang milik daerah yang dikelola/ dilakukan pemeliharaan oleh dinas kesehatan dan IFK		0,00	58,00	0,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
1	02	01	19	01	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					0,00				
1	**02**	**01**	**20**			Jumlah peserta Diklat/ Bimtek	150					**150.00**	-	-
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				0,00				
1	02	01	20	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				**0,00**		72.00	-	-
1	02	01	20	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				**0,00**				
1	02	01	20	04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	760							
1	**02**	**01**	**21**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor**	100%	0,00		21,34	**100,00**			
1	02	01	21	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dinas kesehatan			100,00	100,00	100,00	100	50.00	50.00
1	02	01	21	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2							
1	02	01	21	05		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas kesehatan		1,00	10,00	70,00				
1	**02**	**01**	**22**		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggadaan kantor dinas kesehatan		12,00	100,00	100,00	100,00	100	62.00	62.00
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**1**							
1	02	01	22	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat dan koordinasi bidang kesehatan yang diikuti		12,00	24,00	24,00	100,00	24.00	74.50	310.42
1	02	01	22	05		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	0 2		2 2	1 4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	0 2	0 1	2 3		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1							
1	0 2	0 1	2 3	0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4							
1	0 2	0 1	2 3	0 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	100%		12,00	0,00	**100,00**			
1	**0 2**	**0 1**	**2 4**		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor dilingkungan dinas kesehatan		12,00	12,00	12,00	100,00	**100**	**62.00**	**62.00**
1	0 2	0 1	2 4	0 1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00							
1	0 2	0 1	2 4	0 4	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor		0,00		0,00				
1	**0 2**	**0 1**	**2 4**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1							
1	0 2	0 1	2 4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	**0 2**	**0 1**	**2 5**		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5							
1	0 2	0 1	2 5	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
1	02	01	25	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142							
1	**02**	**01**	**32**		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1							
						Angka Kematian Ibu (AKI)		385,60	205,00	0,00				
						Angka Kematian Bayi (AKB)		11,80	11,30	0,00				
1	02	01	32	05		**Prevalensi Stunting**		18,40	19,00	0,00				
1	02	01	32	09		**Persentase Capaian SPM Kesehatan**		49,02	100,00	0,00				
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**	100%		100,00	0,00	**105,03**			
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan**	80%		100,00	0,00	**92,83**			
					Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pembangunan		0,00		0,00				
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6							
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan fasilitas kesehatan lainnya		0,00		0,00		1.00	-	-
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2							
					Pengembangan Rumah Sakit	Pengadaan alat dan Perlengkapan untuk penunjang rumah sakit tipe D Ujung Gading		1,00	90,00	58,99	65,54			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
						Persentase terpenuhinya dukungan operasional RS tipe D Ujung Gading			100,00	100,00	100,00			
					Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan		1,00		0,00				
					Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan pengembangan rumah sakit (RS Ujung Gading) yang dilaksanakan		1,00		0,00				
					Pengembangan Puskesmas	Jumlah sarana puskesmas yang dilakukan pengembangan		9,00	1,00	1,00	100,00	4.00	9.00	225.00
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6							
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	10,00	10,00	100,00	23.00	-	-
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dalam 1 tahun		0,00		0,00				
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1						
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3						
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan		20,00	31,00	62,00	100,00			
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18724							
					Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin dilingkungan Dinas Kesehatan		20,00	100,00	98,80	98,80	100.00	59.00	59
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan		**89,43**	**100,00**	**78,30**	78,30	100.00	176.74	176.74

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara		**2,00**		**0,00**				
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala serta kalibrasi		1,00		0,00				
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	111							
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan dapat di Distribusikan ke Seluruh puskesmas		16,00	12,00	12,00	100,00	12.00	66.00	
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1						
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0							
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan**	100%		**100,00**	**0,00**	**127,28**			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9605	53,63	100,00	25,00	25,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8294	**77,00**	**100,00**	**16,70**	16,70			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir (BBL) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8260	34,85	100,00	30,00	30,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33331	43,66	100,00	100,00	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25324	84,50	100,00	16,86	16,86			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	329337	100,00	100,00	53,20	53,20			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13417	0,00	100,00	30,00	30,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80029	43,50	100,00	48,12	48,12			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2964	62,60	100,00	161,17	161,17			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	983	69,88	100,00	98,30	98,30			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TB yang mendapat pemeriksaan TB sesuai standar	7197	87,00	100,00	100,00	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13534	100,00	100,00	100,00	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada penduduk pada kondisi KLB	7	50,00	100,00	15,55	15,55			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	1	74,20	100,00	95,00	95,00	5.00	169	169

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK dan Balita Stunting yang dilayani sesuai standar			100,00	17,06	17,06			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka	20							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan terbina di Masyarakat			30,00	30,00	100,00	30.00	110.00	366.67
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	60							
						Jumlah Petugas yang dilatih program kesehatan olah raga dengan BTT			20,00	20,00	100,00			
						Jumlah Kelompok/ komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olahraga dengan BTT			60,00	30,00	50,00			
						Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		20,00		20,00				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan STBM		19,00	12,00	12,00	100,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	90							
						Jumlah fasyankes yang memiliki pengolahan limbah medis		23,00	23,00	23,00	100,00			
						Jumlah sarana air minum diawasi		322,00	100,00	69,00	69,00			
						Jumlah fasilitas umum diawasi		85,00	100,00	37,00	37,00			
						Dokumen EHRA			1,00	1,00	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Sarana Promosi Kesehatan yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat		14,00	9,00	3,00	33,33			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah kelompok ASMAN yang dibina masing masing Puskesmas		40,00	2,00	40,00	100,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	20					12.00	190.00	475.00
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Ketepatan laporan W2 (SKDR)			80,00	160,00	200,00			
						Penemuan kasus AFP yang dibuktikan bukan karena polio (Non Polio AFP Rate)			≥ 2/100.000 anak usia <15 tahun	18,00	100,00	≥ 2/100.000 anak usia <15 tahun	0.00	-
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52							
						Penemuan kasus demamruam yang dibuktikan secara laboratorium bukan karena campakrubela (Discarded Rate)			≥2/100.000 penduduk	4,01	1,31			
						Jumlah Desa UCI			80,00	47,00	58,75	80.00	0.00	-
-						Persentase IDL			95,00	80,02	84,23	95.00	0.00	-
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		0,00		0,00		-	-	-
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24700							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan IPWL		15,64		0,00				
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45					5.00	-	10.730.000
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan		1,00	1,00	1,00	100,00	1.00	201.00	20100.00
					Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Kegiatan Upaya Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		0,00		0,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan Kesehatan PENYAKIT Menular dan Tidak Menular menular dan tidak menular		70,00	51,00	136,00	266,67			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84					24.00	386.67	773.33
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan Sumbar Sakato dan Jaminan Kesehatan Tuah Basamo		36312,00	37333,00	109,00	908,33			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4							
					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah sekolah yang melaksanakan deteksi dini NAPZA		0,00	20,00	0,00	0,00			
						Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	24700					500.00	-	-
						Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang Perda KTR n0.05 tahun 2020			20,00	0,00	0,00			
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional				0,00				
						Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	25							
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah pembinaan kawasan sehat		2,00	19,00	1,00	5,26			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	101					19.00	2.00	18.18
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penyediaan telemedicine di fasyankes		0,00	11,00	11,00	100,00	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase terpenuhinya dukungan operasional RS tipe D		0,00	12,00	15,00	125,00			
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan puskesmas		20,00	12,00	89,00	741,67			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10							
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pelaksanaan kegiatan operasional IFK		0,00	12,00	9,00	75,00			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24							
						Pelaksanaan kegiatan operasional Labkesda		1,00	12,00	9,00	75,00	12.00	1.00	8.33
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Re Akreditasi		20,00	10,00	34,60	346,00	10.00	366.00	1830.00
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20							
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi		1,00	5,00	0,00	0,00			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12					5.00	167.00	3340.00
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan		1,00		0,00				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12					52.00	-	-
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terpenuhinya dukungan pelayanan Public Safety Centre (PSC) 119			12,00	86,00	716,67	12.00	758.33	6319.44
						Jumlah penyediaan pengelolaan SPGDT		1,00		0,00				
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0							
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi terintegrasi dengan SDM yang sesuai standar di Lingkungan Dinas Kesehatan**	6		11,00	0,00	**100,00**			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat		100,00	1,00	1,00	100,00	1.00	300.00	30000.00
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1							
					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet		20,00	11,00	0,00	0,00			
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan**	100		100,00	10,00	**100,00**	100.00	33.33	33.33
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	24							
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22							
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		0,00		0,00				
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penata kelolaan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten		0,00		0,00				
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Kapasitas P Care di Puskesmas			20,00	20,00	100,00			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
						Peningkatan Kapasitas Pengelola BLUD UPT Puskesmas			40,00	40,00	100,00	20.00	200.00	500.00
						Peningkatan Kapasitas PIC Prolanis dan PRB di Puskesmas			40,00	40,00	100,00			
						Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan		0,90		0,00				
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**	65%		55,00	0,00	**136,59**	55.00	151.17	201.56
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi teknis Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut atas perizinanpraktik Tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat**	100		100,00	33,09	**243,09**	100.00	684.09	684.09
					Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1000							
					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah rekomendasi pemberian izin praktek tenaga kesehatan dan sarana kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan			550,00	1337,00	243,09	100.00	684.09	17102.27
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	500							
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	**Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan**	100%		100,00	33,33	**66,67**	100.00	12.50	12.50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Kabupaten/Kota									
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan buku profil SDMK sumber daya manusia kesehatan		100,00	2,00	2,00	100,00	2.00	250.00	25000.00
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2							
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya fasilitas tempat tinggal untuk tenaga kesehatan nusantara sehat			1,00	1,00	100,00	1.00	100.00	10000
						Penyaluran Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Dinas Kesehatan			13,00	0,00	0,00			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	748							
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200					4.00	-	-
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi tekhnis sesuai standar**	25		100,00	0,00	**100,00**	25.00	-	-
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan tenaga fungsional kesehatan			2,00	2,00	100,00	2.00	100.00	400.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300							
					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12					12.00	0.00	0.00
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan**	65%		100,00	0,00	**72,26**	55.00	13.07	17.42
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku**			25,00	0,00	**100,00**			
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku		29,00	25,00	25,00	100,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30					25.00	85.00	340.00
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku	25							
					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	12		12,00	0,00	**50,00**	12.00	0.00	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pelaksanaan Kegiatan Penigkatan kapasitas petugas ASPAK Puskesmas		0,50	2,00	40,00	100,00			
						Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2					40.00	100.50	837.50
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industru Rumah Tangga Pangan (IRTP)**	30		30,00	32,00	**106,67**	3.00	6.67	3.70
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industru Rumah Tangga Pangan (IRTP)			30,00	32,00	106,67	3.00	113.33	62.96
						Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM**	100		100,00	0,00	**54,62**	100.00	2.67	2.66666667
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi			100,00	67,90	67,90			
						Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	30		150,00	62,00	41,33	150.00	70.57	70.56666667
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	200							
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi**	26		26,00	0,00	**50,00**			
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi		7,00	26,00	26,00	100,00	26.00	0.00	0
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	28						
						Persentase Rumah Tangga ber PHBS		42,28	70,00	0,00	0,00			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase RumahTangga ber-PHBS**	75	42,28	70,00	0,00	**100,00**	75.00	72.98	97.3
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Organisasi/ Masyarakat yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan**			300,00	0,00	**100,00**	40.00	0.00	0.00
						Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	40							
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Organisasi/Masyarakat yang diberdayakan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya dan keamanan pangan		290,00	300,00	300,00	100,00			
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14							
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat**	11		6,00	0,00	**100,00**	11.00	145.45	1322.31
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		6,00	6,00	6,00	100,00	11.00	151.45	1376.86
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	-	-	-	-	-	-	-
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3	-	-	-	-	-	-	-

Berikut adalah tabel pencapaian kinerja pelayanan dinas kesehatan kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 :

Tabel 2.1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70%)	BB (72,25)	103,21
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	3,132	104,4
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50%	94,10	188,2
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	205	195	110,26
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	10,97	14,2	70,56
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	10,75	16,7	44,65
		Prevalensi Stunting	19%	35,50	13,16
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	77,55	77,55
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70%	50,25	71,79
RATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS					84,84

Sumber : Data Olahan Subbag PIH tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022, disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh indikator sasaran berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 84,84%.

perbandingan capaian pada 1 (satu) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70)	BB (75,47)	107,81	B (70%)	BB (72,25)	103,21	0	3,22	4,6
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	2,82	94,0	3	3,132	104,4	0	0,312	10,4
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50	84	168	50%	94,10	188,2	0	10,1	20,2
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	210	385,6	54,46	205	195	110,26	5	190,6	55,8
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	11,5	11,8	97,46	10,97	14,2	70,56	0,53	2,4	-26,9
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	12,56	12,3	102,07	10,75	16,7	44,65	1,81	4,4	57,42
		Prevalensi Stunting	20,6	24,0	83,50	19%	35,50	13,16	1,6	11,5	-70,34
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100	49,02	49,02	100%	77,55	77,55	0	28,53	28,53
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70	42,48	60,69	70%	50,25	71,79	0	7,77	11,1
RATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS								84,84			

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Tabel 2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70%)	BB (72,25)	103,21	Sudah Tercapai
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	3,132	104,4	Sudah Tercapai
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50%	94,10	188,2	Sudah Tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	205	195	110,26	Sudah Tercapai
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	10,97	14,2	70,56	Akan tercapai, butuh perbaikan dan inovasi
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	10,75	16,7	44,65	Masih rendah, butuh penguatan dan inovasi
		Prevalensi Stunting	19%	35,50	13,16	Masih rendah, butuh penguatan dan inovasi
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	77,55	77,55	Akan tercapai, butuh perbaikan dan inovasi
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70%	50,25	71,79	Akan tercapai, butuh perbaikan dan inovasi
RATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS					84,84	

Sumber : Data Olahan Subag PIH Tahun 2022

Dari beberapa sasaran strategis terlihat ada beberapa indikator yang telah mencapai target akhir jangka menengah yaitu Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan, Persentase Tindak lanjut temuan oleh BPK dan Angka Kematian Ibu (AKI), sedangkan indikator lainnya masih belum mencapai target akhir Renstra Dinas Kesehatan yang masih membutuhkan beberapa inovasi terkait pencapaian indikator yang sudah ditetapkan sampai tahun 2026.

2.1.1.a Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang pertama adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang akan dicapai. Analisis Kinerja Sasaran Strategis berikut dengan indikator kinerja :

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Uraian ini menjelaskan tentang capaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja pendukungnya tahun 2022, perbandingan realisasi terhadap target yang akan dicapai.

Tabel 2.1.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70%)	BB (72,25)	103,21
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	3,132	104,4
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50%	94,10	188,2

Sumber : Data olahan Subbag PIH Tahun 2022

a. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

Pengukuran SAKIP Dinas Kesehatan dilakukan oleh Inspektorat yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Penilaian SAKIP ini dilihat dari beberapa dokumen perencanaan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan yaitu Dokumen Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Renaksi/ RKT dan LKjIP dengan ruang lingkup Perencanaan, Pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Pada tahun 2022 untuk indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sudah mencapai Nilai BB dengan tingkat persentase sebesar 72,25% dari target B dengan persentase 70% dengan capaian 103,21%. Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini sudah melebihi target, Dinas Kesehatan akan menyesuaikan dan mengkaji Kembali target yang akan ditetapkan selanjutnya.

b. Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan

Pengukuran Maturitas SPIP merupakan pengukuran secara Sampel OPD oleh BPKP di setiap tahunnya, pada tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 3,132

dari nilai target 3 dengan capaian sebesar 104,4%. Penilaian Maturitas SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari beberapa unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalaian terhadap resiko, informasi dan komunikasi dan terakhir adalah pemantauan. Selain itu skala pembobotan pada unsur-unsur SPIP tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini sudah melebihi target dan dinas Kesehatan akan menyesuaikan dan mengkaji Kembali target yang akan ditetapkan selanjutnya.

c. Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
Pengukuran Persentase Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat pengawas dengan dasar jumlah temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun 2022 untuk indikator ini sudah terealisasi 94,10% dari target 50% dengan capaian 188,2%.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun sebelumnya dengan tahun 2022

Tabel 2.1.6. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Sasaran Startegis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70)	BB (75,47)	107,81	B (70%)	BB (72,25)	103,21	0	3,22	4,6
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	2,82	94,0	3	3,132	104,4	0	0,312	10,4
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50	84%	168%	50%	94,10	188,2	0	10,1	20,2

Sumber : Data olahan Subbag PIH Tahun 2022

a. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
Pada tahun 2022 Capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 103, 21% sedangkan tahun 2021 sebesar 107,81%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini dari tahun sebelumnya mengalami penurunan namun masih berada diatas target yang akan dicapai. Jika dilihat dari LHE SAKIP pada Dinas Kesehatan Tahun 2022 pada komponen :

- perencanaan kinerja
  kriteria yang belum di penuhi yaitu anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai

- Pengukuran Kinerja
  kriteria yang belum di penuhi yaitu Pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaiian kinerja belum memanfaatkan Tekhnologi Informasi (Aplikasi)

- Pemanfaatan
  kriteria yang belum di penuhi yaitu Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik structural maupun Fungsional dan pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) Organisasi.

- Pelaporan

  kriteria yang belum di penuhi yaitu Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/ nasional (*Benchmark* Kinerja), Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

b. Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan
Tahun 2022 Level Maturitas SPIP Kabupaten Pasaman Barat mencapai 104,4% sedangkan tahun 2021 mencapai 94,0% (masih menggunakan data tahun 2020). Dapat disimpulkan untuk level Maturitas SPIP meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini

c. Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
Pengukuran Persentase Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat pengawas dengan dasar jumlah temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun 2022 untuk indikator ini sudah terealisasi 94,10% dari target 50% dengan capaian 188,2%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 84% dari target 50%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2022 dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan pada Sasaran Startegis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70%)	BB (72,25)	103,21	Sudah Tercapai
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	3,132	104,4	Sudah Tercapai
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50%	94,10	188,2	Sudah Tercapai

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian seluruh indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan jika disandingkan dengan taget pada Renstra Dinas kesehattan tahun 2021-2026 sudah melebihi target, semua capaian indikator > 100 % dan artinya untuk tahun 2022 sasaran ini sudah tercapai.

D. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada uraian ini menjelaskan tentang penyebab peningkatan Kinerja serta alternatif yang sudah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2022. Dinas Kesehatan sudah mengklasifikasikan kedalam skala pengukuran kinerja, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.8. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					
	Target Indikator Kinerja Sasaran (Indikator)	Sangat Tinggi (≥90,1%) (indikator)	Tinggi (75,1≤90%) (indikator)	Sedang (65,1 ≤ 75%) (indikator)	Rendah (50,1 ≤65%) (indikator)	Sangat Rendah (≤50%) (indikator)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	3	3	-	-	-	-

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan memiliki skala pengukuran kinerja sangat tinggi dengan capaian >100%, Dinas Kesehatan akan menyesuaikan dan mengkaji Kembali target yang akan ditetapkan selanjutnya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan Kerjasama internal di masing-masing bidang dan lintas sektor dalam hal penyusuan dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dokumen itu sendiri.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan efesiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis yang terletak pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Pagu anggaran dan realisasi untuk mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.9. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome /Hasil)	Tahun 2022 (Kinerja)			Tahun 2022 (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingak Efisisensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keseshatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B (70%)	BB (72,25)	103,21	68.384.015.862	64.908.487.925	94,92	5,08
		Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	3,132	104,4				
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan	50%	94,10	188,2				

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Dengan persentase capaian 3 (tiga) indikator) pada Sasaran Strategis diatas >100%, sumberdaya yang digunakan terealisasi sebesar 94,92% atau Rp. 64.908.487.925,- dari Rp. 68.384.015.862 dengan tingkat efiensi 5,08%.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama maka sesuai Renstra Dinas Kesehat tahun 2021 – 2026 maka disusun program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja tersebut. Berikut ini adalah uraian yang mendukung atau menghambat indikator pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 :

Tabel 2.1.10. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.44.738.000	Rp.32.333.616	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full.	Berkoordniasi dengan OPD yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.29.189.000	Rp.18.080.900	Pada kegiatan ini belanja perjalanan dinas tidak dapat di bayarkan sepenuhnya dikarenakan banyak memenuhi undangan kegiatan fullboard dan fullday, dan ini sudah diatur pada standar biaya tidak boleh dibayarkan full.	Berkoordinasi dengan OPD yang berhubungan dengan evaluasi Kinerja
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.59.030.886.262	Rp.56.131.099.647	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.7.540.680.000	Rp.7.319.117.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.493.170.000	Rp.394.585.000	Adanya beberapa bulan kekosongan pejabat struktural yang mengakibatkan tidak adanya realisasi anggaran	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.112.550.000	Rp.59.809.250	Adanya Perubahan standar biaya pada honor Pengurus barang, sehingga ada selisih bayar	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.320.239.500	Rp.253.113.500	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.165.847.980	Rp.147.056.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.25.310.205	Rp.25.193.750	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.341.057.000	Rp.315.000.000	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.280.347.115	Rp.229.877.770	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan ini	

Sumber : Laporan LKPJ Dinas Kesehatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas masing-masing subkegiatan pendukung dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dilingkunagn Dinas Kesehatan dapat terlihat ada beberapa yang memiliki permasalahan terhadap realisasi anggaran, namun demikian kegiatan tetap terlaksana dengan baik.

2.1.1.b Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang kedua adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang akan dicapai. Analisis Kinerja Sasaran Strategis berikut dengan indikator kinerja :

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Uraian ini menjelaskan tentang capaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja pendukungnya tahun 2022, perbandingan realisasi terhadap target yang akan dicapai.

Tabel 2.1.11. Capaian Indikator Kinerja Dinas Keshatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	205	195	110,26
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	10,97	14,2	70,56
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	10,75	16,7	44,65

		Prevalensi Stunting	19%	35,50	13,16
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	77,55	77,55

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis dinas Kesehatan yang kedua adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 5 (lima) indikator kinerja yang akan dicapai.

1. Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)

   Kematian Ibu dan Anak menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menjadi garda terbesar penanganan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB). Dimana kedua elemen tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama Dinkes Kabupaten Pasaman Barat, dimana realisasi angka kematian ibu dipasaman barat pada tahun ini sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup (15 kasus) dengan angka capaian sebesar 107 %. Tahun 2022, AKI didapat berdasarkan jumlah kasus kematian ibu melahirkan sampai dengan nifas sebanyak 15 kasus dibandingkan dengan jumlah lahir hidup pada tahun itu sebesar 7.680 dikalikan 100.000 kelahiran hidup. Maka didapatlah nilai AKI Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup.

2. Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)

   Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Akhir tahun 2022 telah mencapai 14,2/1000 KH. Jumlah kasus kematian bayi tahun 2022 adalah sebanyak 109 bayi dengan jumlah kelahiran hidup 7.680 jiwa.

3. Indikator Kinerja Angka Kematian Balita (AKABA)

   Angka Kematian Balita (AKABA) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga balita sampai umur 59 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita di Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Akhir tahun 2022 telah mencapai 16,7/1000 KH. Jumlah Kasus kematian Balita (juga termasuk bayi didalamnya) sebanyak 128 balita dengan kelhiran hidup 7.680 jiwa.

4. Indikator Kinerja Prevalensi *Stunting*

   Indikator Prevalensi Stunting adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U). Capaian indikator Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 19% dan mampu direalisasikan sebesar 35,5% (persentase berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2022), dengan persentase realisasi kinerja sebesar 14,71%.

5. Persentase Capaian SPM bidang Kesehatan

   Persentase Capaian SPM bidang Kesehatan diukur dari nilai rata-rata seluruh capaian indikator SPM yang ada. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan

mampu mencapai sebesar 77,55% dari target 100%. Untuk pencapaian ini Sasaran yang dipakai merupakan data dari Pusdatin berdasarkan KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2021

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun sebelumnya dengan tahun 2022.

Tabel 2.1.12. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Pada Sasaran Strategi Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	210	385,6	54,46	205	195	110,26	5	190,6	55,8
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	11,5	11,8	97,46	10,97	14,2	70,56	0,53	2,4	-26,9
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	12,56	12,3	102,07	10,75	16,7	44,65	1,81	4,4	57,42
		Prevalensi Stunting	20,6	24,0	83,50	19%	35,50	13,16	1,6	11,5	-70,34
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100	49,02	49,02	100%	77,55	77,55	0	28,53	28,53

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Berdasarkan table diatas dari 5 (lima) indikator Kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat jika dibandingan dengan realisasi tahun sebelumnya ada yang mengalami peningkatan dan penurunan.

1. Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu di Pasaman Barat pada tahun 2022 sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup (15 kasus) dengan angka capaian sebesar 107%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka kematian ibu 209 per 100.000 kelahiran hidup (18 kasus).

Untuk melihat perkembangan angka Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2021 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan Grafik 2 di bawah ini :

Tabel 2.1.13. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Tahun 2021-2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI
1	*2*	*3*	*4*					
1	Sungai Beremas	Air Bangis	508	2	393,7	572	0	0
2	Ranah Batahan	Silaping	255	1	392,1	252	0	0
3		Desa Baru	245	0	0	239	0	0
4	Koto Balingka	Parit	619	6	969,3	542	0	0
5	Sungai Aur	Sungai Aur	683	5	732,0	561	2	356,5
6	Lembah Melintang	Ujung Gading	617	2	324,1	330	1	303,0
7		Ranah Salido	337	1	296,7	682	1	146,6
8	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	226	0	0	271	1	369,0
9		Paraman Ampalu	242	0	0	206	0	0
10	Talamau	Talu	273	2	732,6	241	0	0
11		Kajai	241	0	0	199	0	0
12	Pasaman	Sukamenanti	298	1	335,5	230	1	434,7
13		Aia Gadang	255	1	392,1	256	2	781,2
14		Simpang Empat	497	5	1006,0	512	0	0
15		Lembah Binuang	278	2	719,4	268	0	0
16	Luhak Nan Duo	Ophir	778	1	128,5	721	2	277,3
17	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	238	0	0	237	0	0
18	Kinali	IV Koto Kinali	446	1	224,2	447	2	447,4
19		Kinali	755	0	0	669	2	298,9
20		VI Koto Selatan	249	1	401,6	245	1	408,1
JUMLAH (KAB/KOTA)			8.040	31	385,6	7.680	15	**195,3**
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)					**385,6**			**195**

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2021, 2022

Grafik 1. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Kab. Pasaman Barat

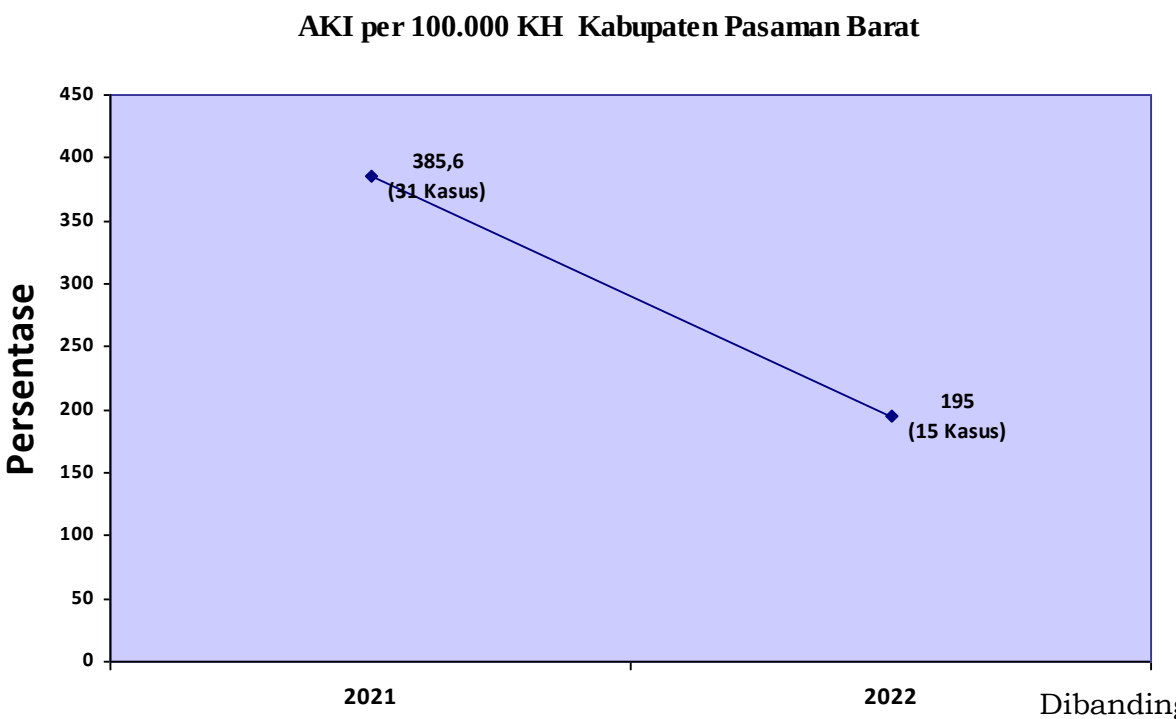

Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan kinerja dimana terjadi penurunan AKI dari 385 pada Tahun 2021 menjadi 195 di Tahun 2022. Pada 3 tahun terakhir realisasi Kinerja pencapaian AKI mengalami fluktuasi. Realisasi Kinerja pada tahun 2022 sebesar 195 sudah mencapai target renstra Dinas Kesehatan pada Tahun 2022. Dimana target AKI pada Renstra Dinas Kesehatan sebesar 205.

2. Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Akhir tahun 2022 telah mencapai 14/1000 KH. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasaman Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2022. Untuk melihat perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 dan Grafik 3 di bawah ini :

Tabel 2.1.14 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Tahun 2021 s.d 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB
1	*2*	*3*	*4*					
1	Sungai Beremas	Air Bangis	508	6	11,8	572	11	19,2
2	Ranah Batahan	Silaping	255	6	23,5	252	6	23,8

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB
3		Desa Baru	245	4	16,3	239	11	46,0
4	Koto Balingka	Parit	619	9	14,5	542	10	18,5
5	Sungai Aur	Sungai Aur	683	6	8,8	561	8	14,3
6	Lembah Melintang	Ujung Gading	617	4	6,5	330	1	3,0
7		Ranah Salido	337	7	20,8	682	11	16,1
8	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	226	1	4,4	271	1	3,7
9		Paraman Ampalu	242	2	8,3	206	1	4,9
10	Talamau	Talu	273	2	7,3	241	0	0,0
11		Kajai	241	6	24,9	199	2	10,1
12	Pasaman	Sukamenanti	298	3	10,1	230	4	17,4
13		Aia Gadang	255	2	7,8	256	2	7,8
14		Simpang Empat	497	6	12,1	512	8	15,6
15		Lembah Binuang	278	1	3,6	268	4	14,9
16	Luhak Nan Duo	Ophir	778	7	9,0	721	7	9,7
17	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	238	4	16,8	237	0	0,0
18	Kinali	IV Koto Kinali	446	8	17,9	447	6	13,4
19		Kinali	755	8	10,6	669	16	23,9
20		VI Koto Selatan	249	3	12,0	245	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			8.040	95	11,8	7.680	109	**14,2**
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)					**11,8**			**14,2**

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2021, 2022

Grafik 2. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Kab. Pasaman Barat

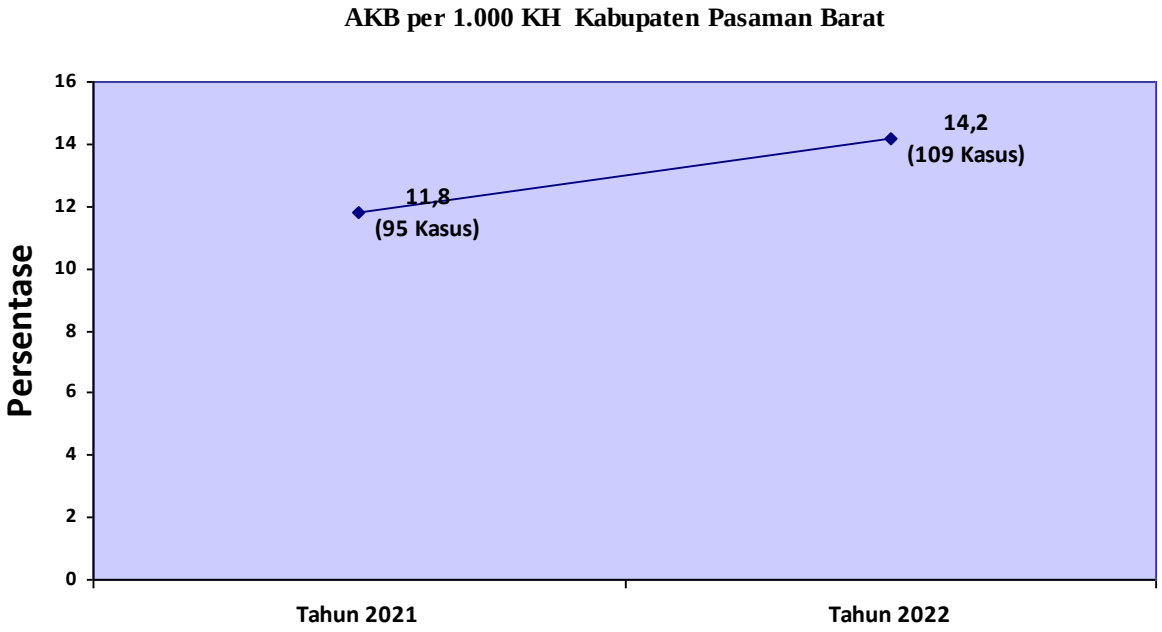

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka kematian bayi dari 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 14 per kelahiran hidup pada Tahun 2022. Pada dokumen renstra Dinas Kesehatan Angka kematian Bayi ditargetkan sebesar 11,3 per 1000 kelahiran Hidup. Apabila dipersentasekan capaian kinerja untuk penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Pasaman Barat baru mencapai 74,3%. Namun apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 18,26 pada tahun 2022 maka capaian Pasaman Barat masih diatas target Nasional (mencapai target).

3. Indikator Kinerja Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita di Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Akhir tahun 2022 telah mencapai 17/1000 KH. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya Angka Kematian Bayi mencapai 11,6/1.000 KH. Untuk melihat perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel 23 dan Grafik 3 di bawah ini :

Tabel 2.1.15. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH Tahun 2020 s.d 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA	Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA
1	*2*	*3*	*4*					

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA	Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA
1	Sungai Beremas	Air Bangis	508	7	13,8	572	14	24,5
2	Ranah Batahan	Silaping	255	6	23,5	252	8	31,7
3		Desa Baru	245	5	20,4	239	12	50,2
4	Koto Balingka	Parit	619	9	14,5	542	14	25,8
5	Sungai Aur	Sungai Aur	683	6	8,8	561	8	14,3
6	Lembah Melintang	Ujung Gading	617	4	6,5	330	1	3,0
7		Ranah Salido	337	8	23,7	682	12	17,6
8	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	226	1	4,4	271	1	3,7
9		Paraman Ampalu	242	2	8,3	206	2	9,7
10	Talamau	Talu	273	2	7,3	241	0	0,0
11		Kajai	241	6	24,9	199	4	20,1
12	Pasaman	Sukamenanti	298	3	10,1	230	4	17,4
13		Aia Gadang	255	2	7,8	256	2	7,8
14		Simpang Empat	497	6	12,1	512	9	17,6
15		Lembah Binuang	278	2	7,2	268	4	14,9
16	Luhak Nan Duo	Ophir	778	7	9,0	721	9	12,5
17	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	238	4	16,8	237	0	0,0
18	Kinali	IV Koto Kinali	446	8	17,9	447	7	15,7
19		Kinali	755	8	10,6	669	17	25,4
20		VI Koto Selatan	249	3	12,0	245	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			8.040	99	12,3	7.680	128	**16,7**
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)					**12,3**			**16,7**

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2021, 2022

Grafik 3. Angka Kematian Balita per 1.000 KH Kab. Pasaman Barat

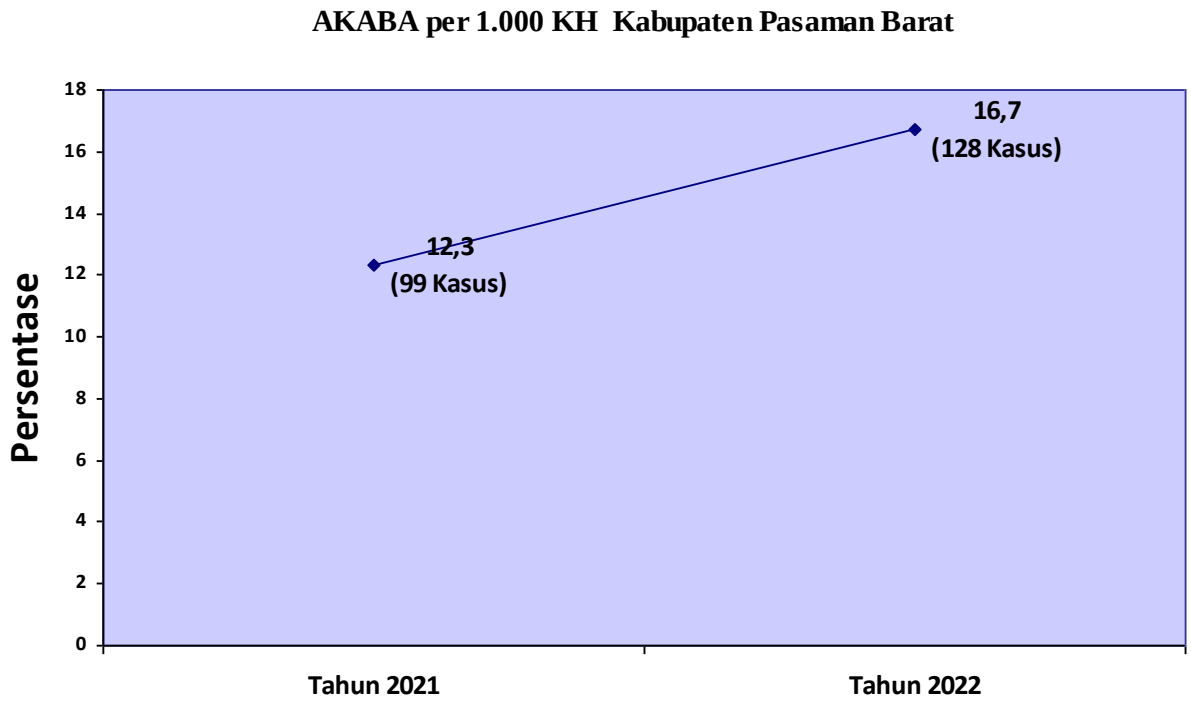

Dari tabel dan grafik di atas terjadi peningkatan AKABA di Pasaman Barat. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar, disebabkan tidak adanya peningkatan kapasitas bidan di Nagari/ jorong dalam tata laksana bayi baru lahir dan kurangnya pemahaman ibu dalam deteksi dini tanda bahaya janin. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasaman Barat mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Selain itu, terjadi peningkatan AKABA di Pasaman Barat yang cukup signifikan disebabkan tentunya oleh AKB yang juga meningkat dan ditambah dengan standar Pelayanan Minimal Kesehatan Balita yang juga belum mencapai target dan sesuai standar minimal. Apabila dibandingkan dengan target di Renstra dinas Kesehatan 2021-2026 Angka kematian Balita (AKABA) tahun 2022 belum mencapai target. Di dalam renstra AKABA tahun 2022 ditargetkan sebesar 10,75, sedangkan realisasi sebesar 17/1000 kelahiran hidup. Sehingga persentase realisasi kinerja Dinas Kesehatan hanya 44,65%.

4. Indikator Prevalensi Stunting

Capaian indikator stunting di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 19% dan mampu direalisasikan sebesar 35,5% (persentase berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2022), dengan persentase realisasi kinerja sebesar 14,71% atau dengan kategori kurang. Capaian kinerja prevalensi Stunting pada 3 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.1.16. Prevalensi *Stunting*

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022
1	*2*	*4*	*5*
1	Prevalensi *Stunting*	24,00%	35,5%

Grafik 4. Prevalensi Stunting Kab. Pasaman Barat

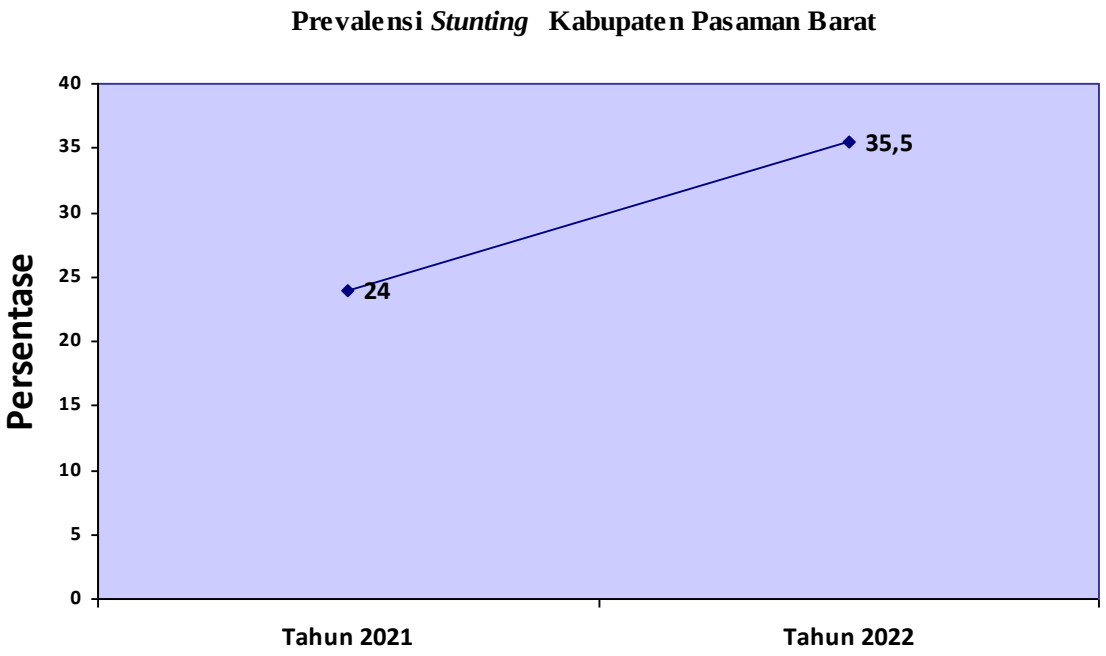

Apabila dibandingkan dengan target di RPJMD sebesar 19 % capaian Kinerja untuk indikator ini sangat jauh dari target yang seharusnya. Apabila diukur persentase capaian kinerja hanya 8,8% dari yang seharusnya 100%. Apabila dibandingkan dengan target propinsi dan Nasional Demikian juga apabila dibandingkan dengan target penurunan stunting secara Nasional melalui RPJMN yang menargetkan pada Tahun 2024 prevalensi stunting hanya 14%. Angka prevalensi stunting ini diambil dari SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) yang saat ini dilakukan oleh Kementrian Kesehatan setiap Tahun.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2022 dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan pada Sasaran Startegis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	205	195	110,26	Sudah Tercapai
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	10,97	14,2	70,56	Akan tercapai, butuh perbaikan dan inovasi
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	10,75	16,7	44,65	Masih rendah, butuh penguatan dan inovasi
		Prevalensi Stunting	19%	35,50	13,16	Masih rendah, butuh penguatan dan inovasi
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	77,55	77,55	Akan tercapai, butuh perbaikan dan inovasi

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian seluruh indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, jika disandingkan dengan taget pada Renstra Dinas kesehatan tahun 2021-2026 masih belum mencapai target, artinya Dinas Kesehatan harus melakukan perbaikan dan Menyusun strategi ulang untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)

   Peningkatan kinerja penurunan AKI dari 385 pada Tahun 2021 menjadi 195 di Tahun 2022 menjadikan capaian melebihi target yang ditetapkan. Pada 3 tahun terakhir realisasi Kinerja pencapaian AKI mengalami fluktuasi. Realisasi Kinerja pada tahun 2022 sebesar 195 sudah mencapai target renstra Dinas Kesehatan pada Tahun 2022. Dimana target AKI pada Renstra Dinas Kesehatan sebesar 205. Dari Capaian tahun 2022 untuk indikator AKI, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perbaikan capaian program

Kesehatan Ibu dan Menurunnya kasus covid-19 pada tahun 2022 juga mempengaruhi tercapainya realisasi kinerja AKI di Pasaman Barat. Pada Tahun 2022 Puskesmas sebagai ujung tombak program Kesehatan Ibu sudah mulai bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan di Masyarakat yang sebelumnya banyak terkendala dengan pembatasan-pembatasan di masa penyebaran covid-19. Demikian juga sumber daya yang ada sudah bisa dioptimalkan untuk pencapaian program-program Kesehatan masyarakat yang mendukung penurunan AKI di Pasaman Barat.

2. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)

Peningkatan Angka kematian bayi dari 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 14 per kelahiran hidup pada Tahun 2022. Pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Angka kematian Bayi ditargetkan sebesar 11,3 per 1000 kelahiran Hidup. Apabila dipersentasekan capaian kinerja untuk penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Pasaman Barat baru mencapai 74,3%. Namun apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 18,26 pada tahun 2022 maka capaian Pasaman Barat masih diatas target Nasional (mencapai target). Rendahnya realisasi kinerja untuk tujuan sasaran ini antara lain disebabkan oleh masih belum tercapainya standar pelayanan minimal pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin, dan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir pada Tahun 2021 dan 2022 di Pasaman Barat. 3 indikator SPM ini merupakan faktor kunci dari pada tercapai atau tidaknya penurunan AKB di Pasaman Barat. Pelayanan Kesehatan ibu hamil yang buruk/tidak memenuhi standar berakibat terhadap Kesehatan ibu hamil yang rendah yang menyebabkan persalinan yang beresiko dan tentunya juga melahirkan anak-anak yang menginap kelainan bawaan. Halini meningkatkan resiko kematian bayi. Pelayanan persalinan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal juga beresiko meningkatkan kasus kejadian kematian bayi disaat persalinan dan dimasa Bayi sebelum berumur 28 hari. Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir juga belum tercapai secara baik di Pasaman Barat yang opastinya berdampak langsung terhadap angka kematian bayi.

Untuk mencapai target penurunan dari pada AKB ini yang dapat dilakukan kedepan adalah meningkatkan capaian SPM yang berdampak langsung terhadap AKB dan peningkatan manajemen Puskesmas dalam penyelenggaran program UKP dan UKM di Puskesmas yang berdampak langsung terhadap AKB di Pasaman Barat.

3. Indikator Angka Kematian Balita (AKABA)

Peningkatan AKABA di Pasaman Barat yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan tentunya oleh AKB yang juga meningkat. Dan ditambah dengan standar Pelayanan Minimal Kesehatan Balita yang juga belum mencapai target dan sesuai standar minimal. Apabila dibandingkan dengan target di Renstra dinas Kesehatan 2021-2026 Angka kematian Balita (AKABA) tahun 2022 belum mencapai target. Di dalam renstra AKABA tahun 2022 ditargetkan sebesar 10,75, sedangkan realisasi sebesar 17/1000 kelahiran hidup. Sehingga persentase realisasi kinerja Dinas Kesehatan hanya 44,65%.

4. Prevalensi *Stunting*

Apabila dibandingkan dengan target di RPJMD sebesar 19 % capaian Kinerja untuk indikator ini sangat jauh dari target yang seharusnya. Apabila diukur persentase capaian kinerja hanya 8,8% dari yang seharusnya 100%. Apabila dibandingkan dengan target propinsi dan Nasional Demikian juga

apabila dibandingkan dengan target penurunan stunting secara Nasional melalui RPJMN yang menargetkan pada Tahun 2024 prevalensi stunting hanya 14%. Angka prevalensi stunting ini diambil dari SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) yang saat ini dilakukan oleh Kementrian Kesehatan setiap Tahun.

D. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2022 dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.18. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)					
	Target Indikator Kinerja Sasaran (Output) (Indikator)	Sangat Tinggi (≥90,1%) (indikator)	Tinggi (75,1≤90%) (indikator)	Sedang (65,1 ≤ 75%) (indikator)	Rendah (50,1 ≤65%) (indikator)	Sangat Rendah (≤50%) (indikator)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	1	1	1	-	2

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 5 (lima) indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat memiliki skala pengukuran kinerja sangat tinggi dengan 1 (satu) indikator, Skala Tinggi dengan 1 (satu) indikator, skala sedang dengan 1 (satu) indikator dan skala sangat rendah 2 (dua) indikator. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan Capaian Kinerja yang menjadi tanggungjawab Kesehatan. Indikator dengan skala sangat rendah yaitu AKABA dan Prevalensi *Stunting*.

Pada indikator Angka Kematian Balita (AKABA) Untuk meningkatkan realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dukungan sumber daya khususnya untuk mengoptimalkan 4 standar pelayanan Minimal yang berdampak langsung terhadap AKB dan AKABA yaitu : pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin , dan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir dan Pelayanan Kesehatan Balita. Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah peningkatan kapasitas petugas, peningkatan kemampuan manajemen program di Puskesmas, dan dukungan anggaran dari APBD Pasaman Barat.

Sedangkan indikator Prevalensi *Stunting* terjadi kenaikan angka stunting dikabupaten pasaman barat berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan SSGI menggunakan system sampel, dimana dengan jumlah sasaran balita dari Pusdatin sebanyak 51.100 orang balita dan sasaran balita real yang ada di kabupaten Pasaman Barat pada bulan Agustus 2022

sebanyak 32.550 yang dientrykan ke aplikasi ePPGBM diambil sampel sebanyak 61 Blok sensus (BS), dimana 1 BS diambil 10 anak yang akan dijadikan sampel. Artinya 61 BS menjadi 610 orang balita mewakili kabupaten pasaman barat. Penetapan blok sensus dan nama anak yang akan menjadi sampel ditentukan oleh Balitbang kemenkes, yang disampaikan ke Kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dinas kesehatan provinsi sumatera barat dan dinas kesehatan kabupaten pasaman barat bertugas sebagai Koordinator kegiatan. Dinas kesehatan kabupaten pasaman barat sudah melaksanakan rangkaian kegiatan seperti rekruetmen enumerataor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, menyediakan lokasi pelatihan workshop SSGI dan lahan praktek untuk workshop yang langsung mengunjungi keluarga balita yang tidak menjadi sampel SSGI serta monitoring kegiatan pengambilan data SSGI selama kegiatan pengumpulan data SSGI dilaksanakan.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan efesiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis yang terletak pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Pagu anggaran dan realisasi untuk mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.19. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Tahun 2022 (Kinerja)			Tahun 2022 (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingak Efisisensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	205	195	110,26	44.423.062.695	33.338.198.541	75,05	24,95
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	10,97	14,2	70,56				
		Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	10,75	16,7	44,65				
		Prevalensi Stunting	19%	35,50	13,16				
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	77,55	77,55				

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Dengan persentase capaian 5 (lima) indikator) pada Sasaran Strategis diatas sumberdaya yang digunakan terealisasi sebesar 75,05% atau Rp. 33.338.198.541,- dari Rp. 44.423.062.695 dengan tingkat efisiensi 24,95%, disebabkan oleh kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, perubahan juknis pada beberapa menu kegiatan bersumber DAK salah satunya kegiatan pengelolaan pelayanan ibu bersalin dimana pembiayaan pelayanan persalinan sebelumnya masih ditanggung pada klaim jampersal namun dengan adanya KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022, seluruh pembiayaan persalinan tidak dibiayai lagi melalui klaim Jampersal melainkan melalui BPJS dengan peserta pada aplikasi eKohort.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama maka sesuai Renstra Dinas Kesehat tahun 2021 – 2026 maka disusun program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja tersebut. Berikut ini adalah uraian yang mendukung atau menghambat indikator pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2022 :

Tabel 2.1.20. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rp. 47.906.805.195**	**Rp.32.987.459.459 (69,53%)**		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.17.737.683.873**	**Rp.14.208.030.295 (78,94%)**		
Pengembangan rumah sakit (RS. Ujung Gading)	Rp1.124.229.498	Rp.874.969.447	Rincian belanja pengadaan tidak sesuai dengan speksifikasi yang ada	
Pengembangan Puskesmas	Rp 213.737.850	Rp.213.674.650	Tidak ada kendala	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.4.245.586.500	Rp.4.243.563.400	Tidak ada kendala	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.3.704.321.812	Rp.3.014.134.000 ()	Tidak ada kendala	
Pengadaan Obat, Vaksin	Rp.3.255.970.380	Rp.2.495.493.969	Kenaikan pajak 11% sehingga ada beberapa harga obat yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun disebabkan sistim penganggaran per item	Untuk belanja obat sedapat mungkin tidak entry per item cukup paket
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp.5.032.929.833	Rp.2.932.835.329	Pengadaan disesuaikan dengan stok yang masih ada dan kebutuhan (Catridge TCM)	Untuk belanja bmhp sedapat mungkin tidak entry per item cukup paket
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.26.067.536.444**	Rp.18.690.791.864		

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pengolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 280.084.015	Rp.134.909.750	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp.622.479.000	Rp.72.701.000	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit. Tahun 2022 penggunaan Jampersal berubah dari tahun sebelumnya.dimana pembiayaan pelayanan persalinan dimasukkan melalui BPJS dengan peserta melalui aplikasi eKohort. Validasi peserta Jampersal melalui puskesmas..dinas kesehatan..Kemenkes dan BPJS.. setelah validasi dari BPJS baru pasien Jampersal bisa dilayani. Juknis tentang Pasien Jampersal keluarnya dan diterima kab tgl 25 Agustus 2022. Sehingga pasien yg akan menggunakan jampersal sdh banyak yg melahirkan. Kegiatan yg ada di Jampersal thn 2022 adalah RTK, Konsumsi RTK ,BBM Rujukan, Sewa kendaraan berpenumpang utk merujuk pasien dan Transportasi petugas memantau pasien di RTK. Utk rujukan yg di bayarkan adalah BBM atau sewa kendaraan berpenumpang, tetapi petugas merujuk tdk bisa dibayarkan, sehingga pusk tdk menggunakan dana Jampersal dlm merujuk pasien. Pasien di RTK tidak ada, sehingga konsumsi pasien tidak ada	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.21.470.000	Rp.15.500.000	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.43.230.000	Rp.26.610.000	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Balita. Melibatkan semua lintas program dalam kegiatan yang dilaksanakan

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.73.900.000	Rp.66.659.500	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar hanya dilaksanakan di Sekolah/ sarana pendidikan formal dan belum terlaksananya pemeriksaan pada anak di fasilitas informal atau yang tidak bersekolah	Aktifkan Posyandu remaja di setiap jorong untuk meningkatkan prevalensi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp.73.979.900	Rp.60.208.000	- Kendaraan Dinas untuk suoervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain. - Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet - Ada kegiatan deteksi dini IVA dan Kanker payudara yang didanaioleh provinsi pada bulann Oktober., sehingga perjalanan pada bulan itu memakai dana provinsi.	- Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien. - Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran..
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp.30.205.000	Rp. 19.289.000	Dimasa pasca bencana banyak kegiatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi yang membuat waktu kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan jadi sedikit Narasumber kegiatan pertemuan lansia masih di tingkat provinsi sehingga dibutuhkan kesesuaian waktu untuk menyamakan jadwal dengan kab/kota lainnya.	Memaksimalkan semua waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Menyamakan tujuan kegiatan lintas sektor dengan tujuan program lansia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Usia Lanjut.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp.37.004.900	Rp.28.792.800	- Kendaraan Dinas untuk suoervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain. - Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet	- Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien. - Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran..
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Rp.10.000.000	Rp.6.915.500	- Kendaraan Dinas untuk supervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain. - Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet	- Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien. - Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran. 2.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp.30.165.000	Rp.26.719.500	- Kendaraan Dinas untuk suoervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain. - Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 jrealisasi pada bahan cetak leaflet	- Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien. - Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran..

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp.14.717.100	Rp.14.533.500	Kegiatan ini tidak ada permasalahan dimana kegiatan ini secara fisik telah terlaksananya 100%	Karena kegiatan ini secara fisisk telah terlaksana 100% jadi untuk kegiatan ini tidak ada upaya dalam
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp.16.060.950	Rp.13.338.000	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksananya 100% tetapi ada kelebihan keuangan untuk BBM dan perjalanan dinas luar daerah dimana untuk BBM karena kekurangan kendaraan dinas operasinal sehingga untuk perjalanan dinas pakai kendaraan umum untuk pencairannya sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah kerena untuk kegiatan pertemuan lebih dari 1 hari dibayarkan 120.000 perhari	Untuk kendaraan dinas operasional dikelola dengan baik adanya jadwal perseksi jadi tidak dable dalam penggunaaannya. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam perencaannya lebih efisein lagi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp.121.000.000	Rp.43.360.000	Tidak ada masalah pada sub kegiatan sehubung dengan penurunan kasus Covid-19	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp.1.747.861.350	Rp.1.539.863.050	Tidak ada masalah pada sub kegiatan ini sehubungan dengan penurunan kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi sudah lebih dari 70%, pada sub kegiatan ini ada pembayaran hutang belanja tahun 2021 untuk pembayaran uang lelah Vaksinator, Swab, Makan-Minum, BBM, dll.	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.653.802.000	Rp.521.059.181	Beberapa kegiatan gizi masyarakat dilakukan bersamaan dengan program promkes dan lintas sektor, dan monitoring evaluasi program gizi tidak semua puskesmas dapat dilakukan.	Akan dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dari perencanaan sampai monitoring evaluasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Rp.82.312.500	Rp.30.885.750	Pelaksanaan kegiatan baru bisa dimulai setelah bulan juli karena pandemic covid-19 ada nya perubahan juknis DAK Non Fisik serta menunggu dana pergeseran di sah kan	Selama pandemic covid 19 kegiatan tidak yang dilakukan monev program ke puskesmas. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan terkait dengan perubahan juknis DAK Non fisik dan pengesahan anggaran pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.421.889.000	Rp.307.446.250	Pelaksanaan kegiatan baru bisa dimulai setelah bulan juli karena pandemic covid-19 Ada nya perubahan juknis DAK Non Fisik serta menunggu dana pergeseran di sah kan	Selama pandemic covid 19 kegiatan tidak yang dilakukan monev program ke puskesmas. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan terkait dengan perubahan juknis DAK Non fisik dan pengesahan anggaran pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.121.100.000	Rp.116.219.000	Promosi kesehatan belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Pasaman Barat baik melalui Media maupun penyuluhan dan sosialisasi lamgsung Adanya kelebihan dalam pengangaran Honor Narasumber kegiatan pertemuan di DPA	Meningkatkan Anggaran media promosi kesehatan untuk tahun 2023 Dapat menyesuaikan rencana kebutuhan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp.40.000.000	Rp.33.617.500	Tidak ada permasalahan pada subkegiatan, untuk perjalanan dinas pada subkegiatan ini satu Tim dengan kegiatan PISPK yang dibiayai oleh APBN, sehingga belanja perjalanan dinas tdk terealisasi.	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp.64.230.000	Rp.60.063850	Tidak ada masalah	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp.600.000.000	Rp.600.000.000 (100%)	Tidak ada masalah	

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.151.300.800	Rp.131.793.750	Kegiatan ini secara fisik telah terlaksananya 100% tetapi ada kelebihan keuangan untuk BBM dan perjalanan dinas luar daerah dimana untuk BBM karena kekurangan kendaraan dinas operasinal sehingga untuk perjalanan dinas pakai kendaraan umum untuk pencairannya sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah kerena untuk kegiatan pertemuan lebih dari 1 hari dibayarkan 120.000 perhari	Untuk kendaraan dinas operasional dikelola dengan baik adanya jadwal perseksi jadi tidak dable dalam penggunaaannya. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam perencaannya lebih efisien lagi
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.17.781.261.600	Rp.14.364.725.800	Adanya dana tambahan yang masuk di saat anggaran perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000 (untuk pembiayaan di RSUD yakni belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan pelayanan BPJS	Telah di susun peraturan bupati pasaman barat tentang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakt miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta program Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan jaringgannya serta RSUD Pasaman Barat tapi tidak di setujui oleh kementerian Hukun dan Hak Azazi manusia.
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp. 29.229.900	Rp.24.096.000	- Kendaraan Dinas untuk suoervisi ke lapangan tidak mencukupi . karena sering rusak dan mobil lainnya dipakai bidang lain. - Realisasi dana lebih kecil dari pada yang di entry di SIPD sehingga terdapat sisa dana dari anggaran awal. Seperti : realisasi pada perjalanan dinas luar daerah, realisasi pada kegiatan pertemuan luar daerah yang hanya di bayarkan Rp. 120. 000 realisasi pada bahan cetak leaflet	- Mohon perbaiki mobil dinas , dibagi jadwal mobildan sopir perbidang dan .perseksi agar lebih bisa dimanfaatkan dengan efisien. - Mengalihkan dana yang masih banyak tersisa ke kegiatan lain yang dirasa perlu pada saat perubahan anggaran.
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Rp.18.200.000	Rp.12.333.376	Belum terbentuknya Forum Kabupaten Sehat Pasaman Barat periode 2022-2027 sehingga untuk monitoring ke forum kecamatan sehat belum bisa dilakukan	Berkoordinasi dengan Tim Pembina KKS (Bappeda) untuk membentuk forum Kabupaten Sehat Pasaman Barta
Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Rp.371.249.000	Rp.371.249.000 (100%)	Tidak ada masalah	
Operasional Pelayanan Puskesmas Rumah Sakit	Rp.229.756.062	Rp.0	1. Harga DPA/RKA sebelum perubahan dibawah harga e-katalog dan item obat yang di usulkan tidak sesuai dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) Rumah Sakit Ujung Gading, sehingga dilakukan pengusulan di perubahan anggaran tahun 2022. 2. Harga di pihak ke tiga di aplikasi e-katalog masih pajak 10%, sedangkan kebijakan tahun 2022 pajak sudah 11%. Pihak ketiga akan mengajukan total tagihan pajak 11% (berbeda dengan total harga di e-katalog). 3. Setelah dilakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga, pihak ketiga menolak karena quantity (jumlah) masing-masing obat yang mau dibelanjakan sedikit.	Operasional Rumah Sakit Ujung Gading akan dicover oleh Pengadaan Obat Kabupaten Tahun 2022, karena status Rumah Sakit berubah menjadi FKTP.
Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp.1.604.842.935	Rp.258.894.782	Pelayanan Pengobatan Gratis di FKTP/Puskesmas belum maksimal dimanfaatkan masyarakat.	Tahun 2023 telah diberlakukan UHC (Universal Health Corporate) di Kabupaten
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	Rp. 61.686.461	Rp.86.756.000	Perjalanan dinas tidak terealisasi sepenuhnya karena structural dan operasional Labkesda secara resmi baru ada dibulan November 2022	Menyesuaikan rencana kegiatan dengan pelaksaan kegiatan di DPA

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD IFK)	Rp.39.074.400		Perjalanan dinas penjemputan vaksin yang tidak bisa dilakukan terjadwal karena tergantung pada ketersediaan vaksin di provinsi kadang bisa 2 kali dalam sebulan ketidakstabilan harga bbm membuat ketersediaan anggaran berkurang	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.497.438.000	Rp.16.794.250	Surveior tidak melaksanakan survei akreditasi terhadap 11 FKTP karena Komisi Akreditasi FKTP tidak mengeluarkan Surat Perintah Tugas sehubungan belum dicabutnya status pandemic nasional.	Kementerian Kesehatan mengeluarkan Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/652/ 2022 tentang Penyelanggaraan Perizinan berusaha bidang Pelayanan Kesehatan.
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp.25.000.000	Rp.24.510.650	Tidak ada masalah	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.117.497.020	Rp.32.196.125	Pelaksanaan kegiatan PSC belum sesuai dengan PMK Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu	Kegiatan yang bisa dilakukan P3 K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp.14.226.000	Rp.3.500.000		
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp.14.226.000	Rp.3.500.000	Untuk perjalanan dinas pada subkegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBN, sehingga belanja perjalanan dinas tdk terealisasi.	Adanya sinkronisasi antara Dinkes Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegitan SIK, agar tidak overlapping dlm penganggaran
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.0	Rp.0	Kegiatan ini merupakan pengadaan Sistem Informasi yang bersumber DAK, namun pada awal April muncul Surat Edaran dari Kemendagri tentang nomenklatur kegiatan yang mengharuskan pada subkegiatan Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan Kesehatan, sehingga subkegiatan ini menjadi 0	Kemenkes sebaiknya mengeluarkan edaran tentang nomenklatur subkegiatan agar tidak terjadi pergeseran subkegiatan di tahun berjalan, karena akan menghambat kegiatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.87.358.878	Rp.85.137.300		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp.87.358.878	Rp.85.137.300	Tidak ada masalah pada sub kegiatan.	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 257.240.000	Rp.55.023.400		
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Rp.16.065.000**	Rp.13.450.000		Adanya pengecualian untuk Kegiatan survey ini untuk tahun yang akan datang,kalau memang masih ada survey hendak nya msh bisa di naikkan SPJ nya
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp.16.065.000	Rp.13.450.000	Karna kegiatan turun survey perizinan di atas tanggal 15 desember 2022 sudah tidak bisa di SPJ kan lagi,sementara kegiatan survey Perizinan di lakukan sesuai permohonan yang kita terima dari Dinas DPMPTSP	Adanya pengecualian untuk Kegiatan survey ini untuk tahun yang akan datang,kalau memang masih ada survey hendak msh bisa di naikkan SPJ nya
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.128.675.000	Rp.31.898.400		

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.7.665.000	Rp.3.910.000		Di sediakan mobil Dinas yang masih bagus agar kegiatan ke lapangan bisa di laksanakan.
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp.121.010.000	Rp.27.988.400	1.Tidak ada pencairan Insentif Covid 19 karna sudah tidak ada lagi Kasus yang di danai dengan anggaran yang sudah di anggarkan. 2. tidak terlaksananya Rekrutmen Tenaga Perawat Jorong	Regulasi perekrutan tenga NON ASN harus lebih jelas sehingga dana yang sudah di alokasikan bisa di pergunakan sebagaimana mestintya
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.500.000	Rp.9.675.000		
Pengembagan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.500.000	Rp.9.675.000	Transportasi tim penguji tidak bisa di spjkan karna letak nya di entrain SIPD perjalanan dinas Biasa, setelah di pindahkan waktu pergerseran pengelola keuangan tidak ACC lagi untuk di naikkan SPJ yang sudah lewat kegiatannya dan mereka lupa memasukkan dalam rekap yang akan di cairkan sehingga dana nya tidak cukup	Lebih hati-hati lagi dalam pengentrian di SIPD agar tidak ada permasalahan lagi saat pencairan untuk kegiatan UKOM tersebut.
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.359.017.500	Rp.228.466.650		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Rp.63.258.000**	**Rp.54.548.650**		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.63.258.000	Rp.54.548.650	Bimbingan teknis pada penanggung jawab 2 sarana UMOT tidak terlaksana karena 1 umot tidak beroperasional dan 1 umot masih berproses dalam pembuatan rumah produksi	Melakukan pembinaan kepada 1 umot yang masih berproses
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Rp.50.000.000**	Rp.23.309.500		
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatn Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp.50.000.000	Rp.23.309.500	Perjalanan dinas pada subkegiatan ini dibiayai oleh APBD, sehingga belanja perjalanan dinas tdk terealisasi.	Adanya sinkronisasi antara Dinkes Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegitan SIK, agar tidak overlapping dlm penganggaran
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Rp.121.390.000**	**Rp.101.525.500**		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.121.390.000	Rp.101.525.500	Kelebihan anggaran adalah perjalanan dinas dan BBM disebabkan karena Perjalanan dinas dilaksanakan untuk penerbitan izin IRTP (SPP-IRT) sesuai dengan permohonan perizinan IRTP yang masuk/diajukan oleh pelaku usaha	Tidak ada kendala kegiatan, kelebihan anggaran adalah perjalanan dinas dan BBM disebabkan karena Perjalanan dinas dilaksanakan untuk penerbitan izin IRTP (SPP-IRT) sesuai dengan permohonan perizinan IRTP yang masuk/diajukan oleh pelaku usaha
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp.17.217.500	Rp.4.087.500		
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertfikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Rp.17.217.500	Rp.4.087.500	Kegiatan diprogram ini berkaitan dengan keberadaan labkesda,sementara labkesda pasaman barat baru diresmikan tanggal 11 November 2022.	Berkoordinasi dengan bagian organisasi tentang kendala rekomendasi labkes dari propinsi yang belum keluar.

URAIAN Subkegiatan	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp.107.152.000	Rp.44.995.500		
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp.107.152.000	Rp.44.995.500	Ada beberapa IRTP yang dikunjungi sudah tidak operasional dan tidak ada ditempat Parameter pengujian sampel tidak semua dipenuhi karena tidak tersedianya atau keterbatasan uang muka untuk pengujian sampel namun target fisik sampel terpenuhi	Update data IRTP Tersedia uang muka untuk pengujian sampel

Sumber : Laporan LKPJ Dinas Kesehatan Tahun 2022

2.1.1.c Sasaran : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang ketiga adalah Meningkatnya perann serta masyarakat dalam perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yang akan dicapai. Analisis Kinerja Sasaran Strategis berikut dengan indikator kinerja :

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Uraian ini menjelaskan tentang capaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja pendukungnya tahun 2022, perbandingan realisasi terhadap target yang akan dicapai.

Tabel 2.1.21. Capaian Indikator Persentase RT ber PHBS Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70%	50,25	71,79

Indikator Persentase Rumah Tangga ber PHBS merupakan Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi Jumlah Seluruh Rumah Tangga dikali 100%.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Rumah Tangga ber PHBS di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 berdasarkan hasil pengumpulan data pada saat kunjungan rumah tangga yang dipantau yaitu sebesar 50.25%. Pada tahun 2022 rumah tangga yang dipantau adalah sebanyak 57.410 dari 99.438 Rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemantauan tersebut didapatkan 22.567 Rumah tangga yang ber-PHBS.

Rumah Tangga dikatakan berprilaku Hidup Bersih dan Sehat ketika sudah melaksanakan dan memenuhi 10 indikator dalam PHBS. Namun di Masyarakat ada beberapa indikator yang masih sulit untuk dicapai atau dipenuhi diantara Tidak ada anggota keluarga yang merokok, makan buah dan sayur setiap hari serta melakukan aktifitas fisik. Petugas telah melakukan intervensi melalui penyuluhan kepada masyarakat, namun untuk melaksanakan ke 10 indikator ini masih kurang. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya cakupan rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.1.22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Per Indikator Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

NO	PUSKESMAS	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA YG DIPANTAU	% DIPANTAU	RUMAH TANGGA BER-PHBS	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		5	6
1	Sungai Beremas	5.661	5.202	92	1.788	34,37
2	Ranah Batahan	6.894	3.474	100	2.084	106,99
4	Koto Balingka	7.066	5.037	71	1.862	36,97
5	Lembah Melintang	11.416	2.990	45	1.384	74,46
7	Gunung Tuleh	2.623	5.974	21.616	2.674	85,28
8	Sungai Aur	8.005	8.005	100	3.612	45,12
10	Kinali	16.570	7.832	160	5.137	199,02
13	Talamau	7.907	3.861	90	2.532	129,92
15	Sasak	3.170	1.431	45	730	51,01
16	Luhak Nan Duo	11.582	5.092	44	1.956	38,41
17	Pasaman	18.544	8.512	202	3.591	203,48
		99.438	57.410	22.567	27.350	1.005
					Persentase RT ber PHBS	**50,25**

Sumber : Data Olahan Seksie Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Rumah tangga yang dipantau dan yang merupakan rumah tangga ber PHBS di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasmaan Barat Tahun 2022.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2021

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun sebelumnya dengan tahun 2022.

Tabel 2.1.23. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Pada Sasaran Strategi Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersi dan Sehat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70	42,48	60,69	70%	50,25	71,79	0	7,77	11,1

Jika dilihat dari tabel diatas perbandingan antara capaian persenstase RT ber PHBS dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,77%. Namun demikian, capaian ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan (70%).

Untuk melihat perkembangan Persenstase Rumah Tangga ber PHBS di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 dan Grafik 5 di bawah ini:

Tabel 2.1.24. Pesentase Rumah Tangga ber-PHBS Tahun 2020 s.d 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022
1	*2*	*4*	*5*
1	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	42.48	50.25

Grafik 5. Pencapaian Persentase RT ber-PHBS Kabupaten Pasaman Barat

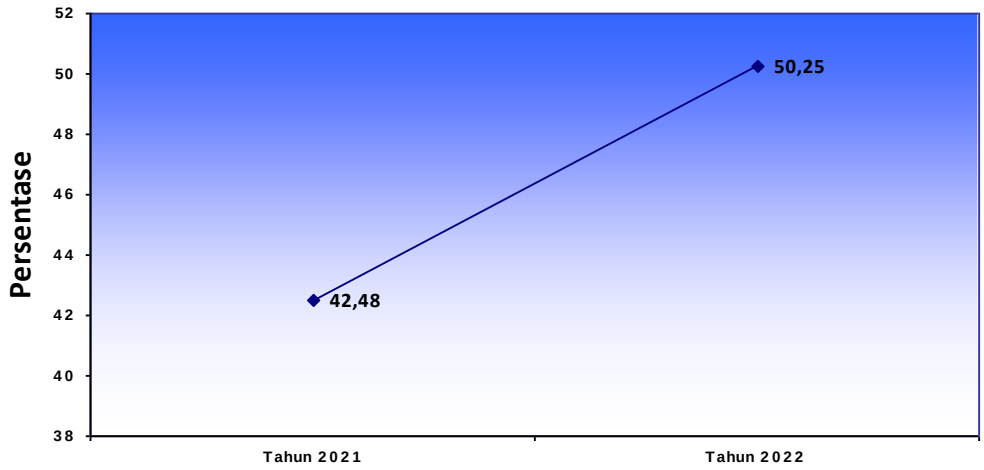

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas persentase RT ber PHBS mengalami naik turun, dan terjadi peningkatan capaian di tahun 2022 sebesar 50,25% dari tahun sebelumnya 42,48%. Hal ini disebabkan karena dinas Kesehatan dan jejaringnya di puskesmas sudah mengambil Langkah intervensi dalam melakukan pelatihan metode penyuluhan PHBS efektif kepada petugas dan membentuk kader PHBS di setiap jorong sebagai perpanjangan tangan petugas Kesehatan dalam upaya peningkatan rumah tangga ber PHBS. Kedua upaya intervensi ini merupakan upaya yang saling berkaitan. Pelatihan bagi kader dan petugas Promosi Kesehatan untuk meningkatkan petugas yang inovatif dalam penyuluhan dan komunikasi efektif dan pembentukan kader PHBS agar pendataan rumah tangga dapat berjalan optimal serta mengaktifkan kembali kegiatan Desa/Nagari siaga di setiap kejorongan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan

Pada Uraian ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2022 dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan pada Sasaran Startegis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70%	50,25	71,79	Akan tercapai, butuh perbaikan dan inovasi

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Perilaku Fidup Bersih dan Sehat, jika disandingkan dengan taget pada Renstra Dinas kesehatan tahun 2021-2026 masih belum mencapai target, artinya Dinas Kesehatan harus melakukan perbaikan dan Menyusun strategi ulang untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Rumah Tangga dikatakan berprilaku Hidup Bersih dan Sehat ketika sudah melaksanakan dan memenuhi 10 indikator dalam PHBS. Namun di Masyarakat ada beberapa indikator yang masih sulit untuk dicapai atau dipenuhi diantaranya tidak ada anggota keluarga yang merokok, makan buah dan sayur setiap hari serta melakukan aktifitas fisik. Petugas telah melakukan intervensi melalui penyuluhan kepada masyarakat, namun untuk melaksanakan ke 10 indikator ini masih kurang. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih belum tercapainya target cakupan rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.

D. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada uraian ini menjelaskan tentang penyebab peningkatan Kinerja serta alternatif yang sudah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2022. Dinas Kesehatan sudah mengklasifikasikan kedalam skala pengukuran kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.26. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)					
	Target Indikator Kinerja Sasaran (Output) (Indikator)	Sangat Tinggi (≥90,1%) (indikator)	Tinggi (75,1≤90%) (indikator)	Sedang (65,1 ≤ 75%) (indikator)	Rendah (50,1 ≤65%) (indikator)	Sangat Rendah (≤50%) (indikator)
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	-	-	1	-	-

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja pada sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam PHBS masuk kedalam skala pengukuran dengan kriteria sedang sebesar 71,79%.

Untuk melihat analisis penyebab rendahnya Capain rumah tangga ber PHBS di Kabupaten Pasaman Barat antara lain :

1. *Man* (Manusia)

   a. Perbedaan persepsi petugas tentang lingkup aktifitas fisik
      Beraktifitas fisik yang dimaksud dalam PHBS tidak hanya melakukan olahraga saja, namun kegiatan rumah tangga seperti mencuci, menyiram bunga, menyapu dan lainnya juga sudah termasuk dalam aktifitas fisik. Ada yang mengkategorikan aktifitas fisik itu hany olah raga saja sehingga pencapaian indikator ini tidak valid

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untu ber- CTPS
   Cuci tangan pakai sabun (CTPS) belum membudaya dikalnagan masyarakat. Usaha intervensi sudah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan,namun penerapan prilaku ini masih rendah. CTPS hendaknya diterapkan minimal sebelum makan, setelah buang air besar (BAB), dan sebelum menyusui anak. Namun kenyataan dilapangan kebanyakan masyarakat hanya mencuci tangan sebelum makan dan tanpa menggunakan sabun

c. Kebiasaan merokok yang sulit dihilangkan
   Bahaya merokok sudah diketahui oleh masyarakat secara umum, namun tetap saja perilaku ini masih sulit dihilangkan. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini adalah faktor sosial budaya, faktor psikis yang menganggap rokok dapat menimbulkan inspirasi, menghilagkan stres dan zat nikotin yang menyebabkan kecanduan bagi perokok. Walaupun Sudah Ada Peraturn Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tapi dalam penerapannya belum ada.

d. Anggapan Masyarakat bahwa sayur dan Buah hanya sebagai makanan pelengkap.Anggapan ini mengakibatkan keluarga merasa tidak perlu setiap hari makan buah dan sayur, sehingga konsumsi pangan ini masih rendah di masyarakat
e. Beban Kerja Petugas yang tinggi

   Dengan banyaknya beban pekerjaan dan program di Puskesmas sehingga untuk pembinaan ke rumah tangga terkait PHBS belum bisa dilaksanakan secara maksimal

f. Masih kurangnya inovasi dari petugas Kesehatan untuk pencapaian PHBS

2. *Methode* (Metode)

   a. Pendataan kerumah hanya dilaksanakan sekali setahun
   b. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
   c. 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan
   d. Belum semua puskesmas melaksanakan therapy Upaya Berhenti Meroko
   e. Metode Penyuluhan kepada masyarakat yang masih menonto dan belum
   f. mampu menarik masyarakat dalam upaya perubahan perilaku
   g. Kurangnya Inovasi dari petugas
   h. Untuk merubah perilaku masyarakat diperlukan cara-cara yang efektif. Untuk itu dituntut inovasi petugas dalam usaha merubah perilaku masyarakat agar ber-PHBS

3. *Money* (dana)
   Masih kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan Rumah Tangga ber- PHBS

4. *Environment* (lingkungan)
   a. Tradisi menyediakan tempat cuci tangan di meja makan
   b. Tradisi makanan yang tinggi lemak dan kurang serat dan sayuran
   c. Kurangnya perhatian dan dukungan dari pihak terkait
      Seperti Membiarkan anggota keluarga merokok, serta masih kurangnya penerapan Perda KTR khususnya mengenai sanksi pelanggaran Perda

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan efesiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis yang terletak pada Program Pemberdayaan Masyarakat. Pagu anggaran dan realisasi untuk mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam PHBS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.27. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Strategis Meningkatnya peran serta masyarakat dalam PHBS Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Tahun 2022 (Kinerja)			Tahun 2022 (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingak Efisisensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	70%	50,25	71,79	203.334.000	155.013.250	76,24	4,45

Sumber : Data Olahan Subbag PIH Tahun 2022

Dengan persentase capaian indikator pada Sasaran Strategis diatas adalah 71,79%, sumberdaya yang digunakan terealisasi sebesar 76,24% atau Rp. 155.013.250,- dari Rp. 203.334.000 dengan tingkat efiensi 4,45%.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama maka sesuai Renstra Dinas Kesehat tahun 2021 – 2026 maka disusun program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja tersebut. Berikut ini adalah uraian yang mendukung atau menghambat indikator pada Sasaran Meningkatnya Peran Serta dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2022 :

Tabel 2.1.28. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022

URAIAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.203.334.000	Rp.155.013.250		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.178.334.000**	Rp.136.649.250		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.178.334.000	Rp.136.649.250	Tidak ada kendala kegiatan, kelebihan anggaran pada paket meeting.	Menyesuaikan anggaran untuk setiap kegiatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif **Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp.25.000.000**	**Rp.18.364.000**		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp.25.000.000	Rp.18.364.000		
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.160.908.000		Kenaikan harga BBM mengurangi volume perjalanan dinas	

Sumber : Data LKPJ Dinas Kesehatan Tahun 2022

2.1.2 RSUD Pasaman Barat

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Pasaman Barat. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.29 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022			
		Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Aktreditasi Rumah Sakit	Tingkat penilaian akreditasi	Tk.Madia	TK. Perdana	0 %

No	Indikator Kinerja	2022			
		Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
2	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	-	-	-
3	Persentase ketersediaan sarana/ prasarana Rumah Sakit	%	100%	73,11 %	73 %
4	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Tingkat penilaian SAKIP	cc	-	0%

Grafik 6. Pencapaian IKU
RSUD Pasaman Barat Tahun 2022

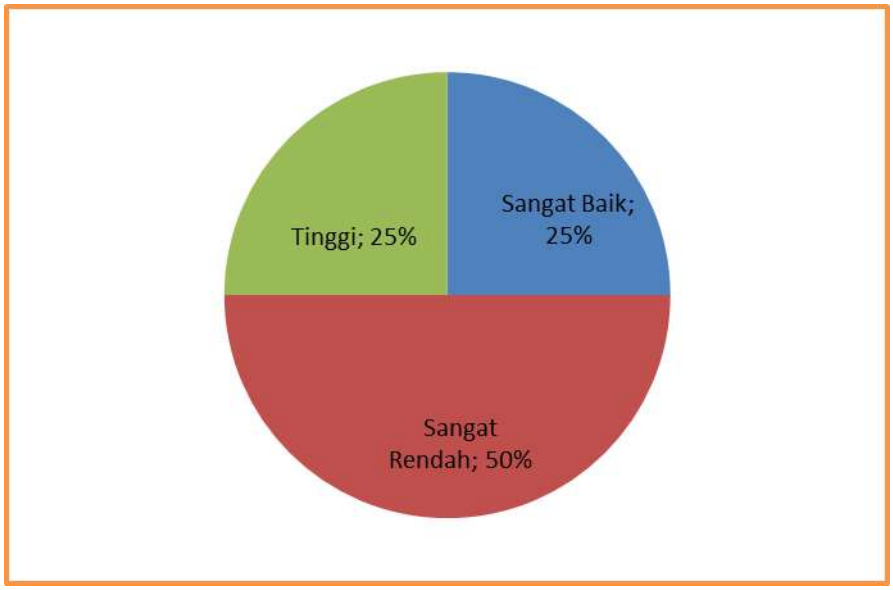

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 indikator kinerja utama RSUD Pasaman Barat tahun 2022, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran atau sebanyak 25.% dalam kriteria Sangat Baik, bahkan realisasi mencapai lebih dari 100%. dan ada 1 (satu) masuk dalam kriteria Tinggi/ 25 % sedangkan ada 2 indikator Sangat Rendah atau sebanyak 50 %.

IKU yang masuk kriteria sangat baik dari target yang ditetapkan yaitu indikator kinerja :

1. Persentase ketersediaan sarana/ prasarana Rumah Sakit

Sedangkan IKU yang masuk kriteria Sangat Rendah yaitu IKU :

1. Akreditasi Rumah Sakit
2. Nilai SAKIP oleh Inspektorat

Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

A. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya di RSUD Pasaman Barat dalam memberikan pelayanan

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.30. Capaian Akreditasi Rumah Sakit

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% cap
1	Aktreditasi Rumah Sakit	Lulus Tk.Dasar / Perdana	Paripurna	Tk. Dasar	0 %
2	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	-	-	-	-
3	Persentase ketersediaan sarana/ prasarana Rumah Sakit	69,11 %	100%	73,11 %	73 %

Untuk Akreditasi Rumah Sakit tahun 2022 telah dilakukan survey akreditasi di akhir bulan Desember 2019, dan penilaian Akreditasinya direncanakan dibulan September 2020, karena adanya Bencana Non Alam (covid-19) dan belum bisa diprediksi Penilaian Akreditasi dapat dilakukan pada tahun ini. Sampai wabah covid ini menghilang.

Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes No. 129/ Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dari 21 unit pelyanan yang ada di Rumah Sakit dengan 91 Indikator penilaian baru 53 Indikator ynag memenuhi standar atau 58,24 %.

Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola rumah sakit yang mandiri dan akuntabel

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2018	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% cap
1	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	-	cc	-	0%

Untuk indikator Nilai SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2018 sampai tahun 2022 ini belum terlaksana penilaian pada indikator ini, mudah – mudahan kedepanya akan ada pelaksanaan penilaian indikator sehingga ada perbaikan Laporan Kinerja pada masing masing OPD di Kab.Pasaman Barat.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 RSUD Pasaman Barat didukung anggaran APBD sebesar Rp. 19.273.123.513,- dan Anggaran BLUD sebesar : Rp. 70.131.644.082,- dengan total anggaran sebesar : Rp. 89.404.767.595,- dengan Jumlah realisasi penarikan dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 17.574.019.049,- dan realisasi BLUD sebesar: Rp. 64.858.872.735,35, - dan total realisasi sebanyak : Rp. 82.432.891.784,- atau sebesar 92,20 % Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 jumlah realisasi anggaran tahun 2022 lebih tinggi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2021	110.739.245.051	97.094.868.025	87,68 %	13.644.377.026,-
2	2022	89.404.767.595	82.432.891.784	92,20 %	6.971.875.810,38,-
selisih		21.334.477.456,-	14.661.976.241,-	68,72%	6.672.501.216,-

Rincian Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja	**89.404.767.595**	**82.432.891.784**	**92,20**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**16.250.407.313**	**14.802.047.264**	**91,09**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.592.469.237**	**13.299.899.644**	**91,69**
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	14.115.689.237	12.874.264.644	91,21
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	476.780.000	425.635.000	89,27
B	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**38.200.000**	**38.200.000**	**100**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	38.200.000	38.200.000	99,23
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**160.331.250**	**59.902.800**	**37,36**
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	**160.331.250**	**59.902.800**	**37,36**
D	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.459.406.826,13**	**1.404.044.820**	**96,21**

1	Penyedia Jasa Komonikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik	857.506.826,13	813.194.820	94,83
2	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.900.000	590.850.000	98,16
II	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYRAKAT**	**70.767.660.282**	**65.316.537.261**	**92,30**
A	**Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**474.850.000**	**374.172.026**	**78,80**
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64.529.000	63.500.000	98,41
2	Pengadaan Obat,Vaksin	177.450.000	163.800.000	92,31
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	155.521.000	69.522.026	44,70
4	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77.350.000	77.350.000	100
B	**Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**70.292.810.282**	**64.942.365.235**	**92,39**
1	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana / atau berpotensi bencana	161.166.200	83.492.500	51,81
2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	70.131.644.082	64.858.872.735	92,48
III	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN***	**2.386.700.000**	**2.314.307.259**	**96,97**
1	**Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten / Kota**	**2.386.700.000**	**2.386.700.000**	**96,97**
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.386.700.000	2.386.700.000	96,97

2.1.2 RSUD Pasaman Barat

(T-C. 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Pasaman Barat s.d. Tahun 2022 Kabupaten Pasaman Barat

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
						URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN										
	1	2	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**100%**	**90,73%**	**90,73%**	**100%**	**14.357.586.916**	73,91%	100%
	1	2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN**	**100%**		**100%**	91,38	91,38%	**100%**	**12.700.648.840**	75,84%	100%
	1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	1. 235 PNS 2. 20 PPPK		1. 185 PNS	**181 PNS**	**97,53%**	1. 232 PNS 2. 5 PPPK	12.223.868.840	1. 179 PNS 2. 4 PPPK	1. 232 PNS 2. 5 PPPK

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Non PNS (PTT) yang melaksanakan tugas administrasi keuangan 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas administrasi keuangan 3. Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	1. 2 orang 2. 10 orang 3. 12 Bulan		1. 1 orang 2. 10 orang 3. 12 Bulan	1. 1 orang 2. 10 orang 3. 12 Bulan	99,23%	1. 2 orang 2. 10 orang 3. 12 Bulan	476.780.000	1. 1 orang 2. 7 orang 3. 9 Bulan	1. 2 orang 2. 10 orang 3. 12 Bulan
	1	2	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peragkat Daerah**	100%		**100%**	**99,23%**	99,23%	**100%**	**37.200.000**	62,23%	**100%**
	1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyediaan honorarium Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	12 bulan		12 bulan	12 bulan	99,23%	12 bulan	37.200.000	9 bulan	12 bulan
	1	2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%		-	-	-	-	-		

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang dapat disediakan untuk aparatur	235 Stel		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam / tahun	18 orang		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	22 Orang		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	-	-	**100%**	**160.331.250**	25,60%	**100%**

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	65 unit		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah ATK yang dibutuhkan 2. Jumlah pengadaan peralatan penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran 3. Penyediaan materai dan benda pos lainnya	2 unit		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah amplop dan map RSUD Pasaman Barat yang dibutuhkan	4600 lembar		-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah undangan rapat koordinasi yang diikuti	20 keg		-	-	-	20 keg	160.331.250	25,60%	20 keg
	1	2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Sarana Dan Prasarana perangkat daerah**	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/Jabatan	1 unit								
	1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor dan administrasi RS	1 unit								
	1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dibutuhkan untuk operasional administrasi perkantoran	68 unit								
	1	2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**81,13%**	81,13%	**100%**	**1.459.406.826**	63,07%	**100%**
	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan		12 bulan	9 bulan	74,56%	12 bulan	857.506.826	9 bulan	12 bulan

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Non PNS (PTT) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Non PNS (THL) penunjang administrasi perkantoran	1. 3 Orang 2. 23 Orang		1. 4 Orang 2. 23 Orang	1. 4 Orang 2. 23 Orang	99,97%	1. 3 Orang 2. 23 Orang	601.900.000	1. 2 Orang 2. 16 Orang	1. 3 Orang 2. 23 Orang
	1	2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik perangkat daerah**	**100%**								
	1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1.13 Unit 2. 13 Unit								
	1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	1. 10 Unit 2. 10 Unit								

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	55 Unit								
	1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**	**100%**		**100%**	**87,44%**	87,44%	**100%**	**48.992.173.674**	81,66%	**100%**
	1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit**	**100%**		**100%**	**86,90%**	86,90%	**100%**	**2.160.720.000**	7,53%	**100%**
	1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya pekerjaan pembangunan RS	4 Paket								

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah pengadaan mobil ambulance transport RS 2. Jumlah pengadaan mobil donor darah RS 3. Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga RS 4. Jumlah pengadaan sarana pengolahan limbah RS 5. Jumlah pengadaan ATK RS 6. Jumlah Belanja pengadaan komputer kegiatan penunjang RS 7. Jumlah Belanja pengadaan printer kegiatan penunjang RS 8. Jumlah Belanja cetak dan penggandaan RS 9. Jumlah penggandaan Mebel RS	1. 9 Unit 2. 24 Paket		1. 2 Unit 2. 259 unit/bh/paket 3. 1 Paket	1. 2 Unit 2. 259 unit/bh/paket 3. 1 Paket	**98,28%**	1. 238 Unit 2. 10 set 3. 28 Paket	-		1. 238 Unit 2. 10 set 3. 28 Paket
	1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RS	460 unit/4 Paket		27 Set /166 Unit	22 Set	**85,15%**	531 unit/ 23 set	64.529.000	**0**	531 unit/ 23 set

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS 2. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS	1. 15 Orang 2. 12 Paket		1. 15 Orang 2. 4 Paket	1. 15 Orang	**100%**	1. 15 Orang 2. 12 Paket	177.450.000	1. 11 Orang 2. 0 Paket	1. 15 Orang 2. 12 Paket
	1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan Bahan Habis Pakai dan perbekalan kesehatan RS	12 Paket		-	-	-	12 Paket	155.521.000	0	12 Paket
	1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan 2. Pemeliharaan sarana pelayanan RS	1. 3 Orang THL 2. 20 Kegiatan		1. 3 Orang THL 2. 20 Kegiatan	1. 3 Orang THL	100%	1. 3 Orang THL 2. 20 Kegiatan	77.350.000	1. 2 Orang THL 2. 0 Kegiatan	1. 3 Orang THL 2. 20 Kegiatan
	1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan gedung dan bangunan, serta prasarana pendukung fasilitas pelayanan RS	21 Kegiatan		-	-	-	21 Kegiatan	-		21 Kegiatan
	1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan alat kesehatan dan Alat Penunjang Medik RS	35 Kegiatan		-	-	-	35 Kegiatan	-		35 Kegiatan

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RS sesuai Standar**	**100%**		**100%**	**87,78%**	**87,78%**	**100%**	**70.131.644.082**	87,08%	**100%**
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pemeriksaan lingkungan RS	16 Kegiatan		-	**-**	**-**	1. 44 Kegiatan 2. 1 Set	-		1. 44 Kegiatan 2. 1 Set
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pasien tidak mampu yang dirawat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	65 Orang		-	**-**	**-**	65 Orang	-		65 Orang
	1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan BLUD RS	100%		**100%**	**90,34%**	**90,34%**	100%	70.131.644.082	87,50%	100%
	1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan standar pelayanan kesehatan di RS	50 Kegiatan		-	**-**	**-**	76 Kegiatan	-		76 Kegiatan
	1	**2**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan RS**	**100%**		**100%**	**-**	**-**	**100%**	**-**		**100%**

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit	2 Orang THL		-	-	-	2 Orang THL	-		2 Orang THL
	1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit	1 Paket		1 Paket	-	-	1 Paket	-		1 Paket
	1	2	3			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**	**55**		**35**	**82,89%**	82,89	**45**	**2.386.700.000**	34%	**45**
	1	2	3	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang telah sesuai dengan standar**	**210 orang**		**145 orang**	**120 Orang**	82,89	**203 orang**	**2.386.700.000**	152 Orang	**203 orang**

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(8/7)*	*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1. Jumlah Non PNS (PTT) yang melaksanakan tugas pelayanan tindak medik dan penunjang medik RS 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pelayanan tindak medik dan penunjang medik RS	1. 2 Orang PTT 2. 143 Orang THL		1. 2 Orang PTT 2. 143 Orang THL	1. 2 Orang PTT 2. 143 Orang THL	82,89	**1. 2 Orang PTT 2. 143 Orang THL**	**2.386.700.000**	**1. 1 Orang PTT 2. 107 Orang THL**	**1. 2 Orang PTT 2. 143 Orang THL**
	1	2	3	2		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bermutu dan berkompetensi kesehatan sesuai standar**	**65 Orang**		**56 Orang**	**-**	**-**	**58 Orang**	**-**		**58 Orang**
	1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengikuti pelatihan/ Bimtek	65 Orang		56 Orang	-	-	58 Orang	-		58 Orang

Berdasarkan Tabel Rekaputulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaan Renja RSUD Pasaman Barat Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra RSUD Pasaman Barat Tahun 2022 adalah :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2021 pada umumnya semua program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan baik realisasi secara fisik maupun realisasi secara keuangan. Persentase dari pencapaian realisasi pada program/kegiatan memang masih belum mencapai 100% seperti yang diharapkan. Seperti program penunjang urusan pemerintah daerah angka realisasi programnya adalah 90,73% untuk kegiatan yang paling tinggi realisasinya adalah 99,23% pada kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan realisasi yang paling rendah adalah 81,13% pada kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat realisasi nya adalah 87,44% dengan realisasi paling tinggi 87,78 % pada kegiatan penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah dan realisasi paling rendah adalah 86,90% pada kegiatan Penyedia Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah. Dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan realisasi nya adalah 82,89% dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota.

   Sedangkan untuk program kegiatan pada tahun 2022 realisasi Program penunjang urusan pemerintah daerah pada triwulan 3 adalah 73,91% dengan realisasi paling tinggi adalah 75,84% pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan realisasi paling rendah adalah 25,60% pada kegiatan administrasi umum peranngkat daerah. Untuk program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat realisasi nya adalah 81,66% dengan realisasi paling tinggi 85,08 % pada kegiatan penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah dan realisasi paling rendah adalah 7,53% pada kegiatan Penyedia Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah. Dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan realisasi nya adalah 34% dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada tahun 2021 dimana semua program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti sehingga semua tujuan dari target kinerja dapat dicapai dengan baik. Sedangkan untuk tahun 2022 permasalahan yang ada belum bisa disimpulkan karena masih berada pada triwulan 3 saat penyusunan renstra ini. Dan untuk kegiatan yang telah direncakan sebelumnya tetapi tidak mendapatkan dukungan dana dari APBD, maka hal ini tentunya akan menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Pasaman Barat.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah pada tahun 2021 dimana capaian program lebih rendah dari hasil yang diharapkan pada renstra sehingga target capaian program renstra belum tercapai secara maksimal. Begitupun halnya dengan target capaian pada tahun 2022, banyaknya kegiatan yang tidak didanai oleh APBD sehingga akan terhambat untuk pencapaian target program dan kegiatan tersebut.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi belum tercapainya target capaian program adalah pentingnya advokasi dan komunikasi terhadap kebijakan dan anggaran kepada pemerintah daerah sehingga apa yang telah direncanakan dapat dicapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.2.1 Dinas Kesehatan

1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2021 dapat tergambar dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021. SPM mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. SPM kesehatan daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM saat ini mengalami perubahan dibanding konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target merupakan kinerja program kesehatan, sedangkan SPM saat ini pencapaian target-target menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4/MENKES/PER/I/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan program-program kesehatan untuk memenuhi standar minimal pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berikut uraian SPM bidang kesehatan tahun 2021 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM :

Tabel 2.2.1 (T-C.30) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)						Realisasi Capaian (%)			Proyeksi (%)			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*	*10*		*11*	*12*	*13*	*14*
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan ibu hamil	K4	100	100	100	100	100	100	62.32	58.6	59,51	59,51	100	100	
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayananan kesehatan ibu bersalin	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100	100	100	100	100	100	73.31	72.9	74,91	74,91	100	100	
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kunjungan bayi	100	100	100	100	100	100	73.0	95.1	78,82	78,82	100	100	
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan balita	Kunjungan Balita	100	100	100	100	100	100	61.0	70.0	89,18	89,18	100	100	
5	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pelayanan kesehatan anak SD dan SMP	100	100	100	100	100	100	73.8	27.8	45,96	45,96	100	100	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)						Realisasi Capaian (%)			Proyeksi (%)			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
6	Persentase usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Posbindu	100	100	100	100	100	100	24.86	12.14	18,19	18,19	100	100	
7	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan kesehatan lansia	100	100	100	100	100	100	13.0	49.6	11,54	11,54	100	100	
8	Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	8.7	3.3	22,19	22,19	100	100	
9	Persentase penderita DM usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	87,18	87,18	100	100	
10	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Pelayanan ODGJ	100	100	100	100	100	100	24.1	48.9	55,85	55,85	100	100	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)						Realisasi Capaian (%)			Proyeksi (%)			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
11	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	13.78	17,53	17,53	100	100	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang dengan risiko HIV yang dilayani	100	100	100	100	100	100	67.17	46.1	27,36	27,36	100	100	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (SPM)

Dalam pelaksanan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, dengan target indikator sebagai berikut:

Tabel 37. Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator SPM	Target (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100
11.	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*/ HIV)	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa standar pelayanan minimal bidang kesehatan mempunyai target Nasional 100% pada semua indikatornya.

Tabel 38. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	INDIKATOR – SPM	SASARAN (B)	REALISASI (A)	HASIL A/B (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	11.438	8.719	76,23
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	10.918	8.719	68,50
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	10.398	7.479	70,92
4	Pelayanan kesehatan balita	51.100	35.502	69,48
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	28.435	27.520	96,78
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	295.548	68.889	23,31
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	44.120	32.393	73,42
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	80.029	38.511	48,12
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	2.964	2.964	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	983	966	98,27
11	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	7.198	5.020	69,74
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*/ HIV)	12.507	11.338	90,65

Dari tabel realisasi SPM bidang kesehatan Tahun 2022, diketahui bahwa realisasi SPM Tahun 2022 belum ada yang mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk target tertinggi pada indikator pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus dengan realisasi sebesar 100% dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dengan realisasi 98,27%. Sedangkan Indikator yang paling rendah adalah indikator Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan realisasi 48,12% dan indikator Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan realisasi 23,31% .

Berdasarkan hasil perhitungan dan data yang didapat pada Tahun 2022 capaian indikator SPM masih belum mencapai target dikarenakan sasaran yang dipakai masih proyeksi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dengan jumlah penduduk sebesar 477.478 Jiwa, jika dibandingkan dengan Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat bersumber Disdukcapil sebesar 440.060 Jiwa, sehingga terdapat selisih sebesar 37.418 jiwa. Artinya pencapaian SPM dibidang Kesehatan akan sulit mencapai target 100% sesuai dengan permenkes no.4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada masing-masing indikator antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah setiap ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan oleh dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan, atau perawat dengan ketersediaan vaksin tetanus difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi resiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu dan buku KIA.

Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) yang sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan : satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga.

Standar kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi :

1. Pengukuran berat badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet
8. Tes laboratorium
9. Tata laksana/penanganan kasus
10. Temu wicara (konseling)

Indikator kinerja yaitu persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, yang dihitung dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

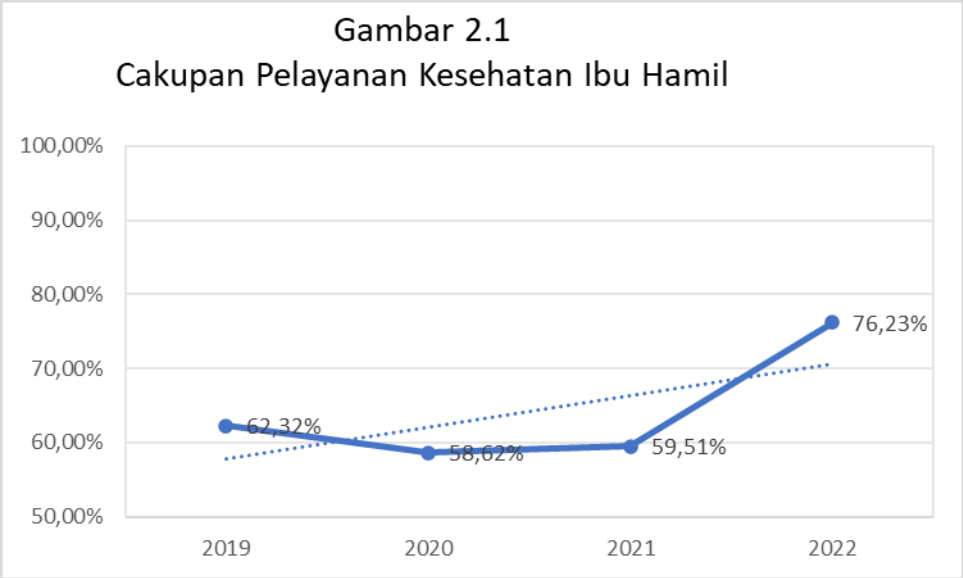

Selama 4 Tahun terakhir terjadi fluktuasi cakupan kunjungan ibu hamil K-4 yang trendnya mengalami kenaikan cakupan yaitu dari 59,51% pada Tahun 2021 menjadi 76,23%. Pada Tahun 2022 perkiraan jumlah ibu hamil di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 11.438 ibu hamil. Dari angka itu sebanyak 8.719 (76,23%) ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 4 kali (K4).

Rendahnya Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ini dikarenakan target sasaran yang digunakan adalah berdasar data proyeksi BPS. Sedangkan Ibu hamil yang terdata jauh dibawah sasaran tersebut. Beberapa hal lain yang juga menyebabkan rendahnya capaian ini antara lain :

a. Adanya rotasi dan mutase petugas/bidan di desa/jorong sebagai penangungjawab wilayah.
b. Pengawasan dan pembinaan dari tim puskesmas ke jejaring (bidan Desa dan Bidan Jorong) tidak terlaksana secara berkesinambungan.
c. Sarana dan prasarana petugas/bidan di desa/jorong tidak memadai.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabiupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi ketersediaan formulir partograf, kartu ibu (rekam medis), dan buku KIA. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dilakukan oleh dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, atau perawat.

Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam 1 tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) sesuai standar yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga penolong minimal 2 (dua) orang, terdiri dari :

1. Dokter dan bidan, atau
2. 2 (dua) orang bidan, atau
3. Bidan dan perawat.

Standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Indikator kinerja yaitu persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, yang dihitung dari jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.2
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

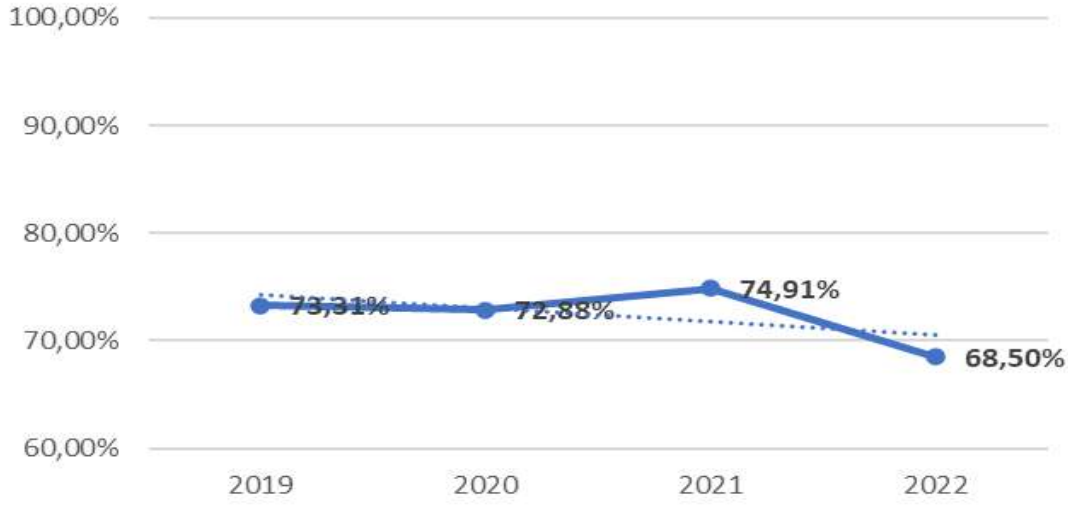

Pada Tahun 2022 perkiraan persalinan di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 10.918 persalinan. Dari angka tersebut terdapat 7.479 (68,50%) persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dari gambar 2.2 terlihat bahwa capaian Tahun 2022 menurun sebesar 6,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya capaian indikator ini paling dominan disebabkan sasaran ibu hamil yang terlalu tinggi (tidak sesuai dengan kondisi riil).

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan oleh dokter/dokter spesialis anak, bidan, atau perawat, yang dilengkapi dengan vaksin hepatitis BO,

vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotik, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM dan buku KIA.

Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkanm oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
b. Kunjungan neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
c. Kunjungan neonatal 3 (KN3) 8-28 hari

Standar kualitas pelayanan bayi baru lahir terdiri dari :

1. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), meliputi perawatan :
   a) Pemotongan dan perawatan tali pusat
   b) Inisiasi menyusui dini (IMD)
   c) Injeksi vitamin K1
   d) Pemberian salep/tetes mata antibiotik
   e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis BO)
2. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputiperawatan :
   a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
   b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
   c) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak difasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vit. K1
   d) Imunisasi hepatitis injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
   e) Penanganan dan kasus neonatal komplikasi.

Indikator kinerja yaitu persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yang dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.3
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

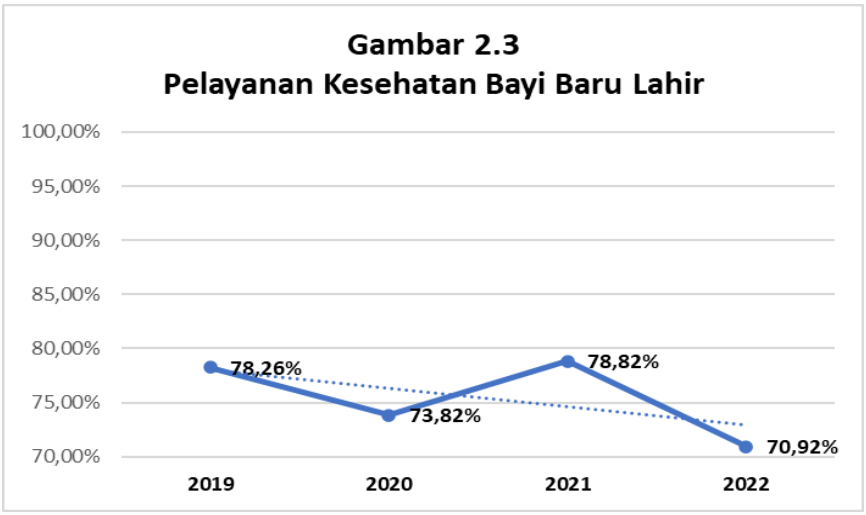

Terlihat dari gambar 2.3, tren cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir terlihat mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, dan cenderung menurun pada tahun 2022. Selama Tahun 2022 terdapat 7.374 bayi lahir hidup yang mendapat penanganan kesehatan bayi baru lahir, dari 10.398 sasaran bayi baru lahir pada Tahun 2022. Capaian Indikator ini cukup rendah dibanding target 100% capaian.

Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Bayi baru lahir riil jauh dibawah target sasaran berdasarkan sasaran sasaran pusdatin.
b. Petugas bidan desa/jorong tidak bekerja maksimal dikarenakan kapasitas/kompetensi bidan jorong belum memadai, dan terjadinya rotasi petugas dari yang lama ke petugas baru.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan balita dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan gizi) serta tenaga non kesehatan terlatih (guru PAUD dan kader kesehatan), yang dilengkapi dengan kuisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP dan peralatan anafilaktik.

Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan pertimbangan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

1. Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan :
   a) Penimbangan minimal 8 kali setahun
   b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
   c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
   d) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
   e) Pemberian imunisasi dasar lengkap
2. Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan :
   a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalamkurun 6 bulan)
   b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
   c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
   d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
   e) Pemberian imunisasi lanjutan.
3. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan :
   a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalamkurun 6 bulan).
   b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
   c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
   d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun

4. Edukasi dan informasi

Indikator kinerja adalah cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang dihitung dari jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar[1] + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar[2] + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar[3] dibagi dengan jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.4
Pelayanan Kesehatan Balita

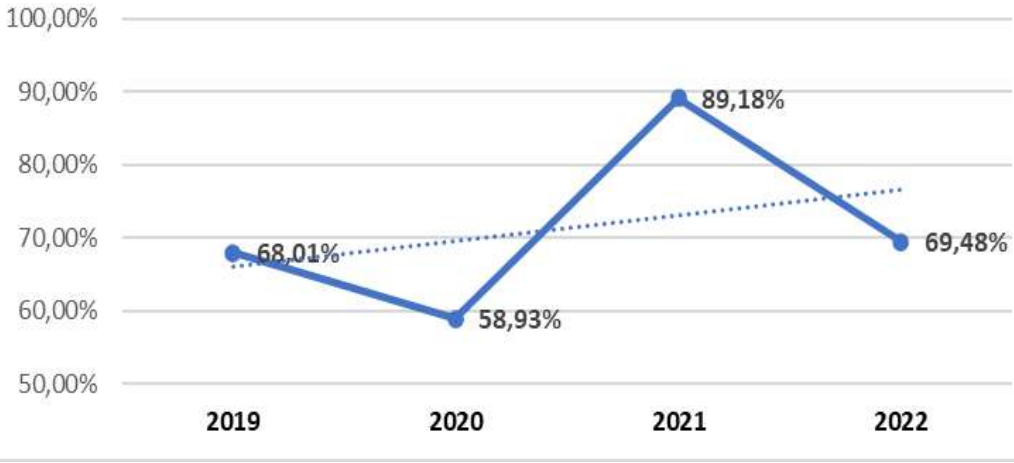

Selama Tahun 2022 terdapat 35.502 balita yang datang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari total target sasaran balita sebesar 51.100 balita (69,48%).

Terlihat dari tren, cakupan pelayanan kesehatan balita masih belum bisa mencapai target 100 %. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih kurangnya masyarakat untuk membawa anaknya ke Posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya dikarenakan situasi pandemi covid-19 selama Tahun 2020-2022. Ditambah dengan data sasaran yang tidak sesuai dengan jumlah riil Balita di Kab. Pasaman Barat.

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerjakabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Standar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (guru dan kader kesehatan/dokter kecil/*peer conselor*), dengan ketersediaan buku

rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah serta formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupatan/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan pertimbangan estimasi dari hasil survei/riset yang terjaminvaliditasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

1. Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi :

a. Penilaian status gizi
b. Penilaian tanda vital
c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut
d. Penilaian ketajaman indera

2. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :

a. Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
b. Melakukan rujukan jika diperlukan
c. Memberikan penyuluhan kesehatan

Indikator kinerja adalah persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satutahun ajaran.

Gambar 2.5
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

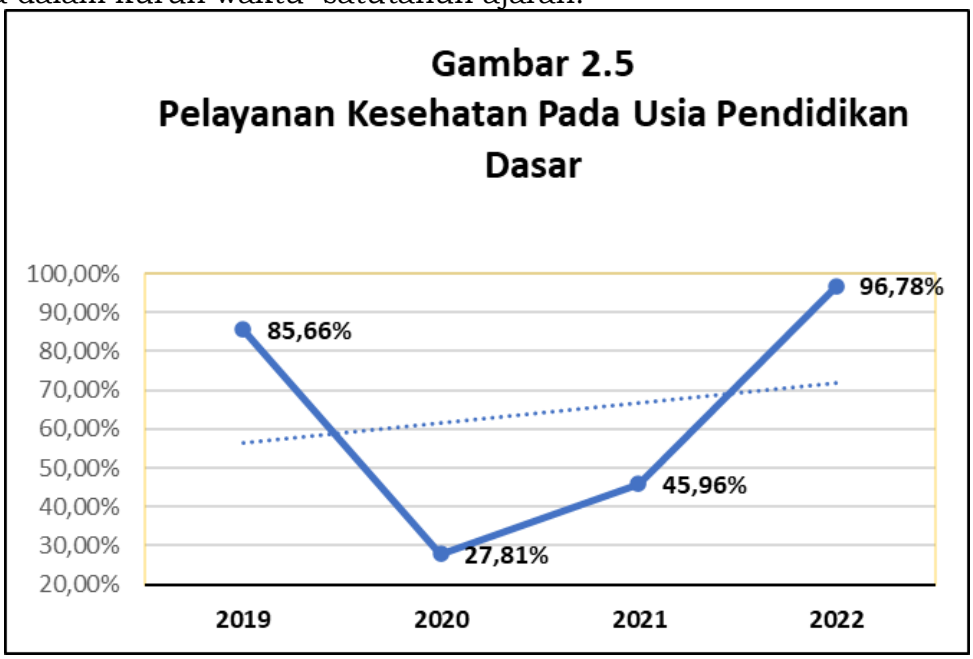

Dari gambar 2.5 terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah setingkat SD/MI di Kabupaten Pasaman Barat selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun pada Tahun 2022 telah terjadi peningkatan capaian yang sangat signifikan dimana capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar mencapai 96,78%. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh telah normalnya proses belajar mengajar tatap muka di sekolah-sekolah sehingga kegiatan penjaringan pada anak sekolah dapat terlaksana dengan baik.

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (kader kesehatan), yang dilengakpi dengan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, Kit IVA tes, formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM).

Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi Pusdatin Kementrian Kesehatan.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

1. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM.
2. Pelayanan skrining faktor resiko pada usia produktif adalah skrining yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi :
   a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
   b. Pengukuran tekanan darah.
   c. Pemeriksaan gula darah.
   d. Anamnesa perilaku berisiko.
3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
   a. Melakukan rujukan jika diperlukan.
   b. Memberikan penyuluhan kesehatan.

Indikator kinerja adalah persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

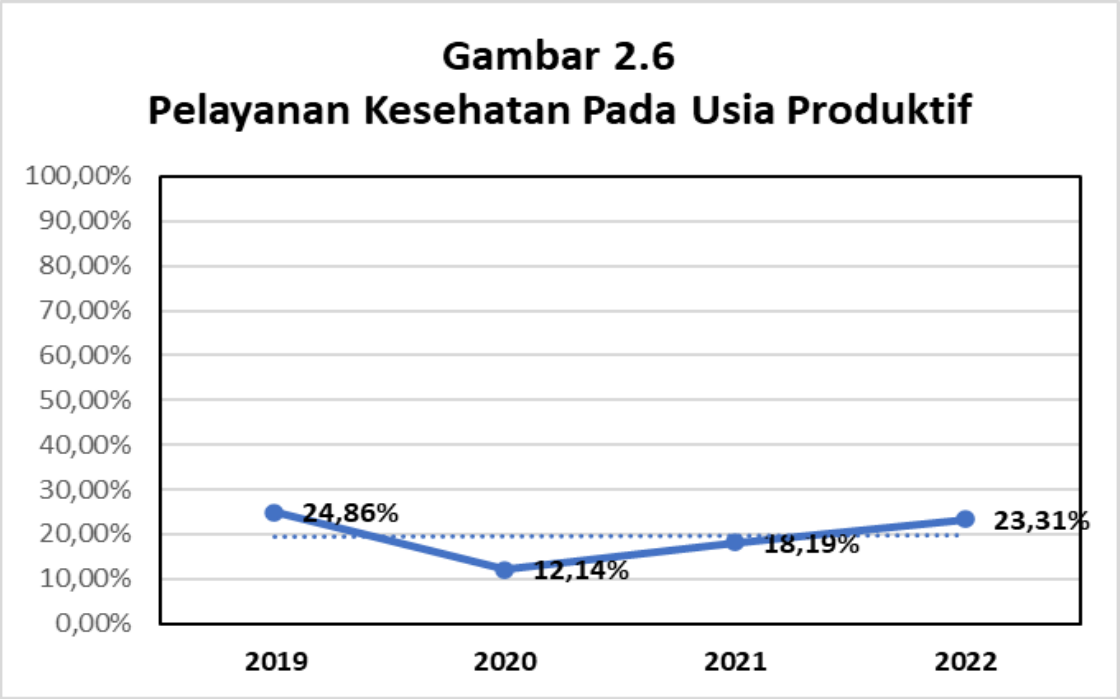

Dari gambar terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Pasaman Barat selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang berkunjung ke Fasilitas pelayanan kesehatan hanya 68.889 (23,31%) dari total sasaran penduduk usia 15-59 tahun sebesar 295.548 orang. Masih jauhnya persentase pencapaian dari target yang telah ditentukan dipengaruhi masih rendahnya masyarakat usia 15-59 yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, maupun yang datang ke Posbindu PTM. Kesadaran untuk memeriksakan Kesehatan masih rendah pada kelompok usia produktif di kab. Pasaman Barat.

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan ketersediaan strip uji pemeriksaan (gula darah dan kolesterol), instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS), instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT) dan instrumen *Activity Daily Living* (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G) serta buku kesehatan lansia, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, gizi, tenaga kesehatan masyarakat) dan tenaga non kesehatan terlatih (kader kesehatan).

Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untukpenyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :
   a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
   b. Pengukuran tekanan darah
   c. Pemeriksaan gula darah
   d. Pemeriksaan gangguan mental
   e. Pemeriksaan gangguan kognitif
   f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
   g. Anamnesa perilaku berisiko
3. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
   a. Melakukan rujukan jika diperlukan
   b. Memberikan penyuluhan kesehatan

Indikator kinerja adalah persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.7
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

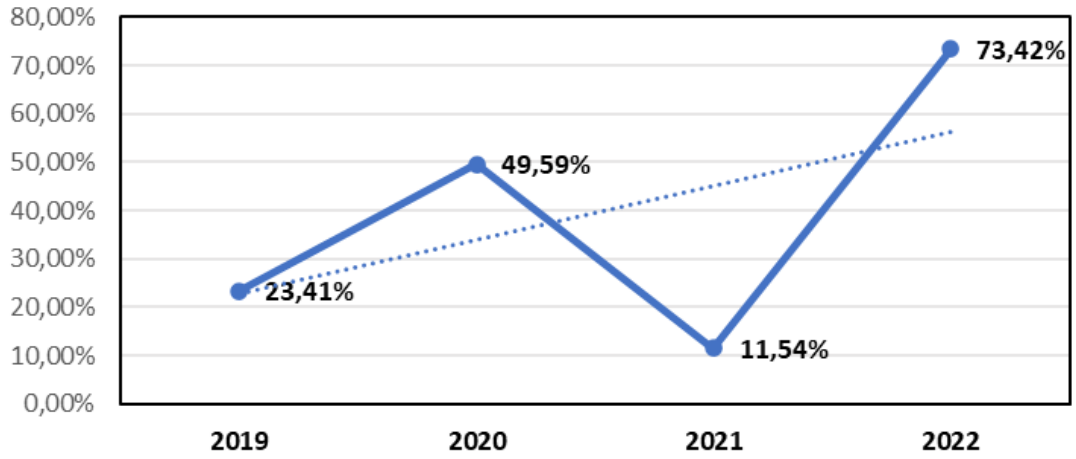

Cakupan Usila yang berkunjung ke Puskesmas dan Posbindu untuk mendapat pelayanan kesehatan selama Tahun 2022 adalah sebanyak 32.393 orang

atau sebesar 73,42% dari target yang telah ditentukan yaitu 44.120 orang. Terlihat dari gambar, cakupan pelayanan kesehatan pada usila lanjut cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan semakin banyak posbindu yang aktif disetiap kejorongan di Pasaman Barat.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilakukan oleh dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat, dengan dukungan media KIE, tensimeter dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM. Sedangkan standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.
b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanyadalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.8
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

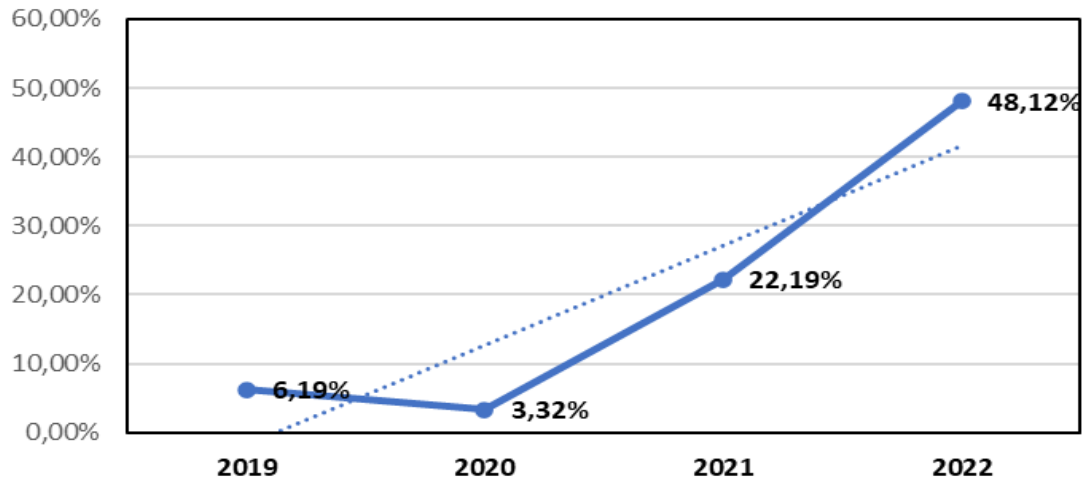

Selama Tahun 2022 cakupan penduduk usia di atas 15 tahun yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang diperiksa tekanan darahnya adalah sebesar 38.511(48,12%) dari total sasaran penduduk usia ≥15 tahun yang berpotensi Hipertensi (sesuai prevalensi Riskesdas 2020 yaitu 24,30) sebesar 80.029 jiwa.

Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami fluktuasi dan terjadi peningkatan di dua tahun terakhir. Kenaikan ini diharapkan tentu dapat ditingkatkan sehingga seluruh sasaran mendapatkan pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yaitu setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upayapencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM, pedoman dan media KIE, yang dilaksanakan oleh dokter, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi :

a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.
b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi
c) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Indikator kinerja adalah persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang dihitung dari jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah

estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.9
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

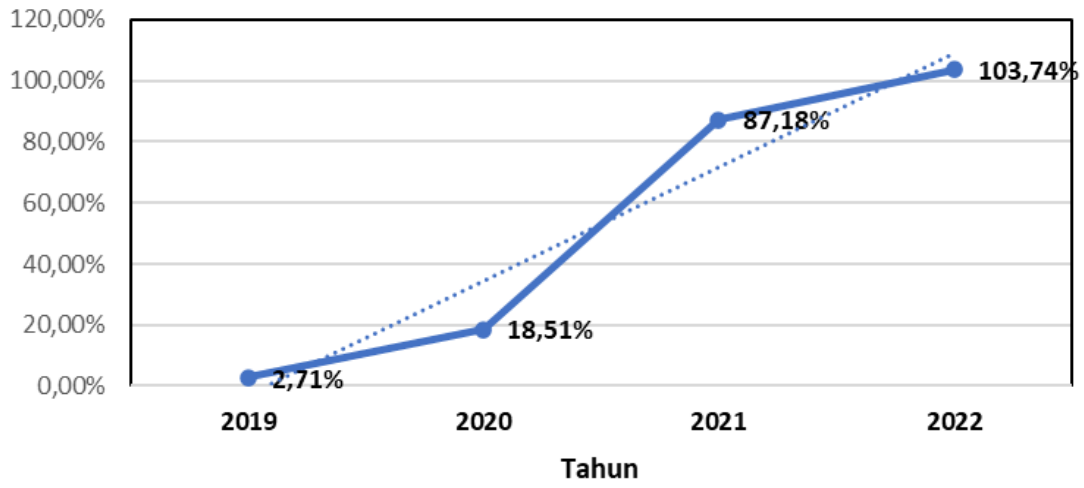

Selama Tahun 2022 cakupan penduduk usia di atas 15 tahun menderita Diabetes Melitus (DM) yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 3.075 (103,74%) dari total sasaran penduduk usia > 15 tahun yang berpotensi Diabetes Melitus sebesar 2.964.

Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berat yaitu setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya dengan dilengakapi buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Kit berisi 2 alat fikasasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan serta media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa yang mencakup pemeriksaan status mental dan

wawancara.
2. Edukasi kepatuhan minum obat
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang dihitung dari jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, dibagi dengan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.10
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

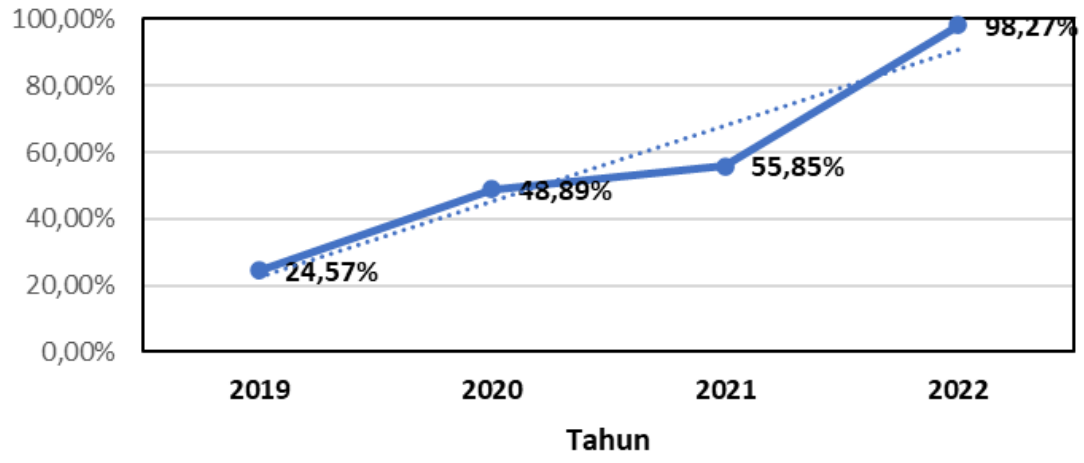

Selama Tahun 2022 cakupan pelayanan penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 966 jiwa (98,27%) dari total target 983 jiwa.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TBC) yaitu setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktusatu tahun.

Standar pelayanan kesehatan orang teduga TBC meliputi ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner). Reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan masker N95, pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol, lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/standar operasional prosedur.

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC dilakukan oleh dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, perawat, analis teknik laboratorium medik (ATLM), penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih (kader kesehatan).

Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengertian pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

1. Pemeriksaan klinis klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kalidalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
2. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/ataubakteriologis dan/atau radiologi
3. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
4. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, dihitung dari jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang yang terduga TBCdalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.11
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

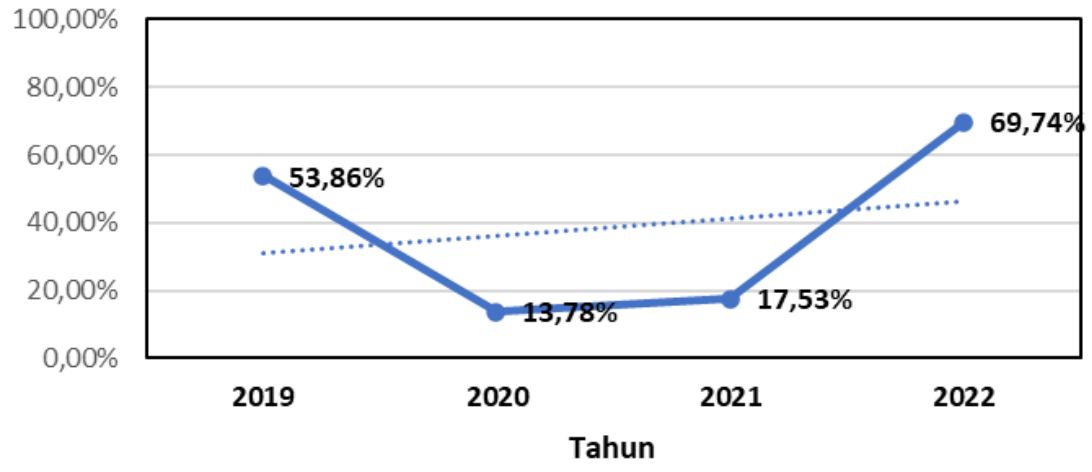

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2022 sebesar 5.020 orang (69,74%) dari total target 7.198 orang. Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan pelayanan pada tahun 2022.

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yaitu setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), penjaja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), waria/transgender, pengguna napza, suntik, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan oleh dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kel;amin, perawat, bidan, ATLM dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunayi kualifikasi tertentu (pendamping /penjangkauan), dengan kelengkapan media KIE berupa lem,bar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT), bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer+jarum sesuai),alat tulis dan rekam medis.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi :

a. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
b. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1kali dalam setahun.
c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja yaitu persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, dihitung dari jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahu dibagi dengan jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.11
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV

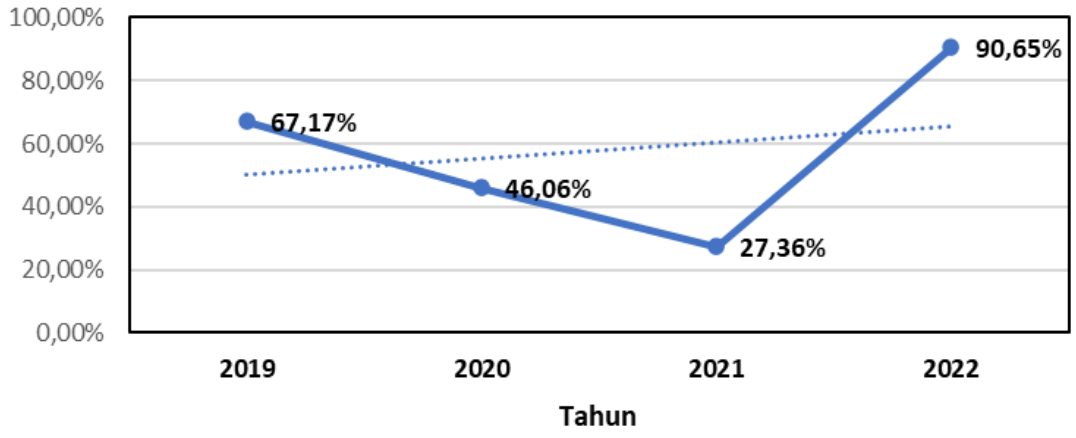

Selama Tahun 2022 jumlah penduduk berisiko terinfeksi HIV, yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar adalah sebesar 11.338 jiwa (90,65%) dari total target 12.507 jiwa. Adapun yang termasuk penduduk beresiko disini adalah Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria atau transgender, pengguna napza, wanita pekerja seks (WPS), lelaki seks lelaki (LSL), dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

2.2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pasaman Barat

Sebagai salah satu OPD pemberi pelayanan publik RSUD Pasaman Barat memiliki standar pelayanan minimal yang harus dicapai. Pada tahun 2022 kinerja pelayanan RSUD Pasaman Barat dapat dilihat sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Pasaman Barat. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pimpinan RSUD Pasaman Barat

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Bintang 5		Dasar	Madya	Utama	Paripurna	Dasar	Dasar	Dasar	Utama	
b	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1:1000 pddk		0,75	0,85	0,90	0,90	-	0,3	0,4	0,45	
c	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100%		79,28%	100%	100%	100%	79,28%	79,28%	76,44%	100%	

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pasaman Barat

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Gawat Darurat	Kemampuan Menangani *Life Saving* anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kompetensi SDM Medis dan Perawat IGD dalam menangani life saving anak dan dewasa di gawat darurat
		Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan IGD 24 jam harus dilakukan 24 jam sehari tanpa ada

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													tutup
		Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan Yang Besertifikat	100%		100%	100%	100%	100%	37%	42%	80%	100%	ATLS/BTLS/ACLS/ PPGD menjadi salah satu dari rencanadiklat rutin
		Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 Tim		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	0	0	1 Tim	1 Tim	Tim penanggulangan bencana harus ada disetiap Rumah Sakit
		Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	< 5 menit		< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	2 menit	1 menit	1 menit	1menit	
		Kepuasan Pelanggan Pada Gawat Darurat	≥ 70%		≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	94%	94%	95%	98%	
		Kematian Pasien ≤ 24 Jam di IGD	≤ 2 perseribu		≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	0,30	0,2114	0,1000	0,005	
		Tidak Adanya Keharusan Membayar Uang Muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Rawat Jalan	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Spesialis	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Buka Pelayanan Sesuai Ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	85	85	85	100%	
		Waktu tunggu Di Rawat Jalan	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≥ 2 jam	≥ 2 jam	≥ 2 jam	≤ 60 menit	
		Kepuasan Pelanggan Pada Rawat Jalan	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	76%	76%	80%	≥ 90%	
3	Rawat Inap	Pemberian Pelayanan Rawat Inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jam Visite Dokter Spesialis	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%	
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1.5%		≤ 1.5%	≤ 1.5%	≤ 1.5%	≤ 1.5%	1%	1%	0,5%	0%	
		Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1.5%		≤ 1.5%	≤ 1.5%	≤ 1.5%	≤ 1.5%	1,2%	1,2%	0,5%	0%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tidak Adanya Kejadian Pasien Jatuh Yang Berakibat Kecacatan/ Kematian *	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kematian Pasien > 48 Jam	≤ 0.24 %		≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	≤ 0.24 %	2%	1,38%	1%	0 %	
		Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	2%	1,06%	1%	0 %	
		Kepuasan Pelanggan Rawat Inap *	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	90%	90%	95%	98%	
4	Bedah	Waktu Tunggu Operasi Elektif	≤ 2 hari		≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	2-3 hari	1-2 hari	1-2 hari	1 hari	Banyaknya pemeriksaan penunjang dan waktu pemeriksaan yang agak lama membuat waktu tunggu operasi elektif menjadi lebih lama dari standaryang seharusnya
		Kejadian Kematian di Meja Operasi	≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	0 %	0 %	0 %	0 %	
		Tidak Adanya Kejadian operasi Salah Sisi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tidak Adanya Kejadian operasi Salah Orang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak Adanya Kejadian Salah Tindakan Pada Operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak Adanya Kejadian Tertinggalnya Benda Asing Pada Tubuh Pasien setelah Operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Komplikasi Anestesi karena Overdosis, Reaksi Anestesi dan Salah Penempatan Endotracheal Tube	≤ 6%		≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	0%	0%	0%	0%	
5	Persalinan, Perinatologi dan KB	Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan : a. Perdarahan	≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	1%	1%	0,6	0%	
		b. Pre-Eklampsia	≤ 30%		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	0,97	1%	0,5%	0%	
		c. Sepsis	≤ 0.2%		≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	0%	0%	0%	0%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemberian Pelayanan Persalinan Normal	100%		100%	100%	100%	100%	94,6%	100%	100%	100%	
		Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Penyulit	≥ 60%		≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	75%	75,49%	80%	90%	
		Pemberi Pelayanan Persalinan Dengan Tindakan Operasi	100%		100%	100%	100%	100%	55%	58%	75%	90%	
		Kemampuan Menangani BBLR 1500gr – 2500gr	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pertolongan Persalinan melalui Seksio Cesaria	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	14%	13%	12%	11%	
		Keluarga Berencana Mantap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Konseling Keluarga Berencana Mantap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	58%	58%	80%	85%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Intensif	Rata Rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif Dengan Kasus Yang Sama < 72 Jam	≤ 3%		≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0%	0%	0%	0 %	
		Pemberian Pelayanan Unit Intensif	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%	
7	Radiologi	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto	≤ 3 Jam		≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	1 jam 53 menit	1 jam 53 menit	1 jam	1 Jam	
		Pelaksanaan Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Rontgen	100%		100%	100%	100%	100%	78,65	78,65	78,65	100%	
		Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen (Kerusakan Foto) *	≤ 2 %		≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	0,03 %	0,02%	0,01%	0 %	
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	80%	80%	85%	90%	
8	Lab Patologi Klinik	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium *	≤ 140 menit		≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	120 menit	120 menit	100 menit	90 menit	
		Pelaksana Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	99,99%	100%	100%	100%	
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	80%	80%	85%	90%	
9	Rehabilitasi Medik	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Yang Direncanakan	≤ 50%		≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	0%	0%	0%	0%	
		Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Tindakan Rehabilitasi Medik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	80%	80%	85%	90%	
10	Farmasi	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	≤ 30 Menit		≤ 30 Menit	≤ 30 Menit	≤ 30 Menit	≤ 30 Menit	31:41 menit	31:41 menit	30 menit	25 menit	
		Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan	≤ 60 Menit		≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	45:10 menit	45:04 menit	45:00 menit	40 Menit	
		Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	80%	99%	100%	100%	
		Penulisan Resep Sesuai Formularium	100%		100%	100%	100%	100%	95%	99%	100%	100%	
11	Gizi	Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	92,40%	100%	100%	100%	
		Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	18%	17%	15%	10%	
		Tidak Adanya Kesalahan Dalam Pemberian Diet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Transfusi Darah	Pemenuhan Kebutuhan Darah Bagi Setiap Pelayanan Transfusi *	100%		100%	100%	100%	100%	83,75%	88,55%	90%	100%	
		Kejadian Reaksi Transfusi *	≤ 0.01%		≤ 0.01%	≤ 0.01%	≤ 0.01%	≤ 0.01%	0%	0%	0%	0%	
13	Rekam Medik	Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan *	100%		100%	100%	100%	100%	80%	88,75%	90%	100%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kelengkapan Informed Concent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas	100%		100%	100%	100%	100%	90%	90,42%	95%	100%	
		Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan	≤ 10 Menit		≤ 10 Menit	≤ 10 Menit	≤ 10 Menit	≤ 10 Menit	10 menit	8 menit	7 menit	6 Menit	
		Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan rawat inap	≤ 15 Menit		≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	15 menit	10 menit	10 menit	10 Menit	
14	Pengelolaan Limbah	Baku Mutu Limbah Cair											
		BOD	30 mg/l		30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	25,50%	25,25%	25%	20%	
		COD	80 mg/l		80 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	25,50%	25,25%	25%	20%	
		TSS	30 mg/l		30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	25,50%	25,25%	25%	20%	
		PH	6-9		6-9	6-9	6-9	6-9	8,11	8,11	8	7,5	
		Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai Dengan Aturan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Pemulsaran Jenazah	Waktu Tanggap Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	≤ 2 jam		≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1 jam	
16	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	Kecepatan Waktu Menangani Kerusakan Alat	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	87%	87,54%	90%	95%	
		Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat	100%		100%	100%	100%	100%	84%	84,41%	90%	100%	
		Peralatan Laboratorium (dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi *	100%		100%	100%	100%	100%	98%	98%	99%	100%	
17	Pelayanan Laundry	Tidak Adanya kejadian Linen Yang hilang	100%		100%	100%	100%	100%	80%	80%	85%	100%	
		Ketepatan Waktu Penyediaan Linen Untuk Ruang Rawat Inap	100%		100%	100%	100%	100%	80%	80%	85%	100%	
18	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Tersedianya Anggota Tim PPI yang terlatih	75%		75%	75%	75%	75%	75%	50%	75%	75%	

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya APD (alat pelindung diri)	60%		60%	60%	60%	60%	95,83%	96%	97%	98%	
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	77%	80%	

Berdasarkan tabel TC-30 di atas dimana capaian kinerja pelayanan RSUD Pasaman Barat seperti yang telah ditetapkan dalam renstra RSUD tahun 2021-2026 adalah tentang akreditasi rumah sakit, SPM dan rasio daya tampung rumah sakit. Hasil pencapaian indikator kinerja masih dibawah yanng diharapkan sehingga rumah sakit perlu melakukan pembenahan diri untuk menjadi lebih baik lagi.

Sementara itu, untuk pelaksanaan penilaian akreditasi sampai akhir tahun 2022 ini masih belum dapat dilaksanakan dan karena adanya penambahan waktu yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dalam proses akreditasi sehingga rumah sakit diharapkan dapat benar benar memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit.

Untuk indikator kegiatan standar pelayanan minimal rumah sakit data ada tersedia di bagian pelayanan dan direkap oleh bagian monitoring dan evaluasi, untuk ke absahan data menjadi tanggung jawab bagian pelayanan sehingga data yang tersaji adalah data rekapan yang direkap oleh bagian monitoring pelayanan. Sebagai tolok ukur penilaian standar pelayanan minimal rumah sakit RSUD Pasaman Barat mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Dinas Kesehatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat. Isu-isu yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya kematian ibu, bayi dan balita	Banyaknya kasus ibu hamil beresiko	- Kurangnya pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas. - Meningkatnya kasus ibu hamil berisiko (4T) - Kasus komplikasi yang tidak terdeteksi secara dini di jejaring puskesmas. - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil. - Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan ibu dalam mengikuti asuhan kebidanan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan.

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih tingginya angka stunting	Intervensi spesifik dan Sensitif belum maksimal	- Masih adanya bayi lahir dengan panjang kurang dari 48 cm - Kasus ibu hamil anemia, ibu hamil KEK masih ada - Masih adanya pernikahan muda - Keluarga beresiko stunting belum mendapatkan pendampingan - Asupan makanan yang belum sesuai dengan anjuran Pemberian Makan pada bayi dan anak (PMBA) terkait pada pola asuh dan kemampuan keluarga untuk menyediaan bahan makanan berkualitas - Masih ada sarana sanitasi yang belum memadai
3	Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan	Kapasitas petugas dalam memberikan layanan kesehatan masih belum maksimal, masyarakat yang belum memahami pentingnya pelayanan kesehatan sebelum terjadi masalah.	- Kapasitas petugas dalam pencatatan dan pelaporan masih belum baik sehingga masalah pelayanan minimal tidak terkontrol dengan maksimal - Masyarakat yang merasa tidak sakit tidak mau datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. - Masih ada nya masyarakat yang merasakan bahwa datang ke fasilitas kesehatan itu merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama, pelayanan yang tidak ramah dan tidak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan yang diinginkannya.
		Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022 sebesar 89.22 dari target capaian 100%	- Pelayanan kesehatan Usia dasar masih berfokus kepada kegiatan Penjaringan kesehatan anak siswa baru kelas I,VII.X dan pemeriksaan berkala di sekolah - Untuk anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah atau melalui pendidikan informal belum terjaring untuk pemeriksaan Kesehatan
		Tidak tersedianya Buku Rapor Kesehatanku sebagai instrument pencatatan dan media KIE bagi anak usia pendidikan Dasar. - Kasus penyakit menular tinggi - SOP pelayanan tidak optimal - Cakupan sasaran rendah	- Tidak tersedianya Anggaran di Dinas Kesehatan untuk pemyediaan Buku Raport Kesehatanku - Kurang pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat - Kompetensi / SDM yang rendah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan	Pengelolaan data Informasi kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan	- Distribusi nakes yang belum merata dan tidak sesuai dengan anjab ABK - Kebijakan pemerintah daerah dan kepala dinas yang menempatkan pegawai tidak berpedoman pada anjab ABK - Belum semua jabatan fungsional memiliki Surat Tanda Registrasi(STR) - Pendidikan dan latihan yang masih terbatas sesuai kebutuhan - Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pendukung. - Integrasi data satu pintu masih manual dan parsial - Kurangnya komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan sistem informasi di Puskesmas dan RS (simpus, e-SIR, website,dll)
5	Kurang terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar	Tidak tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi ketersediaan alat kesehatan	- Kurangnya dukungan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan dipuskesmas. - Terbatasnya anggaran yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan. -
6	Rendahnya nilai capaian keterpenuhan standar ASPAK	Pengelola ASPAK tidak maksimal dalam melaksanakan tugas	- Tidak patuhnya petugas ASPAK dalam melakukan update data sesuai fakta. - Banyaknya sarana fasilitas kesehatan dalam konsisi rusak. - Tidak terpenuhinya kebutuhan ruangan dalam melakukan pelayanan kesehatan. - Kurang terpeliharanya prasarana di fasilitas kesehatan.
7	Rendahnya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Banyaknya tenaga kesehatan yang tidak dapat mengikuti uji kompetensi	- Terbatasnya anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan uji kompetensi tenaga kesehatan. - Belum adanya narasumber kabupaten yang memiliki kualifikasi. - Kurangnya penyelenggara yang terakreditasi dalam penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kesehatan
8	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dan peduli dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan	Akses masyarakat terhadap air besih dan air minum yang memenuhi syarat masih rendah	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan - Masyarakat belum mendapatkan informasi tentang menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan karena masih terbatasnya tenaga sanitarian di puskesmas - Masyarakat terbiasa dengan

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
			bantuan sehingga swadaya masih rendah - Kompetensi sebagian besar petugas tidak sesuai dengan tupoksi program di puskesmas -
9	Masih rendahnya capaian TTU & TPM di Kab. Pasaman Barat	Masih banyak TTU & TPM yang belum memiliki laik hygiene sanitasi	- Pemilik/Pengelola TPM & TTU belum memahami pentingnya memiliki surat laik hygiene sanitasi - Belum adanya perda/perbup yang mewajibkan semua TTU & TPM wajib mengurus laik sehat hygiene sanitasi
10	Perlunya penguatan pembinaan sarana prasarana Kesehatan dalam melaksanakan fungsinya	- Kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan, masih perlu dicukupi - Ketersediaan serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai standar, masih perlu dijamin. - Akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala perlu dilaksanakan - Pemahaman Puskesmas terkait Akreditasi yang belum seragam antar Puskesmas - Kesulitan adaptasi pada pelayanan dalam pengembangan aplikasi	- Alat kesehatan sesuai standar perlu dioptimalkan - Sarana prasarana sesuai standart perlu dioptimalkan - Perlunya Akreditasi Puskesmas serta pemantauan implementasinya secara berkala - Perlu pembinaan terintegrasi dalam memberikan pemahaman maksud, tujuan, dan manfaat akreditasi - Perlu peningkatan kapasitas petugas dengan pelatihan dan pengembangan kemampuan teknologi
11	Perlunya penataan pelayanan bagi peserta JKN khususnya masyarakat miskin	Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan	- Kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan masih perlu dioptimalkan - Perlu komitmen Bersama dalam menjalankan program UHC - Perlu dukungan lintas sector dalam kepesertaan JKN - Dukungan dana

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
			-

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis di atas dapat dirumuskan beberapa program atau kegiatan prioritas yang akan dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
2. Pemerataan tenaga kesehatan
3. Perizinan, standarisasi, dan akreditasi pelayanan falititas pelayanan kesehatan
4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan
5. Mengupayakan semua masyarakat agar menjadi peserta jaminan kesehatan
6. Optimalisasi kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan
7. Menigkatkan PHBS, perubahan gaya hidup, konsumsi makanan dan bahan makanan tambahan dengan pengawasan yang optimal
8. Mengoptimalkan kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan.

2.3.2 RSUD Pasaman Barat

Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat sebagai pusat rujukan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang secara umum ikut serta mendukung program peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih memiliki permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain adalah :

1. Kenyamanan lingkungan rumah sakit saat ini sedikit mengganggu karena kondisi lingkungan yang belum kondusif setelah pembangunan
2. Keterbatasan anggaran untuk belanja modal baik untuk peralatan medis maupun non medis
3. SDM perlu peningkatan kompetensi dan ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih baik
4. Perbaikan regulasi dan peningkatan capaian persentase SPM menuju standar akreditasi
5. Tingkat kinerja untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat saat ini masih rendah karena dana dukungan operasional dari pemerintah daerah belum maksimal dan tidak diterimanya tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai rumah sakit sehingga menyebabkan pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat tidak paripurna.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara eksternal yaitu :

1. Terbatasnya subsidi anggaran dari pemerintah daerah
2. Terbatasnya fasilitas yang disediakan untuk menarik minat masyarakat dalam berobat ke Rumah Sakit
3. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem manajemen yang cepat dan akurat.
4. Informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan yang berada di luar lingkungan rumah sakit tidak relevan.
5. Adanya persaingan pendapatan dan kesejahteraan pegawai yang berbeda dari rumah sakit lain.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara internal yaitu :

1. Pendapatan fungsional RS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin RS
2. Kurangnnya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
3. Lamanya waktu tunggu pelayanan baik di saat pendaftaran, bertemu dengan dokter dan mendapatkan obat
4. Pelayanan prima yang tidak bisa diterapkan karena adanya faktor-faktor internal yang tidak terselesaikan

Sedangkan faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penerapan BLUD
2. Tersedianya dasar hukum pelaksanaan Rumah Sakit

Tersedianya SOP pelayanan di Rumah Sakit

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2024, diproyeksikan bahwa APBD bidang Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan
   - Pendapatan : Rp. 60.000.000,00
   - Belanja : Rp. 123.352.931.163,00
2. RSUD Pasaman Barat
   - Pendapatan BLUD : Rp. 47.141.051.857,00
   - Belanja BLUD : Rp. 47.141.051.857,00
   - Belanja DAU : Rp. 16.637.631.173,00
3. RSUD D Pratama
   - Pendapatan : Rp. 0,00 (belum ada Regulasinya)
   - Belanja : Rp. 1.583.594.638,00
4. Puskesmas
   - Pendapatan BLUD : Rp. 22.978.807.896,00
   - Belanja BLUD : Rp. 22.978.807.896,00
   - Belanja DAK Non Fisik : Rp. 16.841.513.000,00

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5 (T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024

Subunit : Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**	**59.687.689.255,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100 %**	**57.902.235.518,00**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*umlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Dinas Kesehatan*	13 Dokumen	72.410.330,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	76.814.387,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	47.317.888,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen perencanaan di lingkungan pemerintah daerah	7 Dokumen	55.442.887,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 Laporan	25.092.442,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Laporan	21.371.500,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Dinas Kesehatan*	100 %	57.913.335.027,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		*Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Dinas Kesehatan*	100 %	55.976.962.028,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	760 Orang/bulan	57.500.776.600,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	760 Orang/bulan	55.198.202.028,00	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	16 Dokumen	412.558.427,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	16 Dokumen	463.800.000,00	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan*	1 Dokumen	314.960.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan*	45 Unit	158.823.360,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan*	45 Unit	112.111.370,00	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	6 Dokumen	66.031.208,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	6 Dokumen	65.750.000,00	
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian*	12 Laporan	46.396.076,00						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Barang Milik Daerah pada SKPD								
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	5 Laporan	46.396.076,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	5 Laporan	46.361.370,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah peserta Diklat/ Bimtek*	150 Orang	27.578.880,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah peserta Diklat/ Bimtek*	150 Orang	266.000.000,00	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	27.578.880,00						
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	760 Paket	266.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	760 Paket	266.000.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor*	100 %	690.381.658,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor*	100 %	414.422.943,00	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	277.519.035,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	157.839.815,00	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	34.952.128,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	34.952.128,00	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	377.910.495,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	221.631.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.143.140,00	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	288.000.000,00	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	50.143.140,00	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang*	100 %	300.160.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor*	4 Unit	50.143.140,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			urusan kantor								
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	280.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	280.000.000,00	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	20.160.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	33.000.000,00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		475.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		404.781.650,00	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 Unit	52.095.750,00	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	144.725.000,00	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	142 Unit	250.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	142 Unit	107.961.000,00	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	99.999.900,00	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**	**53.828.500.399,00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**	**62.541.044.013,00**	
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	80 %	12.363.065.303,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	80 %	13.994.454.018,00	
21	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	3 Unit	866.994.757,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	2 Unit	553.320.000,00	
22	Pengembangan Puskesmas	- Kab. Pasaman	*Jumlah Puskesmas*	3 Unit	1.443.521.329,00	Pengembangan	- Kab. Pasaman	*Jumlah Puskesmas*	6 Unit	1.443.330.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*			Puskesmas	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*			
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	2 Unit	149.920.462,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	3 Unit	1.499.184.000,00	
24	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	2 Unit	1.300.000.000,00						
25	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	5 Unit	1.500.000.000,00						
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	20 Unit	5.236.890.493,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	18724 Unit	4.617.388.000,00	
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	5.276.679.598,00	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas*	0 Keluarga	199.926.000,00	
27	Pengadaan Bahan Habis Pakai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan*	1 Paket	1.547.000.000,00						
28	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan*	1 Unit	208.197.420,00						
29	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	20 Unit	110.540.842,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	111 Unit	110.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	100 %	41.214.480.561,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	100 %	47.909.842.895,00	
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	9605 Orang	118.520.250,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	9605 Orang	281.890.750,00	
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8294 Orang	76.959.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8294 Orang	30.041.500,00	
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8260 Orang	87.589.750,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8260 Orang	30.003.000,00	
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	33331 Orang	53.250.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	33331 Orang	30.490.000,00	
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	25324 Orang	145.020.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	25324 Orang	145.020.000,00	
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	329337 Orang	56.681.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	329337 Orang	56.680.900,00	
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	13417 Orang	32.159.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	13417 Orang	32.158.000,00	
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	80029 Orang	56.681.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	80029 Orang	56.680.500,00	
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2964 Orang	38.076.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2964 Orang	38.076.250,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	983 Orang	37.946.700,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	983 Orang	37.946.150,00	
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	7197 Orang	37.160.600,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	7197 Orang	37.160.600,00	
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	13534 Orang	36.180.800,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	13534 Orang	36.180.800,00	
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	7 Dokumen	221.137.379,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	7 Dokumen	221.137.100,00	
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	1 Dokumen	50.000.000,00	
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	20 Dokumen	119.609.850,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	20 Dokumen	231.537.500,00	
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	60 Dokumen	49.430.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	60 Dokumen	104.475.000,00	
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	90 Dokumen	304.927.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	90 Dokumen	130.655.000,00	
47	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	20 Dokumen	101.045.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	20 Dokumen	101.042.900,00	
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	- Kab. Pasaman Barat, Semua	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	20 Dokumen	40.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	- Kab. Pasaman Barat, Semua	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	20 Dokumen	40.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*			Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*			
49	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	52 Dokumen	85.583.750,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	52 Dokumen	85.583.650,00	
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	24700 Orang	21.137.379,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	24700 Orang	21.132.500,00	
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	45 Orang	21.137.379,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	45 Orang	21.133.250,00	
52	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus*	3 Dokumen	500.000.000,00	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus*			
53	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	84 Dokumen	240.263.800,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	84 Dokumen	143.997.650,00	
54	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	4 Dokumen	37.850.893.059,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	4 Dokumen	45.000.000.000,00	
55	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	24700 Orang	21.137.379,00	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	24700 Orang	20.528.250,00	
56	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	25 Paket	21.137.379,00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	25 Paket	21.137.379,00	
57	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	101 Dokumen	61.398.000,00	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	101 Dokumen	121.421.000,00	
58	Operasional Pelayanan	- Kab. Pasaman	*Jumlah Dokumen*	10 Dokumen	270.000.000,00	Operasional Pelayanan	- Kab. Pasaman	*Jumlah Dokumen*	10	270.002.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Puskesmas	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Operasional Pelayanan Puskesmas*			Puskesmas	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Operasional Pelayanan Puskesmas*	Dokumen		
59	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	24 Dokumen	78.679.200,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	24 Dokumen	104.523.770,00	
60	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	20 Unit	193.730.000,00	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	20 Unit	193.730.000,00	
61	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	12 Laporan	27.742.811,00	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	12 Laporan	27.742.700,00	
62	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	12 Dokumen	27.742.811,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	12 Dokumen	27.742.811,00	
63	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	81.521.985,00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	81.521.985,00	
64	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	20 Orang	50.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	20 Orang	50.000.000,00	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	0 Orang	28.470.000,00	
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi terintegrasi dengan SDM yang sesuai standar di Lingkungan Dinas Kesehatan*	6 Faskes	33.532.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi terintegrasi dengan SDM yang sesuai standar di Lingkungan Dinas Kesehatan*	6 Faskes	16.766.250,00	
65	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan*	2 Dokumen	16.766.000,00						
66	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	16.766.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	16.766.250,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
							Semua Kel/Desa	*Sistem Informasi Kesehatan*			
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan*	100	217.422.535,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan*	100	619.980.850,00	
67	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	123 Unit	26.985.000,00	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	24 Unit	29.430.000,00	
68	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	22 Unit	190.437.535,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	22 Unit	590.550.850,00	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**65 %**	**331.071.120,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**65 %**	**1.706.771.485,00**	
12	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		*Jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan Jumlah Rekomendasi teknis Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut atas perizinanpraktik Tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat*	6 Kegiatan 100	50.990.625,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		*Jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan Jumlah Rekomendasi teknis Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut atas perizinanpraktik Tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat*	100	42.620.000,00	
69	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian*	1000 Dokumen	22.050.000,00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga	- Kab. Pasaman Barat, Semua	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian*	1000 Dokumen	22.050.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*			Kesehatan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*			
70	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	500 Dokumen	28.940.625,00	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	500 Dokumen	20.570.000,00	
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	100 %	130.080.495,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	100 %	1.099.888.735,00	
71	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	2 Dokumen	23.090.010,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	2 Dokumen	23.090.000,00	
71	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	748 Orang	85.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	748 Orang	1.007.888.250,00	
73	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	200 Dokumen	21.990.485,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	200 Dokumen	68.910.485,00	
74	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi tekhnis sesuai standar*	25	150.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi tekhnis sesuai standar*	25	564.262.750,00	
75	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	300 Orang	150.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	300 Orang	564.262.750,00	
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		***Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan***	**65 %**	**413.896.150,00**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		***Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan***	**65 %**	**434.417.000,00**	
14	Pemberian Izin Apotek,		*Jumlah Sarana*	25 Sarana	136.598.000,00	Pemberian Izin Apotek,		*Jumlah Sarana*	25 Sarana	136.598.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku*			Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku*			
76	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	30 Dokumen	136.598.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	30 Dokumen	136.598.000,00	
15	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		*Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	12 kali	57.947.400,00	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		*Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	12 kali	57.927.000,00	
77	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	2 Dokumen	57.947.400,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	2 Dokumen	57.927.000,00	
16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industru Rumah Tangga Pangan (IRTP)*	30	116.350.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industru Rumah Tangga Pangan (IRTP)*	30	116.350.000,00	
78	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan*	30 Dokumen	116.350.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor*	30 Dokumen	116.350.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*			Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*			
5	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM)		*Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM*	100 %	47.958.750,00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		*Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM*	100 %	68.500.000,00	
79	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	200 Dokumen	47.958.750,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	200 Dokumen	68.500.000,00	
17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		*Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi*	26 Sampel	55.042.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		*Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi*	26 Sampel	55.042.000,00	
80	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	28 Unit	55.042.000,00	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	28 Unit	55.042.000,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**100 % 75 %**	**268.463.347,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**	**768.463.147,00**	
18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan		*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan*	40 40 Posyandu	44.463.347,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan		*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan*	40	544.463.347,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*masyarakat di bidang kesehatan Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*			Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*masyarakat di bidang kesehatan Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*			
81	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	14 Dokumen	44.463.347,00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	14 Dokumen	544.463.347,00	
19	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat*	11 Kecamatan	49.000.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat*	11 Kecamatan	48.999.800,00	
82	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	3 Dokumen	49.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	3 Dokumen	48.999.800,00	
20	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		175.000.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		175.000.000,00	
83	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	3 Dokumen	175.000.000,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	3 Dokumen	175.000.000,00	

Subunit : RSUD Ujung Gading

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**	**1.076.176.208,00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**	**1.583.594.638,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	80 %	562.798.695,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	80 %	625.007.007,00	
1	Pengembangan Rumah Sakit	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	1 Unit	562.798.695,00	Pengembangan Rumah Sakit	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	1 Unit	625.007.007,00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	100 %	513.377.513,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	100 %	958.587.631,00	
2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	513.377.513,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	958.587.631,00	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diusulkan berdasarakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan per tahunnya di Renstra Dinas Kesehatan sebesar RP. 115.871.796.479,00, kemudian di Analisa sesuai hasil kebutuhan berdasarkan Penetapan Pagu Indikatif dari Surat Sekretariat Daerah tanggal 20 Juni 2023 nomor 000.7.2.4/251/Bapelitbangda/PPEP/VI/2023 tentang Permintaan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 dan Penetapan Pagu Renja Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 124.936.525.801,00.

Nama OPD : RSUD Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Pasaman Barat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14.005.909.502	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Pasaman Barat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	16.069.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100%	12.068.609.502	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100%	13.950.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	1. 235 PNS 2.20 PPPK	11.683.609.502	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	1. 255 PNS 2.20 PPPK	13.500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTT) yang melaksanakan tugas administrasi keuangan 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas administrasi keuangan 3.Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	1. 1 orang 2. 10 orang 3. 12 Bulan	385.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTT) yang melaksanakan tugas administrasi keuangan 2. . Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas administrasi keuangan 3.Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Dokumen	450.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peragkat Daerah	100%	32.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peragkat Daerah	100%	40.000.000	
	Penatausahaan Barang MILIK DAERAH SKPD	RSUD Pasaman Barat	Penyediaan honorarium Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	12 bulan	32.400.000	Penatausahaan Barang MILIK DAERAH SKPD	RSUD Pasaman Barat	Penyediaan honorarium Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	12 laporan	40.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	286.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	355.000.000	
	pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pakaian yang dapat disediakan untuk aparatur	235 Stel	200.000.000	pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pakaian yang dapat disediakan untuk aparatur	1 paket	250.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam/tahun	18 orang	33.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam/tahun	18 orang	40.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	3.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	5.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	22 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	22 Orang	60.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat Daerah	100%	83.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Pasaman Barat	persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat Daerah	100%	90.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Pasaman Barat	Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	65 unit	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Pasaman Barat	Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	0	0	kegiatan di alihkan ke BLUD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah ATK yang dibutuhkan 2. Jumlah pengadaan peralatan penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran 3. Penyediaan materai dan benda pos lainnya	2 unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah ATK yang dibutuhkan 2. Jumlah pengadaan peralatan penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran 3. Penyediaan materai dan benda pos lainnya	2 unit	40.000.000	
	penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah amplop dan map RSUD Pasaman Barat yang dibutuhkan	4600 lembar	12.000.000	penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah amplop dan map RSUD Pasaman Barat yang dibutuhkan	1 paket	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Pasaman Barat	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah undangan rapat koordinasi yang diikuti	20 keg	31.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Pasaman Barat	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah undangan rapat koordinasi yang diikuti	12 laporan	35.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Pasaman Barat	persentase terpenuhinya Sarana Dan Prasarana perangkat daerah	100%	278.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Pasaman Barat	persentase terpenuhinya Sarana Dan Prasarana perangkat daerah	100%	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/Jabatan	1 unit	23.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/Jabatan	1 unit	30.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor dan administrasi RS	1 unit	240.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor dan administrasi RS			
	Pengadaan Mebel	RSUD Pasaman Barat	Jumlah Mebeleur yang dibutuhkan untuk operasional administrasi perkantora	68 unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	RSUD Pasaman Barat	Jumlah Mebeleur yang dibutuhkan untuk operasional administrasi perkantora	1 unit	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang Operasional Perangkat Daerah	100%	1.234.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang Operasional Perangkat Daerah	100%	1.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Pasaman Barat	Frekuensi penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	919.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Pasaman Barat	Frekuensi penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	12 laporan	1.100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTT) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Non PNS (THL) penunjang administrasi perkantoran	1. 3 Orang 2. 23 Orang	314.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTT) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Non PNS (THL) penunjang administrasi perkantoran	12 laporan	400.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik perangkat daerah	100%	23.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik perangkat daerah	100%	84.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1. 13 Unit 2. 13 Unit	3.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	1. 10 Unit 2. 10 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR 2. Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	20 unit	60.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Pasaman Barat	Jumlah alat penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	55 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Pasaman Barat	Jumlah alat penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	5 unit	20.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Pasaman Barat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	100%	134.032.888.640	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Pasaman Barat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	100%	102.503.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	100%	78.629.737.023	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	100%	33.350.000.000	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Pasaman Barat	Terlaksananya pekerjaan pembangunan RS	4 Paket	3.487.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Pasaman Barat	Terlaksananya pekerjaan pembangunan RS	1 paket	4.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah pengadaan mobil ambulance transport RS 2. Jumlah pengadaan mobil donor darah RS 3. Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga RS 4. Jumlah pengadaan sarana pengolahan limbah RS 5. Jumlah pengadaan ATK RS 6. Jumlah Belanja pengadaan komputer kegiatan penunjang RS 7. Jumlah Belanja pengadaan printer kegiatan penunjang RS 8. Jumlah Belanja cetak dan penggandaan RS 9. Jumlah penggandaan Mebel RS	1. 9 Unit 2. 24 Paket	935.850.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah pengadaan mobil ambulance transport RS 2. Jumlah pengadaan mobil donor darah RS 3. Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga RS 4. Jumlah pengadaan sarana pengolahan limbah RS 5. Jumlah pengadaan ATK RS 6. Jumlah Belanja pengadaan komputer kegiatan penunjang RS 7. Jumlah Belanja pengadaan printer kegiatan penunjang RS 8. Jumlah Belanja cetak dan penggandaan RS 9. Jumlah penggandaan Mebel RS	1 paket	6.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RS	460 unit/4 Paket	61.608.288.896	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RS	1 paket	2.000.000.000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS 2. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS	1. 15 orang 2. 12 paket	9.538.805.320	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS 2. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS	1 paket	6.000.000.000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD Pasaman Barat	Penyediaan Bahan Habis Pakai dan perbekalan kesehatan RS	12 paket	1.896.370.807	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD Pasaman Barat	Penyediaan Bahan Habis Pakai dan perbekalan kesehatan RS	1 paket	3.000.000.000	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan fasilitas pelayanan Kesehatan 2. Pemeliharaan sarana pelayanan rs	1. 3 Orang THL 2. 20 Kegiatan	33.150.000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan fasilitas pelayanan Kesehatan 2. Pemeliharaan sarana pelayanan rs	1 paket	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	pemeliharaan gedung dan bangunan, serta prasarana pendukung fasilitas pelayanan RS	21 Kegiatan	436.800.000	pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	pemeliharaan gedung dan bangunan, serta prasarana pendukung fasilitas pelayanan RS	1 paket	500.000.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	Pemeliharaan alat kesehatan dan Alat Penunjang Medik RS	35 Kegiatan	693.472.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	Pemeliharaan alat kesehatan dan Alat Penunjang Medik RS	1 paket	800.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Persentase pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RS sesuai Standar	100%	53.825.151.617	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Persentase pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RS sesuai Standar	100%	66.665.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Pasaman Barat	jumlah pemeriksaan lingkungan RS	16 Kegiatan	56.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Pasaman Barat	jumlah pemeriksaan lingkungan RS	1 dokumen	65.000.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Pasaman Barat	jumlah pasien tidak mampu yang dirawat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	65 Orang	975.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Pasaman Barat	jumlah pasien tidak mampu yang dirawat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	1 dokumen	1.100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Pasaman Barat	cakupan Pelayanan BLUD RS	100%	52.344.151.617	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Pasaman Barat	cakupan Pelayanan BLUD RS	1 dokumen	60.000.000.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Peningkatan standar pelayanan kesehatan di RS	50 Kegiatan	450.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Peningkatan standar pelayanan kesehatan di RS	1 unit	5.500.000.000	Ditambahkan di tahun ini karena rencana akan dilaksanakan kegiatan penilaiannya
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegras	RSUD Pasaman Barat	Persentase pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan RS	100%	1.578.000.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegras	RSUD Pasaman Barat	Persentase pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan RS	100%	2.088.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit	2 Orang THL	78.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit	1 dokumen	88.000.000	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sisten Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUD Pasaman Barat	jumlah pengadaan Sistem	1 Paket	1.500.000.00	Pengadaan Alat/Perangkat Sisten Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUD Pasaman Barat	jumlah pengadaan Sistem	1 paket	2.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Pasaman Barat	Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi	55	2.282.995.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Pasaman Barat	Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi	55	2.900.000.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	cakupan sumber daya manusia kesehatan yang telah sesuai dengan standar	210 orang	1.985.495.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	cakupan sumber daya manusia kesehatan yang telah sesuai dengan standar	210 orang	2.500.000.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTT) yang melaksanakan tugas pelayanan tindak medik dan penunjang medik RS 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pelayanan tindak medik dan penunjang medik RS	1. 2 Orang PTT 2. 143 Orang THL	1.985.495.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTT) yang melaksanakan tugas pelayanan tindak medik dan penunjang medik RS 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pelayanan tindak medik dan penunjang medik RS	145 orang	2.500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bermutu dan berkompetensi	65 Orang	297.500.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Pasaman Barat	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bermutu dan berkompetensi	65 Orang	400.000.000	

Berdasarkan tabel diatas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan RSUD Pasaman Barat adalah 3 program yakni Program Penunjang urusan pemerintah daerah dan Program upaya pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai kewenangan daerah serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kewenangan daerah dan 12 kegiatan dan 40 Subkegiatan sehingga dana yang dibutuhkan untuk mencapai target indikator kinerja adalah sebesar Rp. 63.778.683.030,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah), hal ini berdasarkan Penetapan Pagu Indikatif dari Surat Sekretariat Daerah tanggal 20 Juni 2023 nomor 000.7.2.4/251/Bapelitbangda/PPEP/VI/2023 tentang Permintaan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 dan Penetapan Pagu Renja Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam koordinasi dan sinergi program-program pembangunan di bidang kesehatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat memiliki usulan program dari masyarakat dan dari kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.6 (T-C. 32) Daftar Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD TA. 2024 yang ditawarkan pada Pelaksanaan Forum OPD TA. 2023

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1						2	3	4	5	6
1	02	02	2	01	06	Pengadaan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Kec. Ranah Batahan	*Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	1 unit/paket	
							KecamatanKinali	*Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	1 unit/pakrt	

Pengusul atas Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2024 pada Musrenbang tingkat Kecamatan terhadap Renja Dinas Kesehatan adalah Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Kinali. Usulan berupa pengadaan ambulance transport.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Batasan pengembangan *(Development constraint)* sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi keterbatasan SDA yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan yang perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas diketahui beberapa parameter sumber daya alam yang

perlu dipertimbangkan aspek keterbatasannya dalam perencanaan pembangunan meliputi hutan primer, hutan di atas lahan gambut, habitat spesies langka, area pesisir terdampak perubahan iklim, kawasan rawan bencana, ketersediaan air, ketersediaan energi, tingkat emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca.

Kaidah Pembangunan Nasional 2020-2024

1. Membangun Kemandirian → Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa indonesia, dengan cara:
   a. Memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan.
   b. Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.
   c. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
   d. Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
   e. Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri.
2. Menjamin Keadilan → Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
   a. Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan.
   b. Bersikap inklusif atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan.
   c. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehinga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.
   d. Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara.
   e. Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab.
   f. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas.
3. Menjaga Keberlanjutan → Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.
   a. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi

b. Terpatrinya orientasi sikap *(Attitude)* yang bertanggung jawab sebaai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju
c. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan inclusive dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan
d. Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan
e. Bersifat inklusif dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integratif
f. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, dengan cakupan :
   1) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
   2) Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia dan diare;
   3) Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil;
   4) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, yang mencakup:
   1) Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
   2) Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
   3) Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
   4) Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti termasuk fortifikasi pangan;
   5) Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
   6) Penguatan sistem surveilans gizi;
   7) Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
   8) Respons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
c. Peningkatan pengendalian penyakit Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, dan gangguan penglihatan. Selengkapnya strategi ini mencakup :
   1) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama, seperti diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, menggunakan tembakau dan alkohol; termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
   2) Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem kewaspadaan dini (early warning systems) kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
   3) Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit;
   4) Pengendalian resistensi antimikroba;
   5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mencakup:
   1) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
   2) Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik;
   3) Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, terutama terkait rokok, produk pangan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;

4) Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif terutama dalam pembudayaan olahraga, konsumsi gizi seimbang, anti rokok, skrining kesehatan, imunisasi, kepatuhan pengobatan, dan perilaku menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
5) Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

e. Penguatan Sistem Kesehatan
1) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang difokuskan pada:
a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; jdih.kemkes.go.id - 110 –
b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan), termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan daring termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis daring;
i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS Khusus;dan k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:
a) Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan; jdih.kemkes.go.id - 111 –
b) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes);
c) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;

d) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
e) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
f) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
g) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
h) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
i) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga nonkesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
j) Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes, yang difokuskan pada:
k) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
l) Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
m) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
n) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan
o) Pengembangan produksi dan sertifikasi alkes untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.

3) Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, yang difokuskan pada:
a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem singleentry;
d) Penguatan data rutin;
e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai (selain tembakau dan alkohol) dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah;
i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Dinas Kesehatan

Berdasarkan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada lingkup OPD Dinkes	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan		50	50	75	75	100	100
			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	C	B	B	B	B	B	B
			Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	2	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada lingkup OPD Dinkes	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan		50	50	75	75	100	100
			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	C	B	B	B	B	B	B
			Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	2	3	3	3	3	3	3
	Meningkatkan derajat	Meningkatnya derajat	Usia Harapan Hidup		67,82	67,77	67,87	67,97	68,07	68,17

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	kesehatan masyarakat	kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (dihitung per 100.000 kelahiran hidup)	219	210	205	200	190	183	175
			Angka Kematian Bayi (AKB) (dihitung per 1000 kelahiran hidup)	12.08	11.5	11.3	11.2	11.1	11.0	11.0
			Prevalensi Stunting	20,60	19,00	17.00	14,00	13,50	13,00	13,00
			Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
.		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	54,5	70	70	70	75	75	75

Berdasarkan tabel di atas tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas kesehatan pasaman barat tahun 2021-2026 terdapat 2 Tujuan, 3 Sasaran, dan 12 Indikator tujuan/sasaran yang targetnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari indikator tujuan tersebut yang sudah baik yaitu:

1. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan
2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan

3.2.2 RSUD Pasaman Barat

Sebagaimana telah dipaparkan dalam Rencana Strategis RSUD Pasaman Barat Tahun 2021-2026 tujuannya adalah : ”Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD Pasaman Barat” dengan indikator yaitu Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran RSUD Pasaman Barat adalah : “Meningkatnya Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD Pasaman Barat” dengan 2 (dua) indikator yaitu Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (RSUD Pasaman Barat).

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Dinas Kesehatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pembangunan kesehatan dan pengawasan bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan kesehatan di seluruh bidang yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 5 Program 20 Kegiatan dan 84 subkegiatan pada tabel 3.2 (T-C.33) berikut:

Tabel 3.2 (T-C. 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasaman Barat

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**123.352.931.163,00**							**125.720.232.640,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.352.931.163,00**							**125.720.232.640,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**123.352.931.163,00**							**125.720.232.640,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**57.902.235.518,00**						**100 %**	**61.185.286.224,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Dinas Kesehatan*	-			13 Dokumen	76.814.387,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	13 Dokumen	74.050.876,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	55.442.887,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	7 Dokumen	48.389.934,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	21.371.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	7 Laporan	25.660.942,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Dinas Kesehatan*	-			100 %	55.976.962.028,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	100 %	58.429.595.732,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				760 Orang/bulan	55.198.202.028,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	760 Orang/bulan	57.500.776.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	463.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	16 Dokumen	413.159.132,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	314.960.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Dokumen	515.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan*	-			45 Unit	112.111.370,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan dan pemeliharaan BMD Kantor Dinas Kesehatan, Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 Unit	118.983.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	65.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan dan pemeliharaan BMD Kantor Dinas Kesehatan, Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6 Dokumen	69.792.853,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	46.361.370,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan dan pemeliharaan BMD Kantor Dinas Kesehatan, Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Puskesmas	5 Laporan	49.191.112,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah peserta Diklat/ Bimtek*	-			150 Orang	266.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan	150 Orang	292.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				760 Paket	266.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan	760 Paket	292.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor*	-			100 %	414.422.943,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	100 %	721.549.151,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	157.839.815,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	2 Paket	282.592.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.952.128,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Paket	35.956.721,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	221.631.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	2 Laporan	403.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- *Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan*	-			5 Unit	338.143.140,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	-5 Uniit	705.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	288.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Unit	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50.143.140,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	4 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor*	-			100 %	313.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	100 %	328.506.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	280.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	12 Laporan	308.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	33.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Laporan	20.506.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*-Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara*	-			154 unit	404.781.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	154 unit	515.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52.095.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	5 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	144.725.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	6 Unit	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	107.961.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	142 Unit	270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.999.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	1 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**62.541.044.013,00**						**100 %**	**63.788.707.116,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	13.994.454.018,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	80 %	12.740.831.544,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	553.320.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	2 Unit	913.992.046,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	1.443.330.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	6 Unit	1.575.800.023,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	1.499.184.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	3 Unit	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	148.770.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Unit	195.930.442,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18724 Unit	4.617.388.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	18724 Unit	5.520.386.704,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				111 Unit	110.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	111 Unit	116.524.909,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	5.276.679.598,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Paket	3.410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				123.611 Keluarga	199.926.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	123.611 Keluarga	208.197.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	145.356.420,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Paket	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	47.909.842.895,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	100 %	50.877.935.118,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9605 Orang	281.890.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	9605 Orang	118.520.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8294 Orang	30.041.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	8294 Orang	76.959.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8260 Orang	30.003.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	8260 Orang	87.589.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33331 Orang	30.490.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	33331 Orang	53.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25324 Orang	145.020.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	25324 Orang	145.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				329337 Orang	56.680.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	329337 Orang	56.681.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13417 Orang	32.158.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	13417 Orang	32.159.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80029 Orang	56.680.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	80029 Orang	56.681.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2964 Orang	38.076.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	2964 Orang	38.076.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				983 Orang	37.946.150,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	983 Orang	37.946.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7197 Orang	37.160.600,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	7197 Orang	37.160.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13534 Orang	36.180.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	13534 Orang	36.180.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	221.137.100,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	7 Dokumen	222.410.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	231.537.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Dokumen	119.609.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				60 Dokumen	104.475.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	60 Dokumen	49.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				90 Dokumen	130.655.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	90 Dokumen	304.927.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	101.042.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Dokumen	101.045.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				20 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Dokumen	40.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	85.583.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	52 Dokumen	85.583.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				24700 Orang	21.132.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	24700 Orang	22.410.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				45 Orang	21.133.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	45 Orang	21.137.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				84 Dokumen	143.997.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	84 Dokumen	240.263.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	45.000.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	4 Dokumen	48.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				24700 Orang	20.528.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	24700 Orang	21.137.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				25 Paket	21.137.379,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	25 Paket	21.137.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				101 Dokumen	121.421.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	101 Dokumen	61.398.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	270.002.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	10 Dokumen	270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				24 Dokumen	104.523.770,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	24 Dokumen	78.679.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				20 Unit	193.730.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Unit	193.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	27.742.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	12 Laporan	29.413.941,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	27.742.811,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	12 Dokumen	27.742.811,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	81.521.985,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	1 Unit	81.521.985,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Orang	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				18 Orang	28.470.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	18 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi terintegrasi dengan SDM yang sesuai standar di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			6 Faskes	16.766.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan dan Pengelola SP2TP Puskesmas	6 Faskes	16.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	16.766.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan dan Pengelola SP2TP Puskesmas	1 Dokumen	16.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	619.980.850,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan Puskesmas, RSUD Ujung Gading	100 %	153.174.454,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				24 Unit	29.430.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan Puskesmas, RSUD Ujung Gading	24 Unit	2.698.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	590.550.850,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan Puskesmas, RSUD Ujung Gading	22 Unit	150.475.954,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**1.706.771.485,00**						**75 %**	**205.678.232,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi teknis Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut atas perizinanpraktik Tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat*	-			100	42.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	100	56.089.687,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1000 Dokumen	22.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	1000 Dokumen	24.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				500 Dokumen	20.570.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	500 Dokumen	31.834.687,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	1.099.888.735,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	100 %	134.588.545,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	23.090.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	25.399.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				748 Orang	1.007.888.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	748 Orang	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				200 Dokumen	68.910.485,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	200 Dokumen	24.189.535,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi tekhnis sesuai standar*	-			25 orang	564.262.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dengan JFT di bidang kesehatan	25 orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				300 Orang	564.262.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dengan JFT di bidang kesehatan	300 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan***	**75 %**			**65 %**	**434.417.000,00**						**75 %**	**247.097.721,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku*	-			25 Sarana	136.598.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana Pelayanan Farmasi, Toko Alkes dan optikal, UMOT	25 Sarana	136.598.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	136.598.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana Pelayanan Farmasi, Toko Alkes dan optikal, UMOT	30 Dokumen	136.598.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	-			12 kali	57.927.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Petugas ASPAK Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 kali	5.794.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	57.927.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Petugas ASPAK Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Dokumen	5.794.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industru Rumah Tangga Pangan (IRTP)*	-			30 IRTP	116.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP	30 IRTP	11.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				30 Dokumen	116.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP	30 Dokumen	11.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM*	-			100 %	68.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tempat Pengelola Makanan dan Depot Air Minum	100 %	38.027.981,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				200 Dokumen	68.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tempat Pengelola Makanan dan Depot Air Minum	200 Dokumen	38.027.981,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi*	-			26 Sampel	55.042.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP, Sampel Makanan	26 Sampel	55.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				28 Unit	55.042.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP, Sampel Makanan	28 Unit	55.042.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**768.463.147,00**						**75 %**	**293.463.347,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	544.463.347,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Posyandu, ASN Dinas Kesehatan	40	44.463.347,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				14 Dokumen	544.463.347,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Posyandu, ASN Dinas Kesehatan	14 Dokumen	44.463.347,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat*	-			11 Kecamatan	48.999.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan	49.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	48.999.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat	3 Dokumen	49.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			100%	175.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	100%	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	175.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD UJUNG GADING						**1.583.594.638,00**							**1.106.643.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.583.594.638,00**							**1.106.643.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.583.594.638,00**							**1.106.643.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**1.583.594.638,00**						**100 %**	**1.106.643.007,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	625.007.007,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	80 %	593.265.494,00	RSUD UJUNG GADING
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	625.007.007,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	1 Unit	593.265.494,00	RSUD UJUNG GADING
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	958.587.631,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	100 %	513.377.513,00	RSUD UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	958.587.631,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading		513.377.513,00	RSUD UJUNG GADING
	J U M L A H							**124.936.525.801,00**							**126.826.875.647,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS AIR BANGIS KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS AIR BANGIS						**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.610.523.900,00**						**100 %**	**1.035.130.550,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.610.523.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-1 Unit Kerja	1.035.130.550,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.610.523.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Unit Kerja	1.035.130.550,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**766.234.200,00**						**100 %**	**560.093.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	13.640.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	80 %	13.640.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	13.640.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	20 Unit	13.640.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	752.594.200,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	100 %	546.453.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				410 Orang	70.465.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	410 Orang	59.665.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	350 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				405 Orang	15.122.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	405 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1498 Orang	14.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	1498 Orang	7.674.150,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2471 Orang	41.275.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	2471 Orang	3.284.650,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8902 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	8902 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1344 Orang	30.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	1344 Orang	31.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	174 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	64 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	7.656.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	2 Orang	2.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	27.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	350 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				590 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	590 Orang	2.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	6.715.350,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	12 Dokumen	6.715.350,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				13 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	13 Dokumen	1.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				19 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	19 Dokumen	22.500.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				35 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	35 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				130 Dokumen	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	130 Dokumen	19.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				26 Dokumen	12.983.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	26 Dokumen	12.983.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	30 Dokumen	1.700.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				29 Orang	8.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	29 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	98.175.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	24 Dokumen	98.175.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	3 Paket	1.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				83 Dokumen	281.456.200,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	83 Dokumen	165.685.850,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				11 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	11 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	14.175.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	35 Orang	6.450.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				30 Orang	10.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	30 Orang	10.620.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**90.000.000,00**						**75 %**	**28.980.350,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	90.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	100 %	28.980.350,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				88 Orang	90.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	88 Orang	28.980.350,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**17.500.000,00**						**75 %**	**14.600.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	40	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				160 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	160 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			12	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	12	3.600.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	12 Dokumen	3.600.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	J U M L A H							**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PARAMAN AMPALU KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PARAMAN AMPALU						**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.229.181.700,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.229.181.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.229.181.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**762.589.570,00**						**100 %**	**855.481.520,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	13.992.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas Paraman Ampalu	80 %	14.992.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				19 Unit	13.992.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas Paraman Ampalu	19 Unit	14.992.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	748.597.570,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	100 %	840.489.520,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	30.330.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	310 Orang	37.180.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	300 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	300 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				820 Orang	24.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	820 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1780 Orang	9.375.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1780 Orang	10.375.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9130 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	9130 Orang	22.066.600,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	430 Orang	14.260.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1210 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1210 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	310 Orang	4.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	4.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	40 Orang	1.600.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	225.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	1.225.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	336.725.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	50 Dokumen	350.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				14 Dokumen	8.850.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	9.850.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				65 Dokumen	11.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	65 Dokumen	12.400.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	18.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	26.838.220,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				24 Dokumen	6.150.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	24 Dokumen	7.150.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	4.600.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				22 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	22 Orang	4.600.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				40 Dokumen	74.905.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	40 Dokumen	75.905.700,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	20 Paket	3.500.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				14 Dokumen	154.011.870,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	154.839.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1 Laporan	3.400.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	8.500.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				60 Orang	5.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	6.700.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**36.960.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	36.960.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Paraman Ampalu	100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				68 Orang	36.960.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Paraman Ampalu	68 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**20.000.000,00**						**75 %**	**24.568.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	40	11.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				42 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	42 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			100%	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	100%	13.568.050,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	12 Dokumen	13.568.050,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	J U M L A H							**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SUNGAI AUR KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SUNGAI AUR						**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**2.031.423.253,00**						**100 %**	**1.463.018.253,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	2.031.423.253,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	100 %	1.463.018.253,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.031.423.253,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Puskesmas	1 Unit Kerja	1.463.018.253,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**801.805.000,00**						**100 %**	**790.620.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	801.805.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	100 %	790.620.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	59.536.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	450 Orang	60.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	380 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				370 Orang	750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	370 Orang	1.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1225 Orang	51.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	1225 Orang	52.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	2700 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9000 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	9000 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				987 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	987 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				256 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	256 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	83 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				78 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	78 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				510 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	510 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				8 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	8 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	77.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	25 Dokumen	78.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	50 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				210 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	210 Dokumen	620.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				60 Dokumen	59.783.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	60 Dokumen	60.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	30 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	15 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				32 Dokumen	94.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	32 Dokumen	96.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	20 Paket	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	292.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				133 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	133 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				53 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	53 Orang	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1013 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	1013 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				66 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	66 Orang	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.600.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sungai Aur	100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 202	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				528 Orang	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sungai Aur	528 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**19.400.000,00**						**75 %**	**21.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	-			40 Posyandu	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	40 Posyandu	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				75 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	75 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			2 Dokumen	9.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader Kesehatan	2 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	9.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader Kesehatan	2 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	J U M L A H							**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS MUARO KIAWAI KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS MUARO KIAWAI						**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**622.566.723,00**						**100 %**	**37.967.473,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	622.566.723,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	1 Unit Kerja	37.967.473,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	622.566.723,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	1 Unit Kerja	37.967.473,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**100 %**			**100 %**	**779.355.000,00**						**100 %**	**549.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			**100 %**	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Alat Kesehatan	**100 %**	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				15 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Alat Kesehatan	15 Unit	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	769.355.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	100 %	539.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				369 Orang	18.580.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	369 Orang	120.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				352 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	352 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	150 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1462 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1462 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1706 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1706 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8449 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	8449 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				796 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	796 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2218 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	2218 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	20 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				27 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	27 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	20 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	5 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	2 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				6 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	6 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				17 Dokumen	30.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	17 Dokumen	31.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	29.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	6 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	25 Dokumen	25.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	52.983.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	9 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	6 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	15 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				28 Dokumen	84.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	28 Dokumen	85.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				3 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	3 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	388.755.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	15 Dokumen	25.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	20 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				25 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	25 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**-**	**39.000.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			-	39.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kunjungan puskesmas yang mendapat layanan	-	40.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	39.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kunjungan puskesmas yang mendapat layanan		40.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**15.000.000,00**						**75 %**	**15.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	40	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				20 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	20 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	J U M L A H							**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS KINALI KAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KINALI						**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.923.059.039,00**						**100 %**	**1.484.673.068,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.923.059.039,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	1 Unit Kerja	1.484.673.068,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.923.059.039,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	1 Unit Kerja	1.484.673.068,00	PUSKESMAS KINALI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**842.216.000,00**						**100 %**	**590.134.875,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Alat Kesehatan	80 %	22.000.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				26 Unit	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Alat Kesehatan	26 Unit	22.000.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	822.216.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	-100 %	568.134.875,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				819 Orang	78.775.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	819 Orang	86.625.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	286 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				235 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	235 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	11.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	228 Orang	12.375.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3723 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	3723 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15834 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	15834 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3688 Orang	13.320.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	3688 Orang	14.652.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1240 Orang	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1240 Orang	4.125.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				229 Orang	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	229 Orang	4.125.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				76 Orang	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	76 Orang	4.125.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				428 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	428 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				216 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	216 Orang	3.300.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				136 Dokumen	369.080.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	136 Dokumen	74.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				45 Dokumen	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	45 Dokumen	4.092.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				128 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	128 Dokumen	24.750.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				15 Dokumen	68.940.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	15 Dokumen	75.834.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				54 Dokumen	7.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	54 Dokumen	7.920.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	40 Orang	3.960.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				540 Dokumen	78.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	540 Dokumen	86.625.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	94.701.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	24 Dokumen	99.666.875,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				324 Laporan	6.750.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	324 Laporan	7.425.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				180 Orang	11.850.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	180 Orang	13.035.000,00	PUSKESMAS KINALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan***	**75 %**			**65 %**	**18.000.000,00**						**75 %**	**19.800.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku*	-			25 Sarana	18.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	-25 Sarana	19.800.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				238 Dokumen	18.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	238 Dokumen	19.800.000,00	PUSKESMAS KINALI
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**15.000.000,00**						**75 %**	**16.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	7.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	40	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	-1 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	J U M L A H							**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS IV KOTO KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS IV KOTO						**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.083.898.415,00**						**100 %**	**1.083.898.415,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit	1.083.898.415,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat	1 unit	1.083.898.415,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.083.898.415,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.083.898.415,00	PUSKESMAS IV KOTO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**788.780.000,00**						**100 %**	**1.100.977.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	12.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas	80 %	12.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	12.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas	12 Unit	12.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	776.780.000,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	-100 %	1.088.977.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				625 Orang	40.940.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	625 Orang	95.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				618 Orang	6.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	618 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				523 Orang	9.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	523 Orang	14.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2957 Orang	54.675.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	2957 Orang	65.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				605 Orang	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	605 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5433 Orang	10.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	5433 Orang	23.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7251 Orang	7.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	7251 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5354 Orang	5.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	5354 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				198 Orang	5.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	198 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				82 Orang	10.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	82 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				602 Orang	13.650.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	602 Orang	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				804 Orang	6.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	804 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	2 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	303.045.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	350.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	15.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	10.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	23.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	27.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	60.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	8.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6 Orang	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	6 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	84.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	24 Dokumen	90.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	2.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	100 Paket	5.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				35 Dokumen	107.795.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	35 Dokumen	180.977.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				14 Laporan	2.850.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	14 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				52 Orang	12.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	52 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				200 Orang	900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	200 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**42.000.000,00**						**75 %**	**93.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	42.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas	-100 %	93.600.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	42.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Orang	93.600.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**75 %**			**100 %**	**18.300.000,00**						**75 %**	**25.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	-			100 %	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Lintas Sektor, Tenaga Kesehatan	-100 %	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Lintas Sektor, Tenaga Kesehatan		15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			250 Dokumen	9.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	-250 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				250 Dokumen	9.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	250 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	J U M L A H							**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SASAK KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SASAK						**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.000.050.972,00**						**100 %**	**427.355.972,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.000.050.972,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	1 Unit Kerja	427.355.972,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.000.050.972,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	1 Unit Kerja	427.355.972,00	PUSKESMAS SASAK
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**789.441.520,00**						**100 %**	**552.395.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	789.441.520,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Semua Kelompok Masyarakat	-100 %	552.395.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	76.029.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	425 Orang	76.029.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Semua Kelompok Masyarakat	430 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44 Orang	3.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	44 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	26.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	15 Orang	15 Orang	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1925 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	1925 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	4.875.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	65 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2270 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	2270 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2865 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	2865 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	110 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	65 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				90 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	90 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				82 Orang	6.150.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	82 Orang	6.150.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				15 Dokumen	1.125.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	15 Dokumen	1.125.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				55 Dokumen	145.105.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	55 Dokumen	145.105.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	9.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	15 Dokumen	9.750.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				290 Dokumen	30.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	290 Dokumen	30.800.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				220 Dokumen	42.625.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	220 Dokumen	42.625.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				130 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	130 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	15 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				115 Dokumen	74.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	115 Dokumen	74.136.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				424 Dokumen	272.921.520,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	424 Dokumen	31.800.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	12 Laporan	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				65 Orang	4.875.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	65 Orang	4.875.000,00	PUSKESMAS SASAK
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.500.000,00**						**75 %**	**39.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	-100 %	39.500.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	39.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	4 Orang	39.500.000,00	PUSKESMAS SASAK
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**10.000.000,00**						**75 %**	**10.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	-40	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Semua Kelompok Masyarakat	15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	J U M L A H							**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS OPHIR KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS OPHIR						**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.747.650.274,00**						**100 %**	**0,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.747.650.274,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Ophir, Kantor UPT Puskesmas Ophir	-1 Unit Kerja	1.747.650.274,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.747.650.274,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Ophir, Kantor UPT Puskesmas Ophir	1 Unit Kerja	1.747.650.274,00	PUSKESMAS OPHIR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**829.753.000,00**						**100 %**	**1.260.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	829.753.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	-100 %	1.260.600.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1034 Orang	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	1034 Orang	80.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				622 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	622 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				730 Orang	7.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	730 Orang	3.600.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2042 Orang	11.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	2042 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				533 Orang	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	533 Orang	30.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31221 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	31221 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3717 Orang	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	3717 Orang	50.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8054 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	8054 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				298 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	298 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				59 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	59 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	35 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	8 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	2 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	153.369.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	14 Dokumen	450.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 202	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				121 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	121 Dokumen	31.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				259 Dokumen	17.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	259 Dokumen	50.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				111 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	111 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				53 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	53 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	25 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				28 Dokumen	110.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	28 Dokumen	160.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				48 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	48 Paket	10.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	340.534.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	100 Dokumen	200.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	2 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	30 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	1.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	10 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**10.000.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				166 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	166 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**21.000.000,00**						**75 %**	**51.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat.	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				14 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat.	14 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				14 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-14 Dokumen	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				14 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	14 Dokumen	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	J U M L A H							**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS DESA BARU KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS DESA BARU						**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**768.452.434,00**						**100 %**	**250.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	768.452.434,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	-**100 %**	250.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	768.452.434,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	1 Unit Kerja	250.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**737.430.091,00**						**100 %**	**513.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	737.430.091,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	-100 %	513.600.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				330 Orang	94.890.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	330 Orang	96.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	5.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	300 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	4.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	245 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1070 Orang	6.630.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	1070 Orang	7.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2172 Orang	15.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	2172 Orang	16.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6850 Orang	4.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	6850 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1112 Orang	9.990.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	1112 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	80 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	80 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				42 Orang	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	42 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	38 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	2 Orang	4.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				5 Dokumen	5.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	5 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				23 Dokumen	51.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	23 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				25 Dokumen	10.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	25 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				52 Dokumen	50.025.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	52 Dokumen	51.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				17 Dokumen	56.253.050,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	17 Dokumen	57.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				70 Dokumen	9.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	70 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	7.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	10 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	94.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	17 Dokumen	96.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	10 Paket	1.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	265.181.041,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	100 Dokumen	19.600.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				8 Laporan	4.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	8 Laporan	5.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	36 Orang	6.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				15 Orang	7.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	15 Orang	7.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**56.169.950,00**						**75 %**	**60.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	56.169.950,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Desa Baru	100 %	60.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				63 Orang	56.169.950,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Desa Baru	63 Orang	60.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**16.875.000,00**						**75 %**	**18.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40 organisasi	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Lintas Sektor	-40 organisasi	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Lintas Sektor	15 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				24 Dokumen	6.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat dan Lintas Sektor	-24 Dokumen	7.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				24 Dokumen	6.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat dan Lintas Sektor	24 Dokumen	7.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	J U M L A H							**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LEMBAH BINUANG KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS LEMBAH BINUANG						**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**570.427.018,00**						**100 %**	**30.572.018,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	570.427.018,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	570.427.018,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas		30.572.018,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**745.126.000,00**						**100 %**	**495.910.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-80 %	15.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Unit	15.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	730.126.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-100 %	480.410.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				405 Orang	113.539.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	405 Orang	114.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	385 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	1.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	395 Orang	1.800.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2195 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2195 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2522 Orang	32.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2522 Orang	33.760.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14051 Orang	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	14051 Orang	2.310.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1395 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1395 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masayraakat	343 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	29 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				29 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	29 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				102 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	102 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	100 Orang	2.310.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Dokumen	3.300.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				27 Dokumen	48.860.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	27 Dokumen	50.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				23 Dokumen	29.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	23 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				334 Dokumen	42.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	334 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				66 Dokumen	40.260.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	66 Dokumen	41.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				35 Dokumen	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.200.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				57 Dokumen	52.036.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	57 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				8 Paket	1.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-8 Paket	Masyarakat	1.320.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	279.681.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas	12 Dokumen	15.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				18 Laporan	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	18 Laporan	2.310.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	2.100.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.230.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.230.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	39.230.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**20.000.000,00**						**75 %**	**22.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				62 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	62 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-4 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	4 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	J U M L A H							**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KAJAI KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KAJAI						**1.669.291.264,00**							**854.027.264,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**815.264.000,00**							**447.896.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**815.264.000,00**							**447.896.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% pencapaian SPM bidang keseahtan***	**100 %**			**100 %**	**747.404.000,00**						**100 %**	**389.636.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan ketersediaan sarana prasarana, obat, vaksin dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan di lingkungan dinas kesehatan*	-			237 Orang	747.404.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-237 Orang	389.636.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				237 Orang	72.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	237 Orang	45.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	14.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	216 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	11.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	210 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				429 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	429 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1626 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1626 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1020 Orang	45.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1020 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1575 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1575 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				191 Orang	45.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	191 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	45.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	70 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	32 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				378 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	378 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				6 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	6 Dokumen	5.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	82.793.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	25 Dokumen	47.500.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				8 Dokumen	37.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	8 Dokumen	18.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	5 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				51 Dokumen	56.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	51 Dokumen	33.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	21.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	35 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				38 Dokumen	97.661.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	38 Dokumen	94.136.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				63 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	63 Laporan	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				70 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	70 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				150 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	150 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di fasilitas kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan***	**75 %**			**100 %**	**38.260.000,00**						**75 %**	**38.260.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)*	-			50 Orang	38.260.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-50 Orang	38.260.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	38.260.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	50 Orang	38.260.000,00	PUSKESMAS KAJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**29.600.000,00**						**75 %**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-40	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	4 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)*	-			5 Dokumen	10.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-5 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	10.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	5 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	X	**NON URUSAN**						**854.027.264,00**							**406.131.264,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**854.027.264,00**							**406.131.264,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan BLUD pelayanan dan penunjang kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**854.027.264,00**						**100 %**	**406.131.264,00**	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	-			1 Unit	854.027.264,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-1 Unit	406.131.264,00	PUSKESMAS KAJAI
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	854.027.264,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	1 Unit Kerja	406.131.264,00	PUSKESMAS KAJAI
	J U M L A H							**1.669.291.264,00**							**854.027.264,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SIMPANG EMPAT						**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**848.250.592,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	848.250.592,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT

	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	848.250.592,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**		**100 %**	**795.105.000,00**						**100 %**	**548.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	795.105.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	548.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 Orang	119.107.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	345 Orang	120.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				504 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyaralat	504 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				414 Orang	4.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	414 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1839 Orang	44.650.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1839 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	680 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3944 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3944 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6827 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	6827 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5550 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	5550 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	205 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	33 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				127 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	127 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22 Dokumen	284.269.350,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	22 Dokumen	54.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				11 Dokumen	18.969.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	11 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				132 Dokumen	42.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	132 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				159 Dokumen	61.973.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	159 Dokumen	63.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				22 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	22 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	6 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				53 Dokumen	99.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	53 Dokumen	100.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.000.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				106 Orang	39.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	106 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**10.000.000,00**						**75 %**	**11.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	-			40 Posyandu	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	40 Posyandu	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				159 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	159 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	J U M L A H							**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SUKOMENANTI KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SUKOMENANTI						**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**883.598.657,00**						**100 %**	**0,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	883.598.657,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN dan masyarakat	-1 Unit Kerja	883.598.657,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	883.598.657,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN dan masyarakat	1 Unit Kerja	883.598.657,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**850.967.000,00**						**100 %**	**552.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	17.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-80 %	17.100.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	17.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	12 Unit	17.100.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	833.967.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-100 %	535.200.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	108.129.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	415 Orang	109.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	350 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				342 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	342 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1195 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	1195 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2518 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	2518 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8600 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	8600 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	900 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	216 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	80 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	9.225.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	48 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	13 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				244 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	244 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	52.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	20 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				48 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	48 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				203 Dokumen	25.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	203 Dokumen	25.900.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				25 Dokumen	52.983.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	25 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				25 Dokumen	1.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	25 Dokumen	1.800.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				14 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	14 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30 Dokumen	85.315.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	30 Dokumen	87.700.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				244 Paket	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	244 Paket	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	355.345.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	12 Dokumen	30.300.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	4.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	12 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	10 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				90 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	90 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**0,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sukomenanti	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				75 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sukomenanti	75 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**15.000.000,00**						**75 %**	**16.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				68 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	68 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				60 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-60 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				60 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	60 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	J U M L A H							**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PARIT KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PARIT						**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.690.569.283,00**						**100 %**	**1.102.120.783,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	1.690.569.283,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Parit, UPT Puskesmas Parit	-100 %	1.102.120.783,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.690.569.283,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Parit, UPT Puskesmas Parit	1 Unit Kerja	1.102.120.783,00	PUSKESMAS PARIT
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**705.116.120,00**						**100 %**	**594.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				25 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarkat	-25 Unit	10.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				25 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	25 Unit	10.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	695.116.120,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	583.900.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				706 Orang	77.540.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	706 Orang	97.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				583 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	583 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				541 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	541 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1777 Orang	39.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1777 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8270 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	8270 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28116 Orang	9.860.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	28116 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1391 Orang	12.959.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1391 Orang	15.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7166 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	7166 Orang	2.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				229 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	229 Orang	2.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				59 Orang	9.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	59 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				258 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	258 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	800.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Dokumen	2.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	41.875.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	20 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	14.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	24 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				210 Dokumen	9.928.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	210 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	30.588.050,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	14 Dokumen	68.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				82 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	82 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				37 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	37 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				170 Dokumen	99.927.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	170 Dokumen	102.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Paket	1.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	286.062.370,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	86.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				66 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	66 Laporan	6.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				66 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	66 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	5 Orang	3.100.000,00	PUSKESMAS PARIT
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**160.000.000,00**						**75 %**	**160.500.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	160.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-Masyarakat	-100 %	160.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	160.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-Masyarakat	100 Orang	160.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**8.278.500,00**						**75 %**	**14.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	1.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				59 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	59 Dokumen	1.500.000,00	PUSKESMAS PARIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				4 Dokumen	7.278.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-4 Dokumen	12.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	7.278.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	4 Dokumen	12.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	J U M L A H							**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS UJUNG GADING KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS UJUNG GADING						**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.530.838.091,00**						**100 %**	**956.072.441,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	1.530.838.091,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-100 %	956.072.441,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.530.838.091,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	1 Unit Kerja	956.072.441,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**798.486.450,00**						**100 %**	**596.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			o %	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-80 %	10.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat		10.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	798.486.450,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-100 %	586.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				923 Orang	120.704.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	923 Orang	97.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				881 Orang	37.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	881 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				781 Orang	37.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	781 Orang	38.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4132 Orang	105.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4132 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4682 Orang	37.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4682 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25376 Orang	108.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	25376 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4055 Orang	18.775.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4055 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				670 Orang	18.775.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	670 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				783 Orang	11.275.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	783 Orang	12.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				98 Orang	4.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	98 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				98 Orang	11.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	98 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6 Orang	19.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	6 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	53.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	54.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				170 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	170 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				175 Dokumen	25.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	175 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				15 Dokumen	47.425.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	15 Dokumen	59.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				38 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	38 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	15 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				134 Dokumen	64.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	134 Dokumen	95.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	1 Paket	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	5.995.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				22 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	22 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	14.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	10 Orang	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	10 Orang	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**37.680.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	37.680.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				79 Orang	37.680.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	79 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**30.000.000,00**						**75 %**	**32.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	15 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dn supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)*	-			4 dokumen	20.000.000,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-4 dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4 Dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	J U M L A H							**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SILAPING KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SILAPING						**1.880.765.332,00**							**1.456.917.782,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**850.851.550,00**							**1.003.850.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**850.851.550,00**							**1.003.850.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**635.671.550,00**						**100 %**	**942.850.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	635.671.550,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-100 %	942.850.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				239 Orang	51.650.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	239 Orang	105.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				247 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	247 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	246 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				840 Orang	14.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	840 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	21.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3000 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	10.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	10.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	650 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	600 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	200 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				51 Orang	5.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	51 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				134 Orang	12.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	134 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	4.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				4 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	4 Dokumen	600.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	51.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	20 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				90 Dokumen	8.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	90 Dokumen	35.250.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				77 Dokumen	15.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	77 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				127 Dokumen	24.025.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	127 Dokumen	72.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				170 Dokumen	6.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	170 Dokumen	96.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	1.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9820 Dokumen	49.725.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	9820 Dokumen	27.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Paket	3.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	294.571.550,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Dokumen	350.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				87 Orang	5.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	87 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	3.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**186.130.000,00**						**75 %**	**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	186.130.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	30.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				91 Orang	186.130.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	91 Orang	30.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**29.050.000,00**						**75 %**	**31.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				13 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	13 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				56 Dokumen	19.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-56 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				56 Dokumen	19.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	56 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	X	**NON URUSAN**						**1.029.913.782,00**							**453.067.782,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.029.913.782,00**							**453.067.782,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.029.913.782,00**						**100 %**	**453.067.782,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.029.913.782,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-1 Unit Kerja	453.067.782,00	PUSKESMAS SILAPING
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.029.913.782,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Unit Kerja	453.067.782,00	PUSKESMAS SILAPING
	J U M L A H							**1.880.765.332,00**							**1.456.917.782,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS TALU KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TALU						**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.407.089.518,00**						**100 %**	**815.847.368,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.407.089.518,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-1 Unit Kerja	815.847.368,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.407.089.518,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	1 Unit Kerja	815.847.368,00	PUSKESMAS TALU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**790.380.699,00**						**100 %**	**563.650.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-80 %	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	10 Unit	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	780.380.699,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-100 %	552.650.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				476 Orang	162.380.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	476 Orang	100.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				454 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	454 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				422 Orang	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	422 Orang	1.200.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2036 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	2036 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				819 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	819 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12107 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12107 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1265 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	1265 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3155 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	3155 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	220 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				68 Orang	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	68 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				162 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	162 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	2 Orang	1.200.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				28 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	28 Dokumen	3.300.000,00	PUSKESMAS TALU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				144 Dokumen	51.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	144 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	24 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				157 Dokumen	37.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	157 Dokumen	41.250.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				144 Dokumen	47.988.150,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	144 Dokumen	48.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				96 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	96 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				27 Dokumen	81.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	27 Dokumen	89.100.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				4 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	4 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	2 Paket	1.100.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	227.612.549,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12 Dokumen	36.300.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12 Laporan	1.100.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				162 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	162 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12 Orang	1.100.000,00	PUSKESMAS TALU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.400.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				73 Orang	39.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	73 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS TALU
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**20.000.000,00**						**75 %**	**22.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				60 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	60 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			71 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-60 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				71 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	71 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	J U M L A H							**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS RANAH SALIDO KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 202	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS RANAH SALIDO						**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.041.938.780,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.041.938.780,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.041.938.780,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**744.322.650,00**						**100 %**	**854.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	744.322.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	854.500.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	73.710.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	341 Orang	104.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				335 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	335 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	16.370.350,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	295 Orang	17.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	40.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1200 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				738 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	738 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12318 Orang	23.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12318 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1185 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1185 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2993 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2993 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				111 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	111 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	37 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	350 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				450 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	450 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				11 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	11 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				19 Dokumen	51.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-Masyarakat	19 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	12.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Dokumen	33.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	22.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	100 Dokumen	33.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	47.220.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	11 Dokumen	48.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				21 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	21 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				27 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	27 Dokumen	27 Dokumen	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				3 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3 Paket	2.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	260.522.300,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	5 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.600.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**30.000.000,00**						**75 %**	**32.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				55 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	55 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				50 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-50 Dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				50 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	J U M L A H							**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS VI KOTO SELATAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS VI KOTO SELATAN						**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**616.716.749,00**						**100 %**	**72.035.628,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	616.716.749,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	1 Unit Kerja	72.035.628,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	616.716.749,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	1 Unit Kerja	72.035.628,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**750.709.218,00**						**100 %**	**731.585.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	-80 %	25.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	15 Unit	25.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	725.709.218,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-100 %	706.585.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	83.673.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	390 Orang	83.674.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	295 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	295 Orang	750.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	350 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				455 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	455 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				455 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	455 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1040 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	1040 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	400 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47 Orang	6.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	47 Orang	7.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	37 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				54 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	54 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	54 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	2.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	3 Dokumen	2.400.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	61.899.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	20 Dokumen	61.900.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	12 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				52 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	52 Dokumen	225.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				17 Dokumen	24.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	17 Dokumen	25.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				65 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	65 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	94.135.995,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	50 Dokumen	94.136.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	10 Paket	1.500.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	296.849.242,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	12 Dokumen	300.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				33 Laporan	5.000.003,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	33 Laporan	5.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	8.000.003,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				15 Orang	5.000.003,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**38.960.472,00**						**75 %**	**38.960.471,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	38.960.472,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas vI koto selatan	-100 %	38.960.471,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				60 Orang	38.960.472,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas vI koto selatan	60 Orang	38.960.471,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**18.200.010,00**						**75 %**	**18.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-40	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	10.000.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				60 Dokumen	8.200.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas VI koto selatan dan masyarakat	-60 Dokumen	8.200.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				60 Dokumen	8.200.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas VI koto selatan dan masyarakat	60 Dokumen	8.200.005,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	J U M L A H							**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS AIA GADANG KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS AIA GADANG						**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**488.631.452,00**						**100 %**	**165.000.000,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	488.631.452,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-1 Unit Kerja	165.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	488.631.452,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskemsas	1 Unit Kerja	165.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**799.926.000,00**						**100 %**	**358.225.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	80 %	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Unit	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	796.926.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	100 %	354.725.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				212 Orang	30.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	212 Orang	52.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				558 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	558 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				485 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	485 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2176 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2176 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1286 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1286 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12721 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakt	12721 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1253 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1253 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				505 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	505 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				122 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	122 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	300 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3 Orang	4.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Dokumen	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				96 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	96 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	24 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				36 Dokumen	41.687.202,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	36 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				180 Dokumen	23.104.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	180 Dokumen	24.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				36 Dokumen	1.920.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	36 Dokumen	2.200.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyaralat	12 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	48 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3 Paket	1.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	504.414.548,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyaralat	12 Dokumen	15.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				500 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	500 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	1.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Orang	2.025.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**75 %**			**-**	**20.000.000,00**						**75 %**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-6 Orang	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-6 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				6 Orang	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	6 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**8.000.000,00**						**75 %**	**9.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	40	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				21 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	21 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			7 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-7 Dokumen	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	7 Dokumen	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	J U M L A H							**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**14.562.831.173,00**						**-**	**14.758.063.173,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN*	-			100 %	13.597.287.708,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH	-	13.601.171.848,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				290 Orang/bulan	13.216.227.708,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH	13.216.226.848,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	381.060.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH		384.945.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peragkat Daerah*	-			100 %	40.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH	-	40.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	40.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH		40.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat Daerah*	-			100 %	107.905.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH	-	109.252.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	107.905.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH		109.252.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang Operasional Perangkat Daerah*	-			100 %	817.438.465,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH	-	1.007.439.325,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	817.438.465,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH		1.007.439.325,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**47.141.051.857,00**						**100 % 100 %**	**47.141.051.857,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RS sesuai Standar*	-			100 %	47.141.051.857,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH	-	47.141.051.857,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	47.141.051.857,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- RUMAH SAKIT UMUMDAERAH		47.141.051.857,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**2.074.800.000,00**						**75 %**	**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang telah sesuai dengan standar*	-			247 orang	2.074.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-ASN RSUD Pasaman Barat	-	1.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				24 Orang	2.074.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-ASN RSUD Pasaman Barat		1.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	J U M L A H							**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 terdiri dari 5 program, 20 kegiatan dan 84 sub kegiatan, Rencana Kerja UPT Puskesmas tahun 2024 terdiri dari 4 Program 6 Kegiatan dan 35 subkegiatan (tergantung kebutuhan masing-masing 20 UPT Puskesmas) serta Rencana Kerja RSUD Pasmaan Barat terdiri dari 3 Program 12 Kegiatan dan 13 Subkegiatan. Secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pembiayaan dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Transfer- Dana Alokasi Umum dan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan PMK 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non fisik) serta dana yang bersumber BLUD untuk Puskesmas dan RSUD Pasaman Barat.

Berikut detail Tujuan, sasaran dan program, kegiatan, subkegiatan yang diajukan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**123.352.931.163,00**							**125.720.232.640,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.352.931.163,00**							**125.720.232.640,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**123.352.931.163,00**							**125.720.232.640,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**57.902.235.518,00**						**100 %**	**61.185.286.224,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Dinas Kesehatan*	-			13 Dokumen	76.814.387,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	13 Dokumen	74.050.876,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	55.442.887,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	7 Dokumen	48.389.934,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	21.371.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	7 Laporan	25.660.942,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Dinas Kesehatan*	-			100 %	55.976.962.028,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	100 %	58.429.595.732,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				760 Orang/bulan	55.198.202.028,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	760 Orang/bulan	57.500.776.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	463.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	16 Dokumen	413.159.132,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	314.960.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Dokumen	515.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan*	-			45 Unit	112.111.370,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan dan pemeliharaan BMD Kantor Dinas Kesehatan, Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Puskesmas	-45 Unit	118.983.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	65.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan dan pemeliharaan BMD Kantor Dinas Kesehatan, Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6 Dokumen	69.792.853,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	46.361.370,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan dan pemeliharaan BMD Kantor Dinas Kesehatan, Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Puskesmas	5 Laporan	49.191.112,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah peserta Diklat/ Bimtek*	-			150 Orang	266.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan	-150 Orang	292.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				760 Paket	266.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan	760 Paket	292.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor*	-			100 %	414.422.943,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	-100 %	721.549.151,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	157.839.815,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	2 Paket	282.592.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.952.128,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Paket	35.956.721,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	221.631.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	2 Laporan	403.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			1 Unit	338.143.140,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Unit	705.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	288.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Unit	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50.143.140,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	4 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor*	-			100 %	313.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	-100 %	328.506.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	280.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	12 Laporan	308.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	33.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kantor Dinas Kesehatan	1 Laporan	20.506.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			5 unit	404.781.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	- 5 unit	515.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52.095.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	5 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	144.725.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	6 Unit	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	107.961.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	142 Unit	270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.999.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	1 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**62.541.044.013,00**						**100 %**	**63.788.707.116,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	13.994.454.018,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	-80 %	12.740.831.544,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	553.320.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	2 Unit	913.992.046,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	1.443.330.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	6 Unit	1.575.800.023,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	1.499.184.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	3 Unit	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	148.770.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Unit	195.930.442,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18724 Unit	4.617.388.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	18724 Unit	5.520.386.704,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				111 Unit	110.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	111 Unit	116.524.909,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	5.276.679.598,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Paket	3.410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				123.611 Keluarga	199.926.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	123.611 Keluarga	208.197.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	145.356.420,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	1 Pake	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	47.909.842.895,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	-100 %	50.877.935.118,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9605 Orang	281.890.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	9605 Orang	118.520.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8294 Orang	30.041.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	8294 Orang	76.959.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8260 Orang	30.003.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	8260 Orang	87.589.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33331 Orang	30.490.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	33331 Orang	53.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25324 Orang	145.020.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	25324 Orang	145.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				329337 Orang	56.680.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	329337 Orang	56.681.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13417 Orang	32.158.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	13417 Orang	32.159.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80029 Orang	56.680.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	80029 Orang	56.681.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2964 Orang	38.076.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	2964 Orang	38.076.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				983 Orang	37.946.150,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	983 Orang	37.946.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7197 Orang	37.160.600,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	7197 Orang	37.160.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13534 Orang	36.180.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	13534 Orang	36.180.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	221.137.100,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	7 Dokumen	222.410.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	231.537.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Dokumen	119.609.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				60 Dokumen	104.475.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	60 Dokumen	49.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				90 Dokumen	130.655.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	90 Dokumen	304.927.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	101.042.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Dokumen	101.045.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				20 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Dokumen	40.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	85.583.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	52 Dokumen	85.583.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				24700 Orang	21.132.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	24700 Orang	22.410.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				45 Orang	21.133.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	45 Orang	21.137.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				84 Dokumen	143.997.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	84 Dokumen	240.263.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	45.000.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	4 Dokumen	48.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				24700 Orang	20.528.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	24700 Orang	21.137.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				25 Paket	21.137.379,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	25 Paket	21.137.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				101 Dokumen	121.421.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	101 Dokumen	61.398.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	270.002.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	10 Dokumen	270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				24 Dokumen	104.523.770,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	24 Dokumen	78.679.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				20 Unit	193.730.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Unit	193.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	27.742.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	12 Laporan	29.413.941,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	27.742.811,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	12 Dokumen	27.742.811,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	81.521.985,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	1 Unit	81.521.985,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	20 Orang	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				18 Orang	28.470.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, ASN DInas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD Ujung Gading, Satgas Covid-19 bid. kesehatan, PMI	18 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi terintegrasi dengan SDM yang sesuai standar di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			6 Faskes	16.766.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan dan Pengelola SP2TP Puskesmas	-6 Faskes	16.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	16.766.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan dan Pengelola SP2TP Puskesmas	1 Dokumen	16.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100	619.980.850,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan Puskesmas, RSUD Ujung Gading	-100	153.174.454,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				24 Unit	29.430.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan Puskesmas, RSUD Ujung Gading	24 Unit	2.698.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	590.550.850,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan Puskesmas, RSUD Ujung Gading	22 Unit	150.475.954,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**1.706.771.485,00**						**75 %**	**205.678.232,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi teknis Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut atas perizinanpraktik Tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat*	-			100	42.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	-100	56.089.687,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1000 Dokumen	22.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	1000 Dokumen	24.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				500 Dokumen	20.570.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	500 Dokumen	31.834.687,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	1.099.888.735,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	-100 %	134.588.545,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	23.090.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	25.399.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				748 Orang	1.007.888.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	748 Orang	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				200 Dokumen	68.910.485,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan	200 Dokumen	24.189.535,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi tekhnis sesuai standar*	-			25	564.262.750,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dengan JFT di bidang kesehatan	-25	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				300 Orang	564.262.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN dengan JFT di bidang kesehatan	300 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan***	**75 %**			**65 %**	**434.417.000,00**						**75 %**	**247.097.721,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku*	-			25 Sarana	136.598.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana Pelayanan Farmasi, Toko Alkes dan optikal, UMOT	-25 Sarana	136.598.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	136.598.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana Pelayanan Farmasi, Toko Alkes dan optikal, UMOT	30 Dokumen	136.598.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	-			12 kali	57.927.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Petugas ASPAK Dinas Kesehatan dan Puskesmas	-12 kali	5.794.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	57.927.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Petugas ASPAK Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Dokumen	5.794.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industru Rumah Tangga Pangan (IRTP)*	-			30	116.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP	-30	11.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				30 Dokumen	116.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP	30 Dokumen	11.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM*	-			100 %	68.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tempat Pengelola Makanan dan Depot Air Minum	-100 %	38.027.981,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				200 Dokumen	68.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tempat Pengelola Makanan dan Depot Air Minum	200 Dokumen	38.027.981,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi*	-			26 Sampel	55.042.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP, Sampel Makanan	-26 Sampel	55.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				28 Unit	55.042.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelaku IRTP, Sampel Makanan	28 Unit	55.042.000,00	DINAS KESEHATAN
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**768.463.147,00**						**75 %**	**293.463.347,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	544.463.347,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Posyandu, ASN Dinas Kesehatan	-40	44.463.347,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				14 Dokumen	544.463.347,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Posyandu, ASN Dinas Kesehatan	14 Dokumen	44.463.347,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat*	-			11 Kecamatan	48.999.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat	-11 Kecamatan	49.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	48.999.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat	3 Dokumen	49.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			3 Dokumen	175.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	175.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD UJUNG GADING						**1.583.594.638,00**							**1.106.643.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.583.594.638,00**							**1.106.643.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.583.594.638,00**							**1.106.643.007,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**1.583.594.638,00**						**100 %**	**1.106.643.007,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	625.007.007,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	-80 %	593.265.494,00	RSUD UJUNG GADING
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	625.007.007,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	1 Unit	593.265.494,00	RSUD UJUNG GADING
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	958.587.631,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	-100 %	513.377.513,00	RSUD UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	958.587.631,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	RSUD Ujung Gading	1 Dokumen	513.377.513,00	RSUD UJUNG GADING
	J U M L A H							**124.936.525.801,00**							**126.826.875.647,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS AIR BANGIS KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS AIR BANGIS						**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.610.523.900,00**						**100 %**	**1.035.130.550,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.610.523.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	-1 Unit Kerja	1.035.130.550,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.610.523.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	1 Unit Kerja	1.035.130.550,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**766.234.200,00**						**100 %**	**560.093.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	13.640.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	-80 %	13.640.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	13.640.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	20 Unit	13.640.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	752.594.200,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	-100 %	546.453.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				410 Orang	70.465.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	410 Orang	59.665.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	350 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				405 Orang	15.122.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	405 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1498 Orang	14.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	1498 Orang	7.674.150,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2471 Orang	41.275.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	2471 Orang	3.284.650,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8902 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	8902 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1344 Orang	30.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	1344 Orang	31.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	174 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	64 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	7.656.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	2 Orang	2.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	27.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	350 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				590 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	590 Orang	2.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	6.715.350,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	12 Dokumen	6.715.350,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				13 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	13 Dokumen	1.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				19 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	19 Dokumen	22.500.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				35 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	35 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				130 Dokumen	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	130 Dokumen	19.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				26 Dokumen	12.983.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	26 Dokumen	12.983.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	30 Dokumen	1.700.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				29 Orang	8.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	29 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	98.175.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	24 Dokumen	98.175.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	3 Paket	1.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				83 Dokumen	281.456.200,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	83 Dokumen	165.685.850,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				11 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	11 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	14.175.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	35 Orang	6.450.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				30 Orang	10.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas, Masyarakat	30 Orang	10.620.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**90.000.000,00**						**75 %**	**28.980.350,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	90.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	-100 %	28.980.350,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				88 Orang	90.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	88 Orang	28.980.350,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**17.500.000,00**						**75 %**	**14.600.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				160 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	160 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			12	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	-12	3.600.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas	12 Dokumen	3.600.000,00	PUSKESMAS AIR BANGIS
	J U M L A H							**2.484.258.100,00**							**1.638.803.900,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PARAMAN AMPALU KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PARAMAN AMPALU						**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.048.731.270,00**							**920.049.570,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.229.181.700,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.229.181.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.229.181.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	-	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**762.589.570,00**						**100 %**	**855.481.520,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	13.992.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas Paraman Ampalu	-80 %	14.992.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				19 Unit	13.992.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas Paraman Ampalu		14.992.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	748.597.570,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	-100 %	840.489.520,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	30.330.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	310 Orang	37.180.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	300 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	300 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				820 Orang	24.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	820 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1780 Orang	9.375.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1780 Orang	10.375.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9130 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	9130 Orang	22.066.600,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	430 Orang	14.260.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1210 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1210 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	310 Orang	4.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	4.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	40 Orang	1.600.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	225.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	1.225.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	336.725.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	50 Dokumen	350.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				14 Dokumen	8.850.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	9.850.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				65 Dokumen	11.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	65 Dokumen	12.400.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	18.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	26.838.220,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				24 Dokumen	6.150.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	24 Dokumen	7.150.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	4.600.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				22 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	22 Orang	4.600.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				40 Dokumen	74.905.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	40 Dokumen	75.905.700,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	20 Paket	3.500.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				14 Dokumen	154.011.870,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	154.839.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	1 Laporan	3.400.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	8.500.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				60 Orang	5.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	60 Orang	6.700.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**36.960.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	36.960.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Paraman Ampalu	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				68 Orang	36.960.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Paraman Ampalu	68 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**20.000.000,00**						**75 %**	**24.568.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				42 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	42 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			12 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	-12 Dokumen	13.568.050,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, ASN dan Masyarakat	12 Dokumen	13.568.050,00	PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
	J U M L A H							2.048.731.270,00							920.049.570,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SUNGAI AUR KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SUNGAI AUR						**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.892.228.253,00**							**2.314.638.253,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN															
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES															
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**2.031.423.253,00**						**100 %**	**1.463.018.253,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	2.031.423.253,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	- 100 %	1.463.018.253,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.031.423.253,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	1 Unit Kerja	1.463.018.253,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT															
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT															
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**801.805.000,00**						**100 %**	**790.620.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	801.805.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-100 %	790.620.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	59.536.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	450 Orang	60.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	380 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				370 Orang	750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	370 Orang	1.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1225 Orang	51.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1225 Orang	52.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	2700 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9000 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	9000 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				987 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	987 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				256 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	256 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	83 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				78 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	78 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				510 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	510 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				8 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	8 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	77.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	25 Dokumen	78.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	50 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				210 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	210 Dokumen	620.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				60 Dokumen	59.783.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	60 Dokumen	60.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	30 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	15 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				32 Dokumen	94.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	32 Dokumen	96.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	20 Paket	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	292.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Dokumen	300.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				133 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	133 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				53 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	53 Orang	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1013 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1013 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				66 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	66 Orang	0,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.600.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sungai Aur	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				528 Orang	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sungai Aur	528 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**19.400.000,00**						**75 %**	**21.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	-			40 Posyandu	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-40 Posyandu	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				75 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	75 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			2 Dokumen	9.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader Kesehatan	-2 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	9.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Sungaiaur, Sungai Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader Kesehatan	2 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI AUR
	J U M L A H							2.892.228.253,00							2.314.638.253,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS MUARO KIAWAI KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS MUARO KIAWAI						**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**622.566.723,00**						**100 %**	**37.967.473,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	622.566.723,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	-1 Unit Kerja	37.967.473,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	622.566.723,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	1 Unit Kerja	37.967.473,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**100 %**			**-**	**779.355.000,00**						**100 %**	**549.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-15 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Alat Kesehatan	-15 Unit	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				15 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Alat Kesehatan	15 Unit	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	769.355.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	-100 %	539.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				369 Orang	18.580.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	369 Orang	120.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				352 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	352 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	150 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1462 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1462 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1706 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1706 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8449 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	8449 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				796 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	796 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2218 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	2218 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	20 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				27 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	27 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	20 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	5 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	2 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				6 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	6 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				17 Dokumen	30.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	17 Dokumen	31.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	29.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	6 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	25 Dokume	25.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	52.983.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	9 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	6 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	15 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				28 Dokumen	84.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	28 Dokumen	85.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				3 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	3 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	388.755.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	15 Dokumen	25.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	1 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	20 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				25 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kelompok masyarakat	25 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.000.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kunjungan puskesmas yang mendapat layanan	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	39.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	semua kunjungan puskesmas yang mendapat layanan	1 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**15.000.000,00**						**75 %**	**15.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-40	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				20 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	20 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS MUARO KIAWAI
	J U M L A H							**1.455.921.723,00**							**642.967.473,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS KINALI KAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KINALI						**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.923.059.039,00**						**100 %**	**1.484.673.068,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.923.059.039,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	- Puskesmas	-1 Unit Kerja	1.484.673.068,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.923.059.039,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	- Puskesmas	1 Unit Kerja	1.484.673.068,00	PUSKESMAS KINALI
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**842.216.000,00**						**100 %**	**590.134.875,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-80 %	22.000.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				26 Unit	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	26 Unit	22.000.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	822.216.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-100 %	568.134.875,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				819 Orang	78.775.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	819 Orang	86.625.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	286 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				235 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	235 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	11.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	228 Orang	12.375.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3723 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	3723 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15834 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	15834 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3688 Orang	13.320.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	3688 Orang	14.652.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1240 Orang	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	1240 Orang	4.125.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				229 Orang	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	229 Orang	4.125.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				76 Orang	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	76 Orang	4.125.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				428 Orang	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	428 Orang	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				216 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	216 Orang	3.300.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				136 Dokumen	369.080.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	136 Dokumen	74.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				45 Dokumen	3.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	45 Dokumen	4.092.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				128 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	128 Dokumen	24.750.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				15 Dokumen	68.940.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	15 Dokumen	75.834.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				54 Dokumen	7.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	54 Dokumen	7.920.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	40 Orang	3.960.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				540 Dokumen	78.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	540 Dokumen	86.625.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	94.701.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	24 Dokumen	99.666.875,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				324 Laporan	6.750.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	324 Laporan	7.425.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				180 Orang	11.850.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	180 Orang	13.035.000,00	PUSKESMAS KINALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan***	**75 %**			**65 %**	**18.000.000,00**						**75 %**	**19.800.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasional sesuai standar dan peraturan yang berlaku*	-			25 Sarana	18.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-25 Sarana	19.800.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				238 Dokumen	18.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	- Masyarakat	238 Dokumen	19.800.000,00	PUSKESMAS KINALI
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**15.000.000,00**						**75 %**	**16.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-40	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	1 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-1 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS KINALI
	J U M L A H							**2.798.275.039,00**							**2.111.107.943,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS IV KOTO KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS IV KOTO						**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.083.898.415,00**						**100 %**	**1.083.898.415,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit	1.083.898.415,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	UPT Puskesmas, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat	-1 unit	1.083.898.415,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.083.898.415,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.083.898.415,00	PUSKESMAS IV KOTO
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**788.780.000,00**						**100 %**	**1.100.977.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	12.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas	80 %	12.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	12.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas	12 Unit	12.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	776.780.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	-100 %	1.088.977.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				625 Orang	40.940.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	625 Orang	95.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				618 Orang	6.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	618 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				523 Orang	9.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	523 Orang	14.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2957 Orang	54.675.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	2957 Orang	65.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				605 Orang	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	605 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5433 Orang	10.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	5433 Orang	23.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7251 Orang	7.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	7251 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5354 Orang	5.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	5354 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				198 Orang	5.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	198 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				82 Orang	10.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	82 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				602 Orang	13.650.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	602 Orang	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				804 Orang	6.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	804 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	2 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	303.045.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	350.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	15.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	10.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	23.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	27.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	60.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	8.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	12 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6 Orang	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	6 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	84.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	24 Dokumen	90.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	2.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	100 Paket	5.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				35 Dokumen	107.795.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	35 Dokumen	180.977.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				14 Laporan	2.850.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	14 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				52 Orang	12.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	52 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				200 Orang	900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, UPT puskesmas dan tenaga kesehatan	200 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**42.000.000,00**						**75 %**	**93.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	42.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas	-100 %	93.600.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	42.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Orang	93.600.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**75 %**			**100 %**	**18.300.000,00**						**75 %**	**25.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	-			100 %	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Lintas Sektor, Tenaga Kesehatan	-100 %	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Lintas Sektor, Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			250 Dokumen	9.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	250 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				250 Dokumen	9.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Masyarakat	250 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
	J U M L A H							**1.932.978.415,00**							**2.303.475.415,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SASAK KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SASAK						**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.000.050.972,00**						**100 %**	**427.355.972,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.000.050.972,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	- Puskesmas	-1 Unit Kerja	427.355.972,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.000.050.972,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	-- Puskesmas	1 Unit Kerja	427.355.972,00	PUSKESMAS SASAK
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**789.441.520,00**						**100 %**	**552.395.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	789.441.520,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	552.395.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	76.029.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	425 Orang	76.029.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	430 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44 Orang	3.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	44 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	26.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	15 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1925 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1925 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	4.875.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	65 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2270 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2270 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2865 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2865 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	110 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	65 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				90 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	90 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				82 Orang	6.150.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	82 Orang	6.150.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				15 Dokumen	1.125.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	15 Dokumen	1.125.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				55 Dokumen	145.105.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	55 Dokumen	145.105.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	9.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	15 Dokumen	9.750.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				290 Dokumen	30.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	290 Dokumen	30.800.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				220 Dokumen	42.625.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	220 Dokumen	42.625.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				130 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	130 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	15 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				115 Dokumen	74.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	115 Dokumen	74.136.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				424 Dokumen	272.921.520,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	424 Dokumen	31.800.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Laporan	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				65 Orang	4.875.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	65 Orang	4.875.000,00	PUSKESMAS SASAK
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.500.000,00**						**75 %**	**39.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	39.500.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	39.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat		39.500.000,00	PUSKESMAS SASAK
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**10.000.000,00**						**75 %**	**10.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Sasak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat		10.000.000,00	PUSKESMAS SASAK
	J U M L A H							**1.838.992.492,00**							**1.029.250.972,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS OPHIR KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS OPHIR						**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.747.650.274,00**						**100 %**	**0,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.747.650.274,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Ophir, Kantor UPT Puskesmas Ophir	-1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.747.650.274,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	ASN Puskesmas Ophir, Kantor UPT Puskesmas Ophir		0,00	PUSKESMAS OPHIR
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT															
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT															
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**829.753.000,00**						**100 %**	**1.260.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	829.753.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	-100 %	1.260.600.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1034 Orang	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	1034 Orang	80.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				622 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	622 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				730 Orang	7.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	730 Orang	3.600.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2042 Orang	11.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	2042 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				533 Orang	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	533 Orang	30.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31221 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	31221 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3717 Orang	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	3717 Orang	50.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8054 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	8054 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				298 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	298 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				59 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	59 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	35 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	8 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	2 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	153.369.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	14 Dokumen	450.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				121 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	121 Dokumen	31.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				259 Dokumen	17.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	259 Dokumen	50.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				111 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	111 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				53 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	53 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	25 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				28 Dokumen	110.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	28 Dokumen	160.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				48 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	48 Paket	10.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	340.534.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	100 Dokumen	200.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	2 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	30 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	1.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas ophir	10 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**10.000.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				166 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	166 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**21.000.000,00**						**75 %**	**51.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat.	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				14 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat.	14 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				14 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-14 Dokumen	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				14 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	14 Dokumen	40.000.000,00	PUSKESMAS OPHIR
	J U M L A H							**2.608.403.274,00**							**1.351.600.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS DESA BARU KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS DESA BARU						**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**768.452.434,00**						**100 %**	**250.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	768.452.434,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	-100 %	250.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	768.452.434,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	1 Unit Kerja	250.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**737.430.091,00**						**100 %**	**513.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	737.430.091,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	-100 %	513.600.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				330 Orang	94.890.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	330 Orang	96.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	5.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	300 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	4.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	245 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1070 Orang	6.630.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	1070 Orang	7.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2172 Orang	15.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	2172 Orang	16.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6850 Orang	4.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	6850 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1112 Orang	9.990.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	1112 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	80 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	80 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				42 Orang	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	42 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	38 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	2 Orang	4.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				5 Dokumen	5.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	5 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				23 Dokumen	51.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	23 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				25 Dokumen	10.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	25 Dokumen	10.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				52 Dokumen	50.025.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	52 Dokumen	51.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				17 Dokumen	56.253.050,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	17 Dokumen	57.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				70 Dokumen	9.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	70 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	7.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	10 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	94.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	17 Dokumen	96.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	10 Paket	1.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	265.181.041,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	100 Dokumen	19.600.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				8 Laporan	4.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	8 Laporan	5.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	36 Orang	6.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				15 Orang	7.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Baru	15 Orang	7.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**56.169.950,00**						**75 %**	**60.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	56.169.950,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Desa Baru	-100 %	60.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				63 Orang	56.169.950,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Desa Baru	63 Orang	60.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**16.875.000,00**						**75 %**	**18.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40 organisasi	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Lintas Sektor	-40 organisasi	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	9.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Lintas Sektor	15 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS DESA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				24 Dokumen	6.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-24 Dokumen	7.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				24 Dokumen	6.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	24 Dokumen	7.500.000,00	PUSKESMAS DESA BARU
	J U M L A H							**1.578.927.475,00**							**842.100.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LEMBAH BINUANG KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS LEMBAH BINUANG						**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**570.427.018,00**						**100 %**	**30.572.018,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	570.427.018,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	-Puskesmas	-1 Unit Kerja	30.572.018,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	570.427.018,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	--Puskesmas	1 Unit Kerja	30.572.018,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**745.126.000,00**						**100 %**	**495.910.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Masyarakat	-80 %	15.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	1 Unit	15.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	730.126.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	-100 %	480.410.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				405 Orang	113.539.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	405 Orang	114.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	385 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	1.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	395 Orang	1.800.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2195 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	2195 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2522 Orang	32.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	2522 Orang	33.760.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14051 Orang	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	14051 Orang	2.310.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1395 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	1395 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	343 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	29 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				29 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	29 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				102 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	102 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	100 Orang	2.310.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	1 Dokumen	3.300.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				27 Dokumen	48.860.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	27 Dokumen	50.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				23 Dokumen	29.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	23 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				334 Dokumen	42.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	334 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				66 Dokumen	40.260.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	66 Dokumen	41.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				35 Dokumen	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	35 Dokumen	2.200.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	1 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				57 Dokumen	52.036.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	57 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				8 Paket	1.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	8 Paket	1.320.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	279.681.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	12 Dokumen	15.500.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				18 Laporan	2.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	18 Laporan	2.310.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	10 Orang	2.100.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.230.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.230.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	39.230.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	50 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**20.000.000,00**						**75 %**	**22.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				62 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat		11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	-4 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-- Masyarakat	4 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
	J U M L A H							**1.374.783.018,00**							**588.482.018,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KAJAI KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KAJAI						**1.669.291.264,00**							**854.027.264,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**815.264.000,00**							**447.896.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**815.264.000,00**							**447.896.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% pencapaian SPM bidang keseahtan***	**100 %**			**100 %**	**747.404.000,00**						**100 %**	**389.636.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan ketersediaan sarana prasarana, obat, vaksin dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan di lingkungan dinas kesehatan*	-			237 Orang	747.404.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-237 Orang	389.636.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				237 Orang	72.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	237 Orang	45.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	14.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	216 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	11.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	210 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				429 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	429 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1626 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1626 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1020 Orang	45.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1020 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1575 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1575 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				191 Orang	45.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	191 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	45.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	70 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	32 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				378 Orang	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	378 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				6 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	6 Dokumen	5.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	82.793.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	25 Dokumen	47.500.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				8 Dokumen	37.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	8 Dokumen	18.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	5 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				51 Dokumen	56.250.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	51 Dokumen	33.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	21.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	12 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	35 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				38 Dokumen	97.661.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	38 Dokumen	94.136.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	12 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				63 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	63 Laporan	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				70 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	70 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				150 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	150 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di fasilitas kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan***	**75 %**			**100 %**	**38.260.000,00**						**75 %**	**38.260.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)*	-			50 Orang	38.260.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-50 Orang	38.260.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	38.260.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai		38.260.000,00	PUSKESMAS KAJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**29.600.000,00**						**75 %**	**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	19.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-40	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	4 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)*	-			5 Dokumen	10.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-5 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	10.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	5 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS KAJAI
	X	**NON URUSAN**						**854.027.264,00**							**406.131.264,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**854.027.264,00**							**406.131.264,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan BLUD pelayanan dan penunjang kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**854.027.264,00**						**100 %**	**406.131.264,00**	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	-			1 Unit	854.027.264,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	-1 Unit	406.131.264,00	PUSKESMAS KAJAI
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	854.027.264,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Kajai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas kajai	1 Unit Kerja	406.131.264,00	PUSKESMAS KAJAI
	J U M L A H							**1.669.291.264,00**							**854.027.264,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SIMPANG EMPAT						**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**848.250.592,00**						**100 %**	**0,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	848.250.592,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	-Puskesmas	-100 %	0,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	848.250.592,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	-Puskesmas	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**795.105.000,00**						**100 %**	**548.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	795.105.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	-100 %	548.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 Orang	119.107.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	345 Orang	120.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				504 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	504 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				414 Orang	4.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	414 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1839 Orang	44.650.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	1839 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	680 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3944 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	3944 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6827 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	6827 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5550 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	5550 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	205 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	33 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				127 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	127 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	2 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22 Dokumen	284.269.350,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	22 Dokumen	54.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				11 Dokumen	18.969.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	11 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				132 Dokumen	42.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	132 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				159 Dokumen	61.973.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	159 Dokumen	63.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				22 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	22 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	6 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				53 Dokumen	99.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	53 Dokumen	100.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	2 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.000.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				106 Orang	39.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat		40.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**10.000.000,00**						**75 %**	**11.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	-			40 Posyandu	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	-40 Posyandu	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				159 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	159 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
	J U M L A H							**1.692.355.592,00**							**599.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SUKOMENANTI KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SUKOMENANTI						**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**883.598.657,00**						**100 %**	**0,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	883.598.657,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN dan masyarakat	-1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	883.598.657,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	UPT Puskesmas,ASN dan masyarakat	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT															
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT															
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**850.967.000,00**						**100 %**	**552.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	17.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-80 %	17.100.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	17.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	12 Unit	17.100.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	833.967.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-100 %	535.200.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	108.129.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	415 Orang	109.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	350 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				342 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	342 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1195 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	1195 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2518 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	2518 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8600 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	8600 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	900 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	216 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	80 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	9.225.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	48 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	13 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				244 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	244 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	52.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	20 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				48 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	48 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				203 Dokumen	25.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	203 Dokumen	25.900.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				25 Dokumen	52.983.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	25 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				25 Dokumen	1.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	25 Dokumen	1.800.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				14 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	14 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30 Dokumen	85.315.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	30 Dokumen	85.315.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				244 Paket	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	244 Paket	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	355.345.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	12 Dokumen	30.300.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	4.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	12 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	3.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	10 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				90 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	90 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**0,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sukomenanti	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				75 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Sukomenanti		40.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**15.000.000,00**						**75 %**	**16.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				68 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	68 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				60 Dokumen	5.000.000,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	-60 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				60 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat	60 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS SUKOMENANTI
	J U M L A H							**1.749.565.657,00**							**608.800.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PARIT KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PARIT						**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.690.569.283,00**						**100 %**	**1.102.120.783,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	1.690.569.283,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	ASN Puskesmas Parit, UPT Puskesmas Parit	-100 %	1.102.120.783,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.690.569.283,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	ASN Puskesmas Parit, UPT Puskesmas Parit	0 Unit Kerja	1.102.120.783,00	PUSKESMAS PARIT
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**705.116.120,00**						**100 %**	**594.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				25 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-25 Unit	10.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				25 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	25 Unit	10.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	695.116.120,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	583.900.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				706 Orang	77.540.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	706 Orang	97.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				583 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	583 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				541 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	541 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1777 Orang	39.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1777 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8270 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	8270 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28116 Orang	9.860.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	28116 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1391 Orang	12.959.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1391 Orang	15.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7166 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	7166 Orang	2.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				229 Orang	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	229 Orang	2.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				59 Orang	9.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	59 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				258 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	258 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	800.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Dokumen	2.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	41.875.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	20 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	14.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	24 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				210 Dokumen	9.928.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	210 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	30.588.050,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	14 Dokumen	68.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				82 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	82 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				37 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	37 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				170 Dokumen	99.927.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	170 Dokumen	102.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Paket	1.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	286.062.370,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	86.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				66 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	66 Laporan	6.000.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				66 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	66 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	5 Orang	3.100.000,00	PUSKESMAS PARIT
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**160.000.000,00**						**75 %**	**160.500.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	160.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-Masyarakat	-100 %	160.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	160.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-Masyarakat	100 Orang	160.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**8.278.500,00**						**75 %**	**14.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	-Masyarakat	-40	1.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				59 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	59 Dokumen	1.500.000,00	PUSKESMAS PARIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				4 Dokumen	7.278.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-4 Dokumen	12.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	7.278.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	4 Dokumen	12.500.000,00	PUSKESMAS PARIT
	J U M L A H							**2.563.963.903,00**							**1.871.020.783,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS UJUNG GADING KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS UJUNG GADING						**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.530.838.091,00**						**100 %**	**956.072.441,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100 %	1.530.838.091,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-100 %	956.072.441,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.530.838.091,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	1 Unit Kerja	956.072.441,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**798.486.450,00**						**100 %**	**596.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-80 %	10.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	0 Unit	10.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	798.486.450,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-100 %	586.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				923 Orang	120.704.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	923 Orang	97.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				881 Orang	37.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	881 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				781 Orang	37.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	781 Orang	38.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4132 Orang	105.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4132 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4682 Orang	37.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4682 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25376 Orang	108.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	25376 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4055 Orang	18.775.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4055 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				670 Orang	18.775.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	670 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				783 Orang	11.275.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	783 Orang	12.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				98 Orang	4.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	98 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				98 Orang	11.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	98 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6 Orang	19.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	6 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				14 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	53.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	14 Dokumen	54.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				170 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	170 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				175 Dokumen	25.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	175 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				15 Dokumen	47.425.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	15 Dokumen	59.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				38 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	38 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	15 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				134 Dokumen	64.136.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	134 Dokumen	95.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Dokumen	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	5.995.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				22 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	22 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	14.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	0 Orang	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	0 Orang	0,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**37.680.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	37.680.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				79 Orang	37.680.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading - Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	79 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**30.000.000,00**						**75 %**	**32.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat		11.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dn supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)*	-			4 dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	-4 dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas , ASN dan Masyarakat	4 dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS UJUNG GADING
	J U M L A H							**2.397.004.541,00**							**1.624.072.441,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SILAPING KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SILAPING						**1.880.765.332,00**							**1.456.917.782,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**850.851.550,00**							**1.003.850.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**850.851.550,00**							**1.003.850.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**635.671.550,00**						**100 %**	**942.850.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	635.671.550,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-100 %	942.850.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				239 Orang	51.650.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	239 Orang	105.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				247 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	247 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	246 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				840 Orang	14.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	840 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	21.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3000 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	10.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	10.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	650 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	600 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	200 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				51 Orang	5.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	51 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				134 Orang	12.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	134 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	4.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				4 Dokumen	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	4 Dokumen	600.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	51.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	20 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				90 Dokumen	8.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	90 Dokumen	35.250.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				77 Dokumen	15.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	77 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				127 Dokumen	24.025.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	127 Dokumen	72.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				170 Dokumen	6.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	170 Dokumen	96.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	1.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9820 Dokumen	49.725.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	9820 Dokumen	27.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Paket	3.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	294.571.550,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Dokumen	350.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				87 Orang	5.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	87 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	3.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**186.130.000,00**						**75 %**	**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	186.130.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	30.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				91 Orang	186.130.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	91 Orang	30.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**29.050.000,00**						**75 %**	**31.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				13 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	13 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				56 Dokumen	19.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-56 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				56 Dokumen	19.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	-Masyarakat	56 Dokumen	20.000.000,00	PUSKESMAS SILAPING
	X	**NON URUSAN**						**1.029.913.782,00**							**453.067.782,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.029.913.782,00**							**453.067.782,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.029.913.782,00**						**100 %**	**453.067.782,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.029.913.782,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-1 Unit Kerja	453.067.782,00	PUSKESMAS SILAPING
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.029.913.782,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Unit Kerja	453.067.782,00	PUSKESMAS SILAPING
	J U M L A H							**1.880.765.332,00**							**1.456.917.782,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS TALU KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TALU						**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.407.089.518,00**						**100 %**	**815.847.368,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.407.089.518,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	ASN Puskesmas Talu	1 Unit Kerja	815.847.368,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.407.089.518,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	ASN Puskesmas Talu	1 Unit Kerja	815.847.368,00	PUSKESMAS TALU
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**790.380.699,00**						**100 %**	**563.650.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-80 %	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	10 Unit	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	780.380.699,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-100 %	552.650.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				476 Orang	162.380.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	476 Orang	100.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				454 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	454 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				422 Orang	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	422 Orang	1.200.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2036 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	2036 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				819 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	819 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12107 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12107 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1265 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	1265 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3155 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	3155 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	220 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				68 Orang	19.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	68 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				162 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	162 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	2 Orang	1.200.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				28 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	28 Dokumen	3.300.000,00	PUSKESMAS TALU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				144 Dokumen	51.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	144 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	24 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				157 Dokumen	37.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	157 Dokumen	41.250.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				144 Dokumen	47.988.150,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	144 Dokumen	48.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				96 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	96 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				27 Dokumen	81.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	27 Dokumen	89.100.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				4 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	4 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	2 Paket	1.100.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	227.612.549,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12 Dokumen	36.300.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12 Laporan	1.100.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				162 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	162 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	12 Orang	1.100.000,00	PUSKESMAS TALU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.400.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	- 100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				73 Orang	39.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	73 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS TALU
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**20.000.000,00**						**75 %**	**22.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				60 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	60 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			71 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	-71 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				71 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Talamau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas Talu	71 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS TALU
	J U M L A H							**2.256.870.217,00**							**1.441.497.368,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS RANAH SALIDO KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS RANAH SALIDO						**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.041.938.780,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1.041.938.780,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	-Puskesmas	-1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.041.938.780,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	--Puskesmas	1 Unit Kerja	0,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**744.322.650,00**						**100 %**	**854.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	744.322.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	854.500.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	73.710.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	341 Orang	104.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				335 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	335 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	16.370.350,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	295 Orang	17.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	40.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1200 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				738 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	738 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12318 Orang	23.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12318 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1185 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1185 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2993 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2993 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				111 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	111 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	37 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	350 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				450 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	450 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				11 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	11 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				19 Dokumen	51.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-Masyarakat	19 Dokumen	52.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	12.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	2 Dokumen	33.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	22.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	100 Dokumen	33.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	47.220.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	11 Dokumen	48.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				21 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	21 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				27 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	27 Dokumen	95.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				3 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	3 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3 Paket	2.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	260.522.300,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1 Laporan	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	50 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	5 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**39.600.000,00**						**75 %**	**40.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	-100 %	40.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	39.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**30.000.000,00**						**75 %**	**32.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				55 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	55 Dokumen	11.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				50 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-50 Dokumen	21.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				50 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat		21.000.000,00	PUSKESMAS RANAH SALIDO
	J U M L A H							**1.855.861.430,00**							**926.500.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS VI KOTO SELATAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS VI KOTO SELATAN						**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	

TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**616.716.749,00**						**100 %**	**72.035.628,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	616.716.749,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	-1 Unit Kerja	72.035.628,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	616.716.749,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	1 Unit Kerja	72.035.628,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**750.709.218,00**						**100 %**	**731.585.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	-80 %	25.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas,ASN, dan masyarakat	15 Unit	25.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	725.709.218,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-100 %	706.585.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	83.673.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	390 Orang	83.674.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	295 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	295 Orang	750.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	350 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				455 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	455 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7450 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	7450 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1040 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	1040 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	400 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47 Orang	6.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	47 Orang	7.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	37 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				54 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	54 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	10 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	2.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	3 Dokumen	2.400.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	61.899.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	20 Dokumen	61.900.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	12 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				52 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	52 Dokume	225.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				17 Dokumen	24.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	17 Dokumen	25.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				65 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	65 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	9.999.998,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	94.135.995,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	50 Dokumen	94.136.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	10 Paket	1.500.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	296.849.242,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	12 Dokumen	300.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				33 Laporan	5.000.003,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	33 Laporan	5.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	8.000.003,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				15 Orang	5.000.003,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**38.960.472,00**						**75 %**	**38.960.471,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	38.960.472,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Puskesmas vI koto selatan	- 100 %	38.960.471,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				60 Orang	38.960.472,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	ASN Puskesmas vI koto selatan	60 Orang	38.960.471,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**18.200.010,00**						**75 %**	**18.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	10.000.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	- 40	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	10.000.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15 Dokumen	10.000.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				60 Dokumen	8.200.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas VI koto selatan dan masyarakat	60 Dokumen	8.200.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				60 Dokumen	8.200.005,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Kinali	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UPT Puskesmas VI koto selatan dan masyarakat	60 Dokumen	8.200.000,00	PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
	J U M L A H							**1.424.586.449,00**							**860.781.099,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS AIA GADANG KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS AIA GADANG						**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	
TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN																
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA LINGKUP OPD DINKES																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**488.631.452,00**						**100 %**	**165.000.000,00**	

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	488.631.452,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-1 Unit Kerja	165.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	488.631.452,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas	-Puskesmas	-1 Unit Kerja	165.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**799.926.000,00**						**100 %**	**358.225.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			80 %	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-80 %	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	10 Unit	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan terpenuhinya pendukung dan penunjang operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan*	-			100 %	796.926.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	354.725.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				212 Orang	30.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	212 Orang	52.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				558 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	558 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				485 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	485 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2176 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	---Masyarakat	2176 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1286 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	---Masyarakat	1286 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12721 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	---Masyarakat	12721 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1253 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	1253 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				505 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	505 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				122 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	122 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	50 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	300 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	3 Orang	4.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	10 Dokumen	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				96 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	96 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	24 Dokumen	36.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				36 Dokumen	41.687.202,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	36 Dokumen	43.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				180 Dokumen	23.104.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	180 Dokumen	24.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				36 Dokumen	1.920.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	36 Dokumen	2.200.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Orang	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	48 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	3 Paket	1.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	504.414.548,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	15.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				500 Orang	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	500 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	1.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Orang	2.025.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**75 %**			**-**	**20.000.000,00**						**75 %**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-6 Orang	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	6 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				6 Orang	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	6 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Tangga ber-PHBS***	**75 %**			**75 %**	**8.000.000,00**						**75 %**	**9.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*	-			40	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-40	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				21 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	21 Dokumen	5.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			7 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-7 Dokumen	3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat		3.500.000,00	PUSKESMAS AIA GADANG
	J U M L A H							**1.316.557.452,00**							**552.225.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

		URUSAN / BIDANG		TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	
TUJUAN: MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA RSUD PASAMAN BARAT																
SASARAN: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA RSUD PASAMAN BARAT																
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**14.562.831.173,00**						**-**	**14.758.063.173,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN*	-			100 %	13.597.287.708,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Puskesmas	-100 %	13.601.171.848,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				290 Orang/bulan	13.216.227.708,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Puskesmas	290 Orang/bula	13.216.226.848,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	381.060.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	384.945.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peragkat Daerah*	-			100 %	40.200.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	40.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	40.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	24 Laporan	40.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat Daerah*	-			100 %	107.905.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	--Masyarakat	-100 %	109.252.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	107.905.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	--Masyarakat	20 Laporan	109.252.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang Operasional Perangkat Daerah*	-			100 %	817.438.465,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	--Masyarakat	-100 %	1.007.439.325,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	817.438.465,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Laporan	1.007.439.325,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																
SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASAYARAKAT																
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**			**100 %**	**47.141.051.857,00**						**100 % 100 %**	**47.141.051.857,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RS sesuai Standar*	-			100 %	47.141.051.857,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	-100 %	47.141.051.857,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	47.141.051.857,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-Masyarakat	12 Dokumen	47.141.051.857,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUJUAN: MENINGKATKAN KUALITAS MUTU PELAYANAN KESEHATAN RSUD PASAMAN BARAT																
SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS MUTU PELAYANAN KESEHATAN RSUD PASAMAN BARAT																
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi***	**75 %**			**65 %**	**2.074.800.000,00**						**75 %**	**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang telah sesuai dengan standar*	-			247 orang	2.074.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	--Masyarakat	-247 orang	1.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				24 Orang	2.074.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Luhak Nan Duo, Koto Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	--Masyarakat	24 Orang	1.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	J U M L A H							**63.778.683.030,00**							**63.499.115.030,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil pada pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkatan diatasnya seperti Renstra OPD. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Renja Dinas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Program dan kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja harus sesuai dengan target pemerintah dan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan yang ada sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 berisi informasi capaian dan realisasi program/kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, mayoritas indikator belum mencapai target yang direncanakan. Berbagai faktor mempengaruhi tidak tercapainya target program yang ditetapkan telah menjadi catatan dan evaluasi untuk menyusun rencana kerja tahun 2024. Pada Renja tahun 2024 ini, akan memprioritaskan untuk pencapaian SPM bidang Kesehatan dan penunjangnya. Dalam hal pelaksanaannya Dinas Kesehatan akan menyusun strategi dengan membuat inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan layanan terhadap masyarakat sehingga tujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dapat tercapai.

Simpang Empat, Juli 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman Barat

Hajran Huda, SKM
Pembina Tk. I/ IV B
NIP. 19670405 198703 1 006

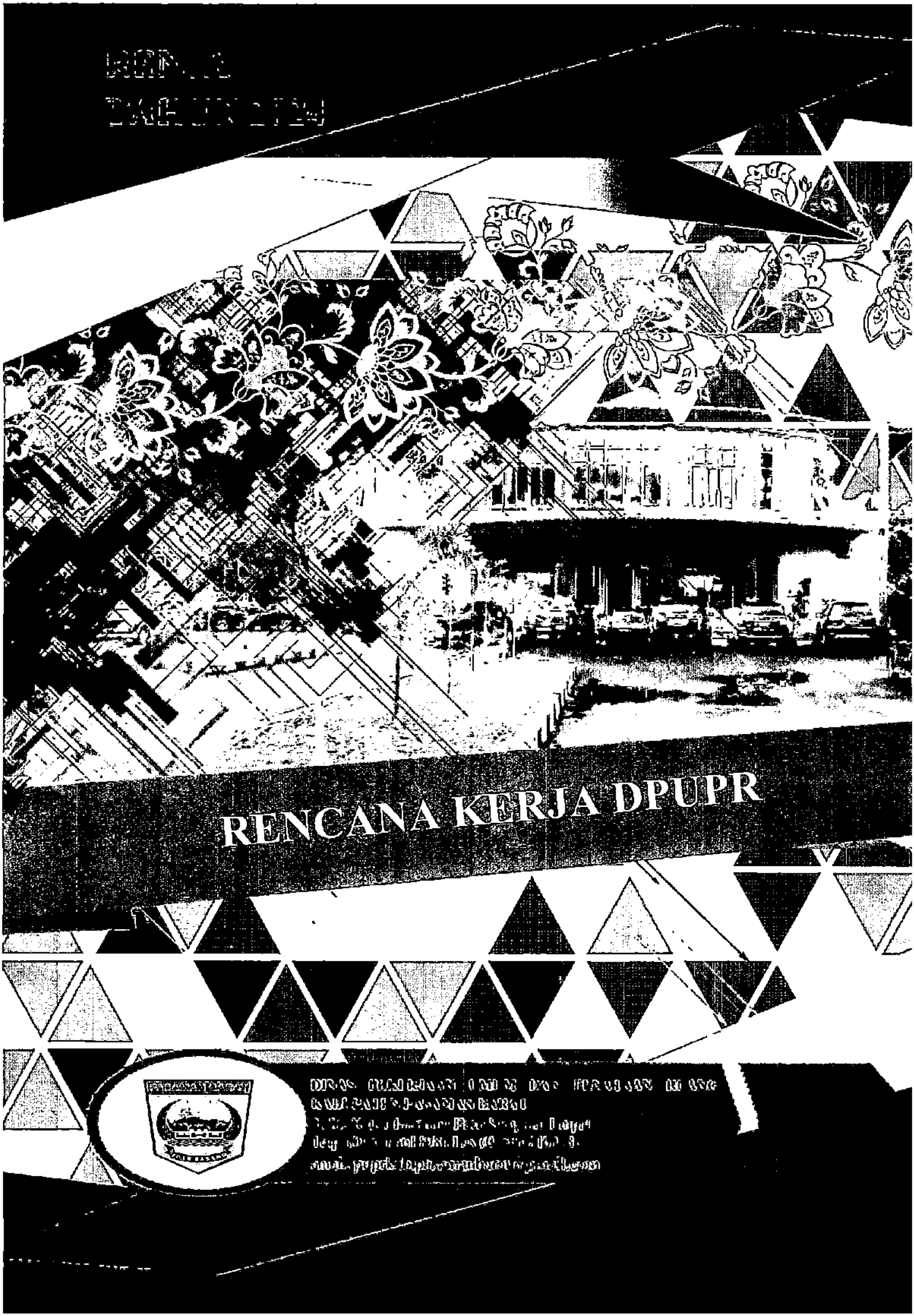

RENCANA KERJA DPUPR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Segala keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diupayakan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Drs. JONI HENDRI,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19751007 199501 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Prioritas pembangunan wilayah Sumatera dalam Renstra tahun 2020-2024 pada Pulau Sumatera khususnya Kabupaten Pasaman Barat mencakup kegiatan Pengembangan kawasan strategis melalui Penanganan Lintas Barat Sumatera.Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukungpemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunandaerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain bertanggung jawab pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah.

Selanjutnya, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai penjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang,* Menguraikan gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra* OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPUPR

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 11 program. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2021. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,018,325,296,850		71,358,386,233		137,420,951,744		125,670,672,965		197,029,059,198	0.00	63.78
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/	80%	75,415,928,866	80 %	7,953,012,617	80%	9,776,624,686	90.68	9,048,286,194	90.68	17,001,298,811	100.00	53.22

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
						kota												
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80%	553,510,694	80 %	20,026,086	80%	46,106,000	71.71	49,619,836	71.71	69,645,922	100.00	71.25
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	14	277,229,132	2	20,026,086	2	46,106,000	2.00	49,619,836	2.00	69,645,922	100.00	71.25
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	80%	49,120,586,984	80 %	6,484,137,421	80%	7,712,028,634	93.85	7,123,865,567	93.85	13,608,002,988	100.00	52.35
1	3	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji dan tunjangan ASN yang	78 org	47,639,726,98	78 org	6,323,127,4	78 org	6,913,908,634	78.00	6,288,990,56	78.00	12,612,117,98	100.00	49.86

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
			2		ASN	dibayarkan dalam satu tahun		4		21				7		8		
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN (Pengelola keuangan daerah, pengelola barang milik daerah)	12 bln	386,100,000	12 bln	43,950,000	12 bln	621,900,000	14.00	621,750,000	14.00	665,700,000	100.00	93.40
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium petugas pengelola keuangan	12 bln	1,094,760,000	12 bln	117,060,000	12 bln	176,220,000	12.00	213,125,000	12.00	330,185,000	100.00	64.55
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Terlaksananya administrasi barang milik	80%	398,400,000	80 %	68,628,000	80%	29,600,000	65.09	23,952,000	65.09	92,580,000	100.00	25.87

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
					Daerah	daerah pada perangkat daerah												
1	3	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah non PNS yang melaksanakan pengamanan BMD	1 org	242,100,000	1 org	28,328,000	1 org	14,600,000	1.00	11,952,000	1.00	40,280,000	100.00	29.67
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan barang milik daerah	1 org	156,300,000	1 org	40,300,000	1 org	15,000,000	1.00	12,000,000	1.00	52,300,000	100.00	22.94
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	80%	1,397,592,000	80 %	98,454,500	80%	184,032,000	78.15	132,097,051	78.15	230,551,551	100.00	57.30
1	3	1	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah peserta yang	20 org	1,397,592,000	20 org	98,454,500	20 org	184,032,000	25.00	132,097,051	25.00	230,551,551	100.00	57.30

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
			5		Peraturan Perundang-Undangan	mengikuti Bimtek												
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	80%	10,712,225,868	80 %	429,988,846	80%	727,991,852	69.23	575,437,668	69.23	1,005,426,514	100.00	57.23
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bln	64,185,468	12 bln	-	12 bln	18,175,158	12.00	18,173,500	12.00	18,173,500	100.00	100.00
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bln	7,163,458,800	12 bln	131,787,100	12 bln	119,786,694	12.00	88,735,850	12.00	220,522,950	100.00	40.24
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bln	1,711,200,000	12 bln	88,736,000	12 bln	285,200,000	12.00	104,309,450	12.00	193,045,450	100.00	54.03

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bln	1,598,472,000	12 bln	206,066,746	12 bln	304,830,000	12.00	364,218,868	12.00	570,285,614	100.00	63.87
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah	30%	2,300,198,100	80 %	36,081,000	80%	65,853,950	91.21	113,655,894	91.21	149,736,894	100.00	75.90
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	114 unit	2,300,198,100	19 Unit	36,081,000	19 Unit	65,853,950	5.00	113,655,894	5.00	149,736,894	100.00	75.90
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80%	2,208,951,720	80 %	210,846,789	80%	265,400,000	83.07	220,457,615	83.07	431,304,404	100.00	51.11

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan listrik, air dan telepon	12 bln	1,713,300,000	12 bln	145,306,185	12 bln	265,400,000	12.00	220,457,615	12.00	365,763,800	100.00	60.27
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah	80%	8,724,463,500	80 %	604,849,975	80%	745,612,250	90.85	809,200,563	90.85	1,414,050,538	100.00	57.23
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	12 bln	1,049,875,500	12 bln	190,042,500	12 bln	122,582,250	12.00	238,938,693	12.00	428,981,193	100.00	55.70
1	3	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kendaraan dinas oprasional/lapangan	12 bln	634,200,000	12 bln	79,030,700	12 bln	30,300,000	12.00	11,112,400	12.00	90,143,100	100.00	12.33

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
			9		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara												
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Alat berat yang dipelihara	60 unit	4,762,740,000	10 Unit	210,343,175	10 Unit	357,000,000	10.00	337,672,970	10.00	548,016,145	100.00	61.62
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	912 unit	496,020,000	152 unit	51,540,500	152 unit	85,730,000	150.00	60,712,000	150.00	112,252,500	100.00	54.09
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	1,781,628,000	12 bulan	73,893,100	12 bulan	150,000,000	12.00	160,764,500	12.00	234,657,600	100.00	68.51

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	89.65	120,849,605,668	82.45	12,611,525,903	82.45	10,665,309,759	80.70	9,356,802,108	80.70	21,968,328,011	100.00	42.59
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/ kota	80%	22,319,669,308	80 %	1,384,809,280	80%	1,727,957,430	98.91	2,308,374,960	98.91	3,693,184,240	100.00	62.50
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya pembangunan bangunan perkuatan tebing	13200 m	14,239,798,812	2200 m	1,051,709,280	2200 m	1,727,957,430	2132.00	2,308,374,960	2132.00	3,360,084,240	100.00	68.70

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	80%	98,529,936,360	80 %	11,226,716,623	80%	8,937,352,329	76.11	7,048,427,148	76.11	18,275,143,771	100.00	38.57
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya perencanaan teknis konstruksi irigasi dan rawa	12 dok	3,000,000,000	2 dok	-	2 dok	50,000,000	2.00	174,226,000	2.00	174,226,000	100.00	100.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	39600 m	39,466,010,220	6600 m	5,033,733,223	6600 m	7,213,698,129	4686.00	5,271,490,752	4686.00	10,305,223,975	100.00	51.15
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya jaringan irigasi permukaan	24 lokasi	56,063,926,140	4 lokasi	6,192,983,400	4 lokasi	1,673,654,200	4.00	1,602,710,396	4.00	7,795,693,796	100.00	20.56
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	90%	229,240,203,400	82 %	9,726,799,588	82%	10,967,028,700	83.25	10,772,346,088	83.25	20,499,145,676	100.00	52.55

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota	80%	229,240,203,400	80 %	9,726,799,588	80%	10,967,028,700	83.25	10,772,346,088	83.25	20,499,145,676	100.00	52.55
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lokasi pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	14670	10,667,284,800	2445 KK	704,444,400	2445 KK	444,670,900	23400.00	435,323,550	23400.00	1,139,767,950	100.00	38.19
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah lokasi Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15550	79,000,000,000	3110	4,620,444,080	3110	10,522,357,800	29500.00	10,337,022,538	29500.00	14,957,466,618	100.00	69.11

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3						*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	4				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20	11,200,000,000	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	701,993,187	3.00	700,539,100	3.00	700,539,100	100.00	100.00
1	3	4	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	5 kecamatan	11,200,000,000	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	701,993,187	3.00	700,539,100	3.00	700,539,100	100.00	100.00
1	3	4	2.01	3		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 Unit	4,000,000,000	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	701,993,187	3.00	700,539,100	3.00	700,539,100	100.00	100.00
1	3	5				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi / cakupan rumah tangga yang	100	59,182,722,379	74	-	74	5,249,981,000	95.58	5,042,863,550	95.58	5,042,863,550	100.00	100.00

Kode					Urusan / Bidang; Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
						menggunakan sanitasi layak (SPM)												
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten	80%	59,182,722,379	80 %	-	80%	5,249,981,000	95.58	5,042,863,550	95.58	5,042,863,550	100.00	100.00
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana/penyediaan sarana dan prasarana IPLT yang dibangun	4583 unit	59,182,722,379	708 Unit	-	708 Unit	5,249,981,000	695.00	5,042,863,550	695.00	5,042,863,550	100.00	100.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	70	43,719,566,800	61.06	3,026,875,500	61.06	4,370,459,099	98.28	4,794,420,281	98.28	7,821,295,781	100.00	61.30
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sistem drainase	80%	43,719,566,800	80 %	3,026,875,500	80%	4,370,459,099	98.28	4,794,420,281	98.28	7,821,295,781	100.00	61.30
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya perencanaan teknis sistem drainase perkotaan	18 dok	2,820,340,000	3 dok	110,831,300	3 dok	179,486,042	3.00	213,914,900	3.00	324,746,200	100.00	65.87

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase perkotaan yang dibangun	15000 m	40,899,226,800	2500 m	2,916,044,200	2500 m	4,190,973,057	24600.00	4,580,505,381	24600.00	7,496,549,581	100.00	61.10
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	16%	29,449,441,928	14 %	2,455,050,600	14%	6,097,013,554	14.00	7,009,868,716	I4.00	9,464,919,316	100.00	74.06
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, pemberian IMB dan SLF	80%	29,449,441,928	80 %	2,455,050,600	80%	6,097,013,554	88.53	7,009,868,716	88.53	9,464,919,316	100.00	74.06

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah perizinan yang diterbitkan	11239 izin	1,417,060,000	23 Izin	42,394,050	23 Izin	184,886,500	10.00	131,767,458	10.00	174,161,508	100.00	75.66
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan dipelihara	507 unit	28,032,381,928	4 Unit	2,412,656,550	4 Unit	5,912,127,054	12.00	6,878,101,258	12.00	9,290,757,808	100.00	74.03
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam	70	428,049,317,866	61.06	35,265,443,529	61.06	88,138,178,737	70.91	78,440,550,082	70.91	113,705,993,611	100.00	68.99

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		16=14/6*100	
						kondisi mantap												
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	80%	428,049,317,866	80 %	35,265,443,529	80%	88,138,178,737	70.91	78,440,550,082	70.91	113,705,993,611	100.00	68.99
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya perencanaan telnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	30 dok	7,668,165,600	5 dok	1,367,991,553	5 dok	1,008,853,400	9.00	1,951,654,011	9.00	3,319,645,564	100.00	58.79
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun	95100 m	12,628,912,410	15850 m	985,588,463	15850 m	2,113,977,244	14350.00	3,159,763,464	14350.00	4,145,351,927	100.00	76.22
1	3	10	2.	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang	11040	161,836,346,5	18400	16,411,000,	18400	55,596,536,23	13425.0	51,349,462,5	13425.0	67,760,462,88	100.00	75.78

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3						*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
			0	1			direkonstruksi	m	62	m	322	m	2	0	62	0	4		
1	3	1 0	2 . 0	0 1	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhab	19000	26,868,205,000	2000	9,685,000	2000	379,997,973	1856.00	384,613,000	1856.00	394,298,000	100.00	97.54
1	3	1 0	2 . 0	0 1	1 0	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang direhab secara berkala	45000	93,000,000,000	9000	13,104,287,167	9000	6,709,697,394	8520.00	6,254,316,274	8520.00	19,358,603,441	100.00	32.31
1	3	1 0	2 . 0	0 1	1 1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara rutin	35000	44,730,634,602	35000 m	616,070,600	35000 m	484,256,914	0.00	30,099,569	0.00	646,170,169	0.00	4.66
1	3	1 0	2 . 0	0 1	1 2	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	138 unit	70,139,449,704	23 unit	2,421,909,299	23 unit	21,640,539,580	8.00	14,910,795,402	8.00	17,332,704,701	100.00	86.03
1	3	1 0	2 . 0	0 1	1 8	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhab	24 unit	8,617,726,188	4 unit	343,583,775	4 unit	204,320,000	2.00	399,845,800	2.00	743,429,575	100.00	53.78

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	55%	3,845,548,343	35 %	144,596,596	35%	394,648,500	35.60	248,035,646	35.60	392,632,242	100.00	63.17
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	80%	2,668,021,500	80 %	82,557,736	80%	294,685,500	65.85	194,063,842	65.85	276,621,578	100.00	70.15
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksanaya pelatihan tenaga terampil konstruksi	300 org	1,919,719,000	50 org	67,870,786	50 org	204,851,500	50.00	194,063,842	50.00	261,934,628	100.00	74.09
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	600 org	567,844,000	100 org	-	100 org	69,892,000	77 org	-	77 org	-	77.00	0.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	11	2.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	12 bulan	180,458,500	12 bulan	14,686,950	12 bulan	19,942,000	12 bulan	-	12 bulan	-	100.00	0.00
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten	80%	307,240,000	80 %	5,696,800	80%	11,803,500	25.25	7,510,900	25.25	13,207,700	100.00	56.87
1	3	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi		307,240,000	1 keg	5,696,800	1 keg	11,803,500	1.00	7,510,900	1.00	13,207,700	100.00	56.87

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6*100	
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		870,286,843	12 bulan	56,342,060	12 bulan	88,159,500	12.00	46,460,904	12.00	102,802,964	100.00	45.19
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	7 kali	718,874,843	1 kali	56,342,060	1 kali	59,918,500	0.00	21,014,804	0.00	77,356,864	0.00	27.17

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
1	3	1 1	2 . 0 4	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	6 bulan	151,412,000	12 bulan	-	12 bulan	28,241,000	12.00	25,446,100	12.00	25,446,100	100.00	100.00
1	3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	90	9,322,961,600	84	175,081,900	84	1,059,714,522	86.00	256,961,200	86.00	432,043,100	100.00	59.48
1	3	1 2	2 . 0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kot	Terlaksananya penetapan RTRW dan RRTR kabupaten	80%	6,456,185,600	80 %	33,216,600	80%	786,237,022	19.99	57,095,950	19.99	90,312,550	100.00	63.22

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6*100*	
					a													
1	3	1 2	2 . 0 1	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah RDTR kawasan perkotaan yang disusun	6 dok	6,456,185,600	1 dok	33,216,600	1 dok	786,237,022	0.00	57,095,950	0.00	90,312,550	0.00	63.22
1	3	1 2	2 . 0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan tersinkronisasinya pemanfaatan ruang daerah kabupaten	80%	2,866,776,000	80 %	141,865,300	80%	273,477,500	55.42	199,865,250	55.42	341,730,550	100.00	58.49
1	3	1 2	2 . 0 3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	180 rekomendasi	2,866,776,000	20 rekomendasi	141,865,300	20 rekomendasi	273,477,500	114.00	199,865,250	114.00	341,730,550	100.00	58.49

Analisa Penjelasan Terkait Tabel :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan terdapat 4 program yaitu :
   a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
   b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
   c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
   d. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan terdapat 6 program yaitu :
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
   c. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
   d. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
   e. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
   f. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3. Faktor – Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan :
   1) Pada awal Tahun 2022 untuk kegiatan DAK sudah memiliki perencanaan teknis yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2021, namun terbit PERMEN PUPR 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Biaya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Sehingga menyebabkan perencanaan yang telah selesai dilaksanakan harus disesuaikan dengan AHSP terbaru, sesuai dengan PERMEN PUPR 1 Tahun 2022.
   2) Pada Bulan Februari 2022 terjadi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Bencana ini mempengaruhi waktu rencana kerja yg sudah di rancang sebelumnya. Mulai dari masa tanggap darurat, banyak personil DPUPR yang mendukung kegiatan tersebut.
   3) Permasalahan hukum tekait pekerjaan fisik Tahun Anggaran sebelumnya yang melibatkan hampir seluruh pejabat struktural dan fungsional DPUPR, dengan Aparat Penegak Hukum.
   4) Sebagaian besar perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di Tahun berjalan.
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Sehingga capaian program pada DPUPR tidak berpengaruh kepada infrastruktur yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sulit untuk di capai.
6) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut dengan membuat arah kebijakan yang mendukung capaian kinerja DPUPR. Seperti menyusun perencanaan teknis pada N-1.

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataraan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 %	57.72 %
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %	77.67 %
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61 %	61 %
		Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	35 %	35 %
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	75 %	75 %
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	85 %	86 %
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	14.5 %	14.5 %
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100 %	82.46 %
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	72.32 %
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	4 kecamatan	3 kecamatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B Level	B Level
		Level maturitas SPIP	3 Level	3 Level

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	12 %	%

Berdasarkan Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 11 program. Program yang dilaksanakan tersebutmendukung pencapaian 7 sasaran yang dijabarkan kedalam 13 indikator sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
3. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
4. Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
5. Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya
6. Ketaatan RTRW
7. % bangunan ber- IMB per satuan bangunan
8. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum
9. Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
10. Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah
11. Nilai Sakip
12. Level maturitas SPIP
13. Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.3** berikut :

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 %	57.72 %	94.62%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %	77.67 %	94.72%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61 %	61 %	100.00%
		Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	35 %	35 %	100.00%
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	75 %	75 %	100.00%
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	85 %	86 %	101.18%
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	14.5 %	14.5 %	100.00%
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100 %	82.46 %	82.46%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	72.32 %	72.32%
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	4 kecamatan	3 kecamatan	75.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B Level	B Level	100.00%
		Level maturitas SPIP	3 Level	3 Level	10.00%
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	12 %	%	0.00%

Berdasarkan Tabel 2.1.3 diatas dapat diartikan bahwa Realisasi yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan terdapat 8 Indikator Kinerja yaitu :

a. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
b. Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
c. Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya
d. Ketaatan RTRW
e. % bangunan ber- IMB per satuan bangunan
f. Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
g. Nilai Sakip
h. Level maturitas SPIP

Sementara itu, 6 (enam) Indikator Kinerja yang belum mencapai target rencana kinerja, namun diupayakan tercapai di tahun 2022, yaitu :

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
3. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum
4. Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
5. Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah

Realisasi dan Capaian Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK belum bisa dicantumkan karena sedang proses penilaian oleh BPKP, BPK, Inspektorat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Pemerintah Daerah periode 2021-2026 yaitu :

Misi 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional dan global, melalui pencapaian tujuan Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah berbasis daya tampung lingkungan

dengan indikator utama, yakni : Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang, Rasio jaringan irigasi baik dan sedang, Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman dan memadai.

Misi 4. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pencapaian tujuan meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah berbasis pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan indikator utama, yakni : Jumlah jorong tertinggal dan terisolir, Akses jalan poros ke daerah-daerah terpencil, Jalan akses ke daerah tertinggal dan terisolir yang terbangun, Jembatan akses ke daerah tertinggal dan terisolir yang terbangun, Cakupan jaringan air bersih daerah tertinggal dan terisolir.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pencapaian tujuan meningkatkan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang yang berbasis daya dukung dan berwawasan lingkungan dengan indikator utama yakni : Persentase kesesuaian penataan ruang, Persentase tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan, Tersedianya taman tematik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2020 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra DPUPR				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn +1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap			*63,92*	*68,17*	*71,20*	*75,44*	*65,78*	*62,84*	*71,20*	*75,44*	
2	Berkurangnnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat			*13*	*8*	*5*	*3*	*10,00*	*4,00*	*5*	*3*	
3	Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik			*38,80*	*43,05*	*47,90*	*52,14*	*38,80*	*25,83*	*47,90*	*52,14*	
4	Persentase luas sawah yang beririgasi baik			77,50	79,00	79,50	80,00	*64,56*	*86,74*	79,50	80,00	
5	Persentase penurunan luas genangan			*5,00*	*10,00*	*20,00*	*25,00*	*5,00*	*10,00*	*20,00*	*25,00*	
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih	SPM		*88,00*	*93,00*	*100,00*	*100,00*	*88,00*	*84,09*	*100,00*	*100,00*	
7	Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang			*3,63*	*7,25*	*14,51*	*14,92*	*3,63*	*0*	*14,51*	*14,92*	
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang			*0*	*0*	*3,63*	*7,26*	*0*	*0RI*	*3,63*	*7,26*	
9	Level Maturitas SPIP			*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*2*	*2*	*3,00*	*3,00*	
10	Opini terhadap Laporan Keuangan			*WTP*	*WTP*	*WTP*	*WTP*	*WTP*	*WTP*	*WTP*	*WTP*	
11	Nilai Sakip			*B*	*B*	*B*	*B*	*CC*	*CC*	*B*	*B*	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas *database* tentang infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Program pembangunan masih bersifat parsial/belum ada keterpaduan.
3. Analisis biaya dan manfaat belum dilaksanakan secara konsekwen dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
4. Masih sangat kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar lainnya.
5. Peralatan yang dimiliki masih sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan dan khususnya bila terjadi kebutuhan mendesak akibat Bencana Alam dan lain sebagainya.
6. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
7. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.
8. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis bidang ke Pu an dan Penataan Ruang
9. Belum tersedianyamekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat.
10. Belum terwujudnya perencanan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkelanjutan.
11. Belum terselenggaranya Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pendanaan dan Pengaman bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat berperan sebagai pelaksana dalam proses pembangunan. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat selain berkoordinasi dengan OPD terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait. Untuk itu, aparatur pemerintah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat harus melakukan fungsi ganda, selain menjalankan Tupoksi utama di tingkat Kabupaten, juga harus bersinergi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait, sementara Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan SDM serta mekanisme pelaksanaanpembangunan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi untuk Pembangunan Daerah, seperti:

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam

dokumen APBD

4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan di daerah sangatlah membutuhkan SDM yang berkualitas dan lengkap serta ditujang dengan sarana dan prasarana yang mememadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

Adapun permasalahan DPUPR dalam pencapaian kinerja TW II 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada awal Tahun 2023 untuk kegiatan DAK sudah memiliki perencanaan teknis yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, namun terbit PERMEN PUPR 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Biaya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Sehingga menyebabkan perencanaan yang telah selesai dilaksanakan harus disesuaikan dengan AHSP terbaru, sesuai dengan PERMEN PUPR 1 Tahun 2022.
2. Permasalahan hukum tekait pekerjaan fisik Tahun Anggaran sebelumnya yang melibatkan hampir seluruh pejabat struktural dan fungsional DPUPR, dengan Aparat Penegak Hukum.
3. Sebagaian besar perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di Tahun berjalan.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 89.636.093.667,00** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2024. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 10 program (teknis dan rutin) yang direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								89.956.254.197,00					89.669.093.667,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								89.956.254.197,00					89.669.093.667,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								89.956.254.197,00					89.669.093.667,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.748.403.990,00					11.428.243.460,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								102.306.930,00					138.594.300,00
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	47.181.930,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	83.469.300,00
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	55.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	55.125.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.222.130.000,00					9.222.130.000,00	

1	0 3	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	78 Orang/ bulan	-	8.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ bulan	8.000.000.000,00
1	0 3	0 1	2. 02	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	934.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	934.940.000,00
1	0 3	0 1	2. 02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	287.190.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	287.190.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								298.818.200,00						298.818.200,00
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	198.818.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	198.818.200,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								756.050.020,00						756.050.020,00
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	142.829.020,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142.829.020,00
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	263.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	263.400.000,00
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	349.821.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.821.000,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									356.447.900,00					0,00
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0,00
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	19 Unit	-	56.447.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								224.815.440,00					224.815.440,00
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	224.815.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.815.440,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									787.835.500,00					787.835.500,00
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Unit	-	155.947.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	155.947.500,00
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	42 Unit	-	24.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	24.700.000,00
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
						-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	327.293.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	327.293.000,00
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	152 Unit	-	79.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152 Unit	79.895.000,00
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								3.617.166.000,00						3.617.166.000,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1.619.859.500,00						1.619.859.500,00

1	0 3	0 2	2. 01	1 0	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
						-	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0.17 KM	-	1.619.859.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.17 KM	1.619.859.500,00
1	0 3	0 2	2. 02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1.997.306.500,00					1.997.306.500,00
1	0 3	0 2	2. 02	1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
						-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1350 KM	-	1.997.306.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1350 KM	1.997.306.500,00

1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								2.596.949.000,00						2.596.949.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								2.596.949.000,00						2.596.949.000,00
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan														
						-	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	199 SR	-	1.021.729.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	199 SR	1.021.729.500,00
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan														

						-	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 SR	-	1.575.219.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 SR	1.575.219.500,00
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								40.314.000,00					40.314.000,00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								40.314.000,00					40.314.000,00
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan													

						-	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	40.314.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1 Unit	40.314.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									301.821.500,00					334.821.500,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									301.821.500,00					334.821.500,00
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat														
						-	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	-	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Rumah Tangga	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	5 Rumah Tangga	33.000.000,00

1	0 3	0 5	2. 01	1 5	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT													
						-	Kapasitas IPLT Terbangun	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	956 M³/Hari	-	301.821.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas IPLT Terbangun	956 M³/Hari	301.821.500,00
1	0 3	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								4.388.070.231,00					4.388.070.231,00
1	0 3	0 6	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								4.388.070.231,00					4.388.070.231,00
1	0 3	0 6	2. 01	1 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan													

						-	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1024 M	-	4.388.070.231,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1024 M	4.388.070.231,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								6.922.622.250,00					6.922.622.250,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								6.922.622.250,00					6.922.622.250,00
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG													

						-	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	23 Dokumen	-	127.473.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	23 Dokumen	127.473.250,00
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.795.149.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.795.149.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								58.139.714.662,00					58.139.714.662,00

1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								58.139.714.662,00					58.139.714.662,00
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	605.806.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen	605.806.800,00
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan													
						-	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18400 KM	-	42.365.743.362,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	18400 KM	42.365.743.362,00

1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan													
						-	Panjang Jembatan yang Dibangun	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 M	-	14.006.924.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jembatan yang Dibangun	15 M	14.006.924.500,00
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan													
						-	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	78 M	-	1.161.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	78 M	1.161.240.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								330.686.500,00					330.686.500,00

1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								240.972.000,00						240.972.000,00
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
						-	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	162.803.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	162.803.500,00
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi														
						-	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	56.942.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang	56.942.500,00

1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	21.226.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Dokumen	21.226.000,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									12.487.500,00					12.487.500,00
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	12.487.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	12.487.500,00

1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								77.227.000,00					77.227.000,00
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi													
						-	-	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	48.112.000,00	-		-	-	48.112.000,00
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi													
						-	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	29.115.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	29.115.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1.870.506.064,00					1.870.506.064,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1.588.307.564,00					1.588.307.564,00

1	0 3	1 2	2. 01	0 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
						-	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.588.307.564,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.588.307.564,00
1	0 3	1 2	2. 03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									282.198.500,00				282.198.500,00
1	0 3	1 2	2. 03	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	282.198.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	282.198.500,00

TOTAL	89.956.254 .197,00	-	89.669.093 .667,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah. Usulan – usulan tersebut berupa :

1. Proposal yang disampaikan masyarakat secara berkelompok.
2. Usulan melalui Anggota DPRD.
3. Usulan melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang Nagari sampai Musrenbang Kabupaten.

Usulan – usulan tersebut diatas tetap memperhatikan tujuan dan sasaran DPUPR serta skala prioritas dan dilengkapi dengan *Readiness Criteria*.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokir) Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	VOLUME	PAGU	CATATAN
1	Pembangunan MCK	Perlunya Pembangunan MCK di Mushala Baiturrahman karena sudah tidak memadai lagi untuk di gunakan di perkirakan Anggaran Rp. 200.000.000	Jorong Kapa Selatan, Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
2	Pembangunan MCK	Perlunya Pembangunan MCK untuk Mesjid Jamit Dt. Rajo Alam Karena sudah tidak memadi lagi untuk di gunakan di perkirakan Anggaran Rp. 200.000.000	Jorong sialang, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	1 paket	200,000,000.00	POKIR
3	Pembangunan TPT Sungai	perlunya Penahan tebing/batu beronjong/TPT di bandar baru Karena Runtuhnya Bahu Jalan karena terkikis Sungai di perkirakan anggaran Rp. 300.000.000	Jorong bandar Baru, Kec, sasak ranah Pasisie, kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 paket	300,000,000.00	POKIR
4	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya Penahan tebing/ batu Beronjong/TPT di Sialang di karenakan runtuhnya bahu jalan karena terkikis sungai di perkirakan anggaran Rp. 250.000.000	Jorong sialang, Nagari Padang harpan, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	250,000,000.00	POKIR

5	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya Penahan tebing/ batu Beronjong/TPT di Desa baru di karenakan runtuhnya bahu jalan karena terkikis sungai di perkirakan anggaran Rp. 300.000.000	Desa Baru jorong Padang Halaban, Kec Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	150 Meter	300,000,000.00	POKIR
6	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Perlunya lanjutan pembangunan Drainase di Jorong bandar baru di perkirakan anggaran Rp 220.000.000	Jorong Bandar baru, Kec Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 paket	220,000,000.00	POKIR
7	Pembangunan MCK	Belum Memdai:nya WC atau Jamban untuk KK Miskin di sasak di Perkirakan Anggaranya Rp. 280.000.000	Sasak Ranah pasisie, Kec. Sasak Ranah Paisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	500 Meter	280,000,000.00	POKIR
8	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Perlunya saluran air di pemukiman masyarakat di jalan batang toman batang ampu jorong lembah binuang Dengan pagu dana sebanyak Rp. 200.000.000,-	Jalan Batang Toman Batang Ampu Jorong Lembah Binuang Nagari Lembah Binuang aua Kuniang Kec.Pasaman , Kab. Pasaman Barat	100 M	200,000,000.00	POKIR
9	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Jalan yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak nyaman lagi dilewati sehingga perlu ditingkatkan dengan membangun Rabat Beton dengan pagu dana Rp.200.000.000,-	Lembah Binuang Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kec.Pasaman , Kab. Pasaman Barat	500 Meter	200,000,000.00	POKIR
10	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simpang Bedeng - Sp. III	Perlunya rehab bahu jalan dan drainase di Jorong Simpang Tigo, Usulan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	500 M	150,000,000.00	POKIR

11	Rehabilitasi Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Perlunya rehabilitasi Drainase Pasar Simpang Tiga, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 paket	200,000,000.00	POKIR
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Perlunya pembangunan penahan tebing untuk mengatasi longsor di Jorong Sinuruik dengan Pagu Dana Rp.200.000.000,-	Kampung Kopi Jorong Sinuruik Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
13	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Perlu dilaksanakan pembangunan Drainase untuk peningkatan aktifitas masyarakat pada Kampung Pasar Tempurung dengan Pagu Dana Rp. 200.000.000,-	Imbo alai Jorong 4 Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 paket	200,000,000.00	POKIR
14	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlu dilakukan peningkatan jalan Rabat beton untuk peningkatan aktivitas masyarakat pada Pasar Tempurung ke Lembah Pasaman Dengan Pagu dana Rp.150.000.000,-	Pasar Tempurung Jorong 4 koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	200 Meter	150,000,000.00	POKIR
15	Pembangunan TPT Sungai	Perlu dilakukan penahan sungai untuk mengatasi naiknya debit air pada Ikan Larangann Silambau Dengan Pagu Dana Rp 100.000.000,-	Ikan Larangan Silambau Jorong Langgam Sepakat Nagari Kinali kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 KM	100,000,000.00	POKIR

16	Pembangunan Jalan	Perlu dilakukan pembangunan jalan di pemukiman Masyarakat untuk peningkatan aktifitas sehari-hari di jalan Imbo alai (Lanjutan) dengan Pagu Dana Rp.100.000.000,-	Kampung Pasar tempurung menuju kejorongan 4 koto Barat nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
17	Pembangunan Jembatan	perlu dilakukan Pembangunan jembatan plat deker sebanyak 2 Paket pada Pasartempurung menuju imbo alai dengan pagu dana Rp.100.000.000,-	Imbo alai ke Jorong 4 Koto Barat Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	15 Meter	100,000,000.00	POKIR
18	Pembangunan Jalan	perlu dilakukan pembangunan jalan (lanjutan) di Sungai Paku kampung sabalah dengan pagu dana Rp.150.000.000,-	Sungai paku kampuang sabalah jorong 4 Koto nagari kinali kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 KM	150,000,000.00	POKIR
19	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlu dilakukan pembangunan Rabat Beton untuk peningkatan aktifitas masyarakat di Jalan MAN Rambah ke Padang lapai dengan Pagu Dana Rp.150.000.000,-	Kampung Rambah Jorong 4 Koto Barat nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 KM	150,000,000.00	POKIR
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Perlunya pembangunan beronjong untuk mencegah terjadinya luapan air sungai, dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Ophir Blok B, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 paket	200,000,000.00	POKIR

21	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlu dilanjutkannya pembuatan jalan penghubung Kampung III ke Kampung I untuk mempermudah akses pendidikan, dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Kampung III Manakarya Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 km	200,000,000.00	POKIR
22	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya lanjutan penahan tebing/Pasangan batu di jalan kuranji jorong malasiro dengan usulan anggaran Rp .200.000.000,-	Jalan Kuranji Jorong Malasiro Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
23	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Batang Lingkin - Tongar	Lebar jalan terlalu sempit dan bahu jalannya sudah tinggi sehingga perlu dilebarkan atau ditingkatkan tinggi bahu jalannya dengan anggaran Rp.200.000.000,-	Juranggo Tongar Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
24	Pembangunan Jalan	Belum adanya jalan/pengerasan jalan kampung Manaon-Batu Mejen, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Mulyorejo Dusun Sidorejo, Nagari Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
25	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan di dusun 1 Bandarejo dalam kondisi rusak sehingga hanya bisa dilalui kendaraan roda dua karenanya perlu direhabilitasi sehingga arus orang dan barang menjadi lancar dibutuhkan anggaran Rp.200.000.000,-	Dusun 1 Nagari Lingkuang Aua Bandarejo Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

26	Pembangunan MCK	Belum Adanya MCK di Jorong Sawah Mudik, Usulan Anggaran Rp. 140.000.000,-	Jorong Sawah Mudik, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	140,000,000.00	POKIR
27	Pembangunan Jembatan	Belum adanya Jembatan Batang Pigogah-HKM Gunung Leco, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Sukorejo, Nagari Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
28	Pembangunan TPT Sungai	Penahan Longsor daerah aliran sungai dan kawasan pemukiman sekitar	Aie kio Jorong Tampus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah melintang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
29	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Mencegah genangan air dan banjir dikawasan lingkungan dan pemukiman	JL Gotong Royong Ds Rantau Pinang Jorong Tampus Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
30	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Mencegah genangan dan banjir pada kawasan lingkungan perkotaan dan masyarakat sekitar	JL Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang , Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
31	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya penyambungan aspal di jalan padang panjang untuk memperlancar akses masyarakat dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Jalan Padang Panjang Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

44	Pembangunan Jembatan	Akses masyarakat ke pemakaman kurang lancar karena tidak ada jembatan perlu dibangun jembatan dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-	Dusun 1 Nagari Lingkuang Aua Bandarajo Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
45	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Durian Kilangan - Padang Canduh	peningkatan jalan dusun 4 koja kecamatan kinali dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
46	Pembangunan Jembatan	pembangunan jembatan padang jiraik jorong alamanda kecamatan kinali dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
47	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya pembangunan Rabat Beton Mushalla Nurul Huda, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
48	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Drainase tidak ada sehingga perlu dibangun drainase dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,-	Nagari Lingkuang Aua Jambak Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
49	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	pembangunan drainase di pasar durian kilangan dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

50	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya Rabat Beton Jalan Mushalla Al- Muhajjirin, Usulan Anggaran Rp. 100.000.000,-	Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
51	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	peningkatan jalan menuju SD Negeri 02 Kinali dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
52	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Dibutuhkannya Rabat Beton Jalan Kampung Pasir Gang Tengkorak, Usulan Anggaran Rp. 100.000.000,-	Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
53	Pembangunan Jalan Produksi	pembangunan jalan lingkungan SMP-IT DARUL HIKMAH Kecamatan Luhak Nan Duo dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
54	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya peningkatan jalan Rimbo Gantiang ke Tongar, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
55	Pembangunan Jalan	Perlunya Rabat Beton Jalan KKN, Usulan Anggaran Rp. 100.000.000,-	Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
56	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Sasak - Pondok	peningkatan jalan rantau panjang tepi sungai kecamatan sasak ranah pasisie 1 Km dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00	Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	1,000,000,000.00	POKIR

57	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Sidodadi - Mandiangin	peningktan jalan lingkungan mandiangin kecamatan kinali dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
58	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Katiagan - Subang	peningkatabn jalan lingkungan katiagan kecamatan kinali dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
59	Rehabilitasi Jembatan	Pembangunan Rambin (Lanjutan ke 3) Angaran Rp. 150.000.000,-	Gunung Marisi Jorong Sarasah Talang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
60	Rehabilitasi Jembatan	sulitnya masyarakat mengangkut hasil panen melalui jembatan rambin marokek mudik sepanjang 24 m dengan usulan anggaran Rp 140.000.000	marokek mudik jorong sarasah betung nagari sungai aur, kecamatan sungai aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	140,000,000.00	POKIR
61	Pembangunan TPT Sungai	Normalisasi anak Sungai yang sering banjir Anggaran Rp. 100.000.000,-	Jorong Muara Tapus Kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
62	Pembangunan MCK	pembangunan MCK Rantau Panjang Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
63	Pembangunan MCK	pembangunan MCK Katiagan Kecamatan kinali dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

64	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Perlunya Pembangunan beronjong air Hitam Rimbo Batu Pasar Kajai untuk mencegah terjadinya luapan air sungai, dengan usulan anggaran, Rp. 50.000.000,-	Nagari Kajai, Kec.Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	50,000,000.00	POKIR
65	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Silambau - PT.Inkud	peningkatan jalan silambau menuju pembibitan PT. INKUD Kantor Camat Kinali dengan pagu dana Rp. 2.000.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	2,000,000,000.00	POKIR
66	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Jalan Lingkar Padang Jiraik	peningkatan jalan alamanda menuju padang jiraik jorong alamanda kecamatan kinali dengan pagu dana Rp.2.000.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	2,000,000,000.00	POKIR
67	Pembangunan Jalan	Pembangunan dan peningkatan Jalan Lingkar Padang Timbalun dengan Usulan Dana Rp. 200.000.000	Jorong Padang timbalun Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
68	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya Peningkaan Jalan Lubuk panjang- Proyek Simpang Tibo Abu untuk memudahkkan akses jalan masyarakat, dengan usulan anggran, Rp. 150.000.000,-	Kampung Alang Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
69	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Pembangunan Drainase Lubuak Alai ke Trans Jawa Pasir dengan Usulan Rp. 200.000.000	Jorong Lubuak Alai Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

70	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya normalisasi sungai di nagari air bangis kecamatan sungai Beremas Rp 100.000.000,-	Nagari Air bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
71	Pembangunan Jembatan	Perlunya dibangun Jembatan di kejorongan Silawai Tengah dengan usulan anggaran Rp.100.000.000,-	Kejorongan Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
72	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlu dilakukan pengerasan jalan untuk mempermudah aktifitas masyarakat di jorong lubuk godang menuju Jorong Limo Soriak dengan usulan anggaran Rp.100.000.000,-	Jorong Lubuk Godang Nagari menuju ke Jorong Limo Soriang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
73	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	perlunya pembuatan beronjong sungai batang tareh untuk mencegah terjadinya luapan air dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Sungai Batang Tareh Nagari Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
74	Pembangunan MCK	Belum adanya MCK untuk masyarakat di Nagari Air Bangis dengan usulan anggaran Rp.150.000.000,-	Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
75	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya Rabat jalan Simpang Tiga Sakato ke SMPN 6 Pasaman untuk memudahkan akses jalan, dengan usulan anggran Rp. 100.000.000,-	Simpang Empat, Lingkuang Aua, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR

76	Pembangunan Jalan	Pembanguan Jalan Rabat Beton Blok 4 Tarans Sakato Jaya (Lanjutan) dengan Usulan dana Rp. 200.000.000	Trans Sakato Jaya, kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
77	Rehabilitasi Jembatan	perlunya rehabilitasi jembatan rantau panjang untuk mengurangi adanya kendala akses warga dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Jembatan Rantau Panjang Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
78	Pembangunan MCK Komunal	pembangunan MCK lubuak anau jorong langgam saiyo kecamatan kinali dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
79	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Pembangunan Drainase Jalan Berlobang SMA I Sungai Aur (Lanjutan) dengan Usulan Dana Rp. 200.000.000	Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
80	Pembangunan TPT Sungai	perlunya pembangunan tembok penahan tebing Rantau Panjang untuk meminimalisir terjadinya longsor dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Rantau Panjang Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
81	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Air Meruap - Durian Kandang	pembangunan jalan lagan jorong langgam saiyo dari air meruab menuju durian kandang jorong sigunanti kecamatan kinali dengan pagu dana Rp. 3.000.000.000,00	Kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	3,000,000,000.00	POKIR

82	Pembangunan Jalan	Diperlukannya pembukaan jalan baru dari Kampung III RT 03 ke Kampung II untuk memperlancar akses masyarakat dengan usuluan anggaran Rp. 200.000.000,00	Kampung III Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
83	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simpang Kapundung - Tanjung Medan	peningkatan jalan tanjung medan menuju kampung sabuik jorong bandua balai kecamatan kinali dengan pagu dana Rp. 3.000.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	3,000,000,000.00	POKIR
84	Pembangunan Jalan	Perlunya Pembukaan Badan Jalan dari Simpang Languang menuju jalan Simpang Lai.guang menuju jalan Simpang Desa Tanjung Pangka untuk memudahkan akses jalan masyarakat, dengan usulan anggran Rp. 150.000.000,-	Nagari Lingkuang Aua, Kec.Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
85	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan (Over Lay) Jalan Air Haji - Sakato Jaya dengan Usulan Dana Rp. 200.000.000	Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
86	Pembangunan Jalan	Perlu Pembukaan jalan Pandan Pakuburan Pinaga untuk memudahkan Akses Jalan Masyarakat, dengan usulan anggran, Rp. 150.000.000,-	Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR

87	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Pembangunan Drainase Jalan Pembangunan Jorong Kuamang dengan Usulan Dana Rp. 150.000.000	Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
88	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya Rabat Beton jalan Lingkuang dan Plat deker Belakang BRI lama menuju jalan sakato, Simpang Empat untuk memudahkan akses jalan, dengan usulan Anggran Rp. 150.000.000,-	Nagari Lingkuang Aua, Kec.Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
89	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Durian Kilangan - Air Meruap	peningkatan jalan lingkungan lubuak anau jorong langgam saiyo kecamatan kinali dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
90	Pembangunan Jalan	Pembukaan jalan Perumnas Langgam Ke kantor PLN kinali	Kinali, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
91	Rehabilitasi Jembatan	Pembangunan Rambin Anggaran Rp. 200.000.000,-	Marokek Jorong Sarasah Betung kecamatan Sungai Aur , Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
92	Rehabilitasi Jembatan	Rehab Jembatan Taluak batiang Untuk memudahkan akses Masyarakat dengan usulan anggaran Rp 200.000.000-,	Taluak Batiang Kinali, kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
93	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase jalan Jorong Tinngiran dengan usulan dana Rp. 150.000.000	Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR

94	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan Jorong Kumpulan dengan Pagu Dana Rp.200.000.000	Jorong Kumpulan sakato Jaya Kec. sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
95	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	peningkatan jalan padang canduah untuk mempermudah akses jalan masyarakat dengan usulan anggaran Rp 150.000.000,-	padang canduah, kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
96	Pembangunan Jembatan	Rehab Jembatan Batang Air haji Ruas jalan Nagari Rabi Jonggor ke Jorong Bayang Tengah Nagari Sungai Aur	Ruas jalan Nagari Rabi Jonggor ke Jorong Bayang Tengah Nagari Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
97	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya Pondasi tepi sungai perkiraan anggaran : Rp. 100.000.000	Kapa Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
98	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	peningkatan jalan kepundung untuk mempermudah akses jalan masyarakat dengan usulan anggaran Rp 200.000.000,-	kapundung jorong bandua balai, kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
99	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Peningkatan Jalan Kompleks SMA 1 Kinali untuk mempermudah akses jalan dengan usulan anggaran Rp 150.000.000,-	Jorong Langgam, kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
100	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	Pembuatan Sumur/tower air bersih di ampar putih selatan Jorong kasik Putih perkiraan anggaran: Rp. 200.000.000	Ampar Putih Selatan Jrong kasik Putih kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

101	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya peningkatan jalan menuju puskemas ophir agar akses memudahkan masyarakat ke puskesmas	Puskesmas Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
102	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase Gorong2 Air Haji Anggaran Rp. 200.000.000,-	Air Haji Kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
103	Pembangunan Jalan	Lanjutan Rabat Beton Pasa Tarandam Simpang Tigo perkiraan anggran Rp. 70.000.000	Koto baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	70,000,000.00	POKIR
104	Pembangunan MCK	perlunya pembangunan MCK Mesjid Miftahul Jannah Perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000	Kapa Utara, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
105	Pembangunan Jembatan	Diperlukanya Pembangunan Jembatan Batang kumir banja Karang Besar Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kec.Pasaman untuk mempermudah akses jalan I Unit , dengan usulan Anggran Rp. 200.000.000,-	Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kec.Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
106	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	peningkatan jalan Lingkar jorong Parit kecamatan Koto Balingka Dengan usulan Anggaran Rp 200.000.000,-	Jorong parit, kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

107	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan drainase di jorong Suka Rami Kecamatan Koto balingka dengan usulan anggaran Rp 200.000.000,-	Jorong Suka Rami, Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
108	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	peningkatan drainase di jorong Parit kecamatan Koto Balingka dengan usulan Anggaran Rp 100.000.000,-	jorong Parit, kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
109	Pembangunan Jembatan	Diperlukanya Jembatan Kelompok Tani Giri Maju untuk Mempermudah Akses jalan Masyarakat, dengan usulan Anggaran Rp. 400.000.000,-	Giri Maju Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	400,000,000.00	POKIR
110	Pembangunan TPT Sungai	Perkuatan Tebing Jln. Jalur III Blok B Dusun 7 Jambak Selatan Timur untuk Menahan Tebing agar Banjir, dengan usulan anggran Rp. 150.000.000,-	Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
111	Pembangunan Jembatan	pembangunan plat dueiker di jorong 1 air bangis kecamatan sungai beremas dengan ususlan anggaran Rp 100.000.000,-	jorong 1 air bangis, kecamatan sungai beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
112	Pembangunan Jalan	meningkatkan pembangunan jalan lingkungan pasar tempurung dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Pasar Tempurung Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

113	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya dilakukan pekerjaan Bronjong Sungai untuk menahan tingginya Debit air di Jorong Tamiang Ampalu dengan usulan Anggaran Rp.200.000.000,-	Jorong Tamiang Ampalu Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
114	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kampung Lambah - Durian Tibarau	peningktan jalan lingkungan bunut jorong alamanda kecamatan kinali dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
115	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Peningkatan jalan rabat beton lubuk juangan dengan usulan anggaran Rp 200.000.000,-	lubuk juangan, kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
116	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Peningkatan Jalan holmit Air Haji dengan usulan Anggaran Rp 200.000.000,-	Air Haji, kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
117	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Durian Kilangan - Padang Canduh	lanjutan peningkatan jalan lingkung lubuak anau jorong langgam saiyo kecamatan kinali dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
118	Rehabilitasi Drainase Perkotaan/ Lingkungan	normalisasi dan rehab drainase gorong-gorong SMA Sungai Aur	sungai Aur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
119	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simp. Basecamp - Sungai Balai	peningkatan jalan Banja Durian Gadang Air Carut Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali dengan pagu dana Rp. 1.500.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	1,500,000,000.00	POKIR

120	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Padang Kadok - Padang Batih	peningkatan jalan Padang Kadok menuju Padang Batiah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali dengan pagu dana Rp. 1.000.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	1,000,000,000.00	POKIR
121	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	peningkatan jalan Rabat Beton jalan ke SMK IT Alhidayah Aia Gadang dengan usulan anggaran Rp 150.000.000,-	nagari Aia Gadang Batang Saman, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
122	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Perlunya pembangunan Drainase untuk mengatasi tingginya debit air di jorong Parik dengan usulan anggaran Rp.200.000.000,-	Jorong Parik Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
123	Pembangunan TPT Sungai	Pembangunan TPT Saluran Air Pelak Kopi ke Air Tolang Anggaran Rp. 150.000.000,-	Mudiak Simpang Kajai Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
124	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Pondasi Jembatan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Jorong Tombang Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
125	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya pembangunan TPT sungai di Jorong Batas Tarok dengan usulan anggaran Rp.200.000.000,-	Jorong Batas Tarok Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
126	Pembangunan MCK	Pembangunan MCK Musholla Air Rau Jorong VI Koto Selatan dan Musholla Candung Usulan Anggaran: Rp. 200.000.000	VI Koto Selatan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

127	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jenbatan Produktif Kampung lambah Usulan Anggaran: Rp. 150.000.000	VI Koto Utara, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
128	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya dilakukan pengerasan jalan kawasan perumahan di jorong pigogah Patibubur dengan usulan anggaran Rp.150.000.000,-	Jorong Pigogah Patibubur kecamatan sungai beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
129	Pembangunan TPT Sungai	Lanjutan Bronjong Sungai batang Tipo Perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Batang Tipo Jr Bandarejo Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
130	Pembangunan Jalan	Melanjutkan jalan Rabat Beton di kampung Lambah Perkiraan Anggaran: Rp.150. 000.000	Vi Koto Utara, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
131	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton di jorong Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka dengan pagu Data	Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
132	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton di jorong Simaninggir Kecamatan Koto Balingka dengan dana Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
133	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase di Jorong Labuai Kecamatan Koto Balingka dengan pagu dana Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

134	Pembangunan TPT Sungai	Penguatan Tebing Batang Limpato perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Batang Limpato Nagari Kajai Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
135	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton dijorong Trans Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka dengan pagu dana Rp, 200.000.000,00	Kecmatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
136	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan rabat Beton Perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Jalan Lingkar Dusun 2 Jr Bandarejo Nagari Lingkuang Aua kec Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
137	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton di Tanjung Larangan Kecamatan Ranah Batahan dengan Pagu dana Rp. 200.000.000.00	Kecamatan Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
138	Pembangunan Jembatan	Belum adanya Jembatan perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Tinggam Kajai Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
139	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Bancah Talang Batang Lingkin nagari Aia Gadang kec Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
140	Pembangunan TPT Sungai	Lanjutan pembangunan Bronjong Batang Tumpek siap longsor perkiraan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Sungai Lampang Jr Tanjung Beruang Kajai Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR

141	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase perkiraan Anggaran Rp 200.000.000,-	Sontang Tengah, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
142	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase perkiraan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Sontang Utara, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
143	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Perlunya tambahan pembangunan beronjong di sungai dekat Mesjid Nurul Amal untuk mencegah terjadinya luapan air, dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Sungai dekat Mesjid Nurul Amal Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
144	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya pembangunan rabat beton jalan dikejorongan Kapa timur untuk meningkatkan akses masyarakat dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Jorong kapa timur kecamatan luhak nan duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
145	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya pembangunan rabat beton jalan malasiro untu'k meningkatkan akses jalan bagi masyarakat dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	jalan malasiro kecamatan luhak nan duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
146	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	sulitnya akses jalan ke sitabu, maka perlu dilakukan peningkatan jalan (rabat beton) jalan raya rabi jonggor menuju sitabu dengan pagu dana yang di usulkan sebesar Rp. 200.000.000	Nag. Rabi Jonggor, kec. gunung tuleh, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

147	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya tembok untuk menahan tebing agar tidak longsor dan tempat berwudhu yang layak perkiraan anggaran Rp. 100.000.000,-	Mushalla Al- Muttaqin Kampung Baru Jorong Lubuk Landur, Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
148	Pembangunan TPT Sungai	"Pemasangan Tanggul Batu Ikan Larangan Pemuda Limpato Usulan : Pembangunan TPT Sungai Perkiraan Anggaran : Rp. 200.000.000,-"	Kajai, Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
149	Pembangunan Jembatan	"Robohnya Pondasi Plat Duiker Jalan Usulan :Pembuatan plat duiker Kampuang Aua Kuniang Perkiraan Anggaran : Rp. 200.000.000,-"	Aua Kuniang, Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
150	Pembangunan TPT Sungai	bronjong lubuk aua perkiraan 200jt	lubuak landua kec. pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
151	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase perkiraan anggaran Rp 150.000.000,-	Jr Parit Kec Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
152	Rehabilitasi Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Perlunya Normalisasi bandar buangan di Kampung IV Mahakarya, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Kampung IV Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

153	Pembangunan Jalan	Belum adanya akses jalan di Kampung V Mahakarya, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Kampung V Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
154	Pembangunan Jalan	Perlunya akses jalan di kampung IV Mahakarya, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Kampung IV Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
155	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya rabat beton jalan di Giri Maju, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
156	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya Normalisasi Sungai di Nagari Air Bangis, Usulan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
157	Pembangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Gedung Diklat Sudah Banyak yang hancur sehingga butuh Direhab dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000	Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
158	Pembangunan Jalan	Perlunya lanjutan Jalan Lingkar Aek Runding, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Aek Runding, Nagari Parit, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
159	Pembangunan MCK	Perlunya MCK untuk KK Miskin, Usulan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Kec. Ranah Batahan, Kec. Koto Balingka, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR

160	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Perlunya pembangunan Bandar Irigasi, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Kampiung I Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
161	Pembangunan Jembatan	Perlunya Jembatan di Perintis PTPN VI, Usulan Anggaran Rp. 100.000.000,-	Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
162	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya TPT Penguat Bahu Jalan di Kampung V Maha Karya, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Maha Karya, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
163	Rehabilitasi Jembatan	Perlunya dilakukan rehabilitasi Jembatan untuk memudahkan akses jalan di Jorong Sikabau Dengan usulan anggran Rp.100.000.000,-	Jorong Sikabau Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	100,000,000.00	POKIR
164	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	perlunya peningkatan akses jalan dari Kampung IV ke Kampung I untuk mempermudah akses pendidikan	Jalan dari Kampung IV ke Kampung I Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	-	POKIR
165	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	perlunya penyambungan aliran air ke rumah-rumah masyarakat dari RT 01 ke RT 02 Kampung III Mahakarya untuk mendapatkan air bersih dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	RT 01 ke RT 02 Kampung III Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

166	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	perlunya penyediaan penyambungan air ke rumah-rumah masyarakat RT 01 ke RT 02 Kampung III Mahakarya untuk mendapatkan air bersih dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	RT 01 ke RT 02 Kampung III Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
167	Pembangunan Jembatan	Tiadak ada jembatan , perlu pembangunan Jembatan Plat Duiker di Koto Alam Padang Tujuh (Jalan Depan Dinas Pendidikan Ke Jambu Baru) di usulkan anggaran Rp. 50.000.000,-	Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	50,000,000.00	POKIR
168	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	Perlunya bantuan air bersih di nagari sasak, kec. Sasak ranah pasisie diperkirakan anggaran Rp. 200.000.000	Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
169	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	Perlunya Peningkatan jalan di rantau panjang karena jalan sudah tidak memadai lagi untuk di lalui di perkirakan anggaran Rp. 300.000.000	Jorong Rantau Panjang, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	300,000,000.00	POKIR
170	Pembangunan Jalan	Perlunya peningkatan jalan di Jorong Rantau Panjang di perkirakan anggaran Rp. 270.000.000	Jorong Rantau Panjang, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	270,000,000.00	POKIR

171	Pembangunan MCK Komunal	Perlunya pembangunan MCK Komunal untuk Nagari Sasak di perkirskan anggaran Rp. 250.000.000	Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	250,000,000.00	POKIR
172	Pembangunan Jalan (Non Status)	Perlunya jalan alternatif menuju kampung lamo Rimbo Binuang dari dusun 1 Rimbo Binuang, anggaran yang diusulkan Rp. 150.000.000,-	Jorong Rimbo Binuang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
173	Pembangunan Jembatan	Perlunya lanjutan Pembangunan Jembatan Gugung Cibadak, Usulan Anggaran Rp. 150.000.000,-	Jorong Kampung Alang, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	POKIR
174	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Pembangunan Drainase perkiraan anggaran Rp. 200.000.000,-	Tran Muaro Kiawai, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
175	Pembangunan MCK	Pembangunan RKB/MCK perkiraan anggaran Rp 200.000.000,-	RKB/MCK Pesantren Al MUTTAQIN, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
176	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Box Coper perkiraan anggaran Rp 200.000.000,-	Tran Muara Kiawai, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR
177	Pembangunan Jalan	perlunya pembangunan jalan lingkar belakang masjid Durian Tiga Batang untuk memperlancar akses masyarakat dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00	Jalan Belakang Masjid Durian Tiga Batang Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	POKIR

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Musrenbang) Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
1	Bantuan Dana Renovasi/ Pembangunan Mushalla	Waspadanya masyarakat karna belum ada tembok penahanaan tebing di sekitar Mushalla Nurul Falah, maka dari adanya tembok penahan tersebut dapat menjaga keutuhan mushalla agar tidak terjadi pengkisan oleh air kuranji (sungai) kampung lubuk panjang...	Lubuk Panjang Dusun Kampung Alang Desa Kajai Kecematan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	200 Meter	160,000,000.00	Musrenbang
2	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Masalah : terjadinya penyumbatan saluran irigasi akibat pengikisan tanah, Usulan Pembagunan Drainase dari simpang Rini sampai simpang doyok Jorong Sukorejo, Volume 500 M, Pagu Dana 500.000.000,00	Jorong Sukorejo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
3	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Kalau Hujan Lebat Turun Kawasan ini akan tergenang Air dan dapat Merusak Badan Jalan.	Kapa timur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
4	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	tidak adanya di kawasan pemukiman tersebut saluran pengaliran yang mendukung	Jorong Sungai Talang, Kab. Pasaman Barat	250 Meter	150,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		untuk mengatasi genangan jika musim hujan				
5	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Jalan akan di rencanakan akan di rabata beton sehingga membuat posisi jalan akan lebih tinggi dr pada rumah dan mengakibatkan banjir jika hujan	Jorong Jambak, Kab. Pasaman Barat	400 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
6	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	1. Akan terjadinya genangan air (banjir) karena belum adanya drainase yang memadai untuk menampung debit air. 2. Rusaknya berbagai Infrastrutur Jalan, Jembatan dan Bangunan Lainnya akibat dari gerusan dan hantaman air dikarenakan debet air yang berlebih.	Jalan Yaptip ke arah Pasar Simpang Empat Jorong Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat	250 Meter	206,828,857.00	Musrenbang
7	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	1. Terjadinya Penyumbatan pada Lubang tempat amsuk air ke inlet Saluran Draenase. 2. Kondisi Draenase lama kurang memadai baik di tinjau dari segi kuantitas dan segi kualitas. 3. Pemeliharaan Jaringan Draease yang ada belum dilaksanakan secara	Jorong Tanjung Durian, Kab. Pasaman Barat	1000 Meter	250,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		bersikenambungan sehingga kondisi jaringan kurang terpelihara				
8	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	Belum adanya Drainase	Jorong Patomuan, Kab. Pasaman Barat	300 METER	240,000,000.00	Musrenbang
9	Pembangunan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	saluran air tidak ada dan sering tergenangnya air di Jalan sehingga berakibat rusak perlahan di Jalan, Volume 150 M, anggaran biaya Rp 100.000.000	Jalan Koramil Jorong Kuamang, Kab. Pasaman Barat	260 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
10	Pembangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Kondisi kantor camat saat ini tidak layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat	Jorong Pasar Muara, Kab. Pasaman Barat	1645 Meter	50,000,000,000.00	Musrenbang
11	Pembangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Kondisi rumah dinas camat sungai beremas saat ini tidak layak dihuni karena atap sudah banyak yang bocor, dinding sudah banyak yang retak	Jorong Pasar Dua Suak, Kab. Pasaman Barat	54 Meter	240,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
12	Pembangunan Gedung Kabupaten/ Kota	banyak nya keberagaman baik suku, agama di lingkungan jorong giri maju sehingga membutuhkan gedung serba guna untuk terciptanya kerukunan dan kebersamaan antar masyarakat dalam segala bidang	Kejorongan Giri Maju, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
13	Pembangunan Jalan	Hotmix Jalan SMPN 04 Pasaman, jalan yang sudah berlobang dengan kondisi jalan yang kurang bagus membuat siswa/siswi dan juga majelis guru yang melewati jalan tersebut akan membuat mereka tidak nyaman apabila hujan jalan akan becek dan berlumpur	Kejorongan Batang Umpai, Kab. Pasaman Barat	500 Meter	300,000,000.00	Musrenbang
14	Pembangunan Jalan	Jalan yang ada saat ini mengalami rusak berat dan harus diperbaiki	Jorong Pigogah Patibubur, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
15	Pembangunan Jalan	Belum Adanya Akses berupa jalan produksi untuk membawa hasil pertanian	Plasma III Jalur 9 Dusun Tengah Jorong Bukik Nilam, Kab. Pasaman Barat	1500 Meter	1,500,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
16	Pembangunan Jalan	Belum adanya akses berupa jalan produksi untuk membawa hasil pertanian	Plasma III Jalur 8 Dusun Selatan Jorong Bukik Nilam, Kab. Pasaman Barat	1500 Meter	1,500,000,000.00	Musrenbang
17	Pembangunan Jalan	Masalah : Sepanjang 3.000 meter jalan banjar jaya Jorong Sukorejo Nagari Desa Baru mengalami rusak parah, akses jalan tanah, berlobang-lobang, apabila turun hujan becek dan banjir dan sering terjadi kecelakaan apabila musim penghujan, memperlambat jarak tempuh ke puskesmas, sekolah, dan fasilitas umum lainnya menjadi lambat. usulan : pengaspalan jalan banjar jaya jorong sukorejo nagari desa bara. volume : 3.000 meter pagu dana : 3.000.000.000,00	Jorong Sukorejo, Kab. Pasaman Barat	3000 METER	3,000,000,000.00	Musrenbang
18	Pembangunan Jalan	Belum adanya akses berupa jalan untuk membawa hasil partanian.	Jorong Sidomulyo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
19	Pembangunan Jalan	Masalah : Belum adanya akses jalan yang memadai, akses jalan masih kerikil berbatu-batu, sebagian akses jalan tanah, apabila turun hujan becek.	Jorong Karangrejo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
20	Pembangunan Jalan	Permohonan Peningkatan Jalan dan rehabilitasi jalan Lingkar Mulyorejo	Jorong Mulyorejo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
21	Pembangunan Jalan	MAHALNYA BIAYA TRANSPORTASI PENGANGKUTAN HASIL PANEN SEHINGGA PERLU DILAKSANAKAN PEMBANGUNAN ASPAL HOTMIX	KEJORONGAN TANDIKEK, Kab. Pasaman Barat	1500 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
22	Pembangunan Jalan	jalan banyuwagi yang menghubungkan RT III ke RT IV di RK I Kampung II Mahakarya yang dilalui warga banyak terdapat genangan-genangan air ketika hujan dan lubang-lubang, sehingga dari segi aspek kehidupan serta perkembangan penduduk masyarakat banyak mengalami kendala dalam beraktivitas terutama di bidang pertanian,	Kampung II Mahakarya, Kab. Pasaman Barat	1000 Meter	100,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		perekonomian dan pendidikan				
23	Pembangunan Jalan	Jalan Mbah Salleh merupakan jalan yang cukup ramai dilalui oleh masyarakat Kondisi jalan mbah salleh saat ini sangat jauh dari kata layak sebab sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, di beberapa bagian jalan sudah tidak ada lagi koral yang menutupi jalan, tinggal jalan tanah yang ketika hujan akan seperti kubangan kerbau	Dusun III Jorong Pujorahayu, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
24	Pembangunan Jalan	1. Jalan Berlobang dan licin 2. Satu satunya akses jalan pintas ketika ada masyarakat mengadakan acara yang menimbulkan keramaian (Baralek dll)	Kampung Dalam Jorong Tanjung Pangka, Kab. Pasaman Barat	800 Meter	409,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
25	Pembangunan Jalan	Kondisi jalan sangat rusak dan memprihatinkan untuk dilalui kendaraan dan pada saat hujan jalan sering tergenangi air, volume: 1000 M dengan anggaran biaya Rp 1.100,000.000	Bulu Laga Jorong Lubuk Alai, Kab. Pasaman Barat	1000 Meter	1,100,000,000.00	Musrenbang
26	Pembangunan Jalan (Non Status)	sulitnya akses masyarakat keluar masuk perkampungan	jorong rura patontang, Kab. Pasaman Barat	6000 Meter	699,000,000.00	Musrenbang
27	Pembangunan Jalan (Non Status)	Rusaknya Jalan Masyarakat	Jorong Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat	2000 Meter	2,000,000,000.00	Musrenbang
28	Pembangunan Jalan (Non Status)	jalan berbatu besar dan berlobang sulit di lalui oleh kendraan roda 2.	jorong sarasah talang, Kab. Pasaman Barat	2000 Meter	1,500,000,000.00	Musrenbang
29	Pembangunan Jembatan	Masyarakat yang memiliki lahan di seberang sungai batang pasaman menyeberangi sungai hanya dengan fasilitas seadanya seperti berenang, sampan dan lainnya karena idak ada jembatan penghubung untuk menyeberangi sungai tersebut, diharapkan pembangunan jembatan gantung ini bisa terlaksana demi keselamatan dan kelancaran aktifitas hasil tani	Kejorongan Pasir Bintungan, Kab. Pasaman Barat	80 Meter	800,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		masyarakat				
30	Pembangunan Jembatan	jembatan yang ada sudah rusak berat	Jorong Ranah Panantian, Kab. Pasaman Barat	4 Unit	205,000,000.00	Musrenbang
31	Pembangunan Jembatan	sulitnya transportasi masyarakat dalam mengeluarkan hasil panen	jorong pintu padang, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	700,000,000.00	Musrenbang
32	Pembangunan Jembatan	Jembatan rusak dimana bebebrapa papanya sudah bolong dan tebing disekitar bahkan jembatan sudah runtuh dan tergerus oleh luapan air.....	Bonda Godang Dusun Mudik Simpang Desa Kajai Kecematan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	5 Meter	500,000,000.00	Musrenbang
33	Pembangunan Jembatan	Kurang Lancarnya akses Jalan Ke Pematang Jambu karna Jembatan masih terbuat dari Kayu.	Pematang Jambu Kapa Utara, Kab. Pasaman Barat	84 Meter	600,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
34	Pembangunan Jembatan	Kondisi air pasang yang sering meluap, membuat masyarakat takut untuk menyeberang dengan menggunakan ponton atau bot.	Jorong Katiagan, Kab. Pasaman Barat	100 Meter	1,500,000,000.00	Musrenbang
35	Pembangunan Jembatan	Pada Saat ini kondisi kantor wali nagari kinali persiapan terletak diujung aspal jalan samping dari aur badidik lebih kurang 80 m menuju ke mesjid quba kajai lebih kurang 200 m dan bersimpang ke panco hal ini dipisahkan oleh batang pertupangan dengan bentangan lebih kurang 25 m dan dari ujung jalan dipanco menuju jembatan lebih kurang 90 m, hal ini yang menyebabkan akses jalan tersebut sulit untuk dilewati	Batang Pertupangan Jorong Langgam Saiyo, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
36	Pembangunan Jembatan	tidak ada akses penghubung dari kinali ke kejorongan limpato sehingga perlu dibangun jembatan	limapto, Kab. Pasaman Barat	200 Meter	1,500,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
37	Pembangunan Jembatan	Jorong sungai talang memiliki satu jembatan penghubung dari sungai talang ke padang laweh yang mana jembatan ini nantinya digunakan bagi masyarakat untuk jalan usaha tani sehingga d butuhkan akses jembatan yang memadai	jorong sungai talang, Kab. Pasaman Barat	200 Meter	150,000,000.00	Musrenbang
38	Pembangunan Jembatan	tidak lancarnya akses masyarakat dalam kegiatan sehari-hari	jorong ulu simpang, Kab. Pasaman Barat	6 Meter	500,000,000.00	Musrenbang
39	Pembangunan Jembatan	akses jalan yang terputus karena adanya sungai yang menyulitkan masyarakat mengeluarkan hasil pertanian yang memerlukan jembatan	Jorong Guo, Kab. Pasaman Barat	24 Meter	300,000,000.00	Musrenbang
40	Pembangunan Jembatan	Akses jalan Evakuasi Utama masih Belum Memadai	Jorong Pisang Hutan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	400,000,000.00	Musrenbang
41	Pembangunan Jembatan	Mengantisipasi Ancaman Sunami Di daerah tersebut	Jorong Pantai Indah Maligi, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	225,000,000.00	Musrenbang
42	Pembangunan Jembatan	Mengantisipasi Terjadinnya Ancaman Sunami Di Daerah tersebut	Jorong Suka Damai Maligi, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	255,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
43	Pembangunan Jembatan	Mengantisipasi Terjadinya Ancaman Tsunami	Jorong Suka Jadi Mahgi, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	225,000,000.00	Musrenbang
44	Pembangunan Jembatan	akses jalan sulit apalagi di saat air besar masyarakat tidak bisa melewati sungai.	jorong sopo bawak, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	200,000,000.00	Musrenbang
45	Pembangunan MCK	Kondisi lingkungan yang sudah mulai padat penduduknya bertolak belakang dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai sehingga masyarakat setempat kesulitan untuk mendapatkan air bersih mandi,cuci dan kakus.	Kejorongan Durian Hutan, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	300,000,000.00	Musrenbang
46	Pembangunan MCK	Masih Banyak Ya Buang Air Besat Atau Kecil Sembarangan	Jorong Sialang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	300,000,000.00	Musrenbang
47	Pembangunan TPT Sungai	Hampir disetiap tahun di Nagari Aia Gadang mengalami banjir, pemukiman yang berada dilokasi tepi jembatan sudah sangat memprihatinkan karena tanah sudah banyak yang runtuh, demikian juga dengan lahan pertanian masyarakat sudah banyak	Jorong Pasir Bintungan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	1,300,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		yang dibawa arus sungai, air sungai juga menghantam pangkal jembatan yang mengakibatkan runtuhnya jembatan				
48	Pembangunan TPT Sungai	untuk minimalisir bahaya bencana alam	Jorong Sukomananti, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
49	Pembangunan TPT Sungai	Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan Masyarakat	Jorong Pinaga, Kab. Pasaman Barat	250 Meter	400,000,000.00	Musrenbang
50	Pembangunan TPT Sungai	Kendala yang diha dapi oleh nelayan akan pergi melaut saat pasang kering sungai tidak dapat dilewati dengan Bot TS maupun Bot Robin, karena terjadi pendakalan disepajang sungai.	Jorong Mandiangin, Kab. Pasaman Barat	500 METER	200,000,000.00	Musrenbang
51	Pembangunan TPT Sungai	Pembangunan TPT dan Pelebaran Jalan sangat dibutuhkan masyarakat karena susahnya ketika berpasan saat melewati jalan karena sebagian jalan sudah rusak	Mudiak Labuah, Kab. Pasaman Barat	1800 Meter	1,800,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
52	Pembangunan TPT Sungai	Aspal Jalan Akan Roboh	Jorong Bandar Baru, Kab. Pasaman Barat	1200 Meter	150,000,000.00	Musrenbang
53	Pembangunan TPT Sungai	Akan Robohnya Tebing Sungai	Jorong Rantau Panjang, Kab. Pasaman Barat	1000 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
54	Pembangunan TPT Sungai	disaat curah hujan tinggi sering terjadi banjir akibat luapan sungai	Tinggam Jorong Harapan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
55	Pembangunan TPT Sungai	sering terjadi longsor dan banjir	jorong tombang padang hilir, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
56	Pembangunan TPT Sungai	Perlunya TPT Sungai	jorong Perhimpunan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
57	Pembangunan TPT Sungai	kondisi tanah mulai menipis, terjadinya erosi ketika jumlah debit air sungai banyak, perlu nya penahan tebing untuk menanggulangi erosi tersebut, volume 100 M anggaran biaya Rp 200.000.000	gang kelapa jorong koto pinang, Kab. Pasaman Barat	100 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
58	Pembangunan TPT Sungai	kondisi tebing sudah memprihatinkan, sehingga perlu dipasang tembok penah tebing supaya tidak terdampak kerumah warga ditepi sungai tersebut, volume 1 Paket, anggaran Rp 200.000.000	Jalan Sumba Dusun Kampung Baru Jorong Taluak Ambun, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
59	Pembangunan TPT Sungai	Kondisi Tebing sudah runtuh, perlu TPT agar Tebing lebih Kokoh, Volume 200 M, anggaran biaya Rp 400.000.000	Sungai Batang Bayang Jorong Irian, Kab. Pasaman Barat	200 Meter	800,000,000.00	Musrenbang
60	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Jalan Kampung Bukik	Jalan yang sudah mulai rusak berlobang dan becek, Jalan merupakan alat transportasi bagi masyarakat yang berada pada kawasan pemukiman, infrastruktur yang bagus akan mendukung kesejahteraan,kenyamanan dan kesehatan masyarakat, Hotmix jalan Kampung Bukik sangat dibutuhkan masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keindahan tata lingkungan, jalan ini terbatas kemampuannya menerima beban kendaraan yang lewat akibatnya dapat merusak jalan,	Peningkatan/Rehabilitasi Hotmix Jalan Kp. Bukik Batang Umpai, Kab. Pasaman Barat	1000 Meter	800,000,000.00	Musrenbang
61	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Malasiro - Lubuk Gadang	Kurang Lancarnya Akses Jalan Warga Lubuak Gadang karna adanya jalan yg Rusak sepanajng 1 Km	Lubuak gadang Jorong Malasiro, Kab. Pasaman Barat	500 Meter	500,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
62	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Padang Panjang - Kp. Jambu	Kurang Lancarnya Jalan Pemukiman Masyarakat di Padang Panjang ke Pematang Jambu	Padang Panjang Jorong Lubuak Pudiang, Kab. Pasaman Barat	2500 Meter	2,500,000,000.00	Musrenbang
63	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Padang Tujuh - Kampung Baru	untuk keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat	jorong padang tujuh, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
64	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Sawah Mudiak - Batas Sumut	kondisi jalan kurang baik apabila terjadi hujan, becek dan mambahayakan pengguna jalan	jorong sawah mudik, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
65	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simaninggir-Aek Nabirong	berlobang dan masih sulit nya akses warga saat musim hujan	Jorong simaninggir, Kab. Pasaman Barat	1800 Meter	227,500,000.00	Musrenbang
66	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simp. III Alin - Sungai Magelang	Jalan rusak, putus dan berlubang	Jorong Air Dingin, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	5,138,000,000.00	Musrenbang
67	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simp. Translok - Simp. Lubuk Juangan	jalan berbatu dan merupakan jalan utama masyarakat	jorong sungai tanang, Kab. Pasaman Barat	1500 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
68	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Simpang Adian Modang - Tanjung Larangan	kondisi jalan menuju jorong tanjung larangan masih kurang baik dan kondisinya becek, berlmupur ketika musim hujan	Jorong tanjung larangan nagari batahan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
69	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Sp Adian Modang - Tb Pdg Silayang Mudik	kondisi jalan kurang baik apabila terjadi hujan dan becek dan membahayakan pengguna jalan.	Jorong silayang Julu, Kab. Pasaman Barat	8000 METER	1,000,000,000.00	Musrenbang
70	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	sering nya halaman warga banjir saat musim hujan	Jorong Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat	500 Meter	152,000,000.00	Musrenbang
71	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	sering banjir di halaman rumah warga saat musim hujan	jorong sigalangan, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	200,000,000.00	Musrenbang
72	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	meluapnya air selokan saat musim hujan	jorong labuai, Kab. Pasaman Barat	700 Meter	400,000,000.00	Musrenbang
73	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	meluap nya air selokan saat musim hujan	jorong ulu simpang, Kab. Pasaman Barat	700 Meter	500,000,000.00	Musrenbang
74	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	air selokan sering meluap saat musim hujan	jorong tamiang ampalu, Kab. Pasaman Barat	2000 Meter	2,000,000,000.00	Musrenbang
75	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	sering meluapnya air selokan di musim hujan	jorong lubuk gadang, Kab. Pasaman Barat	2000 Meter	600,000,000.00	Musrenbang
76	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	jalan sering digenagi air di saat musim hujan.	jorong tanjung babolik, Kab. Pasaman Barat	1000 Meter	500,000,000.00	Musrenbang
77	Peningkatan Drainase Perkotaan/ Lingkungan	seringnya banjir di Kawasan tersebut, agar dibangun drainase untuk pencegahan bencana banjir, volume :500 M , Perkiraan biaya: Rp	Jorong Saroha, Kab. Pasaman Barat	500 Meter	200,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		200.000.000				
78	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	sering terjadi genangan air apabila musim hujan	Jorong kampung mesjid, Kab. Pasaman Barat	300 METER	500,000,000.00	Musrenbang
79	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	kondisi jalan kerikil, sehingga perlu ditingkatkan agar akses jalan lebih dekat, volume: 300 M, anggaran biaya 300.000.000	Jalan Pembangunan Jorong Kuamang, Kab. Pasaman Barat	200 Meter	200,000,000.00	Musrenbang
80	Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan	kondisi jalan sudah berlobang dan rusak, sehingga jalan perlu diperbaiki dengan volume 500 M, anggaran biaya Rp 350.000.000	Gugung Pioner Jorong Lombok, Kab. Pasaman Barat	500 Meter	350,000,000.00	Musrenbang
81	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	1. Tidak adanya sarana air bersih, sehingga masyarakat harus mencari alternativ lain seperti mencari air kesungai yang jaraknya sangat jauh dari permukiman masyarakat. 2. Tingginya resiko terjangkit penyakit mutaber bagi masyarakat yang menggunakan air rawa sebagai MCK	Dusun Utara Batang Biyu, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	500,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		3. Terbatasnya kemampuan Masyarakat untuk membeli air galon sebagai air kosumsi.				
82	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	kurangnya persediaan air bersih masyarakat	jorong simaninggir, Kab. Pasaman Barat	7 Unit	300,000,000.00	Musrenbang
83	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	1. Kurangnya Sumber Air Bersih, sehingga tidak dapat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Sumber Air Berih yang kurang memadai dapat menimbulkan datangnya bernagai sumber penyakit ti tegah-tegah masyarakat. 3. Timbulnya ketidaknyamanan ditengah-tegah masyarakat. 4. Dampaknya terhadap lingkungan menjaddi kurang bersih.	Jorong Bandar dan Jorong Huta Tonga, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	1,000,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
84	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kawasan Perdesaan	Sulitnya air bersih di daerah tersebut, air sumur warga banyak berwarna oren sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumi anggaran biaya Rp 150.000.000	Jorong Saroha, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	150,000,000.00	Musrenbang
85	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	sarana irigasi belum maksimal dibangun diwilayah POKTAN, Maka keberadaan irigasi yang baik sangat dibutuh kan para petani...	Sawah Darek Dusun Pasa Lamo Desa Kajai Kecematan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	150,000,000.00	Musrenbang
86	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Sering terjadi luapan air dan banjir yang mengakibatkan hanyutnya rumah warga, banyak nya pembuangan sambah di air sungai bantang limpato sehingga tersumbat dan mengakibatkan banjir besar...	Banir Tambuk Dusun Limpato Desa Kajai Kecematan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	300 Meter	300,000,000.00	Musrenbang
87	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (saluran/bendung/bangunan pintu air)	Pada Musim Hujan yang hampir turun pada bulan akhir tahun dan awal menyebabkan volume air sungai batang kenaikan jadi tinggi dan meluap ke lokosi persawahan yang	Jorong Paraman AMpalu, Kab. Pasaman Barat	300 METER	500,000,000.00	Musrenbang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Pagu	Catatan
		menakibatkan petani jadi gagal panen dan rusaknya lahan persawahan.				
88	Rehabilitasi Jembatan	Memperbaiki Jembatan yang sudah rusak	Jembatan Batang Ampu Jorong Lembah Binuang, Kab. Pasaman Barat	1 Paket	250,000,000.00	Musrenbang
89	Rehabilitasi Jembatan	1. Jembatan sudah rusak 2. Susahnya Akses masyarakat untuk mengeluarkan hasil tani dan akses ke permukiman.	Dusun II Jorong Bandarejo, Kab. Pasaman Barat	15 Meter	150,135,000.00	Musrenbang
90	Rehabilitasi Jembatan	jembatan rusak dan sulit dilalui oleh masyarakat	jorong situmang, Kab. Pasaman Barat	1 UNIT	200,000,000.00	Musrenbang
91	Rehabilitasi Jembatan	kondisi rambin masih dari kayu dan tidak memadai lagi sehingga sering lantai rambin patah karena terbuat dari kayu, maka rambin perlu direhab dengan sengplat, volume 1 Paket anggaran Rp 250.000.000	Jalan Gugung Pioner Jorong lombok, Kab. Pasaman Barat	1 Unit	250,000,000.00	Musrenbang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu ;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan Rencana Kerja 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 38 menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;
5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, RKP 2021 mengusung tema "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas".Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi akibat dari pandemi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan terutama kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2021-2026 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
I	**Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan:** a) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan c) Pemerataan Layanan Pendidikan dan Pengembangan Iptek-Inovasi d) Pengentasan Kemiskinan e) Pembangunan Budaya · · Karakter, dan Prestasi bangsa	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
				• Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
				• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				• Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
				• Program pengembangan wawasan kebangsaan
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Perdesaan
				• Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang	• Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				• Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
				• Program obat dan perbekalan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
			berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	kesehatan
				• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				• Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga
				• Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
				• Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				• Program pengawasan obat dan makanan
				• Program pengembangan lingkungan sehat
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				• Program peningkatar peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
				• Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	• Program Pendidikan Anak Usia Dini
				• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				• Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				• Program Peningkatan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
				Kualitas Hasil Belajar
				• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				• Program Pendidikan Non Formal
				• Program bantuan Operasional Sekolah
		4. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	• Program Peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan
				• Program Pengembangan Prestasi Keagamaan
				• Program pengembangan wawasan kebangsaan
				• Program peningkatan peran serta kepemudaan
				• Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
				• Program Pengembangan Nilai Budaya
II	**Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah:** a) Perluasan Infrastruktur Dasar b) Penguatan Infratruktur Daerah Tertinggal,dan Ketahanan Bencana	1. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				• Program Pengembangan Perumahan
				• Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastrutur Kawasan Perkotaan
				• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
	c) Penguatan Konektivitas Multimoda dan antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi d) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan e) Transformasi Digital			• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Program perencanaan pembangunan daerah • Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam • Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong • Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana • Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana • Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi • Program Pengembangan Data/ Informasi • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan • Program Pengendalian dan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
				Pengamanan Lalu Lintas
				• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
				• Program kerjasama informasi dengan mas media
			2. Pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang	• Program Perencanaan Tata Ruang
				• Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
III	**Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja:** 1. Penguata Kewirausahaan dan UKM 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi, Sektor Riil dan Industrialisasi 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 5. Penguatan	1. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	1. Pemberdayaan koperasi,IKM dan UMKM	• Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
				• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
				• Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
				• Program peningkatan dan pengembangan ekspor
				• Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
				• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			2. Pengembangan perdagangan,Investasi, Jasa, Pariwisata dan Industri Kreatif melalui Peningkatan	• Program peningkatan dan pengembangan ekspor
				• Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
				• Pengembangan Industri Kecil

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
	Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		Kulitas Tanaga Kerja	dan Menengah
				• Program Peningkatan Kesempatan Kerja
				• Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
				• Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
				• Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				• Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
				• Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan
				• Program pengembangan destinasi pariwisata
				• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				• Program Pengelolaan Keragaman Budaya
				• Program pengembangan Industri Kreatif
		2. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	3. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman	• Program pengembangan budidaya perikanan
				• Program pengembangan perikanan tangkap
				• Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
				• Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
				• Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
				• Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
				• Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
				• Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
				• Program peningkatan produksi hasil peternakan
IV	**Ketahanan Pangan, Air , Energi, dan Lingkungan Hidup:** 1. Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aksesibilitas Air 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Penguatan	1. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	1. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman	• Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
				• Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
				• Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
				• Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
				• Program pengembangan budidaya perikanan
				• Program pengembangan perikanan tangkap
		2. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan	2. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
				• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
	Ketahanan Bencana	Infrastruktur		• Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
		3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	• Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
				• Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
				• Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
				• Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				• Program peningkatan pengendalian polusi
				• Program Perencanaan Tata Ruang
				• Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				• Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
				• Program Peningkatan Kelembagaan Kebencanaan
				• Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
				• Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam
				• Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
V	**Stabilitas Pertahanan dan Keamanan:**	1. Pembangunan mental dan	1. Pengamalan ajaran agama dalam	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
	1. Penguatan Kemampuan Pertahanan 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 4. Penanggulangan Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 5. Penaggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal
				Program pendidikan politik masyarakat
		2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi	Program penataan peraturan perundang-undangan
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Saseran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat Tahun 2021

MISI	TUJUAN MISI	SASARAN MISI	TUJUAN DPUPR
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kineija Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Infrastruktur Yang Berkualitas dan Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Tata Ruang
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan yang inklusif	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan	
		Meningkatnya konektivitas wilayah	
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah dan penanggulangan bencana	Pengendalian pemanfaatan ruang	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahun 2021-2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang wilayah. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak hanya melalui dana APBD saja namun juga dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.Secara garis besar, rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 10 Program, 22 Kegiatan, 58 Sub-Kegiatan. Dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 55.544.948.381,00**

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

9. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

- Normalisasi/Restorasi Sungai

10. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

12. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Penyediaan Sarana Persampahan

V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

14. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

VII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

15. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

16. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan

dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
- Penataan Bangunan dan Lingkungan

IX. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

17. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- Pembangunan Jalan
- Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

X. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

18. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

19. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

20. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

XI. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

21. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Sistem Informasi Penataan Ruang

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**55,644,948,381.00**							**89,669,093,667.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**55,644,948,381.00**							**89,669,093,667.00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**55,644,948,381.00**							**89,669,093,667.00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	**9,996,290,782.00**						100 %	**11,428,243,460.00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan*	-			80 %	97,305,500.00			-	-	-	-	138,594,300.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Kerja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Kerja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	47,179,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83,469,300.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	50,126,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi keuangan*	-			80 %	7,863,598,362.00			-	-	-	-	9,222,130,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	6,626,163,362.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	954,190,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		934,940,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	233,245,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		287,190,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD*	-			80 %	189,918,200.00			-	-	-	-	298,818,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	189,918,200.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198,818,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi administrasi umum PD*	-			80 %	731,542,780.00			-	-	-	-	756,050,020.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	144,791,980.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		142,829,020.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	263,400,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		263,400,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	323,350,800.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		349,821,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase fasilitasi pengadaan BMD*	-			80 %	71,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	71,000,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			80 %	224,815,440.00			-	-	-	-	224,815,440.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	224,815,440.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		224,815,440.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD*	-			80 %	818,110,500.00			-	-	-	-	787,835,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	182,392,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		155,947,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	26,600,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24,700,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	326,903,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		327,293,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				152 Unit	82,215,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79,895,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik***	**90 %**			**86 %**	**2,133,162,200.00**						**90 %**	**3,617,166,000.00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai*	-			80 %	100,639,900.00			-	-	-	-	1,619,859,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.17 KM	100,639,900.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,619,859,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder*	-			80 %	2,032,522,300.00			-	-	-	-	1,997,306,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1350 KM	2,032,522,300.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,997,306,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	*Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)*	100 %			100 %	3,646,655,497.00						100 %	2,596,949,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota yang dikelola*	-			80 %	3,646,655,497.00			-	-	-	-	2,596,949,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				199 Liter/Detik	68,677,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,021,729,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 SR	3,577,977,997.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,575,219,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	*Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah*	5 Kecamatan			5 Kecamatan	68,677,500.00						5 Kecamatan	40,314,000.00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem dan pengelolaan persampahan yang dikembangkan*	-			80 %	68,677,500.00			-	-	-	-	40,314,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	68,677,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40,314,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	*Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik*	100 %			100 %	368,677,500.00						100 %	334,821,500.00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten yang dilakukan*	-			100 %	368,677,500.00			-	-	-	-	334,821,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				956 M³/Hari	300,000,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		301,821,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	68,677,500.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***"Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat***	70 %			**65.46 %**	**2,026,789,902.00**						70 %	**4,388,070,231.00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya sistem drainase*	-			80 %	2,026,789,902.00			-	-	-	-	4,388,070,231.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1024 M	2,026,789,902.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		-		4,388,070,231.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***% bangunan ber-IMB per satuan bangunan***	15.51 %			15.01 %	2,382,424,900.00						15.51 %	6,922,622,250.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, pemberian IMB dan SLF yang dilaksanakan*	-			80 %	2,382,424,900.00			-	-	-	-	6,922,622,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,101,147,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6,795,149,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				23 Dokumen	281,277,400.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		127,473,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	*Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap*	70 %			65.46 %	32,585,534,750.00						70 %	58,139,714,662.00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya jalan dan jembatan*	-			80 %	32,585,534,750.00			-	-	-	-	58,139,714,662.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	40,501,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		505,806,800.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				18400 KM	26,527,121,250.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42,365,743,362.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				78 Jembatan	223,450,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-		1,161,240,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa	UMUM						
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	5,794,652,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14,006,924,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi***	50 %			**45 %**	**364,799,500.00**						50 %	330,686,500.00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi*	-			80 %	278,859,000.00			-	-	-	-	240,972,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	55,200,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56,942,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	20,690,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21,226,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	202,978,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		162,803,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten*	-			80 %	12,240,500.00			-	-	-	-	12,487,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	12,240,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12,487,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang*	-			80 %	73,690,000.00			-	-	-	-	77,227,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dilakukan													
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	27,817,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29,115,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				1 Lembaga	45,873,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48,112,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	*Ketaatan RTRW*	90 %			87 %	1,971,935,850.00						90 %	1,870,506,064.00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase penetapan RTRW dan RRTR kabupaten*	-			80 %	1,693,924,350.00			-	-	-	-	1,588,307,564.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,693,924,350.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,588,307,564.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koordinasi dan tersinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten yang dilakukan*	-			80 %	278,011,500.00			-	-	-	-	282,198,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	278,011,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		282,198,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							55,544,948,381.00							89,669,093,667.00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD.Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatanpembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKab.PasamanBarat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati PasamanBarat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pasaman Barat Tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 11 program, 22 kegiatan dan 63 sub-kegiatan yang akandilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp.137.420.951.744,-** sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN Renja Perangkat Daerah TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET Renja Perangkat Daerah TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						55,544,948,381.00							89,669,093,687.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55,544,948,381.00							89,669,093,687.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						55,544,948,381.00							89,669,093,687.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	9,996,290,782.00						100 %	11,428,243,460.00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan*	-			80 %	97,305,500.00			-	-	-	-	138,594,300.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	47,179,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83,469,300.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	50,126,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi keuangan*	-			80 %	7,893,598,362.00			-	-	-	-	9,222,130,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	6,826,193,362.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	954,190,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		834,940,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	283,245,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		287,190,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD*	-			80 %	189,918,200.00			-	-	-	-	288,818,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	189,918,200.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		188,818,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi administrasi umum PD*	-			80 %	731,542,760.00			-	-	-	-	756,050,020.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	144,791,960.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		142,829,020.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	263,400,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		263,400,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	323,350,800.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	349,821,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase fasilitasi pengadaan BMD*	-			80 %	71,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	71,000,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			80 %	224,815,440.00			-	-	-	-	224,815,440.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	224,815,440.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		224,815,440.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD*	-			80 %	616,110,500.00			-	-	-	-	787,835,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	182,362,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		155,947,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	26,600,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24,700,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	326,903,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		327,293,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				152 Unit	82,215,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79,895,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	*Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik*	**90 %**			**86 %**	**2,133,152,200.00**						**90 %**	**3,617,166,000.00**	

	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai*	-			80 %	100,639,900.00			-	-	-	-	1,619,859,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.17 KM	100,639,900.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,619,859,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder*	-			80 %	2,032,522,300.00			-	-	-	-	1,997,306,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1350 KM	2,032,522,300.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,997,306,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	*Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)*	100 %			100 %	3,846,855,497.00						100 %	2,596,949,000.00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota yang dikelola*	-			60 %	3,846,855,497.00			-	-	-	-	2,596,949,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				199 Liter/Detik	68,677,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	1,021,729,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang tersayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 SR	3,577,977,997.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,575,219,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	*Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah*	5 Kecamatan			5 Kecamatan	68,677,500.00						5 Kecamatan	40,314,000.00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem dan pengelolaan persampahan yang dikembangkan*	-			60 %	68,677,500.00			-	-	-	-	40,314,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	68,677,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40,314,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	*Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik*	100 %			100 %	368,677,500.00						100 %	334,821,500.00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten yang dilakukan*	-			100 %	368,677,500.00			-	-	-	-	334,821,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														

			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				956 M³/Hari	300,000,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		301,821,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	66,677,500.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	*"Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat*	70 %			65.48 %	2,026,789,902.00						70 %	4,388,070,231.00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya sistem drainase*	-			60 %	2,026,789,902.00			-	-	-	-	4,388,070,231.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1024 M	2,026,789,902.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4,388,070,231.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	*% bangunan ber-IMB per satuan bangunan*	15.51 %			15.01 %	2,382,424,900.00						15.51 %	6,922,622,250.00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, pemberian IMB dan SLF yang dilaksanakan*	-			60 %	2,382,424,900.00			-	-	-	-	6,922,622,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,101,147,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8,795,149,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				23 Dokumen	291,277,400.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		127,473,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	*Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap*	70 %			66.45 %	32,585,534,750.00						70 %	58,139,714,662.00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya jalan dan jembatan*	-			80 %	32,585,534,750.00			-	-	-	-	58,139,714,662.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	40,301,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605,808,800.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				18400 KM	26,527,121,250.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42,365,743,362.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.10.2.01.00 39	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				78 Jembatan	223,460,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,161,240,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.00 40	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	5,794,652,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14,006,924,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	*Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi*	50 %			45 %	354,799,500.00						50 %	330,688,500.00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi*	-			90 %	278,869,000.00				-	-	-	240,972,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	55,200,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56,842,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.00 14	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	20,690,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21,228,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

-	---	- - ---- - -	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, - Teknisi atau Analis yang Dilatih*	- - - - - -	- - -		50 Orang	202,978,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	- -	162,803,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten*	-			80 %	12,240,500.00			-	-	-	-	12,467,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.00 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	12,240,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12,467,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang dilakukan*	-			90 %	73,690,000.00			-	-	-	-	77,227,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.00 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	27,917,000.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29,115,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.00 08	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				1 Lembaga	45,873,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48,112,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	*Ketaatan RTRW*	**90 %**			**67 %**	**1,971,935,850.00**						**90 %**	**1,870,506,064.00**	

	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Kabupaten/Kota	*Persentase penetapan RTRW dan RRTR kabupaten*	-			80 %	1,593,924,350.00			-	-	-	-	1,588,307,564.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,593,924,350.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,588,307,564.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koordinasi dan tersinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten yang dilakukan*	-			80 %	278,011,500.00			-	-	-	-	282,198,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	278,011,500.00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		282,198,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							55,544,948,381.09							89,669,093,657.00	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat beserta seluruh personil diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Melalui penerapan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berjalan secara efektif dan efisien serta ramah lingkungan sesuai dengan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yaitu **"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PENATAAN RUANG".**

Simpang Empat, 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Drs. JONI HENDRI, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19751007 199501 1 001

RENJA

RENCANA KERJA

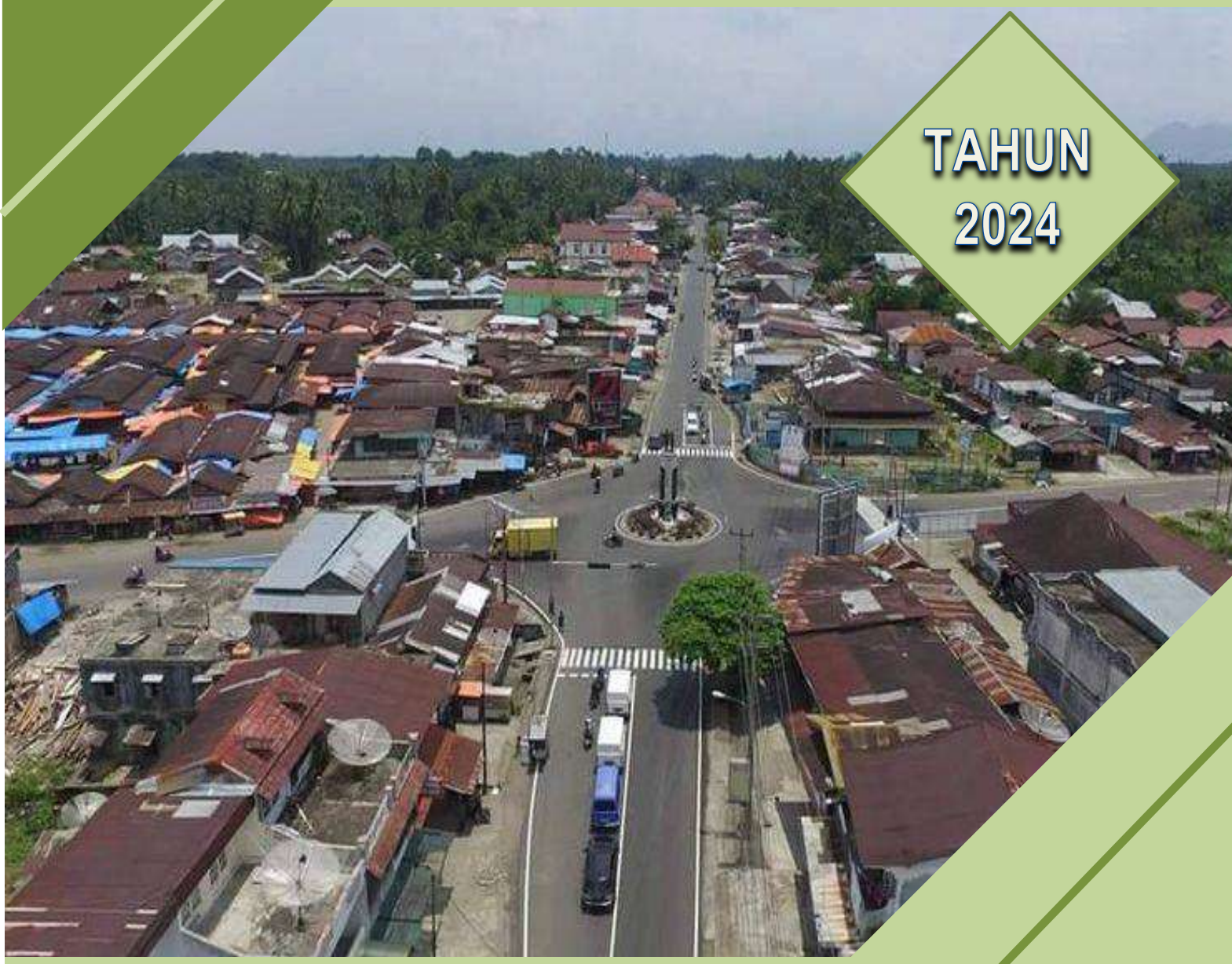

TAHUN
2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja ini telah berupaya memperhatikan permasalahan dalam urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan bidang pertanahan yang saat ini terjadi maupun yang masa mendatang dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah otonomi. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amin..

Padang Tujuh, Juni 2023

Kepala

ASRI HAMDI, ST
Pembina / IV/a
NIP 197611232005011012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud Dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **10**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 34

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III : TUJUAN DAN SARAN **48**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 50

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 ..... **52**

4.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 52

BAB V : PENUTUP **72**

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat……..…….. .12

Tabel 2.2 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pasaman Barat ……..……29

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat…….…… 30

Tabel 2.3 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ……..……..33

Tabel 2.4 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan …….…….…….……..33

Tabel T-C.31 Review Rancangan awal RKPD ……..…….…….35

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat ……..…….…….46

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat……49

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan……..……. 51

Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025……..…….…… 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.....4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu pelaksanaan amanat Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai bahan penyusunan RKPD, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Penyusunan Renja OPD harus ada keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan setiap Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang disusun melalui tahap-tahap penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang serta dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dalam Forum Perangkat Daerah serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Susunan Renja 2024 berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, perkiraan realisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

tahun 2023 serta evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2024 baik terhadap target capaian kinerja maupun anggaran.Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Psaman Barat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renja ini merupakan tahun ke-19 dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Pasaman Barat merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat serta penyusunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat setiap tahunnya.
c. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan.
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. RKPD Kabupaten Pasaman Barat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD Kabupaten Pasaman Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pasaman Barat.
e. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan RKPD Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan juga akan disesuaikan dengan pelaksanaan Renja K/L dan Renja Provinsi khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pusat maupun provinsi. Dokumen Renja yang telah disahkan akan menjadi dasar dalam pembahasan untuk menentukan besarnya RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang akan diurai lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan tahapan :

A. Persiapan Penyusunan;

   a. Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;

   b. Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah;

   c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan;

   d. Penyiapan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Penyusunan Rancangan Awal;

   Penyusunan Rancangan Awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

C. Penyusunan Rancangan

   Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja dengan mereview terhadap rancangan awal RKPD dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

E. Perumusan Rancangan Akhir dan;

F. Penetapan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok *membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten dan urusan bidang pertanahan* yang

terdiri dari Sekretariat, Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada gambar berikut ;

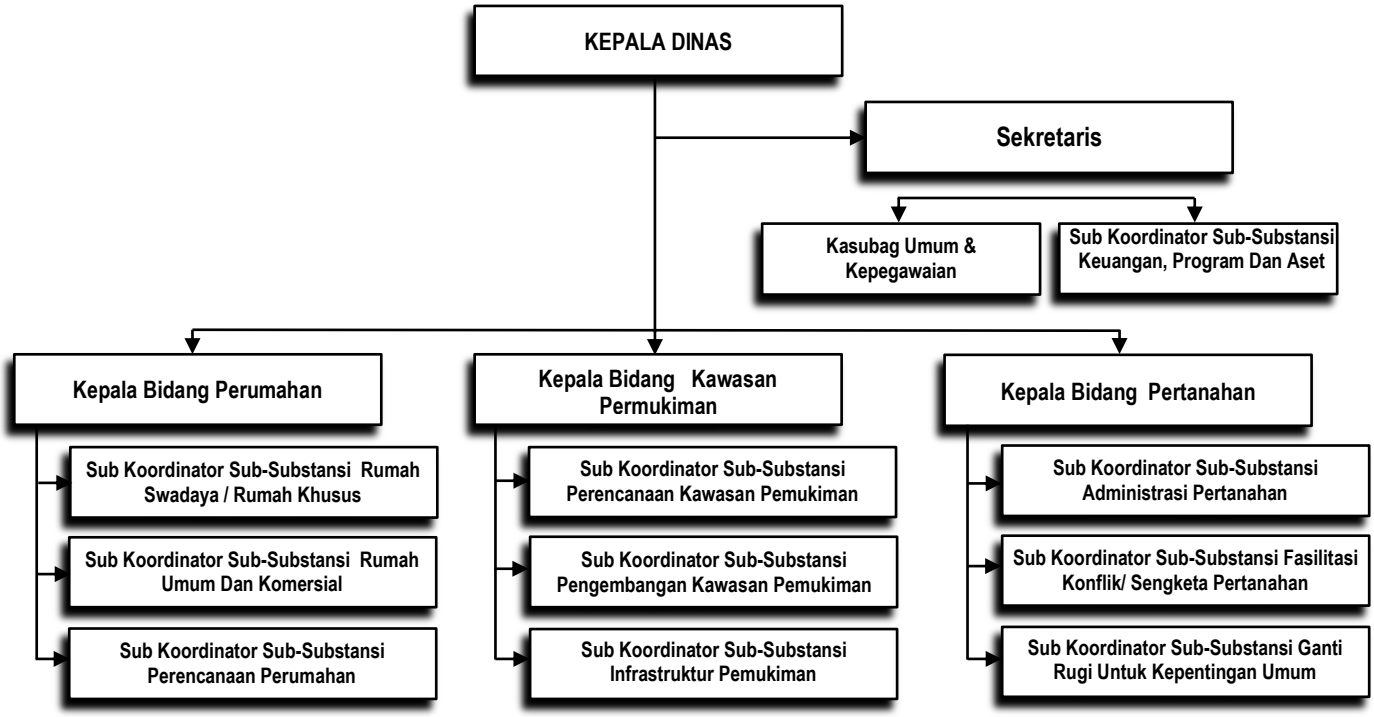

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

18. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/729/BUP-PASBAR/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini adalah sebagai acuan untuk menyusun perencanaan tahun 2024 di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah :
Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2024;

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
2. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dalam mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan dan lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi ABD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam bagian ini berisikan tentang uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelesan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    - Jumlah program dan jumlah kegiatan
    - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
    - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang rinci menurut sumber pendanaan

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup diantaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran .

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat secara umum sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Apabila dilihat dari indikator kinerja rata-rata telah mncapai target. Dari 9 Program 19 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan ada 2 Kegiatan yang capainnya tidak ada karna tidak ada antara lain :

1. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.448.000,00 realisasinya 0 %.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.810.217.400,00 realisasinya sebesar Rp. 1.686.250,00 atau sebesar 0.01%.
3. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.172.000,00 realisasinya 0 %.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target adalah:

a. Status bencana Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah darurat menuju pemulihan sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/188/BUP-PASBAR/2022 tentang Penetapan Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat sementara anggaran yang tersedia baru bisa digunakan setelah status bencana daerah adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.
b. Waktu yang singkat setelah perubahan anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak terealisasi dengan baik.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan program utama yang dilaksanakan tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**3.175.234.383**	**2.826.131.353**	**89%**	**100%**		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	2.813.713.283	2.477.912.253	88%	100%		
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	361.521.100	348.219.100	96%	100%		
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik daerah dan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**44.345.092**	**37.621.298**	**85%**	**100%**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra PerangkatDaerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	44.345.092	37.621.298	85%	100%		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**47.111.800**	**16.361.200**	**35%**	**100%**		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	47.111.800	16.361.200	35%	100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	*7*	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsai Umum Perkantoran**	**100%**	**100%**	**230.793.850**	**175.304.555**	**76%**	**100%**		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	3.600.000	3.550.000	99%	100%		
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	24.173.850	23.539.500	97%	100%		
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	203.020.000	148.215.055	73%	100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra PerangkatDaerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**32.000.000**	**31.280.000**	**98%**	**100%**		
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%	32.000.000	31.280.000	98%	100%		
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**78.910.000**	**44.254.825**	**56%**	**100%**		
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	44.040.000	22.794.825	52%	100%		
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	34.870.000	21.460.000	62%	100%		
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan AdministrsaiUmum Perkantoran**	**100%**	**100%**	**120.385.725**	**86.321.800**	**72%**	**100%**		

Kode					Urusan/Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra PerangkatDaerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	79.565.725	64.255.800	81%	100%		
1	04	01	2.09	06	Pemelihaaraan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			40.820.000	22.066.000	54%			
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)**	100%	100%	**26.955.025.400**	**33.286.500**	**12 %**	100%		
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah	100%	100%	112.350.000	31.600.250	28%	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di LokasiRawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100%	23.160.000	-	-	100%		
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-	22.140.000	-	-	-		
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		100%	-	67.050.000	31.600.250	47%	100%		
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Presentase Sosialisasi**	-	-	**32.448.000**	-	-	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusaana Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Ke giatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKiner j a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2022			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**04**	**02**	**2.02**	**1**	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepadaMasyaraka t/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi tentang Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	17.520.000	-	-	-		
1	**04**	**02**	**2.02**	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	14.928.000	-	-	-		
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Fasilititasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**	100%	-	26.810.217.400	1.686.250	1%	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusaana Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2022			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Terehabilitasi	100%	-	26.808.218.000	-	-	100%		
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.999.400	1.686.250	84%	-		
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase areal kawasan kumuh**	100%	100%	**8.079.071.549**	**7.885.355.450**	**98%**	100%		
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Tersedianya Izin Lokasi Perumahan**	-	100%	**10.590.000**	**6.225.000**	**59%**	-		
1	04	03	2.01	03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumu**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh**	-	100%	10.590.000	6.225.000	59%	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerj a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2022			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalaian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalaian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	100%	]10.590.000	6.225.000	59%	-		
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase areal kawasan kumuh**	-	100%	**419.120.000**	**341.964.250**	**82%**	-		
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Suvei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	100%	419.120.000	341.964.250	82%	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerj a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2022			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase areal kawasan kumuh**	100%	100%	**7.649.361.549**	**7.537.436.200**	**99%**	100%		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak layakHuni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100%	100%	4.729.928.000	4.664.414.250	99 %	-		
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugarkan	100%	-	2.919.433.549	2.873.021.950	99%	100%		
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**	100%	100%	**2.133.500.000**	**2.114.404.200**	**99%**	100%		
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuhpada daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**	100%	100%	2.133.500.000	2.114.404.200	99%	100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerj a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2022			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan tehhadap tumbuh dan Kemabnagnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100%	100%	2.133.500.000	2.114.404.200	99%	100%		
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	100%	-	**2.082.076.585**	**2.014.412.000**	**97%**	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerj a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	100%	-	2.082.076.585	2.014.412.000	97%	100%		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	-	2.082.076.585	2.014.412.000	97%	100%		
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pengembang yang Tersertifikasi**	100%	-	**15.172.000**	-	-	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerj a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dtahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Persentase Pengembang yang Tersertifikasi**	100%	-	15.172.000	-	-	100%		
1	04	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100%	-	15.172.000	-	-	100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusaana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2022			Target progam dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
10	**04**				**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi**	100%	100%	**104.368.800**	**76.115.600**	**73%**	100%		
10	**04**	**2**	**01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah konflik pemda/tanah ulayat yan difasilitasi**	100%	100%	**104.368.800**	**76.115.600**	**73%**	100%		
10	04	2	01	02	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.020.000	1.709.250	43%	-		
10	04	2	01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Tanah Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100.348.800	74.406.350	74%	100%		
10	**05**				**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah**	100%	100%	**20.076.000**	**13.441.650**	**67%**	100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi TargetKinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target progamdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Peangkat Daerah s/d tahun bejalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8=(7/6)	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
10	**05**	**2**	**01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah**	100%	100%	20.076.000	13.441.650	67%	100%		
10	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	20.076.000	13.441.650	67%	100%		

Padang Tujuh, Juni 2023
Kepala Dinas

ASRI HAMDI, ST
NIP. 19761123 200501 1 012

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkurren wajib pelayanan dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadu kewenangan kabupaten. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat tiga urusan pemerintahan yaitu bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan 2 (dua) Indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2021-2026, yaitu Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia yaitu pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, dimana peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup manusia.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan

memberikan dampak citra negatiF akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Pada akhir tahun 2020, berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 29 menyebutkan bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat dan Pasal 38 menyebutkan bahwa penetapan lokasi permukiman kumuh dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dan mendasari program Presiden Republik Indonesia yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 11 Target 11.1. Kebutuhan perumahan dan permukiman menjadi salah satu indikator dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDG's). Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh : 38.30% 52.78%. Capaian dan target pembangunan infrastruktur PPAS Kementrian PUPR tahun 2020 – 2024 Bidang Cipta Karya salah satunya adalah penanganan 10.000 Ha pembangunan kawasan kumuh. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan deliniasi kawasan kumuh baru.

Setelah dilakukan peninjauan dan pendataan ulang untuk lokasi dan luasan kawasan permukiman kumuh dengan indikator kekumuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terjadi penambahan lokasi dan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga berpengaruh pada luasan permukiman layak huni.

Berdasarkan perhitungan deliniasi kekumuhan baru di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 25 lokasi yang masuk ke dalam kategori kumuh dibawah 10 Ha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/729/BUP-PASBAR/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pasaman Barat

No.	Lokasi		Luas Lahan (Ha)	Jumlah Bangunan (Unit)	Jumlah KK	Tingkat Kekumuhan	Ket.
	Kecamatan	Nagari					
1	Lembah Melintang	Ujung Gading	4.29	143	143	Kumuh Ringan	
2	Sungai Beremas	Air Bangis	8.25	371	363	Kumuh Ringan	
3	Sungai Beremas	Air Bangis	8.97	356	356	Kumuh Sedang	
4	Kinali	Kinali	9.13	154	153	Kumuh Ringan	
5	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	9.90	303	287	Kumuh Ringan	
6	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	6.29	229	228	Kumuh Ringan	
7	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	3.19	118	114	Kumuh Ringan	
8	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	8.89	282	281	Kumuh Ringan	
9	Talamau	Kajai	1.52	78	78	Kumuh Ringan	
10	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	6.76	153	152	Kumuh Ringan	
11	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	8.16	238	233	Kumuh Ringan	
12	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	7.75	210	192	Kumuh Ringan	
13	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	5.75	169	169	Kumuh Sedang	
14	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	5.32	75	75	Kumuh Ringan	
15	Ranah Batahan	Batahan	1.90	54	53	Kumuh Ringan	
16	Ranah Batahan	Desa Baru	9.04	152	151	Kumuh Sedang	
17	Ranah Batahan	Desa Baru	7.72	127	125	Kumuh Ringan	
18	Sungai Aur	Sungai Aur	4.32	100	85	Kumuh Ringan	
19	Sungai Aur	Sungai Aur	4.43	189	188	Kumuh Ringan	
20	Sungai Aur	Sungai Aur	7.33	302	302	Kumuh Ringan	
21	Pasaman	Air Gadang	1.63	56	56	Kumuh Ringan	
22	Pasaman	Air Gadang	6.61	211	210	Kumuh Ringan	
23	Pasaman	Air Gadang	1.67	52	40	Kumuh Ringan	
24	Pasaman	Aur Kuning	3.33	149	148	Kumuh Ringan	
25	Luhak Nan Duo	Koto Baru	8.31	241	240	Kumuh Ringan	
JUMLAH			**150.46**	**4512**	**4422**		

Setelah dilaksanakan perhitungan deliniasi kekumuhan baru di akhir tahun 2021 diperoleh data terdapat 25 Lokasi yang masuk dalam Kategori Kumuh Ringan dengan luas

kumuh total sebesar 126.70 Ha dan Kategori Kumuh sedang dengan luas kumuh total sebesar 23.76 Ha.

Sesuai dengan target pembangunan nasional dan pengembangan kawasan permukiman untuk pengentasan 0% kawasan kumuh di tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dalam upaya pengentasan permukiman kumuh.

Berikut analisis capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Persentase areal kawasan kumuh		√	3.68 %	2.95 %	2.16%	1.48 %	3.68 %		2.16 %	1.48 %	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		√	87.79	90.04	91.19	93.34	87.79		91.19	93.34	
	Persentase pengembang yang tersertifikasi		√	50%	60%	70%	95%	0%		70%	95%	
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU		√	0.41	0.59	0.78	0.95	0.41		0.78	0.95	
	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	√		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	√		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

	Persentase penyelesaian izin lokasi		√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase konflik pertanahan difasilitasi		√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah		√	7	9	12	15	7		12	15	
	Nilai SAKIP			B	B	B	BB	B		B	BB	
	Level Maturitas SPIP			2.35	2.48	2.6	>2.6	3		2.6	>2.6	
	Berkurangnya temuan BPK			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Bersadarkan uraian pada Tabel T.C 30 diatas dapat kita lihat kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mengalami peningkatan, hanya satu indikator yaitu Persentase pengembang yang tersertifikasi yang tidak ada realisasi dan target kinerja tidak tercapai. Sedangkan untuk indikator lainnya seperti level maturitas SPIP realisasinya melebihi 100%, dan untuk indikator Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan realisasinya 100% karena tidak ada kasus relokasi pada tahun 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 42.993.616.384,- dan realisasi sebesar Rp 15.264.733.181,- atau sebesar 35.50%. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Anggaran untuk penerapan SPM rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2022 belum bisa direalisasikan karena Status bencana Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah darurat menuju pemulihan . Program rehabilitasi rumah bagi korban bencana anggarannya dialihkan ke Tahun Anggaran 2023.
2. Tidak tersedianya alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten.
3. Rendahnya penanganan areal permukiman kumuh dan ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan

Sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pada urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 6 indikator yaitu Persentase areal kawasan kumuh; Cakupan ketersediaan rumah layak huni; Persentase pengembang yang tersertifikasi; Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU; Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Keenam indikator tersebut diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun tahun 2026 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Untuk dapat mencapai target dari ketiga indikator tersebut membutuhkan kolaborasi pendanaan untuk penanganan kawasan kumuh dan pemenuhan rumah layak huni serta penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan, sumber pendanaan ini berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Indikator luasan permukiman layak huni pada tahun 2022 dipengaruhi oleh luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasaman Barat yaitu seluas 150.46 Ha atau 0.04% dari luas Kabupaten Pasaman Barat. Setelah dilaksanakan penanganan permukiman kumuh selama tahun 2022 dengan sumber pendanaan dari APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; APBD Provinsi dan APBN Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat diperoleh sisa luasan kumuh sebesar 138.46 Ha atau sebesar 0.036%.

Untuk indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90.04 dan realisasi sebesar 90.04 sehingga persentase mencapai 100%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah kecenderungan peningkatan pendanaan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat, di samping penanganan Rumah Tidak Layak Huni dari Anggaran Pemerintah Pusat melalui kegiatan DAK Perumahan. Selain itu keterlibatan pihak non pemerintah dalam usaha peningkatan kualitas hunian masyarakat juga turut mendukung terwujudnya penanganan rumah tidak layak huni, salah satu di antaranya adalah dengan pemberian bantuan rehabilitasi RTLH melalui Dana BAZNAS.

1. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.3
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	2022		
				Target RPJMD	Realisasi	Persentase %
1	Persentase Areal Kawan Kumuh	%	4.24%	3.68%	3.68%	100%
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	87.79	90.04	90.04	100%
3	Persentase Pengembang yang Terseftifikasi	%	50%	60%	0	0
4	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0.41	0.59	0.59	100%
5	Rasio Penduduk Korban Bencana yang yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	0	100	100	100%
6	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100%

2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	2022		
				Target RPJMD	Realisasi	Persentase %
1	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Konflik Pertanahan difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	Angka	7	9	9	100%

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Beberapa kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasaman Barat tidak tepat sasaran di lokasi basis kawasan kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/340/Bup.Pasbar tentang Kawasan Kumuh.
- Masih Kurangnya Keterlibatan Bidang Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Pasaman Barat.

Solusi :

- Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan dalam upaya pengurangan kekumuhan di Kabupaten Pasaman Barat seperti (Dinas Kesehatan; DPU PR; DLH; PDAM; Satpol PP dan lain-lain) untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai dengan lokasi kekumuhan di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengajukan usulan pendanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya berdasarkan luasan kekumuhan (luasan kumuh 10 – 15 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; Luasan kumuh diatas 15 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat).
- Meningkatkan Instensitas Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pertanahan Terkait urusan Pertanahan dengan OPD teknis yang mempunyai kewenangan seperti DPMPTSP dalam pemberian izin lokasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2022 mengalami perubahan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Review Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel T-C. 31
Review Rancangan awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**		**3.388.647.549**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**3.728.780.850**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.950.312.732	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.175.234.383	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.604.508.632	- Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.813.713.283	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		345.804.100	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		361.521.100	
	Administrasi Barang MilikDaderah pada Perangkat Daerah		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daderah pada Perangkat Daerah		61.909.092	Administrasi Barang Milik Daderah pada Perangkat Daerah		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daderah pada Perangkat Daerah		44.345.092	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		61.909.092	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		44.345.092	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		26.148.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		47.111.800	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		26.148.000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		47.111.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		134.829.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		230.793.850	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4.000.000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3.600.000	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan		27.049.000	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan		24.173.850	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		103.780.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		203.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		32.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		32.000.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		44.040.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		44.040.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		30.920.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		34.870.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		108.488.725	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120.385.725	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		82.928.725	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		79.565.725	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		25.560.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		40.820.000	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)**		**500.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)**		**26.955.015.400**	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah		74.280.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah		112.350.000	
	- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi terkena relokasi program pemerintah		18.570.000	- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi terkena relokasi program pemerintah		23.160.000	
	- Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah dokumen data Identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		18.570.000	- Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah dokumen data Identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		22.140.000	
	- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Tersedianya data rumah korban bencana tahun sebelumnya yang belum tertangani		18.570.000	- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Tersedianya data rumah korban bencana tahun sebelumnya yang belum tertangani		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Tersedianya Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Becana		18.570.000	- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Tersedianya Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Becana		67.050.000	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rasio Rumah Korban Bencana yang tertangani		88.249.200	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rasio Rumah Korban Bencana yang tertangani		32.448.000	
	- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi tentang Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		17.570.000	- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi tentang Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		17.570.000	
	- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme pengantian hak atas tanah dan bangunan		17.570.000	- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme pengantian hak atas tanah dan bangunan		-	
	- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang mengikuti sosilaisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP		18.030.000	- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang mengikuti sosilaisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih		10.327.200	- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih		-	
	- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah dokumen dan data calon penerima rumah korban bencana		14.928.000	- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah dokumen dan data calon penerima rumah korban bencana		14.928.000	
	- Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan		9.924.000	- Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan		-	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		337.470.800	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		26.810.217.400	
	- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau DED bagi rumah korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota		49.965.000	- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau DED bagi rumah korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota		287.505.800	- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota		1.999.400	
	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Terehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		-	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Terehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		26.808.218.000	
3.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase areal kawasan kumuh**		**7.731.618.549**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase areal kawasan kumuh**		**8.079.071.549**	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Tersedianya Izin Lokasi Pengembangan Perumahan		26.660.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Tersedianya Izin Lokasi Pengembangan Perumahan		10.590.000	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah laporan hasil kordinasi dan singkrnisasi penegmdalian pembangunan dan pengembangan perumahan		26.660.000	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah laporan hasil kordinasi dan singkrnisasi penegmdalian pembangunan dan pengembangan perumahan		10.590.000	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		415.280.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		419.120.000	
	- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		415.280.000	- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		419.120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase areal kawasan kumuh			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase areal kawasan kumuh		**7.649.361.549**	
	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		4.647.215.000	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		4.729.928.000	
	- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas permukiman kumuh yang diremajakan atau dipugar		2.642.463.549	- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas permukiman kumuh yang diremajakan atau dipugar		2.919.433.549	
4.	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**		**1.911.400.000**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**		**2.133.500.000**	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan ketersediaan rumah layak huni		1.911.400.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan ketersediaan rumah layak huni		2.133.500.000	
	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki		1.911.400.000	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki		2.133.500.000	
5.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**		**1.505.006.559**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**		**2.082.076.585**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		1.505.006.559	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		2.082.076.585	
	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utlitas umum yang menunjang fungsi hunian		1.505.006.559	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utlitas umum yang menunjang fungsi hunian		2.082.076.585	
6.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi**		**15.172.000**	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi		15.172.000	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil			- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil		15.172.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	**PROGRAM PEMBERIAN IZIN LOKASI**		**Persentase penyelesaian izin lokasi**			**PROGRAM PEMBERIAN IZIN LOKASI**		**Persentase penyelesaian izin lokasi**		**25.366.000**	
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian izin lokasi			Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian izin lokasi		25.366.000	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Persentase penyelesaian izin lokasi			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Persentase penyelesaian izin lokasi		25.366.000	
8.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase konflik pertanahan difasilitasi**		**77.030.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase konflik pertanahan difasilitasi**		**104.368.800**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah konflik tanah pemda/tanah ulayat yang difasilitasi		77.030.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah konflik tanah pemda/tanah ulayat yang difasilitasi		104.368.800	
	- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data sengketa konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota		4.020.000	- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data sengketa konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota		4.020.000	
	- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi penyelesaian kasus sengeketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) kabupaten/kota		73.010.000	- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi penyelesaian kasus sengeketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) kabupaten/kota		100.348.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator(Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah**		**11.886.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah**		**20.076.000**	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah		11.886.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah		20.076.000	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		11.886.000	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20.076.000	
	- Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		4.530.000	- Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		-	
	- Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				33.100.000	- Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan seluruh komponen masyarakat yang terkoordinir dengan baik antar dinas-dinas yang tekait untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam pembangunan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan dan mengikuti musrenbang baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Adapun tahapan yang dilalui dalam menghimpun aspirasi masyarakat ini adalah telah dilaksanakan musrenbang tingkat Kecamatan dan Forum OPD. Dari hasil musrenbang kecamatan dan Forum OPD akan dilakukan verifikasi sebelum dimasukan ke Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Disamping menampung usulan dari masyarakat, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun Rencana Kerja juga memperhatikan dari usulan dari stakeholder yang lain missal dari Pokok Pikiran Dewan.

Dari sekian banyak usulan tidak semuanya dapat terealisasikan dengan pertimbangan sebagai:

1. Penyesuaian Pagu Anggaran yang telah ditetapkan
2. Adanya pertimbangan setelah dilakukan survey

Berikut di uraikan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Areal Kawasan Kumuh	2.16 %	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Areal Kawasan Kumuh	2.16 %	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	104 Unit Rumah	Musrenbang dan Pokir
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	2.16 Ha	Musrenbang dan Pokir
2	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	91.19 %	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	91.19 %	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	Musrenbang dan Pokir
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	0.78 %	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	0.78 %	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	15 Lokasi	Musrenbang dan Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada tahun 2023 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

Tema RKP Tahun 2023	Tema RKPD Provinsi Tahun 2023	Tema RKPD Kabupaten Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas dan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas sektor unggulan untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berketahanan

Persandingan Prioritas RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten

Prioritas RKP Tahun 2023	Prioritas RKPD Provinsi Tahun 2023	Prioritas RKPD Kabupaten Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job 4. Mendorong pemulihan dunia usaha 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas 6. Ekonomi hijau 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah 3. Meningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 7. Mewujudakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas.	1. Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana 3. Meningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan 4. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat 5. Mendorong pertumbuhan dan pemulihan dunia usaha dan ekonomi kreatif 6. Peningkatan pengamalan ajaran agama, nilai-nilai luhur dan budaya 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan program pengambilan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Secara umum, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Pengentasan kemiskinan dan Penanganan Stunting	Persentase Areal Kawasan Kumuh	2.16%
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	92.34
			Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi	95%
			Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.95
			Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%
2	Pemenuhan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Masyarakat Rukun yang berkeadilan	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100%
			Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
			Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	15
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Berkurangnya temuan BPK	100%
			Nlai Sakip	B
		Pengentasan kemiskinan dan Penanganan Stunting	Level Maturitas SPIP	2.16

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2024 dan dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi maupun capaian pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, serta memperhatikan target kinerja yang direncanakan dalam rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, maka rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 mencakup 2 (dua) urusan, 9 (sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh unit pelaksana yang membidangi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024, diawali dari musrenbang tingkat nagari, musrenbang tingkat kecamatan, forum perangka daerah tingkat perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah di tingkat kabupaten, konsultasi publik rancangan awal RKPD hingga Musrenbang RKPD tahun 2024, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan bidang pertanahan, baik unsur masyarakat, unsur kecamatan/nagari, unsur perangkat daerah, unsur lembaga swadaya masyarakat maupun unsur legislatif, dan lain-lain.

4.1. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Penyusunan rencana kerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi Pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Rencana kerja tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2024 mendasari pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, kegiatan dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan untuk memperoleh keluaran (output), dan hasil (outcome) yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai masukannya (input).

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan 2 (dua) urusan, 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

8. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
    - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
    - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
9. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
    - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
    - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
10. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
    - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

11. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
    - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

12. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

V. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

13. Urusan Penyelnggaraan Perumahan
    - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

VI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

14. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat kemampuan Kecil
    - Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

VII. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

15. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

16. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9.385.597.800**							**15.008.192.230**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**3.408.648.115**						100 %	**5.067.011.270**
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**2.706.966.895**						100 %	**4.086.511.270**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.446.312.395	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatan Sumbe Daya Manusia Yang Berkualita Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN)	29 Orang/bul	3.586.511.270

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	260.654.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN)	24 Dokumen	500.000.000
1	**04**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase cakupan pelayanan administrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	**96.798.280**						100 %	**112,000,000**
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	96.798.280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah yang Menjadi KewenanganPD	12 Laporan	112,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**32.586.000**						100 %	**180,000,000**
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				29 Orang	32.586.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN)	29 Orang	180,000,000
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase cakupan pelayanan administrasiumum perangkat daerah	%		%	100 %	**191.107.400**						100 %	**245,500,000**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PenerangganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatan Sumbe Daya Manusia Yang Berkualita Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	4 Paket	5,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	34.117.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatan Sumbe Daya Manusia Yang Berkualita Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	4 Paket	60,000,000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	151.039.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	75 Laporan	180,000,000
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase cakupan layanan pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**157.667.040**						100 %	**160,000,000**
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	157.667.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Peralatan danMesin Penunjang Operasional Kantor	4 Unit	160,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**84.977.500**							**128.000.000**
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.040.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kebutuhan Operasional Kantor	12 Laporan	58,000,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	40.937.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kebutuhan Operasional Kantor	12 Laporan	70,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**138.545.000**						100 %	**155,000,000**
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	89.245.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah	18 Unit	100,000,000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	49.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah	80 Unit	55,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Rasio Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)	%		%	100 %	**829.068.800**						100 %	**2,255,000,000**
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Rasio Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)	%		%	100 %	**50.738.750**						100 %	**55,000,000**
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	17.067.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Rumah Korban Bencana dan Rumah yang Terkena Relokasi		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten /Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	17.067.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Rumah Korban Bencana dan Rumah yang Terkena Relokasi	1 Dokumen	55,000,000
1	04	02	2.01	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	16.607.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Rumah Korban Bencana dan Rumah yang Terkena Relokasi		
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						**65.945.000**							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 orang	17.847.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				100 orang	21.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkut Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembagan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			
1	04	02	2.02	08	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 orang	26.347.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkut Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembagan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	Rasio Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)	%		%	100 %	**712.385.050**						100 %	**2,200,000,000**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terehabilitasi				4400 Unit Rumah	527.215.050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Rumah Korban Bencana dan Rumah yang Terkena Relokasi	4400 Unit Rumah	2,200,000,000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				100 Unit Rumah	185.170.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Rumah Korban Bencana dan Rumah yang Terkena Relokasi		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%		%	2.16 %	**2.471.573.385**						2.16 %	**4,783,280,960**
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%		%	2.16 %	**2.471.573.385**						2.16 %	**4,783,280,960**
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah TidakLayak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				104 Unit Rumah	210.627.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh yang Mempunyai Rumah TidakLayak Huni	104 Unit Rumah	2,050,000,000
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				2.16 Ha	2.260.945.885	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh yang Mempunyai Rumah Tidak Layak Huni	2.16 Ha	2,733,280,960

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%		%	91.19 %	**2.154.105.000**						91.19 %	**2,433,280,960**
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota**	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%		%	91.19 %	**2.154.105.000**						91.19 %	**2,433,280,960**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	2.154.105.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat yang Mempunyai Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	100 Unit Rumah	2,433,280,960
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	%		%	0.78 %	**511.927.500**						0.78 %	**1,131,350,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	%		%	0.78 %	**511.927.500**						0.78 %	**1,131,350,000**
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana ,Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				15 Lokasi	511.927.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perumahan yang DIbangun Oleh Pengembang	15 Lokasi	1,131,350,000
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Pengembang yang Tersertifikasi	%		%	75 %	**10.275.000**						75 %	**60,550,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	**04**	**06**	2.01		**Sertifikasi dan Registrasibagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	Persentase Pengembang yang Tersertifikasi	%		%	75 %	**10.275.000**						75 %	**60,550,000**
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	10.275.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	60,550,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**176.319.000**								**275,849,652**
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi	%		%	100 %	**43,808,500**						100 %	**53,100,606**
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi	%		%	100 %	**43,808,500**						100 %	**53,100,606**
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota				12 Berita Acara	43,808,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakatyang Mempunyai Konflik Pertanahan	12 Berita Acara	53,100,606
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Jumlah Fasilitasi GantiRugi Tanah	Angka		Angka	12 Angka	**132.510.500**						12 Angka	**199,148,777**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraa Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitasi GantiRugi Tanah	Angka		Angka	12 Angka	**132.510.500**						12 Angka	**199,148,777**
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	132.510.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakatyang Mendapat Ganti Rugi	1 Dokumen	199,148,777
TOTAL											**9.561.916.800**							**15.260.441.613**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pelaksana di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan dukungan aktif dari seluruh stakeholder baik di lingkungan internal Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat maupun seluruh stakeholder terkait. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dan bidang urusan pertanahan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang strategis dalam pencapaian pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis dan RPJMD tahun 2021-2026.
2. Seluruh perangkat di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban melaksanakan rencana kerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 difokuskan untuk pencapaian target kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis dan RPJMD 2021-2026.
4. Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran kegiatan tahun 2024.
5. Untuk menjamin pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan, baik menyangkut kegiatan, anggaran,

sasaran maupun lokasi kegiatan, maka akan dilakukan perubahan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ASRI HAMDI, ST
NIP. 19761123 200501 1 012

RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridha-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Renja ini sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantukami sehingga tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

SimpangEmpat, 14 Agustus 2023
Plt. KEPALA,

MEDIA FITRA, S.Pd
NIP. 19720314 199412 1 001

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

3.3 Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50

BAB V PENUTUP 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut diatas memberikan gambaran bahwa diera otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mandiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk itu salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan adalah terciptanya situasi yang kondusif pada suatu wilayah sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam Pasal 255 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya untuk menjalankan organisasi pemerintahan diperlukan dokumen perencanaan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Sesuai dengan dinamika pembangunan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni

perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan PD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan dasar untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024 sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman barat Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan dalam 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur dalam memberikan acuan dasar untuk penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai perangkat yang menciptakan pelayanan dasar menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang sinkron dan terintegrasi pada Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan meningkatkan penerapan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan efisien;
b. Sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kecakapan

penanganan ganggunan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

c. Sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**

1.1 *Latar Belakang*, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,* memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan

BAB V : **PENUTUP**

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran tahun 2021 dan tahun 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Kabupaten Pasaman Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran selama tahun 2022 dan perkiraan maju 2023.

Evaluasi Program Tahun 2022 dengan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.718.748.164,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan Realisasi Anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 7.210.000.892,00

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2022 maka dilakukan pengukuran dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau

kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (Tahun Anggaran 2023) disajikan pada Tabel T-C.29 di bawah ini :

Tabel 2.1.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Peraangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*100*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				***100%***	**99,80%**	**99,80%**	***100%***	***100%***	***100%***
1 05	**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				***100%***	**99,80%**	**99,80%**	***100%***	***100%***	***100%***
1 05 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***99,5%***	**99,50%**	***100%***	***100%***	***100%***
1 05 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN**	**100%**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1 05 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan	175 Orang	33 orang	35 Orang	28 Orang	80%	27 Orang	27 Orang	100%
1 05 01 2 02 02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Adminitrasi Perkantoran	60 Dokumen	306 orang	306 Orang	230 Orang	75%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1 05 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	60 Dokumen	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1 05 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100%**					100%	100%	100%
1 05 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang					6 orang	6 orang	100%

1	**05**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75**	**75**	**100%**
1	05	01	2	06	01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1	05	01	2	06	02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	5 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1	05	01	2	06	03	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1	05	01	2	06	05	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPPKBP3A yang dibutuhkan	5 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1	05	01	2	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	130 laporan	1. 26 Kali 2. 34 Kali	1. 26 Kali 2. 34 Kali	1. 26 Kali 2. 34 Kali	100%	26 laporan	26 laporan	100%
1	**05**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor	15 unit			25 Unit	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
1	**05**	**01**	**2**	**08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	01	2	08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	60 laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	**05**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**97,5%**	**97,5%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	01	2	09	01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	95 Unit	19 unit	19 Unit	18 Unit	94,70%	19 Unit	19 Unit	100%

1	05	01	2	09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	40 Unit	8 unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85 Unit	17 unit	17 Unit	16 Unit	94%	17 Unit	17 Unit	100%
1	05	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	30 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	6 unit	6 unit	100%
1	***05***	***02***				***Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)***	***100%***	***80%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
1	**05**	**02**	**2**	**01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselesainya gangguan ketentraman dan ketertiban**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1. Jumlah Patroli yang dilaksanakan 2. Jumlah Pengunguman dan selebaran yang diedarkan 3. Jumlah Sosialisasi yang di laksanakan	495 kasus	96 kali	1. 33 Kali 2. 30 Kali 3. 36 Kali	1. 33 Kali 2. 30 Kali 3. 36 Kali	100%	99 kasus	99 kasus	100%
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1. Jumlah Razia yang dilaksanakan 2. Jumlah Kasus yang ditangani	950 kasus	190 kali	190 Kali	215 kali	113%	190 kasus	190 kasus	100%
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Handal	379 dokumen	436 orang	436 Orang	436 Orang	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
1	05	02	2	01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan	40 dokumen	8 kali	8 Kali	8 kali	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
1	05	02	2	01	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10 Laporan					2 laporan	2 laporan	100%
1	**05**	**02**	**2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase pengawasan atas kepatuhan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Perda/Perbup yang di awasi	120 laporan	24 kali	24 Kali	24 kali	100%	24 laporan	24 laporan	100%
1	05	02	2	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perbup yang di tangani	250 laporan	50 kasus	50 kasus	259 Kasus	518%	50 laporan	50 laporan	100%
1	***05***	***04***				***Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	***"Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"***	***15 menit***	***15 menit***	***15 menit***	***15 menit***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
1	**05**	**04**	**2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dakam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tercapainya pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**100%**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	04	2	01	02	Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Kejadian Kebakaran Yang Terselamatkan	175 laporan	35 kali	35 kali	60 kali	171%	35 laporan	35 laporan	100%
1	**05**	**04**	**2**	**02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran**	**100%**	**64%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	04	2	02	01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Pendataan Alat Pengamanan diri dari bahaya Kebakaran	55 dokumen	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
1	**05**	**04**	**2**	**03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Persentase Kejadian Kebakaran yang terdata	100%		100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	04	2	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang terdata	150 dokumen		100%	100%	100%	30 laporan	30 laporan	100%
1	**05**	**04**	**2**	**04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	1.933 orang		24 kali	24 kali	100%	133 orang	133 orang	100%

SimpangEmpat, 14 Agustus 2023

Plt. KEPALA,

MEDIA FITRA, S.Pd

NIP. 19720314 199412 1 001

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2021.

2.1.2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1.2

NO	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	99,5%	99,5%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	'Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	'Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	100%	100%	100%

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2022.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kas sehingga target kinerja tercapai dengan baik.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian Program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarakan, sehingga tata kelola pemerintahan bisa tercapai dengan baik.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal Perencanaan, penganggaran baik staf yang menangani serta para pejabat, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Capaian analisis kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentu posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.2.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun indicator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sasaran	Indikator Utama	Target	Realisasi	% Realiasasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	75%	-	Belum dilakukan penilaian
	Nilai SAKIP	B	-	Belum dilakukan penilaian
	Level Maturitas SPIP	2,35	-	Belum dilakukan penilaian
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	84%	84 %	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	100%

Standar Pelayanan Minimal juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, dimana pencapaian target SPM 100% menjadi kinerja Kepala Daerah. Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) SatpolPP dengan jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya antara lain:

Tabel 2.2.3

Jenis Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Indikator Kinerja Kunci (IKK) SatpolPP dan Kebakaran yang harus dipenuhi adalah:

A. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
   1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;
   2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

B. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah managemen kebakaran (WMK)
   1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
   2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

Tabel 2.2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja SatpolPP dan Kebakaran

Kabupaten Pasamann Barat

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	(13)
1.	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	-	-	50%	75%	75%	100%		-	75%	100%	Hasil penilaian tahun 2022 belum ada
	Nilai SAKIP	-	-	2,11	2,35	2,48	2,6		-	2,48	2,6	Hasil penilaian tahun 2022 belum ada
	Level Maturitas SPIP	-	-	B	B	B	BB		-	B	BB	Hasil penilaian tahun 2022 belum ada
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	80%	84%	87%	99%	80%	-	100%	100%	
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	-	15 Menit	15 Menit	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaran pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat, serta jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang cenderung meningkat secara otomatis akan membawa dampak terhadap munculnya masalah- masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kantrantibmas di wilayah Kabupaten Pasaman Barat mulai dari kebutuhan lahan pemukiman, penyakit masyarakat seperti Perjudian, Miras dan PSK, masalah sosial lain yang dilatar belakangi oleh ekonomi seperti banyaknya pedagang kaki lima (PKL), gelandangan dan pengemis (gepeng) serta aksi sosial terkait pro kontra terhadap kebijakan pemda sampai dengan konflik berlatar belakang keagamaan menempatkan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah bagian perangkat daerah dalam posisi yang cukup penting sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu Satuan Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib terkait dengan berbagai gambaran kondisi diatas maka diperlukan suatu komitmen dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidanngnya masinng-masing berdasarkan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Namun secara garis besar beberapa permasalahan yang menjadi isue penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Kurangnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

1. Aspek regulasi, yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.

2. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.
3. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 masih sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan untuk mewujudkan Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermartabat, sejahtera dan berwawasan lingkungan. Sasaran Prioritas pada renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yakni Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPD, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Meningkatnya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Tabel 2.4.1 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.999.918.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.999.918.353	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.668.927.353	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.668.927.353	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100%	6.076.494.311	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100%	6.076.494.311	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	3.793.054.311	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.793.054.311	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.157.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	2.157.500.000	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125.940.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125.940.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	115.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	115.000.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Pasaman	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Pasaman	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	35.000.000	

	Kelengkapannya	Barat	Kelengkapan			Kelengkapannya	Barat	Kelengkapan			
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	20.000.000	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100%	260.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100%	260.000.000	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah pengadaan sarana prasarana serta peralatan	100%	1.860.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah pengadaan sarana prasarana serta peralatan	100%	1.860.000.000	

	Daerah					Daerah					
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.700.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.700.000.000	
	- Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	15.000.000	
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	115.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	115.000.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	242.433.042	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	242.433.042	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	80.000.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100.000.000	
	- Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	30.840.865	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	30.840.865	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	29.592.177	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	29.592.177	
2.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"	87%	800.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"	87%	800.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban	100%	515.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban	100%	515.000.000	

	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	99 Kasus	350.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	99 Kasus	350.000.000	
	- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	190 Kasus	60.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	190 Kasus	60.000.000	
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.000.000	
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	19 Dokumen	60.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	19 Dokumen	60.000. 000	
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	436 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	436 Orang	5.000.000	

	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	20.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	20.000.000	
	- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5.000.000	
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	5.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	5.000.000	
	- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	5.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	5.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pengawasan atas kepatuhssn dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah	100%	235.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pengawasan atas kepatuhssn dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah	100%	235.000.000	
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	20.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	20. 000.000	
	- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	95.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	95.000.000	

	- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	120.000.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	120.000.000	
	- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS	100%	50.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS	100%	50.000.000	
	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	50.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	50.000.000	
3.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	15 Menit	530.991.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	15 Menit	530.991.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100%	401.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100%	401. 000.000	
	- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	30 Dokumen	15.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	30 Dokumen	15. 00.000	

	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 Laporan	230.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 Laporan	230.000.000	
	- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	24 Dokumen	16.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	24 Dokumen	16.000.000	
	- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	15.000.000	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	15.000.000	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	60.000.000	
	- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20.000.000	

	- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	19 Desa/Kelura	15.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	19 Desa/Kelura	15.000.000	
	- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	15 Dokumen	30.000.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	15 Dokumen	30.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	100%	29.991.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	100%	29.991.000	
	- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	11 Dokumen	29.991.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	11 Dokumen	29.991.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase kejadian kebakaran yang terdata	100%	29.950.000	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase kejadian kebakaran yang terdata	100%	29.950.000	
	- Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan	30 Dokumen	29.950.000	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan	30 Dokumen	29.950.000	

			Pengujian					Pengujian			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan	24 kali	70.050.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan	24 kali	70.050.000	
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	133 Orang	70.050.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	133 Orang	70.050.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan dari Perangkat Daerah yang menyangkut peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur baik bersifat teknis, fungsional maupun penjejangan karier.

Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok yang melekat pada Perangkat Daerah bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek dan menengah pembangunan daerah. Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat belum dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah Pegawai ASN.

Tabel 2.5.1

Usulan Progam dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
b. Pembangunan Infrastruktur;
c. Penyederhanaan Regulasi;
d. Penyederhanaan Birokrasi; dan
e. Transformasi Ekonomi.

Terdapat 7 agenda pembangunan dalam pelaksanan lima arahan utama presiden yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri pertahanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai acuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, yakni;

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Terwujudnya integritas, singkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai
4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efesien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Terwujudnya tatakelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif;
6. Terwujudnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
7. Terwujudnya kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah.

Tabel 3.2.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN				
				2022	2024	2024	2025	2026
1		2	3	5	6	7	8	9
1	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	75%	75%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB
			Level Maturitas SPIP	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
2	Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	84%	87%	93%	96%	100%

		Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
3	Mewujudkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 3 program dan 15 Kegiatan dengan 47 SubKegiatan.

Sasaran 1: Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upayameningkatkan Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untukkepentingan tresebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan dengan 14 SubKegiatan yaitu :

1. **Pragram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

b. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan **Kualitas** Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 3 kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan yaitu :

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
   - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
   - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
   - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
   - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

b. **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c. **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Daerah, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 5 kegiatan dengan 20 Sub Kegiatan yaitu :

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran

dan Alat Pelindung Diri

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

b. **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. **Investigasi Kejadian Kebakaran**

- Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

d. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

e. **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Tabel 3.2.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN				**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**
	1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**
1	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah***		**100 %**	**5.803.334.916,00**			**100 %** **100 %**	**7.365.554.311,00**
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan gaji tunjangan dan honorarium ASN***		**100 %**	**5.095.322.041,00**			**100 %**	**6.165.554.311,00**
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang/bulan	2.528.132.041,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Orang/bulan	3.843.054.311,00
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.481.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	2.162.500.000,00
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	85.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	160.000.000,00

	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***		**100 %**	**3.560.000,00**			**100 %**	**15.000.000,00**
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian***		**100 %**	**54.891.000,00**			**100 %**	**80.000.000,00**
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000,00
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	34.891.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Orang	30.000.000,00
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor***		**100 %**	**195.348.000,00**			**100 %**	**300.000.000,00**
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.670.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	15.000.000,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	12.245.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	60.000.000,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25. 000.000,00
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	23.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000,00

	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Laporan	149.123.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26 Laporan	150.000.000,00
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah pengadaan sarana prasaranan serta peralatan perlengkapan kantor***		**12 Unit**	**45.451.000,00**			**12 Unit**	**290.000.000,00**
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	43.951.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	100.000.000,00
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	190.000.000,00
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor***		**100 %**	**76.794.375,00**			**100 %**	**100.000.000,00**
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	76.794.375,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	100.000.000,00
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara***		**100 %**	**331.968.500,00**			**100 %**	**415.000.000,00**
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	47.887.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19 Unit	100.000.000,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	207.171.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	225.000.000,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	21.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Unit	40.000.000, 00

	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	55.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	50.000.000,00
2	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"***		**100 %**	**1.239.776.150,00**			**100 %** **100 %**	**1.221.000.000,00**
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban***		**100 %**	**902.098.150,00**			**100 %**	**926.000.000,00**
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	10.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Dokumen	472.765.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Dokumen	180.000.000,00
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670 Orang	30.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		670 Orang	50.000.000,00
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	6.000.000,00
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	*Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.315.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00

			Dimutakhirkan							
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99 laporan	279.296.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99 laporan	350.000.000,00
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190 Laporan	84.961.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		190 Laporan	150.000.000,00
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Laporan	15.000.000,00
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	20.000.000,00
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	***Persentase pengawasan atas kepatuhan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah***		**100 %**	**291.568.000,00**			**100 %**	**235.000.000,00**

	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	22.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	15.000.000,00
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	147.138.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	120.000.000,00
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	122.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Laporan	100.000.000,00
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	***Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS***		**100 %**	**46.110.000,00**			**100 %**	**60.000.000,00**
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	46.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	60.000.000,00
3	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Tingkat waktu tanggap (rensponse time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**15 Menit**	**504.021.000,00**			**15 Menit** **15 Menit**	**1.215.000.000,00**
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun***		**100 %**	**259.471.500,00**			**100 %**	**665.000.000,00**
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Dokumen	30.000.000,00

	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Laporan	195.963.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Laporan	215.000.000,00
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	7.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	30.000.000,00
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	7.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	150.000.000,00
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.386.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	5.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	60.000.000,00

	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Desa/Kelurahan	7.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Desa/Kelurahan	40.000.000,00
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	1.155.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Unit	40.000.000,00
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	2.032.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Dokumen	20.000.000,00
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Keluarga	22.005.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Keluarga	60.000.000,00
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	***Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran***		**100 %**	**33.085.000,00**			**100 %**	**70.000.000,00**
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	40.000.000,00

	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	18.085.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	30.000.000,00
	1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	***Persentase kejadian kebakaran yang terdata***		**100 %**	**57.809.500,00**			**100 %**	**70.000.000,00**
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	57.809.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Dokumen	70.000.000,00
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran***		**100 %**	**141.635.000,00**			**100 %**	**250.000.000,00**
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Orang	21.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		450 Orang	100.000.000,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Desa/Kelu rahan	79.785.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Desa/Kelu rahan	100.000.000,00
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	*Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Dokumen	40.530.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Dokumen	50.000.000,00

	1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	***Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia***		**100 %**	**12.020.000,00**			**100 %**	**160.000.000,00**
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	4.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	50.000.000,00
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	60.000.000, 00
	J U M L A H					**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2024 terdiri atas 3 program dengan 3 capaian program sebagai berikut :

Tabel 4.1

No.	Program	Capaian Program	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	5.803.334.916,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, da keindahan)	1.239.776.150,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	504.021.000,00
	Jumlah		**7.547.132.066,00**

Anggaran/pagu indikatif yang diperkirakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dan sumber lainnya yang sah (APBN/APBD Propinsi Sumatera Barat/ Dekonsentari Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 7.547.132.066,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	%
1.	APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	7.547.132.066,00	100
2.	APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat		
3.	APBN/ Dekonsentrasi		
4.	APBN/ Tugas Perbantuan		
5.	Bantuan Luar Negeri		

6.	Bantuan Masyarakat dan lain-lain		
	Jumlah	**7.547.132.066,00**	**100**

Kegiatan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun 2024 yaitu sebanyak 15 Kegiatan dengan 15 indikator keluaran serta 47 sub kegiatan dengan 47 indikator keluaran dan 47 indikator hasil. Rumusan Rencana Kerja kegiatan, indikator kegiatan dan pagu indikatif per indikator hasil untuk tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir.

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Kabupaten Pasaman Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN				**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**
	1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**
1	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah***		**100 %**	**5.803.334.916,00**			**100 %** **100 %**	**7.365.554.311,00**
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan gaji tunjangan dan honorarium ASN***		**100 %**	**5.095.322.041,00**			**100 %**	**6.165.554.311,00**
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang/bulan	2.528.132.041,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Orang/bulan	3.843.054.311,00
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.481.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	2.162.500.000,00

	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	85.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	160.000.000,00
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***		**100 %**	**3.560.000,00**			**100 %**	**15.000.000,00**
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian***		**100 %**	**54.891.000,00**			**100 %**	**80.000.000,00**
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000,00
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	34.891.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Orang	30.000.000,00
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor***		**100 %**	**195.348.000,00**			**100 %**	**300.000.000,00**
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.670.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	15.000.000,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	12.245.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	60.000.000,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00

	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	23.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000,00
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Laporan	149.123.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26 Laporan	150.000.000,00
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah pengadaan sarana prasaranan serta peralatan perlengkapan kantor***		**12 Unit**	**45.451.000,00**			**12 Unit**	**290.000.000,00**
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	43.951.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	100.000.000,00
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	190.000.000,00
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor***		**100 %**	**76.794.375,00**			**100 %**	**100.000.000,00**
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	76.794.375,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	100.000.000,00
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara***		**100 %**	**331.968.500,00**			**100 %**	**415.000.000,00**
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	47.887.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19 Unit	100.000.000,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	207.171.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	225.000.000,00

	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	21.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Unit	40.000.000,00
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	55.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	50.000.000,00
2	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"***		**100 %**	**1.239.776.150,00**			**100 %** **100 %**	**1.221.000.000,00**
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban***		**100 %**	**902.098.150,00**			**100 %**	**926.000.000,00**
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	10.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Dokumen	472.765.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Dokumen	180.000.000,00
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670 Orang	30.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		670 Orang	50.000.000,00
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	6.000.000,00

	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	*Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.315.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99 laporan	279.296.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99 laporan	350.000.000,00
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190 Laporan	84.961.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		190 Laporan	150.000.000,00
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Laporan	15.000.000,00
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	20.000.000,00
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	***Persentase pengawasan atas kepatuhan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah***		**100 %**	**291.568.000,00**			**100 %**	**235.000.000,00**

	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	22.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	15.000.000,00
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	147.138.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	120.000.000,00
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	122.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Laporan	100.000.000,00
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	***Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS***		**100 %**	**46.110.000,00**			**100 %**	**60.000.000,00**
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	46.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	60.000.000,00
3	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Tingkat waktu tanggap (rensponse time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**15 Menit**	**504.021.000,00**			**15 Menit** **15 Menit**	**1.215.000.000,00**
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun***		**100 %**	**259.471.500,00**			**100 %**	**665.000.000,00**
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Dokumen	30.000.000,00

	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Laporan	195.963.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Laporan	215.000.000,00
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	7.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	30.000.000,00
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	7.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	150.000.000,00
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.386.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	5.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	60.000.000, 00

	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Desa/Kelurahan	7.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Desa/Kelurahan	40.000.000,00
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	1.155.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Unit	40.000.000,00
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	2.032.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Dokumen	20.000.000,00
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Keluarga	22.005.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Keluarga	60.000.000,00
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	***Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran***		**100 %**	**33.085.000,00**			**100 %**	**70.000.000,00**
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	40.000.000,00

	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	18.085.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	30.000.000,00
	1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	***Persentase kejadian kebakaran yang terdata***		**100 %**	**57.809.500,00**			**100 %**	**70.000.000,00**
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	57.809.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Dokumen	70.000.000,00
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran***		**100 %**	**141.635.000,00**			**100 %**	**250.000.000,00**
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Orang	21.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		450 Orang	100.000.000,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Desa/Kelu rahan	79.785.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Desa/Kelu rahan	100.000.000,00
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	*Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Dokumen	40.530.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Dokumen	50.000.000,00

	1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	***Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia***		**100 %**	**12.020.000,00**			**100 %**	**160.000.000,00**
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	4.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	50.000.000,00
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis*	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	60.000.000,00
	J U M L A H					**7.547.132.066,00**				**9.801.554.311,00**

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan tidak mengesampingkan data/masukan/ rekomendasi dari berbagai pihak.

Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai program-program yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan 15 kegiatan dalam mencapai 3 program yang telah ditetapkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.547.132.066,00,- yang direncanakan bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Pada tahap pelaksanaan masih banyak ditemui permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkan beberapa hambatan dengan pokok permasalahan yang berkaitan. Untuk ke depan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran akan berupaya meningkatkan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini akan menjadi tolok ukur dan dipahami oleh seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sehingga akan memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan dengan harapan realisasi capaian kinerja dapat tercapai sesuai sesuai target yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana dengan baik.

SimpangEmpat, 14 Agustus 2023

Plt. KEPALA,

MEDIA FITRA, S.Pd

NIP. 19720314 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD**)** Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2024 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun pertama dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Pasaman Barat Anggaran 2024. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Padang Tujuh, Juli 2023
Kepala Pelaksana

ARMI NINGDEL, S.Pd. MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19760609 2003 12 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2021 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 58
3.3 Program dan Kegiatan 58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 101
BAB V PENUTUP 143

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan Tahun 2022 11
Tabel 2. 2 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Pasaman Barat 16
Tabel 2. 3 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat 29
Tabel 2. 4 T.C.30 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat 31
Tabel 2. 5 T-C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD BPBD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat 37

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat..... 58
Tabel 3. 2 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 60
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat 102

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerh (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perncanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023.
3. program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPBD Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan antara Renja BPBD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut:

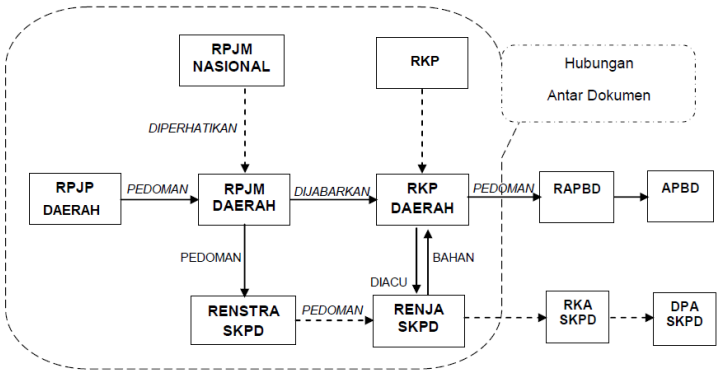

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat (BPBD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat;
40. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA BPBD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2024.

1.3.1 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA BPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini adalah:

1. Untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan

RENJA BPBD Kabupten Pasaman Barat Tahun 2024 meliputi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir), uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada tahun 2022 BPBD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 2 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Sementara pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 2 program dengan 12 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 memuat pencapaian target tahun 2022 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 2 (Enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp. 4.781.782.969,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Dari Pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 3.936.595.343,- (Tiga Miliyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan persentase realisasi sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar 82,32%.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 dibagikan pada 3 (tiga) bidang, 1 (satu) sekretariat yang digunakan untuk membiayai/mendanai 2 (dua) program. Berikut rincian realisasi Ketiga program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 3.227.771.944,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.858.072.448,- atau 89% dengan realisasi fisik 78%
2. Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.554.011.025,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.078.522.895,- atau 69,40% dengan realisasi fisik sebesar 49%;

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat tealah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2. 1
Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
						Rp	%
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**4.781.782.969**	**3.936.595.343**	82%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100%	78%	3.227.771.944	2.858.072.448	89%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	100%	2.688.035.944	2.348.218.095	87%
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	22 Orang	22 Orang	2.512.530.944	2.179.868.095	87%
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	6 Orang	5 Orang	84.500.000	80.250.000	95%
1.1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan yang dikelola BMD	12 Bulan	12 Bulan	91.005.000	88.100.000	97%
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola BPBD	668 Unit	668 Unit	26.900.000	26.900.000	100%
1.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Orang PNS 2 Orang THL	1 Orang PNS 2 Orang THL	26.900.000	26.900.000	100%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	100%	7.824.000	7.029.200	90%
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	2 Orang	2 Orang	7.824.000	7.029.200	90%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	215.726.500	213.534.912	99%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	1 Paket	3.000.000	2.986.000	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket	36.508.000	35.437.300	97%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
						Rp	%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	4.000.000	4.000.000	100%
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	100%
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	24 Kali	24 Kali	157.218.500	156.111.612	99%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	100%	64.057.500	63.850.000	100%
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	4 Unit	4 Unit	39.057.500	38.850.000	99%
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sewa gedung logistic	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	100%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	100%	40.800.000	37.080.491	91%
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	12 Bulan	40.800.000	37.080.491	91%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	88%	184.428.000	161.459.750	88%
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaandan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan Dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaranPajak/ KIR. 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan Kendaraan.	13 Unit 5 Orang THL	13 Unit 5 Orang THL	158.738.000	142.348.750	90%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	21 Unit	20 Unit	24.290.000	18.046.000	74%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1.400.000	1.065.000	76%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
						Rp	%
2	Program Peanggulangan Bencana	penurunan dampak bencana daerah	100%	49%	1.554.011.025	1.078.522.895	69,40%
2.1	Pelayanan informasi Rawan Bencana	Persenatase Masyarakat yang memperoleh informasi bencana	100%	0	172.013.200	71.384.660	41%
2.1.1	Penyusunan Kajian resiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	0	172.013.200	71.384.660	41%
2.2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	36%	1,75%	963.126.825	604.886.934	63%
2.2.3	Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	1. Jumlah peserta Pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan preasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekontruksi 3. Jumlah Fasilitator Teknis Rumah Rusak Berat yang telah dilatih	1 Unit 42 Orang 77 Orang	1 Unit 42 Orang 77 Orang	963.126.825	604.886.934	63%
2.3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50%	100%	320.150.000	309.852.351	97%
2.3.1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap sattus darurat bencana	100%	100%	188.897.000	186.659.551	99%
2.3.2	Pencarian pertolongan dan evakuasi korbanbencana kabuten/kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian brncana	100%	100%	45.590.000	41.000.800	90%
2.3.3	Penyediaan logistik penyelatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	1. Jumlah tenaga penyedia logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	6 Orang	6 Orang	85.663.000	82.192.000	96%
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	60%	100%	98.721.000	92.398.950	94%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
						Rp	%
2.4.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalampenanggulangan bencana	12 Kali	12 Kali	23.271.000	22.984.150	99%
2.4.2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah jenis informasi kebencanaan yang dikelola	5 Jenis	5 Jenis	75.450.000	69.414.800	92%

Adapun informasi yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dan realisasi keuangan, dibawah 75%, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
   - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, adanya peralatan dan mesin yang jarang dipergunakan pada tahun berjalan, sehingga tidak diperlukan pemeliharaan pada tahun 2022;
2. Program Penanggulangan Bencana
   - Sub kegiatan Penyusunan Kajian resiko Bencana Kabupaten/Kota, Pembuatan Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022 tidak terlaksana karena Belum tersedia anggaran yang mencukupi dalam pembuatan dokumen sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang tersedia, sehingga kegiatan ini tidak terlaksana sesuai target indikator penyusunan dokumen;
   - Sub Penanganan pasca bencana kabupaten/kota, BBM alat berat, honorarium operator alat berat dan pembantu operator alat berat bersisa disebabkan oleh alat berat excavator tidak bisa dipakai karena tidak ada biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat, Sebagian yang hanya bisa dimanfaatkan hanya back hoe, akibatnya belum semuanya puing-puing rumah dibersihkan, Dana konsultan tidak direalisasikan karena system kontraktual untuk pembangunan rumah rusak berat belum terlaksana, Honorarium Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Monitoring dan Evaluasi tidak bisa realisasikan karena SK belum selesai/belum ditanda tangani bupati yang menjadi dasar untuk pembayaran honorarium tim tersebut, Honorarium Jitu Pasna tidak seluruhnya di realisasikan karena sebagian anggota tidak aktif dalam kegiatan;

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan renja tahun 2022. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan renja BPBD tahun 2023 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD pada tahun sebelumnya serta yang akan datang. Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja BPBD pada tahun 2022 serta perkiraan capian kinerja tahun berjalan yaitu 2023 disajikan pada table 1 T-C.29 di bawah ini :

Tabel 2. 2
T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BPBD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Pasaman Barat

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	02					**KESEHATAN**									
1	02	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		-	**85%**	-	-	-	-	**85%**	**85%**
1	02	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		-	**85%**	-	-	-	-	**85%**	**85%**
1	02	02	2.02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		-	**85%**	-	-	-	-	**85%**	**85%**
1	05					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**05**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**78%**	**78%**	**100%**	**50,00%**	**50%**
1	**05**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Laporan Evaluasi Kineja BPBD**	**6 Laporan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 Laporan**	**3 Laporan**	**12,50%**
1	05	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	-	-	-	-	6 Laporan	3 Laporan	12,50%
1	**05**	**01**	**2,02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**70%**	**69,91%**
1	05	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	23 Orang	22 Orang	22 Orang	100%	23 Orang/Bulan	26 Orang/bulan	100,00%
1	05	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	6 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	36 Dokumen	7 Dokumen	4,86%
1	05	01	2,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	73 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1	**05**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD**	**676 Unit**	**621 Unit**	**668 Unit**	**668 Unit**	**100%**	**674 Unit**	**674 Unit**	**98,97%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	1 Orang PNS 2 Orang THL	1 Orang PNS 2 Orang THL	1 Orang PNS 2 Orang THL	100%	14 Laporan	6 Laporan	10,71%
1	**05**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
1	05	01	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	10 Orang	2 Orang	4,00%
1	**05**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**53,75%**	**53,75%**
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	20 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Laporan	53 Laporan	44,17%
1	**05**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**75%**
1	05	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	16,67%
1	05	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Tahun	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100,00%
1	**05**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**62,50%**	**62,50%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Laporan	18 Laporan	18,75%
1	**05**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**88%**	**88%**	**100%**	**50,51%**	**50,51%**
1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	24 Unit 4 Orang THL	13 Unit 5 Orang THL	13 Unit 5 Orang THL	100%	21 Unit	17 Unit	16,19%
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	18 Unit	21 Unit	20 Unit	95%	44 Unit	20 Unit	8,73%
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Unit	1 Unit	100,00%
1	**05**	**03**				**Program Penanggulangan Bencana**	**Capaian SPM Bidang Kebencanaan**	**100%**	**33%**	**100%**	**49%**	**49%**	**100%**	**35,11%**	**35,11%**
1	05	03	2.01			**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana**	**100%**	**25%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**7,50%**	**7,50%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.01	03		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 dokumen	0%	100%	0%	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1	05	03	2.01	04		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencan Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencan)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	-	-	-	-	1000 Orang	50 Orang	1,06%
1	**05**	**03**	**2.02**			**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**9,25%**	**36%**	**1,75%**	**1,75%**	**100%**	**28%**	**28%**
1	05	03	2.02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.02	09		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	10		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	11		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	12		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	13		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	14		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.02	15		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	16		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	0 Orang	0%
1	05	03	2.02	17		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	1. Jumlah peserta Pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan preasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekontruksi 3. Jumlah Fasilitator Teknis Rumah Rusak Berat yang telah dilatih	-	7 Unit 0 Orang	1 Unit 42 Orang 77 Orang	1 Unit 42 Orang 77 Orang	100%	60 Orang 19 Unit	21 Orang 25 Orang	8,08%
1	**05**	**03**	**2.03**			**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**75%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**67%**	**67,22%**
1	05	03	2.03	01		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	7 dokumen	100%	100%	100%	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	3,57%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.03	03		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 orang	100%	100%	100%	100%	0 Orang	49 Orang	0,93%
1	05	03	2.03	09		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	0 Orang	11 Orang	0,18%
1	05	03	2.03	10		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	11		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04			**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**23,33%**	**60%**	**100%**	**100%**	**60%**	**40%**	**66,67%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.04	01		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	02		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 dokumen	2 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1	05	03	2.04	04		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	5 dokumen	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Dokumen	8 Dokumen	32,00%
1	05	03	2.04	05		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiaan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.04	13		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	20 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai Visi dan Misi BPBD yang tertuang dalam RENSTRA BPBD tahun 2021-2026 maka hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasarana adalah sebagai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2021-2026.

Visi: "Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera".

Misi *:"*Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan"

Analisis kinerja Utama BPBD sesuai dengan RENSTRA BPBD merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran Strategis instansi Pemerintah, yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam capaian Sasaran Strategis sampai dengan tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagai Tabel T-C.30 berikut:

Tabel 2. 3
T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (semester 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Ketahanan Daerah		1.80	1.5	1.6	1.7	1.8	1.5	1.5	1.7	1.8	
	Ratio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100	100	100	100	100	29,69	11,25	100	100	
	Ratio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	100	100	100	100	63,47	0	100	100	
	Ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100	100	100	100	100	73,62	100	100	
	Nilai SAKIP		BB	B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
	Level Maturitas SPIP		3	3	3	3	3	3	2,6	3	3	
	Persentase penurunan temuan BPK atas laporan keuangan BPBD		WTP	30%	35%	40%	45%	62,5%	-	40%	45%	

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada SPM Sub Urusan Bencana yang terdiri dari :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
    - Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)
    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
    - Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
    - Pelatihan pencagahan dan mitigasi
    - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
    - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
    - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas
    - Respon cepat darurat bencana
    - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
    - Pencarian pertolonga dan evakuasi korban bencana

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka capaian kinerja berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
T.C.30 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (semester 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	Tahun 2023 kegiatan penyusunan KRB sedang dalam tahap proses penyelesaian
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	-	0%	100%	100%	100%	59,38%	22,50%	100%	100%	Tahun 2023 kegiatan KIE sedang berjalan
3	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Penyusunan RPB belum dianggarkan
4	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Penyusunan Renkon belum dianggarkan
5	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	-	0%	100%	100%	100%	73,44%	0%	100%	100%	Kegiatan pencegahan dan mitigasi dilaksanakan pasa semester 2
6	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	-	0%	100%	100%	100%	87,50%	0%	100%	100%	Dilaksanakan pada semester 2
7	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	62,40%	0%	100%	100%	Kegiatan ini belum dianggarkan
8	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	-	100%	-	100%	100%	62,40%	-	100%	100%	Kegiatan ini belum dianggarkan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (semester 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Status tanggap covid-19 yang belum dicabut
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	Kegiatan ini disesuaikan dengan status darurat bencana yang terjadi
11	Persentase (%) jumlah petugas yang dalam penanganan darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana
12	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	69,49%	100%	100%	Data disesuaikan dengan jumlah korban yang ditolong dan dievakuasi

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022 dapat tergambar dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022. SPM mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang urusan bencana terdapat 3 jenis pelayanan bagi daerah kabupaten / kota yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM saat ini mengalami perubahan dibanding konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target merupakan kinerja program penanggulangan bencana, sedangkan SPM saat ini pencapaian target-target menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian antara target dan realisasi terurai sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (29,69%)
    - Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun 2022 tidak jadi dilaksanakan karena belum tersedia anggaran yang mencukupi dalam pembuatan dokumen sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang tersedia, sehingga kegiatan ini tidak terlaksana sesuai target indikator penyusunan dokumen;
    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana realisasinya 59,38%, dikarenakan anggaran untuk kegiatan ini tidak mencukupi. Sehingga kegiatan ini tidak optimal pelaksanaanya.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (63,47%)
    - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum dianggarkan pada tahun 2022;
    - Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon) belum dianggarkan pada tahun 2022;
    - Pelatihan pencagahan dan mitigasi realisasinya 73,44%;
    - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana realisasinya 87,50%;
    - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana realisasinya 62,40%
    - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana realisasinya 62,40%.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%)
    - Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas, kegiatan ini disesuaikan dengan kejadian luar biasa (KLB);
    - Respon cepat darurat bencana, kegiatan ini disesuaikan dengan status darurat bencana yang terjadi
    - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
    - Pencarian pertolonga dan evakuasi korban bencana

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpadauan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat adalah :

a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Pasaman Barat sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
b. Belum adanya dokumen pendukung kebijakan dalam penanggulangan bencana (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontijensi);
c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
d. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 4 tahun 2018 tentang Penanggulangan bencana;
e. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Pasaman Barat sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
i. Penganggaran dalam kebencanaan sangat rendah dan tidak mencukupi untuk kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana;
j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data

masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;

l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat; Belum optimalnya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
n. Masih lemahnya koordinasi jejaring lintas sektor/ lembaga peduli bencana dengan masyarakat dan pemerintah.
o. Sarana dan prasarana/ peralatan yang di butuhkan dalam penanganan bencana belum lengkap dan minimnya peralatan yang dimiliki.
p. Kelompok siaga bencana untuk menjadikan nagari tangguh bencana yang mampu menangani bencana lokal nagari dalam skala kecil belum aktif.

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

Peluang BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya : Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Povinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat secara otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Pasaman Barat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dengan dibentuknya BPBD Kabupaten Pasaman Barat, maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat pada Dinas teknis lainnya bergeser menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat.

Pergeseran tersebut tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis. Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang tupoksi BPBD, maka BPBD Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD

termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun Rencana kegiatan BPBD tetap mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/prioritas BPBD yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya pekerjaan mendesak yang harus dilkasanakan disebabkan adanya program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang harus juga dilakukan. hal ini dapat dilihat pada Table 5 T-C.31 sebagai berikut :

Tabel 2. 5
T-C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD BPBD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**3.929.742.704**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**2.951.729.514**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Laporan Evaluasi Kinerja BPBD**	**6 Laporan**	**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Laporan Evaluasi Kinerja BPBD**	**6 Laporan**	**27.580.915**	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	27.580.915	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**2.894.422.704**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**2.497.590.324**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.706.657.704	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.317.690.324	Terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											dikarenakaanggaran TPP yang tersedia10 bulan
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	89.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	89.700.000	Rancangan awal dan hasil analisis telah sesuai
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73 dokumen	98.065.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73 dokumen	90.200.000	Pada sub kegiatan ini merupakan honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, karena pagu pada hasil analisis kebutuhan lebih kecil dari rancangan awal RKPD, maka honorarium tersebutpun lebih kecil

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD**	**676 Unit**	**26.900.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD**	**676 Unit**	**26.900.000**	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	26.900.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	26.900.000	Rancangan awal dan hasil analisis telah sesuai
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian**	**100%**	**31.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian**	**100%**	**-**	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	1.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Karena anggaran yang deficit, maka kegiatan ini tidak bisa dianggarkan
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											tersedia
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**172.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**130.226.525**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
2.	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.660.750	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.336.866	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.500.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											pagu yang diberikan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	105.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	74.228.909	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**480.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**25.000.000**	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	400.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini disediakan hanya untuk

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											sewa gudang logistic
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**51.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**51.600.000**	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	51.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	51.600.000	Rancangan awal dan hasil analisis telah sesuai
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**243.820.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**192.831.750**	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	178.622.500	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	40.420.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	11.660.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.549.250	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
II.	**Program Penanggulangan Bencana**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Capaian SPM bidang kebencanaan**	**100%**	**3.152.437.942**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Capaian SPM bidang kebencanaan**	**100%**	**577.797.085**	
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	**101.000.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	**40.539.085**	
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 dokumen	-	Kegiatan ini dianggarkan di rancangan awal RKPD untuk antisipasi jika penyusunan KRB yang

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											telah dianggarkan ditahun 2023 gagal terlaksana
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencan Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencan)	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1500 Orang	100.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencan Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencan)	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	40.539.085	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100%**	**1.538.400.000**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100%**	**1.080.000**	
1	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan	Semua Kab/kota, Semua	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam	91 Kawasan	150.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan	Semua Kab/kota, Semua	Jumlah Kawasan yang	0 Kawasan	-	Pagu yang disediakan

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
	Kesiapsiagaan	Kecamatan, Semua Keluraha	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Kesiapsiagaan	Kecamatan, Semua Keluraha	Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	98.400.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0 Orang	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0 Dokumen	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	80.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0 Orang	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	6 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1000 Keluarga	80.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
7	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	5 Dokumen	30.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0 kegiatan	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Dokumen	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
9	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0 Unit	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
10	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2000 Orang	100.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	1100 Orang	1.080.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
								bencana			
11	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	200.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0 Laporan	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Rasio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**564.750.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Rasio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**426.350.000**	
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	-	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka sesuai arahan

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											tetap dimasukkan dalam hasil analisis kebutuhan, namun karena Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen	384.750.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	7 dokumen	331.350.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2280 Orang	50.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 orang	20.000.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3088 Orang	80.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 orang	75.000.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
5	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	-	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 Dokumen	-	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka sesuai arahan tetap dimasukkan dalam hasil analisis kebutuhan, namun karena Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
											tersedia
6	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	12 Laporan	50.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0 Laporan	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**948.287.942**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**109.828.000**	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 dokumen	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	25.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 dokumen	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	25.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 dokumen	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	5 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	5 dokumen	79.400.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	-	Pagu yang disediakan tidak mencukupi, sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak tersedia
6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	673.287.942	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	20 Dokumen	30.428.000	Anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang diberikan

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
								Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
JUMLAH					**7.082.180.646,00**					**3.529.526.599,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat tidak tersedia untuk tahun 2024.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah :

"*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita** kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkedaulatan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah darah dalam rangka Negara kesatuan.

Dari ke Sembilan misi tersebut dirumuskan 5 (lima) arahan kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim**;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) agenda prioritas tersebut pada agenda ke-dua yaitu: "*Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan*" dan agenda ke-enam : "*Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim*" terdapat beberapa sub agenda yang masing-masingnya yaitu:

1. Agenda ke-dua: "*Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan*"
    a. Pembangunan sektro/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
    b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
    c. Pembangunan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
    d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
    e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
2. Agenda ke-enam : "*Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim*"
    a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
    c. Pembangunan rendah karbon.

Pada sub agenda ke-dua dan ke-enam jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masuk dalam agenda prioritas untuk mewujudkan pengembangan wilayah, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Arah kebijakan dan strategi untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; **(b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim**; dan (c) pembangunan rendah karbon. Strategi untuk mewujudkan peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Adapun strategi untuk mewujudkan arahan kebijakan ketahanan bencana dan iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Penanggulangan bencana**, yang dilaksanakan dengan:
    a. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
    b. Penguatan system, regulasi, dan tata kelola bencana;
    c. Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;
    d. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana;
    e. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
    f. Penguatan penanganan darurat bencana;
    g. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
    h. Penguatan system mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan WHEWS; dan
    i. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
    j. Peningkatan pembangunan dan inovasi skema alternative pembiayaan penanggulangan bencna.
2. Peningkatan ketahanan iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana nasional Adaptasi Perubahan iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui:
    a. Perlindungan kerentanan pesisir dan sector kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan

masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir;
b. Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air;
c. Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim; serta
d. Perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim

Dari konstruksi perencanaan pembangunan nasional ini terlihat bahwa urusan pengelolaan kebencanaaan (penanggulangan bencana) merupakan salah satu sub agenda strategis pembangunan nasional dalam Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Hal ini diwujudkan dalam Visi Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Dengan arahan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan."

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencan adalah "Menurunnya kerugian ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana."

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan dan strategi Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
    a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
    b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi:
   Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
    a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
    b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
    c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
    d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Selanjutnya lima langkah srategi tersebut agar dapat direalisasikan secara terencana dan terukur selanjutnya akan diaplikasikan secara konkret dalam bentuk program dan kegiatan dari satuan kerja pelaksana penanggulangan bencana baik di tingkat nasional dalam hal ini Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun di tingkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perumusan program dan kegiatan ini pada tingkat daerah juga harus mengacu kepada RPJMD yang berlaku agar selaras dengan visi misi dan program prioritas dari Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah :

   a. Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah, dan penanggulangan bencana;
   b. Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif.

2. Sasaran

   Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah :

   a. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana;
   b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Mitigasi, tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana	Masyarakat yang Tangguh menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1.20	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.80
			Ratio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	77.55	100	100	100	100	100	100
			Ratio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.06	100	100	100	100	100	100
			Ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	BB
			Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3	3	3
			Persentase penurunan temuan BPK atas laporan keuangan BPBD	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD Tahun 2024, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Darah;
b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BPBD.

Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2024 direncanakan berjumlah 2

Program, 12 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar **Rp 3.529.526.599,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah*)**. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD dan RPJMD:

1. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. Penyesuaian dengan hasil evaluasi Tahun 2022;
3. Analisa Kebutuhan Operasional.

Rencana Kerja BPBD Tahun 2024, seperti yang tercantum dalam tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3.529.526.599,00							7.790.398.710,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.529.526.599,00							7.790.398.710,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.529.526.599,00							7.790.398.710,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	2.951.729.514,00						100%	4.322.716.974,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kineja BPBD	24Laporan			6 Laporan	27.580.915,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6Laporan	33.000.000,00	
	1	05	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan			6 Laporan	27.580.915,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6 Laporan	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%			100 %	2.497.590.324,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	3.183.864.974,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan			26 Orang/bulan	2.317.690.324,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	23 Orang/bulan	2.977.323.474,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Dokumen			36 Dokumen	89.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat,	DANA TRANSFER UMU	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan	-	36 Dokumen	98.670.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pasaman, Aua Kuniang	M-DANA ALOKASI UMUM		masyarakat				DAERAH
	1	05	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	292 Dokumen			73 Dokumen	90.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	73 Dokumen	107.871.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	681Unit			676 Unit	26.900.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	681Unit	29.590.000,00	
	1	05	01	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56 Laporan			14 Laporan	26.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	14 Laporan	29.590.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%			0 %	0,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	34.100.000,00	
	1	05	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	310 Paket			0 Paket	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	66 Paket	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5	1															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang			0 Orang	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	10 Orang	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			100 %	130.226.525,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	189.200.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	2.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	3.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	34.660.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Keca	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	44.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													matan, Semua Kel/ Desa	ALOKASI UMUM						
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	3.336.866,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	4.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	15.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan			24 Laporan	74.228.909,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	24 Laporan	115.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%			100 %	25.000.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	528.000.000,00	
	1	05	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit			0 Unit	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	11 Unit	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Unit	440.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													n, Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%			100 %	51.600.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	56.760.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan			24 Laporan	51.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Keca	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	24 Laporan	56.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													matan, Semua Kel/ Desa	ALOKASI UMUM						
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%			100 %	192.831.750,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	268.202.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105 Unit			18 Unit	178.622.500,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	21 Unit	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	229 Unit			9 Unit	11.660.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	51 Unit	44.462.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0 9	0 9															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	2.549.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Unit	3.740.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	0 5	0 3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	100%			100 %	577.797.085,00						100%	3.467.681.736,00	
	1	0 5	0 3	2 . 0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%			100 %	40.539.085,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	111.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Dokumen	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	4700 Orang			1000 Orang	40.539.085,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1500 Orang	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			100 %	1.080.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	1.692.240.000,00	
	1	0	0	2	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	3	.02	006															
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	90 Kawasan			0 Kawasan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	90 Kawasan	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	190 Orang			0 Orang	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	50 Orang	108.240.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	009	Penyusunan Rencana Kontijensi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	11 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	4 Dokumen	330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1800 Orang			0 Orang	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	600 Orang	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2	0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	3	. 0 2	0 1 2															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1200 Keluarga			0 Keluarga	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	500 Keluarga	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2 . 0 2	0 0 1 3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	33 Dokumen			0 Kegiatan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	11 Dokumen	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Dokumen	330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	115 Unit			0 Unit	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	50 Unit	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4650 Orang			1100 Kawasan	1.080.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1250 Orang	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	36 Dokumen			0 laporan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	18 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rasio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100 %	426.350.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	621.225.000,00	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	18 Laporan			0 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6 Laporan	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	28 Dokumen			7 Dokumen	331.350.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	7 Dokumen	423.225.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5280 Orang			1000 Orang	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1000 Orang	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6100 Orang			1000 Orang	75.000.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1000 Orang	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	18 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6 Dokumen	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	36 Laporan			0 Laporan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	12 Laporan	52.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	100%			100 %	109.828.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	1.043.116.736,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	10 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	2 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	6 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	2 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	5 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	25 Dokumen			5 Dokumen	79.400.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	5 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan			0 Laporan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	99 Dokumen			20 Dokumen	30.428.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	22 Dokumen	740.616.736,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JUMLAH								**3.529.526.599,00**							**7.790.398.710,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyakarat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

BPBD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan bidang urusan pemerintah yaitu Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Untuk program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan serta rencana tahun 2024 yang meliputi lokasi program / kegiatan, target capaian kinerja, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan maju tahun 2025. Berikut ini tabel rumusan berikut dengan kodefikasi subkegiatan yang mendukung pencapaian SPM dan atau Program Unggulan (Progul) Daerah, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3.529.526.599,00							7.790.398.710,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.529.526.599,00							7.790.398.710,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.529.526.599,00							7.790.398.710,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	2.951.729.514,00						100%	4.322.716.974,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kineja BPBD	24Laporan			6 Laporan	27.580.915,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6Laporan	33.000.000,00	
	1	05	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan			6 Laporan	27.580.915,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6 Laporan	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%			100 %	2.497.590.324,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	3.183.864.974,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan			26 Orang/bulan	2.317.690.324,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	23 Orang/bulan	2.977.323.474,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Dokumen			36 Dokumen	89.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat,	DANA TRANSFER UMU	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan	-	36 Dokumen	98.670.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pasaman, Aua Kuniang	M-DANA ALOKASI UMUM		masyarakat				DAERAH
	1	05	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	292 Dokumen			73 Dokumen	90.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	73 Dokumen	107.871.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	681Unit			676 Unit	26.900.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	681Unit	29.590.000,00	
	1	05	01	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56 Laporan			14 Laporan	26.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	14 Laporan	29.590.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%			0 %	0,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	34.100.000,00	
	1	05	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	310 Paket			0 Paket	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	66 Paket	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5	1															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang			0 Orang	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	10 Orang	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			100 %	130.226.525,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	189.200.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	2.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	3.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	34.660.750,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Keca	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	44.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													matan, Semua Kel/ Desa	ALOKASI UMUM						
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	3.336.866,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	4.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	15.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Paket	22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan			24 Laporan	74.228.909,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	24 Laporan	115.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%			100 %	25.000.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	528.000.000,00	
	1	05	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit			0 Unit	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	11 Unit	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Unit	440.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													n, Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%			100 %	51.600.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	56.760.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan			24 Laporan	51.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Keca	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	24 Laporan	56.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													matan, Semua Kel/ Desa	ALOKASI UMUM						
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%			100 %	192.831.750,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	268.202.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105 Unit			18 Unit	178.622.500,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	21 Unit	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	229 Unit			9 Unit	11.660.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	51 Unit	44.462.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0 9	0 9															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	2.549.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Unit	3.740.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	0 5	0 3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	100%			100 %	577.797.085,00						100%	3.467.681.736,00	
	1	0 5	0 3	2 . 0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%			100 %	40.539.085,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	111.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Dokumen	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	4700 Orang			1000 Orang	40.539.085,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1500 Orang	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			100 %	1.080.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	1.692.240.000,00	
	1	0	0	2	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	3	.02	006															
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	90 Kawasan			0 Kawasan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	90 Kawasan	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	190 Orang			0 Orang	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	50 Orang	108.240.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	009	Penyusunan Rencana Kontijensi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	11 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	4 Dokumen	330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1800 Orang			0 Orang	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	600 Orang	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2	0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	3	.02	012															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1200 Keluarga			0 Keluarga	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	500 Keluarga	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	33 Dokumen			0 Kegiatan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	11 Dokumen	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Dokumen	330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/ Desa	ASI UMUM						
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	115 Unit			0 Unit	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	50 Unit	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4650 Orang			1100 Kawasan	1.080.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1250 Orang	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	36 Dokumen			0 laporan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	18 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rasio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100 %	426.350.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	621.225.000,00	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	18 Laporan			0 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6 Laporan	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	28 Dokumen			7 Dokumen	331.350.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	7 Dokumen	423.225.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5280 Orang			1000 Orang	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1000 Orang	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6100 Orang			1000 Orang	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1000 Orang	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	18 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	6 Dokumen	1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	36 Laporan			0 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	12 Laporan	52.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	100%			100 %	109.828.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	100%	1.043.116.736,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	10 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	2 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	6 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	2 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	5 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	25 Dokumen			5 Dokumen	79.400.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	5 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan			0 Laporan	0,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	1 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	99 Dokumen			20 Dokumen	30.428.000,00	- Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	22 Dokumen	740.616.736,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JUMLAH								**3.529.526.599,00**							**7.790.398.710,00**	

BAB V
PENUTUP

RENJA BPBD Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026. RENJA BPBD Tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana RENJA Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD, seluruh aparatur BPBD secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2024.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2024 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun pertama dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dinas Sosial kabupaten Pasaman Barat, berkewajiban menyusun Rencana Kerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RTKD) Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Padang Tujuh, Juni 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pasaman Barat

HERMANTO
NIP.196510041988021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 2

I.3. Maksud dan Tujuan 3

I.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS TAHUN 2021 .. 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021

dan Capaian Renstra Dinas Sosial 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 36

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial 41

2.4 Review Rancangan Awal RKPD 42

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat 53

BAB III TUJUAN dan SASARAN 56

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 56

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 57

3.3 Program dan Kegiatan 60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 78

BAB V PENUTUP 98

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perncanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat. mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1 Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKP dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2 RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2024;

3 Program / Kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD). Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Rencana Kerja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Sosial memuat kebijakan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, program dan kegiatan Dinas Sosial, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023 dan 2024.

Keterkaitan antara Renaja Dinas Sosial dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

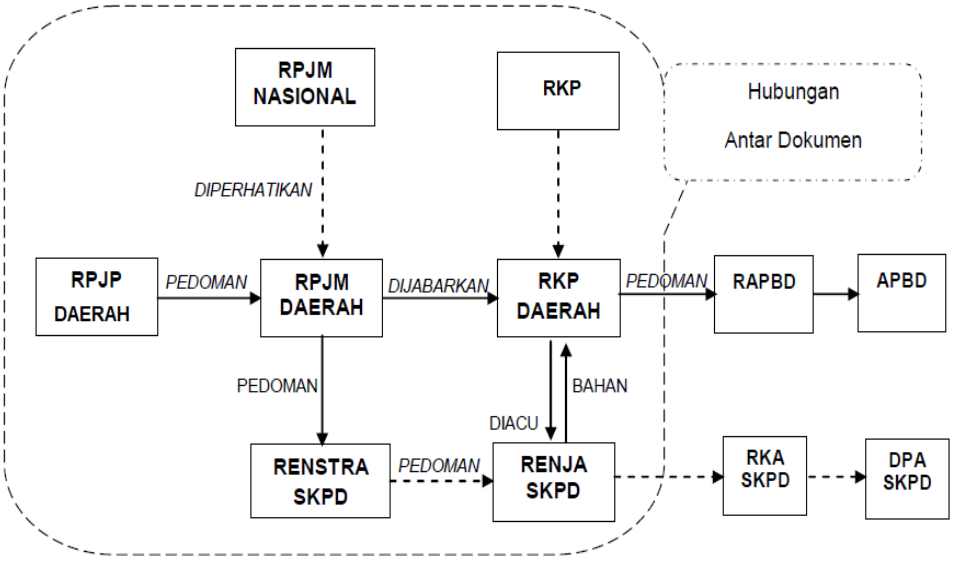

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;
   Meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusunan Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Peneyusunan Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan
II. Penyusunan Rancangan Awal
   Berpedoman pada Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Dinas Sosial tahun 2022 (n-2) dan Perkiraan capaian tahun 2023 (n-1) sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan Renja ini berpedoman pasa Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awla renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun Lalu dan Tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atay kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.
III. Penyusunan Rancangan
   Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan

disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang lambat minggu ke 3 bulan Maret.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
Sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa forum perangkat daerah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Forum perangkat dilaksanakan di OPD masing-masing. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditanda tangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum gabungan Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir
Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

VI. Penetapan
Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2024 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi public merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannnya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi

Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan

Kabupaten / Kota;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat agar dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yaitu Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1 Untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024

2 Mensinkronkan dan mensinergikan program dan dan kegiatan Dinas Sosia dengan Target dan sasaran pembangunan daerah sebagimana terumus dalam program perencanaan daerah dan tutur mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja /Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengaturtentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas sosial

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota

serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang

langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangkabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan (pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir), uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial pada tahun 2022 memuat pencapaian target tahun 2022 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2023 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk pencapaian target program dan kegiatan tahun 2024, maka perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat.

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 5 (Lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp. 15.961.000.616,- (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas rupiah). Dari Pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 12.908.478.190,- (Dua belas milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan persentase realisasi sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar 80,88%.

Anggaran Dinas Sosial tahun 2022 dibagikan pada 3 (tiga) bidang, 1 (satu) sekretariat yang digunakan untuk membiayai/mendanai 5 (lima) program. Berikut rincian realisasi Kelima program tersebut adalah i berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 3.025772.896,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.883.634.680,- atau 95,30 % dengan realisasi fisik sebesar 100%
2 Program Pemberdayaan Sosial dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 434.142.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 405.469.700,- atau 93,40% dengan realisasi fisik 100%
3 Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 199.820.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 172.989.150,- atau 86,57 % dengan realisasi fisik sebesar 100%;
4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu dana sebesar Rp. 12.097.160.020,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.385.310.100,- atau 77,35% dengan realisasi fisik sebesar 100%;
5 Program Penanganan Bencana dengan pagu dana sebesar Rp. 204.104.250,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 129.754.560,- atau 63,57% dengan realisasi fisik 100%;

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tealh optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Realisasi Fisk dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2.1.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
1	2	4	5	6	7	8	9
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah** **Nilai SAKIP** **Level Maturitas SPIP**	**3.025.772.896**	**100**	**2.883.634.680**	**95,30**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran**	**6.090.000**	**100**	**5.090.000**	**83,58**	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.090.000	**100**	5.090.000	83,58	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**2.517.680.786**	**100**	**2.421.999.226**	**96,20**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	2.070.880.786	**100**	1.983.324.226	95,77	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	366.120.000	**100**	361.610.000	98,77	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	80.680.000	**100**	77.065.000	95,52	
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentse Terpenuhi nya Administrasi Kepegawaian**	**30.900.000**	**100**	**22.547.855**	**72,97**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	30.900.000	**100**	22.547.855	72,97	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**248.947.010**	**100**	**245.593.300**	**98,65**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	0		-	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	23.985.000	**100**	23.985.000	100,00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.733.460	**100**	15.929.000	85,03	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15.750.000	**100**	15.750.000	100,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	190.478.550	**100**	189.929.300	99,71	
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**69.043.160**	**100**	**68.680.000**	**99,47**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan mesin	69.043.160	**100**	68.680.000	99,47	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**64.346.940**	**100**	**43.933.999**	**68,28**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	42.246.940	**100**	21.833.999	51,68	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	22.100.000	**100**	22.100.000	100,00	
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara**	**88.765.000**	**100**	**75.790.300**	**85,38**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilaku kan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	75.945.000	**100**	62.970.300	82,92	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilaku kan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas operasional atau lapangan	12.820.000	**100**	12.820.000	100,00	
II	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase terlaksananya program Pemberdayaan Sosial**	**434.142.700**	**100**	**405.469.700**	**93,40**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
A.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaen/Kota**	**Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial**	**434.142.700**	**100**	**405.469.700**	**93,40**	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	119.768.348	**100**	107.911.650	90,10	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	162.412.250	**100**	159.853.350	98,42	
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Tenaga kesejahteraan	151.962.102	**100**	137.704.700	90,62	
III	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase terlaksananya program rehabilitasi Sosial**	**199.820.750**	**100**	**172.989.150**	**86,57**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
A	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan, anak dan korban sosial lainnya**	**199.820.750**	**100**	**172.989.150**	**86,57**	
1	Penyediaan Sandang	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	32.013.250	**100**	24.696.650	77,15	
2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	47.862.000	**100**	42.913.700	89,66	
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah bantuan bagi Mayat terlantar	75.239.000	**100**	69.352.050	92,18	
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah bantuan bagi Penyandang Disabilitas	44.706.500	**100**	36.026.750	80,59	
IV	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase data yang telah dikelola**	**12.097.160.020**	**100**	**9.385.310.100**	**77,58**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
A	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data yang telah dikelola**	**12.097.160.020**	**100**	**9.385.310.100**	**77,58**	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabpaten/Kota	Jumlah Data Fakir miskin pada Aplikasi SIKS NG	260.263.800	**100**	229.879.200	88,33	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang telah dikelola	11.836.896.220	**100**	9.155.430.900	77,35	
V	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase terlaksananya program penangganan bencana**	**204.104.250**	**100**	**129.754.560**	**63,57**	
A	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagan bencana**	204.104.250	**100**	129.754.560	63,57	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
					Rp	%	
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	204.104.250	**100**	129.754.560	63,57	
	JUMLAH		**15.961.000.616**		**12.908.478.190**	**80,88**	

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial. Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Adapun informasi yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dibawah 75%, adalah :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Karena adanya Kesalahan Rekening pada perjalanan dinas sehingga tidak dapat direalisasikan.
2. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik adanya sisa anggaran pada rekening pembayaran tagihan air karena adanya kesalahan dalam penanggaran tagihan air perbulan.
3. Program Penanganan Bencana kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten /kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan karena ada anggaran yang tidak terealisasi pada Pembelian Barang yang diserahkan kepada masyarakat.

   Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pencapaian target OPD diantaranya adalah :
   1. Terlambatnya Pengesahan Anggaran
   2. Adanya Kesalahan Rekening
   3. tidak sesuainya biaya belanja barang yang telah direncaakan

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.1.2 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**								
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**								
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang		18 PNS	18 PNS	100	25 Pns	43	**48,84**
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		3 Orang PTT 21 Orang THL	3 Orang PTT 21 Orang THL	100	3 Orang PTT 21 Orang THL	48	**60,42**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	**50,00**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran**								
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	**50,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Sosial**								
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DINAS SOSIAL			1 Orang THL	0	-	1 Orang THL	1 Orang THL	**100,00**
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**								
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		2 Orang	2 Orang	100	4 Orang	6 Orang	**50,00**
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	5 Orang		16 orang	16 orang	100	18 orang	34 Orang	**52,94**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						undangan								
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang		2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	4 Orang	-
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor			1 Paket	0	-	1 Paket	1 Paket	**100,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Knator yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1Paket	2 Paket	**50,00**
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	**50,00**
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggagndaan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	**50,00**
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		12 Kali	12 Kali	100	12 Kali	24 Kali	**50,00**
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**								

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 Unit		5 Unit	5 Unit	100	6 Unit	11 Unit	**27,27**
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**								
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit		0	0 Unit	100	1 Unit	1 Unit	**100**
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit		0	0 Unit	100	1 Unit	1 Unit	**100**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya	11 Unit		0	0 Unit	100	1 Unit	1 Unit	**100**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						yang Disediakan								
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**								
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan		0	0	0	12 Laporan	24 Bulan	**50,00**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	24 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	**50,00**
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan		0	0	0	0	0	**0**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						disediakan								
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan		3 Orang THL	2 Orang THL	66	3 Orang THL	5 Orang	**40,00**
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemelihraraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**								
1	**06**	**01**	**2.09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas aatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		1. 18 Unit (6 unit kendaraan roda 5 dan 25 unit kendaraan roda 2) 2. 1 Orang THL			1. 18 Unit (6 unit kendaraan roda 5 dan 25 unit kendaraan roda 2) 2. 1 Orang THL	36 Unit	**50,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit		52 Unit			52 Unit	52 Unit	**100,00**
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0			0	0	**0**
1	06	01	2.09	010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		0			0	0	**0**
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat**								

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						bencana daerah kab/kota(SPM)								
1	**0 6**	**0 6**	**2.0 1**		**Kegiatan Penyelenggaraaan Pemberdayaan Masyarakat terhadapa Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**								
1	0 6	0 6	2.0 1	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialsasi dan Pelaksanaan Kampung siaga Bencana Kabupaten/kot a	1 Kampung		50 Kali	50 Kali	100	0	200 Kali	**75,00**
1	0 6	0 6	2.0 1	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	43 Orang		50 Kali	50 Kali	100	0	100 Kali	**75,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/kota								
1	**06**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagan bencana**								
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggapa darurat (penggungsian) kewenangan Kabupaten /kota	100 Orang		50 Kali	50 Kali	100	150 Orang	100 Orang	**75,00**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan	100 Orang		50 Kali	50 Kali	100	150 Orang	100 Orang	**75,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						3x1 Hari dalam masa tanggapa darurat (penggungsian) kewenangan Kabupaten /kota								
1	0 6	0 6	2.0 1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Penggungsia dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		0	0	0	0	0	**0,00**
1	0 6	0 6	2.0 1	03	Penyediaan Tempat Panampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penggungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit		0	0	0	0	0	**0**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		0	0	0	0	0	**0,00**
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		0	0	0	0	0	**0,00**
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase terlaksananya program rehabilitasi Sosial**								

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	**06**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban eksploitasi, perdagangan peerempuan, anak dan korban sosial lainnya**								
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	36 Orang		0	0	0	0	0	**0**
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan Lainnya yang	35 Orang		3 kali penyediaan	3 kali penyediaan	100	3 kali penyediaan	6 kali penyediaan	**50,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ kota								
1	06	04	2.01	03	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanna Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	5 Orang		6 kali	6 kali	100	8 Kali	14 Kali	**35,71**
1	06	04	2.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten /kota	15 Orang		30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	60 Orang	**25,00**
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan	25 Orang		3 Paket	0	-	3 Paket	3 Paket	**50,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota								
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	5 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang umlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	JJumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	10 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Kabupaten/Kota								
1	06	04	2.01	010	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**
1	06	04	2.01	011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar**								

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM**								
1	0 6	0 4	2.0 2	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**
1	0 6	0 4	2.0 2	013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		0	0	-	0	0	**00,00**
1	**0 6**	**0 2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase terlaksananya program Pemberdayaan Sosial**								

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial**								
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	umlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat		6 Kegiatan	2 Kegiatan	33	6 Kegiatan	6 Kegiatan	**100,00**
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	25 Orang		6 Kegiatan	3 Kegiatan	50	6 Kegiatan	9 Kegiatan	**66,67**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						a								
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang		6 Kegiatan	2 Kegiatan	33	6 Kegiatan	8 Kegiatan	**75,00**
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga		0	0	0	0	0	**50,00**
1	06	02	2.03	04	PPeningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	1 Lembaga		0	0	0	0	0	**50,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial								
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data yang telah dikelola**								
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	500 Orang		92.671 Data	92.671 Data	100	92.671 Data	185.342 Data	**50,00**

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	62.736 Keluarga		69.194 Data	69.194 Data	100	69.194 Data	138.388 Data	**50,00**
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga		0	0	0	0	0	**50,00**
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		0	0	0	0	0	**50,00**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Pada RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah pada misi 4 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2016, yakni : Penerapan Tatakelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif, Menanggulangi Kemiskinan Melalui Penyediaan Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan, sasaran dan target indikator yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dan Taget tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Peningkatan Nilai Sakip		BB	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
2	Level Maturitas SPIP		2,6	3	3	3	3	2,6	2,6	3	3	
3	Persentase Penurunan Temuan BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Indeks Gini		0,251	0,257	0,256	0,255	0,253	0,26	0,28	0,015	0,020	
5	Persentase Penduduk Miskin		6,58	07.02	07.00	6,96	6,84	7,51	7,60	0,56	0,50	

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
6	LKS Anak Binaan, LKS Lanjut Usia Binaan, LKS Penyandang Disabilitas Binaan, karang Taruna aktif yang Dibina		12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	4 LKS	5 LKS	8 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuan dasarnya dluar Panti	100%	100%	75	80	90	100	75	80	90	100	
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%	75	80	90	100	75	80	90	100	

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
9	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota		100%	75	80	90	100	75	80	90	100	

Untuk bidang sosial standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka capaian kinerja berdasarkan SPM bidang sosial tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100%		75%	85	95%	100%	9.09 %	85%	100%	100 %	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%		75%	85	95%	100%	100 %	25%	100%	100 %	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%		75%	85	95%	100%	75%	85%	100%	100 %	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%		75%	85	95%	100%	75%	85%	100%	100 %	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten /kota	100%		75%	85	95%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	

Kinerja pelayanan Dinas Sosial tahun 2024 dapat tergambar dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022. SPM mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Sosial terdapat lima jenis pelayanan bagi daerah kabupaten / kota yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di laur panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM saat ini mengalami perubahan dibanding konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target merupakan kinerja program sosial, sedangkan SPM saat ini pencapaian target-target menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.

Uraian antara target dan realisasi terurai sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti

   Dalam tahun 2022 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti masih sangat rendah karena realisasi pada tahun 2022 sebesar 9,09% dari target capaian daerah sebesar 100%, dimana jumlah disabilitas terlantar diluar yang terbantu sebanyak 42 orang dari 462 orang penyandang disabilitas terlantar diluar panti**.**
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
   Cakupan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial cukup tinggi dengan realisasi sebesar 100 % dari target capaian daerah sebesar 100% setiap tahun, dimana jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 6 orang dari 6 orang jumlah anak terlantar diluar panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
   Dalam tahun 2022 rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti termasuk kategori sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% dari target capaian
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.
   Untuk tahun 2021 rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis, realisasi sebesar 100 % dari capaian realisasi sebesar 100% pertahun. Dimana pada tahun 2021 ada 3 Orang yang mana 3 tersebut telah ditindak lanjuti.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

   Pada tahun 2022 pencapaian sudah sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% dari target capaian daerah sebesar 100%, dimana jumlah korban bencana yang ada sebanyak 359 kejadian bencana dengan jumlah korban sebanyak 359 Jiwa dan telah ditanggapi dan diberikan jaminan sosial oleh Bidang Bantuan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pasaman Barat. Isu-isu yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pelayanan sosial masyarakat memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data by name by address yang lengkap
2. Banyak Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia, gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, namun cakupan penanganan (rehabilitasi, jaminan dan pemberdayaan sosial masih rendah)
3. Masih banyaknnya masyarakat miskin yang belum mendapatkan fasilitas bantuan jaminan sosial seperti askes (BPJS)
4. Belum semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat penangan yang optimal
5. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu sebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
6. Ancaman bencana alam dan sosial akibat kondisi geografis daerah seperti banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya.
7. Pemberian bantuan kepada penyandang Disabilitas berupa bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP), bantuan untuk alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan lain mendukung penyandang disabilitas bisa mandiri dan berusaha.
8. Terdapat masyarakat yang layak menerima bansos tidak menerima bansos atau sebaliknya, terdapat PBI-JK yang dinonaktifkan dan data anggota keluarga yang tercecer penerima PBI-JK. Program sembako/BPNT sering terdapat saldo Nol/kartu Ganda.

Sedangkan Sasaran besar lainnya yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah :

a. Meningkatnya peran organisasi sosial dalam pelayanan sosial terhadap PPKS
b. Meningkatnya kemampuan penyandang cacat dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar
c. Meningkatnya perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan anak jalanan)
d. Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin
e. Meningkatnya kondisi puluh psikologi traficking dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
f. Terlaksananya pelayanan dan bantuan sosial secara cepat dan tepat kepada korban bencana alam selam masa tanggap darurat.

Dalam mengamati isu-isu penting tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan koordinasi dan

sinergi program dengan lintas OPD/Lemabaga teknis yang terkait dengan Bidang Sosial di Kabupaten Pasaman Barat melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum dapat dikatakan optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun Rencana kegiatan Dinas Sosial tetap mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/prioritas Dinas yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya pekerjaan mendesak yang harus dilkasanakan disebabkan adanya program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang harus juga dilakukan. hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

OPD ; Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**4,349,927,979**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**4,349,927,979**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3,264,027,979**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3,264,027,979**	
1	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**				**1,980,000**	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**				**1,980,000**	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Sosial yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2023; LAKIP Tahun 2023)	4 Dokumen	1,980,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Sosial yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2023; LAKIP Tahun 2023)	4 Dokumen	1,980,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,131,313,687**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,131,313,687**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	18 Orang	2,533,463,687	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	18 Orang	2,533,463,687	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	38 Orang	585,805,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	38 Orang	585,805,000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	12,045,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	12,045,000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5,500,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5,500,000**	
6	Pengamanan barang milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Orang	5,500,000	Pengamanan barang milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Orang	5,500,000	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**21,518,750**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**21,518,750**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	4 Orang	6,325,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	4 Orang	6,325,000	
8	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	5,500,000	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	5,500,000	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	4 Orang	9,693,750	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	4 Orang	9,693,750	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**33,978,908**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**33,978,908**	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	7,034,408	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	7,034,408	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	8,739,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	8,739,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program /Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	5,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	5,500,000	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	6,105,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	6,105,000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	30 Kali	6,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	30 Kali	6,600,000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**11,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**11,000,000**	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	11,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	11,000,000	
						Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4.271.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**49,936,634**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**49,936,634**	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	46,471,634	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	30.412.450,00	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	3,465,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	3,465,000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**8,800,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**8,800,000**	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran	20 Unit	3,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran	20 Unit	3,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan			
19	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor ata bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1 Paket	3,000,000	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor ata bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1 Paket	3,000,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.200.000,00	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin	20 Unit	5,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin	25 Unit	5,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang terpelihara					yang terpelihara			
2	**Program Pemberdayaan Sosial**				**376,200,000**	**Program Pemberdayaan Sosial**				**376,200,000**	
9	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota**				**376,200,000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota**				**376,200,000**	
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	6 Kegiatan	110,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	6 Kegiatan	110,000,000	
22	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	4 Kegiatan	101,200,00	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	4 Kegiatan	101,200,00	
23	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan	6 Kegiatan	165,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan	6 Kegiatan	165,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program /Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Potensi Tenaga kesejahteraan			Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Potensi Tenaga kesejahteraan			
3	**Program Rehabilitasi Sosial**				**352,000,000**	**Program Rehabilitasi Sosial**				**352,000,000**	
10	**Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**352,000,000**	**Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**352,000,000**	
24	Penyediaan Sandang	Kab. Pasaman Barat	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	3 Kali Penyediaan	77,000,000	Penyediaan Sandang	Kab. Pasaman Barat	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	3 Kali Penyediaan	77,000,000	
						Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko	35 Orang	3.184.306.400 ,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ta Penyediaan Permakanan			
25	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	100%	165,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	100%	165,000,000	
26	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	3 Paket	110,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	3 Paket	110,000,000	
27	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pemberian Bantuan pada Peringatan hari - hari besar	3 Paket	110,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pemberian Bantuan pada Peringatan hari - hari besar	3 Paket	110,000,000	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	10 Orang	999.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1.098.000,00	
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	999.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.248.601,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2.518.000,00	
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM		3.611.250,00	
						Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan	5 Orang	2.490.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
						Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1.121.250,00	
4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**247,700,000**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**42.887.436,00**	
11	**Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota**				**247,700,000**	**Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota**				**42.887.436,00**	
28	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data Fakir miskin pada Aplikasi SIKS NG	92.671 Data	121,200,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	500 Orang	7.044.936,00	
29	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data PMKS yang telah dikelola	69.194 Data	126,500,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	62736 Keluarga	18.339.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program /Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
						Kabupaten/Kota		Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
30						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	8.734.000,00	
31						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	8.769.000,00	
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**110,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**107.872.389,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraaan Pemberdayaan				**110,000,000**	**Kegiatan Penyelenggaraan**				**18.079.100,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program /Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Masyarakat terhadapa Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					**Pemberdayaan Masyarakat terhadapa Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**					
30	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pasaman Barat	Jumlah koordinasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Taruna Siaga	50 Kali	110,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Kali	4.815.000,00	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	13.264.100,00	
32						**Kegiatan** Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				89.793.289,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Sosial Kabupaten/Kota					
33						Penyediaan Makanan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	68.646.989,00	
34						Penyediaan Sandang	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.180.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	3.746.300,00	
35						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.410.000,00	
36						Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	3.809.500,00	
37						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		18.079.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bencana Kabupaten/Kota					
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	4.815.000,00	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	13.264.100,00	
TOTAL					**4,349,927,979**					**6.021.882.871,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Sosial, usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 pada Dinas Sosial. Untuk Tahun 2024 ada 3 usulan kegiatan masyarakat hasil Musrembang Kecamatan Tahun 2023 yang menjadi Prioritas daerah dapat disajikan dalam tabel 2.5.1

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Sosial

Kode						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1						2	3	4	5	6
1	06	05				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
1	06	05	2.02			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota				
1	06	05	2.02	03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
1	06	05	2.02	03	01	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Baru kecamatan Luhak Nan Duo Dapil 1 Kab. Pasaman Barat	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	200.000.000	Pokir Endra Yama Putra
1	06	05	2.02	03	01	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	65.000.000	Pokir Wasman
1	06	05	2.02	03	01	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	150.000.000	Pokir Syerli Puspita Indah Sari

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan miskin secara intensif sehigga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Sesuai dengan tugas dan Pokoknya Kementerian Sosial RI bersama instansi yang ada di Provinsi dan Kabupaten /Kota bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bersama dengan Kementrian /Lembaga terkait.

Dinas Sosial sebagai OPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPJMD sebagai berikut :

Program prioritas dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan adalah :

1) Pengendalian terpadu penanganan kemiskinan
2) peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari
3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahreraan Sosial
4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5) Pemberdayaan Fakir Miskin
6) Program Koordinasi Bidang Ksejahteraan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu penelataran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang / terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
d. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yaitu tergantungnya salah satu konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagi akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;
f. Korban tidak kekerasan, eksloitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Berdasarkan telaahaan terhadap Renstra Kemensos yang berdasarkan Permensos nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa :

a. Tantangan utama dan permasalahan yang akan dihadapi dala peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan, yaitu :
   1 Memastikan Hidup yang berkualitas dan bermartabat
   - Rendahnya kualitas dan ketersedian pangan
   - Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum
   - Keterbatasan akses pelayanan pendidikan
   - Keterbatasan akses pelayanan kesehatan
   - Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak
   - Keterbatasan akses terhadap sumber energi
   - Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non – ASN
   2. Memastikan Kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi
   - Keterbatasan sumber daya finansial
   - Keterbatasan kemampuan SDM pengelola
   - Keterbatasan sumber pemasaran produk
   3. Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigaasi serta perlindungan sosial
   - Penanganan resiko sosial yang belum responsif
   - Keterbatasan pendampingan pelayanan
   - Diskriminasi sosial bagi kelompok PPKS (penyandang disabilitas, lansia, korban bencana)
      i. Kerangka Kelembagaan dan pembangunan kesejahteraan sosial Kelembagaan SLRT dan Puskesos dalam rangka mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai pusat data dan sasaran program penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal.
      ii. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.
      iii. Pembiayaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial

b. Sasaran strategis pembangunan sosial
   1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
   2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
   3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

c. Major Project terkait sosial adalah
   1. Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh melalui :
   - Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial non tunai
   - Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan
   2. Percepatan penurunan kematian ibu dan prevalensi stunting, dengan :
   - Menurunkan angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup
   - Menurunkan prevalensi stunting hingga 13 %

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan misi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial tahun 2024, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
d. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

Berdasarkan tujuan diatas, dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target						Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	75	80	85	90	95	100	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	75	80	85	90	95	100	
2	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana alam dan Sosial	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab / kota	75	80	85	90	95	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	
			Persentase Penurunan Temuan BPK	75	80	85	90	95	100	

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Sosial
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera			
MISI I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1 Penguatan pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	1 Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
		a. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan	2 Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Sosial Di Kabupaten Pasaman Barat
MISI II: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan Penanganan Korban bencana Alam dan Sosial	1.1 Masyarakat yang Tangguh menghadapi bencana	**2.5.** Meningkatkan upaya pencegahan dan tanggap darurat serta penanggulangan bencana	1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana bagi korban bencana serta terpenuhi kebutuhan dasarnya
		2.6. Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana	3 Meningkat bantuan rehabilitasi dan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana 4 Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban

			bencana kabupaten / kota.
MISI III : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS atau pelayanan Rehabilitasi Sosial	1.1 Pengentasan Kemiskinan 1.2 Meningkatkan Penyediaan kebutuhan dasar PPKS Luar Panti	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti. 3. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti. 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang sosial berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermatrabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 teruang dalam 5 (Lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan.

Rekapitulasi program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat :

a. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Tujuan :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
2. Meningkatkan Penanganan Korban Bencana alam dan Sosial
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
2. Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan Akuntabel

b. Nama Progran dan Kegiatan yang Mendudkung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   1. Perencanaan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah
   7. Penyediaan Jasa Penunjabg Urusan Pemerintah Daerah
   8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Penanganan Bencana

1. 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
   2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota

III. Program Rehabilitasi Sosial
   1. Kgiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
   2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

V. Program Pemberdayaan Sosial
   1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yaitu dalam pengentasan kemiskinan, terdapat Program yang ada pada rancangan awal namun dengan adanya perubahan nomenklatur yaitu Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat terdampak Program Pemugaran hal ini sebabkan karena kegiatan tersebut bukan kewenangan dari Dinas Sosial. Tabel rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.3.3

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
					Dinas Sosial				6.021.882.871,00				8.334.810.813,95
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				5.991.470.421,00				8.287.310.813,95
1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				5.991.470.421,00				8.287.310.813,95
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				2.509.267.397,00				3.093.308.083,95
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan			2.000.000,00				2.200.000,00

						daerah							
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	2.200.000,00
1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi keuangan			2.262.610.220,00				2.551.909.403,95
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Orang/bulan	2.022.665.220,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang/bulan	2.022.430.003,95
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	163.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	444.834.400,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	76.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	84.645.000,00

1	06	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian			9.254.000,00				40.532.300,00
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	3.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	21.505.000,00
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	2.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	9.028.400,00
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	2.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	9.998.900,00
1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			125.558.087,00				44.500.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	- Kab. Pasaman Barat, Semua	1 Paket	18.216.500,00	Dana Transfer Umum-Dana		1 Paket	18.000.000,00

						Disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Alokasi Umum			
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.982.187,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	13.000.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	88.359.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	1.500.000,00
1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			32.825.090,00				140.433.600,00
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	1 Unit	15.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	53.433.600,00

						yang Disediakan	Semua Kel/Desa						
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.271.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	22.000.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	12.703.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	65.000.000,00
1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			11.900.000,00				71.936.700,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	27.500.000,00
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 Laporan	5.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	33.165.000,00

							a						
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.271.700,00
1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara			65.120.000,00				241.796.080,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	47.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	69.300.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	7.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	16.610.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	1 Unit	6.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	135.886.080,00

						ehabilitasi	Semua Kel/Desa						
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20.000.000,00
1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	""""""- LKS Anak Binaan - LKS Lanjut Usia Binaan - LKS Penyandang Disabilitas Binaan - % Karang taruna aktif			101.903.098,00				443.835.800,00
1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial			101.903.098,00				443.835.800,00
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	15.544.448,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	17.000.000,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Ko	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	11 Orang	64.898.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang	211.835.800,00

						ta yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel/Desa						
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	1.868.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Keluarga	11.500.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	17.392.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	38.500.000,00
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Sertifikat	2.198.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Sertifikat	165.000.000,00
1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				3.229.540.101,00				4.247.221.150,00
1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas**				3.225.928.851,00				4.243.821.150,00

					Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	3.184.306.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	3.279.056.400,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	8.970.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	66.855.800,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	9.030.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	869.708.950,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	- Kab. Pasaman Barat, Semua	5 Orang	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		5 Orang	10.000.000,00

						Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Alokasi Umum			
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	6.757.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	10.500.000,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	999.900,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Orang	1.100.000,00
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	1.098.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	1.100.000,00

						bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	999.500,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Orang	1.100.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	2.248.601,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	1.500.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	2.518.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	2.900.000,00
1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi			3.611.250,00				3.400.000,00

					Panti Sosial	kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM							
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	2.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	2.200.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	1.121.250,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Orang	1.200.000,00
1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			42.887.436,00				402.945.780,00
1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase data yang telah dikelola			42.887.436,00				402.945.780,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	7.044.936,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	92.764.980,00

1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62736 Keluarga	18.339.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		62736 Keluarga	178.180.800,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Keluarga	8.734.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Keluarga	49.500.000,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	8.769.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	82.500.000,00
1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		100%	107.872.389,00				100.000.000,00

						(SPM)							
1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagan bencana		100%	89.793.289,00				80.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	68.646.989,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	37.000.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	9.180.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	10.500.000,00
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	1 Unit	3.746.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	11.500.000,00

							Semua Kel/Desa					
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	4.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	12.500.000,00
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	3.809.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	8.500.000,00
1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana			18.079.100,00				20.000.000,00
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kampung	4.815.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kampung	5.000.000,00

1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Orang	13.264.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43 Orang	15.000.000,00
X					**NON URUSAN**				30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	30.412.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	47.500.000,00
TOTAL									**6.021.882.871,00**				**8.334.810.813,95**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyakarat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan bidang urusan pemerintah yaitu Bidang Urusan Sosial. Untuk program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan serta rencana tahun 2024 yang meliputi lokasi program / kegiatan, target capaian kinerja, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan maju tahun 2025. Berikut ini tabel rumusan berikut dengan kodefikasi subkegiatan yang mendukung pencapaian SPM dan atau program Unggulan (Progul) Daerah, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Sosial

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
					Tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial								
					Sasaran Terwujudny a birokrasi yang bersih dan akuntabel								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				5.991.470.421,00				8.287.310.813,95
1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				5.991.470.421,00				8.287.310.813,95
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**				2.509.267.397,00				3.093.308.083,95

					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			2.000.000,00				2.200.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	2.200.000,00
1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi keuangan			2.262.610.220,00				2.551.909.403,95
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Orang/bulan	2.022.665.220,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang/bulan	2.022.430.003,95
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	163.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	444.834.400,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	- Kab. Pasaman Barat, Semua	36 Dokumen	76.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		36 Dokumen	84.645.000,00

					asi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Alokasi Umum			
1	06	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian			9.254.000,00				40.532.300,00
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	3.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	21.505.000,00
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	2.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	9.028.400,00
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	2.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	9.998.900,00
1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan			125.558.087,00				44.500.000,00

						kantor							
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	18.216.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	18.000.000,00
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.982.187,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	13.000.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	88.359.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	1.500.000,00
1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan			32.825.090,00				140.433.600,00

					Urusan Pemerintah Daerah	kantor							
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	15.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	53.433.600,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.271.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	22.000.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	12.703.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	65.000.000,00
1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			11.900.000,00				71.936.700,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 Laporan	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	27.500.000,00

							a						
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	33.165.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.271.700,00
1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara			65.120.000,00				241.796.080,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	47.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	69.300.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	5 Unit	7.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	16.610.000,00

							Semua Kel/Desa						
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	135.886.080,00
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20.000.000,00
1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	"""""- LKS Anak Binaan - LKS Lanjut Usia Binaan - LKS Penyandang Disabilitas Binaan - % Karang taruna aktif			101.903.098,00				443.835.800,00
1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial			101.903.098,00				443.835.800,00
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	25 Orang	15.544.448,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	17.000.000,00

						Kabupaten/Kota	Kel/Desa						
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Orang	64.898.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang	211.835.800,00
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	1.868.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Keluarga	11.500.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	17.392.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	38.500.000,00
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Sertifikat	2.198.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Sertifikat	165.000.000,00

						Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS								
					Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Sosial Bagi PMKS								
1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				3.229.540.101,00				4.247.221.150,00
1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				3.225.928.851,00				4.243.821.150,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	3.184.306.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	3.279.056.400,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	35 Orang	8.970.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	66.855.800,00

						Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa						
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	9.030.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	869.708.950,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	10.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	6.757.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	10.500.000,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	999.900,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Orang	1.100.000,00

					Masyarakat	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	1.098.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	1.100.000,00
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	999.500,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Orang	1.100.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Ko	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10 Orang	2.248.601,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	1.500.000,00

						ta	a						
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	2.518.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	2.900.000,00
1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM			3.611.250,00				3.400.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	2.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	2.200.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	1.121.250,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Orang	1.200.000,00

1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			42.887.436,00				402.945.780,00
1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase data yang telah dikelola			42.887.436,00				402.945.780,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	7.044.936,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	92.764.980,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62736 Keluarga	18.339.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		62736 Keluarga	178.180.800,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Keluarga	8.734.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Keluarga	49.500.000,00

1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	8.769.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	82.500.000,00
					Tujuan Meningkatkan Penangan Korban bencana alam dan sosial								
					Sasaran Meningkatnya Penangan Korban bencana alam dan sosial								
1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (SPM)		100%	107.872.389,00				100.000.000,00
1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagan bencana		100%	89.793.289,00				80.000.000,00

1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	68.646.989,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	37.000.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	9.180.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	10.500.000,00
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.746.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	11.500.000,00
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Ko	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	4.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	12.500.000,00

						ta							
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	3.809.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	8.500.000,00
1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana			18.079.100,00				20.000.000,00
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kampung	4.815.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kampung	5.000.000,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Orang	13.264.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43 Orang	15.000.000,00

X					**NON URUSAN**				30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			30.412.450,00				47.500.000,00
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	30.412.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	47.500.000,00
TOTAL									**6.021.882.871,00**				**8.334.810.813,95**

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini merupakan kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Sosial pada Tahun 2024 mencakup 10 Kegiatan dalam 5 Program untuk mencapai 3 sasaran dan 3 tujuan. Namun demikian yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapai masyarakat Pasaman Barat yang sejahtera, demokratis dan agamais.

Simpang Empat, Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HERMANTO
NIP. 19651004 198802 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (Good Govermance). Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada RENSTRA 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan – masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Dina Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat di masa mendatang.

Simpang Empat, 14 Juli 2023
Kepala,

AZHAR, S.Pd
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19680803 198802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1
1. 2. Landasan Hukum 2
1. 3. Maksud dan Tujuan 3
1. 4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.. 7

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 29
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 32
2. 5. Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat..... 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 48

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 48
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 55
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... 65
BAB V PENUTUP..... 84
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Pasaman Barat.....	7
Tabel 2.1.2	Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022	16
Tabel 2.1.3	Target Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran Tahun 2021 – 2026.....	24
Tabel 2.1.4	Target Rencana Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
Tabel 2.1.5	Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022.....	26
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.....	28
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	33
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	46
Tabel 3.1.1	Telaah Terhadap Potensi Bidang Ketenagakerjaan	49
Tabel 3.1.2	Tealaah Terhadap Kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT No. 17 Tahun 2020)	55
Tabel 3.2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	55
Tabel 3.3.1	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	57
Tabel 3.3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan	59
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun setelah RPJPD, RPJMD dan Renstra ditetapkan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu bertangggung jawab terhadap:

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan/ kegiatan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selanjutnya, Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja mengalami perubahan dalam susunan organisasi, yang semula unsurnya terdiri dari bidang Tenaga Kerja, bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi, menjadi bidang Tenaga Kerja, bidang Hubungan Industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah :
"Untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dengan RPJMD".

1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja maupun Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Kronologi Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Kronologi dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan RKPD tahun bersangkutan, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan membuat Surat Keputusan Rencana Kerja tahun 2024 dan Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan pengertian ringkas Renja, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

1.3 penganggaran Perangkat Daerah.
Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud

1.4 dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,* memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,* memuat tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dan penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 *Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat,* bagian ini memuat tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DISNAKER sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target OPD antara lain misalnya:

1. Terlambatnya pengesahan anggaran.
2. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
3. Kenaikan indeks harga satuan barang.
4. Atau faktor lainnya.

Untuk pencapaian target program dan kegiatan tahun 2024, maka perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 (T-C.29.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					**Urusan Wajib**									
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**93,06**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**293,06**	**2,93**
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Pbln	25 Orang	25 Orang	25 Orang	1,00	25 Org/Bln	75	2,03
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	25 Orang	25 Orang	25 Orang	1,00	15 Orang	65	4,33
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bln	12 Bln	1,00	12 Bln	36	3,00
2	**07**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah yang Dikelola Disnaker**	**2 Orang**	**1 Orang**	**1 Orang**	**1 Orang**	**1,00**	**2 Orang**	**4**	**2,00**
2	07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Orang	0	0	0,00	2 Dokumen	3	1,50
2	07	01	2.03	06	Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	1 Orang	1 Orang	1,00	1 Laporan	2	2,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Kepega waian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	10 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	1,00	6 Orang	14	1,40
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	1 Paket	3	3,00
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	1 Paket	3	3,00
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	4 Paket	6	1,50
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	3 Paket	5	1,67
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Kali	30 Kali	30 Kali	1,00	30 Laporan	90	3,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan peralatan dan perleng kapan kantor**	**1 Unit**	**1 Gedung**	**0**	**0**	**0,00**	**1 Unit**	**2**	**2,00**
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1,00	1 Unit	3	3,00
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,00	12 Laporan	36	3,00
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,00	12 Laporan	36	3,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1,00	12 Laporan	16	1,33
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah sarana dan prasa rana kantor yang dipeli hara**	**32 Unit**	**24 Unit**	**7 Unit**	**7 Unit**	**1,00**	**32 Unit**	**57**	**1,78**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemelihara an,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1,00	3 Unit	15	5,00
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenda raan Dinas Opearsional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1,00	2 Unit	6	3,00
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	27 Unit	19	0,70
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi**	**3,00**	**1,92**	**2,12**	**3,06**	**1,44**	**2,32**	**7,3**	**2,43**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pelatihan yang difasilitasi**	**140 Orang**	**37 Orang**	**37 Orang**	**37 Orang**	**1,00**	**80 Orang**	**154**	**1,10**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	1,00	32 Orang	106	1,10

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	2 Rakor	3 Rapat Koordinasi	2 Rapat Koordinasi	0,67	15 Lembaga	19	1,27
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina**	**15 Lembaga**	**11 LPKS**	**13 LPKS**	**11 LPKS**	**0,85**	**13 LPKS**	35	2,33
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang Dibina	15 Lembaga	11 LPKS	13 LPKS	11 LPKS	0,85	13 Lembaga	35	2,33
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN KERJA**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**25**	**14,75**	**17,19**	**14,82**	**0,86**	**19,79**	**49,36**	**1,97**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota**	**Persantase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**345,64**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**545,64**	**5,46**
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	321 Orang	283 Orang	321 Orang	1,13	150 Orang	792	5,28
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalaui Program Perluasan Kesempatan Kerja	48 Orang	0	0	0	0,00	48 Orang	48	1,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	830 Orang	50 Orang	830 Orang	16,60	50 Orang	1710	34,20
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Imformasi Pasar Kerja**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**12 Dokumen**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**12 Dokumen**	**212**	**17,67**
2	07	04	2.03	02	Pelayanan Dan Penyediaan Imformasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,00	1000 Orang	1024	1,02
2	**07**	**04**	**2.03**	**01**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**100**	**1,00**
2	07	04	2.03	03	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	0	0	0	0,00	60 Orang	60	1,00
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**90**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**88**	**288**	**3,20**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftarn perjanjian kerja bersama**	**40 Perusahaan**	**40 Perusahaan**	**40 Perusahaan**	**40 Perusahaan**	**1,00**	**40 Perusahaan**	**110**	**2,75**
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan (100 %)	1,00	3 Perusahaan	13	2,60
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan (100 %)	1,00	3 Perusahaan	13	4,33
2	07	05	2.01	03	Penyelengggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30 Laporan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan (100 %)	1,00	25 Laporan	85	2,83

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyele saian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogol Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**15 Perkara**	**13 Kasus**	**15 Kasus**	**15 Kasus**	**1,00**	**13 Perkara**	**43**	**2,87**
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusa haan yang Berakibat/ Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisi han yang Terselesaikan	16 Perkara	13 Kasus	15 Kasus	15 Kasus	1,00	15 Perkara	43	2,69
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	15 Perkara	0 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	13 Perkara	13	0,87
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEM BANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang Difasilitasi Program SDM**	**10 Jorong**	**1 Jorong**	**17 Jorong**	**5 Jorong**	**0,29**	**10 Jorong**	**16**	**1,60**
3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan**	**10 Jorong**	**1 Jorong**	**17 Jorong**	**5 Jorong**	**0,29**	**10 Jorong**	**16**	**1,60**
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	50 KK	15 Orang	15 Orang	15 Orang	1,00	50 KK	80	1,60

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

Pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 5 (Lima) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp 5.197.839.192.- (Lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 4.904.388.885-, (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan persentase daya serap sampai Desember 2022 adalah sebesar 94,35%.

Anggaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 tersebar pada 4 (empat) bidang, 1) sekretariat, 2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas, 3) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, 4) Bidang Hubungan Industrial dan ESDM, yang digunakan untuk membiayai 5 (lima) program. Berikut rincian realisasi Kelima program tersebut beserta faktor penghambat dan pendukung adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran program ini sebesar Rp 4.113.681.692,- dan terealisasi sebesar Rp 3.862.239.393- atau 93,89 % dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk realisasi target program ini sebesar 100%.
   Faktor pendukung tercapainya realisasi target ini adalah
   a. Adanya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan.
   b. adanya dukungan dari semua pihak

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Anggaran program ini sebesar Rp 587.000.200,- dan terealisasi sebesar Rp 561.904.630,- atau 95,72 % dengan realisasi fisik 100 %. Untuk realisasi target program ini sebesar 3,06 dari target 2,12, sudah melebihi target.
   Faktor pendukung tercapainya realisasi target ini adalah
   a. Tersedianya tempat pelatihan yaitu gedung BLK
   b. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan walaupun baru tersedia 2 paket.
   c. Tersedianya pelatihan berbasis kompetensi
   d. Tersedianya instruktur untuk 4 (empat) bidang latihan yaitu pelatihan kelistrikan, TIK, otomotif, dan las.
   e. Tersedianya sarana prasarana pelatihan untuk kelistrikan, TIK dan otomotif walaupun masih belum memadai dan sarana prasarana untuk las belum ada sama sekali.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja
   Anggaran program ini sebesar Rp 387.850.150,- dan terealisasi sebesar Rp 376.820.012,- atau 97,16 % dengan realiasi fisik sebesar 100 %. Untuk realisasi target program ini sebesar 14,82 dari target yang ditetapkan sebesar 17,19
   Faktor penghambat tidak tercapainya realisasi target ini adalah:
   a. Kurangnya laporan dari pencari kerja yang terdaftar untuk melaporkan penempatannya.

4. Program Hubungan Industrial
   Anggaran program ini sebesar Rp 89.450.050,- dan terealisasi sebesar Rp 85.262.250,- atau 95,32 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Untuk realisasi target program ini sebesar 100% dari target 100%, tercapai target.
   Faktor pendukung tercapainya realisasi target ini adalah:
   a. Adanya perencanaan pelaksanaan kegiatan
   b. Adanya dukungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Anggaran program ini sebesar Rp 19.857.100,- dan terealisasi sebesar Rp 18.162.600,- atau 91,47 % dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk realisasi target program ini sebesar 5 Jorong dari 17 Jorong yang ditargetkan.
Faktor penghambat tidak tercapainya realisasi target ini adalah:
a. tidak tercapainya program ini karena terbatasnya anggaran.

Program dan kegiatan dengan realisasi tertinggi adalah program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 387.850.150,- dan terealisasi sebesar Rp 376.820.012,- atau 97,16 % dengan realiasi fisik sebesar 100 %, kegiatan ini tercapai karena adanya dukungan dari Dinas dan pihak terkait seperti anggota dewan yang telah menyalurkan dana pokirnya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target realisasi fisik dan keuangan hasil/keluaran yang direncanakan, dibawah 75%, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena adanya sisa pembayaran air dan listrik. Kedepannya akan dilakukan penyusunan perencanaan anggaran yang lebih matang.

Implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra adalah dapat mendorong capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu:
1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dengan indicator Tingkat Pengangguran Terbuka.
2. Meningkatnya kesejahteraan eks transmigrasi dengan indikator jumlah jorong eks transmigrasi yang dibina.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tatakelola dinas tenaga kerja dengan indikator a) Opini BPK atas laporan keuangan daerah, 2) Nilai SAKIP, 3) Level Maturitas SPIP.

Tindakan perencanaan dimasa yang akan datang adalah dinas akan lebih aktif dalam mencari informasi mengenai penempatan tenaga kerja serta mengusulkan anggaran yang lebih besar.

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.2 berikut ini :

Tabel 2.1.2
Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah** **Nilai SAKIP** **Level Maturitas SPIP**	**4.113.681.692**	**100,00**	**100,00**	**3.862.239.393**	**93,89**	
I.I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi keuangan**	**3.617.126.427**	**100,00**	**100,00**	**3.400.418.499**	**94.01**	
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	148.808.000	100,00	100,00	147.958.000	99,43	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	3.467.518.427	100,00	100,00	3.251.660.499	93,77	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	800.000	100,00	100,00	800.000	100,00	
I.II	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah yang dikelola DISNAKER**	**254.000**	**100,00**	**100,00**	**254.000**	**100,00**	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah uang makan petugas piket malam Non PNS(THL) yang melaksa nakan pengamanan BMD pada DISNAKER	0	0	0	0	0	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	254.000	100,00	100,00	254.000	100,00	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentse Terpenuhi nya Administrasi Kepegawaian**	**37.538.000**	**100,00**	**100,00**	**35.100.000**	**93,51**	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	37.538.000	100,00	100,00	35.100.000	93,51	
I.IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**311.284.550**	**100,00**	**100,00**	**307.143.656**	**98,67**	
7	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	7.572.0000	100,00	100,00	7.538.000	99,55	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan.	67.515.600	100,00	100,00	67.366.100	99,78	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.695.400	100,00	100,00	19.288.100	97,93	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	30.217.000	100,00	100,00	30.001.500	99,29	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	186.284.550	100,00	100,00	182.949.956	98,21	
I.V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**79.181.315**	**100,00**	**100,00**	**57.622.538**	**72,77**	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembur PNS dan Non PNS penunjang urusan kantor	16.810.000	100,00	100,00	16.417.000	97,66	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.171.315	100,00	100,00	35.005.538	63,45	Adanya sisa tagihan belanja air dan listrik
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa Kebersihan Kantor	7.200.000	100,00	100,00	6.200.000	86,11	
I.VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**68.297.400**	**100,00**	**100,00**	**61.700.700**	**90,34**	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilaku kan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	27.647.400	100,00	100,00	22.007.000	79,60	Adanya sisa pembayaran pajak
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilaku kan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas operasional atau lapangan	22.185.000	100,00	100,00	22.668.700	97,67	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penun jang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	18.465.000	100,00	100,00	18.025.000	97,62	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi**	**587.000.200**	**100,00**	**100,00**	**561.904.630**	**95,72**	
II.1	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Pelatihan yang difasilitasi**	**564.818.600**	**100,00**	**100,00**	**542.738.980**	**96,09**	
18	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	545.257.000	100,00	100,00	524.615.980	96,21	
19	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja berupa penguatan dan pemberdayaan SDC serta pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	19.561.600	100,00	100,00	18.123.000	92,65	
II.2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**	**22.181.600**	**100,00**	**100,00**	**19.165.650**	**86,40**	
20	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang melakukan Pembinaan	22.181.600	100,00	100,00	19.165.650	86,40	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**387.850.150**	**100,00**	**100,00**	**376.820.012**	**97,16**	
III.1	**Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/ Kota**	**Persantase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**314.965.650**	**100,00**	**100,00**	**308.264.100**	**97,87**	
21	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	28.821.850	100,00	100,00	26.150.800	90,73	
22	Perluasan Kesempatan Kerja		286.143.800	100,00	100,00	282.113.300	98,59	
III.2	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan**	**72.884.500**	**100,00**	**100,00**	**68.555.912**	**94,06**	
23	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	32.502.500	100,00	100,00	31.816.250	97,89	
IV	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi**	**89.450.050**	**100,00**	**100,00**	**85.262.250**	**95,32**	
IV.1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**61.049.850**	**100,00**	**100,00**	**58.019.300**	**95,04**	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang terdaftar pada Perjanjian Kerjasama	7.902.500	100,00	100,00	7.243.500	91,66	
25	Penyelengggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	53.147.350	100,00	100,00	50.775.800	95,54	
IV.2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogol Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**28.400.200**	**100,00**	**100,00**	**27.242.950**	**95,93**	
26	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	24.135.700	100,00	100,00	23.363.950	96,80	
27	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kerjasama Tripartit yang terbentuk dan dibina	4.264.500	100,00	100,00	3.879.000	90,96	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI	TOTAL REALISASI			KET
				FISIK	FISIK	KEUANGAN		
				(%)	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM**	**19.857.100**	**100,00**	**100,00**	**18.162.600**	**91,47**	
V.1	**Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah Penyelesaian Permasalahan di Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi**	**19.857.100**	**100,00**	**100,00**	**18.162.600**	**91,47**	
28	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pelatihan penguatan SDM	19.857.100	100,00	100,00	18.162.600	91,47	
JUMLAH			**5.197.839.192**	**100,00**	**100,00**	**4.904.388.885**	**94,35**	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Sebagai penjelasan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 terdapat 4 (Empat) tambahan indikator sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 dari Dokumen Renstra awal karena pada Dokumen RPJMD sudah tertuang 12 (Dua belas) indikator sasaran terkait urusan Dinas Ketenaga kerjaan sedangkan pada Renstra awal baru 8 (Delapan) indikator dicantumkan, namun dalam penyusunan Perubahan Renstra ada 1 (satu) indikator yang tidak ditambahkan karena indikator sasaran ini sudah diakomodir ke dalam indikator tujuan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jadi ada 3 (Tiga) indikator yang ditambahkan, kekurangan 3 indikator tersebut adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
3. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja

Tindakan perencanaan dimasa yang akan datang adalah dinas akan lebih aktif dalam mencari informasi mengenai penempatan tenaga kerja serta mengusulkan anggaran yang lebih besar.

Adapun tujuan, sasaran dan target indikator yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 -2026 dan target tahun 2024 sbb:

Tabel 2.1.3
Target Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	4	5	6			7
1	Persentase penurunan temuan BPK	75	**75**	**75**	**75**	**80**	**80**
2	Level Manuritas SPIP	3	3	3	3	3	3
3	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	85,00	85,70	85,80	86,00
5	Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja	NA	NA	68,24	68,49	68,75	69
6	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	15,79	17,79	19,79	21,79	23,79	25.00
7	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berba sis kompetensi	1,92	2,12	2,32	2,52	2,75	3
8	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	NA	NA	58,95	60,97	62,98	65,00
9	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan	17.562	18.088	18.630	19.188	19.763	20.355
10	Besaran kasus yang diselesai kan dengan perjanjian bersama (PB)	86	87	88	89	90	90
11	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	15	17	10	10	10	10

Sumber: RPJMD Kab. Pasaman Barat

Tabel 2.1.4
Target Rencana Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penurunan temuan BPK	75
	Level Manuritas SPIP	3
	Nilai SAKIP	B
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,70
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,49
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	21,79
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2,52
	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja	60,97
Meningkatnya Perlindungan Ketenaga kerjaan	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan	19.188
	Besaran kasus yang diselesai kan dengan perjanjian bersama (PB)	89
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	10

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

Realisasi capaian kinerja rata-rata capaian 8 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebesar 100.28 %. Tingkat capaian tertinggi pada indikator kinerja adalah Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dari target nilai 2.12 dan terealisasi dengan nilai 144**,**34 %, dan tingkat capaian terendah ada pada indikator Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi Program Penguatan SDM dengan target 17 terealisasi 5, rendahnya tingkat capaian pada indikator ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk merealisasikan jumlah eks transmigrasi yang difasilitasi dari 17 jorong terealisasi hanya 5 jorong, sehingga tidak mencapai target, capaian realisasi rendah lainnya ada pada indikator persentase pencari kerja terdaftar

yang ditempatkan dari target 17,19 terealisasi sebesar 14,82 dengan capaian realisasi sebesar 86,21, ini dikarenakan kurangnya laporan dari pencari kerja yang terdaftar untuk melaporkan penempatannya, dan diharapkan kedepannya Dinas Tenaga Kerja lebih aktif dalam mencari data atau informasi mengenai pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Dan untuk capaian indikator Persentase penurunan temuan BPK, Level Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) untuk capaian realisasi masing-masing indikator nilainya sudah memuaskan. Kedepannya akan dilakukan penyusunan perencanaan anggaran yang lebih matang, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 3.2.1 diatas

Rumus Persentase Capaian Hasil = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ X 100

realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.5 sebagai berikut :

Tabel 2.1.5
Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penurunan temuan BPK	85	95	111,76
		Level Manuritas SPIP	B	B	100,00
		Nilai SAKIP	B	B	100,00
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17,19	14,82	86,21
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2,12	3,06	144,34
4	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan	18.088	19.597	108,34
		Besaran kasus yang diselesai kan dengan perjanjian bersama (PB)	87	93	106,90
5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	17	5	29,41

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada penjabaran RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi 1 dan Misi 3 yang berbunyi Misi Ke-1 yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan inovatif dengan tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik dan sasarannya adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik. Dan Misi Ke-3 yaitu Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan Inklusif dengan tujuan Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi dan sasarannya adalah 1) Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja, Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan 2) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi.

Kemudian Misi ke 3 ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah berbasis pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan sementara sasarannya adalah menurunnya tingkat pengangguran dengan strategi dan arah kebijakannya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan Tenaga Kerja;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja;
d. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil walaupun dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan atau dengan kata lain harus ada penajaman beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun anggaran 2021 - 2026, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) yang akan dicapai dapat dilihat pada table 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

No	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6			7		8	10	11	12
1	Persentase penurunan temuan BPK		75	75	75	75	80	80	75	95	75	75	
2	Level Manuritas SPIP		3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	
3	Nilai SAKIP		B	B	B	B	B	B	BB	B	B	B	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat		NA	NA	85,00	85,70	85,80	86,00	NA	NA	85,00	85,70	
5	Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja		NA	NA	68,24	68,49	68,75	69,00	66,93	63,88	68,24	68,49	
6	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		15,79	17,79	19,79	21,79	23,79	25.00	23,6	14,82	19,79	21,79	
7	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		1,92	2,12	2,32	2,52	2,75	3	6,64	3,06	2,32	2,52	
8	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja		NA	NA	58,95	60,97	62,98	65,00	NA	NA	58,95	60,97	
9	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan		17,562	18.088	18,63	19,188	19,763	20,355	27,875	19.597	18,63	19,188	
10	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		86	87	88	89	90	90	13	93	88	89	
11	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM		15	17	10	10	10	10	30	5	10	10	

Sumber: BPS Kab. Pasaman Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan prioritas nasional yang berjumlah 7 (Tujuh) buah, maka program prioritas kementerian tenaga kerja masuk ke dalam proiritas nasional pertama yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Kemudian prioritas nasional yang ketiga yaitu SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan
4. Penurunan angka pengangguran
5. Pelaksanaan sistem Jaminan sosial nasional
6. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah
7. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan yang dilaksanakan
8. Meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat.
9. Meningkatkan pembinaan kawasan transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM

Sedangkan Sasaran besar lainnya yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan jumlah tenaga profesional yang berkeahlian
2. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja
3. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum
4. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dengan pengusaha
5. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri
6. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat

Dalam mengamati isu-isu penting tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergi program dengan lintas OPD/Lembaga teknis yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum dapat dikatakan optimal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat melatih sumber daya manusia untuk mengelola informasi pasar kerja seperti mengikuti Bimbingan Teknis, sedangkan sinergi program belum berjalan sebagaimana mestinya untuk menggerakkan dan memotivasi OPD dan lembaga lain yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan kegiatan ketenagakerjaan.

a. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
Permasalahan utama Ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Pasaman Barat adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan
1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja,
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,
3. Masih rendahnya kualitas pencari kerja,
4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja,
5. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah
6. Kurang akuratnya data ketenagakerjaan terutama data angkatan kerja.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
1. Dinas Tenaga Kerja berupaya untuk memberikan pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau untuk usaha sendiri seperti pelatihan satpam, pelatihan perbengkelan, dll untuk meningkatkan skil dan keterampilan pencari kerja.
2. Menjalankan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dengan memberikan pelatihan dan bantuan usaha agar para penganggur bisa membuka usaha sendiri seperti pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, dll. Kegiatan ini tentunya terbatas jumlah peserta dan bantuan usahanya sesuai dengan anggaran yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Pasaman Barat, dunia usaha, dunia industry, lembaga diklat serta pemerintah daerah/OPD terkait dengan menjalankan forum Skill Development Center (SDC).
4. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk pelatihan produktifitas dan kegiatan lain.
5. Meningkatkan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
6. Meningkatkan sosialisasi tentang ketenagakerjaan baik bagi pencari kerja maupun pekerja.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan di BLK.
8. Menyusun rencana aksi kegiatan untuk pencapaian target hasil pengukuran kinerja.

b. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional.
Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, bahwa Visi Kepala Daerah adalah *Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera.* Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat berupaya melaksanakan Misi 1 dan Misi 3 Kepala Daerah yaitu :
a. Misi 1 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.
b. Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan Inklusif.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut, untuk pencapaian pembangunan daerah telah ditetapkan Program urusan

Ketenagakerjaan dan urusan Ketransmigrasian termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut.

c. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

Masalah Ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Ketenagakerjaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah tidak seimbangnya *demand* dan *supply* Tenaga Kerja. Ketidakseimbangan ini salah satunya dipengaruhi oleh ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antara pasar kerja dan penggunaan tenaga kerja. Implikasinya masih banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang dengan sendirinya menaikkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan kondisi lingkungan pada organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal yang meliputi *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

1. Adanya Misi dan Misi yang jelas;
2. Adanya Peraturan Perundangan yang berlaku pada bidang ketenagakerjaan;
3. Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja yang cukup tinggi;
4. Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerjaan.

KELEMAHAN (W) :

1. Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur bidang ketenagakerjaan;
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
3. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
4. Tersebar dan belum teridentifikasinya potensi ketenagakerjaan sehingga menyulitkan pengembangannya;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelatihan di BLK
7. Kurang aktifnya petugas layanan IPK untuk permintaan data pencari kerja yang telah ditempatkan.
8. Kurangnya sumber daya aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

1. Besarnya potensi ketenagakerjaan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat;
2. Adanya permintaan TKI ke Luar Negeri;
3. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan dalam peningkatan kualitas angkatan kerja;

ANCAMAN (T) :

1. Lemahnya sinergitas dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
2. Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
3. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global terutama MEA.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun Rencana Kegiatan, Dinas Tenaga Kerja tetap mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/ prioritas Dinas yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.254.645.202,- (Lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua rupiah) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2024. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Setelah keluarnya Penetapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 maka pagu untuk program kegiatan Dinas Tenaga Kerja berubah menjadi Rp. 4.121.970.100,- (Empat milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya pekerjaan mendesak yang harus dilaksanakan disebabkan adanya program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang harus juga dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada table 2.4.1 berikut ini:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat
Tabel 2.4.1

OPD : Dinas Tenaga Kerja

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3,523,648,736**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.859.384.450**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Realisasi keuangan**	**100 %**	**2,878,404,784**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Realisasi keuangan**	**100 %**	**3.524.420.715**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasbar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln	2,598,790,888	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasbar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln	3.236.080.915	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	214,693,896	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	170.619.850	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pasbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	64,920,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pasbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	117.719.950	
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah yang dikelola DISNAKER**	**2 Orang**	**18,224,880**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah yang dikelola DISNAKER**	**2 Orang**	**9.590.200**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pasbar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8,624,880	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pasbar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasbar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,600,000	Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasbar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.589.200	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentse Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**119,134,062**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentse Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**20.003.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pasbar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	6,134,062	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pasbar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	1.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pasbar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pasbar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pasbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	4 Orang	40,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pasbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	4 Orang	1.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8 Org	33.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8 Org	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 persen**	**203,922,360**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 persen**	**186.072.125**	
7	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pasbar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,317,000	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pasbar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.995.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasbar	Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69,957,360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasbar	Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.179.400	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pasbar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10,648,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pasbar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	19.920.725	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Pasbar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Pasbar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporani	90,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporani	89.977.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**1 Paket**	**106.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**1 Paket**	**2.000**	
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasbar	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	106.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasbar	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pasbar	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pasbar	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	1.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100 persen**	**118,075,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100 persen**	**45.900.710**	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.998.710	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	12 Laporan	33.275.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	12 Laporan	2.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**32 Unit**	**79,887,650**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**32 Unit**	**73.395.700**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Jasa Pemelihara an,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasbar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	33,097,000	Penyediaan Jasa Pemelihara an,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasbar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30.800.700	
19	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	Pasbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	31,950,000	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	Pasbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	33.975.000	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	14,840,650	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	8.620.000	
II	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Rencana Tenaga Kerja yang Disusun**	**2 Dokumen**	**104,040,000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Rencana Tenaga Kerja yang Disusun**	**2 Dokumen**	**2.000**	
8	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang Disusun**	**2 Dokumen**	**104,040,000**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang Disusun**	**2 Dokumen**	**2.000**	
21	Penyusunan Renacana Tenaga Kerja Makro	Pasbar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	52,020,000	Penyusunan Renacana Tenaga Kerja Makro	Pasbar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1.000	
22	Penyusunan Renacana Tenaga Kerja Mikro	Pasbar	Jumlah Kegiatan Tenaga Kerja Mikro	1 Perusahaan	52,020,000	Penyusunan Renacana Tenaga Kerja Mikro	Pasbar	Jumlah Kegiatan Tenaga Kerja Mikro	1 Perusahaan	1.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**		**Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta**	**2,52 %**	**1,014,390,000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**		**Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta**	**2,52 %**	**150.152.650**	
9	**Pelaksanaan Pelatihan Ber dasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Pelatihan yang difasilitasi**	**100 Orang**	**633,240,000**	**Pelaksanaan Pelatihan Ber dasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Pelatihan yang difasilitasi**	**100 Orang**	**140.196.000**	
23	Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	367,040,000	Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	115.000.500	
24	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyedia an Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pasbar	Jumlah Kesepakatan/Koordi nasi Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	242,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyedia an Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pasbar	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	25.194.500	
25	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana pelatihan kerja	2 Unit	24.200.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana pelatihan kerja	2 Unit	1.000	
10	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**	**15 LPKS**	**102,850,000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**	**15 LPKS**	**9.953.650**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pasbar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang Dibina	14 Lembaga	102,850,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pasbar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang Dibina	14 Lembaga	9.953.650	
11	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**Jumlah Lembaga Pelatihan kerja yang memperoleh perizinan terintegrasi**	**14 LPKS**	**60,500,000**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**Jumlah Lembaga Pelatihan kerja yang memperoleh perizinan terintegrasi**	**14 LPKS**	**1.000**	
27	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Pasbar	Jumlah Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	60,500,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Pasbar	Jumlah Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	1.000	
12	**Konsultansi Produkti vitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah konsultasi produktifitas yang dilakukan pada perusahaan kecil**	**8 Konsultasi**	**96,800,000**	**Konsultansi Produkti vitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah konsultasi produktifitas yang dilakukan pada perusahaan kecil**	**8 Konsultasi**	**1.000**	
28	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pasbar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivfitas	8 Perusahaan	96,800,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pasbar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivfitas	8 Perusahaan	1.000	
13	**Pengukuran Produktivi tas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen pengukuran produktifitas Kabupaten Pasaman Barat**	**1 Dokumen**	**121,000,000**	**Pengukuran Produktivi tas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen pengukuran produktifitas Kabupaten Pasaman Barat**	**1 Dokumen**	**1.000**	
29	Pengukuran Kompeten si dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	121.000.000	Pengukuran Kompeten si dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**PROGRAM PENEMPATAN KERJA**		**% Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan**	**21,79**	**426,564,000**	**PROGRAM PENEMPATAN KERJA**		**% Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan**	**21,79**	**50.008.000**	
14	**Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota**		**Persantase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	100 persen	**247,229,000**	**Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota**		**Persantase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	100 persen	**22.138.000**	
30	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Pasbar	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yg Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-Lain Untuk Peningkatan Kompetensi	7 Orang	21,000,000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Pasbar	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yg Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-Lain Untuk Peningkatan Kompetensi	7 Orang	1.000	
31	Pelayanan Antar Kerja	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	94,850,250	Pelayanan Antar Kerja	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	1.000	
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalaui Program Perluasan Kesempatan Kerja	48 Orang	31,642,250	Perluasan Kesempatan Kerja	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalaui Program Perluasan Kesempatan Kerja	48 Orang	14.525.000	
33	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pasbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	11,256,500	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pasbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	7.610.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	**2 Orang**	**426,564,000**	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	**2 Orang**	1.000	
15	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penerbitan izin Lembaga LPTKS**	**2 Paket**	**12,750,000**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penerbitan izin Lembaga LPTKS**	**2 Paket**	**2.000**	
35	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Pasbar	Jumlah Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	1 Lembaga	5,500,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Pasbar	Jumlah Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	1 Lembaga	1.000	
36	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pasbar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dgn Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	7,250,000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pasbar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dgn Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	1.000	
16	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah Dokumen Informasi Pasar Kerja**	**12 Dokumen**	**156,650,000**	**Pengelolaan Imformasi Pasar Kerja**		**Jumlah Dokumen Informasi Pasar Kerja**	**12 Dokumen**	**15.432.000**	
37	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pasbar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	38,500,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pasbar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	1.000	
38	Pelayanan Dan Penyediaan Imformasi Pasar Kerja Online	Pasbar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	85,650,000	Pelayanan Dan Penyediaan Imformasi Pasar Kerja Online	Pasbar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	15.430.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Job Fair/Bursa Kerja	Pasbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	32.500.000	Job Fair/Bursa Kerja	Pasbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	1.000	
17	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)**	**100 persen**	**9,935,000**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)**	**100 persen**	**12.436.000**	
40	Peningkatan Pelindu ngan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pasbar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	2,350,000	Peningkatan Pelindu ngan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pasbar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	12.434.000	
41	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pasbar	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	15 Orang	3,000,000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pasbar	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	15 Orang	1.000	
42	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pasbar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	4,585,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pasbar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	1.000	
V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**89**	**186,002,466**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**89**	**52.423.000**	
18	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**40 Perusahaan**	**108,502,466**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**40 Perusahaan**	**15.470.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pasbar	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahaan	36,002,466	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pasbar	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahaan	1.000	
44	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pasbar	Jumlah perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 Perusahaan	28,000,000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pasbar	Jumlah perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 Perusahaan	1.000	
45	Penyelengggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pasbar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan	44,500,000	Penyelengggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pasbar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan	15.468.000	
19	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	13 Perkara	**77,500,000**	**Pencegahan dan Penyele saian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogol Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	13 Perkara	**36.953.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	6,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	1.000	
47	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusa haan yang Berakibat/ Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pasbar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	13 Perkara	46,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusa haan yang Berakibat/ Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pasbar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	13 Perkara	15.540.000	
48	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	3.500,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	21.410.000	
49	Penyelenggaraan Verifi kasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pasbar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1,500,000	Penyelenggaraan Verifi kasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pasbar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1.000	
50	Pengembangan Pelaksa naan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pasbar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19188 Orang	20,500,000	Pengembangan Pelaksa naan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pasbar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19188 Orang	1.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang Difasilitasi Program SDM**	**10 Jorong**	**110,250,000**	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang Difasilitasi Program SDM**	**10 Jorong**	**10.000.000**	
20	**Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**		**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan**	**10 Jorong**	**110,250,000**	**Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**		**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan**	**10 Jorong**	**10.000.000**	
51	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Pasbar	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	50 Kepala Keluarga	110,250,000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Pasbar	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	50 Kepala Keluarga	10.000.000	
	TOTAL				**5.254.645.202**	**TOTAL**				**4.121.970.100**	

Sumber Data: RKPD Kabupaten Pasaman Barat

2.5 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja tidak ada. Untuk tahun 2024 ada lima usulan kegiatan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2024 yang menjadi prioritas daerah dan akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak dua paket pelatihan tekhnik otomotif, Kecamatan Talamau sebanyak satu paket pelatihan TIK (Desain Grafis), dan Kecamatan Sungai Aur sebanyak dua paket pelatihan tekhnik otomotif, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.1.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

No					*Kegiatan*	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Volume*	*Besaran*	*Catatan*
1					2	3	4	5	6	7
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**		**Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta**	80 Orang	1.532.107.000,-	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Ber dasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Pelatihan yang difasilitasi**			
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Jorong Pasa Lamo, Kelurahan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	1 Paket (16 Orang)	356.119.600,-	Pendidikan dan Pelati han Kete rampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Tekhnik Otomoti
					Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Jorong Sialang, Kelurahan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	1 Paket (16 Orang)	356.119.600,-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampil an Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Tekhnik Otomotif)
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Nagari Sinuruik, Kelurahan Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	1 Paket (16 Orang)	107.628.600,-	Pendidikan dan Pelati han Kete rampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Kejuruan TIK (Desain Grafis))

					Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Jorong Bukit Harapan, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	1 Paket (16 Orang)	356.119.600,-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampil an Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Tekhnik Otomotif)
					Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Jorong Sarasah Betung, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	1 Paket (16 Orang)	356.119.600,-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampil an Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Tekhnik Otomotif)

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada terdapat 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitik beratkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas Sumber Daya Ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ini menitik beratkan kepada pengguna pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Menigkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan dasar. Misalnya pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Agenda ini dititik beratkan kepada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik.

Selain hal tersebut memasuki periode pembangunan 2020-2024 dan merujuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa lingkup wewenang, tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan secara substansi tidaklah memiliki banyak perubahan. Tugas Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan tetap meliputi fungsi teknis Ketenagakerjaan di bidang Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, fungsi non-teknis juga tetap meliputi berbagai hal, seperti: dukungan administratif dan substansi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengawasan atas pelaksanaan tugas, perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Meskipun tidak terjadi perubahan yang mendasar, namun bukan berarti Kementerian Ketenagakerjaan hanya melakukan proses business as usual. Kondisi yang demikian justru menjadi modal dasar untuk melaksanakan berbagai terobosan strategis guna mengoptimalkan potensi pembangunan serta mengatasi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

1) Telaah terhadap Potensi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan periode 2020-2024 terdapat sejumlah potensi yang harus dioptimalkan. Pertama, potensi optimalisasi penciptaan lapangan kerja dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hadirnya UU ini berpotensi meningkatkan permintaan tenaga kerja dikarenakan adanya regulasi yang mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentunya sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19. Dalam konteks yang demikian, tantangan yang muncul kemudian adalah perumusan peraturan perundang-undangan turunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan, yang memiliki keselarasan "nafas" dan semangat dengan UU Cipta Kerja sebagai payung hukumnya. Kedua, bonus demografi dan karakteristik angkatan kerja muda (generasi Z).

Tabel 3.1.1

No	Visi/Misi	Potensi Bidang Tenaga Kerja	Hasil Telaah
1	Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Potensi optimalisasi penciptaan lapangan kerja dengan hadirnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Komposisi penduduk suatu wilayah tidak terlepas dari perhitungan angka beban tanggungan yaitu untuk mengetahui proporsi penduduk yang belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan proporsi penduduk yang tidak produktif lagi (kelompok umur 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (kelompok umur 15-64 tahun). Persentase penduduk di Kabupaten Pasaman Barat yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) pada Tahun 2021 sebesar 66,79 persen sedangkan penduduk belum produktif sebesar 33,21 persen dan penduduk yang tidak produktif lagi sebesar 5,06 persen. Kondisi yang seperti ini tentunya menjadi insentif bagi perekonomian jika dapat dimanfaatkan

			secara optimal, mengingat besarnya jumlah penduduk usia produktif. Dari sisi regulasi, UU Cipta Kerja sebenarnya sudah memberikan payung hukum bagi hal tersebut.
		Bonus demografi dan karakteristik angkatan kerja muda (generasi Z)	Dilihat dari bonus demografi dengan angkatan kerja usia produktif sebesar 66,79 persen dan didominasi oleh angkatan kerja muda (generasi Z), Kabupaten Pasaman Barat akan dapat meningkatkan daya saing SDMnya. Dengan banyaknya tingkat angkatan kerja yang produktif harusnya ini menjadi peluang yang besar bagi Kabupaten Pasaman Barat. Kebanyakan generasi Z lebih menyukai pekerjaan yang flexibel dan berbasis teknologi. Dinas Tenaga Kerja melalui stakeholder harus mampu menyediakan lapanga pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
		Potensi meningkatnya terhadap jenis-jenis pekerjaan baru akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital, dan menghadapi revolusi industry 5.0 dan society 5.0	Potensi meningkatnya permintaan terhadap jenis-jenis pekerjaan baru akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Pada era sekarang ini, teknologi digital membawa banyak perubahan dalam berbagai kehidupan. Dalam sektor ekonomi, terjadi transformasi industri yang mengarah pada bentuk-bentuk industry 4.0. Revolusi Industri 4.0 belum sampai satu dekade tapi pada tahun 2019/2020 sudah berkembang Revolusi Industri

			5.0. Persyaratan untuk menuju Revolusi Industri 5.0 adalah: Kinerja tenaga kerja terlatih akan lebih baik: Dengan teknologi yang begitu maju, dibutuhkan tenaga kerja terlatih yang berspesialisasi dalam bidang tersebut. Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat yang saat ini sudah mempunyai UPT BLK mempunyai rencana untuk mengembangkan potensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan revolusi 5.0 dengan merencanakan program pelatihan berbasis teknologi. Namun kendala yang ada saat ini adalah program pelatihan tersebut harus di dukung dengan tenaga pengajar/instruktur yang mumpuni di bidangnya. Penyediaan instruktur pada UPT BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada saat ini masih terbatas pada program Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sektor potensial di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Untuk realisasi pelatihan di tahun 2022 baru 2 program pelatihan yang dilaksanakan, dengan serapan peserta 32 orang dan 10 orang sudah diserap oleh perusahaan yang ada dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
		Pekerjaan yang lebih produktif diluar sektor	Potensi produktivitas sektor yang ada di Kabupaten

		pertanian akibat transformasi sektoral penduduk bekerja.	Pasaman Barat saat ini masih fokus kepada sektor pertanian. Selain pertanian ada 2 sektor potensial lainnya yang menjadi fokus yaitu; sektor perkebunan dan sektor perikanan. Ketiga sektor ini menjadi fokus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dalam penempatan peserta hasil binaan UPT BLK. Untuk sektor pekerjaan yang saat ini sudah menuju industry 5.0 akan menjadi fokus untuk Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat dan tentunya harus sejalan dengan program kegiatan UPT BLK.
		Meningkatnya jumlah penduduk berwirausaha	Perkembangan UMKM di Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal dilaksanakan dan terdata. Masih banyak potensi UMKM yang harus mendapatkan perhatian, salah satunya online entrepreneur. Perkembangan ekonomi digital dan teknologi memacu tumbuhnya online entrepreneur. Online entrepreneur di Kabupaten Pasaman Barat sendiri belum terdaftar.
		Perkembangan agribisnis perdesaan dan ekonomi kreatif	Salah satu strategi pembangunan dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan isu/permasalahan strategis di Indonesia adalah pembangunan agribisnis. Strategi pembangunan sistem agribisnis yang bercirikan yakni berbasis pada pemberdayagunaan keragaman sumberdaya yang

			ada di setiap daerah *(domestic resources based)*, akomodatif terhadap keragaman kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, tidak mengandalkan impor dan pinjaman luar negeri yang besar, berorientasi ekspor (selain memanfaatkan pasar domestik), diperkirakan mampu memecahkan sebagian besar permasalahan perekonomian yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aktor utama dalam pergerakan agribisnis perdesaan maupun ekonomi kreatif, namun di Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah SDM produktif sebanyak 66,79 persen belum terkelola dengan maksimal. Dengan jumlah yang besar tersebut dan dengan adanya UPT BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat diharapkan akan dapat mengelola SDM yang produktif tersebut.
		Penempatan tenaga kerja di luar negeri dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SISKOTKLN dari tahun 2018-2022 dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada tahun 2018 jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 9 orang dan terjadi peningkatan sebesar 111,11% menjadi 19 orang ditahun 2019. Tahun 2020 tidak ada penempatan Pekerja

			Migran Indonesia (PMI) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Ditahun 2021 penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdata di aplikasi aplikasi SISKOTKLN adalah sebanyak 2 orang dan mengalami kenaikan sebesar 400% menjadi 10 orang pada tahun 2022. Potensi pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang besar di Kabupaten Pasaman Barat seiring dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja produktif yang yang ada. Banyaknya jumlah potensi ini nantinya jika dikelola dengan baik maka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, namun juga menggerakkan perekonomian di daerah asal PMI.

2) Telaah Terhadap Kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari: i) Lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, jawa-luar jawa, dan antara kawasan Timur-Barat ii) Rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland) termasuk antara kota dan desa.

Tujuan pembangunan bidang Transmigrasi adalah terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah Sasaran: Meningkatkan status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi Indikator: i) rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi, ii) rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi.

Berdasarkan Renstra KDPDTT, salah satu lokus kawasan transmigrasi prioritas kementerian adalah Ranah Balingka Beremas

Tabel 3.1.2
Telaahan Terhadap Kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2020)

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Hasil Telaah
1	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.	Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear and clean (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang . Namun adanya penetapan kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kawasan transmigrasi prioritas kementerian membuat pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi lebih fokus.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Misi 1 dan Misi 3 Kepala Daerah, yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penurunan temuan BPK
			Level Manuritas SPIP
			Nilai SAKIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat

2.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
			Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berba sis kompetensi
			Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja
		Meningkatnya Perlindungan Ketenaga kerjaan	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan
			Besaran kasus yang diselesai kan dengan perjanjian bersama (PB)
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Pasaman Barat

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (Enam) program yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) kegiatan.

Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

a. Tujuan Dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
4. Meningkatnya Perlindungan Ketenaga kerjaan
5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi

b. Nama Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja
1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

III. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
4. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja
1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Hubungan Industrial
1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 3.3.1 berikut ini :

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nama Program dan Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penurunan temuan BPK	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
			Level Manuritas SPIP	
			Nilai SAKIP	

			Indeks Kepuasan Masyarakat	Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja 1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 4. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja	
		Meningkatnya Perlindungan Ketenaga kerjaan	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan	Program Hubungan Industrial 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Tabel 3.3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.859.384.450**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Realisasi keuangan**	**100 %**	**3.524.420.715**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasbar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln	3.236.080.915	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	170.619.850	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pasbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	117.719.950	
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah yang dikelola DISNAKER**	**2 Orang**	**9.590.200**	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pasbar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasbar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.589.200	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentse Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**20.003.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pasbar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	1.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pasbar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pasbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	4 Orang	1.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	12
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8 Org	20.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 persen**	**186.072.125**	
7	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pasbar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.995.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasbar	Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.179.400	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pasbar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	19.920.725	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Pasbar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	89.977.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**1 Unit**	**2.000**	
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasbar	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pasbar	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Unit	1.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100 persen**	**45.900.710**	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	
15	Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.998.710	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	12 Laporan	2.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	12
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**32 Unit**	**73.395.700**	
18	Penyediaan Jasa Pemelihara an,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasbar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30.800.700	
19	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	Pasbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	33.975.000	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	8.620.000	
II	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Rencana Tenaga Kerja yang Disusun**	**2 Dokumen**	**2.000**	
8	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang Disusun**	**2 Dokumen**	**2.000**	
21	Penyusunan Renacana Tenaga Kerja Makro	Pasbar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1.000	
22	Penyusunan Renacana Tenaga Kerja Mikro	Pasbar	Jumlah SDM Perusahaan yg mampu menyusun RTK Mikro	1 Orang	1.000	
III	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**		**Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta**	**2,52 %**	**150.152.650**	
9	**Pelaksanaan Pelatihan Ber dasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Pelatihan yang difasilitasi**	**100 Orang**	**140.196.000**	
23	Proses Pelaksanaan Pendidi kan dan Pelatihan Keteram pilan bagi Pencari Kerja Ber dasarkan Klaster Kompetensi	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	115.000.500	
24	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyedia an Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pasbar	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	25.194.500	
25	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana pelatihan kerja	2 Unit	1.000	
10	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**	**15 LPKS**	**9.953.650**	
26	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pasbar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang Dibina	14 Lembaga	9.953.650	
11	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**Jumlah Lembaga Pelatihan kerja yang memperoleh perizinan terintegrasi**	**14 LPKS**	**1.000**	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	12
27	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Pasbar	Jumlah Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	1.000	
12	**Konsultansi Produkti vitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah konsultasi produktifitas yang dilakukan pada perusahaan kecil**	**8 Konsultasi**	**1.000**	
28	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pasbar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivfitas	8 Perusahaan	1.000	
13	**Pengukuran Produktivi tas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen pengukuran produktifitas Kabupaten Pasaman Barat**	**1 Dokumen**	**1.000**	
29	Pengukuran Kompeten si dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.000	
IV	**PROGRAM PENEMPATAN KERJA**		**% Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan**	**21,79**	**50.008.000**	
14	**Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota**		**Persantase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	100 persen	**22.138.000**	
30	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Pasbar	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yg Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-Lain Untuk Peningkatan Kompetensi	7 Orang	1.000	
31	Pelayanan Antar Kerja	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	1.000	
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalaui Program Perluasan Kesempatan Kerja	48 Orang	14.525.000	
33	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pasbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	7.610.000	
34	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pasbar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	**2 Orang**	1.000	
15	**Penerbitan Izin Lemba ga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penerbitan izin Lembaga LPTKS**	**2 Paket**	**2.000**	
35	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Pasbar	Jumlah Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	1 Lembaga	1.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	12
36	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pasbar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dgn Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	1.000	
16	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah Dokumen Informasi Pasar Kerja**	**12 Dokumen**	**15.432.000**	
37	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pasbar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	1.000	
38	Pelayanan Dan Penyediaan Imformasi Pasar Kerja Online	Pasbar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	15.430.000	
39	Job Fair/Bursa Kerja	Pasbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	1.000	
17	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)**	**100 persen**	**12.436.000**	
40	Peningkatan Pelindu ngan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pasbar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	12.434.000	
41	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pasbar	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	15 Orang	1.000	
42	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pasbar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	1.000	
V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**89**	**52.423.000**	
18	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**40 Perusahaan**	**15.470.000**	
43	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pasbar	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahaan	1.000	
44	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pasbar	Jumlah perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 Perusahaan	1.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	12
45	Penyelengggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pasbar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan	15.468.000	
19	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	13 Perkara	**36.953.000**	
46	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	1.000	
47	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusa haan yang Berakibat/ Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pasbar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	13 Perkara	15.540.000	
48	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pasbar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	21.410.000	
49	Penyelenggaraan Verifi kasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pasbar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1.000	
50	Pengembangan Pelaksa naan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pasbar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19188 Orang	1.000	
VI	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang Difasilitasi Program SDM**	**10 Jorong**	**10.000.000**	
20	**Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**		**Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan**	**10 Jorong**	**10.000.000**	
51	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Pasbar	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	50 Kepala Keluarga	10.000.000	
	TOTAL				**4.121.970.100**	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan bidang urusan pemerintahan yaitu Bidang Urusan Tenaga Kerja dan Bidang Urusan Transmigrasi. Untuk program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan serta rencana tahun 2024 yang meliputi lokasi program/kegiatan, target capaian kinerja, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS TENAGA KERJA KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS TENAGA KERJA						**4.121.970.100,00**							**6.022.245.536,00**		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.111.970.100,00**							**5.906.483.036,00**		
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.111.970.100,00**							**5.906.483.036,00**		
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3.859.384.450,00**						**100 Persen**	**4.140.866.641,00**		
	2.07.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan*	persen		persen	100 persen	3.524.420.715,00				Meningkatkan kualitas tata kelo la penyelengg araan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik		35 Orang/bulan	3.428.135.818,00		6.2.5
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.236.080.915,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Kualitas tata kelo La penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelaya nan publik	-	35 Orang/bulan	3.187.515.818,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	170.619.850,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelaya nan publik	-	15 Dokumen	170.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	117.719.950,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyele nggaraan peme rintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	12 Dokumen	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
												berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelaya nan publik					
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah Yang Dikelola DISNAKER*	Orang		Orang	2 Orang	9.590.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	24.487.368,00		
	2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	2 Dokumen	9.487.368,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	9.589.200,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.05	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian*	Persen		Persen	100 Persen	20.003.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih,		50 Paket	115.134.062,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
												akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOKSASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	50 Paket	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	50 Paket	6.134.062,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	2 Orang	1.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	2 Orang	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	4 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	4 Orang	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	8 Orang	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	8 Orang	34.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	Persen		Persen	100 Persen	186.072.125,00						1 Paket	216.000.000,00		
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	7.995.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin	-	1 Paket	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5

											tahan dan pelayanan publik					
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	53.179.400,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	19.920.725,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	4 Paket	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	3 Paket	24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Laporan		Laporan	30 Laporan	89.977.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	30 Laporan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanKantor*	Unit		Unit	1 Unit	2.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik		- Unit	153.709.893,00		
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	- Unit	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	- Unit	2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan	Unit		Unit	1 Unit	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	1 Unit	151.709.893,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan kantor*	Persen		Persen	100 Persen	45.900.710,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik		12 Laporan	123.302.500,00		
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	39.998.710,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	63.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	2.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	36.002.500,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelaya nan publik	-	12 Laporan	4.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara*	Unit		Unit	26 Unit	73.395.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerin tahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerin tahan dan pelayanan publik		3 Unit	80.097.000,00		
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	3 Unit	30.800.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	3 Unit	33.097.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	2 Unit	33.975.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	2 Unit	32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	27 Unit	8.620.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	27 Unit	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA**	***Rencana Tenaga KerjaYang Disusun***	**Dokumen**		**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2.000,00**						**2 Dokumen**	**106.120.800,00**		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro YangDisusun*	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	106.120.800,00		

	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen RencanaTenaga Kerja Makro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Perluasan Kesempatan Kerja	-	1 Dokumen	53.060.400,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah Perusahaan yangMenyusun RTK Mikro	Perusahaan		Perusahaan	1 Perusahaan	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Perluasan Kesempatan Kerja	-	1 Perusahaan	53.060.400,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA**	***Persentase Tenaga KerjaYang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi***	**Persen**		**Persen**	**2.52 Persen**	**150.152.650,00**						**2.52 Persen**	**1.034.677.800,00**		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pelatihan Yang Difasilitasi*	Orang		Orang	100 Orang	140.196.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Perluasan Kesempatan Kerja		64 Orang	615.412.800,00		
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan BerbasisKompetensi pada Tahun n	Orang		Orang	64 Orang	115.000.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Perluasan Kesempatan Kerja	-	64 Orang	332.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga		Lembaga	15 Lembaga	25.194.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Perluasan Kesempatan Kerja	-	15 Lembaga	242.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota															
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit		Unit	2 Unit	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	2 Unit	40.662.800,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina*	LPKS		LPKS	14 LPKS	9.953.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		14 Lembaga	113.135.000,00		6.2.5
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta															
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		Lembaga	14 Lembaga	9.953.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	14 Lembaga	113.135.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Memperoleh Perizinan Terintegrasi*	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	1.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		5 Perizinan	66.550.000,00		
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi															
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga PelatihanKerja Secara Terintegrasi	Perizinan		Perizinan	5 Perizinan	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	5 Perizinan	66.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5

	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Konsultasi Produktifitas yang Dilakukanpada Perusahaan Kecil*	Konsultasi		Konsultasi	8 Konsultasi	1.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia		8 Perusahaan	106.480.000,00		
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat KonsultansiPeningkatan Produktivitas	Perusahaan		Perusahaan	8 Perusahaan	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	8 Perusahaan	106.480.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengukuran Produktifitas Kabupaten Pasaman Barat*	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	133.100.000,00		
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Dokumen	133.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Pencari KerjaTerdaftar Yang Ditempatkan***	**Persen**		**Persen**	**21.79 Persen**	**50.008.000,00**						**21.79 Persen**	**435.095.280,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*	Persen		Persen	100 Persen	22.138.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia		7 Orang	257.460.280,00		
	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja															
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang		Orang	7 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	7 Orang	22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja															
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang		Orang	150 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	150 Orang	94.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja															
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		Orang	50 Orang	7.610.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	50 Orang	32.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan															
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang		Orang	2 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat,	-	2 Orang	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5

											Berdaya Saing	berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia					
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja															
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang		Orang	48 Orang	14.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	48 Orang	93.010.280,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Lembaga LPTKS*	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Lembaga	13.850.000,00		
	2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi															
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Lembaga	6.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS															
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1 Lembaga	7.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi PasarKerja	*Jumlah Dokumen InformasiPasar Kerja*	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	15.432.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Dokumen	152.435.000,00		
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	12 Dokumen	46.585.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online															
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		Orang	1000 Orang	15.430.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	1000 Orang	75.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja															
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang		Orang	5 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	5 Orang	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)*	persen		persen	100 persen	12.436.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas sumber daya manusia		60 Orang	11.350.000,00		
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)															
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		Orang	60 Orang	12.434.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	60 Orang	3.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran															
			Jumlah CPMI yang Terlayanisesuai Prosedur dalam LTSAdan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang		Orang	15 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	15 Orang	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan															

			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang		Orang	10 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	10 Orang	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
5 .	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama***	**Persen**		**Persen**	**89 Persen**	**52.423.000,00**						**89 Persen**	**189.722.515,00**		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama*	Perusahaan		Perusahaan	40 Perusahaan	15.470.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia		3 Perusahaan	111.722.515,00		
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan															
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		Perusahaan	3 Perusahaan	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	3 Perusahaan	37.722.515,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan															
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan		Perusahaan	3 Perusahaan	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	3 Perusahaan	29.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan															
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		Laporan	25 Laporan	15.468.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	25 Laporan	44.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.1
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Terselesaikan*	Perkara		Perkara	13 Perkara	36.953.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia		15 Perkara	78.000.000,00		
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perselisihan yangDicegah	Perkara		Perkara	15 Perkara	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	15 Perkara	6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara		Perkara	13 Perkara	15.540.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat,	-	13 Perkara	46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5

										UMUM	Berdaya Saing	berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia					
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi															
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja		Asosiasi dan Serikat Pekerja	24 Asosiasi dan SerikatPekerja	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	21.410.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	1 Lembaga	3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja															
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		Orang	19188 Orang	1.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n kualitas sumber daya manusia	-	19188 Orang	21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.000.000,00**							**115.762.500,00**		
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**10.000.000,00**							**115.762.500,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODEFIKASI
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Jumlah Jorong Eks Transmigrasi Yang Difasilitasi Program SDM***	**Jorong**		**Jorong**	**10 Jorong**	**10.000.000,00**						**10 Jorong**	**115.762.500,00**		
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Jumlah Jorong Eks Transmigrasi Yang DilakukanPembinaan*	Jorong		Jorong	10 Jorong	10.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan kualitas sumber daya manusia		50 Kepala Keluarga	115.762.500,00		
	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman															
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga		Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	50 Kepala Keluarga	115.762.500,00	DINAS TENAGA KERJA	6.2.5
	J U M L A H							**4.121.970.100,00**							**6.022.245.536,00**		

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Organisasi Perangkat Daerah pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, 14 Juli 2023
Kepala,

AZHAR, S.Pd
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19680803 198802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yangm telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Simpang Empat, 14 Juli 2023

K e p a l a

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr.ANNA RAHMADIA, M.KM

NIP. 19820927 200805 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan hukum 1

1. 3. Maksud dan Tujuan 3

1. 4. Sistematika Penyusunan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6

2. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A..... 6

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 11

2. 3.Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 14

2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 14

2. 5.Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....

3. 1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 28

3. 2.Telahaan Terhadap Renstra Kemen PPPA (Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2021)..... 29

3. 3.Telahaan Terhadap Renstra KBKKBN (Perka BKKBN Nomor 6 Tahun 2020..... 32

3. 4.Tujuan dan Sasaran Renja SOPD..... 34

3. 5.Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 46

BAB V PENUTUP..... 56

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi penyusunan rancangan Kepetusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan dan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, selanjutnya barulah disusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistim Informasi Keluarga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja DPPKBP3A serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan.
b. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .
c. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
d. Mendukung seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang,*
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L

dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum,*
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

Maksud dan Tujuan,

1.3 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan,*
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,* Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah . Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out come) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPPKBP3A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi,misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DPPKBP3A tahun 2022 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan visi dan misi dalam tahun 2022, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 10 Program dan 23 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggran 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBP3A tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja DPPKBP3A tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBP3A pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Operasi
   Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa yang dinggarkan sebesar RP 12.385.426.984,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.760.060.478,- atau sebesar 70,72%.
b. Anggaran Belanja Modal
   Belanja Modal pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 sebesar Rp 548.854.800 dan terealisasi sebesar Rp 486.987.694 atau sebesar 88,72%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPPKBP3A tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
02.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)**	>800 Skor		650 Skor	709 (Madya)	109,08	650 Skor	**867 skor**	**108**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)**	>800 Score		600 Score	709 (Madya)	109,08	600 Score	**867 skor**	**108**
02.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak**	0 %		0.01 %	0,03	2,47	0.01 %	**123,33**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak**	0 Rasio		0,02 Rasio	450	33,33	0,02 Rasio	0,06 rasio	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan**	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan bagi Anak yangMemerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100
02.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	12 %		4.67 %	0,19	4,07	4.67 %	4.65 Persen	39
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)**	12,00		4,67	0,19	4,07	4,67	4.65 Persen	39
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif**	30 %		**7,50 %**	**7,50 %**	**100**	7,50 %	7,50 %	**25**
02.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan**	0 %		0.35 %	10,07	4,19	0.35 %	**11,21%**	-

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	760 orang		130 orang	0		130 orang	130 orang	17
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Prlindungan Perempuan	100 Persen					100 Persen	100 Persen	100
02.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**TPAK Perempuan**	45.75 %		45.6 %	21,27	46,70	45.6 %	**21,27**	46
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat PArtisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)**	45,75%		45,60%	21,27	46,70	45,60%	**21,27**	46
02.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender**	100 %		95 %	99%	100 %	95 %	95 %	95
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpilah Gender	100,00		95,00%	99%	100,00%	95,00%	95,00%	95
	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk									
02.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	3 Indeks		3.05 Indeks	3.05 Indeks	100	3,05 Rasio	3.05 Indeks	98
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Peserta Sosialisasi**	260		200	200	138,89	200	200	77
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana**	72 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	8
02.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)**	**68 %**		66,5 %	63,44%	89,13	95,40	62,53%	**92**
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Tersedianya Operasional Balai Penyuluh KB	19 Nagari		11 Kec, 22 Faskes	11 Kec, 22 Faskes	100	19 Nagari	19 Nagari	100
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	22 Faskes 1535 Akseptor		22 Faskes 1520 Akseptor	22 Faskes 1293 Akseptor	100	22 Faskes 1520 Akseptor	22 Faskes 792 Akseptor	51,60

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB	11 Kecamatan		11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
02.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Prevalensi Stunting	14 Persen		0,14	0,14	77,78	18 Persen	20,5	64,52
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	75%		65 Persen	21,7 Persen	33	65 Persen	21,7 Persen	28,93
		Nilai SAKIP	B Nilai		B Nilai	B Nilai	100	B Nilai	B Nilai	100
		Level Maturitas SPIP	Level3 Level		Level 3 Level			Level 3 Level		
		Opini Terhadap Laporan Keuangan	WTP Level		WTP Level			WTP Level		
		Nilai SAKIP	B		B	BB	100	B	B	100
02.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Level Maturitas SPIP	Level3 Level		Level 3 Level			Level 3 Level		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan	100 %		75 %			Level 3 Level		
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai	22 org		22 org	18 Orang	100	22 org	18 org	81,82
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60%	60
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60%	60
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi, dan Map DPPKBP3A yang Dibutuhkan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Elektronik Penunjang Operasional Kantor dan Administrasi Perkantoran	30 Unit		6 Unit	6 Unit	0	6 Unit	0	0
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60%	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berdasarkan telaahan terhadap Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama mendukung pencapaian **Misi ke 1** yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif untuk mencapai sasaran 1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta **Misi ke 2** yaitu ***Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing*** Dengan menfokuskan pada tujuan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mencapai sasaran 3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. **Misi 3 Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing** dengan memfokuskan pada Tujuan 4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan dengan sasaran 4.1 Pengentasan Kemiskinan dengan 2 (dua) indikator utama, yakni:

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan mencapai 92 pada tahun 2026.
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan mencapai 68 pada tahun 2026.
3) Predikat Kabupaten Layak Anak ditargetkan mencapai 820 (Utama) pada tahun 2026.
4) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ditargetkan mencapai 1,12 pada tahun 2026.

DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perencanaan pelayanan DPPKBP3A Tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2022 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya Analisis terhadap kinerja pelayanan tentang capaian kinerja pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPKBP3A				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Predikat pencapaian KLA	KLA		Madya (620)	Madya (650)	Nindya (720)	Nindya (750)	Madya (867) Predikat	Madya	Nindya	Nindya	
2	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	800		500	Madya (2)	Madya (2)	Madya (2)	867 Nilai	Madya	Nindya	Nindya	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,0%		0,58	0,47	0,35	0,23	0,9	0,47	0,35	0,23	
4	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	100,0%		0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0%		0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	
6	IPG	92%		90,38	90,71	91,03 Indeks	91,35 Indeks	90,38	90,17	91,03 Indeks	91,35 Indeks	
7	Predikat APE	Madya		Pratama (1) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	Pratama (1) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	
8	IDG	75,24%		62,07	63,25 Indeks	64,44 Indeks	65,63 Indeks	62,07	63,25 Indeks	64,44 Indeks	65,63 Indeks	
9	TPAK Perempuan	47%		45,5	45,6	45,65	45,7	45,5	45,6	45,65	45,7	
10	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif			64,79	65,00	65,20%	65,40%	64,79	65,00	65,20%	65,40%	
11	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	30%		7,5	7,5	7,5	30,00%	7,50%	7,5	7,5	30,00%	
12	Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD			4,63	4,65	4,67%	8,00%	4,63	0,19	4,67%	8,00%	
13	% OPD yang menyediakan data terpilah gender			91%	93%	95,00%	97,00%	91%	99%	95,00%	97,00%	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13		1,24%	1,23%	1,22%	1,21%	1,24%	1,41%	1,22%	1,21%	
15	Modern contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	63,41		66	66,25	66,50%	66,75%	66	63,44	66,50%	66,75%	
16	TFR	2,1		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)			60	63	65,00	70,00	21,7	21,7	65,00	70,00	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah danpemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yangkompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya serta masih tingginya kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1) Meningkatnya pengendalian kuantitas penduduk melalui kebutuhan dan memperluas pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Sejahtera
2) Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG)
3) Meningkatkan integrasi perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak dengan kebijakan pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja								
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**10.179.940.830,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**10.179.940.830,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**10.179.940.830,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.179.940.830,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**5.817.347.589,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.817.347.589,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**4.882.272.290,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**4.882.272.290,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.312.272.290,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.312.272.290,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.084.872.290,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.084.872.290,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	150.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	150.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77.400.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77.400.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**100 %**	**30.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**100 %**	**30.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					Bimbingan Teknis Implementasi					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**140.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**140.000.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					Penyediaan Komponen Instalasi					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	100.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	100.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah**	**100 %**	**10.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah**	**100 %**	**10.000.000,00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung					Pengadaan Sarana dan Prasarana					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100 %**	**55.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100 %**	**55.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	55.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	55.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**315.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**315.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	100.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	100.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	15.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	15.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000,00	
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**8 %**	**640.075.299,00**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**8 %**	**640.075.299,00**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)**	**8 Persen**	**30.075.299,00**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)**	**8 Persen**	**30.075.299,00**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	30.075.299,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	30.075.299,00	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif	30 %	600.000.000,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif	30 %	600.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	600.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	600.000.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	10.000.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	10.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 Orang	10.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 Orang	10.000.000,00	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan**	**0.23 %**	**65.000.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan**	**0.23 %**	**65.000.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**150 Orang**	**20.000.000,00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**150 Orang**	**20.000.000,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	20.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan**	**100 Persen**	**45.000.000,00**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan**	**100 Persen**	**45.000.000,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	45.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	45.000.000,00	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**TPAK Perempuan**	**45.65 %**	**30.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**TPAK Perempuan**	**45.65 %**	**30.000.000,00**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)**	**45,65 Persen**	**20.000.000,00**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)**	**45,65 Persen**	**20.000.000,00**	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Perlindungan Anak yang ditingkatkan Kapasitasnya**	**100 persen**	**10.000.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Perlindungan Anak yang ditingkatkan Kapasitasnya**	**100 persen**	**10.000.000,00**	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	10.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	10.000.000,00	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender**	**97 %**	**35.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender**	**97 %**	**35.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpilah Gender**	**97 Persen**	**35.000.000,00**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpilah Gender**	**97 Persen**	**35.000.000,00**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	35.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	35.000.000,00	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)**	**700 Skor**	**60.000.000,00**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)**	**700 Skor**	**60.000.000,00**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)**	**650 Score**	**60.000.000,00**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)**	**650 Score**	**60.000.000,00**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	80 Organisasi	30.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	80 Organisasi	30.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Dokumen	30.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Dokumen	30.000.000,00	
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		-	-	**105.000.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		-	-	**105.000.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	-	**25.000.000,00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		-	-	**25.000.000,00**	
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota					Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	60 Dokuman	25.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	60 Dokuman	25.000.000,00	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan**	**100 %**	**50.000.000,00**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan**	**100 %**	**50.000.000,00**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50.000.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak**	**0,02 Persen**	**30.000.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak**	**0,02 Persen**	**30.000.000,00**	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota					Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	80 Dokumen	30.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	80 Dokumen	30.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**4.362.593.241,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**4.362.593.241,00**	
8	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Total Fertility Rate (TFR)**	**3.05 Indeks**	**239.072.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Total Fertility Rate (TFR)**	**3.05 Indeks**	**239.072.000,00**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		**Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	11 Satuan Pendidikan	30.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	11 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana**	**12 Dokumen**	**209.072.000,00**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana**	**12 Dokumen**	**209.072.000,00**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	50.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	44.067.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	44.067.000,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	35.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	35.000.000,00	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	80.005.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	80.005.000,00	
9	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)**	**67,75 %**	**2.156.401.600,00**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)**	**67,75 %**	**2.156.401.600,00**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		**Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK**	**100 Persen**	**796.490.000,00**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK**	**100 Persen**	**796.490.000,00**	
	Pengendalian Program KKBPK					Pengendalian Program KKBPK					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	40.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	40.000.000,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	445.500.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	445.500.000,00	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	110 Laporan	171.600.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	110 Laporan	171.600.000,00	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui					Promosi dan KIE Program Bangga					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	70.640.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	70.640.000,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)					Komunikasi, Informasi dan Edukasi					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000,00	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja					Advokasi Program Bangga kencana					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	35 Organisasi	43.750.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	35 Organisasi	43.750.000,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		**Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**19 Nagari 11 Kecamatan**	**91.200.000,00**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**19 Nagari 11 Kecamatan**	**91.200.000,00**	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan					Penggerakan Kader Institusi					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	427 Orang	71.200.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	427 Orang	71.200.000,00	
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	20.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	20.000.000,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Terlaksananya Pelayanan KB MKJP**	**100 Persen 22 Faskes 1525 Akseptor**	**934.961.600,00**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Terlaksananya Pelayanan KB MKJP**	**100 Persen 22 Faskes 1525 Akseptor**	**934.961.600,00**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	11.250.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	11.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20000 Orang	686.154.600,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20000 Orang	686.154.600,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	226.757.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	226.757.000,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	10.800.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	10.800.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB	100 Persen 11 Kecamatan	333.750.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB	100 Persen 11 Kecamatan	333.750.000,00	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Organisasi	75.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Organisasi	75.000.000,00	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian		
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	9.000.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	9.000.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Kampung	249.750.000,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Kampung	249.750.000,00	
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)**	**70 %**	**1.967.119.641,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)**	**70 %**	**1.967.119.641,00**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**11 Kec 100 Persen**	**1.967.119.641,00**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**11 Kec 100 Persen**	**1.967.119.641,00**	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	801.705.100,00		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	801.705.100,00	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang, Forum OPD maupun usulan lainnya dari masyarakat dan untuk Tahun 2024 ada beberapa usulan kegiatan dari Pokir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jorong Bandar Baru, Kec Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Jumlah Anggota Kelompok UMKM Bina Bahari yang diberikan bantuan penunjang Usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga	200.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jorong Pasa lamo, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat	Jumlah Anggota Kelompok UMKM Kasih Ibu yang diberikan bantuan penunjang Usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga	200.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jorong Pondok, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat	Jumlah Anggota Kelompok UMKM Pohon Seribu yang diberikan bantuan penunjang Usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga	200.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jorong Padang Halaban, Kec Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat	Jumlah Anggota Kelompok UMKM Melati yang diberikan bantuan penunjang Usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga	200.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia
5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jorong Pasa Lamo, Kec Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat	Jumlah Anggota Kelompok UMKM Harapan yang diberikan bantuan penunjang Usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga	200.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Pasaman dan Kec.Talamau, Kab. Pasaman Barat	Jumlah Anggota Kelompok UMKM yang diberikan bantuan penunjang Usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga	150.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia

7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pedagang Kecil yang diberikan Bantuan Hibah modal usaha	100.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jrg sarik.Nag .sarik., Kab. Pasaman Barat	Jumlah Bantuan peralatan katering untuk KWT JASA BUNDA	100.000.000	Diterima jika Anggaran tersedia

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada 7 agenda Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-4 (2021-2026) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2014-2019 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
I	**Nasional**		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	RKP 2023	
2.	Angka Kemiskinan Nasional	RKP 2023	
3.	Gini Ratio Nasional	RKP 2023	
4.	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	RKP 2023	
II	**Provinsi**		
1.	Pembangunan Agama dan Budaya	RPJP Provinsi 2005-2025	
2.	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005-2025	
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005-2025	
4.	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005-2025	
5.	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005-2025	

3.2. Telahaan terhadap Renstra Kemen PPPA (Permen PPPA Nomor 6 tahun 2021)

a. Permasalahan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, meliputi:

1) Kualitas hidup perempuan: masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang rendah, pengeluaran per kapita perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan dilegislatif belum mencapai kuota yang ditetapkan regulasi

2) Perlindungan Hak Perempuan: tingginya kasus kekerasan terhadapperempuan, diranah privat (KDRT) maupun ranah publik, tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersil dan kerja paksa, rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal, belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (UPTD PPA atau P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, perlindungan terhadap kelompok lansia, penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan perlakuan kurang adil,

3) lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan, dampak covid-19 berdampak terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan dan pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekeran dan TPPO, dan belum terintegrasinya data terkait perempuan korban kekeran dan TPPO

4) Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan; belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan

b. Permasalahan perlindungan anak

1) Pemenuhan hak anak: Belum mencapai predikat KLA; capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah seperti kepemilikan akte kelahiran, lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, puspaga, puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, sekolah ramah anak, pusat kreativitas anak, ruang bermain ramah anak, rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), media informasi layak anak (TeSA: Telepon Sahabat Anak), PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak, daerah mengembangkan model pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan (PAPP), pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P); penggalian dan pemanfaatan dana selain APBN dan APBD serta APBDesa untuk pemenuhan hak anak seperti danas CSR dan dana swasta dan swadaya masyarakat

2) Perlindungan khusus anak: tingginya kasus kekerasan terhada anak, terjadinya berbagai praktik buruk seperti pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus, covid-19 diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak

3) Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam perlindungan anak; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam perlindungan anak; belum adanya pedoman dan panduan teknis

berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perlindungan anak.

c. Permasalahan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1) Kualitas hidup perempuan: masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang rendah, pengeluaran per kapita perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan dilegislatif belum mencapai kuota yang ditetapkan regulasi

2) Perlindungan Hak Perempuan: tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, diranah privat (KDRT) maupun ranah publik, tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersil dan kerja paksa, rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal, belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (UPTD PPA atau P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, perlindungan terhadap kelompok lansia, penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan perlakuan kurang adil, lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan, dampak covid-19 berdampak terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan dan pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekeran dan TPPO, dan belum terintegrasinya data terkait perempuan korban kekeran dan TPPO

3) Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan; belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan

d. Permasalahan perlindungan anak

1) Pemenuhan hak anak: Belum mencapai predikat KLA; capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah seperti kepemilikan akte kelahiran, lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, puspaga, puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, sekolah ramah anak, pusat kreativitas anak, ruang bermain ramah anak, rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), media informasi layak anak (TeSA: Telepon Sahabat Anak), PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak, daerah mengembangkan model pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan (PAPP), pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P); penggalian dan pemanfaatan dana selain APBN dan APBD serta APBDesa untuk

pemenuhan hak anak seperti danas CSR dan dana swasta dan swadaya masyarakat

2) Perlindungan khusus anak: tingginya kasus kekerasan terhada anak, terjadinya berbagai praktik buruk seperti pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus, covid-19 diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak
3) Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam perlindungan anak; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam perlindungan anak; belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perlindungan anak.

3.3 Telahaan terhadap Renstra Renstra BKKBN (Perka BKKBN Nomor 6 tahun 2020

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian:

a. Terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan

1) Bonus demografi *(Demographic dividend)*; kebijakan pembangunan diarahkan melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.
2) Penduduk yang menua *(Aging population)*; perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin "menua" akibat dari pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang menua akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.
3) Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan siklus hidup dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang bekualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan);

4) satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangga Kencana di lini lapangan.

b. Terkait pemenuhan layanan dasar
   1) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi
   2) Penurunan penggunaan kontrasepsi modern *(mCPR)*
   3) Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, *ASFR* cenderung masih tinggi
   4) Kebutuhan ber-KB PUS yang belum terlayani *(unmet need)* masih tinggi
   5) Prevalensi stunting masih tinggi; yang perlu mendapat perhatian perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK) serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.
c. Terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa
   1) Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga; (agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan)
   2) Tingginya kasus pernikahan usia anak

Potensi dan Permasalahan yang ada:

a. Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif, namun beberapa permasalahan pengendalian penduduk yang perlu mendapat perhatian:
   1) Angka kelahiran total masih perlu ditekan
   2) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk
   3) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
   4) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang berarti rendahnya peran pemerintah daerah
   5) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan
b. Upaya mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait
c. Komitmen terhadap aksi global terhadap program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana seperti Program Aksi ICPD*, SDGs, Family Planning 2020, permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

1) Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan Unmet Need
2) Tingginya peserta KB yang putus pakai (drop out) disertai rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria
3) Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN
4) Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah
5) Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB pasca persalinan (KB-PP)

d. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:
   1) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
   2) Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi Z)
   3) Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga
   4) Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga
   5) Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakupan pendampingan perawatan jangka panjang lansia
   6) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
   7) Masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sektor
e. Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai "komunikasi perubahan perilaku" atau *"behavior change communication" (BCC)* digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian:
   1) Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media
   2) Kurang optimalnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam advokasi KIE dan penggerakan lini lapangan
   3) Kondisi kelembagaan yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE program Bangga Kencana
   4) Belum optimalnya fokus dan kesinambungan pengegerakan mekanisme operasional (mekop) lini lapangan
   5) Belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan penggerakkan program Bangga Kencana
   6) Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026,

maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPPKBP3A Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja DPPKBP3A Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)
		Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 3. Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD
3.	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 TahunLaporan Keuangan
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR
4.	Meningkatkan pencegahan Stunting	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

5.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	1. Nilai SAKIP DPPKBP3A 2. Level Maturitas SPIP 3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A

3.5 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan urusan wajib dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan DPPKBP3A Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, seperti terlihat pada tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Pasaman Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								552,959,271					533,768,456
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								83,079,880					84,741,477
2	8	2	02.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								30,075,299					30,075,299
2	8	2	02.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran yang Responsive Gender (ARG)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	50 Perangkat Daerah	8 %	30,075,299	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %	30,075,299
2	8	2	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								53,004,581					54,666,178
2	8	2	02.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	31 Organisasi	30 %	53,004,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %	54,666,178
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								136,499,182					118,829,165
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000					20,000,000
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,23 %	1 Dokumen	0.23 %	40,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,23 %	20,000,000
							Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				130 Orang							
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								86,499,182					88,829,165
2	8	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,23 %	12 Layanan	100 %	86,499,182	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,23 %	88,829,165

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan				100 %							
2	8	3	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000					10,000,000
2	8	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Prlindungan Perempuan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	0,23 %	36 Orang	100 %	10,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,23 %	10,000,000
							Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan				100 %							
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													
2	8	4	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								19,755,500					20,150,610
2	8	4	02.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TPAK Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.6 %	1 Dokumen	45.6 %	19,755,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TPAK Perempuan	45.6 %	20,150,610
							Jumlah Pekerja Wanita yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)				60 Orang							
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
2	8	5	02.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								31,248,000					22,022,960
2	8	5	02.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpilah Gender	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	1 Dokumen	97 %	31,248,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender	97 %	22,022,960
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Gender dan Anak dan Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak				1 Dokumen							
							Jumlah SDM yang Terlatih				41 Orang							
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2	8	6	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								65,033,025					66,333,686
2	8	6	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Skor	60 Organisasi	700 score	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 Skor	35,000,000
							Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)				700 score							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	6	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Skor	1 Dokumen	700 score	30,033,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 Skor	31,333,686
							Persentase Forum Anak Aktif				90 %							
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								217,343,684					221,690,558
2	8	7	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000					45,000,000
2	8	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	1 Dokumen	0.02 Rasio	35,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %	45,000,000
							Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak				200 Orang							
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								132,343,684					126,690,558
2	8	7	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	20 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %	25,000,000
							Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan				100 %							
2	8	7	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	12 Layanan	100 %	107,343,684	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %	101,690,558
							Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan				100 %							
2	8	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					50,000,000
2	8	7	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan bagi Anak yangMemerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0,01 %	50,000,000
							Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %							
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								9,187,191,594					9,654,260,584
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,890,574,564					7,003,405,678
2	14	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,644,031,668					5,881,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang/bulan	100 %	5,262,131,868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,500,000,000
2	14	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	100 %	304,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	304,500,000
							Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Adminsitrasi Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai				22 Orang						
2	14	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Dokumen	100 %	77,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77,400,000
							Jumlah Petugas Pengelola Keuangan yang Menerima Honorarium				5 Orang						
2	**14**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**34,858,400**					**34,858,400**
2	14	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	34,858,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	34,858,400
2	**14**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**60,803,642**					**60,803,642**
2	14	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	60,803,642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	60,803,642
2	**14**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**292,190,880**					**307,190,880**
2	14	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	25,059,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	35,059,280
2	14	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	25,175,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25,175,700
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket						
2	14	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Paket	100 %	32,061,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	32,061,500
							Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Alat Pembersih				12 Bulan						
2	14	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	17,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,135,000
2	14	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	192,759,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	192,759,400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat K/L yang Diikuti				12 Bulan							
2	14	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								205,704,839					225,667,621
2	14	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	98,667,621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	108,667,621
2	14	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	107,037,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	117,000,000
2	14	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								91,334,935					101,334,935
2	14	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	91,334,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	101,334,935
2	14	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								361,650,200					391,650,200
2	14	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	67 Unit	100 %	189,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	199,905,000
2	14	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Unit	100 %	62,569,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	72,569,200
2	14	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	109,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	119,176,000
2	14	2			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								114,383,457					118,809,565
2	14	2	02.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								78,352,457					82,778,565
2	14	2	02.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Peserta Sosialisasi PIK R/M di Sekolah-sekolah	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PEserta Sosialisasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	200 Orang	240 orang	52,491,151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	56,917,259
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan							
2	14	2	02.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PEserta Sosialisasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	12 Laporan	240 orang	25,861,306	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	25,861,306
							Terlaksananya Tindak Lanjut dan Audit Stunting				1 Keg							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	2	02.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**36,031,000**					**36,031,000**
2	14	2	02.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	132 Dokumen	132 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	20,000,000
2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	132 Dokumen	132 Dokumen	16,031,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	16,031,000
2	14	3			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**1,842,942,073**					**2,032,045,341**
2	14	3	02.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**360,000,000**					**360,000,000**
2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	20 Organisasi	11 Kecamatan, Faskes	30,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	30,000,000
						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66,5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	
2	14	3	02.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	12 Dokumen	11 Kecamatan, Faskes	85,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	85,000,000
						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66,5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	
2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	12 Dokumen	11 Kecamatan, Faskes	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	25,000,000
						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66,5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	66 Laporan	11 Kecamatan, Faskes	100,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	100,000,000
						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66.5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66.5 %	
2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan		66,5 %	132 Laporan	11 Kecamatan, Faskes	120,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	120,000,000
						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66.5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66.5 %	
2	**14**	**3**	**02.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**91,200,000**					**91,200,000**
2	14	3	02.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	425 Orang	19 Nagari	91,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	91,200,000
2	**14**	**3**	**02.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,114,742,073**					**1,303,845,341**
2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	264 Laporan	1520 Aksep tor	58,815,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	58,815,000
2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP		66,5 %	1496 Orang	1520 Aksep tor	410,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	595,030,341
							Terlaksananya Pergerakan Pelayanan KB MKJP(IUD, Implant, MOP, dan MOW)				1496 Aksep tor						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	43 Unit	1520 Aksep tor	545,927,073	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	550,000,000
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	264 Laporan	1520 Aksep tor	100,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	100,000,000
2	**14**	**3**	**02.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-**								**277,000,000**					**277,000,000**
2	14	3	02.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	10 Organisasi	11 Kecamatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	150,000,000
							Terlaksananya Kegiatan TNI Manunggal KB Kes dan PKK KB Kes				11 Kecamatan							
2	14	3	02.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	19 Kampung	11 Kecamatan	127,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	127,000,000
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**539,291,500**					**500,000,000**
2	**14**	**4**	**02.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**539,291,500**					**500,000,000**
2	14	4	02.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65 %	45 Kelompok	11 Kecamatan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	45,000,000
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)				70 %						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	70 %	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	4	02.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	20 Unit	11 Kecamatan	180,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	180,000,000
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)				70 %						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	70 %	
2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	465 Orang	11 Kecamatan	239,291,500	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	200,000,000
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)				70 %						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	70 %	
2	14	4	02.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	231 Kelompok	11 Kecamatan	75,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	75,000,000
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)				70 %						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	70 %	
TOTAL																		10,188,029,040

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-3 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih focus mendukung pencapaian tujuan Strategis DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak, Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun, Meningkatkan pencegahan Stunting dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 7 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala DPPKBP3A, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 10 Program (Teknis dan Rutin), 27 Kegiatan dan 52 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKBP3A Tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 10.179.940.830 (Sepuluh Milayr Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sebagaimana disajikan pada table 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada table dibawah ini:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
						Dinas Pengendalian Penduduk,								10.179.940.830,00				10.173.934.896,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								10.179.940.830,00				10.173.934.896,00
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								5.817.347.589,00				6.555.552.794,00
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100persen			4.882.272.290,00			100persen	5.995.383.811,00
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100Persen	4.312.272.290,00		-	100Persen	4.948.721.754,00
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		45 Orang/bulan		4.084.872.290,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	45 Orang/bulan	4.566.821.754,00
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	304.500.000,00
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		77.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	77.400.000,00
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah				100 Persen	20.000.000,00		-	100Persen	24.858.400,00
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
									Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan		20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	24.858.400,00
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				100 %	30.000.000,00		-	100Persen	60.803.642,00
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
									Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang			30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Orang	60.803.642,00
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	140.000.000,00		-	100Persen	267.190.880,00
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Paket		5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	5.059.280,00
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan												
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Paket		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	25.175.700,00
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah												
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Paket		5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	32.061.500,00
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan												
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Paket		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	12.135.000,00
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		80 Laporan		100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	192.759.400,00
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah			100 %		10.000.000,00		-	100Persen	200.000.000,00
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Unit		10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Unit	100.000.000,00
	2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit		0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	100.000.000,00
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				100 %	55.000.000,00		-	100Persen	81.334.935,00
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,												
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		24 Laporan		55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	81.334.935,00
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	315.000.000,00		-	100Persen	412.474.200,00
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,												
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		66 Unit		100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	67 Unit	169.905.000,00
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		90 Unit		15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	48 Unit	42.569.200,00
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Unit		200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		200.000.000,00
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase ARG pada belanja langsung APBD		8%			640.075.299,00			12%	96.436.307,00
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)				8 Persen	30.075.299,00		-	12Persen	30.075.299,00
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG												
									Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		55 Perangkat Daerah		30.075.299,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	43 Perangkat Daerah	30.075.299,00
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif				30 %	600.000.000,00		-	30Persen	56.361.008,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
									Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Organisasi		600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	38 Organisasi	56.361.008,00
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-			10.000.000,00		-	-	10.000.000,00
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
									Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25 Orang		10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		10.000.000,00
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		0,23%			65.000.000,00			0%	104.394.326,00
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan				150 Orang	20.000.000,00		-	180Orang	20.000.000,00
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
									Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50 Dokumen		20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	180 Dokumen	20.000.000,00
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan				100 Persen	45.000.000,00		-	100Persen	84.394.326,00
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
									Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		40 Layanan		45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 Layanan	84.394.326,00
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			TPAK Perempuan		45.65 %			30.000.000,00			45.75%	70.553.622,00
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)				45,65 Persen	20.000.000,00		-	45,75Persen	20.553.622,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
									Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	20.553.622,00
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Perlindungan Anak yang ditingkatkan Kapasitasnya		-	100 persen		10.000.000,00		-	-	50.000.000,00
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
									Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			70 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		50.000.000,00
5	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender		97 %			35.000.000,00			100%	45.000.000,00
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpilah Gender				97 Persen	35.000.000,00		-	100Persen	45.000.000,00
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota												
									Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	45.000.000,00
6	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)		700 Skor			60.000.000,00			>800Skor	67.660.359,00
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)				650 Score	60.000.000,00		-	750skor	67.660.359,00
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
									Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		80 Organisasi		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	80 Organisasi	35.000.000,00
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
									Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		800 Dokumen		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	800 Dokumen	32.660.359,00
7	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			-		0%			105.000.000,00			0%	176.124.369,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-				0Persen	25.000.000,00		-	0Persen	86.124.369,00
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota												
									Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		60 Dokuman		25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		86.124.369,00
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan				100 %	50.000.000,00		-	100Persen	25.000.000,00
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
									Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50 Orang		50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 Orang	25.000.000,00
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak				0,02 Persen	30.000.000,00		-	100persen	65.000.000,00
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota												
									Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		80 Dokumen		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		65.000.000,00
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								4.362.593.241,00				3.618.382.102,00
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Total Fertility Rate (TFR)		3.05 Indeks			239.072.000,00			3Indeks	217.475.455,00
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				100 Persen	30.000.000,00		-	100Persen	66.444.455,00
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal												
									Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		11 Satuan Pendidikan		30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	30 Satuan Pendidikan	66.444.455,00
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana				12 Dokumen	209.072.000,00		-	1Dokumen	151.031.000,00
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
									Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan		50.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	0 Laporan	75.000.000,00
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga												
									Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		44.067.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	20.000.000,00
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga												
									Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan		35.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	0 Laporan	40.000.000,00
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB												
									Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		80.005.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	12 Dokumen	16.031.000,00
9	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)		67,75 %			2.156.401.600,00			68% 68%	2.225.906.647,00
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK				100 Persen	796.490.000,00		-	100Persen	385.861.306,00
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK												
									Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan		40.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1 Laporan	25.861.306,00
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana												
									Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		11 Laporan		445.500.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	12 Laporan	120.000.000,00
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												
									Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		110 Laporan		171.600.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	12 Laporan	100.000.000,00
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
									Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		70.640.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	12 Dokumen	25.000.000,00
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal												
									Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		25.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	12 Dokumen	85.000.000,00
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja												
									Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35 Organisasi		43.750.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	30 Organisasi	30.000.000,00
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			19 Nagari 11 Kecamatan		91.200.000,00		-	11Kecamatan	121.200.000,00
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												
									Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		427 Orang		71.200.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	100 Orang	91.200.000,00
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB												
									Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Organisasi		20.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	0 Organisasi	30.000.000,00
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Terlaksananya Pelayanan KB MKJP				100 Persen 22 Faskes 1525 Akseptor	934.961.600,00		-	100Persen	1.303.845.341,00
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
									Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25 Laporan		11.250.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	12 Laporan	58.815.000,00
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
									Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20000 Orang		686.154.600,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1496 Orang	595.030.341,00
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB												
									Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Unit		226.757.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	46 Unit	550.000.000,00
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
									Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25 Laporan		10.800.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	0 Orang	100.000.000,00
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB				100 Persen 11 Kecamatan	333.750.000,00		-	100Persen	415.000.000,00
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
									Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Organisasi		75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	30 Organisasi	150.000.000,00
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
									Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		9.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	0 Dokumen	15.000.000,00
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												
									Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		19 Kampung		249.750.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	24 Kampung	250.000.000,00
10	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)		70 %			1.967.119.641,00			75%	1.175.000.000,00
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				11 Kec 100 Persen	1.967.119.641,00		-	100Persen	1.175.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
									Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20 Unit		801.705.100,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	20 Unit	500.000.000,00
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
									Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		120 Orang		1.115.414.541,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	0 Kelompok	600.000.000,00
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)												
									Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Kelompok		50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	60 Kelompok	75.000.000,00
													JUMLAH	10.179.940.830,00				10.173.934.896,00

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, 14 Juli 2023

Kepala DPPKBP3A,

dr. ANNA RAHMADIA, M.KM

NIP. 19820927 200805 2 001

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/141 /BUP-PASBAR/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan Penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

C. Kelompok Kerja
1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

9. dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
10. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat 2024;
11. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
12. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
13. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/ 141 /Bup-PASBAR/2023
Tanggal : 31 Januari 2023
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA ,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB.PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Kepala	Pengarah
Sekretaris	Ketua
Perencana Ahli Muda	Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Koordinator
Kabid Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Koordinator
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Anggota
Penyusun Bahan Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	Anggota
Kabid Bina Kelembagaan Perempuan	Koordinator
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Januari 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. M. Natsir – Simpang Ampek Telp. (0753) 7464100 / Fax.(0753) 7464105
Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/ 39 /DPPKBP3A/VIII/2023

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : (1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024;

(2) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 14 Juli 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

dr. ANNA RAHMADIA, M.KM
NIP. 19820927 200805 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-NYA sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disusun sebagai dasar melakukan kegiatan bertahap untuk terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat melalui perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD. Penyusunan Renja Tahun 2024 ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif. Renja ini memuat program untuk masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merupakan subyek bukan sebagai obyek pembangunan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini belum sempurna. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Sukamenanti, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-7
1.3 Maksud dan Tujuan I-8
1.4 Sistematika Penulisan I-9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU 2022 ..... **II-1**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan II-21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan II-27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **IV-1**
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah IV-1

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2024.....	I-4
Tabel 1.2	Agenda Kerja Peyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	I-6
Tabel 2.1 (Tabel TC-29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat.....	II-6
Tabel 2.2 (Tabel T-C 30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	II-21
Tabel 2.3	*Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan (IKP).....	II-23
Tabel 2.4 (T-C.31)	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	II-32
Tabel 2.5 (T-C.32)	Usulan Program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	II-46
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	III-5
Tabel 3.3 (T-C 33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kab. Pasaman Barat.....	III-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah..... I-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan serta bahan baku pangan yang lain. Karenanya bahan pangan perlu selalu tersedia di daerah-daerah pemukiman dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan secara medis aman dikonsumsi. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Disamping itu pangan juga termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran rakyat, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sedapat mungkin melibatkan peran masyarakat berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga peran pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan sumberdaya manusia yang didukung oleh penyediaan akses modal dan akses pasar.

Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan Nasional dibentuk Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan, yaitu Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Secara umum, tujuan dibentuknya BAPANAS yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, memperkuat sistem logistik pangan serta menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan distribusi dan akses pangan; dan meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan. Hal tersebut telah dilaksanakan dalam program-program pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah

maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Proses penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renja, dan penetapan Renja.

Dalam tahap persiapan, proses dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap penyusunan rancangan Renja, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra, perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta perumusan Tujuan, Sasaran, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah yang digambarkan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi

Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran serta Program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

2. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan untuk memasukkan program / kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program / kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2024.
3. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

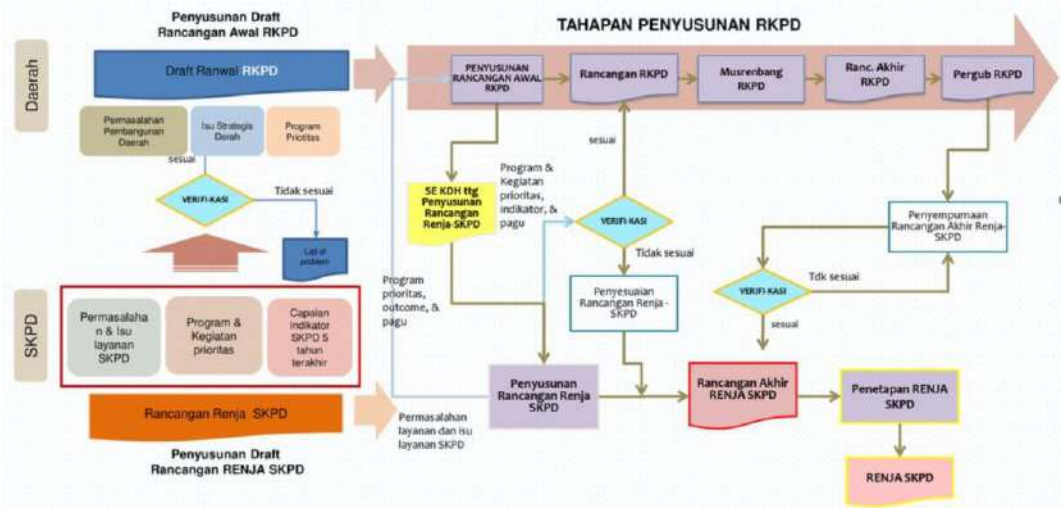

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 juga memuat tentang rencana pencapaian prioritas pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Berdaya Saing, dan Inklusif” dengan tujuan “Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pendapatan” yang memiliki sasaran “Pengentasan Kemiskinan”. Dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tersebut, keterkaitan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	90,73%
Tujuan: Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase program penanganan kerawanan pangan	100%
Sasaran: Pengentasan kemiskinan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90,72%
Indikator Sasaran: % Penduduk Miskin	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat menetapkan pencapaian indikator tujuan yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah” yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dengan indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan antara lain persentase ketersediaan pangan utama (%), ketersedian informasi harga, pasokan dan akses pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH), persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%). Selain itu dalam program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu “Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan” dengan indikator sasaran peningkatan nilai SAKIP, level maturitas SPIP dan persentase enurunan temuan (%). Tujuan dan sasaran ini didukung oleh 4 program teknis dan 1 program penunjang.

Tujuan 1	Peningkatan kedaulatan pangan Ik: Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah Ik: • Persentase ketersediaan pangan utama (%) • Ketersedian informasi harga, pasokan dan akses pangan • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) • Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)

Tujuan 2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Ik: • Peningkatan nilai SAKIP • Level maturitas SPIP • % Penurunan temuan

Tabel 1.2 Agenda Kerja Peyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Persiapan Penyusunan												
2	Penyusunan Rancangan Awal												
3	Penyusunan Rancangan												
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												
5	Perumusan Rancangan Akhir												
6	Penetapan												

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Mendagri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Pangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/62/BUP-PASBAR/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan secara keseluruhan. Dinas Ketahanan Pangan sebagai Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan kegiatan Perangkat Daerah

tahun 2024 yang berpedoman pada RPJMD dan RKPD, sehingga untuk tahun 2024 semua pembangunan ketahanan pangan merupakan implikasi dari aspirasi masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat yang berkelanjutan.

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala parsitipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang pangan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian capaian kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Peragkat Daerah tahun lalu (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Peragkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Peragkat Daerah tahun sebelumnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, maupun dari SKPD Kabupaten yang ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusaan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi SKPD dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Pasaman Barat termasuk darerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian dan perkebunan. Namun beberapa komoditi pangan di Kabupaten Pasaman Barat dari aspek ketersediaan belum mencukupi yang menyebabkan disaat-saat tertentu mengalami gejolak harga yang sulit dipenuhi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masih rendah. Masih adanya masyarakat yang sulit mengakses pangan karena tingkat pendapatannya yang rendah dan fluktuatifnya nilai harga pangan. Dengan adanya kecendrungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadinya penurunan cadangan pangan masyarakat.

Keanekaragaman pangan di daerah menjamin pola konsumsi masyarakat. Keragaman pola konsumsi merupakan hal yang penting karena terpenuhinya energi dan protein yang diperlukan tubuh. Ketergantungan konsumsi nasional, sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dengan terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal serta perlunya keamanan pangan lokal yang akan diolah agar tidak timbul masalah setelah dikonsumsi.

Pada tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sementara pada tahun 2023 melaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Adanya kecenderungan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Peragkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan seperti terlihat pada Tabel TC 29.

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100%**	**86%**	**84,29%**	**100 %**	**50%**	
2.09.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100 %*	*100%*	*100%*	94,76%	100 %	55%	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	94,18%	7 dokumen	4 Dokumen	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	3 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	-	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100 %*	*100%*	*100%*	*82,47%*	100 %	46%	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	16 Orang/bln	16 PNS	16 PNS	81,12%	16 PNS	24 Orang/bln	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	14 Dokumen	14 ASN	14 ASN	99,98 %	14 ASN	1 Dokumen	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 Dokumen	7 PNS	7 PNS	96,67%	7 PNS	1 Dokumen	
2.09.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*100 %*	*100 %*	*99,91%*	100 %	42%	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	2 Dokumen	2 ASN	2 ASN	99,90%	2 ASN	1 Dokumen	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 PNS	1 PNS	100%	1 PNS	1 Laporan	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*100 %*	*100 %*	*0%*	100 %	32%	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	25 Paket	-	-	-	25 Stel	-	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	4 Orang	1 PNS	1 PNS	-	4 Orang	9 Orang	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	5 Orang	-	-	-	5 PNS	-	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5 Orang	-	-	-	5 PNS	-	
2.09.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*100 %*	*100 %*	*99,80%*	100 %	57%	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	-	-	98,56%	1 Paket	1 Paket	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	1 paket	1 paket	99,95%	1 paket	1 paket	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	1 paket	1 paket	99,51%	1 paket	1 paket	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	1 Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	160 Laporan	12 bulan	12 bulan	99,79%	150 Laporan	6 Laporan	
2.09.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*100%*	*100%*	-	100 %	-	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	4 Unit	1 Scanner dan 3 laptop	1 Scanner dan 3 laptop	-	4 Unit	-	
2.09.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*100%*	*100%*	*97,71%*	100 %	42%	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Laporan	12 bln	12 bln	96.50%	12 bln	6 Laporan	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 Laporan	2 ASN	2 ASN	100 %	2 ASN	6 Laporan	
2.09.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*	*100%*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	100 %	43%	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 Unit	21 Unit	21 Unit	96,26 %	21 Unit	10 Unit	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	21 Unit	10 Unit	10 Unit	99,49%	30 Unit	10 Unit	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	30 Unit	1 paket	1 paket	-	1 paket	-	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**% ketersediaan pangan utama**	**1 Unit**	**1 Unit**	**0 Unit**	**94,02%**	**90.68 %**	**50 %**	
2.09.02.2.01	*Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM*	*90,68%*	*1 Paket*	*0 Paket*	*94,02%*	1 Paket	0 Paket	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	0 Paket	94,02%	1 Paket	-	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan singkronisaSI Penyediaan Insfrastruktur Logistik	1 Unit	-	-	-	15 kali	6 Laporan	
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah peta kebutuhan	15 Laporan	-	-	-	1 dokumen	-	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan energi dan protein perkapita**	**90,69%**	**100%**	**-**	**91,74%**	**90.66 %**	**42%**	
2.09.03.2.01	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	*Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis*	*90,63%*	*11 Kecamatan*	*11 Kecamatan*	*98,24%*	11 Kecamatan	11 Kecamatan	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	11 Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	99,23%	15 Buku	0 Laporan	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan singkronisasi	15 Laporan	-	-	-	4 kali	6 Laporan	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	4 Laporan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	98,03%	11 Kecamatan	0 Dokumen	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Gapoktan yang di Fasilitasi dan dibina	11 Dokumen	10 Gapoktan	10 Gapoktan	97,40%	10 Gapoktan	5 Unit	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Konsumen Pasaman Barat	10 Unit	-	-	-	11 Kecamatan	-	
2.09.03.2.02	*Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan*	*11 Unit*	-	-	97,16%	12 Laporan	-	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan singkronisasi	12 Laporan	-	-	-	4 kali	-	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	4 Laporan	23 ton, 1 Tahun	1 Tahun	97,16%	3 Ton	-	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.03.2.04	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	*Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun*	*83,00 skor*	*100%*	*100%*	*88,08%*	82,60 skor	38%	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	82,40 skor	1 dokumen	1 dokumen	86,68%	1 dokumen	0 Dokumen	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	1 Dokumen	12 KWT	12 KWT	86,68%	16 KWT	1 Laporan	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	16 Laporan	4 kali	4 kali	96,61%	4 kali	0 Laporan	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan**	**5 Laporan**	**100%**	**100%**	**97,65%**	**100 %**	**45%**	
2.09.04.2.01	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	*Adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan*	*100%*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*96,18%*	1 Dokumen	0 Dokumen	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku FSVA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	*96,18%*	20 buku	0 Dokumen	
2.09.04.2.02	*Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten*	*20 Dokumen*	*100 %*	*100 %*	*99,19%*	100 %	45%	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sikronisasi yang dilaksanakan	100%	20 Kali	20 Kali	*99,19%*	10 kali	6 Laporan	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyusunan Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyusunan, pengadaan cadangan pangan	10 Laporan	-	-	-	2 ton	-	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**	**100%**	**3 Kelompok**		**99,44%**	**100 %**	**45%**	
2.09.05.2.01	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar*	*100%*	*3 Kelompok*	*3 Kelompok*	*99,44%*	2 Kelompok	1 Kelompok	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	2 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	*99,44*	2 Kelompok	0 Dokumen	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan	2 Dokumen	-	-	-	1 kelompok	-	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi yang terdaftar	1 Sertifikat	-	-	-	2 komoditi	-	

Tabel 2.1 (Tabel TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaiaan Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang tersedia	2 Dokumen	-	-	-	1 paket	-	

Dari Tabel 2.1 (TC-29) dapat dilihat, rata-rata realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dengan capaian rata-rata berkisar diatas 99 % dengan kategori sangat tinggi. Realisasi anggaran terendah adalah sebesar 81,12% dan 86,68% yaitu untuk indikator kinerja penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
Rendahnya penyerapan anggaran pada belanja pegawai ini disebabkan karena anggaran yang disediakan melebihi jumlah kebutuhan pegawai yang ada dan masih adanya kekosongan jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat disebabkan karena adanya perubahan harga benih tanaman di pasaran. Harga dipasaran lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di DPA, sehingga mengganti merk benih tanaman dengan harga yang lebih rendah dari harga DPA. Selain itu hal ini juga disebabkan karena adanya beberapa jenis benih tanaman yang sudah tidak tersedia di pasaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat melalui tabel T-C.30

Tabel 2.2 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Tujuan											
1	Indeks Ketahanan Pangan (%)			60	61	62	63	80.82	-	62	63	
	Indikator Sasaran											
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)			90.65	90.68	90.73	90.73	89,25	-	90.73	90.73	
2	Ketersedian informasi harga, pasokan dan akses pangan (Kecamatan)			11	11	11	11	11	-	11	11	
3	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi (Skor)			82.40	82.60	82.80	83.00	90.30	-	81.0	82.0	
4	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)			90.63	90.66	90.69	90.72	112.99	-	91	91.5	

Ditinjau dari capaian indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan, dapat diketahui bahwa ada 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target, dan 5 (lima) Indikator Kinerja yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahan Pangan 2021-2026, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

A. Indikator Tujuan

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator tujuan pada Dinas Ketahanan Pangan. IKP menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan (*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Aspek ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Aspek akses atau keterjangkauan pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Aspek pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 2.1). Wilayah yang masuk kedalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota/provinsi dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Pada tahun 2022 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yaitu 80,82. Berdasarkan kategori tersebut Pasaman Barat berada

pada kategori 6 sebagai Kabupaten yang menuju sangat tahan pangan. Berikut disajikan pada Tabel 2.1 *Cut Off Point* IKP.

Tabel 2.3
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, 2022
Keterangan:
Kelompok IKP 1: Sangat Rentan (Prioritas 1)
Kelompok IKP 2: Rentan (Prioritas 2)
Kelompok IKP 3: Cukup Rentan (Prioritas 3)
Kelompok IKP 4: Cukup Tahan (Prioritas 4)
Kelompok IKP 5: Tahan (Prioritas 5)
Kelompok IKP 6: Sangat Tahan (Prioritas 6)

B. Indikator Sasaran

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Program yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut pada indikator ini yaitu penyediaan infrastruktur lumbung pangan. Target indikator capaian persentase ketersediaan pangan utama yakni beras, yang diukur dengan membandingkan jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat dikalikan 100 %. Pada tahun 2022 Berdasarkan angka produksi padi sebesar 95.753 ton dengan mengkonversikan Gabah Kering Giling (GKG) ke Beras adalah 61.550,028 ton. Jika dibandingkan dengan kebutuhan Beras di Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun 2022 sebesar 45.282,174 ton , masih terdapat Surplus sebesar 16.267,854 ton ditambah Cadangan Pangan pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 48,969 ton, jadi ketersedian pangan utama 40.416,92 ton persentase 89,25%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan pangan utama sangat baik, namun masih dibawah target yaitu 90,65%. Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- Luas lahan sawah setiap tahunnya mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan turunnya produksi Padi kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2021 sebesar 109.883 ton ke Tahun 2022 menjadi 95.753 ton.
- Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
- Belum dimanfaatkannya hasil pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) oleh *stakeholder* terkait sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan intervensi daerah rawan pangan.
- Belum ditingkatkannya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

2. Peningkatan Kelembagaan Pengelola Pasokan Komoditi

Target indikator peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis yaitu terlaksananya pembinaan kepada 10 gapoktan pelaksana Distribusi Pangan Masyarakat yang telah menerima bantuan pemerintah dari tahun 2009 sampai 2015. Hasil pembinaan telah dilaksanakan pada 10 LDPM berupa pembinaan administrasi, pengelolaan cadangan pangan dan pengelolaan jaringan distribusi pangan berupa jual beli komoditi gabah, beras dan jagung. Keberhasilan kegiatan pembinaan LPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat serta pelaku usaha mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dana tingkat Provinsi maupun kabupaten.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- Kurang harmonisnya kerjasama antara lembaga dengan pemilik RMU.
- Berkurangnya ketersediaan gabah dan pengurus inti lembaga, ada yang sudah pindah atau meninggal.

Untuk mengatasi permasalahan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat, maka Dinas Ketahanan Pangan telah

berusaha mencari solusi untuk pemecahan masalah yang ada diantaranya:

- Koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai Pembina Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Sumatera Barat tentang permasalahan lembaga yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
- Koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat terutama dengan Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluh (WKP) setempat untuk memperbaiki struktur organisasi lembaga distribusi tersebut.
- Perencanaan Anggaran pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat berupa Rapat Koordinasi dan Monitoring Kelompok.

3. Ketersedian informasi harga, pasokan dan akses pangan

Target dalam sasaran ini yaitu terlaksananya pemantauan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan pada 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Realisasi capaian untuk sasaran ini juga telah memenuhi target yaitu telah tersedianya informasi harga, pasokan dan akses pangan sejumlah target yang telah ditetapkan yaitu 11 kecamatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Pemantauan Harga dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan jadwal pasar di wilayah kerja petugas yang bersangkutan. Untuk kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan yaitu kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. Indikator sasaran ini berupa laporan harga pangan yang dipantau secara rutin serta dilaporkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas pemantau harga pasar.

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu. Skor PPH Kabupaten Pasaman Barat hasil analisis data Susenas tahun 2022 adalah 90,3. Angka ini

menunjukkan bahwa konsumsi pangan antar kelompok pangan sudah cukup beragam, namun masih belum berimbang. Ketidak seimbangan konsumsi pangan dipengaruhi oleh sumbangan energi per kelompok pangan yang tidak sesuai dengan standar kecukupan energi nasional. Untuk angka kecukupan energi sudah melebihi standar kecukupan energi ideal yaitu sebesar 2.413 % AKE. Kontribusi energi berlebih terlihat pada kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta buah dan sayur. Sedangkan untuk kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula masih belum tercukupi.

Tabel 2.2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	366,2	1.420	58,9	67,6	0,5	29,4	33,8	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	44,7	41	1,7	2,0	0,5	0,8	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	131,0	228	9,5	10,9	2,0	18,9	21,8	24,0	21,8
4	Minyak dan Lemak	30,7	277	11,5	13,2	0,5	5,7	6,6	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	23,7	127	5,2	6,0	0,5	2,6	3,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	17,0	51	2,1	2,4	2,0	4,2	4,8	10,0	4,8
7	Gula	20,6	75	3,1	3,6	0,5	1,6	1,8	2,5	1,8
8	Sayur dan Buah	245,7	145	6,0	6,9	5,0	30,1	34,6	30,0	30,0
9	Lain-lain	83,9	49	2,0	2,3	-	-	-	-	-
	Total		**2.413**	**100,0**	**114,9**		**93,4**	**107,3**	**100,0**	**90,3**

(Susenas, Maret 2022)
Keterangan:
*) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2.100 Kkal/kap/hari dan Protein 57 gr/kap/hari

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator Skor Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan pangan utama sangat baik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya skor PPH ideal dan belum berimbangnya konsumsi energi antar kelompok pangan diantaranya yaitu:

- Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA.
- Aspek daya beli masyarakat terhadap pangan B2SA.

- Minimnya ketersediaan pangan yang beragam bagi Masyarakat.
- Kebiasan masyarakat yang sulit untuk dirubah.
- Tingkat ekonomi atau pendapatan Masyarakat.
- Minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- Kurangnya pemahaman *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan.

5. Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari

Ketersediaan energi dan protein tahun 2022 sebesar 112,99%, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan energi dan protein dari 11 kelompok pangan. Penyumbang terbesar pada kelompok pangan hewani.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan pangan utama sangat baik. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai ketersediaan energi dan protein adalah produksi kelompok pangan dan ketersediaan kelompok pangan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran ketersediaan energi dan protein menurut WNPG X tahun 2012 adalah dengan meningkatkan produksi 11 kelompok pangan, melakukan impor komoditi pangan yang didatangkan/dimasukkan dari luar Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dilaksanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan energi dan protein masyarakat karena tidak semua kelompok pangan tersedia wilayah Kabupaten Pasaman Baarat. Dari ketersediaan energi dan protein dapat menjadi bahan acuan untuk mengevaluasi ketersediaan energi dan protein dan penetapan dan pemantapan kebijakan pangan dan gizi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Bertitik tolak dari isu tingkat Nasional dan Regional tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan Ketahanan Pangan. Peningkatan Ketahanan Pangan dapat diketahui dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan (*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga bahan pokok di daerah maka dibentuklah

Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas:

a. Memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran, distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok di daerah yang meliputi: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.
b. Dalam melaksanakan monitoring terkait ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok, Satuan Tugas Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Bupati.
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan kelancaran, distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok di daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kabupaten Pasaman Barat terlampir pada Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/62/BUP-PASBAR/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjabat sebagai Sekretaris dalam Satuan Tugas. Isu-isu penting dalam peyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

2.3.1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang berdasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumber daya daerah tersebut. Terpaut definisi tersebut maka permasalahan dihadapkan pada :

a) Saat ini masih terdapat masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah sehingga sulit mengakses pangan, yang menyebabkan terjadinya rentan pangan.
b) Adanya kecendrungan penurunan luas baku sawah sementara permintaan akan pangan pokok (beras) terus meningkat, dikhawatirkan terjadinya penurunan cadangan pangan masyarakat .
c) Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat yang rentan pangan belum maksimal.
d) Data ketersediaan pangan belum terakumulasi secara maksimal, sehingga menghambat dalam penyusunan Neraca

Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.

e) Gizi buruk/kurang pada daerah rawan pangan

2.3.2 Distribusi dan Cadangan Pangan

Masalah pangan merupakan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat yang harus tercukupi sampai tingkat keluarga dan individu. Agar masyarakat dapat mandiri maka dibuat kelembagaan masyarakat yang dilaksanakan dengan sistem tunda jual sehingga cadangan pangan yang ada di masyarakat dapat terwujud dan berjalan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi pangan adalah :

a) Lemahnya permodalan pada penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan kurangnya sarana mesin RMU. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu penguatan modal kelembagaan masyarakat yang bersifat hibah dengan pendampingan, pembinaan, dan monitoring serta pelaporan yang kontinu.
b) Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan, sehingga menyebabkan inflasi harga pangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan pemantauan terhadap harga dan stok pangan secara berkelanjutan dan melakukan gelar pangan murah dengan subsidi.
c) Informasi pasokan dan akses pangan di Kabupaten Pasaman Barat belum dirangkum secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat dilkukan yaitu melakukan pemantauan terhadap pasokan pangan di pasaran/lapangan secara berkelanjutan dan menggerakkan kembali kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang kurang aktif, agar akses pangan di daerah-daerah dapat berjalan baik.

2.3.3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

a) Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah pada kategori stunting (tumbuh pendek). Salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan gizi dan sarana pendukung kesehatan. Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam peningkatan asupan gizi dengan cara meningkatkan asupan makanan yang bergizi oleh masyarakat, peranan ini memberikan peluang besar pada masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan, menanam tanaman yang beragam dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarganya sendiri.
b) Konsumsi pangan yang kurang beragam karena ketergantungan konsumsi masyarakat pada satu jenis pangan pokok. Sampai saat ini mindset masyarakat adalah beras sebagai makanan pokok. Hal tersebut berdampak pada skor PPH Pasaman Barat yang rendah. Upaya yang

dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan yang sesuai dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman.

c) Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dan teknologi pengelolaan pangan lokal masih sangat terbatas.
d) Registrasi izin edar PSAT PDUK (Pangan Dalam Negeri Usaha Kecil) terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) sekarang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Menindaklanjuti hal tersebut perlu adanya sosialisasi/bimtek pendataan pelaku usaha serta sosialisasinya ke pelaku usaha.
e) Peningkatan kapasitas SDM pengawas keamanan pangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan pengujian. Untuk melakukan peningkatan kapasitas tersebut diperlukan bimtek terkait disertifikasi, mendorong penganggaran yang memadai serta menciptakan mini laboratorium on spot pada psar-pasar tradisional yang dinilai lebih beresiko pangan.
f) Sarana dan Prasarana untuk keamanan pangan belum ada, masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD memuat Tabel T-C.31 mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan memuat hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**3.103.598.165**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**3.103.598.165**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*10.982.000*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*10.982.000*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.982.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.982.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*2.666.988.110*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*2.666.988.110*	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bln	2.440.678.110	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bln	2.440.678.110	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	144.950.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	144.950.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	81.360.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	81.360.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*40.755.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*40.755.000*	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	35.240.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	35.240.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.515.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.515.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*11.750.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	*100%*	*11.750.000*	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	11.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	11.750.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%	**196.322.950**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%	**196.322.950**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.395.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.395.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.645.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.645.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.155.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.155.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.789.450	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.789.450	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	144.338.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	144.338.100	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*12.698.950*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*12.698.950*	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.698.950	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.698.950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*75.323.055*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan*	*100%*	*75.323.055*	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.173.055	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.173.055	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	33.150.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	33.150.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*	*100%*	*88.778.100*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*	*100%*	*88.778.100*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	67.627.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	67.627.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.150.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.150.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		**% ketersediaan pangan utama**	**90,68%**	**15.950.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		**% ketersediaan pangan utama**	**90,68%**	**15.950.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM*	*1 Paket*	*15.950.000*	*Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM*	*1 Paket*	*15.950.000*	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	0	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	0	
	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	15 Laporan	15.950.000	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	15 Laporan	15.950.000	
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	1 Dokumen	0	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	1 Dokumen	0	
C.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Ketersediaan energi dan protein perkapita**	**90,63%**	**272.849.300**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Ketersediaan energi dan protein perkapita**	**90,63%**	**272.849.300**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		*Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis*	*11 Kecamatan*	*153.676.100*	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*		*Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis*	*11 Kecamatan*	*153.676.100*	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0	
	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Singkronisasi dan Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	25.456.000	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Singkronisasi dan Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	25.456.000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	11 Unit	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	11 Unit	0	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	15.151.300	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	15.151.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	0	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	0	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	0	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	0	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	63.350.000	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	63.350.000	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	49.718.800	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	49.718.800	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		*Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan*	*12 Laporan*	*0*	*Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*		*Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan*	*12 Laporan*	*0*	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Ton	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Ton	0	
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	1 Ton	0	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	1 Ton	0	
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		*Terlaksananya penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal*	1 Laporan	0	*Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi*		*Terlaksananya penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal*	1 Laporan	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	0	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		*Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun*	*82,40 skor*	*188.180.467*	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*		*Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun*	*82,40 skor*	*188.180.467*	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43.593.900	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43.593.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16 Laporan	37.771.500	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16 Laporan	37.771.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	5 Laporan	37.807.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	5 Laporan	37.807.800	
D.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	100%	**69.471.800**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	100%	**69.471.800**	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		*Adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan*	*1 Dokumen*	*30.235.400*	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*		*Adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan*	*1 Dokumen*	*30.235.400*	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan	1 Dokumen	30.235.400	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan	1 Dokumen	30.235.400	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten*	*100%*	*39.236.400*	*Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten*	*100%*	*39.236.400*	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	13 Laporan	39.236.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	13 Laporan	39.236.400	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
E.	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**	**100%**	**46.679.600**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**	**100%**	**46.679.600**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar*	*2 Kelompok*	*46.679.600*	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*		*Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar*	*2 Kelompok*	*46.679.600*	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	0	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	0	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	40.298.500	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	40.298.500	
	Jumlah				**3.502.167.765**	**Jumlah**				**3.502.167.765**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang. Kajian dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dari harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang
4. disajikan dalam Tabel 2.4 (T-C.32) berikut:

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Program: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan: *Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksananya pelatihan olahan pangan	Rp. 100.000.000	RESES (PKS)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan PD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu. Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
c. Rencana Strategis
d. Rencana Kerja Pemerintah
e. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja PD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi pembangunan

dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Agenda Prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan rincian dari Tujuh Agenda Prioritas tersebut, maka Ketahanan Pangan tercakup dalam Agenda Prioritas yang pertama, yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, melalui “pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan”.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pangan Nasional RI pada Tahun 2020 - 2024 merumuskan Visi **“**Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong**”** yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

a. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan.
b. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
c. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
d. Menjamin k eamanan dan mutu pangan segar.
e. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
b. Memperkuat sistem logistik pangan.
c. Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi.
d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal.

e. Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
f. Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegrasi tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Nasional adalah :

a. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan
b. Pengadaan/penyiapan pasokan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga
c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi harga pangan
d. Pengawasan mutu, gizi dan keamanan pangan
e. Pengentasan kerawanan pangan dan gizi

Sedangkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas yaitu “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan dalam 5 misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Pada misi nomor 4 terkait dengan Ketahanan Pangan yaitu Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global, kemudian dijelaskan pada sasaran pokok misi keempat adalah:

a. Meningkatnya ketahanan dan keamanan konsumsi pangan,
b. Meningkatnya kualitas pangan masyarakat;
c. meningkatnya ketahanan pangan,
d. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis,
e. Meningkatnya Kesejahteraan Petani,
f. Meningkatnya nilai V.3 tambah produk pertanian, Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman,
g. Terlaksananya peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan,
h. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah,
i. Meningkatnya nilai ekspor Sumatera Barat, Meningkatnya investasi di Sumatera Barat,
j. Meningkatnya pengelolaan sentra-sentra UMKM,
k. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara,
l. Terlaksananya KEK Mandeh dan Siberut Khusus Mentawai,

m. Menurunnya jumlah penduduk miskin, Menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
n. Menurunkan daerah tertinggal, dan
o. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk misi keempat pada RPJPD tentang ketahanan pangan dijabarkan dalam misi ketiga pada RPJMD yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu

a. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan.
b. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang di tetapkan.
c. Masih ditemuinya daerah rawan pangan. IV.12
d. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
e. Peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum maksimal.
f. Pengembangan pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal belum optimal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kedaulatan pangan		Tujuan 1: Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	59.17	60	61	62	63	64
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	90,62	90,65	90,68	90,73	90,73	90,73
			Ketersedian informasi harga, pasokan dan akses pangan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00	83,00
			Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	90,61	90,63	90,66	90,69	90,72	90,75
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
			Level maturitas SPIP	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3
			% Penurunan temuan	60	70	80	85	90	100

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Visi Kabupaten Pasaman Barat **"Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"** yang dituangkan dalam misi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat berada pada misi 3 sasaran 1 yaitu "Peningkatan kedaulatan pangan". Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Jumlah Program sebanyak 5 program, 14 kegiatan, dan 28 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 3.502.167.765,- **(Tiga Milyar**

Lima Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 (T-C 33).

TABEL 3.2 (TC-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kab. Pasaman Barat

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Ketahanan Pangan								3.502.167.765,00					4.933.882.182,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.502.167.765,00					4.933.882.182,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								3.502.167.765,00					4.933.882.182,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.103.598.165,00					3.875.151.946,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.982.000,00					35.700.000,00
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	100 %	10.982.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	32.500.000,00
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.200.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.666.988.110,00					3.159.924.900,00
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Orang/bulan	100 %	2.440.678.110,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	3.069.214.500,00
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	144.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	17.790.400,00
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	81.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	72.920.000,00
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								40.755.000,00					40.620.000,00
2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	35.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	39.000.000,00
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	5.515.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1.620.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11.750.000,00					55.099.246,00
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Orang	100 %	11.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.099.246,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10.000.000,00
2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10.000.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								196.322.950,00					297.870.750,00
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	3.395.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.170.750,00
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	28.645.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.155.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	15.789.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	144.338.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	198.700.000,00
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								12.698.950,00					36.689.050,00
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	12.698.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	36.689.050,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.323.055,00					145.748.000,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	42.173.055,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	123.648.000,00
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	33.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.100.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								88.778.100,00					103.500.000,00
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Unit	100 %	67.627.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	50.840.020,00
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	9.000.000,00
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000,00
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	100 %	21.150.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	31.100.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.559.980,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								15.950.000,00					267.000.000,00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								15.950.000,00					267.000.000,00
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
						% ketersediaan pangan utama	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.73 %	1 Unit	1 paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	55.000.000,00
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik													
						% ketersediaan pangan utama	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.73 %	1 Laporan	1 paket	15.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	47.000.000,00
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
						% ketersediaan pangan utama	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.73 %	1 unit	1 paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	165.000.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								272.849.300,00					528.726.867,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								153.676.100,00					241.876.500,00
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Laporan	11 Kecamatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Laporan	11 Kecamatan	25.456.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	28.375.300,00
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	11 Unit	11 Kecamatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	11 Unit	28.375.300,00
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	100 Keluarga	11 Kecamatan	15.151.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Laporan	11 Kecamatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	50.000.000,00
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	10 Unit	11 Kecamatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	28.375.300,00
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Dokumen	11 Kecamatan	63.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	28.375.300,00
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	13 Dokumen	11 Kecamatan	49.718.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	28.375.300,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								0,00					117.453.750,00
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Dokumen	12 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	20.000.000,00
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	4 Ton	12 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Ton	69.000.000,00
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Ton	12 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	1 Ton	28.453.750,00
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi								0,00					20.000.000,00
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								119.173.200,00					149.396.617,00
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Dokumen	82,80 skor	43.593.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	52.396.617,00
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	0 Dokumen	82,80 skor	43.593.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen	52.396.617,00
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Laporan	82,80 skor	37.771.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	54.500.000,00
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun													
						Ketersediaan energi dan protein perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.69 %	1 Laporan	82,80 skor	37.807.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	42.500.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								69.471.800,00					214.923.381,00
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								30.235.400,00					60.000.000,00
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
						Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	30.235.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	60.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								39.236.400,00					154.923.381,00
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.000.000,00
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
						Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	13 Laporan	100 %	39.236.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	13 Laporan	70.289.957,00
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
						Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.633.424,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								40.298.500,00					48.079.988,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								40.298.500,00					48.079.988,00
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Kelompok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan													
						Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Kelompok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	10.019.997,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Kelompok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	10.019.997,00
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
						Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Kelompok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	10.019.997,00
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
						Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokuman	2 Kelompok	40.298.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	10.019.997,00
												TOTAL	**3.502.167.765,00**					**4.933.882.182,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-4 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni peningkatan kedaulatan pangan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap ketercapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan 5 program (teknis dan rutin), 14 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 3.502.167.765,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)**.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan ketahanan pangan. Mengingat masalah pangan dan gizi bersifat lintas sektoral, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan tujuan, sasaran serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Membangun terus kemitraan dengan semua *stakeholder* merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

Sukamenanti, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 100.3.3.2/102 /BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja

masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;

3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat 2024;
10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
11. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan

dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan

12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/102 /BUP-PASBAR/2023
Tanggal : 24 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Tim Penyusun	Jabatan dalam Tim
Kepala Dinas	Ketua
Sekretaris Dinas	Sekretaris
Perencana Ahli Muda Sub-Substansi Program	Anggota
Kasubag TU dan Keuangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinator
Analis Ketahanan Pangan - Distribusi Pangan	Anggota
Analis Ketahanan Pangan - Harga Pangan	Anggota
Analis Ketahanan Pangan - Cadangan Pangan	Anggota
Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Koordinator
Analis Ketahanan Pangan - Ketersediaan Pangan	Anggota
Analis Ketahanan Pangan - Akses Pangan	Anggota
Analis Ketahanan Pangan - Kerawanan Pangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
Kabid. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordinator
Analis Ketahanan Pangan - Konsumsi Pangan	Anggota
Analis Ketahanan Pangan - Penganekaragaman Pangan	Anggota
Analis Ketahanan Pangan - Keamanan Pangan	Anggota
Analis Pengolah Hasil Pertanian	Anggota

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan pertamanan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan

dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Nomor:800.1/023/SK-DLH/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas

Lingkungan Hidup serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi dinas sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup dan kehutanan, baik Bidang Penataan, Penaatan, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P4LH), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH), Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja DLH Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa

rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;

4) Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* OPD *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2024 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DLH sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja DLH pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DLH dan Pencapaian Renstra DLH s.d. Tahun 2022

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S.D. Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S.D. Tahun 2023	
							Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	5 kecamatan	2 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	100 %	3 kecamatan	3 kecamatan	60 %
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	28,50 %	18,28 %	28,50 %	18,28 %	64,14 %	29,50 %	18,28 %	64,14 %
			Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (IL) dan IPPLH	49 objek	49 objek	40 objek	30 objek	75 %	40 objek	30 objek	61,22 %
			Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah objek yang diawasi dan dibina	49 objek	49 objek	40 objek	30 objek	75 %	40 objek	30 objek	61,22 %
			Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Persentase pengkajian dampak lingkungan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Kegiatan Pembinaan sekolah berbasis lingkungan hidup (adiwiyata)	Jumlah sekolah Adiwiyata yang terbina	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor, sumber mata air dan kawasan mangrove	32 %	15 %	15 %	15 %	100 %	15 %	15 %	100 %
			Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	20	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Kualitas Air	56,29	61,25	55,89	61,25	109,59 %	50	50	100 %
				Indeks Kualitas Udara	90,75	94,36	90,34	94,36	104,45%	90,43	90,43	100 %
			Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah objek pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industry			15 objek					
			Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah objek pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair			25 objek					
			Kegiatan Pengujian kualitas air sungai	Jumlah sungai yang diuji kualitasnya	2 sungai	2 sungai	2 sungai	2 sungai	100 %	2 sungai	2 sungai	100 %
2	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	6 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100 %	6 lokasi	6 lokasi	100 %

			Kegiatan Pemeliharaan RTH	Lokasi RTH yang dipelihara	6 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100 %	6 lokasi	6 lokasi	100 %
2	5	17	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase PJU dalam Kondisi Baik	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB
2	5	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	Level 3	100 %
				Skoring Penilaian LKj/SAKIP	B	B	B	B	B	B	B	B
				Skoring penilaian LPPD	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100 %	57 unit	36 unit	63 %
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	5	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		9 unit	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin		9 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	5	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70 orang	8 orang	6 orang	6 orang	100 %	14 orang	4 orang	5,71

			Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat	70 orang	8 orang	6 orang	6 orang	100 %	14 orang	4 orang	5,71

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 (delapan) Program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dimana relisasi pencapaian target dan sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut sesuai Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLH Tahun 2016-2021, yaitu :

Tabel 2.2
Penilaian Capaian Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,74	71,50	104,02	Tercapai
2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	55,89	61,25	109,59	Tercapai
3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	90,34	94,36	104,45	Tercapai
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	50,84	46,81	92,07	Tercapai
5. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	93	64,29	69,13	Kurang Tercapai
6. Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	Tercapai
7. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	%	100	100	100	Tercapai
8. Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS, RPJP)	Dokumen	1	0	0	Tidak Tercapai
9. Penghargaan Sekolah Adiwiyata	Penghargaan	3	0	0	Tidak Tercapai
10. Penghargaan Kalpataru	Penghargaan	2	0	0	Tidak Tercapai
11. Penghargaan PROPER Daerah	Penghargaan	6	6	100	Tercapai
12. Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kab/kota	MHA	3	0	0	Tidak Tercapai
13. Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	Kecamatan	4	4	100	Tercapai
14. Persentase sampah yang tertangani	%	28,25	18,29	64,74	Belum Tercapai
15. Peningkatan Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100	Tercapai
16. Peningkatan Level maturitas SPIP	Level	3	3	100	Tercapai
17. Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan	%	40	40	100	Tercapai

keuangan					

Sumber : Laporan Kinerja DLH Kab Pasaman Barat Tahun 2022

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase sampah yang tertangani masih kurang, hal ini disebabkan karena armada transportasi sampah yang berkurang jumlahnya (jumlah truk sampah hanya 5 unit dan yang dapat digunakan 3 unit saja, jumlah becak sampah juga tidak mencukupi yaitu hanya sebanyak 8 unit. Begitu juga halnya dengan jumlah kontainer sampah yang dalam keadaan baik saat ini hanya sebanyak 10 unit dari total kontainer tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) sebanyak 30 unit.
2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Pasaman Barat tidak dapat dilaksanakan, karena dokumen Revisi RTRW dari Dinas PUPR juga belum dapat dituntaskan.
3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata belum diperoleh karena belum adanya sekolah yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Adiwiyata pada tahun 2022. Belum optimalnya pembinaan kepada Calon Sekolah Adiwiyata yang dilakukan oleh DLH selama tahun 2022 sehingga belum ada calon sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria penilaian.
4. Penghargaan Kalpataru belum memenuhi kriteria penilaian dari provinsi Sumatera Barat sehingga masih perlu pembinaan lanjutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.
5. Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota belum dapat dianggarkan pada tahun 2022.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada masa-masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganggarkan kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat mendukung Pencapaian Misi Ke-VI (ke enam) yakni :

Tabel 2.2.1.
Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan DLH
Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola Sumber Daya Alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam sesuai penataan ruang dan berwawasan lingkungan	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	**Indikator :** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Uraian tugas pokok dan fungsi DLH dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala DLH yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian target kinerja DLH Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2022 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja P elayanan DLH Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra DLH						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	69,61	69,91	71,05	70,89	70,84	66,85	68,74	71,50	
2	Persentase sampah yang tertangani	-	-	28,16	28,00	27,88	27,75	27,58	27,50	28,25	18,29	
2	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan	-	-	87	88	89	90	92,86	92,95	93	64,29	
3	Jumlah Penghargaan lingkungan tingkat propinsi dan nasional yang diperoleh	-	-	2	3	5	7	-	1	1	1	
4	Level Maturitas SPIP	-	-	NA	3	3	3	3	3	3	3	
5	Opini terhadap laporan keuangan OPD	-	-	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	NILAI SAKIP	-	-	NA	B	B	B	B	B	B	B	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dinas lingkungan hidup kabupaten pasaman barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1) Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada, baik truck sampah, becak sampah maupun kontainer sampah sehingga belum optimalnya kinerja pelayanan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat.
2) Permasalahan sertifikasi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum tuntas sehingga menjadi penghalang untuk proses pengajuan proposal bantuan pembangunan fisik melalui dana APBN.
3) Minimnya anggaran untuk mengoptimalkan kinerja laboratorium lingkungan DLH Kabupaten Pasaman Barat sehingga kita masih menggunakan jasa laboratorium terakreditasi di Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat.
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, misalnya dalam hal penanganan sampah, perlindungan tanaman dan hutan, serta upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024 membutuhkan dana sebesar **Rp.5.848.058.754** (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) program, 14 empat belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan DLH dengan mengacu pada Renstra DLH 2021-2026.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi :
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Dinas Lingkungan Hidup								5.848.058.75
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.848.058.75
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								5.848.058.75
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.081.874.83
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.622.68
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	14.622.68
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.364.235.50
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	39 Orang/bulan	100 %	3.144.107.50
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Dokumen	100 %	133.200.00

2	1 1	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Dokume n	100 %	86.928.00
2	1 1	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								29.525.00
2	1 1	0 1	2. 03	00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Dokume n	589 Unit	29.525.00
2	1 1	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								27.136.00
2	1 1	0 1	2. 05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bintek/Diklat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	2 Orang	27.136.00
2	1 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								224.477.65
2	1 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhn pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Paket	100 %	4.510.00
2	1 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhn pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Paket	100 %	59.470.65

2	1 1	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhn pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	65 Laporan	100 %	160.497.00
2	1 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								109.640.46
2	1 1	0 1	2. 07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/perlengkapan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Unit	3 Unit	30.304.50
2	1 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								79.335.96
2	1 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Laporan	100 %	50.944.99
2	1 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Laporan	100 %	28.390.96
2	1 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								232.901.56
2	1 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	37 Unit	57 unit	81.916.20
2	1 1	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	15 Unit	57 unit	15.080.00
2	1 1	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	34 Unit	57 unit	28.952.00
2	1 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	100 %	1 Unit	57 unit	106.953.36
2	1 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								250.159.25
2	1 1	0 2	2. 02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								250.159.25
2	1 1	0 2	2. 02	00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								
						Tersedianya Dokumen Perencanaa n Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dok ume n	250.159.25

2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								83.995.56
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								83.995.56
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
						Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air dan Udara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.09 dan 90.55 Indeks	1 Dokumen	42.75 dan 93.89 Indeks	83.995.56
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								99.029.12
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								99.029.12
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.02 Indeks	1 Ha	46.71 Indeks 46,71 Indeks 46.71	99.029.12
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								105.701.50
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								105.701.50
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								
						Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/KotaKetaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	95 %95 %	1 Dokumen	95 %	45.097.16

						yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota							
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
						Ketaatan penanggung gjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota Ketaatan penanggung gjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 95 %	1 Badan Usaha	95 %	60.604.34
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								20.613.92
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20.613.92
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
						Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Penghargaan	28 Entitas	25 Penghargaan	20.613.92
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								20.683.20

2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								20.683.20
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								
						% penanganan pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Persentase pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Pengaduan	100 %	20.683.20
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								1.295.634.32
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								1.295.634.32
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								
						Persentase jumlah sampah yang tertangani	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang tertangani	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.00 %	0 Ton	29 %	1.295.634.32
TOTAL													5.848.058.75

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, pokir dari anggota Dewan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan uraian tabel berikut.

Usulan Pokir Dewan Untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Kegiatan	Lokasi	Pelaksana	Anggaran	Keterangan
Penanaman Cemara Laut	Pantai Muara Sasak	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	200.000.000	Usulan Anggota Dewan an. Endra Yama Putra, S.Si

BAB III

TUJUAN SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionaL

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Adapun sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan prioritas pembangunan Propinsi terletak pada program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi “Sakato Plan”.

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2019 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa

dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain). (4) Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLHK 2020–2024, sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasaman Barat 2016–2021 dalam mendukung pencapaian misi ke 6 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016–2021.

Tabel 3.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024

No	PEMBANGUNAN	BASELINE 2019	SASARAN 2024
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
3	**Lingkungan**		
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	~ 26%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	66,5-68,5
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)

Sumber : Renstra KLHK 2020-2024

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket
I	**Nasional**		
3.	Pemerataan dan Kewilayahan	RKP 2019	
3.14	Desa dan kawasan pedesaan	RKP 2019	
3.14.7	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan : 3. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim. 4. Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam	RKP 2019	

	pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna.		
III	**Provinsi**		
1	Pembangunan agama dan budaya	RPJP Provinsi 2005 - 2025	
2	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005 - 2025	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005 - 2025	
4	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005 - 2025	
5	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005 - 2025	

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2023, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renj

a DLH Tahun 2024

Visi Bupati : **Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"**			
Misi II : Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3 di nagari 2. Peningkatan penyediaan sarana/prasarana pengelolaan sampah/LB3 3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup. 5. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6. Peningkatan pengembangan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah 7. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah dan penegakan hokum	1. Penambahan sarana prasarana, pengembangan budidaya BSF untuk penangan sampah organik, optimalisasi peran dan keberdayaan bank sampah. 2. Penyediaan TPA Sampah yang representatif (Sanitary Landfill/Control Landfill) dan pengembangan pengelolaan sampah pada TPA. 3. Penyediaan incinerator untuk pengolahan LB3. 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders. 5. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat/stakeholders. 6. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan pada umumnya dan isu persampahan/Limbah B3 pada khususnya kepada sektor lain 7. Pengembangan penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif
Misi III : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menetapkan kawasan konservasi/pemeliharaan. 3. Mengendalikan mutu lokasi konservasi/pemeliharaan. 4. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan- kegiatan pengawasan. 5. Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak. 6. Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan.	1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. 2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan. 3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya 4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi 5. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaaan. 6. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas/design model-model pemeliharaan 7. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan 8. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar. 9. Pencegahan terjadinya degradasi lahan. 10. Penerapan teknologi pengelolaan limbah. 11. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,22	68,20	68,74	69,27	69,81	70,34	70,87	70,87
	Indeks Kualitas Air	42,50	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29	56,29
	Indeks Kualitas Udara	93,86	90,23	90,34	90,45	90,55	90,65	90,75	90,75
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46,68	48,76	50,84	52,93	55,02	57,11	59,20	59,20
	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan (IL)	92,86 %	92,95 %	93 %	94,75 %	96,50 %	98,25 %	100 %	100 %
	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan & teknis penyimpanan sementara limbah B3	100	100	100	100	100	100	100	100
	Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS)	-	-	-	-	1	1	-	2
	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) & kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	0	0	3	5	7	9	13	13
	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12	15	15	18	25	28	34	34
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	27,58 %	28,00 %	28,25 %	28,50 %	29,00 %	29,25 %	29,50 %	29,50 %
3	Peningkatan Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3
	Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %	70 %	80 %	80 %

Sumber : Renstra DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah yang diukur dengan persentase sampah yang tertangani.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DLH, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DLH Kab. Pasaman Barat Tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 8 (delapan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kab. Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp.5.977.376.603** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) yang akan dialokasikan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DLH Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS LINGKUNGAN HIDUPKAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Lingkungan Hidup						5.977.376.603,00							3.210.633.277,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.977.376.603,00							3.210.633.277,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.977.376.603,00							3.210.633.277,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	-			100 %	4.026.287.418,00						-	1.233.805.353,00	

	2	1 1	0 1	2. 01		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	-			8 Dokume n	14.622.687 ,00			-	Meningkat kan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerinta han daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat an tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	-	17.284.500 ,00	
	2	1 1	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokume n	14.622.687 ,00	- Kab. Pasam an Barat, Pasam an, Aua Kunian g	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	Meningkat kan kualitas tata kelola penyeleng garaan pemerinta han daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat an tata kelola pemerinta han dan pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup		17.284.500 ,00	DINAS LINGKU NGAN HIDUP

																publik				
	2	1 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	-			100 %	3.494.153. 355,00			-	Peningkat an tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	-	653.656.44 6,00	
	2	1 1	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	3.273.425. 355,00	- Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Peningkat an tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup		422.626.44 6,00	DINAS LINGKU NGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	133.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup		149.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	87.528.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup		81.090.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																publik				
	2	1 1	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	-			589 Unit	29.525.000 ,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	-	38.250.000 ,00	
	2	1 1	0 1	2. 03	00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	29.525.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup		38.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Bintek/Diklat	-			2 Orang	16.628.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	-	34.183.357,00	

	2	1 1	0 1	2. 05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	16.628.000 ,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		34.183.357 ,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhn pelayanan administrasi dan operasional kantor	-			100 %	209.493.550,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup	-	220.101.050,00	

																publik				
	2	1 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.505.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup		5.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.470.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup		40.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	145.517.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup		173.691.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																public				
	2	1 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/perlengkapan kantor	-			3 Unit	30.304.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Dinas Ligkungan Hidup	-	3.600.000,00	
	2	1 1	0 1	2. 07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.304.500 ,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Dinas Ligkungan Hidup		3.600.000, 00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	-			100 %	79.324.126 ,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup	-	89.760.000 ,00	

	2	1 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.944.999 ,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup		58.140.000 ,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	28.379.127 ,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah Peningkatan tata kelola pemerinta	Dinas Lingkungan Hidup		31.620.000 ,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																han dan pelayanan publik			
	2	1 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	-			57 unit	152.236.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Dinas Lingkungan Hidup	-	176.970.000,00	
	2	1 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	81.916.200,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Dinas Lingkungan Hidup		102.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15.080.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kunian g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Aset Dinas Lingkungan Hidup		19.380.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																publik				
	2	1 1	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	28.952.000 ,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Aset Dinas Lingkungan Hidup		41.820.000 ,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26.288.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Dinas Lingkungan Hidup		13.770.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-			1 Dokumen	250.159.285,00							-	52.000.000,00	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Barat	-			1 Dokumen	250.159.285,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	KLHS	-	52.000.000,00	

															daya manusia				
	2	1 1	0 2	2. 02	00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	250.159.285,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	KLHS		52.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air dan Udara	-			56.09 dan 90.55 Indeks	83.995.563,00						-	131.085.896,00	

	2	1 1	0 3	2. 01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Air dan Udara	-			42.75 dan 93.89 Indeks	83.995.563 ,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dunia usaha	-	131.085.896,00	
	2	1 1	0 3	2. 01	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut															
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	83.995.563 ,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dunia usaha		131.085.896,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4	2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-			55.02 Indeks	174.660.420,00						-	348.246.886,00	
	2	1 1	0 4	2. 01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-			46.71 Indeks 46,71 Indeks 46.71	174.660.420,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Ruang Terbuka Hijau	-	348.246.886,00	
	2	1 1	0 4	2. 01	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	174.660.420,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat	Ruang Terbuka Hijau		348.246.886,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																an kualitas sumber daya manusia				
5	2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	-			95 % 95 %	105.701.500,00						-	166.063.400,00	
	2	1 1	0 6	2. 01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	-			95 %	105.701.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,	Penanggungjawab usaha	-	166.063.400,00	

						PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	pemerintah Kab/Kota									terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia				
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	45.097.160,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Penanggungjawab usaha		26.973.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	60.604.340,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil	Penanggungjawab usaha		139.089.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia				
6	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	-			25 Penghargaan	20.610.875,00						-	33.275.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-			25 Penghargaan	20.610.875,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Lembaga/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan hidup	-	33.275.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															

							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				28 Entitas	20.610.875,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Lembaga/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan hidup		33.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% penanganan pengaduan	-			100 %	20.683.207,00							-	88.721.133,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-			100 %	20.683.207,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber	Masyarakat Kab. Pasaman Barat	-	88.721.133,00	

																daya manusia				
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani				1 Pengaduan	20.683.207,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Pasaman Barat		88.721.133,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-			29.00 %	1.295.278.335,00							-	1.157.435.609,00	

	2	1 1	1 1	2. 01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tertangani	-			29 %	1.295.278. 335,00			-	Meningkat kan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpenget ahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat an kualitas sumber daya manusia	Masyarakat/ Objek Penghasil Sampah	-	1.157.435. 609,00	
	2	1 1	1 1	2. 01	00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabup aten/kota atau TPA/TPST Regional				0 Ton	1.295.278. 335,00	- Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Meningkat kan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpenget ahuan, terampil dan berdaya saing Peningkat an kualitas sumber daya manusia	Masyarakat/ Objek Penghasil Sampah		1.157.435. 609,00	DINAS LINGKU NGAN HIDUP
	JUMLAH											**5.977.376. 603,00**							**3.210.633. 277,00**	

BAB V
PENUTUP

Dokume Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program; kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intens antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Padang Tujuh, Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

H. Edison Zelmi, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197511111997031003

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcom yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang responsive dan aspiratif.

Simpang Empat, 23 Juni 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Hj. YULISNA,SH
NIP.196507031991022001

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21
2.4. Telaahan Terhadap Rancangan RKPD 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat 33

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD 34
3.3. Rencana Program dan Kegiatan 35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 48

BAB V. PENUTUP 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) tahap yakni dokumen Renja awal dan dokumen Renja Perubahan. Dokumen Renja awal disusun sebelum penetapan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan. Sementara Dokumen Renja Perubahan disusun menjelang perubahan anggaran (DPPA/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) tahun berjalan. Dokumen ini merupakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023. Dasar pertimbangan perubahan Renja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya penyesuaian pagu anggaran pada Renja sesuai dengan kemampuan daerah. Penyesuaian pagu anggaran tersebut berdampak pada pencapaian target sehingga perlu dilakukan penyesuaian pencapaian target yang dapat direalisasikan oleh Perangkat Daerah. Dasar pertimbangan perubahan Renja yang lain adalah dalam rangka penyesuaian dokumen perencanaan terhadap Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Kembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap penyusunan rancangan awal Renja Perubahan, tahap penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluas kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah Perubahan untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SOPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,* memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari 11 kegiatan. Sementara pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang didukung oleh 12 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel T-C. 29 di bawah ini :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Pasaman Barat

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	12					Administrasi Kependudukan dan Capil									
2	12	01	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Buku/Tahun	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	100%	-	-	-
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Buku/Tahun	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	100%	-	-	-

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	38 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	24 Orang	24 Orang	100%
2	12	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jjumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	5 Orang	14 Orang	14 Oorg	14 Orang	100%	5 orang	5 org	100%
2	12	01	2	03	06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 Orang	7 Orang	7 org	7 Orang	100%	7 Orang	7 org	100%
2	12	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	100%	100%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
2	12	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Orang	2 Orang	2 org	2 Orang	100%	2 Orang	2 org	100%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	14 Orang	100%
2	12	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	14 Orang	100%
2	12	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	18%	100%	100%	100%	100%	100%
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	-	-	-
5	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
5	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	25 laporan	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan	25 laporan	100%
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100%	100%	10%	100%	100%	100%	230%	230%
2	12	01	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 paket	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	23 unit	230%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	500 laporan	500 laporan	500 laporan	100%	500 laporan	500 laporan	100%
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	630 Unit	618 Unit	618 unit	618 Unit	100%	71 Unit	67 unit	94%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	20 Unit	20 unit	20 Unit	100%	21 Unit	17 unit	81%
2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	44 Unit	44 unit	44 Unit	100%	49 Unit	49 unit	100%
2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	80%	64%	64%
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	80%	64%	64%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	02	2	01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.750 dokumen	3.750 dokumen	3.750 dokumen	3.750 dokumen	100%	3.750 dokumen	2691 dokumen	72%
2	12	02	2	01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penrbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	98.000 dokumen	98.000 dokumen	98.000 dokumen	98.000 dokumen	100%	98.000 dokumen	53.548 dokumen	55%
2	12	02	2	04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2	12	02	2	04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	-	-

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53%	99.53%
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53%	99.53%
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.051 dokumen	13.051 dokumen	1.3.051 dokumen	13.051 dokumen	100%	13.051 dokumen	12.990 dokumen	99.53%
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	100%	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	2 Buku 6 OPD 6 Jaringan	2 Buku 6 OPD 6 Jaringan

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 dokumen	3 dokumen	13 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	2 dok	67%
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	0	25%	0	-	100%	86%	86%
2	12	04	2	03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	7 OPD	0	-	-	-	7 OPD	6 OPD	86%

Dari tabel T-C.29 dapat dilihat bahwa semua target program yang terdiri dari 4 (empat) program pada tahun 2022 tercapai 100%. Ke empat program tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian realisasi kinerja sebesar 100%. Namun beberapa kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra dan Renja tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang cukup berarti sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra dan Renja untuk dilaksanakan di tahun 2023 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan tersbut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya untuk kegiatan yang dimaksud.
2. Masalah-masalah teknis, diantaranya:
   a. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai karena banyak yang rusak baik yang ada di Disdukcapil Kabupaten maupun yang ada di Kantor Camat. Biaya perbaikan dan pengadaan alat sangat terbatas.
   b. Gangguan jaringan sering terjadi sehingga memperlambat proses pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.
   c. Kurang nya pelatihan-pelatihan bagi SDM Disdukcapil. Hal ini sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sering berubah terkait administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berkut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM SKPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi

daerah, Renstra dan Renja.

6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7 Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutukan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Tabel 2.2.1 (Tabel T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	% Penurunan Temuan	50%	40%	30%	20%	50%	40%	20%	10%	
		Nilai SAKIP	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
		Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,5	85	85,7	83,44	84,5	85	85,7	
		1. Penerbitan KTP-El (dokumen)	35	35	35	35	34.039	15.059	35	35	
		2. Penerbitan KIA (dokumen)	23	23	23	23	23	20.178	23	23	
		3. Penerbitan KK (dokumen)	40	40	40	40	50.859	18.311	45	45	
		4. Penerbitan Dokumen Pindah Datang (dokumen)	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.243	2.75	2.75	
		5. Penerbitan Dokumen Adminduk untuk Penduduk Rentan Adminduk (dokumen)	1	1	1	1	1.03	448	1	1	
		6. Laporan Data Penduduk Non Permanen (laporan)	4	4	4	4	4	2	4	4	

No	Indikator Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		7. Penerbitan Akta Kelahiran (dokumen)	16	12	12	12	16.626	11.772	12	12	
		8. Penerbitan Akta Kematian (dokumen)	2	1	1	1	1.854	1.189	1.2	1.2	
		9. Penerbitan Akta Perkawinan (dokumen)	80	50	50	50	106	26	50	50	
		10. Penerbitan Akta Perceraian (dokumen)	1	1	1	1	1	3	1	1	
		11. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan OPD/Lembaga (OPD)	10	10	10	10	30	30	32	34	
		12. Integrasi pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan dengan OPD (OPD)	2	5	6	7	3	6	7	8	
		13. Inovasi Pelayanan yang Dikelola (Inovasi Pelayan)	17	20	22	24	17	23	24	25	
		14. Penyusunan Dokumen Penyajian Data Kependudukan (buku dan laporan)	3 dan 12	3 dan 12	3 dan 12	3 dan 12	3 dan 12	2 dan 6	3 dan 12	3 dan 12	
		15. Pengelolaan Jaringan SIAK (jaringan)	6	6	6	6	6	6	6	6	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai inovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan. Namun demikian, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi:

a) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat terendah, yakni nagari. Dengan demikian, masyarakat tidak harus ke Simpang Empat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Hal ini tentunya akan menghemat banyak waktu, tenaga, dan biaya;
b) Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai hingga ke tingkat nagari. Gangguan jaringan masih kerap menjadi masalah, karena masih ada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
c) Penyediaan sistem automatis (auto-print) bagi layanan administasi kependudukan tertentu. Layanan auto-print dapat menjadi solusi untuk menghindari kerumunan dan antrian panjang di loket pelayanan. Namun, diperlukan investasi sarana dan prasarana yang cukup besar agar layanan ini tersedia dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan memastikan ketersediaan program/kegiatan, anggaran, dan data yang akurat untuk mendukung capaian kinerja;
d) OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih sangat rendah. Sampai saat ini, dari 40 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat, baru 3 (7,5%) OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Pemanfaatan data kependudukan dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat;

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat membutuhkan pada awal nya membutuhkan pagu sebesar Rp.

4.436.987.591,- . Namun karena keterbatasan anggaran, Tim penyusun RKPD Tahun 2024 telah menetapkan pagu masing-masing perangkat daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp. 3.922.859.704,-** (*Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah)* untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin) yang direncanakan. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.830.534.597	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.663.265.810	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	3,002,508,097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	2.520.092.785	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24 Orang	2,761,054,379	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24 Orang	2.380.055.592	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jjumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	5 orang	155,873,718	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jjumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	5 orang	155,873,718	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 orang	85,580,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 orang	143.160.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	100%	15,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	100%	15,600,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 orang	15,600,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 orang	15,600,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	57,705,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	81.705.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63 Paket	24,000,000					24,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	39,605,500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	39,605,500	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	18,100,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	18,100,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	164,372,556	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	330,171,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,151,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,151,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	38,626,835	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	145,00,000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	24,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10,000,000	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,244,721	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12,100,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	75,350,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	150,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100%	71,600,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100%	46,500,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	71,600,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	35,500,000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	271,276,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	345,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	78,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	110,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	75,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	75,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	155,200,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	155,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	75,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	75,200,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	618 unit	55,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	618 unit	55,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 unit	25,000,000	
	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	80%	101,963,219	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	80%	143,859,361	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	91,963,219	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	98,463,219	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.750 dokumen	56,200,000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.750 dokumen	56,200,000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penrbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	98.000 dokumen	35,763,219	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penrbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	98.000 dokumen	42,263,219	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase meningkatnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 layanan	10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		penyelenggaran pendaftaran penduduk	1 layanan	45,396,142	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa Kependudukan dan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	45,396,142	
	Program Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	90%	71,100,000	Program Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	90%	71,100,000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	100%	36,100,000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	100%	36,100,000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.051 dokumen	36,100,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.051 dokumen	36,100,000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pencatatan Sipil dengan Baik	100%	35,000,000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pencatatan Sipil dengan Baik	100%	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatann Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	12 laporan	35,000,000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatann Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	12 laporan	35,000,000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 dokumen, 7 OPD dan 6 jaringan	155,000,000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 dokumen, 7 OPD dan 6 jaringan	53,231,058	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1,000,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	17,731,058	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 dokumen	10,000,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 dokumen	17,731,058	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	145,000,000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	35,500,000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	7 OPD	35,000,000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	7 OPD	35,500,000	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil	11 Kecamatan	110,000,000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan	11 Kecamatan	150,400,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Didalam undang- undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi Kependudukan secara rasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan untuk perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional telah mendorong terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yaitu belum meratanya persentase penerbitan akte kelahiran bagi anak di setiap daerah, tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan serta sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product, out of service,* dan *out of sale.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	% penurunan temuan BPK atas laporan keuangan Disdukcapil			50%	40%	30%	20%	10%	5%
		Nilai SAKIP Disdukcapil			B	B	B	BB	BB	BB
		Level Maturitas			2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
			Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	% penurunan temuan BPK atas laporan keuangan Disdukcapil	50%	40%	30%	20%	10%	5%
				Nilai SAKIP Disdukcapil	B	B	B	BB	BB	BB
				Level Maturitas SPIP Disdukcapil	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
2	Peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang Profesional Akuntabel dan Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat			83	84,5	85	85,7	85,8	86
			Terwujudnya pendaftaran penduduk secara optimal	Rasio Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk % Penduduk yang Memiliki KK % Penduduk Usia >18 Tahun yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA	100 100 30	100 100 35	100 100 40	100 100 45	100 100 50	100 100 60
			Terwujdunya pencatatan sipil secara optimal	Rasio Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil % Penduduk usia <18 Tahun yang mempunyai Akte Kelahiran % Penerbitan Akte	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh OPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 4 (empat) program yang akan didukung oleh 16 (Enam belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**4,263,907,532**					**8,279,355,632**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,906,873,889**					**3,885,342,034**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**10,100,000**
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	15 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,100,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,081,634.379**					**3,052,006,723**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai		100 %	24 Orang/bulan	100 %	2,881,054,379	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,956,426,723

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai		100 %	12 Dokumen	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai		100 %	1000 Dokumen	100 %	85,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	85,580,000
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15,600,000**					**15,600,000**
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil		100 %	2 Laporan	100 %	15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**75,010,000**					**75,760,000**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	63 Paket	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel	100 %	24,240,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	14 Orang	100 %	40,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel	100 %	40,501,000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	5 Orang	100 %	10,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel	100 %	11,019,100
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**250,359,510**					**252,863,111**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	5,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,202,510

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	4 Paket	100 %	145,309,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	146,762,399
2	12	01	2.06	03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,010,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	12,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12,221,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	24 Laporan	100 %	78,879,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	79,668,002

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	12 Dokumen	100%	7,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,999,200
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50,050,000**					**50,550,500**
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah		100 %	6 Unit	100 %	39,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	39,440,500
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah		100 %	1 Unit	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	11,110,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**261,500,000**					**264,115,000**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	500 Laporan	100 %	76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	77,265,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksanaanya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	111,100,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksanaanya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	75,750,000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162,720,000**					**164,347,200**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah		100 %	21 Unit	100 %	82,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	83,547,200
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah		100 %	618 Unit	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	55,550,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah		100 %	1 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	25,250,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**159,796,142**					**683,693,325**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**111,400,000**					**480,193,000**
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukanterkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk		100 %	3750 Dokumen	100 %	56,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukanterkait pendaftaran penduduk	100 %	196,500,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukanterkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk		100 %	98000 Dokumen	100 %	55,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukanterkait pendaftaran penduduk	100 %	283,693,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**12**	**02**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**48,396,142**					**203,500,325**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik		100 100 45 %	12 Dokumen	95 %	45,396,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	100 %	203,500,325
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**71,100,000**					**82,307,138**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**36,100,000**					**39,710,000**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen kependuduk anterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik		100 %	13051 Dokumen	100 %	36,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependuduk anterkait Pencatatan Sipil	100 %	39,710,000
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**35,000,000**					**42,597,138**
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukanterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait PencatatanSipil	Terselenggaranya pencatatan sipil denganbaik		100 %	12 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependuduk anterkait Pencatatan Sipil	100 %	42,597,138

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**56,500,000**					**58,825,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**11,000,000**					**11,550,000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan PenyajianData Kependudukan	Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan admindukyang dikelola	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Terlaksanya pengelolaan informasi administrasi kependudukan		3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Dokumen	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahandan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	11,550,000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**35,500,000**					**37,275,000**
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksanya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		7 OPD	3 Dokumen 7 OPD	100 %	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahandan penyajian data kependudukan	7 OPD	37,275,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**10,000,000**					**10,000,000**
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	Persentase instansi pemerintah pemanfaat data administrasi kependudukan		20 OPD	20 OPD	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahandan penyajian data kependudukan	20 OPD	10,000,000
2	**12**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**								**72,637,501**					**150,000,004**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**72,637,501**					**150,000,004**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Terlaksananya penyusunan profil kependudukan		2 Buku/Tahun	12 Dokumen	100 %	72,637,501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahandan penyajian data kependudukan	20 OPD	150,000,004

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi : DisdukCapil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2					**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah**				**100%**			3.663.265.810	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10.000.000**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Cappaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Laporan	100%	10.000.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.520.092.785**	
2	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Orang/bulan	100%	2.380.055.592	DAU
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	100%	155.873.718	DAU
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1000 Dokumen	100%	143.160.000	DAU
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15,600,000**	
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaanya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	*Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	100%	2 Laporan	100%	15,600,000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**81.705.500**	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Terwujudny a birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	63 Paket	100%	24.000.000	DAU
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudny a Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Orang	100%	39.605.500	DAU
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudny a Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Orang	100%	18.100.000	DAU
2	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**330.171.000**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	5.151.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Paket	100%	145.000.000	DAU
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	10.000.000	DAU
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	12.100.000	DAU
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Laporan	100%	150.000.000	DAU
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	100%	7.920.000	DAU

							Elektronik Pada SKPD							
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**					
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**46.500.000**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Unit	100%	35.500.000	DAU
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	11.000.000	DAU
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**345.000.000**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanany a penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	500 Laporan	100%	150.000.000	DAU

2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	110,000,000	DAU
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**					
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	10.000.000	DAU
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	75.000.000	DAU
2	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**155.200.000**	

2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Unit	100%	75.200.000	DAU

Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**					
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	618 Unit	100%	55.000.000	DAU
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	25.000.000	DAU
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat terkait pendaftaran penduduk			**%**	**80%**			**143.859.361**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran penduduk**									

													98.463.219	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	terlaksanaanya Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3750 Dokumen	100%	56.200.000	DAU

Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**					
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokuemn Atas Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	98000 Dokumen	100%	42.263.219	DAU
2	12	02	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								45.396.142	DAU
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 45%	12 Dokumen	95%	45.396.142	DAU

					Penduduk	usia > 18 th yg memiliki KTP % Kepemilikan KIA"	Penting Terkait Pendaftaran Penduduk								
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio kepemilikan dokumen kependudukan**				**100%**				**71.100.000**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**									**36.100.000**	
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**						
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**	
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13051 Dokumen	100%	36.100.000	DAU	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**35.000.000**	DAU	

2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya pencatatan sipil dengan baik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	35.000.000	DAU
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk				**15 OPD**			**53.231.058**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Data Base Kependudukan**								**17.731.058**	
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**					
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	Jumlah Dokumen data kepoendudukan yang diolah dan disajikan	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Dokumen	100%	17.731.058	DAU

2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								35.500.000	DAU
2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Jumlah Instansi/Lembaga yang Memanfatakan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 OPD	3 Dokumen 7 OPD	100%	35.500,000	DAU
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**					
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Induktif (Rp.)**	**Sumber Dana**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
2	12	05			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Ketersediaan Profil dan Agregat Data Kependudukan							150.400.000	DAU

2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan						150.400.000	DAU
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Terlaksanannya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	150.400.000	DAU
TOTAL												4.081.856.229	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 mencakup 16 kegiatan dalam 4 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Pasaman Barat yang sejahtera, demokratis dan agamais.

Simpang Empat, 23 Juni 2023
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat

Hj. YULISNA, SH
NIP. 19650703 199102 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA
BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESABUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor

21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Sosial;
f. Dinas Tenaga Kerja;
g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Ketahanan Pangan;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
l. Dinas Perhubungan;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r. Dinas Perikanan;
s. Dinas Pariwisata;
t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
u. Dinas Perkebunan;
v. Sekretariat Daerah;
w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
x. Inspektorat;
y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;

z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;

aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

ee. Rumah Sakit Umum Daerah;

ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Simpang Empat, Juli 2023

RANDY HENDRAWAN,S.IP.,M.Si.
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 198712122007011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan hukum 1

1. 3. Maksud dan Tujuan 3

1. 4. Sistematika Penyusunan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6

2. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMN Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMN..... 6

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 11

2. 3.Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 14

2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 14

2. 5.Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat..... 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 35

3. 1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 35

3. 2. Tujuan dan sasaran Renja 36

3. 3. Program dan kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 62

BAB V PENUTUP..... 75

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja perangkat daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) DPMN Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Nagari mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) DPMN Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
20. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah :

   "Untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dengan RPJM".
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari
- Mewujudkan perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
- Untuk meningkatan pelayanan masyarakat urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) PERANGKAT DAERAH adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*,

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renca Kerja (Renja) Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*,

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 *Maksut dan Tujuan*

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*,

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,* Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.3 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.4 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMN Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out come) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPMN Kabupaten Pasaman Barat yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPMN beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi,misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kinerja DPMN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi-misinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah

ditetapkan, secara umum kinerja DPMN tahun 2022 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan visi dan misi dalam tahun 2022, DPMNKabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 3 Program dan 9 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggran 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMN tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja DPMN tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMN pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum Realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tahun 2022 adalah sebesar 95,98% yang terdiri atas 3 Program yang dirinci 9 kegiatan dan 26 Sub kegiatan yang mempunyai indikator pencapaian target kinerja masing masing dengan rincian sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Terdiri atas 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase pelayanan penunjang pemerintah Daerah, indikator masuknya yaitu jumlah dana Rp.3.650.346.417,-
2. Program Administrasi Pemerintah Desa terdiri atas 1 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase Nagari yang memiliki administrasi pemerintah Nagari yang tertib sesuai dengan perundang undangan jumlah nagari yang terbina dalam peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari jumlah BKAN dan UPK yang dibina persentase nagari yang terbina dalam penyusunan profil Nagari, jumlah monitoring evaluasi pembanguan di Nagari indikator masukannya yaitu Jumlah dana RP. 330.355.250,-
3. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat Hukum adat terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa jumlah lembaga adat nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap AD/ART dan perna tentang KAN jumlah LPNM yang dilatih ,jumlah Nagari yang melaksanakan 10 program pokok PKK, julah posyandu dengan stara mandiri, jumlah TP PKK aktif,

persentase dasawisma aktif, persentase posyandu aktif, terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarhga, jumlah posyantek yang baik terlaksananya Bulan bakti gotong royong masyarakat persentase pelaksanaan kegiatan peringatan Hari kesatuan Gerak PKK/ PKK KB kes, indikator masukannya yaitu Jumlah dana RP.813.516.909,-

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPMN tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPMN tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

Tabel. TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%			100%				
0 1	0 1	0 1	0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0 1	0 2	0 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	75%	100%
0 1	0 2	0 1	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	1. 4 orang PTT 2. 10 orang THL	1. 5 orang PTT 2. 10	1. 5 orang PTT 2. 10	1. 5 orang PTT 2. 10 orang THL	100%	1. 4 orang PTT 2. 10		100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaan kesehatannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website	3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	orang THL 3. 842 orang perangkat	3. 842 orang perangkat		orang THL 3. 842 orang perangkat		
01	02	01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%	100%	25%	100%
01	**02**	**02**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPMN**								
01	02	02	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. 1 orang PNS 2. 1 Orang THL	4 unit	3 unit	2 laporan	100%	3 unit	-	100%
01	**02**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**								
01	02	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	5 orang	41,45%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran** **2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah**								

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	01	15		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	2 jenis	54,47
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	98,41
07	01	15	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	78,26%
01	02	15	02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	3Jenis	**62,36%**
01	02	16	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1. 12 kali 2. 24 kali	1. 12 kali 2. 24 kali	1. 12 kali 2. 24 kali	1. 12 kali 2. 24 kali	100%	1. 12 kali 2. 24 kali	8 kali 18 kali	78,26%
01	02	18	01	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**								
01	02	18	03	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	**0**	0	0	0	0	0	0	0
01	02	18	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	5	6	7	7	100%	5	1	1,30%
01	02	18	06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**								
01	**02**	**21**		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 rekening	2 rekening	2 rekening	2 rekening	**100%**	**2 rekening**	**2 rekening**	**75%**

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	02	21	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	4 orang THL	4 orang THL	4 orang THL	4 orang THL	100%	4 orang THL	4 orang THL	61,54%
01	02	21	02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**								
01	02	21	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	**100%**	2 unit	**1 unit**	**33,77**
01	02	21	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	19 unit	19 unit	19 unit	19 unit	100%	19 unit	10 unit	44,85%
01	02	21	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	100%	58 unit	5 unit	9,36%
01	02	21	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	0	0%
01	02	21	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	**100%**	12 unit	**3 unit**	**22,06%**
				Program peningkatan Kerjasama Desa	**Meningkatnya ekonomi dikawasan perdesaan**								
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Persentase terlaksananya kerjasama antar desa**								

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa	**90Nagari**	19 Nagari	19 Nagari	19 Nagari	**100%**	-	-	-
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan	5 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	**1. Persentase nagari yang memiliki administrasi pemerintahan nagari yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan** **2. Persentase nagari yang memliki lembaga ekonomi nagari yang aktif.**	**100%** **100%**		**5%**					
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**1. meningkatnya tata kelola pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku** **2. meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi BUMNAG yang ada di nagari**	**15 Nagari** **12 BUMNAG**		**70%**					
				Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara	70 Nagari	5 Nagari	0	0	0	0	0	0
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari yang di Evaluasi	70 Nagari	-	-	-	-	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APBNagari yang di evaluasi	70 Nagari	5 Nagari	19 Nagari	19 Nagari	100%	19 Nagari	15 Nagari	73,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah APBNagari yang di evaluasi	70 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur dan Tim yang mengikuti Pelatihan Pengelola Barang dan jasa	133 orang	25 %	-	-	-			
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	1. jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang dibina 2. jumlah BKAN dan UPK yang dibina	1. 50 BUMNAG 2. 11 UPK dan BKAN	5 Bumnag 11 UPK dan BKAN	15 BUMNAG 11 UPK dan BKAN	15 BUMNAG 11 UPK dan BKAN	100%	30 Bumnag	11 Bumnag	32,39
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan	90 Nagari	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Nagari yang telah melaksanakan pendataan dan entry data Profil Nagari	90 Nagari	25 Nagari	19 Nagari	19 Nagari	100%	19 Nagari	2 Nagari	7,59%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik	90 Nagari	19 Nagari	19 Nagari	19 Nagari	100%	19 Nagari	4 Nagari	29,22%
	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	persentase penigkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi	80 %	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1. Persentase Nagari yang telah di evaluasi tingkat perkembangannya 2. Jumlah Monitoring evaluasi Pembangunan di Nagari	70% 15 Nagari	10%	20%	20%	100%	25%	8%	32,39
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	**Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berkinerja baik**	**100%**		**60%**	**60%**				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan	40%		20%	20%				
				Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	pemerintahan nagari	-	-	-	-	-	-	-	-
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah Posyandu dengan Strata mandiri 5. Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK	470 Posyandu 90 lpmn 19 KAN	1. 0 KAN 2. 31 TP PKK 3. 0 LPMN 4. 120 Posyandu 5. 19 Nagari	1. 0 KAN 2. 31 TP PKK 3. 0 LPMN 4. 120 Posyandu 5. 19 Nagari	1. 0 KAN 2. 31 TP PKK 3. 0 LPMN 4. 120 Posyandu 5. 19 Nagari	100%	470 Posyandu 90 lpmn 19 KAN	200 Posyandu 45 lpmn 8 KAN	35,73
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang baik	90 Posyantek	6 Posyantek	4 Posyantek	4 Posyantek	100%	38 Posyantek	10 Posyantek	12,95%
				fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1 (satu) kali	1 kegiatan 100 Jamban	1 kegiatan 50 Jamban	1 kegiatan 50 Jamban	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	92,66
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes	75%	40%	50%	50%	100%	50%	25%	40,99

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terutama mendukung pencapaian **Misi ke 1** yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif*** 1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2. Terwujudnya birokrasi yang efisien dan dan efektif serta **Misi ke 3** yaitu ***Mewujudkan perekonomian yang tangguh berdaya saing dan inklusif*** dengan memfokuskan pada Tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan dengan sasaran 4.1 Penguatan industri beerbasis komoditas unggulan dengan 4 (empat) indikator utama, yakni:

1) Persentase Desa Tertinggal menurut IDM
2) Persentase Status Desa Mandiri menurut IDM
3) Rata-rata persentase capaian pendapatan antar nagari
4) Persentase sosial aktif di nagari, persentase lembaga ekonmi aktif di nagari, persentase lembaga adat aktif di nagari.

DPMN Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perencanaan pelayanan DPMN Tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2020 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya Analisis terhadap kinerja pelayanan tentang capaian kinerja pelayanan DPMN Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPMN				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Nagari Maju dan Mandiri pada IDM (Indeks Desa Membangun)		Persentase desa Tertinggal menurut IDM	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Persentase staus desa Mandiri menurut IDM	26,3 %	31,6 %	36,4 %	42 %	26,3 %	31,6 %	36,4 %	42 %	
			Rata – rata persentase capaian pendapatan antar nagari	15%	22%	30%	40%	15%	22%	30%	40%	
			Perentase lembaga soail aktif nagari, persentase lembaga ekonomi aktif di nagari, persentase lembaga adat aktif di nagari	100 63,33 10,52	100 65 75	100 70 85	100 70 70	100 63,33 10,52	100 65 75	100 70 85	100 70 70	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan nagari terdapat 3 Bidang prioritas, yang mana pada bidang tersebut mempunyai isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Bidang Administrasi Pemerintahan Nagari dan Bidang Penataan Nagari

Perencanaan pembangunan nagari selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten dan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan provinsi dan Nasional, sehingga penyusunan pembangunan nagari dirumuskan saling bersinergi dengan kebijakan pembangunan kabupaten Pasaman Barat, berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik tingkat provinsi maupun nasional.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian penyelarasan dalam perumusan pogram dan kegiatan prioritas

- Kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di seluruh nagari baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun peningkatan SDM
- Kewajiban penyusunan RPJM nagari bagi nagari yang melaksanakan pemilihan walinagari tahun 2023 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah walinagari dilantik harus sudah menetapkan RPJM Nagari
- Peningkatan kapasitas wali nagari dan anggota Bamus yang baru dilantik/ diresmikan tahun 2023 serta peningkatan kapasitas perangkat nagari dan lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman tupoksi
- Kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Penyediaan server dan aplikasi yang original untuk mendukung pelaksanaan siskeudes online
- Penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset nagari secara online terutama untuk nagari yang baru definitif
- Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi di Nagari
- Kewajiban pengentasan jorong tertinggal
- Kebijakan nomenklatur perencanaan Nagari mulai penempatan bidang dan sub bidang RPJM, RKP Nagari dan penempatan nomenklatur perencanaan APB Nagari sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
- Kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan data yang ada di Nagari yang ada dalam sistim informasi desa sebagai salahsatu acuan dan perencanaan pembangunan Nagari
- Kebijakan pelaksanaan inventarisasi aset desa
- Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan di nagari
- Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyusunan RKP APB nagari sehingga bisa ditetapkan tepat waktu
- Fasilitasi percepatan penyusunan desain dan RAB kegiatan fisik di Nagari

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Pengelolaan pelayanan sosial dasar masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat harus selaras dengan

perencanaan pembangunan di provinsi dan nasional. Demikian juga pembangunan nagari yang selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional. Hal ini sejalan dengan Tujuan Negara Indonesia Ayat 4 Pembukaan UUD 1945 yaitu : mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat terwujud jika masyarakat mendapatkan layanan Kesehatan dan Pendidikan serta pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian penyelarasan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah:

1. Kebijakan program percepatan penurunan stunting Kabupaten Pasaman Barat menuju angka 14 % tahun 2024. Pembinaan oleh DPMN terhadap Proses perencanaan nagari yang diakomodir dalam program dan kegiatan di nagari diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting.
2. Peningkatan kapasitas dan komitmen wali nagari dan ketua bamus dalam percepatan dan penurunan stunting.
3. Pembinaan 20 % Dana Desa digunakan untuk ketahanan pangan yang selaras dengan pencegahan nagari tanpa kelaparan dan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan protein hewani dan dan nabati dalam rangka percepatan penurunan stunting.
4. Aksi 4 Percepatan penurunan stunting secara nasional yaitu penyusunan regulasi tentang percepatan penurunan stunting di nagari yang memerlukan dukungan Perangkat Daerah
5. Aksi 5 Percepatan penurunan stunting secara nasional yaitu peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) sehingga DPMN dan nagari-nagari perlu melaksanakan peningkatan kapasitas KPM.
6. Peningkatan kapasitas kasie pelayanan nagari. Karena pada umumnya kasie pelayanan nagari melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan keluarga, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan lainnya di nagari. Kasie pelayanan perlu ditingkatkan kapasitasnya agar kasie pelayanan memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya pokja posyandu nagari berjalan dengan baik, terwujudnya integrasi pelayanan di posyandu, bagaimana Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai mitra pemerintah nagari.
7. Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan nagaru (kapasitas kader posyandu, kader pkk, lpmn, karang taruna, rt dan rw).
8. Hadirnya Aplikasi Satu Data Pasaman Barat yang berisi informasi tentang data-data penting nagari. Satu data pasaman barat dapat di tunjang dengan kelengkapan buku 3 dasawisma pkk, entrian aplikasi dasawisma sehingga perlu ditingkatkan kapasitas kader dan petugas entry data nagari
9. Aplikasi si gesit stunting yang merupakan inovasi nagari sinuruik perlu di aplikasikan ke semua posyandu se Kabupaten Pasaman barat. Karena aplikasi ini berisi tentang data by name by address sasaran posyandu. Perlu bimbingan terhadap nagari agar menjalankan aplikasi si gesit stunting.
10. Aplikasi e-HDW yang perlu di realisasikan.
11. Salah satu bentuk pembinaan provinsi terhadap penguatan Lembaga kemasyarakatan nagari adalah dengan dilaksanakannya lomba-lomba tingkat provinsi sumatera barat. Sehingga kabupaten pasaman barat perlu melaksanakan program dan kegiatan lomba kemasyarakatan nagari

12. Program kegiatan TP.PKK Kabupaten Pasaman Barat yang sejalan dengan program kegiatan TP.PKK Provinsi Sumatera Barat.Provinsi.
13. Berdasarkan hasil Rakornas IX, bahwa Pembinaan PKK dilakukan secara berjenjang. Sehingga TP.PKK Kabupaten melakukan pembinaan ke TP.PKK Kecamatan.
14. Monitoring percepatan dan penurunan stunting di nagari
15. Pembinaan dan monitoring laporan konvergensi stunting ke ompsman kemendagri.
16. Bidang PPSDM sebagai bidang yang mengkoordinir pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perguruan Tinggi (PT). Namun hanya beberapa PT yang memberikan rekomendasi terhdap program kegiatan yang dapat diakomodir oleh nagari. Sehingga diperlukan koordinasi dan penyamaan persepsi ttg KKN antara DPMN dan PT.
17. MOU antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Bupati) dengan Rektor ISI Padang Panjang untuk membangun ISI di Kabupaten Pasaman Barat. Ini memrlukan kajian yang matang.
18. Kegiatan-kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani diarahkan keberlanjutannya akan ditidaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga keuangan desa yang pada akhirnya nanti dapat menggairahkan ekonomi masyarakat. Kebijakan-kebijakan penguatan ekonomi oleh pemerintah pusat sejalan dengan program pemerintah provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah menciptakan seratus ribu entrepreneur di Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat dengan program unggulan prioritas Pasbar maju dan sejahtera.
19. Percepatan pendaftaran Badan Hukum BUMNag sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
20. Percepatan pelaksanaan Transformasi UDB/UPK Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai amanat Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021.
21. Mengaktifkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di seluruh Nagari sebagai wadah untuk melahirkan inovator-inovator teknologi tepat guna di Nagari sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	25 Orang/Bulan	3,798,477,141	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	25 Orang/Bulan	2.429.649.375,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMN	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaan	13 Bulan 12 Dokumen	2,671,775,061	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMN	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Perangkat Nagari	13 Bulan 12 Dokumen	1.051.037.880,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website					yang dijamin pemeliharaan kesehatannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMN	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	2 Dokumen	75,649,200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMN	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	2 Dokumen	75.620.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPMN			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPMN			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMN	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	15,600,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMN	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	9.550.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	13 orang	34,828,640	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	13 orang	38.360.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMN	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	2 Paket	14,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMN	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	2 Paket	6.828.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMN	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	40,020,420	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMN	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	43.515.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMN	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMN	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	9.996.571,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMN	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	2 paket	16,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMN	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	2 paket	28.664.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan dalam Kabupaten	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	120 Laporan	190,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan dalam Kabupaten	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	120 Laporan	223.590.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMN	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMN	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 Unit	52.712.580,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMN	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 Laporan	64,801,210	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMN	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 Laporan	52.870.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMN	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	13 Laporan	44,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMN	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	13 Laporan	25.500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMN	1. jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	1 unit	17,825,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMN	1. jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	1 Unit	17,825,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMN	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	19 unit	60,491,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMN	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	19 Unit	53.550.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	58 unit	19,920,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	58 unit	19.835.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMN	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	33,275,714	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMN	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	300.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan yang dipelihara	12 unit	7,320,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMN	Jumlah peralatan yang dipelihara	12 unit	7,320,000	
	Program Penataan Desa										
	- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	0 Desa	0	- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	0 Desa	0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayah nya	90 Desa	**158,400,000**	- Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayah nya	90 Desa	10.000.000,00	
	- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	90 Desa	**79,200,000**	- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	90 Desa	68.755.000,00	
	- Fasilitasi Penamaan Kode Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	90 Desa	0	- Fasilitasi Penamaan Kode Desa	DPMN	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	90 Desa	0	
	- Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMN	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Laporan	0	- Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMN	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Laporan	10.000.000,00	
	- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMN	Jumlah Sarana/Prasarana Desa yang terfasilitasi	94 Unit	**184,800,000**	- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMN	Jumlah Sarana/Prasarana Desa yang terfasilitasi	94 Unit	10.000.000,00	
	Program peningkatan Kerjasama Desa		Meningkatnya ekonomi dikawasan perdesaan		-	Program peningkatan Kerjasama Desa		Meningkatnya ekonomi dikawasan perdesaan		-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase terlaksananya kerjasama antar desa	90 Dokumen	6,666,667	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase terlaksananya kerjasama antar desa	90 Dokumen	0	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa	90 Dokumen	6,666,667	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa	90 Dokumen	0	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah pembangunan kawasan perdesaan	90 Dokumen	6,666,667	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah pembangunan kawasan perdesaan	90 Dokumen	0	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		1. Persentase nagari yang memiliki administrasi pemerintahan nagari yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Persentase nagari yang memliki lembaga ekonomi nagari yang aktif.	100% 100%		Program Administrasi Pemerintahan Desa		1. Persentase nagari yang memiliki administrasi pemerintahan nagari yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan 2. Persentase nagari yang memliki lembaga ekonomi nagari yang aktif.	100% 100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1. meningkatnya tata kelola pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 2. meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi BUMNAG yang ada di nagari	15 Nagari 12 BUMNAG		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1. meningkatnya tata kelola pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 2. meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi BUMNAG yang ada di nagari	15 Nagari 12 BUMNAG		
	Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara	90 Dokumen	3,000,000	Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara	90 Dokumen	71.834.050,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari yang di Evaluasi	90 Dokumen	6,300,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Belanja dan Pendapata n Nagari yang di Evaluasi	90 Dokumen	7.006.450,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Pasbar	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APBNagari yang di evaluasi	180 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Pasbar	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APBNagari yang di evaluasi	180 Dokumen	165.345.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa		Jumlah APBNagari yang di evaluasi	90 Dokumen	150,000,000	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa		Jumlah APBNagari yang di evaluasi	90 Dokumen	78.494.450,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Pasbar	Jumlah Aparatur dan Tim yang mengikuti Pelatihan Pengelola Barang dan jasa	355 orang	238,854,277	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Pasbar	Jumlah Aparatur dan Tim yang mengikuti Pelatihan Pengelola Barang dan jasa	355 orang	95.451.700,00	
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	90 Laporan	50,000,000	- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	90 Laporan	49.999.900,00	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	90 Dokumen	3,500,000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	90 Dokumen	6.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	19 Nagari	1. jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang dibina 2. jumlah BKAN dan UPK yang dibina	90 Dokumen	150,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	19 Nagari	1. jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang dibina 2. jumlah BKAN dan UPK yang dibina	90 Dokumen	72. 807.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa		Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan	90 Laporan	5,600,000	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa		Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan diberhentikan	90 Laporan	0	
	- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- Kab. Pasbar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	90 Laporan	5,000,000				90 Laporan	10.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Pasbar	Persentase Nagari yang telah melaksanakan pendataan dan entry data Profil Nagari	90 dokumen	100,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Pasbar	Persentase Nagari yang telah melaksanakan pendataan dan entry data Profil Nagari	90 dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Pasbar	persentase Manajemen Pemerintahan nagari yang Baik	90 dokumen	4,600,000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		persentase Manajemen Pemerintahan nagari yang Baik	90 dokumen	6.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Pasbar	persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik	90 dokumen	100,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik	90 dokumen	78.074.450,00	
	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Kab.Pasbar	persentase penigkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi	450 Orang	270,000,000	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD		persentase penigkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi	450 Orang	32.150.000,00	
	- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	90 Desa	450,000,000	- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	90 Desa	6.360.750,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	90 Laporan	3,500,000	- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	90 Laporan	3.425.250,00	
	- Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Desa	90 Dokumen	6,000,000	- Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab.Pasbar	- Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	90 Dokumen	0	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Pasbar	1. Persentase Nagari yang telah di evaluasi tingkat perkembangannya 2. Jumlah Monitoring evaluasi Pembangun an di Nagari	90 Dokumen	150,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Pasbar	1. Persentase Nagari yang telah di evaluasi tingkat perkembangannya 2. Jumlah Monitoring evaluasi Pembangunan di Nagari	90 Dokumen	6.009.500,00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berkinerja baik	100%		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berkinerja baik	100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari	40%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari	40%		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah Posyandu dengan Strata mandiri 5. Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK	- 470 Posyandu - 10 LPMN - 2 KAN Dokumen	500,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah Posyandu dengan Strata mandiri 5. Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK	- 470 Posyandu - 10 LPMN - 2 KAN Dokumen	149.991.100,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten pasaman Barat	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	- 700 PKK - 1800 Posyandu - 19 LPMN - 6 Lembaga	500,000,000	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten pasaman Barat	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitas nya	- 700 PKK - 1800 Posyandu - 19 LPMN - 6 Lembaga	6.000.000,00	
	- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat	Kabupaten pasaman Barat	- Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu,	3 Unit	500,000,000	- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat	Kabupaten pasaman Barat	- Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan	3 Unit	6.000.000,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	-		- LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, keluraha n dan masyarak at hukum adat -			-		(RT,R W, PKK, Posya ndu, LPMN , dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelura han dan masya rakat hukum adat			
	- Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten pasaman Barat	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90 Dokumen	150,000,000	- Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten pasaman Barat	- Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Pembang unan Usaha Ekonomi Masyara kat dan Pemerint ah Desa dalam Meningk atkan Pendapat an Asli Desa	90 Dokumen	6.000.000,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten pasaman Barat	Jumlah Posyantek yang baik	76 Laporan	125,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten pasaman Barat	Jumlah Posyantek yang baik	76 Laporan	50.423.700,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	Kabupaten	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1 kegiatan	260,000,000	fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	Kabupaten	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1 kegiatan	22.307.750,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	5 Dokumen	100,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	5 Dokumen	6.000.000,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes	60 Dokumen	600,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes	60 Dokumen	599.956.057,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang, Forum perangkat daerah maupun usulan lainnya dari masyarakat dan untuk Tahun 2024 tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada 7 agenda Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititik berat kan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkankarakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomidan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-4 (2021-2026) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan

pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2014-2019 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
I	**Nasional**		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	RKP 2023	
2.	Angka Kemiskinan Nasional	RKP 2023	
3.	Gini Ratio Nasional	RKP 2023	
4.	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	RKP 2023	
II	**Provinsi**		
1.	Pembangunan Agama dan Budaya	RPJP Provinsi 2005-2025	
2.	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005-2025	
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005-2025	
4.	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005-2025	
5.	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005-2025	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Misi 1 dan Misi 3 Kepala Daerah, yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Penerapan tata kelola Pemerintahan Profesional, akuntabel dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	a. Nilai SAKIP b. Indeks Profesionalitas ASN Indeks maturitas SPBE
2.	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Penguatan industry berbasis komoditas unggulan lokal	PDRB Per Kapita ADHBS

3.3 Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi mewujudkan Pasaman Barat yang cerdas dan sejahtera. Secara umum rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 4 (Empat) program yang terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh Lima) subkegiatan dengan rincian Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Tabel T-C. 3.3 :

T-C.3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TA. 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

kode	Tujuan/Sasaran Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu Anggaran (Rp) 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Pagu Anggaran (Rp)	Target capaian Kinera
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif						
	Sasaran						
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel						
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Pasaman Barat	25 Orang/Bulan	2.488.146.154	2.429.649.375,00	25 Orang/Bulan
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran - Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	Pasaman Barat	13 Bulan 12 Dokumen	1.262.850.132	1.051.037.880,00	13 Bulan 12 Dokumen

1	2	3	4	5		10	11
		- Jumlah Tenaga					
		- Informasi teknologi dan Pengelola website					
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	- Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Pasaman Barat	2 Dokumen	75.160.000	75.620.000,00	2 Dokumen
	1. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah						
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pasaman Barat	2 Laporan	8.820.000	9.550.000,00	2 Laporan
	2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah						
	- Bimbingan Teknis Impelementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	Pasaman Barat	13 orang	0	38.360.000,00	13 orang
	3. Administrasi umum perangkat daerah						
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangun kantor	- Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Pasaman Barat	2 Paket	5.950.000	6.828.000,00	2 Paket
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	Pasaman Barat	1 paket	50.010.100	43.515.000,00	1 paket
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pasaman Barat	1 paket	8.850.920	9.996.571,00	1 paket

1				2	3	4	5		10	11
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pasaman Barat	2 paket	26.102.750	28.664.000,00	2 paket
				- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulrasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulrasi SKPD	Pasaman Barat	120 Laporan	189.130.000	223.590.000,00	120 Laporan
				- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang disediakan		1 unit	0	0	1 unit
				- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	Pasaman Barat	3 Unit	42.815.850	52.712.580,00	3 Unit
				4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Pasaman Barat	2 Laporan	49.250.500	52.870.000,00	2 Laporan

1	2	3	4	5		10	11
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Pasaman Barat	13 Laporan	25.500.000	25.500.000,00	13 Laporan
	5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan per orangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak nya.	Pasaman Barat	1 Unit	23.850.000	17,638.250,00	1 Unit
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinan nya	Pasaman Barat	19 Unit	40.827.500	53.550.000,00	19 Unit
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Pasaman Barat	58 unit	24.665.000	19.835.000,00	58 unit
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah dan luas gedung kantor	Pasaman Barat	1 unit	120.000.000	300.000.000	1 unit
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangun lainnya	- Jumlah peralatan yang dipelihara	Pasaman Barat	12 unit	7.320.000	7,320,000	12 unit

1	2	3	4	5		10	11
	Sasaran						
	Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif						
	Program Penataan Desa						
	- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Pasaman Barat	0 Desa	0	0	0 Desa
	- Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayah nya	Pasaman Barat	90 Desa	0	10.000.000,00	90 Desa
	- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	Pasaman Barat	90 Desa	74.000.000	68.755.000,00	90 Desa
	- Fasilitasi Penamaan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Pasaman Barat	90 Desa	0	0	90 Desa
	- Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	90 Laporan	0	10.000.000,00	90 Laporan
	- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana/Prasarana Desa yang terfasilitasi	Pasaman Barat	94 Unit	0	10.000.000,00	94 Unit
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa						
	- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	0	90 Dokumen

1	2	3	4	5		10	11
	- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dangan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	0	90 Dokumen
	- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	0	90 Dokumen
	Program Administrasi pemerintah Desa						
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	72.000.050	71.834.050,00	90 Dokumen
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	- Jumlah Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	7.006.450,00	90 Dokumen
	- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	- Jumlah Hasil Dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pasaman Barat	180 Dokumen	164.810.000	165.345.000,00	180 Dokumen
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	95.802.000	78.494.450,00	90 Dokumen
	- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Aparatur Pemerintah yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Pasaman Barat	355 orang	96.999.950	95.451.700,00	355 orang
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	0	49.999.900,00	90 Laporan

1	2	3	4	5		10	11
	- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	6.000.000,00	90 Dokumen
	- Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	68.990.000	72. 807.500,00	90 Dokumen
	- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	0	0	90 Laporan
	- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	0	10.000.000	90 Laporan
	- Fasilitasi penyusunan Profil Desa	- Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	Pasaman Barat	90 dokumen	0	10,000,000	90 dokumen
	- Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	Pasaman Barat	90 dokumen	0	6.000.000,00	90 dokumen
	- Fasilitasi pengelolaan aset Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengelolaan aset Desa	Pasaman Barat	90 dokumen	76.011.200	78.074.450,00	90 dokumen
	- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	- Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Kapasitas Aparatur	Pasaman Barat	450 Orang	0	32.150.000,00	450 Orang

1	2	3	4	5		10	11
	- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	Pasaman Barat	90 Desa	0	6.360.750,00	90 Desa
	- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	0	3.425.250,00	90 Laporan
	- Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	- Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	0	90 Dokumen
	- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan keluarahan	- Persentase terlaksananya evaluasi perkembangan Nagari	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	6.009.500,00	90 Dokumen
	Sasaran						
	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal						
	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat						
	- Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat	- Jumlah Dokumen Hasil penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat.	Pasaman Barat	- 470 Posyandu - 10 LPMN - 2 KAN Dokumen	414.753.700	149.991.100,00	- 470 Posyandu - 10 LPMN - 2 KAN Dokumen

1				**2**	**3**	**4**	**5**		**10**	**11**
				- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkat kan Kapasitas nya	Pasaman Barat	- 700 PKK - 1800 Posyandu - 19 LPMN - 6 Lembaga	0	6.000.000,00	- 700 PKK - 1800 Posyandu - 19 LPMN - 6 Lembaga
				- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat	- Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat -	Pasaman Barat	3 Unit	0	6.000.000,000	3 Unit
				- Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	6.000.000,00	90 Dokumen
				- Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	- Jumlah Laporan Hasil pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Pasaman Barat	76 Laporan	61.389.700	50.423.700,00	76 Laporan

1				2	3	4	5		10	11
				- Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	- Terlaksananya fasilitasi pencanangan BBGRM	Pasaman Barat	1 kegiatan	22.530.000	22.307.750,00	1 kegiatan
				- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	Pasaman Barat	5 Dokumen	0	6.000.000,00	5 Dokumen
				- Fasilitasi Tim , Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	- Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes\ - Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan penyelenggaraan	Pasaman Barat	60 Dokumen	858.540.875	599.956.057,00	60 Dokumen

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan kebijakan umum APBD. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip safe guarding yaitu transparansi , akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DPMN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan perkiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat
Tabel. 4.1

kode	Tujuan/Sasaran Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinera	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan									
	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif									
	Sasaran									
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel									
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Pasaman Barat	25 Orang/Bulan	2.429.649.375,00	Dana Alokasi Umum		25 Orang/Bulan	2.805.363.814,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran - Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	Pasaman Barat	13 Bulan 12 Dokumen	1.051.037.880,00	Dana Alokasi Umum		13 Bulan 12 Dokumen	1.051.052.880,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Jumlah Tenaga								
		- Informasi teknologi dan Pengelola website								
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	- Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Pasaman Barat	2 Dokumen	75.620.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	83.214.120,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	6. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah									
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pasaman Barat	2 Laporan	9.550.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	15,600,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	7. Administrasi kepegawaian perangkat daerah									
	- Bimbingan Teknis Impelementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	Pasaman Barat	13 orang	38.360.000,00	Dana Alokasi Umum		13 Orang	36.311.504,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	8. Administrasi umum perangkat daerah									
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangun kantor	- Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Pasaman Barat	2 Paket	6.828.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Paket	17.000.000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	Pasaman Barat	1 paket	43.515.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Paket	44.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pasaman Barat	1 paket	9.996.571,00	Dana Alokasi Umum		1 paket	15,000,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pasaman Barat	2 paket	28.664.000,00	Dana Alokasi Umum		2 paket	18.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulrasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulrasi SKPD	Pasaman Barat	120 Laporan	223.590.000,00	Dana Alokasi Umum		120 Laporan	200.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang disediakan			1 unit	0	Dana Alokasi Umum		0	400.000.000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	Pasaman Barat	3 Unit	52.712.580,00	Dana Alokasi Umum		3 Unit	50.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	9. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Pasaman Barat	2 Laporan	52.870.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	64,801,210,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Pasaman Barat	13 Laporan	25.500.000,00	Dana Alokasi Umum		13 Laporan	44,200,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	10. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan per orangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak nya.	Pasaman Barat	1 Unit	17,638.250,00	Dana Alokasi Umum		1 Unit	17,825,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinan nya	Pasaman Barat	19 Unit	53.550.000,00	Dana Alokasi Umum		19 Unit	60,491,450	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Pasaman Barat	58 unit	19.835.000,00	Dana Alokasi Umum		58 Unit	19,920,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah dan luas gedung kantor	Pasaman Barat	1 unit	300.000.000	Dana Alokasi		1 unit	33,275,714	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangun lainnya	- Jumlah peralatan yang dipelihara	Pasaman Barat	12 unit	7,320,000	Dana Alokasi Umum		12 Unit	7,320,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran									
	Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif									
	Program Penataan Desa									
	- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Pasaman Barat	0 Desa	0	Dana Alokasi Umum		0 Desa	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayah nya	Pasaman Barat	90 Desa	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		90 Desa	166.320.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	Pasaman Barat	90 Desa	68.755.000,00	Dana Alokasi Umum		90 Desa	83.160.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Penamaan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Pasaman Barat	90 Desa	0	Dana Alokasi Umum		0 Desa	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarkat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	90 Laporan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		90 Laporan	108.448.912,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana/Prasarana Desa yang terfasilitasi	Pasaman Barat	94 Unit	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum		96 Unit	192.192.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa									
	- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dangan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pasaman Barat	90 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	Program Administrasi pemerintah Desa									**2.04**
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	71.834.050,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	72.000.050,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	- Jumlah Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	7.006.450,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	6.300.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	- Jumlah Hasil Dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pasaman Barat	180 Dokumen	165.345.000,00	Dana Alokasi Umum		180 Dokumen	150,000,000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	78.494.450,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	150,000,000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Aparatur Pemerintah yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Pasaman Barat	355 orang	95.451.700,00	Dana Alokasi Umum		355 Orang	207.447.700,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	49.999.900,00	Dana Alokasi Umum		100 Laporan	50.000.000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	3.500.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	72. 807.500,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	150,000,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	0	Dana Alokasi Umum		90 Laporan	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	10.000.000	Dana Alokasi Umum		90 Laporan	5.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi penyusunan Profil Desa	- Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	Pasaman Barat	90 dokumen	10,000,000	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	10.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	Pasaman Barat	90 dokumen	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	4.600.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi pengelolaan aset Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengelolaan aset Desa	Pasaman Barat	90 dokumen	78.074.450,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	100,000,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
	- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	- Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Kapasitas Aparatur	Pasaman Barat	450 Orang	32.150.000,00	Dana Alokasi Umum		450 Orang	270.000.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan	Pasaman Barat	90 Desa	6.360.750,00	Dana Alokasi Umum		0 Desa	0	2.04 Pasbar Maju dan

					Batas Desa								sejahtera
				- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Pasaman Barat	90 Laporan	3.425.250,00	Dana Alokasi Umum		90 Laporan	3.500.000,00	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
				- Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	- Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen		Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	0	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
				- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan keluarahan	- Persentase terlaksananya evaluasi perkembangan Nagari	Pasaman Barat	90 Dokumen	6.009.500,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	150,000,000	2.04 Pasbar Maju dan sejahtera
				Sasaran									
				Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal									
				Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat									**2.01/ 2.04**
				- Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat	- Jumlah Dokumen Hasil penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat.	Pasaman Barat	- 470 Posyandu - 10 LPMN - 2 KAN Dokumen	149.991.100,00	Dana Alokasi Umum		- 470 Posyandu - 10 LPMN - 2 KAN Dokumen	1.000.000.000,00	2.01 Pasbar Sehat 2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkat kan Kapasitas nya	Pasaman Barat	- 700 PKK - 1800 Posyandu - 19 LPMN - 6 Lembaga	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		- 900 PKK - 2350 Posyandu - 19 LPMN Lembaga	0	2.01 Pasbar Sehat 2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera
	- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat	- Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga desa kemasyarakatan desa/ keluarahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan karang taruna) lembaga adat, desa, kelurahan dan masyarakat hukum adat -	Pasaman Barat	3 Unit	6.000.000,000	Dana Alokasi Umum		1 Paket Sarana Dasar Posyandu 1 Paket Sarana LPMN Unit	0	2.01 Pasbar Sehat
	- Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pasaman Barat	90 Dokumen	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		90 Dokumen	175.000.000 ,00	2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera
	- Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	- Jumlah Laporan Hasil pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Pasaman Barat	76 Laporan	50.423.700,00	Dana Alokasi Umum		90 Laporan	150,000,000	2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	- Terlaksananya fasilitasi pencanangan BBGRM	Pasaman Barat	1 kegiatan	22.307.750,00	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	22.307.750,00	2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat	Pasaman Barat	5 Dokumen	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0	2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera
	- Fasilitasi Tim , Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	- Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes\ - Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan penyelenggaraan	Pasaman Barat	60 Dokumen	599.956.057,00	Dana Alokasi Umum		75 Dokumrn	700,000,000	2.04 Pasbar Maju dan Sejahtera

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari pada tahun 2024. keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait.

Diperlukan upaya yang lebih intens antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik, selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat dan Nagari

Maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan dengan demikian dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentunya Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2023

RANDY HENDRAWAN,S.IP.,M.Si.
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 198712122007011002

2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program pemerintah kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari renja ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran Program dan kegiatan Dinas Perhubungan masa yang akan datang, kami berharap adanya saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan ini kami buat semoga bermanfaat.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

BAKARUDDIN, SH
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19681002 199212 1 001

kadis	
sekdis	
kasubag	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… i

Daftar Isi ……. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 28

3.3. Program dan Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB IV PENUTUP..... 44

kadis	
sekdis	
kasubag	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

kadis	
sekdis	
kasubag	

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga di integrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Prioritas Pembangunan pemerintah Pusat untuk saat ini dititik beratkan pada Perhubungan laut, yang mana di Kabupaten Pasaman Barat dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang yang merupakan isu strategis infrastruktur pelayanan Laut pada masa yang akan datang. Status Pelabuhan teluk Tapang merupakan pelabuhan pengumpul yang kewenangannya berada pada Kementerian Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Psaman Barat Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Perhubungan lebih menitikberatkan pada pelayanan angkutan jalan yaitu penyediaan jaringan angkutan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, peningkatan sumber daya manusia dan keselamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

kadis	
sekdis	
kasubag	

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pehubungan Nomor KM.49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional

kadis	
sekdis	
kasubag	

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;

kadis	
sekdis	
kasubag	

2. Sebagai acuan dalam menyusun jaringan pelayanan angkutan jalan yaitu tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Kab/Kota sesuai dengan Tratalok Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menjamin tercapainya jaringan sarana dan prasarana jalan berupa tersedianya halte dan terminal di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk menjamin tercapainya fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka dan quardrill serta Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten.
5. Untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang handal di bidang perhubungan.
6. Untuk menjamin meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan Bermotor dengan tersedianya alat uji yang berbasis IT.
7. Untuk menjamin keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten.
8. Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai ada evaluasi kinerja;
9. Sebagai dokumen acuan/guideline (pedoman) bagi capaian indikator kinerja daerah dalam rentang waktu perencanaan jangka menengah Kepala Daerah terpilih (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 untuk target capaian Visi Misinya.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

kadis	
sekdis	
kasubag	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Perangkat Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

kadis	
sekdis	
kasubag	

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan rencana Strategis Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 memiliki Visi " ***Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan Demi Kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat***" sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Mengembangkan SDM Aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan memberdayakan potensi masyarakat yang turut serta dalam mewujudkan pelayanan prima di bidang perhubungan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan Daerah.

Untuk mencapai Visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2023 melaksanakan 1 urusan 4 Program dan 13 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Evaluasi peelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	LOKASI	PAGU	REALISASI S/D BULAN INI		
			ANGGARAN	KEUANGAN		FISIK
			Rp	Rp	%	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	dishub	**4,038,131,332**	**2,073,440,115**	51%	51%
	Administrasi Keuangan	dishub	**3,502,441,938**	**1,896,086,272**	54%	54%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dishub	3,043,796,938	1,679,736,272	55%	55%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dishub	357,810,000	177,950,000	50%	50%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dishub	100,835,000	38,400,000	38%	38%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat	dishub	**7,960,000**	**400,000**	5%	5%

kadis	
sekdis	
kasubag	

	Daerah					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	dishub	7,960,000	400,000	5%	5%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	dishub	**233,949,000**	**84,410,595**	36%	36%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dishub	1,300,000	617,500	48%	48%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dishub	45,342,000	19,972,500	44%	44%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dishub	187,307,000	63,820,595	34%	34%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dishub	**58,602,800**	**-**	0%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dishub	58,602,800		0%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dishub	**41,998,925**	**20,936,627**	50%	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	dishub	41,998,925	20,936,627	50%	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dishub	**193,178,669**	**71,606,621**	37%	37%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dishub	152,615,000	50,835,275	33%	33%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dishub	17,480,000	7,475,030	43%	43%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dishub	23,083,669	13,296,316	58%	58%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	dishub	**2,304,263,000**	**1,028,355,561**	45%	45%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	dishub	**1,169,544,000**	**618,486,400**	53%	53%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	dishub	1,169,544,000	618,486,400	53%	53%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	dishub	**89,238,000**	**23,275,000**	26%	26%
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	dishub	89,238,000	23,275,000	26%	26%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dishub	**269,575,000**	**70,407,750**	26%	26%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dishub	103,750,000	49,450,000	48%	48%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dishub	45,700,000	700,000	2%	2%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dishub	81,000,000	2,000,000	2%	2%
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dishub	39,125,000	18,257,750	47%	47%

kadis	
sekdis	
kasubag	

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu llntas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	dishub	**225,540,000**	**94,668,650**	42%	42%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	dishub	222,540,000	94,668,650	43%	43%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dishub	553,366,000	**221,517,761**	40%	40%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dishub	553,366,000	221,517,761	40%	40%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	dishub	**110,413,000**	**33,458,400**	30%	30%
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	dishub	110,413,000	**33,458,400**	30%	30%
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	dishub	110,413,000	33,458,400	30%	30%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	dishub	**186,097,240**	**75,103,408**	40%	40%
	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	dishub	**186,097,240**	**75,103,408**	40%	40%
	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	dishub	186,097,240	75,103,408	40%	40%

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggungjawab organisasi, secara keseluruhan rata – rata capaian kinerja sampai bulan juni 2023 adalah sebesar 48 %.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat juga harus dilakukan evaluasi, karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Juli 2023, oleh karena itu yang disajikan merupakan perkiraan realisasi Tahun 2023 dan hasil pencapaian Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 dibawah ini :

kadis	
sekdis	
kasubag	

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)	Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*	*7*	*8=(7/6)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**97.31**	**97.31**	**100%**	51%	51%
	Administrasi Keuangan	Persentase Operasional Pegawai	**100%**	**100%**	**97.29**	**97.31**	**100%**	54%	54%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	40 org	40 org	40 org	**100%**	**40 org**	40 org	40 org
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	67 org	67 org	67 org	**100%**	**67 org**	67 org	67 org
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	10 Org	10 Org	10 Org	**100%**	**10 Org**	10 org	10 org
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pegawai yang mengikuti**	**100%**	**3 kali**	**3 kali**	**100%**	**100%**	5%	5%

kadis	
sekdis	
kasubag	

	Bimtek							
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Org	10 Org	10 Org	**100%**	**10 Org**	1 orang	1 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Operasional Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	36%	36%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	150 Pcs	150 Pcs	30 pcs	20%	**150 Pcs**		0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan ATK dan Matrai	1.000 bh	1.000 bh	450 bh	45%	**1.000 bh**		0%
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000 lbr	40.000 lbr	15.000 lbr	38%	**40.000 lbr**		0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang diikuti	150 Kali	150 Kali	50 kali	33%	**150 Kali**		0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin**	**100%**	2 unit	2 unit	100%	**100%**		0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan Kantor	12 Unit	2 unit	2 unit	100%	**12 Unit**		0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan jasa Penunjang**	**100%**	**100%**	**89.71**		**100%**	50%	50%

kadis	
sekdis	
kasubag	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantorengadaan Peralatan Kantor	**100%**	**100%**	89.71	90%	**100%**	50%	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**150 unit**	**150 unit**	**100 unit**	90%	**150 unit**	50 unit	50 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan Operasional yang dipelihara	64 Unit	64 Unit	50 unit	78%	**64 Unit**	24 unit	24 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	27 Unit	27 Unit	17 unit	63%	**27 Unit**	17 unit	17 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	**1 Unit**	1 unit	1 unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase layanan angkutan darat**	**35%**		**97.99**	98%	**100%**	45%	45%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	**Jumlah Dokumen LLAJ**	**1 Dokumen**	**-**		-	**1 Dokumen**		0%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	**Jumlah Dokumen LLAJ**	**1 Dokumen**	**-**		-	**1 Dokumen**		0%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyedia & Pemeliharaan perlengkapan jalan**	**100 unit**	**100%**	**98.17**	98%	**100 unit**	60 unit	60 unit

kadis	
sekdis	
kasubag	

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pju yang di pelihara	-	252 Unit	180 unit	71%	0%	60 unit	60 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	-	400 Unit	300 unit	75%	0%		0%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase jumlah Terminal tipe C**	**100%**	**80%**		-	**100%**	26%	26%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah rehabilitas yang dilaksanakan		12 bulan		-	0%		0%
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur pengelola terminal		6 org	5 org	83%	0%	5 org	5 org
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang ditertibkan	**10 Lokasi**		**-**	-	**10 Lokasi**		0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang ditertibkan	**10 Lokasi**			-	10 Lokasi		0%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah Kendaraan yang di Uji**	**4000 kendaraan**	**4000 kendaraan**	**2500 kendaraan**	63%	**4000 kendaraan**	1000 kendaraan	1000 kendaraan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah peningkatan kapasitas sdm	09 org	9 org	6 org	67%	09 org	10 org	10 org
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan bukti lulus uji	4.000 buah	1.800 buah	1000 buah	56%	4.000 buah		0%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pemeliharaan alat uji	12 Unit	12 Unit	8 unit	66%	12 Unit		0%
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi	100 Kali	20 Kali	15 kali	75%	100 Kali	20 kali	20 kali

kadis	
sekdis	
kasubag	

	terkait							
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu llntas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	**Jumlah Manajemen Lalu Lintas yang dilaksanakan**	**100 %**	**100%**		-	**100 %**	42%	42%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Jumlah penataan rekayasa lalu lintas	**5 Kali**	**-**		-	5 Kali	5 kali	5 kali
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jlan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang dan dirawat	12 unit	12 Unit		-	12 unit		0%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Forum PERANGKAT DAERAH yang dilaksanakan	5 Kali			-	5 Kali		0%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyediaan & Pemeliharaan Bus**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	40%	40%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bus dan rute pelayanan antar jemput anak sekolah jumlah pengadaan bus	11 Bus	10 unit	8 unit	100%	11 Bus	40%	40%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengatur Lalu Lintas	35 Org	15 Org	10 org	100%	35 Org		0%

kadis	
sekdis	
kasubag	

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun**	**100%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**	30%	30%
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengawasan Kapal**	**30 Unit**	30 Unit	**20 unit**	67%	**30 Unit**	10 unit	10 unit
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah personil Pengawasan lalu Lintas penyebrangan laut	30 Unit	30 Unit	20 unit	67%	30 Unit	10 unit	10 unit
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah Org/Barang melalui bandara pertahun	**100%**	**100%**		-	**100%**	40%	40%
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	**Jumlah Sarana yang tersedia**	**48 Kali**	48 Kali	**48 Kali**	100%	**48 Kali**	8 kali	8 kali
Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Operasional Pesawat	48 Kali	48 Kali	**48 Kali**	100%	48 Kali	8 kali	8 kali

kadis	
sekdis	
kasubag	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berupaya untuk proaktif, kreatif, inovatif dan profesional dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, terutama yang terkait dengan pelayanan masyarakat antara lain :

1. Pelayanan Angkutan Jalan

   Sesuai dengan Perda no 12 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pasaman Barat Sisten jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri atas, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas jaringan jalan, jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Jaringan Layanan Lalu Lintas. Yang tersedia saat ini sebbagai berikut :

   1. Jaringan Prasarana Lalu lintas yaitu terdiri dari terminal
      a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Simpang Ampek
      b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Ujuang Gadiang
      c. Terminal Barang terdapat di Simpang Ampek, Aia Bangih, Kinali

      Yang aktif saat ini hanya terminal penumpang simpang empat tipe C.
   2. Jaringan Layanan Lalu Lintas yang terdiri dari trayek angkutan penumpang dan trayek angkutan barang, yang terdiri dari :
      a. Trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas
         - ✓ Simpang Ampek- Sidempuan- Medan
         - ✓ Simpang Ampek- Pekan Baru- Medan

      b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas
         - ✓ Simpang Ampek- Pariaman- Padang
         - ✓ Simpang Ampek- Lubuak Basuang- Bukittinggi
         - ✓ Simpang Ampek- Panti- Lubuak Sikapiang
         - ✓ Simpang Ampek- Panti- Rao
         - ✓ Simpang Ampek- Kumpulan- Lubuak Sikapiang

   - Sejak Tahun 2016 telah beroperasi angkutan Bus Sekolah bantuan dari DAK, yang mana operasionalnya dari APBD yang terdiri dari 11 bus dengan rute sebagai berikut :

     1. Kecamatan Kinali

kadis	
sekdis	
kasubag	

a) Pasar Durian Kilangan – Lubuk Karak – SMP N 1 Kinali – Alamanda – Pasar Padang Canduah – Sidodadi – SMPN 7 Kinali.
b) Kantor Camat Knali – Pasar Durian Kilangan – Base Camp – Aia Aru – Kapunduang – SMK 1 Kinali.
c) Pasar Duran Kilangan – Kampung Dalam – Kampung Kinali – Bancah Basuang – Silambau.

2. Kecamatan Talamu
   a) Sungai Abuak – Pasa Kajai – Jembatan Panjang – Pasanggiang – Pasar Talu – Sianok – SMA N 1 Talamau – Taluak Ambun – MTSN Sinuruik.
   b) Gantiang – Kampuang Pinang – Sungai Janiah – Kampuang Kandih – Rumbbai – Aia Angek – Taluak Ambun – MTSN Sinuruik.
   c) Tinggam – Sinuruik – SMPN 1 Talamau – Pasar Talu – Taluak Ambun - MTSN Talamau.
3. Bateh Pulai – Pinagar – Pasar Padang Tujuh – Tapalan – Simpang Kampung Cubadak – Jalan Jati – Simpang Yarsi – Halte Masjid Agung – Simpang Pasaman Baru – Bundaran Simpang Empat – MTSN Simpang empat – SMK Cirsa Kapa.
4. Batang saman – Batang Umpai – Batang Lingkin- Simpang Pasaman Baru- Halte Depan Masjid Agung Pasaman Baru – Simpang Pasaman Baru – Bundaran simpang Empat – Depan SMA Al – istiqamah.
5. a) Simpang 3 Ophir – Halte Jambak – Simpang Gang Serasi Batang toman – Simpang empat Bundaran – Halte Masjid Agung – Simpang Pasaman Baru - MTSN – SMK Cersa Kapa.
   b) Plasma 4 – Plasma 5 – Plasma 3 – Pengkolan – Puju Rahayu – Ophir – SMP N 1 Luhak Nan Duo – Simpang 3 Ophir – Sariak – SMA N 2 Luhak Nan Duo.
6. Ampar Putih – Air Haji – Sungai aur – Simpang Sontang – Paadang Timbalun – Simpang Tamunarang – Muara Tapus – Pematang Sontang.
7. Paninjoan – Kampung Kajai – Tumbang Jaruang – Lubuak Gantiang – Tampus – MTsN – Simpang PLN – Huta Nagodang – Jl. Halmahera – Lampu Merah – SMA – SMK.

kadis	
sekdis	
kasubag	

8. Pasar Desa Baru – Simpang Kampung Baru – Simpang silaping – Simpang rao – Rao – SMA N 1 Ranah Batahan – SMK N 1 Ranah Batahan.
9. a. Labuah luruih – Kiawai – Pasar Kiawai – Kampung Alang – Simpang Tigo Alin – SMA N 2 Gunung Tuleh.
   b. Rabijonggor – SMA N 2 Gunung Tuleh.
10. Pasar Sasak – Padang Laban – Padang Silasuang – Anak Aia Rimbo – Kasiak Tinggi – Pisang Hutan – Sialang – Pasar Kapa – SMK Cersa.
11. Parit – Simpang Bulan – SMA N 1 Parit Koto Balingka.

- Sejak Tahun 2017 telah beroperasi Bus Perintis dengan seluruh biaya dari DITJEN Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan dan dikelola oleh DAMRI dengan rute 5 (lima) trayek perintis yaitu :
  1. Terminal Simpang empat – Mandiangin
  2. Terminal Simpang Empat – Talu (Bateh Samuik)
  3. Terminal Simpang Empat – Sikabau
  4. Terminal Simpang Empat – Desa Baru.

  Untuk Tahun 2023 hanya satu buah Trayek perintis yang beroperasi yaitu Terminal Simpang Empat - Desa Baru, yang lainnya sudah ditarik sama Ditjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Melalui Balai Perhubungan Darat.
- Fasilitas sarana perhubungan yang tersedia saat ini adalah :
  a. Halte yang sudah tersedia sampai sekarang ada 6 halte yaitu Halte air haji, Halte Polsek Pasaman, Halte SMA Istiqamah, Halte Jambak (Depan Lapangan Bola), Halte Katimaha, Halte Simpang 4 Batang Umpai.
  b. Teminal hanya 1 yang aktif yaitu terminal simpang empat sedangkan terminal Talu, Kinali dan ujung gading belum aktir.
- Sarana dan prasarana angkutan laut Tersedianya 12 Dermaga / Tambatan Perahu. Tersedianya 10 Unit Kapal.
- Lampu Jalan tersedia 1.250 unit yang menyebar di seluruh Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

   Peyelenggaraan pelayanan ini brtujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan Uji kendaraan untuk memenuhi syarat laik

kadis	
sekdis	
kasubag	

jalan. Tahun 2021 dari Target 16.946 kendaraan hanya terealisasi 3.419 kendaraan dan pada Tahun 2022 target pelaksanaan Uji Kendaraan adalah 16.946 Kendaraan.

3. Pelayanan Perizinan Angkutan

   Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait rekomendasi izin trayek, rekomendasi perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor, izin insidentil dan izin usaha angkutan.

Disamping sebagai dinas teknis yang diserahi tugas menyelenggarakan urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat juga diberi tanggungjawab sebagai salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Parkir ditepi Jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, dan Retribusi Khusus tempat Parkir.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel dibawah :

Tabel 2.3

Target dan Realisasi PAD Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15,000,000.00	4,900,000.00	33%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500,000,000.00	185,174,400.00	37%
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	10,500,000.00	2%
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	10,000,000.00	2,100,000.00	3%
Jumlah		**600.000.000**	**202,674,400.00**	**33.78%**

Sumber: Dinas Perhubungan, per 31 juli 2023

Target capaian PAD Dinas perhubungan masih jauh dibawah Rata – Rata karena masih adanya kendala – kendala yang ditemui dilapangan diantaranya :

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
   - Jalan Propinsi atau jalan negara tidak di perbolehkan untuk dipungut retribusi
   - Jalan kabupaten untuk titik yang berpotensi untuk pemungutan retribusi tidak memungkinkan
2. Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

kadis	
sekdis	
kasubag	

- Masih adanya kendaraan yang tidak melakukan uji lanjutan kendaraannya
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengujian kendaraan bermotor.
- Karena belum terakreditasinya PKB sehingga membuat kir ditutup sementara

3. Target Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
   - Pada tahun 2023 ini peminjam bus berkurang sehingga target tidak tercapai
   - Terkendala dengan hari dan jumlah jam keberangkatan
4. Retribusi Terminal
   - Meningkatnya kepemilikan kendaraan roda dua (R2) sehingga mengurangi populasi angkutan umum yang beroperasi.
   - Jumlah kendaraan yang menjadi objek retribusi terminal pada tahun 2023 berkurang.
   - Tidak banyaknya angkutan dalam daerah yang beroperasi sehingga target retribusi tidak tercapai dimana setiap angkutan umum yang beroperasi untuk retribusi terminal wajib dipungut di dalam areal terminal.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis dan Pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.
2. Peningkatan pengadaan Infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu, guardraill, APILL, dll) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk menciptakan dan wewujudkan standar keselamatan.
3. Peningkatan pengadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi (HT), senter lalu lintas, helm, rompi, jas hujan dll.
4. Peningkatan sarana Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang berbasis IT maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk optimalisasi pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan.
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu

kadis	
sekdis	
kasubag	

lintas cenderung menurun, tenggang rasa dijalan juga semakin menipis sehingga berdampak pada peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas.

6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
7. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan antar lembaga untuk penanganan bidang perhubangan laut terutama dalam penanganan lanjutan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sebagai isu strategis infrastruktur pelayanan laut pada masa yang akan datang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Mengusulkan rancangan awal renja terdiri dari 6 (enam) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, sejak Tahun 2020 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penerangan Jalan telah pindah ke Dinas Perhubungan yang sebelumnya berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada BAB IV pasal 26 tentang Perlengkapan Jalan disampaikan bahwa Alat Penerangan Jalan termasuk salah satu perlengkapan jalan.

Alat Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat Penerangan Jalan.

kadis	
sekdis	
kasubag	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 selain program kegiatan rutin pendukung pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga program kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Musrenbang yang terakomodir Dalam Renja Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Dana	Ket
I.	**Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ**					
1.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota**					
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		300.000.000		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		100.000.000		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru keacamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		100.000.000		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Lubuk Puding Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		100.000.000		

Hasil Musrenbang Kecamatan

kadis	
sekdis	
kasubag	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun tingkat Propinsi seperti RPJP Propinsi Sumbar, RPJM Propinsi Sumbar, RKPD Propinsi Sumbar dan tingkat Kabupaten seperti RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2025, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, dan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan

kadis	
sekdis	
kasubag	

terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pehubungan nomor KM.49 tahun 2005 tentang sistem Transportasi Nasional maka perlu adanya tatanan Transfortasi yang terdiri dari semua jaringan dan Moda Transfortasi yang terorganisir secara kesisteman. Tratanan (tataran Transportasi Nasional) dalam lingkup Nasional, yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa Transfortasi yang efektif dann efesien dan berfungsi melayani pemindahan penumpang dan barang antar Simpul atau Kota Nasional (SKN) ke LN atau sebaliknya sedangkan Tratawil (tataran Transfortasi Wilayah) dalam lingkup Propinsi, yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa transfortasi yang efektif dan efesien dan berfungsi melayani pemindahan penumpang dan barang antar simpul atau kota lokal (SKL) dan dari simpul atau kota lokal ke Propinsi atau Nasional atau Sebaliknya.

Untuk memantapkan perencanaan dan mewudjudkan sistem transpotasi yang efektif dan efisien di kabupaten pasaman barat maka perlu dilaksanakan Perencanaan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok).

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang erhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,

Tabel 3,1
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2023

kadis	
sekdis	
kasubag	

			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2023
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2023
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2023
		3 Fasilitas Perlengkapa n Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2023
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2023
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2023
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2023
			8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir pada kabupaten/kota	40%	2023
			9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2023
		6.Keselamatan	10. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2023

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan

kadis	
sekdis	
kasubag	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *Outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyususn pilihan – pilihan stategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
1	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangakan konektifitas wilayah	Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan	Persentase layanan angkutan darat	40%	45%	50%	50%	60%
			Rasio Konektifitas Kabupaten	1.8	1.9	2	2.1	2.1
			V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4
		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4

kadis	
sekdis	
kasubag	

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen – elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing – masing bidang.
2. Memperhatikan Program Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya, saat ini dan yang akan datang.
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertent.

Rencana kerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2023 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan Tiga (3) program, sebelas (11) kegiatan dan Dua puluh dua (22) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan kegiatan Non Urusan
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
        - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
            c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
        - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
            a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan.
        - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
            a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
            b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
            c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.

kadis	
sekdis	
kasubag	

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

  a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
  b. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)
   - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota
     a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota
     b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
   - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
     a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
   - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
     a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
     b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
     c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
     d. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
   - Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota.
     a. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota.
     b. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota.
3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

kadis	
sekdis	
kasubag	

- Penempatan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani Penyebrangan dalam Daerah Kab/kota.
    a. Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam darha Kab/kota.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

-Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

a. Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter pada tahun 2024 program dan sub kegiatan tidak tersedia di SIPD sehingga di alihkan pada sub kegiatan Pemeliharaan Aset lainya yang bertempat pada program penunjang urusan pemerintahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka pelaksanaan Rencana Startegis di Tahun ke enam Dinas Perhubungan telah menyusun Program dan kegiatan pada Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 secara rinci dengan pendanaan terdiri dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD) Kabupaten Pasaman Barat

kadis	
sekdis	
kasubag	

Tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

kadis	
sekdis	
kasubag	

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**5.147.180.863,00**							**11.695.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.147.180.863,00**							**11.695.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**5.147.180.863,00**							**11.695.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**			**100 %**	**3.886.544.863,00**						**100%**	**6.925.000.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan*	-			5 dokumen	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*ersentase operasional pegawai*	-			100 %	3.456.491.938,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	4.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.043.796.938,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	319.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	93.395.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah Pegawai yang di bimtek*	-			5 kali	7.960.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				50 Laporan	195.080.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan bus*	-			11 bus	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				50 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	265.400.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan konektivitas wilayah	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	265.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan konektivitas wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				40 Laporan	34.905.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan*	-			5 kali	195.080.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan konektivitas wilayah	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				10 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan konektivitas wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				100 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan konektivitas wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*jumlah kendaraan yang diuji*	-			4000 kendaraan	265.355.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				11 Unit	81.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Orang	103.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	45.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	199.923.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan konektivitas wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				165 Unit	136.355.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*persentase operasional terminal tipe c*	-			100 %	88.760.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				10 Orang	88.760.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase layanan angkutan darat***	**60%**			**50 %**	**1.150.873.000,00**						**60%**	**4.570.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RI LLAJ*	-			1 dokumen	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah penyedia dan pemeliharaan perlengkapan jalan*	-			100 unit	336.278.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah*	-			150 unit	154.885.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	655.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	137.405.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	17.480.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Perluasan Kesempatan Kerja	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah pengadaan peralatan dan mesin*	-			10 unit	0,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Perluasan Kesempatan Kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	41.998.925,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	41.998.925,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	7.960.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*ersetase pelaksanaan operasional kantor*	-			100 %	225.209.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	470.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	1.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	36.466.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	187.443.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

kadis	
sekdis	
kasubag	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun***	**1000,1500ton,org/tahun**			**600,850 ton, org/tahun**	**109.763.000,00**						**1000,1500ton,org/tahun**	**200.000.000,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Izin Persetujuan Pengoperasian kapal*	-			30 unit	109.763.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				12 Laporan	109.763.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Perluasan Kesempatan Kerja	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	JUMLAH							**5.147.180.863,00**							**11.695.000.000,00**	

kadis	
sekdis	
kasubag	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan,

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat serta peran aktif *stakeholder* terkait.

Simpang Empat, Juli 2023
Kepala Dinas Perhubungan

BAKARUDDIN, SH
Pembina Tk. I / IV /b
NIP. 19681002 199212 1 001

kadis	
sekdis	
kasubag	

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diselesaikan dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapakan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Renstra 2021 – 2026 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Semoga penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat.

Padang Tujuh, Juli 2023

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DPKUKM

PAHREIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP.19674041989081004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha KecilMenengah 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 31
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 32
3.3. Program dan Kegiatan 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 40
BAB IV PENUTUP **57**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan

kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik bidang koperasi dan UKM, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 : Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 : Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 : Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 : Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 : Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 : Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 : Review terhadap rancangan awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 : Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 : Telaahan terhadap kebijakan nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 : Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Evaluasi terhadap pelaksanaan renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 11 (sebelas) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2021. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncana kan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
(T.C 29)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)x100*
2						**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
2	**17**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**34.691.085.885**	**3.423.921.358**	**4.152.489.722**	**3.698.489.063**	**89,07**	**1.588.735.700**	**5.287.224.763**	**15,24**
2	**17**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**31.943.943.943**	**3.099.843.571**	**3.637.723.695**	**3.192.604.928**	**87,76**	**1.438.460.534**	**4.631.065.462**	**14,50**
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	26.961.588.785	2.728.263.571	3.282.248.695	2.854.310.928	**86,96**	1.530.665.939	4.384.976.867	**16,26**

2	17	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS Penunjang administrasi perkantoran	4.674.502.319	285.550.000	265.805.000	262.394.000	**98,72**	136.814.000	399.208.000	**8,54**
2	17	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium petugas pengelola keuangan	307.852.839	86.030.000	89.670.000	75.900.000	**84,64**	33.995.000	109.895.000	**35,70**
2	**17**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**104.160.735**	**8.500.000**	**10.375.000**	**10.374.000**	**99,99**	**10.200.000**	**20.574.000**	**19,75**
2	17	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan BMD	104.160.735	8.500.000	10.375.000	10.374.000	99,99	10.200.000	20.574.000	**19,75**
		01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**315.954.230**	**25.446.200**	**-**	**-**	**-**	**10.011.450**	**10.011.450**	**3,17**
		01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Pegawai	97.216.686	12.478.700			-	-	**-**	**-**
		01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Pegawai	121.520.858	12.967.500			-	4.813.050	4.813.050	**3,96**
		01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Pegawai	97.216.686	-	-	-	**-**	5.198.400	5.198.400	**5,35**
2	**17**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**1.457.478.730**	**203.132.400**	**280.117.717**	**278.550.150**	**99,44**	**129.271.307**	**407.821.457**	**27,98**
2	17	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listerik penunjang operasional kantor	91.815.759	12.070.000	25.703.800	25.629.000	**99,71**	9.080.500	34.709.500	**37,80**
2	17	01	2	06	03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	231.468.300	-	-	-	**-**	17.773.000	17.773.000	**7,68**
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Cetak Blanko SPT, SPPD, Kwitansi, Amplop dan Map DKUK yang dibutuhkan	121.520.858	27.556.000	44.601.000	43.980.500	**98,61**	9.167.200	53.147.700	**43,74**

2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat-Rapat dari Pemerintah Provinsi dan Pusat yang diikuti 2. Jumlah Penyedia Makan/Minum Rapat Koordinasi	1.012.673.813	163.506.400	209.812.917	208.940.650	**99,58**	93.250.607	302.191.257	**29,84**
2	**17**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**347.202.450**	**41.318.000**	**21.130.000**	**19.574.000**	**92,64**	**16.000.000**	**35.574.000**	**10,25**
2	17	01	2	07	06	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	347.202.450	41.318.000	21.130.000	19.574.000	92,64	16.000.000	35.574.000	**10,25**
2	**17**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**522.345.797**	**45.681.187**	**45.601.310**	**45.601.310**	**100,00**	**39.497.098**	**85.098.408**	**16,29**
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekwensi Penyediaan Kebutuhan Listrik dan Air untuk Operasional Kantor	522.345.797	45.681.187	45.601.310	45.601.310	100,00	39.497.098	85.098.408	**16,29**
2	**17**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah**	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	**250.757.325**	**50.305.000**	**157.542.000**	**151.784.675**	**96,35**	**40.115.400**	**191.900.075**	**76,53**
2	17	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah alat Elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	177.459.030	94.899.500	148.118.000	142.424.675	96,16	40.115.400	182.540.075	**102,86**
2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	73.298.295	8.987.000	9.424.000	9.360.000	99,32	-	9.360.000	**12,77**
2	**17**	**03**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	**194.283.247**	**17.270.900**	**18.800.000**	**17.877.600**	**95,09**	-	**23.644.400**	**9,20**
2	**17**	**03**	**2**	**01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota**	Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas	**194.283.247**	**17.270.900**	**18.800.000**	**17.877.600**	**95,09**	-	**23.644.400**	**9,20**

2	17	03	2	01	01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian kesehatan serta pengawasan Koperasi/Unit simpan pinjam	29.419.950	-	18.800.000	17.877.600	95,09	-	17.877.600	**60,77**
		03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian kesehatan serta pengawasan Koperasi/Unit simpan pinjam	164.863.297	17.270.900	-	-	-	-	-	-
2	**17**	**05**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI**	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	**518.874.773**	**366.092.800**	**404.200.000**	**400.204.350**	**99,01**	**110.750.000**	**510.954.350**	**98,47**
2	**17**	**05**	**2**	**01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/Kota**	Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**518.874.773**	**366.092.800**	**404.200.000**	**400.204.350**	**99,01**	**110.750.000**	**510.954.350**	**98,47**
2	17	05	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta pelatihan manajemen pengellaan koperasi	518.874.773	366.092.800	404.200.000	400.204.350	99,01	27.800.000	428.004.350	**82,49**
2	**17**	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	**1.097.931.303**	**53.146.100**	**109.242.500**	**96.755.326**	**88,57**	**41.339.200**	**138.094.526**	**12,58**
2	**17**	**06**	**2**	**01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah kabupaten/Kota**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	**1.097.931.303**	**53.146.100**	**109.242.500**	**96.755.326**	**88,57**	**41.339.200**	**138.094.526**	**12,58**
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	1.097.931.303	53.146.100	109.242.500	96.755.326	88,57	41.339.200	138.094.526	**12,58**
2	**17**	**07**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	% Pertumbuhan Usaha Mikro	**808.210.148**	**271.266.800**	**498.083.400**	**484.421.642**	**97,26**	**47.289.200**	**531.710.842**	**65,79**

2	**17**	**07**	**2**	**01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelelmbgaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	**808.210.148**	**271.266.800**	**498.083.400**	**484.421.642**	**97,26**	**47.289.200**	**531.710.842**	**65,79**
2	17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Aktif yang terdata	646.182.338	-	233.473.400	232.184.900	99,45	-	232.184.900	35,93
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM Aktif yang tersedia	162.027.810	271.266.800	264.610.000	252.236.742	95,32	155.010.900	407.247.642	251,34
2	17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Persentase Kimitraan Usaha Permodalan	385.780.500	-	-	-	-	10.088.300	10.088.300	2,62
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
3	**30**	**02**				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pertumbuhan perizinan	**998.553.860**	-	-	-	-	**2.200.000**	**2.200.000**	**0,22**
3	**30**	**02**	**2**	**01**		**penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan**	Persentase pertumbuhan perizinan	**998.553.860**	-	-	-	-	**2.200.000**	**2.200.000**	**0,22**
3	30	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perizinan Pasar dan Pusat Perbelanjaan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	998.553.860	-	-	-	-	2.200.000	2.200.000	0,22

3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**335.629.035**	**691.892.300**	**1.141.751.000**	**1.056.507.758,63**	**92,53**	**15.178.300**	**1.071.686.059**	**319,31**
3	**30**	**04**	**2**	**01**		**Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab/Kota**	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**335.629.035**	**691.892.300**	**1.141.751.000**	**1.056.507.758,63**	**92,53**	**15.178.300**	**1.071.686.059**	**319,31**
3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Paket Sembako yang disubsidi	165.885.615	30.535.900	39.701.000	38.396.573	96,71	11.938.300	50.334.873	30,34
3	30	04	2	01	02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Paket Sembako yang disubsidi	169.743.420	661.356.400	1.102.050.000	1.018.111.185,63	92,38	19.116.530	1.037.227.716	611,06
3	**30**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	**172.058.103**	**35.412.200**	**44.203.200**	**42.901.000**	**97,05**	**22.914.096**	**65.815.096**	**38,25**
3	**30**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspo	**172.058.103**	**35.412.200**	**44.203.200**	**42.901.000**	**97,05**	**22.914.096**	**65.815.096**	**38,25**
3	30	05	2	01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah MOU/Kontrak Dagang	172.058.103	35.412.200	44.203.200	42.901.000	97,05	22.914.096	65.815.096	38,25
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Jumlah Pasar Tertib Ukur	**848.717.101**	**143.642.550**	**478.462.600**	**366.157.361**	**76,53**	**8.000.200**	**374.157.561**	**44,09**
3	**30**	**06**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	Jumlah Pasar Tertib Ukur	**848.717.101**	**143.642.550**	**478.462.600**	**366.157.361**	**76,53**	**8.000.200**	**374.157.561**	**44,09**
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	jumlah Pasar yang ditera, tera ulang alat UTTP dan kelelngkapannya	646.182.338	80.175.600	451.600.000	340.326.461	75,36	8.000.200	348.326.661	53,91

3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah Pasar yang ditera, tera ulang alat UTTP dan kelelngkapannya	202.534.763	63.466.950	26.862.600	25.830.900	96,16	-	25.830.900	12,75
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regiona	**974.095.763**	**106.291.600**	**159.071.600**	**156.296.900**	**98,26**	**240.120.718**	**396.417.618**	**40,70**
3	**30**	**07**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri**	Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	**974.095.763**	**106.291.600**	**159.071.600**	**156.296.900**	**98,26**	**240.120.718**	**396.417.618**	**40,70**
3	30	07	2	01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Terselenggranya Pasaman Barat Expo	974.095.763	106.291.600	159.071.600	156.296.900	98,26	240.120.718	396.417.618	40,70
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3	**31**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pengembangan) Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra	**1.997.107.720**	**258.064.610**	**487.499.660**	**477.902.355**	**98,03**	**65.471.300**	**543.373.655**	**27,21**
3	**31**	**02**	**2**	**01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi	**1.997.107.720**	**258.064.610**	**487.499.660**	**477.902.355**	**98,03**	**65.471.300**	**543.373.655**	**27,21**
3	31	02	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	998.553.860	-	188.427.660	184.001.650	97,65	7.112.700	191.114.350	**19,14**
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan dalam peran serta masyarakat	998.553.860	258.064.610	299.072.000	293.900.705	98,27	58.358.600	352.259.305	**35,28**
3	**31**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTI KABUPATEN/KOTA**	Persentase industri rumah tanggan yang dibina	**612.773.360**	**79.893.900**	**159.421.800**	**157.402.899**	**98,73**	**24.758.250**	**182.161.149**	**29,73**

3	**31**	**03**	**2**	**01**		**Penerbitan Izin Usaha Indsutri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) , Izin Perluasan Kwasan Indsutri (IPK) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Industri Rumah Tangga yang dibina	**612.773.360**	**79.893.900**	**159.421.800**	**157.402.899**	**98,73**	**24.758.250**	**182.161.149**	**29,73**
3	31	03	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem informasi industri nasional yang terintegrasi dang sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah yang diberikan fasilitas pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan kabupaten/Kota	612.773.360	79.893.900	159.421.800	157.402.899	98,73	24.758.250	182.161.149	29,73

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor ekonomi. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang koperasi dan UKM telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
(T-C.30)

NO.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Koperasi yang berkualitas			35%	40%	45%	50%	16,11%	32%	40%	45%	
	Persentase Koperasi Aktif			95,25 %	95,50 %	95,75 %	100 %	95,56%	96%	92%	98%	
	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil			1 %	1,5 %	2 %	2,50 %	1,05%	1,2%	1,5%	2%	
	Persentase Usaha Mikro Aktif			95,25 %	95,50 %	95,75 %	100 %	96,20%	92,70%	95,75%	96%	
	Kenaikan PDRB Sektor Perdagangan			1 %	1,25 %	1,5 %	1,75 %	3,28%	3,47%	3,58%	3,89%	
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB			1 %	1,25 %	1,5 %	1,75 %	12,4%	13,01%	13,12%	13,57%	
	Persentase alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			0,050 %	0,075 %	0,1 %	0,15 %	2,69%	3,03%	4,12%	5%	

	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian			-2 %	-1 %	-1 %	1,25 %	4,33%	3,29%	4,5%	4,5%	
	Pertumbuhan Jumlah IKM			2 %	2,25 %	2,50 %	2,75 %	5,58%	1,92%	3%	3%	
	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri			14,50 %	14,75 %	15 %	15,25 %	14,28%	12,36%	14,75%	15%	
	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait			34,50 %	34,75 %	35 %	35,25 %	37,5%	23,4%	37%	37%	
	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			B	B	B	B	B	B	B	B	
	Level Maturitas SPIP Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2 Level	2 Level	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK			50%	75%	75%	85%	75%	80%	95%	98%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1) Penguatan dan pemantapan kelembagaan koperasi.
2) Pengambangan kawasan sentra IKM dan penggunaan mesin dan teknologi produksi modern.
3) Perlindungan konsumen, pengawasan barang/jasa dan kemetrologian.
4) Kerjasama IKM, IKRT dan UKM dengan investor serta peningkatan dayya saing produk IKM, IKRT dan UKM.
5) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan pengembangan sarana distribusi perdagangan.

Keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1) Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan, akibatnya beberapa kegiatan tidak dapat diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2) Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya seperti program kegiatan yang tidak melalui Musrenbang di tingkat nagari, kecamatan maupun kabupaten.
3) Adanya usulan atau kebutahan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan karena keterbatasan APBD.
4) Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2023, bahwa APBD Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 6.007.343.367,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 5.683.675.417,- 2) Belanja Modal Rp. 323.667.950,-

Artinya, struktur Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 akan didominasi oleh Belanja Operasi. Sementara itu, jumlah Plafon Belanja Langsung tahun 2023 pagu sementara yang dialokasikan untuk Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar Rp 6.007.343.367,-

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat
(T-C.31)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas**	**39%**	**25.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas**	**39%**	**25.000.000**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas**	**39%**	**25.000.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas**	**39%**	**25.000.000**	

	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25.000.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**	**100%**	**310.000.000**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**	**100%**	**310.000.000**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi**	**100%**	**310.000.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi**	**100%**	**310.000.000**	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**Kab. Pasaman Barat**	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	310.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**Kab. Pasaman Barat**	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	310.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Kab. Pasaman Barat**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2.33 %	**86.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kab. Pasaman Barat**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2.33 %	**86.000.000**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pasaman Barat**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	3%	**86.000.000**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pasaman Barat**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	3%	**86.000.000**	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	86.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	86.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Kab. Pasaman Barat**	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.33 %	**92.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kab. Pasaman Barat**	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.33 %	**92.000.000**	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Kab. Pasaman Barat**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	35%	**92.000.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kab. Pasaman Barat**	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	35%	**92.000.000**	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3 Dokumen	40.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3 Dokumen	40.000.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 Unit Usaha	52.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 Unit Usaha	52.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**Kab. Pasaman Barat**			**1.087.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**Kab. Pasaman Barat**			**1.087.000.000**	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**30%**	**650.000.000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**30%**	**650.000.000**	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**30%**	**650.000.000**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**30%**	**650.000.000**	

						Kabupaten/ Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	150.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	150.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor**	**5 Komoditi**	**41.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor**	**5 Komoditi**	**41.000.000**	

	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor**	**30%**	**41.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor**	**30%**	**41.000.000**	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	41.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	41.000.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Pasar Tertib Ukur**	**9 Pasar**	**96.000.000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Pasar Tertib Ukur**	**9 Pasar**	**96.000.000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Pasar Tertib Ukur**	**9 Pasar**	**96.000.000**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Pasar Tertib Ukur**	**9 Pasar**	**96.000.000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit	75.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit	75.000.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	21.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	21.000.000	

	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional**	**11 Produk**	**300.000.000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional**	**11 Produk**	**300.000.000**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional**	**11 Produk**	**300.000.000**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional**	**11 Produk**	**300.000.000**	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	15 UMKM	300.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	15 UMKM	300.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**Kab. Pasaman Barat**			**490.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**Kab. Pasaman Barat**			**490.000.000**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Kab. Pasaman Barat**	**Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)**	**2 Kawasan**	**420.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab. Pasaman Barat**	**Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)**	**2 Kawasan**	**420.000.000**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi**	**2 Kawasan**	**420.000.000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kab. Pasaman Barat**	**Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi**	**2 Kawasan**	**420.000.000**	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	120.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	120.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	300.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase industri rumah tanggan yang dibina**	**3.5 %**	**70.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase industri rumah tanggan yang dibina**	**3.5 %**	**70.000.000**	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Meningkatnya IKM yang Memiliki Izin**	**4%**	**70.000.000**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Pasaman Barat**	**Meningkatnya IKM yang Memiliki Izin**	**4%**	**70.000.000**	

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	10 Dokumen	70.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	10 Dokumen	70.000.000	
					6.371.962.207					6.371.962.207	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.371.962.207,- dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan RPJMD Periode 2021-2026. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran tidak ada perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan UKM, Industri dan Perdagangan, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasaman Barat pada umumnya berdasarkan usulan program/kegiatan dari masyarakat.

Program/kegiatan diusulkan melalui Musrembang merupakan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan berupa pembangunan/renovasi pasar nagari dan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang koperasi, UKM, IKM dan kerajinan. Ususlan program/kegiatan dari masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat
(T-C.32)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Kemitraan Usaha Permodalan		
1	Pelatihan olahan pangan	Nagari Kinali		Rp. 50.000.000,-/ 1 Paket	
2	Pemberdayaan UKM	Nagari Talu		Rp. 60.000.000,-/ 1 Paket	
3	Pelatihan olahan pangan	Nagari Ujung Gading		Rp. 50.000.000,-/ 1 Paket	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
4	Pembangunan / renovasi pasar	Nagari Sungai Aur		Rp. 250.000.000,-/ 1 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, terdapat sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yakni :

1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sember daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target sasaran sebagai berikut :
    a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
    b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
    c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
    d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian, dengan target sasaran sebagai berikut :
    a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Kecil Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)dan koperasi.
    b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
    c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
    d. Peningkatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan derajat keseharan masyarakat
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dari ABS SBK dalam kehidupan masyarakat.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan insfrastruktus.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terdapat misi mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan. Sasaran-sasaran yang akan dicapai yakni, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, indikator sebagai berikut :
   a. Nilai SAKIP denga target B
   b. Level maturitas SPIP 2
   c. Persentase penurunan jumlah temuan BPK sebesar 75 persen

2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor IKM, UKM dengan sasaran meningkatkan IKM, UKM dan ekonomi kreeatif, indikator sebagai berikut :
   a. Pertumbuhan jumlah IKM sebesar 2,5%
   b. Kontribusi pdrb dari sektor industri 15%
   c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri IUI kecil dan indutri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 35%.

3. Meninkatkan koperasi berkualitas dengan sasaran :
   a. Meningkatkan koperasi aktif dengan indikator persentase koperasi aktir 95,75%
   b. Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil dengan indikator:
      - Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 2%
      - Persentase usaha mikro aktir sebesar 95,75%
4. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan sasaran meningkatnya efisiensi perdagangan, indikator sebagai berikut :
   a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,75%
   b. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 0,1%.

3.3. **Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat selaku menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tertuang 11 program, 17 kegiatan dan 25 sub. Kegiatan.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
(T-C. 33)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**4.794.962.207**					**0**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.281.962.207**					**0**
2	**17**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.676.690.695**					**0**
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	26 Orang/bul	100 %	3.282.248.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	310.442.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	84.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**18.000.000**					**0**
2	17	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DKUKM	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	24 Laporan	385 Unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**41.000.000**					**0**
2	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0

2	17	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**226.271.512**					**0**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	16.271.512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	127.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**25.000.000**					**0**
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**100.500.000**					**0**

2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan pelayanan penunjang pememrintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	74.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan pelayanan penunjang pememrintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	12 Laporan	100 %	26.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**194.500.000**					**0**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	84.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**25.000.000**					**0**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**25.000.000**					**0**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 %	25 Unit Usaha	39 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas	39 %	0
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**310.000.000**					**0**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**310.000.000**					**0**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Cakupan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	70 %	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	100 %	0

						dan Kompetensi SDM Koperasi		Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								dan Kompetensi SDM Koperasi		
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**86.000.000**					**0**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**86.000.000**					**0**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,33 %	10 Unit Usaha	3 %	86.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2,33 %	0
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**92.000.000**					**0**
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**92.000.000**					**0**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,33 %	3 Dokumen	35 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Usaha Mikro	3,33 %	0
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,33 %	5 Unit Usaha	35 %	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Usaha Mikro	3,33 %	0
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**1.087.000.000**					**0**
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**650.000.000**					**0**
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**650.000.000**					**0**
3	**30**	**04**	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Jumlah paket sembako murah yang disubsidi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	5 Laporan	35 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30 %	0

3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Jumlah paket sembako murah yang disubsidi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	5 Laporan	35 %	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30 %	0
3	30	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**41.000.000**					**0**
3	30	05	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**41.000.000**					**0**
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Terlaksanya MoU Perdagangan Komoditi daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Komoditi	3 Pelaku Usaha	1 MoU	41.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	5 Komoditi	0
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**96.000.000**					**0**
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**96.000.000**					**0**
3	**30**	**06**	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Tersedianya anggaran untuk melakukan tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Pasar	100 Unit	9 Pasar	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	9 Pasar	0
3	**30**	**06**	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tersedianya anggaran untuk melakukan tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Pasar	5 Orang	9 Pasar	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	9 Pasar	0
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**300.000.000**					**0**
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**300.000.000**					**0**
3	**30**	**07**	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Terlaksanya MoU Perdagangan Komoditi daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Produk	15 UMKM	1 MoU	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	11 Produk	0
3	31				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**490.000.000**					**0**

3	31	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**420.000.000**						**0**
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**420.000.000**						**0**
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan	10 Dokumen	3 %	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	2 Kawasan		0
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan	10 Dokumen	3 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	2 Kawasan		0
3	31	03			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**								**70.000.000**						**0**
3	31	03	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**								**70.000.000**						**0**
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase industri rumah tanggan yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi	Meningkatnya IKM yang Memiliki Izin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,5 %	10 Dokumen	4 %	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase industri rumah tanggan yang dibina	3,5 %		0
												Total	**6.371.962.207,00**						

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-4 dari Rencana Strategis tahun 2021- 2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor IKM, UKM dengan sasaran meningkatkan IKM, UKM dan ekonomi kreeatif, Meninkatkan koperasi berkualitas dan Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan sasaran meningkatnya efisiensi perdagangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat haruslah yang mendulung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 11 program, 17 kegiatan dan 25 sub. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 6.371.962.207,-

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERANGKAT DAERAH)
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**4.874.199.305,00**							**5.643.074.231,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.268.390.618,00**							**4.903.436.351,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.268.390.618,00**							**4.903.436.351,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	-			**100%**	**3.620.948.418,00**						-	**3.975.026.451,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	3.257.322.208,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	100%	3.414.032.405,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang /bulan			28 Orang/bulan	2.869.820.208,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	28 Orang/bulan	3.010.984.443,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen			12 Dokumen	303.442.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	50 Dokumen	316.301.265,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen			12 Dokumen	84.060.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 Dokumen	86.746.697,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	17.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100%	17.720.426,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	17.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	2 Laporan	17.720.426,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	29.927.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	100%	39.630.004,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang			10 Orang	20.262.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	10 Orang	21.113.004,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang			3 Orang	9.665.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	3 Orang	18.517.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	153.281.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100%	260.020.425,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	20.321.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	24.571.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	25.037.940,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	26.154.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	32.922.600,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan	-	1 Paket	34.318.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

												dan pelayanan publik				
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			24 Laporan	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	24 Laporan	174.976.925,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	25.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100%	32.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	25.300.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	2 Unit	32.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	82.172.670,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100%	85.656.791,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	82.172.670,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	85.656.791,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah*	100%			100%	55.945.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100%	125.866.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit			22 Unit	6.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	22 Unit	6.254.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit			22 Unit	40.521.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	22 Unit	109.788.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	9.424.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	2 Unit	9.824.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	-	**55%**			**-**	**0**						**55%**	**20.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	45%			-	0			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	40%	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	26 Unit Usaha			40 Unit Usaha	0	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	22 Unit Usaha	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Penilaian Koperasi berkualitas***	**30 KSP/US P**			**39 %0**	**0**						**30 KSP/US P**	15.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas*	30 KSP/USP			39%	0			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	30 KSP/USP	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha			40 Unit Usaha	0	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	30 Unit Usaha	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya***	**7%**			**5.77 %**	**306.670.000,00**						**7%**	**424.000.000,00**	

	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	100%			100%	306.670.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	100%	424.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				750 Orang	306.670.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		424.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Kemitraan Usaha Permodalan***	**2.5 %**			**2.33 %**	**49.000.000,00**						**2.5 %**	**82.150.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kemitraan Usaha Permodalan*	150 Koperasi			2,33%	49.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	140 Koperasi	82.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha			140 Unit Usaha	49.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	140 Unit Usaha	82.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***% Pertumbuhan Usaha Mikro***	**3.5 %**			**3.33 %**	**291.772.200,00**						**3.5 %**	**387.259.900,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro Menjadi Kecil, Persentase Usaha Mikro Aktif, Persentase Kemitraan Usaha Permodalan*	45%			35%	291.772.200,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	40%	387.259.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro				5000 Unit Usaha	259.572.200,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-		351.059.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				70 Orang	32.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		36.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**605.808.687,00**							**739.637.880,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**441.074.200,00**							**387.852.480,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***% Perusahaan terdaftar***	**42%**			**38%**	**5.000.000,00**						**42%**	**5.200.000,00**	

	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase Pertumbuhan Perizinan*	42%			39%	5.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	41%	5.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen			5 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	4 Dokumen	5.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***	**40%**			**30%**	**273.029.450,00**						**40%**	**90.523.700,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Paket Sembako Murah yang disubsidi*	500 Paket			500 Paket	273.029.450,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	500 Paket	90.523.700,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14 Laporan			500 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	12 Laporan	26.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				500 Laporan	207.473.450,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-		14.463.700,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan			500 Laporan	40.556.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor***	**6 Komoditi**			**5 Komoditi**	**19.388.000,00**						**6 Komoditi**	30.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor*	40%			30%	19.388.000,00			-	Meningkatkan usaha perdaganga n dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	35%	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				4 Pelaku Usaha	19.388.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdaganga n dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Jumlah Pasar Tertib Ukur***	**11 Pasar**			**9 Pasar**	**19.688.500,00**						**11 Pasar**	62.120.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Pasar Tertib Ukur*	11 Pasar			9 Pasar	19.688.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	10 Pasar	62.120.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				5000 Unit	15.688.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		47.950.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	11 Orang			300 Orang	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola	-	10 Orang	4.169.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

												pem erintahan dan pelayanan publik				
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal														
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				5000 Unit	0	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional***	**13 Produk**			**11 Produk**	**123.968.250,00**						**13 Produk**	**200.008.780,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Produk IKM yang Mampu Bersaing Menuju Pasar Regional*	13 Produk			11 Produk	123.968.250,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	12 Produk	200.008.780,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				5000 UMKM	123.968.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-		200.008.780,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**164.734.487,00**							**351.785.400,00**	

1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase industri rumah tanggan yang dibina***	**42%**			**3.5 %**	**32.600.487,00**						**42%**	**49.750.000,00**	
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	*Persentase Industri Rumah Tangga yang dibina*	-			3,50%	32.600.487,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	49.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri														
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				35 Dokumen	32.600.487,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		49.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)***	**2 Kawasan**			**2 Kawasan**	**132.134.000,00**						**2 Kawasan**	**302.035.400,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Pertumbuhan Perizinan*	11%			7%	132.134.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	9%	302.035.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen			1 Dokumen	39.384.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	2 Dokumen	41.435.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				30 Dokumen	92.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-		260.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H							**4.874.199.305,00**							**5.643.074.231,00**	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam rencana kerja kan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk membangun satu tahun kedepan. Selain itu diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari semua kegiatan yang dilaksanakan tentu saja Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program dimasa mendatang.

Dengan demikian program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Padang Tujuh, Juli 2023

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DPKUKM

PAHREIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19670410041989081004

[redacted]

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan, indikator kineja, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Dalam penyusunan Renja 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bupati Pasaman Barat.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kerja (Renja) tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Pasaman Barat, 12 Juli 2023

KEPALA DPMPTSP

FADLUS SABI, S.Sos, MM

NIP. 19700814 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penyusunan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Renstra DPMPTSP 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 37

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 49

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 49

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50

3.3 Program dan Kegitan 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 72

BAB V PENUTUP 97

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas yang sangat antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Selanjutnya, Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasarannya dengan pemerintah pusat (Kementerian Investasi/BKPM RI) dan pemerintah propinsi (Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat. Salah tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu meningkan Nilai Investasi Daerah yang selaras dengan Renstra BKPM RI adalah Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal, dimana juga selaras dengan tujuan Renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan pertumbuhan investasi.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan sebagai acuan dalam meningkatkan investasi daerah dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan investasi daerah melalui promosi dan pengembangan iklim investasi.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan terintegrasi secara elektronik.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran halaman 399 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika Penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* Perangkat Daerah *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 *.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs (*Suistanable Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prio ritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu

indikatif), dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 6 (enam) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 adalah sebagai berikut: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja DPMPTSP pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
									I		II		III		IV								
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	*K*	*Rp*	
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		*15=14/6*100*		*16*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota**	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	100 %	3.461.654.617	90 %	3.663.096.946	100 %	3.359.847.866	0,18	60.420.582	60	1.638.282.189	75%	2.769.079.142	100%	4.606.051.996	100%	4.606.051.996	190%	8.269.148.942	190,00	238,88	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	77.380.657	90 %	47.187.000	100 %	101.625.000	80%	1.498.000	100%	22.297.000	100%	44.981.900	100%	96.444.230	100%	96.444.230	190%	143.631.230	190,00	185,62	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan DPMPTSP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2022; Renja Tahun 2023; RTP Tahun 2022; PK Tahun 2022)	6 dok	56.356.376	6 dok	35.252.300	6 dok	65.731.000	-	-	6 dok	15.200.000	6 dok	30.555.900	6 dok	62.276.430	6 dok	62.276.430	12 dok	97.528.730	200,00	173,06	

	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja DPMPTSP yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2021; LAKIP Tahun 2021)	2 lap	21.024.081	2 dok	11.934.700	2 lap	35.894.000	2 dok	1.498.000	2 dok	7.097.000	2 dok	14.426.000	2 dok	34.167.800	2 dok	34.167.800	4 dok	46.102.500	200,00	219,28	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	2.337.753.392	100 %	3.076.991.919	100 %	3.754.539.735	30%	16.470.200	60%	1.482.393.210	80%	2.372.474.475	100%	3.659.746.910	100%	3.659.746.910	180%	6.736.738.829	180,00	288,17	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	30 PNS	2.199.433.392	33 PNS	2.947.671.919	33 PNS	3.601.955.535	-	-	33 PNS	1.414.759.610	33 PNS	2.275.976.405	33 PNS	3.507.222.710	33 PNS	3.507.222.710	63 PNS	6.454.894.629	210,00	293,48	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran dan keuangan	1 orang PTT 2 orang THL	53.300.000	1 orang PTT 2 orang THL	53.300.000	1 orang PTT 2 orang THL	49.350.000	-	-	4 Orang	26.300.000	4 Orang	38.766.270	4 Orang	49.350.000	4 Orang	49.350.000	7 orang	102.650.000	233,33	192,59	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	85.020.000	100	76.020.000	12 bulan	103.234.200	2 bulan	16.470.200	6 bulan	41.333.600	9 Bulan	57.731.800	12 bulan	103.174.200	12 bulan	103.174.200	12 bulan	179.194.200	100,00	210,77	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	335 unit	35.592.271	100	22.100.000	**329 unit**	26.741.000	-	-	329 unit	10.720.000	329 unit	16.880.000	329 unit	24.850.000	329 unit	24.850.000	429 unit	46.950.000	128,06	131,91	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPMPTSP	2 orang THL	15.627.271	2 orang THL	22.100.000	2 orang THL	24.850.000	-	-	2 orang	10.720.000	2 orang	16.880.000	2 orang	24.850.000	2 orang	24.850.000	4 orang	46.950.000	200,00	300,44	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 orang PNS	19.965.000	100 %	-	1 orang PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	0,00	-	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	90%	-	60 %	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	60%	-	66,67	-	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah ASN pengelola Retribusi IMB	-	-	100 %	-	1 orang PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	100%	-	0,00	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	90 %	36,784,048	90 %	13.881.000	90%	70.600.500	20%	420.000	60%	4.355.000	75%	6.895.000	100%	68.072.400	100%	68.072.400	190%	81.953.400	211,11	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	5 orang	5.000.000		-	30 orang	56.449.500	-	-	-	-	-	-	30 Oang	54.351.900	30 Orang	54.351.900	35 Orang	54.351.900	600	1.087,04	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang	5.000.000		-	10 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	10 orang	21.784.048	10 orang	13.881.000	6 orang	14.151.000	2 orang	420.000	3 orang	4.355.000	7 Orang	6.895.000	10 Orang	13.720.500	10 Orang	13.720.500	20 orang	27.601.500	200,00	126,71	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	336.845.578	80 %	162.281.252	100 %	253.077.068	30%	21.037.500	60%	63.518.150	80%	134.575.396	100%	260.785.777	100%	260.785.777	180%	423.067.029	180,00	125,60	

2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	5 paket	586.576	5 paket	4.002.852	5 paket	3.400.000	-	-	-	-	2 paket	1.515.000	5 paket	3.400.000	5 paket	3.400.000	10 paket	7.402.852	200,00	1.262,04	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	5 paket	44.143.347	1 paket	22.392.500	3 paket	25.911.000	1 paket	2.437.000	1 paket	4.702.000	1 paket	5.796.500	3 paket	22.799.000	3 paket	22.799.000	4 paket	45.191.500	80,00	102,37	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	6 paket	4.702.469	1 paket	2.896.000	3 paket	13.821.500	1 paket	765.500	1 paket	1.522.600	1 paket	5.215.100	3 paket	13.121.500	3 paket	13.121.500	4 paket	16.017.500	66,67	340,62	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	25 paket	30.622.033	2 paket	21.078.500	7 paket	16.015.250	1 paket	2.207.000	3 paket	5.019.500	5 paket	7.161.200	7 paket	16.015.250	7 paket	16.015.250	9 paket	37.093.750	36,00	121,13	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang diberi fasilitas	60 orang	31.511.019	0,00%		30 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	35 kali	86.856.135	1.25 kali 2. 2 paket	111.911.400	40 kali 3 paket	214.002.000	5 kali 0 paket	15.628.000	15 kali 1 paket	52.274.050	18 Kali 2 Paket	114.887.596	50 Kali 10 Paket	205.450.027	50 Kali 10 Paket	205.450.027	75 kali 12 paket	317.361.427	214,29	365,39	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah ASN Yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	1 orang	26.620.000		-	1 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumalh Aplikasi Yang digunakan untuk penunjang pelayanan perkantoran	4 sistem	106.480.000		-	2 sistem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100 %	186.960.353	100 %	54.422.000	100 %	209.727.250	-	-	-	-	40%	81.559.000	100%	202.860.000	100%	202.860.000	200%	257.282.000	200,00	137,61	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 unit	26.620.000		-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel penunjang operasional dan administrasi perkantoran	17 unit	13.310.000	-	-	4 unit	7.204.340	-	-	-	-	4 unit	7.203.000	4 unit	7.203.000	4 unit	7.203.000	4 unit	7.203.000	23,53	54,12	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya penunjang operasional dan administrasi perkantoran	21 unit	80.480.354	7 unit	21.422.000	14 unit	99.522.910	-	-	-	-	11 unit	74.356.000	14 unit	94.557.000	14 unit	94.557.000	21 unit	115.979.000	100,00	144,11	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan Aset Tak Berwujud penunjang pelayanan perkantoran	1 dok	13.310.000		-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasaranaGedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	26.620.000		-	1 paket	103.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	101.100.000	1 paket	101.100.000	1 paket	101.100.000	100,00	379,79	

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 paket	13.310.000	1 paket	33.000.000	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1 paket	33.000.000	33,33	247,93	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	147.455.075	100 %	77.641.075	100 %	110.785.180	30%	5.811.330	30%	21.993.077	50%	36.025.819	100%	56.501.477	100%	56.501.477	200%	134.142.552	200,00	90,97	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Non PNS penyedia Jasa Surat Menyurat	2 orang	32.356.610	2 orang THL	22.100.000	2 orang	10.200.000	1 orang	-	1 orang	5.100.000	1 orang	6.800.000	1 orang	10.200.000	1 orang	10.200.000	3 orang	32.300.000	150,00	99,83	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	69.431.855	12 bulan	33.441.075	12 bulan	45.744.120	3 bulan	5.811.330	6 bulan	12.643.077	9 bulan	21.575.819	12 bulan	35.251.477	12 bulan	35.251.477	24 bulan	68.692.552	200,00	98,94	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	13.310.000	0	-	12 bulan	-	1 orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS yang melaksanakan tugas K3	2 orang	32.356.610	2 orang THL	22.100.000	1 orang	11.050.000	1 orang	-	1 orang	4.250.000	1 orang	7.650.000	1 orang	11.050.000	1 orang	11.050.000	3 orang	33.150.000	150,00	102,45	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	100%	280.921.742	90 %	208.592.700	100 %	243.879.000	-	15.183.552	40%	33.005.752	60%	75.687.552	100%	236.791.202	60%	236.791.202	150%	445.383.902	150,00	158,54	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL/PTT) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1. 19 unit 2 . 4 orang	88.358.435	1. 21 unit 2 . 4 orang	58.619.600	1. 17 unit 2 . 2 orang	28.000.000	-	-	1. 17 unit 2 . 2 orang	9.350.000	1. 17 unit 2 . 2 orang	16.916.450	1. 17 unit 2 . 2 orang	27.768.750	1. 17 unit 2 . 2 orang	27.768.750	1. 38 unit 2. 6 orang	86.388.350	200,00	97,77	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Akan Dilakukan Pemeliharaan	16 unit	26.620.000	0	-	4 unit	-	-	-	-	-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	60 unit	82.990.246	10 unit	149.770.800	27 unit	92.235.000	5 unit	15.183.552	7 unit	23.655.752	13 unit	40.171.102	39 unit	85.542.452	39 unit	85.542.452	49 unit	235.313.252	81.67	283,54	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 paket	26.620.000	1 paket	202.300	2 unit	123.644.000	-	-	-	-	1 unit	18.600.000	2 unit	123.480.000	2 unit	123.480.000	2 unit	123.682.300	200,00	464,62	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara	4 paket	43.023.062	0	-	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor yang dipelihara	3 paket	13.310.000		-	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Nilai Investasi PMDN dan PMA**	55 Miliar	232.161.694	50 Milyar	-	51 Miliar	64.113.500	-	1.174.000	15.01 M	41.212.100	79.6 M	44.082.100	268,6 M	61.971.000	268,6 M	61.971.000	319.6 Milyar	61.971.000	581,09	26,69	

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dokumen pendukung pengembangan iklim penanaman modal	**1 dok**	222.161.694		-	80%	64.113.500	-	1.174.000	-	41.212.100	-	44.082.100	-	61.971.000	0,00	61.971.000	0,00	61.971.000	0,00	27,89	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Aturan Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Yang dibuat	1 perda / perbup	180.000.000		-	1 perda /perbup	64.113.500	-	1.174.000	-	41.212.100	-	44.082.100	-	61.971.000	0,00	61.971.000	0,00	61.971.000	0,00	34,43	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan	42.161.694		-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	1	110.000.000		-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Tersedianya peraturan bupati terkait arah kebijakan dan panduan implementasi kegiatan penanaman modal	1 peraturan	75.000.000	0	-	1 peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
		Terlaksananya Sosialisasi Perbup RUPM	-	-		-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
		Dokumen evaluasi Pelaksanaan RUPMP	-	-		-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Data Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Pasaman Barat	1 dok	35.000.000		-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
		JumlahProfil Peluang Investasi Kabupaten Pasaman Barat		-		-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
		Data Pelaku Usaha yang dimitrakan		-		-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
		Data Pelaku Usaha yang dimitrakan		1		1	2 dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,00	1,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	67.521.372	1 dok	133.170.550	1 dokumen	44.192.500	-	2.388.000	-	5.790.000	-	12.692.900	-	44.190.000	0,00	44.190.000	1 dok	177.360.550	100,00	262,67	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 dok	23.521.372	1 dok	133.170.550	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1 dok	133.170.550	100,00	566,17	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi penanaman Modal yang diikuti	4 kegiatan	44.000.000	0	-	2 kegiatan	44.192.500	-	2.388.000	1 kegiatan	5.790.000	1 kegiatan	12.692.900	-	44.190.000	2 kegiatan	44.190.000	2 kegiatan	44.190.000	0.50	100,43	
		Jumlah fasilitasi calon investor ke lokasi proyek investasi	1 kali	-		-	1 kali	0	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	1 kali	-	100,00	-	
		Terlaksananya promosi investasi melalui media massa	3 kali	-		-	5 kali	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**% Capaian Nilai IKM**	**86%**	256.982.331	86,73 %	207.570.850	85.45 %	143.635.000	88,66	2.372.500	84,16 %	34.172.350	85,86 %	79.292.800	83,55 %	142.592.574	83,55%	142.592.574	170%	350.163.424	198,00	136,26	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Yang diterbitkan tepat waktu	**90%**	256.982.331	87,5%	207.570.850	82%	143.635.000	-	2.372.500	80%	34.172.350	80%	79.292.800	80%	142.592.574	80%	142.592.574	Ter168%	350.163.424	186,11	136,26	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Brusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	3000 izin	170.000.000	2442 izin	189.146.750	2200 izin	110.801.000	500 izin	2.102.500	1104 izin	27.794.350	2306 izin	71.550.000	3501 izin	110.382.355	3501 izin	110.382.355	5943 izin	299.529.105	198,10	176,19	
		Adanya Sistem pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 sistem		2 sistem		2 sistem	-	2 sistem	-	2 sistem	-	-	-	-	-	2 sistem	-	4 sistem	-	200,00		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ke lapangan	135 kali	30.000.000	0	-	120 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10 laporan	24.982.331	15 laporan	18.424.100	10 laporan	32.834.000	-	270.000	6 laporan	6.378.000	20 laporan	7.742.800	26 laporan	32.210.219	26 laporan	32.210.219	41 laporan	50.634.319	410,00	202,68	

		Terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	100 responden	-	131 responden		100 responden	0	148 responden	-	211 responden	-	178 responden	-	692 responden	-	692 responden	-	823 responden	-	823,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan SOP perizinan dan Non perizinan	-	-	0		1 kali	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
		Tersebarnya informasi Layanan Pengaduan melalui media massa	1 kali		1 kali	-	5 kali	0	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	3 kali	-	300,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 pertemuan	32.000.000		-	1 pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**% Kenaikan/penurunan realisasi investasi PMDN dan PMA**	**100%**	40.111.706	-49%	275.138.170	**-4,4%**	403.438.000		-	-	121.715.850	-	177.594.150	168,46	369.968.300	168,46	369.968.300	167,97	645.106.470	16797,00	1.608,27	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporakan oleh PMDN/PMA	45 laporan	40.111.706	33 laporan	275.138.170	30 laporan	403.438.000	-	-	13 laporan	121.715.850	30 laporan	177.594.150	34 laporan	369.968.300	34 laporan	369.968.300	67 laporan	645.106.470	148,89	1.608,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dilakukan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	32 perusahaan	12.000.000	28 perusahaan	52.437.670	29 perusahaan	10.044.000	-	-	13 perusahaan	4.793.000	26 perusahaan	900.000	65 perusahaan	9.853.400	65 perusahaan	9.853.400	93 perusahaan	62.291.070	290,63	519,09	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang difasilitasi permasalahannya	5 perusahaan	16.111.706	5 perusahaan	159.072.000	5 perusahaan	316.522.000	-	-	2 perusahaan	82.650.000	-	124.790.000	9 perusahaan/pelakuusaha	293.868.200	9 perusahaan/pelakuusaha	293.868.200	14 perusahaan	452.940.200	280,00	2.811,25	
		Terlaksananya Bimtek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali		9 kali		7 kali		-	-	4 kali		9 kali	-	10 kali	-	10 kali	-	19 kali	-	271,43		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dilakukanPengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	38 perusahaan	12.000.000	25 perusahaan	63.628.500	32 perusahaan	76.872.000	-	-	13 perusahaan	34.272.850	43 perusahaan	51.904.150	55 perusahaan	66.246.700	55 perusahaan	66.246.700	80 perusahaan	129.875.200	210,53	1.082,29	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Sistem Informasi data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	Ada (100)	53.482.275	0	78.577.000	Ada (100)	12.150.000	Ada (100)	710.000	Ada (100)	7.473.000	Ada (100)	8.664.000	Ada (100)	11.744.000	Ada (100)	11.744.000	Ada (100)	90.321.000	100,00	168,88	
	Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	80%	53.482.275	35 %	78.577.000	50%	12.150.000	10%	710.000	20%	7.473.000	30%	8.664.000	50%	11.744.000	50%	11.744.000	85%	90.321.000	106,25	168,88	

	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Data dan informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 dok	53.482.275	1 dok	78.577.000	1 dok	12.150.000	-	710.000	-	7.473.000	-	8.664.000	1 dok	11.744.000	1 dok	11.744.000	2 dok	90.321.000	200,00	168,88	
		Sinkronisasi data perizinan dan non perizinan ke lapangan					20 kali	-	5 kali	-	10 kali	-	13 kali	-	14 kali	-	14 kali	-	14 kali	-	0,00		

Tabel 2.1.1.
Evaluasi Realisasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan program/Sub Kegiatan sesuai permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	100%	90%	90%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%	98%	98%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan DPMPTSP yang disusun	6 dok	6 dok	100%
2	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja DPMPTSP yang disusun	2 laporan	2 laporan	100%
2	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi Keuangan	100%	100%	100,00%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat Gaji dan Tunjangan	33 pns	33 pns	132,00%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran dan keuangan	1 orang PTT, 3 orang THL	1 orang PTT, 3 orang THL	100%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelolaan keuangan	12 bulan	12 bulan	100%

3	AdministrasiBarang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	329 unit	329 unit	100%
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPMPTSP	2 orang THL	2 orang THL	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	90%	90%	100%
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	30 orang	30 orang	100%
8	Bimbingan Teknis impelentasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat	6 orang	10 orang	80%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	90%	90%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	5paket	5paket	100,00%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	3 paket	3 paket	100,00%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	3paket	3 paket	100,00%
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	7 paket	7 paket	100,00%
13	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	1. 40 kali. 2. 3 paket	1. 50 kali, 2. 10 paket	1. 125% 2. 333,33%

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan	100%	100%	100,00%
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Non PNS penyedia Jasa Surat Menyurat	2 orang THL	2 orang THL	100,00%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS yang melaksanakan tugas K3	2 orang THL	2 orang THL	100,00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	100%	100%	100%
16	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL/PTT) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1.17 unit, 2. 2 orang	1. 17 unit, 2. 2 orang	100%
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	27 unit	39 unit	114%
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit	100%
8	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel penunjang operasional dan administrasi perkantoran	4 unit	4 unit	100%
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan / kendaraan dan mesin	14 unit	14 unit	100%

20	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasaranaGedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	1 paket	100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN dan PMA	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%
21	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dokumen pendukung pengembangan iklim penanaman modal	80%	50%	62%
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Aturan Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Yang dibuat	1 Perda/ Perbup	0	0
2	**PROGRAM PROMOSI PM**	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	0 MoU	0 MoU	100%
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pernyataan Minat Investasi dari Calon Investor terhadap potensi investasi	1 dok	0	0
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi penanaman Modal yang diikuti	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
		Jumlah Fasilitasi calon investor ke lokasi proyek investasi	1 kali	1 kali	100%
		Terlaksananya promosi investasi melalui media masa	5 kali	0 kegiatan	0
3	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,45%	83,55%	97,77%

10	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	82%	80%	97,56%
24	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan	2200 izin	3501 izin	159,13%
		Adanya Sistem pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 sistem	2 sistem	100%
25	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10 laporan	26 laporan	260%
		Terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	100 responden	692 responden	692%
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan SOP perizinan dan Non perizinan	1 kali	0	0
		Tersebarnya informasi Layanan Pengaduan melalui media massa	5 kali	2 kali	40%
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	-4,4%	168,46%	172,86%

11	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporakan oleh PMDN/PMA	30 laporan	34 laporan	112%
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dilakukan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	29 perusahaan	65 perusahaan	224,13%
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PerusahaanPMDN/PMA yang difasilitasi permasalahannya	5 perusahaan	9 perusahaan	180%
		Terlaksananya Bimtek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali	10 kali	142%
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	32 perusahaan	55 perusahaan	171,875%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi**	Ada	Ada	100%
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	50%	50%	100%

29	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data perizinan yang dikelola dan disajikan melalui aplikasi	1 dok	1 dok	100%

Berdasarkan Tabel 2.1.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa sub kegiatan yang capaian targetnya dibawah 90%. Seperti subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimana capaian targetnya 50%, hal ini dikarenakan adanya pembatalan pengadaan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Subkegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaian targetnya 70% disebabkan masih adanya izin yang dikeluarkan melebihi batas waktu sesuai dengan SOP, karena terkendala pada rekomendasi tim teknis.

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program teknis dan 1 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 27 subkegiatan.Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 5 indikator sasaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.1.2.

Penilaian Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1	Kenaikan Nilai Investasi	51 milyar	268,6 milyar	568,6%	Sangat Baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,45	85,56	100,36%	Sangat Baik
3	Nilai SAKIP	B	B	B	Sangat Baik
4	Level SPIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Baik
5	Persentase Penurunan jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan	30%	90%	333,3%	Sangat Baik

Hasil capaian atas 6 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagaimana uraian pada Tabel 2.1.2 Terlaksana dengan predikat “sangat baik” sebanyak 5 indikator

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-3 dan Misi Ke-5 Pembangunan Daerah periode 2021-2026, melalui 2 (dua) indikator utama, yakni:

1) Kenaikan Nilai Investasi Daerah .Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ditargetkan mencapai 51 Milyar pada tahun 2022.

   Hingga tahun 2022, tingkat pencapaian Nilai Investasi sebasar 268,6 Milyar milyar dari 51 Milyar yang ditargetkan pada tahun 2022. Tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal yang mana pada tahun 2022 meningkatnya minat investasi di Kabupaten Pasaman Barat seiring meningkatnya izin usaha yang diterbitkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha). Sehingga untuk tahun - tahun berikutnya nilai investasi akan meningkat sesuai dengan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

2) Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melaksanakan Penilaian Skor Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang ditargetkan mencapai 85,45 pada tahun 2022. Hingga tahun 2022, pencapaian skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) hanya mencapai 85,56. Dari nilai skor tersebut dapat dilihat bahwa target sudah tercapai secara keseluruhan penilaian , tetapi ada beberapa poin dalam penilaian yang belum maksimal yaitu pada kecepatan waktu dalam pelayanan .Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk capaian nilai pada setiap unsur diantaranya :

   - Keterlambatan rekomendasi dari tim teknis
   - Kelalaian dari petugas front office
   - Terjadinya maintanace Aplikasi OSS dan SiCantik

   Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu melalui bidang Pelayanan Perizinan sudah menindaklanjutinya dan melakukan perbaikan untuk ke depannya sehingga Nilai IKM dapat meningkatkan sesuai yang ditargetkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Kenaikan Nilai Investasi			50 M	51 M	52 M	53 M	54 M	55 M	268,6 M	52 M	53 M	54 M	55 M	Realisasi Melebihi Target
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86	85,56	85,45	85,60	85,85	86	Realisasi Mendekati Target
3	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	BB	B	B	B	B	BB	Target Realisasi Tercapai
4	Level SPIP			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Target Realisasi Tercapai
5	Persentase Penurunan jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan			30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	Realisasi Melebihi Target

Sumber : Renstra 2021-2026 DPMPTSP 2021

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dari hasil pengukuran tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasinya sudah mencapai target dan bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sangat mempengaruhi hasil kinerja yang bernilai positif, sehingga tidak ada hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Program Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

Tabel 2.3.1

Isu- Isu Penting Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

TUPOKSI	Isu penting	Rekomendasi / Tindak lanjut
A. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pntu	1. Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah; 2. Belum adanya peta potensi dan peluang investasi 3. Belum terbentuknya kebijakan yang mengatur kemudahan berinvestasi didaerah	1. Menyusun SOP perizinan dan non perizinan sesuai aturan yang berlaku 2. Menyusun peta potensi dan peluang investasi 3. Menyusun Perda kebijakan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal
B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1. Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. 2. Sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan pengaduan belum optimal 3. Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM 4. Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal	1. Menyusun strategi promosi investasi 2. Melengkapi kebutuhan sanpras pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik 3. Meningkatan pemantauan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah 4. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan
A. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman	1. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di daerah	1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di daerah

modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	2. Kualitas SDM belum optimal. 3. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dan sistem	melalui bimtek dan sosialisasi 2. Adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam menambah pengetahuan SDM 3. Terciptanya inovasi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan

Sumber : DPMPTSP Kab. Pasaman Barat, 2022

Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja DPMPTSP dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"				
	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	**Permasalahan Pelayanan DPMPTSP**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif				
	Pelayanan Penanaman Modal	- Aturan dan mekanisme terkait perizinian yang bersifat dinamis atau sering berubah - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai	- SOP Pelayanan Perizinan - sarana dan prasaranan - Kualitas SDM - Kurangnya Dukungan dana dari TAPD	- Sudah adanya Perbup tentang SOP Pelayanan perizinan - Komitmen Pimpinan dalam mendukungpercepatan pelayanan perizinan - Adanya aplikasi online dari pemerintah pusat dalam memudahkan proses pelayanan perizinan (OSS dan Si Cantik)
	Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal	Aplikasi yang digunakan belum optimal	- Terlaksananya pengiriman data perizinan dan perizinan sesuai dengan permintaan instansi terkait
Misi 3 : "Mewujudkan perekonomian yang tangguh , berdaya saing dan inklusif"				
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Penerapan sanksi yang belum tegas - Belum tertibnya penyampai LKPM PMA/PMDN -	- Adanya perka yang yang mengatur tentang tata cara pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal (Perka No 6 Tahun 2020)
4	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Belum tersusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan arah kebijakan Penanaman	- Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal	- Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggara an penanaman modal

		Modal	- Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli	
5	Promosi Penanaman Modal	- Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal.	- Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal - Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang	- Potensi Peluang Investasi yang cukup banyak dapat dipromosikan

Dari uraian permasalah pada table diatas ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja DPMPTSP, dalam hal ini faktor penghambat dapat dikendalikan pada program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Selain itu faktor pendukung sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Untuk melihat keselarasan tujuan dan sasaran visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat terhadap program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat berikut penjelasannya pada table berikut :

Tabel 3.4

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN BKPM RI, DPMPTSP PROPINSI SUMATERA BARAT DAN DPMPTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT

BKPM RI		**DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat**		**DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat**	
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**
1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal 2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	1.Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2.Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3.Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.	1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Pelayanan publik yang berkualitas 2. Meningkatkan investasi didaerah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan 2. Meningkatkan Nilai Investasi di daerah

Sumber : Renstra 2021-2026 DPMPTSP

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, perlunya keselarasan tujuan dan sasaran dari tingkat Nasional, Propinsi dan Daerah, agar tercapainya target yang telah ditetapkan, karena dalam penyelesaian permasalahan bidang penanaman modal dan pelayanan peizinan pada DPMPTSP sangat didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat dan propinsi, seperti : aturan yang ditetapakan pemerintah pusat dalam proses pelayanan perizinan dengan system aplikasi online dan terintegrasi secara elektronik serta pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan secara online oleh investor melalui LKPM online, sehingga dapat memantau kegiatan penanaman modal di daerah.

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada DPMPTSP sebabagai berikut :

1. Berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Pasaman Barat menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan menjadikan usaha masyarakat mempunyai legalitas dalam rangka mendukung program percepatan berusaha di daerah.
2. Faktor rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia menjadi tantangan dalam pengembangan iklim investasi salah satunya yaitu masih adanya masyarakat yang menolak adanya investasi akibat pola piker yang salah dan kurangnya informasi sehingga berdampak pada kegiatan penanaman modal di daerah .

Dari tantangan tersebut ada beberapa peluang yang dapat diambil yaitu :

1. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah, baik dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan maupun sektor pariwisata. Hal itu menjadi peluang untuk meningkatkan nilai investasi.
2. Kebijakan/Aturan terkait dengan Perizinan dari tingkat pusat maupun propinsi sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin didaerah yaitu pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2024, jumlah Plafon Belanja Operasi Sementara yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 3,905,066,166,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam rupiah)

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: DPMPTSP Kab. Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Pasaman Barat	**Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)**	**100%**	**4.984.523.205**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Pasaman Barat	**Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)**	**100%**	**5.464.388.977**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran**	**100 %**	**58.137.233**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran**	**100 %**	**69.137.233**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumrn Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	42.341.530	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumrn Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	52.341.530	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	15.795.703	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	16.795.703	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**3.594.901.080**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**3.980.400.000**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 PNS	2.377.124.241	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 PNS	3.800.400.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	53.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 orang PTT 3 orang THL 12 Bulan	90.000.000	

			ASN								
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	85.020.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	90.000.000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah BMD Yang dikelola DPMPTSP**	**100%**	**26,741,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah BMD Yang dikelola DPMPTSP**	**100%**	**30.000.000**	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	11.741.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	13.000.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.000.000	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP**	**90%**	**27.636.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP**	**90%**	**35.000.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 paket	7.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	7.000.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	7.000.000	

4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	12.636.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	14.000.000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor**	**100%**	**253,077,068**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor**	**100%**	**268,000,000**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan operasional kantor	5 paket	4.403.137	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan operasional kantor	5 paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	33.165.550	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	35.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3.570.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 paket	23.006.786	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kinjungan Tamu	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	23.674.695	Fasilitasi Kinjungan Tamu	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	65.256.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	68.000.000	

	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN Yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	1 Orang ASN	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN Yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	1 Orang ASN	22.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	80.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	82.000.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	**140.466.081**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	**154.466.081**	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	22.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	12.000.000	
2	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	60.466.081	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	62.466.081	
3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	12.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau bagunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau bagunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	12.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	22.000.000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Kabupaten Pasaman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	1 unit	12.000.000	

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Barat	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			
7	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	**110.785.180**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	**118.310.000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	24.310.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	26.310.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52.165.180	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	54.165.180	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24.310.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	26.310.000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP**	**100%**	**211.060.663**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP**	**100%**	**222.675.663**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Angkutan Darat tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	21 unit	66.385.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Angkutan Darat tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	21 unit	68.000.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	22.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	jumlah peralatan dan mesin yang dipeliara	45 unit	62.351.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	jumlah peralatan dan mesin yang dipeliara	45 unit	64.351.800	

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	22.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	32.323.863	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	34.323.863	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	12.000.000	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Nilai investasi PMDN/ PMA**	**52 Miliar**	**200.550.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Nilai investasi PMDN/ PMA**	**52 Miliar**	**208.550.000**	
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan**	**80%**	**100,550,000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan**	**80%**	**104.550.000**	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah peraturan daerah/propinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	70.550.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah peraturan daerah/propinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	72.550.000	
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	10 kegiatan	30.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	10 kegiatan	32.000.000	
2	**Pembuatan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi**	**90 %**	**100.000.000**	**Pembuatan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap**	**90 %**	**104.000.000**	

			investasi yang lengkap								
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.000.000	
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.000.000	
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan**	**- MoU**	**58.327.500**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan**	**- MoU**	**62.000.000**	
1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keweangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi**	1 Dokumen	**58.327.500**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keweangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi**	1 Dokumen	**62.000.000**	
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	22.000.000	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen	38.327.500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen	40.000.000	
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman barat	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan**	**85.45 %**	**221.991.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan**	**85.45 %**	**227.000.000**	
1	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu**	84%	**221.991.000**	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu**	84%	**227.000.000**	

	Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota**					
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Brusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	150.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Brusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	150.000.000	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	20.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	22.000.000	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	21.991.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	23.000.000	
4	Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	10 Kegiatan Usaha	30.000.000	Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	10 Kegiatan Usaha	32.000.000	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELASANAAN PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA**	**-0.8 %**	**34.650.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELASANAAN PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA**	**-0.8 %**	**40.650.000**	
1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN**	**30 laporan**	**34.650.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang**	**30 laporan**	**40.650.000**	

	Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**yang dilaporakan oleh PMDN/PMA**			**Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**dilaporakan oleh PMDN/PMA**			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	29 Kegiatan Usaha	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	29 Kegiatan Usaha	12.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Pelaku Usaha	14.650.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Pelaku Usaha	16.650.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	32 Kegiatan Usaha	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	32 Kegiatan Usaha	12.000.000	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi**	**Ada (100)**	**46.200.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Kabupaten Pasaman Barat	**Cakapuan Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**100%**	**48.200.000**	
1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi**	**50%**	**46.200.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah Data dan informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**12 dokumen**	**48.200.000**	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan	1 Dokumen	**46.200.000**	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	48.200.000	

			Dimanfaatkan			Elektronik					

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.984.523.205,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima rupiah). Dari hasil analisa kebutuhan perlunya tambahan anggaran sebesar Rp. 5.464.388.977.- (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Rarus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Penambahan anggaran ini sesuai dengan analisa kebutuhan yaitu perkiraan kenaikan harga barang, bahan bakar minyak dan kebutuhan sarana prasarana pendukung operasinal kantor dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RPJMD Periode 2021-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dari masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang tertampung dalam rancangan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan tidak bersumber dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari perguruan tinggi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan serta nyata oleh semua pemangku kepentingan

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia , pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Lima program prioritas yang disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato setelah pelantikan sebagai presiden untuk periode 2020 – 2024 , adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang bekerja keras, dinamis dan terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang memudahkan akses ke kawasan wisata dan yang mendongkrak lapangan kerja baru serta memberika nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi harus dipotong dan dipangkas.
4. Penyederhanaan Birokrasi akan terus dilakukan besar besaran, sehingga investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan diprioritaskan.
5. Transformasi ekonomi, dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah yang tinggi bagi kemakmuran bangsa.

Adapun sasaran dari kelima prioritas yang akan dilaksanakan tersebut, sub agendanya adalah:

- Menciptakan layanan satu atap untuk investasi terintegrasi secara elekronik
- Efisiensi Perizinan bisnis menjadi maksimal 5 hari.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Kepala Daerah dalam RPJMD yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Meningkatkan Investasi di daerah

Berdasarkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran disusun sebagai sebagai instrumen yang menggambarkan / menjelaskan kondisi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan isu strategis daerah dan kesesuaiannya terhadap misi kepala daerah, tupoksi dan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel.. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2021-2026. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2024
1	MeningkatkanAkuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	B

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Level Maturitas SPIP	3
			2. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	53 %
2	MeningkatkanPelayanan Publik Yang Bekualitas		Nilai IKM Perizinan	85,60
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,60
3	Meningkatkan investasi di daerah		Kenaikan Nilai Investasi daerah	53 Milyar
.		Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	53 Milyar

Sumber : Renstra 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematik dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran. Ada 3 (tiga) Program Prioritas DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Iklim Investasi penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Kabupaten Pasaman Barat dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di propinsi Sumatera Barat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Menyikapi keadaan geografis Kabupaten Pasaman Barat yang rawan bencana, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Kabupaten Pasaman Barat Barat memiliki 11 kecamatan, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Peluang investasi di Kabupaten Pasaman Barat yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka.Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi

maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur.Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah

Sub Kegiatan :

- Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

- Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- Penyediaan Peta Potensi Kabupaten/Kota

b. Program Promosi Penanaman Modal

Dalam meningkatan investasi di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu ditingkatkan kegiatan promosi penanaman modal dalam bentuk promosi dimedia cetak, mediaelektronik dan pameran investasi serta pembuatan feasibility study potensi investasi. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di kabupaten Pasaman Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal serta pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan perizinan. Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Penanaman Modal adalah:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas/insentif.
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko terintegrasi secara elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang penting dilaksanakan untuk memantau dan mengawasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat guna menghitung realisasi investasi yang dipantau melalui laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM), yang mana perusahaan wajib melaporakan setiap semester melalui aplikasi SPIPISE secara online. Selain itu juga dilalukan kegiatan pembinaan yang bertujuan menberikan sosialisai mengenai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya
- Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dengan adanya program ini, penyusunan dan pengolahan data dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan instansi terkait dan terintegrasi secara elektronik. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara elektronik

Sub Kegiatan :

- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik

Tabel 3.3
Rumusan dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan

Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator KinerjaCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Tolok Ukur	Target		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**4.936.886.897**				**5.076.031.052**	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat,	100 %	**4.250.604.047**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	**4.635.532.358**	
2	**18**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Pasaman Barat,	100 %	**57.856.700**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	**70.346.052**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat,	6 Dokumen	40.481.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.233.251	

2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat,	2 Laporan	17.375.273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19.112.801	
2	**18**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	Kab. Pasaman Barat,	100 %	**3.561.221.194**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	**3.621.868.970**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat,	35 Orang/ bulan	3.449.901.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	3.500.548.970	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat,	12 Dokumen	19.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat,	12 Dokumen	91.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	91.320.000	
2	**18**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	Kab. Pasaman Barat,	332 unit	**7.324.050**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	333 unit	**32.356.610**	

2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.206.610	
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat,	12 Laporan	3.074.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.150.000	
2	**18**	**1**	**2,03**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase capaian target PAD Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Kab. Pasaman Barat,	90%	10.024.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian target PAD Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	90%	**15.000.000**	
2	18	01	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	10.024.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.000.000	
2	**18**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	Kab. Pasaman Barat,	90 %	44.795.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	90 %	**33.440.044**	

2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasaman Barat,	53 paket	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53 paket	5.000.000	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasaman Barat,	5 Orang	4.995.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.000.000	
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat,	10 Orang	4.999.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5.000.000	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan`	Kab. Pasaman Barat,	10 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	18.440.044	
2	**18**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	Kab. Pasaman Barat,	100 %	194.235.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	**308.223.254**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kab. Pasaman Barat,	6 Paket	4.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	7 Paket	5.327.796	

						Disediakan				Umum	Disediakan			
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	5 Paket	36.481.900,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40.130.316	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	4 paket	3.926.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	4.320.426	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	6 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27.838.212	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasaman Barat,	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	28.646.381	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat,	25 Laporan	129.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	80.960.123	

2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	11.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24.200.000	
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	1.903.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	96.800.000	
2	**18**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	Kab. Pasaman Barat,	100 %	136.261.283	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100 %	**169.963.958**	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	24.200.000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 unit	13.773.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	12.100.000	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	17 unit	13.773.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	73.163.958	

										Umum				
2	18	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	12.100.000	
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.100.000	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	21.981.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	24.200.000	
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	10.999.193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	12.100.000	

2	**18**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat,	100 %	90.732.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %	**128.950.068**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.415.100	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	37.372.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63.119.868	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7.000.000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	33.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	29.415.100	
2	**18**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pasaman Barat,	100 %	148.152.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	100 %	**255.383.402**	

					Daerah					Umum				
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasaman Barat,	21 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	80.325.850	
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat,	12 unit	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	24.200.000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat,	50 unit	60.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	75.445.678	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat,	2 unit	21.948.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	24.200.000	
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat,	2 unit	19.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	39.111.874	

2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat,	2 unit	13.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12.100.000	
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai investasi PMDN/ PMA**	Kab. Pasaman Barat,	53 Milyar	**65.616.800**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Nilai investasi PMDN/ PMA**	54 Milyar	**150.000.000**	
2	**18**	**2**	**2,01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pasaman Barat,	80 %	22.082.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80 %	**70.000.000**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	1.654.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	40.000.000	

2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Pasaman Barat,	50 dokumen	19.941.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	51 dokumen	10.000.000	
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Pasaman Barat,	5 dokumen	487.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5 dokumen	20.000.000	
2	**18**	**2**	**2,02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	Kab. Pasaman Barat,	90 %	43.534.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	90%	**80.000.000**	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	4.774.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/ Kota	1 Dokumen	30.000.000	
2	18	02	2.02	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Pasaman Barat,	1 Daerah	9.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi	3 Daerah	30.000.000	

										Umum	investasi			
2	18	02	2.02	02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	29.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Kesepakatan Investasi yang dikeluarkan**	Kab. Pasaman Barat,	- MoU	**51.748.600,**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Jumlah Kesepakatan Investasi yang dikeluarkan**	3 MoU	**64.306.069**	
2	**18**	**3**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	**51.748.600,**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 Dokumen	**64.306.069**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	30.615.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	40.000.000	
2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	21.133.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	1 Dokumen	24.306.069	

2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	Kab. Pasaman Barat,	85.60 %	68.532.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85.85 %	**153.991.000**	
2	**18**	**4**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Kab. Pasaman Barat,	82%	68.532.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	88%	**153.991.000**	
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	1 dokumen	9.996.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan usaha	**20.000.000**	
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan BerusahaBerbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik	Kab. Pasaman Barat,	2600 Pelaku Usaha	38.545.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	80.000.000	

2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasaman Barat,	10 Pelaku Usaha	9.993.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	130 Kegiatan Usaha	23.991.000,00	
2	18	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Pasaman Barat,	125 Kegiatan Usaha	9.997.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	135 Kegiatan Usaha	30.000.000	
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Kab. Pasaman Barat,	2.8 %	490.386.100	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	10 %	**47.201.625**	

2	**18**	**5**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporakan oleh PMDN/PMA	Kab. Pasaman Barat,	35 Laporan	490.386.100	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporakan oleh PMDN/PMA	45 laporan	**47.201.625**	
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pasaman Barat,	5 Kegiatan Usaha. .	280.399.850	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	32 Kegiatan Usaha.	16.201.625	
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Pasaman Barat,	500 Pelaku Usaha	9.986.500	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 pelaku usaha	20.000.000	
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi	Kab. Pasaman Barat,	34 Kegiatan Usaha	199.999.750	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha	36 Kegiatan Usaha	11.000.000	

						Lapangan serta DIlakukan EvaluasiPenilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan EvaluasiPenilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Kab. Pasaman Barat,	Ada (100)	**9.998.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	**25.000.000**	
2	**18**	**6**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	Kab. Pasaman Barat,	60%	**9.998.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	70%	**25.000.000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	**9.998.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	**25.000.000**	
					Jumlah				**4.936.886.897**				**5.076.031.052**	

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (enam) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator KinerjaCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Tolok Ukur	Target		
					Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP		B			Nilai SAKIP	B		
					Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Level Maturitas SPIP		3			Level Maturitas SPIP	3		
						Persentase penurunan jumlah temuan BPK		60%			Persentase penurunan jumlah temuan BPK	70%		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**4.936.886.897**				**5.076.031.052**	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat,	100 %	**4.250.604.047**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	100 %	**4.635.532.358,**	
2	**18**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Pasaman Barat,	100 %	**57.856.700**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	**70.346.052**	

2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat,	6 Dokumen	40.481.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.233.251	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat,	2 Laporan	17.375.273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19.112.801	
2	**18**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	Kab. Pasaman Barat,	100 %	**3.561.221.194**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	**3.621.868.970**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat,	35 Orang/ bulan	3.449.901.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	3.500.548.970	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat,	12 Dokumen	19.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat,	12 Dokumen	91.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	91.320.000	
2	**18**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	Kab. Pasaman Barat,	332 unit	**7.324.050**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	333 unit	**32.356.610**	

2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.206.610	
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat,	12 Laporan	3.074.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.150.000	
2	**18**	**1**	**2,03**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase capaian target PAD Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Kab. Pasaman Barat,	90%	10.024.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian target PAD Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	90%	**15.000.000**	
2	18	01	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	10.024.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.000.000	
2	**18**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	Kab. Pasaman Barat,	90 %	44.795.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	90 %	**33.440.044**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasaman Barat,	53 paket	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	53 paket	5.000.000	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Kab. Pasaman Barat,	5 Orang	4.995.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	5 Orang	5.000.000	

						Pendidikan dan Pelatihan				Umum	Pendidikan dan Pelatihan			
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat,	10 Orang	4.999.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5.000.000	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan`	Kab. Pasaman Barat,	10 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	18.440.044	
2	**18**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	Kab. Pasaman Barat,	100 %	194.235.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	**308.223.254**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	6 Paket	4.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.327.796	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	5 Paket	36.481.900,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40.130.316	

2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	4 paket	3.926.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	4.320.426	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	6 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27.838.212	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasaman Barat,	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	28.646.381	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat,	25 Laporan	129.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	80.960.123	
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	11.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24.200.000	
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	1.903.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	96.800.000	

2	**18**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	Kab. Pasaman Barat,	100 %	136.261.283	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100 %	**169.963.958**	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	24.200.000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 unit	13.773.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	12.100.000	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	17 unit	13.773.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	73.163.958	
2	18	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	12.100.000	
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.100.000	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	21.981.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	24.200.000	

2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	1 unit	10.999.193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	12.100.000	
2	**18**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat,	100 %	90.732.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %	**128.950.068**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.415.100	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	37.372.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63.119.868	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7.000.000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat,	12 laporan	33.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	29.415.100	

2	**18**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pasaman Barat,	100 %	148.152.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	100 %	**255.383.402**	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasaman Barat,	21 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	80.325.850	
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat,	12 unit	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	24.200.000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat,	50 unit	60.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	75.445.678	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat,	2 unit	21.948.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	24.200.000	
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat,	2 unit	19.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	39.111.874	

2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat,	2 unit	13.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12.100.000	
					Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah	Kenaikan Nilai Investasi Daerah	Kab. Pasaman Barat,	53 Milyar		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kenaikan Nilai Investasi Daerah	**54 Milyar**		
					Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	Kab. Pasaman Barat,	53 Milyar		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	**54 Milyar**		
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai investasi PMDN/ PMA**	Kab. Pasaman Barat,	53 Milyar	**65.616.800**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Nilai investasi PMDN/ PMA**	54 Milyar	**150.000.000**	
2	**18**	**2**	**2,01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pasaman Barat,	80 %	22.082.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80 %	**70.000.000**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	1.654.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan	1 Dokumen	40.000.000	

											Kemudahan Penanaman Modal			
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Pasaman Barat,	50 dokumen	19.941.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	51 dokumen	10.000.000	
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Pasaman Barat,	5 dokumen	487.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5 dokumen	20.000.000	
2	**18**	**2**	**2,02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	Kab. Pasaman Barat,	90 %	43.534.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	90%	**80.000.000**	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	4.774.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupat	1 Dokumen	30.000.000	

											en/ Kota			
2	18	02	2.02	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Pasaman Barat,	1 Daerah	9.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	3 Daerah	30.000.000	
2	18	02	2.02	02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	29.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Kesepakatan Investasi yang dikeluarkan**	Kab. Pasaman Barat,	- MoU	**51.748.600,**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Jumlah Kesepakatan Investasi yang dikeluarkan**	3 MoU	**64.306.069**	
2	**18**	**3**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	**51.748.600,**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 Dokumen	**64.306.069**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	30.615.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	40.000.000	

2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	21.133.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	1 Dokumen	24.306.069	
					Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	**Nilai IKM Perizinan**	Kab. Pasaman Barat,	85,60		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Nilai IKM Perizinan**	85.85		
					Sasaran :Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	**Nilai IKM Perizinan**	Kab. Pasaman Barat,	85,60		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Nilai IKM Perizinan**	85.85		
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	Kab. Pasaman Barat,	85.60 %	68.532.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85.85 %	**153.991.000**	

2	**18**	**4**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Kab. Pasaman Barat,	82%	68.532.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	88%	**153.991.000**	
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	1 dokumen	9.996.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan usaha	**20.000.000**	
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasaman Barat,	2600 Pelaku Usaha	38.545.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	80.000.000	
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	Kab. Pasaman Barat,	10 Pelaku Usaha	9.993.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	130 Kegiatan Usaha	23.991.000,00	

						Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
2	18	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Pasaman Barat,	125 Kegiatan Usaha	9.997.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	135 Kegiatan Usaha	30.000.000	
					Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah	Kenaikan Nilai Investasi di Daerah	Kab. Pasaman Barat,	53 Milyar			Kenaikan Nilai Investasi di Daerah	54 Milyar		
					Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	Kab. Pasaman Barat,	53 Milyar			Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	54 Milyar		
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Kab. Pasaman Barat,	2.8 %	490.386.100	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	10 %	**47.201.625**	
2	**18**	**5**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan**	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporakan oleh	Kab. Pasaman Barat,	35 Laporan	490.386.100	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN	45 laporan	**47.201.625**	

					Daerah Kabupaten/Kota	PMDN/PMA					yang dilaporakan oleh PMDN/PMA			
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pasaman Barat,	5 Kegiatan Usaha. .	280.399.850	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	32 Kegiatan Usaha.	16.201.625	
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Pasaman Barat,	500 Pelaku Usaha	9.986.500	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 pelaku usaha	20.000.000	
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku	Kab. Pasaman Barat,	34 Kegiatan Usaha	199.999.750	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha	36 Kegiatan Usaha	11.000.000	

						DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Kab. Pasaman Barat,	Ada (100)	**9.998.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	**25.000.000**	
2	**18**	**6**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	Kab. Pasaman Barat,	60%	**9.998.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	70%	**25.000.000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	Kab. Pasaman Barat,	1 Dokumen	**9.998.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	1 dokumen	**25.000.000**	

					Elektronik	Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
					Jumlah				**4.936.886.897**				**5.076.031.052**	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat

FADLUS SABI, S.Sos, MM

NIP. 19700814 199703 1 005

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua
1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris
1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja
1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;

2. Menganalisa gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu;
3. Menganalisa dan mengevaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat ;

4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
5. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja 2023;
7. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
8. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal Januari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/ /BUP.PASBAR/2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Fadlus Sabi, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Ketua
Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
Ahmad Hanif, S.IP	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Khairuman, S.Ag	Kabid Penanaman Modal	Koordinator
Yenni Fitra	Kasi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
Rici Sandra, ST	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Anggota
Endang Trifuji Astuti, ST	Staf Bidang Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan		
Sepriwenti, SE	Kabid Pelayanan Perizinan	Koordinator
Yan Eldi	Kasi Teknis Perizinan	Anggota
Mukhlas, SH	Kasi Administrasi Perizinan	Anggota
Zainal Arifin, AMd	Staf Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian		
Andre Afandi, SSTP	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Koordinator
Sri Yenita, SKM, M.Kes	Kasi Pengendalian dan Pengawasan PM	Anggota
Arnis, SKM, MM	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Anggota
Lydia Fitra, SKM	Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan		
Getri Ardenis, S.Ag, MA	Kabid Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Koordinator
Ade Handayani, S.Kom	Kasi Data dan Sistem Informasi	Anggota
Desi Yusnita, SKM	Kasi Pelayanan dan Pengaduan	Anggota
Anita Yulia Anwar, SKM	Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal Januari 2022

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekretaris Daerah		
Kepala DPMPTSP		
Sekretaris DPMPTSP		

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax (0753) 466302 Simpang Ampek - Pasaman Barat Kode Pos : 26636

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 900/ / SK/DPMPTSP/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat No 46Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
2. Menganalisa gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu;
3. Menganalisa dan mengevaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun;
4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
5. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pasaman Barat;

6. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja 2023;
7. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
8. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Januari 2022

Kepala DPMPTSP

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199703 1 005
Pembina Utama Muda / IV.c

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Nomor : 900/ / SK/DPMPTSP/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Fadlus Sabi, S.Sos, MM	Kepala	Ketua
Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
Memizesmita, SP	Kabid Penanaman Modal	Sekretaris
Media Tuwenti, SE, MM	Kepala Bidang Penanaman Modal	Koordinator
Yenni Fitra	Kasi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
Endang Trifuji Astuti, ST	Staf Bidang Penanaman Modal	Anggota
Rici Sandra, ST	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan		
Sepri Wenti, SE	Kabid Pelayanan Perizinan	Koordinator
Yan Eldi	Kasi Teknis Perizinan	Anggota
Mukhlas, SH	Kasi Administrasi Perizinan	Anggota
Zainal Arifin, AMd	Staf Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian		
Andre Afandi, S.STP	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Koordinator
Sri Yenita, SKM, M.Kes	Kasi Pengendalian dan Pengawasan PM	Anggota
Arnis, SKM, MM	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Anggota
Lydia Fitra, SKM	Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan		
Getri Ardenis, S.Ag	Kabid Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Koordinator
Ade Handayani, S.Kom	Kasi Data dan Sistem Informasi	Anggota
Desi Yusnita, SKM	Kasi Pelayanan dan Pengaduan	Anggota
Anita Yulia Anwar, SKM	Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Anggota

Plt.KEPALA DINAS,

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TAHUN 2024

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Karunianya, sehingga penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, Renja disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Peraturan Mentri dalam Negri No 86 Tahun 2017. Renja Dispora Tahun 2024 memuat hasil Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan. Renja Perangkat daerah Mencakup Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi RenjaPerangkat Daerah Tahun Lalu.

Melalui Tahapan Perencanaan pembangunan ini, diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diukur, dikendalikan dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan yang nantinya dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki Kinerja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman Barat

MEDIA FITRA, S.Pd
Nip. 197203141994121001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4. REVIU TERHADAP RANCANAGAN AWAL RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAMDAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang disusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja disusun guna mengoperasionalkan Renstra tahun 2021-2026, rencana yang dimaksud sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa kepala OPD menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pasaman Barat merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Dari 6 misi pada Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, 2 (dua) misi diantaranya merupakan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan DISPORA yaitu":

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi Renja Perangkat Daerah (PD) adalah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah untuk Periode 1 Tahun. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 Tahapan yaitu:

1. tahap persiapan penyusunan
2. penyusunan rancangan awal
3. penyusunan rancangan
4. penyusunan forum PD/lintas PD
5. penyusunan rancangan akhir
6. penetapan

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal PD dengan berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi Renja PD tahun berjalan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada DISPORA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan PD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan pedoman kerja bagi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) selama satu-tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja. Renja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Renja DISPORA Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan (2023), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai OPD yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Kepemudaan Dan Olahraga, DISPORA mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, dan penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024. tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan Kepemudaan dan Keolahragaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, didukung oleh sumber daya aparatur dengan struktur sebagai berikut:

1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 Sub bagian yaitu
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan.
3) Unsur Pelaksana yaitu :
    a. Bidang Layanan Kepemudaan
        - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Pemberdayaan Pemuda;
        - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Pengembangan Pemuda;
        - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Infastruktur dan Kemitraan;
    b. Bidang Pembudayaan Olahraga
        - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Olahraga dan Pendidikan dan Sentra Olahraga;
        - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
        - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
    c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Pembibitan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tenaga Keolahragaan;
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Standarisasi dan Infrastruktur;

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
12. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;

15. Permendagri No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian dalam Negeri tahun 2015-2019;
16. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan manajemen kepemudaan dan keolahragaan maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas kegiatan internal di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Renja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur

sebagai dasar untuk penilaian kinerja DISPORA serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan dan Program pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman / acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh bidang dilingkungan DISPORA Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menyediakan pedoman / acuan penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.
3. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolak ukur kinerja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja DISPORA mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024, memuat ketentuan antara lain:

1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* Perangkat Daerah *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

2.5

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Melaksanakan 3 (Tiga) Program yang terdiri dari 13 Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2023. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut..

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 sebagai berikut :

ANALISIS RENJA DG EVALUASI

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 7 Kegiatan Rutin yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Diharapkan keluaran dari kegiatan tersebut dapat menunjang kelancaran Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

   Program ini dengan anggaran total Rp. 3.769.130.126,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.252.955.170 ,- dengan realisasi fisik sebesar Rp.100%.

c. Permasalahan dan Solusi

   Dalam pelaksanaan program ini sebelumnya adanya kendala untuk tahun ini telah di selesaikan yaitu Fasilitas yang Kurang Memadai, Banyaknya Kekurangan atau Ketidaklengkapan Surat-surat Kendaraan, Terbatasnya Keahlian Teknisi Yang Berada Didaerah.

2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota. Program ini diharapkan dapat menunjang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

   Program ini dengan total anggaran Rp. 187.375.000,- dengan realisasi Rp. 124.939.800,00dengan realisasi fisik 100%

c. Permasalahan dan Solusi

   Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan permasalahan.

3.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan dan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota, Pembinaan dan Pengembanga Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

   Jumlah anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp. 5.410.156.000,- dengan realisasi fisik 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

   Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan permasalahan.

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Pasaman Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai tahun berjalan		
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Rp jutaan	Rp jutaan	Rp jutaan	Rp jutaan	Rp jutaan	Rp jutaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah**	**100%**		**3,769,130,126**	**3,242,955,170**		**3,429,504,674**		
2.19.001.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**		409,550,000	**3,387,910,556**	**2,869,015,855**	**84,98**	**2,914,057,574**		
2.19.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah			2,939,750,556	2,451,471,355	83,73	2,563,467,574	1,247,395,071	
2.19.1.2..2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah			353,450,000	324,024,500	91,67	246,550,000	112,550,000	
2.19.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah			94,710,000	93,520,000	98,74	104,040,000	45,425,000	
2.19.001.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**		208,230,234	**263,502,820**	**259,685,990**	98,55	**394,058,000**		
2.19.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			43,909,500	43,784,500	99,72	167,672,000	23,580,000	
2.19.1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			26,811,820	23,411,820.00	87,32	24,000,000	6,375,000	
2.19.1.2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			192,781,500	192,489,670	99,85	202,386,000	90,823,150	
2.19.001.2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor		**7,101,312**	**14,450,000**	**14,403,400**	**99,68**	**28,900,000**		
2.19.1.2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor			14,450,000	14,403,400	99,68	28,900,000	2,516,600	
2.19.001.2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		**70,453,000**	**103,266,750**	**99,849,925**	**96,73**	**92,489,100**		
2.19.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor			103,266,750	99849925	96,73	92,489,100	35,789,125	

=

									3,725,000	
2.19.1.2.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor						31,840,000	24,800,000	
2.19.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)**	**6 dan 17 %**		**127,358,000**	**124,939,800**				
2.19.002.2	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	jumlah pemuda pelopor yang berprestasi		66,021,300	127,358,000	124,939,800	98,10			
2.19.2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)			-	-		25,513,750	-	
2.19.2.2.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)			127,358,000	124,939,800	98,10	691,783,500	90,342,200	
2.19.002.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**60,017,000**	**46,632,500**	**77,70**			
2.19.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi kepemudaan yang terbina			60,017,000	46,632,500	77,70	39,350,000		
2.19.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**jumlah prestasi(unit)**	**25 medali**		**5,410,156,000**	**5,016,379,000**				
2.19.003.2	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah cabang olahraga yang terbina		241,016,000	448,256,000	432,380,700	96,46			

2.19.3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah prestasi olahraga			355,750,000	350,098,800	98,41	155,484,000	79,337,600	
2.19.3.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah prestasi olahraga			92,506,000	82,281,900	88,95	508,529,000	30,794,650	
2.19.003.2	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	jumlah prestasi(unit) tingkat daerah provinsi			434,900,260	271,691,850	62,47%			
2.19.3.2.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri			434,900,260	271,691,850	62,47	327,815,000	37,230,000	
2.19.003.2	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	jumlah cabang olahraga yang terbina		**48,232,500**	**1,789,595,000**	**1,765,838,600**	**98,67**			
2.19.3.2.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah prestasi(unit) tingkat provinsi			1,789,595,000	1,765,838,600	98,67	4,739,944,000	47,080,009,000	
2.19.003.2	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**jumlah cabang olahraga yang terbina**		**2,071,674,915**	**2,737,404,740**	**2,546,467,850**	**93,02**			
	Penyelengaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi							161,607,000	8,115,000	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi							234,547,700	11,630,000	
2.19.3.2.3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	-		2,737,404,740	2,546,467,850	93,02	3,002,344,902	127,281,000	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam upaya mewujudkan tujuan terhadap pencapaian kinerja pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan melalui analisa SWOT, agar pelayanan dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan dari kinerja yang ditetapkan. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian target kinerja didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran(output) dan hasil (outcome).

Adapun pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Memberi kesempatan yang lebih besar kepada Pemuda untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan atau sosialisasi sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing.
3. Melaksanakan penghimpunan data dan pembaharuan data organisasi Kepemudaan dan Olahraga secara kontinue.

4. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pemuda serta club-club olahraga dan pemberian penghargaan kepada organisasi pemuda dan atlit-atlit yang berprestasi.
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat atas bantuan sarana dan prasarana olahraga.
6. Melaksanakan diklat-diklat olahraga khususnya diklat sepak bola untuk pembinaan atlit sepak bola yang berprestasi.
7. Melaksanakan pelatihan atau sosialisasi pengembangan kewirausahaan untuk organisasi pemuda yang bertujuan untuk menjadikan pemuda yang kreatif serta mandiri.
8. Melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana olahraga

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas DISPORA Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun bahwa Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Memberi kesempatan yang lebih besar kepada Pemuda untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan atau sosialisasi sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing.
3. Melaksanakan penghimpunan data dan pembaharuan data organisasi Kepemudaan dan Olahraga secara kontinue.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pemuda serta club-club olahraga dan pemberian penghargaan kepada organisasi pemuda dan atlit-atlit yang berprestasi.
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat atas bantuan sarana dan prasarana olahraga.
6. Melaksanakan diklat-diklat olahraga khususnya diklat sepak bola untuk pembinaan atlit sepak bola yang berprestasi.
7. Melaksanakan pelatihan atau sosialisasi pengembangan kewirausahaan untuk organisasi pemuda yang bertujuan untuk menjadikan pemuda yang kreatif serta mandiri.
8. Melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana olahraga

Pada RPJMD tahun 2021-2026, DISPORA Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi II RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan satu tujuan strategis pembangunan DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

Uraian tugas pokok dan fungsi DISPORA dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala DISPORA yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DISPORA tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja DISPORA Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2022 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2022 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
		Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Jumlah Atlit yang mendapat Medali dalam Porprov dan Kejurda		Jumlah medali		10 Medali	15 Medali	20 Medali	25 Medali	30 Medali	10 Medali	15 Medali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Presentase Partisipasi Pemuda dan Organisasi sosial Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial		2%	3%	4%	5%	6%	2 & 8	4 & 12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Partisipasi Pemuda Yang Mendapatkan Pelatihan		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	-	-	-	100	100	-	-	-

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

a. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD

Mengenai penyelenggara birokrasi, aspek pembinaan Kepemudaan dan Olahraga menjadi perhatian utama karena sebagian besar Kepemudaan dan Olahraga adalah Organisasi pemuda dan club-club olahraga. Dengan demikian aspek pembinaan mendapatkan peran penting yang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia birokrasi yang profesional, bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

- Belum terhimpunya data organisasi kepemudaan dan organisasi club-club olahraga secara akuntabel berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi kepemudaan dan olahraga yang berkompetensi.
- Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme pada organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD

Tantangan : belum optimalnya peningkatan profesionalisme pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk mewujudkan prestasi di bidang kepemudaan dan keolahrgaan baik ditingkat Propinsi mapun tingkat Nasional.

Peluang : - Mengembangkan bakat dan keahlian serta minat organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk menfasilitasi kebutuhan mengikuti event-event kepemudaan dan keolahragaan sehingga bisa mencapai atlit yang mempunyai prestasi yang berkualitas.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

- Mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atlit khusunya cabang olahraga sepak bola.
- Memberikan kebutuhan dan fasilitas sesuai dengan scedule yang telah ditentukan.
- Mengoptimalkan pengelolaan terhadap pembinaan atlit diklat sepak bola agar mampu memotivasi untuk mengikuti pertandingan-pertandingan baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional.

Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD. Mengenai penyelenggara birokrasi, aspek pembinaan Kepemudaan dan Olahraga menjadi perhatian utama karena sebagian besar Kepemudaan dan Olahraga adalah Organisasi pemuda dan club-club olahraga. Dengan demikian aspek pembinaan mendapatkan peran penting yang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia birokrasi yang profesional, bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan.

a) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

- Belum terhimpunya data organisasi kepemudaan dan organisasi club-club olahraga secara akuntabel berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi kepemudaan dan olahraga yang berkompetensi.

- Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme pada organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

b) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD

Tantangan : belum optimalnya peningkatan profesionalisme pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk mewujudkan prestasi di bidang kepemudaan dan keolahrgaan baik ditingkat Propinsi mapun tingkat Nasional.

Peluang : Mengembangkan bakat dan keahlian serta minat organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk menfasilitasi kebutuhan mengikuti event-event kepemudaan dan keolahragaan sehingga bisa mencapai atlit yang mempunyai prestasi yang berkualitas.

c) Pencapaian Prestasi cabang-cabang Olahraga masih terhambat karena sarana dan prasarana olahraga belum lengkap sesuai dengan target-target cabang yang diprioritaskan.

d) Perlunya b Pengoptimalan pembianaan terhadap Organisasi Pemuda dan Masyarakat melalui program Pada Dinas Kepemudaan Olahraga

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

- Mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atlit Pada Cabang-cabang Olahraga yang diperlombakan tingkat, Provinsi, Nasional maupun Internasional khusunya cabang olahraga sepak bola.
- Memberikan kebutuhan dan fasilitas sesuai dengan scedule yang telah ditentukan.
- Mengoptimalkan pengelolaan terhadap pembinaan atlit diklat pada seluruh cabang Olahraga yang diperlombakan Khusunya sepak bola dan Volly Ball agar mampu mengikuti pertandingan-pertandingan baik tingkat Propinsi,Nasional maupun Internasional

2.4. Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tc.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
					6,226,655,074					**23,525,000,000**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pasaman Barat	Cakupan Pelayanan Dasar Penunjang Urusan Pemerintah	100%	**3,524,547,574**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pasaman Barat	Cakupan Pelayanan Dasar Penunjang Urusan Pemerintah	100%	**4,755,000,000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Pasaman Barat	Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,954,847,574	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Pasaman Barat	Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,450,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pasaman Barat	Presentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	61,100,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pasaman Barat	Presentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100,000,000	
	Aministrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pasaman Barat	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	162,100,000	Aministrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pasaman Barat	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	200,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Pasaman Barat	Presentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	100%	94,910,000	Administrasi Umum Perangkat daerah	Pasaman Barat	Presentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	100%	620,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pasaman Barat	Caakupan Pemenuhan Layanan jasa Penunjang Operasional kantor	100%	28,900,000	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pasaman Barat	Caakupan Pemenuhan Layanan jasa Penunjang Operasional kantor	100%	35,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasaman Barat	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	222,690,000	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasaman Barat	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	350,000,000	
	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Pasaman Barat	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri(%), Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	5 & 15%	**154,802,500**	**Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan**	Pasaman Barat	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri(%), Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	5 & 15%	**5,000,000,000**	

			Kepemudaan dan Organisasi Sosial(%)					Kepemudaan dan Organisasi Sosial(%)			
	Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten atau Kota	Pasaman Barat	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berprestasi	1 org	45,461,500	Penyadaran ,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten atau Kota	Pasaman Barat	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berprestasi	1 org	1,500,000,000	
	Pemberdayaan dan penegembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/kota	Pasaman Barat	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1 lembaga	109,341,000	Pemberdayaan dan penegembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/kota	Pasaman Barat	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1 lembaga	3,500,000,000	
	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan	Pasaman Barat	Jumlah Prestasi Olahraga	25 Medali	**2,547,305,000**	**Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan**	Pasaman Barat	Jumlah Prestasi Olahraga	25 Medali	**13,770,000,000**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kaupaten/kota	Pasaman Barat	Jumlah cabang Olahraga yang terbina	2 cabor	46,905,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kaupaten/kota	Pasaman Barat	Jumlah cabang Olahraga yang terbina	2 cabor	3,500,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pasaman Barat	Jumlah Prestasi(medali) tingkat Provinsi	5 medali	20,100,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pasaman Barat	Jumlah Prestasi(medali) tingkat Provinsi	5 medali	4,000,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pasaman Barat	Jumlah cabang Olahraga yang terbina	2 cabor	900,500,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pasaman Barat	Jumlah cabang Olahraga yang terbina	2 cabor	3,000,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pasaman Barat	Jumlah cabang Olahraga yang terbina	2 cabor	1,579,800,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pasaman Barat	Jumlah cabang Olahraga yang terbina	2 cabor	3,270,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dari Masyarakat

TC.32

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
10	233930	28-02-2023	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	bantuan sarana dan Prasaran a peralatan olahraga untuk kelompok/Organisasi pemuda dalam menunjang dan memajukan keolahragaan di perkiraka n anggaran Rp. 250. 000. 000	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan Ke TAPD	-	1	Paket	250000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
11	233976	28-02-2023	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	bantuan sarana dan Prasaran a untuk Pencapsenam dan bantuan sarana dan prasaran a untuk kelompok senam Airobit/Senam kesehatan jantung serta dana pembina untuk organisasi pemuda (bantuan Hibah Kekoni) di perkiraka n anggaran Rp. 250. 000. 000	Kab. Pasman Barat, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	Paket	250000000	-	Pengembangan Organisasi Keolahragaan

53	234870	28-02-2023	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	perlunya mesin pemotong rumput untuk lapangan sepak bola SMP N 1 sasak Ranah pasisie, diperkirakan anggaran Rp. 200.000.000	SMP N 1 Sasak Ranah Pasisie, Kec Sasak Ranah Pasisie, kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Disdik	diteruskan ke TAPD	-	1	Paket	200000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
54	234907	28-02-2023	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	belum adanya tribun di lapangan bola tersebut maka perlunya pembangunan tribun di lapangan bola SMP N 1 Sasak Ranah pasisie tersebut diperkirakan anggaran Rp. 300.000.000	SMP N 1 Sasak ranah Pasisie, kec. Sasak Ranah pasisie, kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Disdik	Karena Dinas Pendidikan bukan OPD teknis terkait sarana prasarana olahraga	-	1	paket	300000000	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
119	241467	01-03-2023	H.YEFRIZAL, A.Md	Hibah Koni	Perlunya hibah bantuan ke koni untuk meningkatkan prestasi keolahragaan dengan pagu dana RP 50.000.000,-	Koni Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	50000000	-	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
214	245624	01-03-2023	H.ERIANTO, SE	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	perlunya bantuan sarana dan prasarana bola kaki dan volly untuk kemajuan pemuda	Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	200000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

					di bidang olahraga, dengan usulan anggaran Rp. 200.000.000,00														
215	245632	01-03-2023	MUHAMMAD UMAR, SE	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	Belum tersedianya sarana lapangan olahraga yang memadai guna peningkatan kegiatan siswa	PP Adlaniyah Jl Gotong Royong Tampus Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diakomodir melaui belanja hibah	Diteruskan ke TAPD	-	1	unit	90000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
219	245691	01-03-2023	MUHAMMAD UMAR, SE	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	Belum tersedianya alat alat olah raga yang berkualitas	RPS Rantau Pinang Sepakat Jorong Tampus Nagari Ujung Gading Kecamatan lembah melintang, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	20	unit	50000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
233	245848	01-03-2023	SAHRIMAN	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	Perlunya rehabilitasi lapangan Bola Kaki Kampung Masjid, Usulan Anggaran Rp. 50.000.000,-	Jorong Kampung Masjid, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	Unit	50000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
234	245865	01-03-2023	SAHRIMAN	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	Perlunya Tribun Lapangan Bola Kaki Mulyo Rejo, Usulan Anggaran Rp. 200.000.000,-	Jorong Mulyo Rejo, Nagari Desa Baru, Kec, Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	Unit	200000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
237	245927	01-03-2023	SAHRIMAN	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	Perlunya Sarana dan Prasarana Olahraga di Nagari Desa Baru dan Nagari Batahan , Usulan Anggaran Rp.	Nagari Desa Baru, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	Paket	100000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

					100.000.000,-														
329	249478	01-03-2023	ROSDI, SE	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	Perlunya bantuan alat-alat olahraga, Usulan Anggaran Rp. 50.000.000,-	Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	Paket	50000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
336	249679	01-03-2023	H.DALIYUS K,S.Si,MM	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	bantuan untuk kegiatan pemuda dan olahraga dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	200000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
337	249687	01-03-2023	H.DALIYUS K,S.Si,MM	Pembinaan/Pelatihan Organisasi Kepemudaan _ Pelatihan wirausaha bagi pemuda Umur 16-30 tahun	pembinaan dan kejuaraan cabang karate dengan pagu dana sebesar Rp. 200.000.000,00	Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	DIteruskan Ke TAPD	-	1	paket	200000000	-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
379	251477	02-03-2023	H.ERIANTO, SE	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	perlunya pembuatan pagar pengaman lapangan bola kaki dari arah SD dan SMA nagari sariak untuk meningkatkan keamanan masyarakat ketika adanya kegiatan di lapangan bola kaki dengan usul	Lapangan Bola Kaki arah SD dan SMA Nagari Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	Paket	200000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

					an anggaran Rp. 200. 000. 000, 00														
491	254320	02-03-2023	DIRWAN SYAH, SH	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	peningkatan pembangunan lapangan bola kaki jorong limau soring kecamatan koto Balingka dengan usulan anggaran Rp 200. 000. 000, -	jorong limau soring, kecamatan koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	200000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
493	254432	02-03-2023	DIRWAN SYAH, SH	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola kaki)	Pembangunan Bola Kaki di Jorong Silawai Tengah kecamatan Sungai Beremas dengan usulan Anggaran Rp 100. 000. 000, -	Jorong Silawai Tengah, kecamatan Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	100000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
530	256485	02-03-2023	DEDI LESMANA, S.Pi	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	perlunya bantuan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan skil para pemuda dengan usulan anggaran Rp. 150. 000. 000, 00	Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diterukan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	150000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

589	258219	02-03-2023	HERI MIHELDI	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	perlunya pengadaan iven/turnamen untuk meningkatkan prestasi olahraga dengan usulan anggaran Rp.100.000.000,-	Kecamatan Koto Balingka ,Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan Ke TAPD	-	1	paket	100000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
591	258267	02-03-2023	HERI MIHELDI	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	Perlunya pembangunan pengadaan tribun Motor cros untuk menunjang sarana dan prasaran a olahraga di Jorong Kampung Randah dengan usulan Anggaran Rp.200.000.000,-	Jorong Kampung Randah kecamatan koto balingka, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	unit	200000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
596	258442	02-03-2023	ALI NASIR	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	Pembuatan Lapangan Bola Volly di Pajuanggang pagu dana : Rp.100.000.000	VI Koto Utara, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	unit	100000000	-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
633	260162	02-03-2023	H.INSAN SABRI	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan bola volley)	Lanjutan pembangunan lapangan Volly Aktor Muda perkiraan anggaran Rp 100.000.000,-	Aktor Muda, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi Lebih Lanjut	Diusulkan melalui dana BKK	Diteruskan ke TAPD	-	1	Unit	100000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
635	260209	02-03-2023	H.INSAN SABRI	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	Pengadaan Sarana Olah Raga perkiraan Anggaran Rp	Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Kabupaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi Lebih Lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	Set	20000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

					20.000.000,-														
661	260852	02-03-2023	H.ERIANTO, SE	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	perlunya bantuan honorarium, tim pelatih sekolah sepak bola nagari kapa dan kelengkapan kostum serta alat peraga pemain untuk mempasilitasi sekolah sepak bola, dengan usulan anggaran Rp.50.000.000	sekolah sepak bola nagari kapa kecamatan luhak nan duo, Kab. Pasaman Barat	Kab upaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	50000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
757	266022	03-03-2023	Drs.H.BAHARUDDIN R, MM	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	belum adanya lapangan Olah Raga diDiklat Kecamatan Talamau dengan Usulan Anggaran Rp. 100.000.000,00	kecamatan talamau, Kab. Pasaman Barat	Kab upaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Bappelitbangda untuk verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	100000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
883	293477	06-03-2023	SUBANDRIO, SH	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	mohon bantuan dana sarana olah raga d akec. Luhak nan duo. dengan pagu dana Rp.100.000.000	kec. Luhak nan duo. , Kab. Pasaman Barat	Kab upaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	100000000	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
886	293513	06-03-2023	SUBANDRIO, SH	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat olah raga)	lanjutan pagar lapangan putsal jrg ophit nag ophir. dengan pagu dana Rp.100.0	jrg ophit nag ophir. , Kab. Pasaman Barat	Kab upaten / Kota	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke Bappelitbangda untuk Verifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke opd Dispora	Diteruskan ke TAPD	-	1	paket	100000000	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

					00.0 00.															

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional dibidang pemuda yaitu: Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sedangkan bidang olahraga adalah memelihara dan meningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan Bangsa.

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Dalam kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan penekanan pada 9 (sembilan) prioritas utama dalam Nawacita "Kami akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayan pemuda dan olahraga", yaitu:

1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan;
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalanganpemuda;
5. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untukmendukung pembinaan olahraga;
8. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan;
9. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet,pelatih dan tenaga keolahragaan.

Dari sembilan agenda prioritas yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barat adalah agenda satu samapai dengan sembilan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menyusun program seperti Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatn Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.

B. Arah kebijakan Dinas kepemudaan dan Olahraga Sumbar

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Dinas Kepemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan faktor-faktor dari eksternal yang masih berhubungan dengan Tupoksinya. Berikut ini tabel data isu-isu strategis yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Asian Youth Games
    - PON Remaja
    - Persiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah PON XXI tahun 2024 dengan menyiapkan sarana prasarana olahraga
    - Pembinaan olahraga yang belum maksimal
2. Asia Paralympic Games
    - Pekan Paralympian Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
    - Pekan Paralympian Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
    - Meningkatnya perhatian kepada atlet disabilitas
3. Jambore Pemuda Internasional
    - Jambore Pemuda Indonesia
    - Jambore Pemuda Indonesia Daerah
    - Kegiatan seleksi Pemuda prestasi

Dari sasaran pokok dan arah kebijakan diatas yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sasaran empat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah membuat program dan kegiatan untuk mendukung sasaran pokok dan arah kebijakan tersebut seperti Program Peningkatan peran serta kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga .

C. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : **MEWUJUDKAN PASAMAN BARAT YANG BERMATABAT, AGAMAIS, MAJU, DAN SEJAHTERA.** ". Misi untuk pencapaian visi tersebut adalah

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif..

Salah satu Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian misi di atas adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan yang diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud : tata pemerintahan yang baik melalui

pelayanan prima, terciptanya pemerintahan yang bersih dan professional, terlaksananya pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan terwujudnya aparatur pemerintah yang professional dan bebas KKN.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan merupakan penjabaran implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan arah pembangunan pada RPJMD. Dengan ditetapkannya tujuan akan mempertajam fokus pelaksanaan Tujuan Dinas Kepemudaan dan olahraga yaitu ***: mewujudkan Pasbar yang Bermartabat Agamais Maju dan Sejahtera.***

Berdasarkan visi diatas telah ditetapkan 1 (tujuan) tujuan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat seperti pada table berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021- 2026

Misi 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.
2. Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berdaya Saing dan Inklusif

No	Tujuan
1	Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah
2	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga

Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan dituangkan pada target indikator kinerja mencakup konsep ruang lingkup, arah, kepastian dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah :

Sasaran

1. Terwujudnya Birokrasi Yang Memilki Pelayananan publik yang berkuaitas.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Masyarakat yang Agamais dan Berbudaya.

a) Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kepemudan Dan Olahraga Kabupeten Pasaman Barat

Berdasarkan misi Dinas Kepemudan Dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudan Dan Olahraga tahun 2022, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

a. Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
b. Meningkatnya Prestasi olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional
c. Meningkatnya Pemasyarakatan Olahraga
d. Memfasilitasi olahraga

e. Meningkatnya peran serta pemuda dalam berwirausaha

f. Meningkatnya Prestasi Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program yang direncanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2024 terdiri atas 3 program dengan 3 capaian program sebagai berikut :

No	Program	Capaian Program	Pagu Indikatif (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Urusan Pemerintah Daerah	3.524.547.574,-
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	154.802.500,-
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragan	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.547.305.000,-
Total			**6.226.655.074,00**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Kegiatan yang direncanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2024 yaitu sebanyak 13 kegiatan dengan 13 indikator Keluaran dan 13 Indikator Hasil. Indikator kegiatan dan pagu indikatif per indikator hasil untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Anggaran/ pagu indikatif yang diperkirakan tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. **6.226.655.074,00,-** Dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	%
1	APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	**6.226.655.074,00**	100
2	APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat		
3	APBN/ Dekonsentrasi		
4	APBN/ Tugas Perbantuan		
5	Bantuan Luar Negeri		
6	Bantuan Masyarakat dan lain-lain		
	Jumlah	**6.226.655.074,00**	100

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemuda Dan Keolahragaan berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penanganan masalah Pemuda Dan Keolahragaan untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermatrabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 teruang dalam 3(tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan.

Rekapitulasi program dan Kegiatan Dinas Pemuda Dan Keolahragaan Kabupaten Pasaman Barat :

a. Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Tujuan :

1. Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah
2. Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga

Sasaran :

1. Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah
2. Meninggkatkan Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri

Nama Progran dan Kegiatan yang Mendudkung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2. Administrasi Barang Milik Daerah
   3. Administrasi kepegawaian Perangkat daerah
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Penembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat kabupaten/Kota

III. Program Pengembanagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pembinaan Dan Pengembangan Olahrag Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
3. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi olahraga
4. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudan Dan Olaharaga Kabupaten Pasaman Barat yaitu dalam Peningkatan Kapasitas Kepemudaan Dan Keolahragaan sesuai dengan Tabel rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PEDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2024 merupakan masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 dan 2021-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Tahun 2016-2021 dan 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis DISPORA Kabupaten Pasaman Barat, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORA Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DISPORA, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DISPORA Kab. Pasaman Barat Tahun 2020 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program (teknis dan rutin), 9 Kegiatan dan 11 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISPORA Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 6.226.655.074,00-** sebagaimana disajikan pada

TC.33

Program dan Kegiatan Dispora

kabupaten pasaman barat

Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Kepemudaan dan Olah Raga						6.226.655.074,00							5.450.577.339,80	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.226.655.074,00							5.450.577.339,80	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.226.655.074,00							5.450.577.339,80	
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %			100 %	3.524.547.574,00						100 %	4.235.151.971,00	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi	-			100 %	2.954.847.574,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber	ASN	-	2.207.917.806,60	

						Daerah	Keuangan Perangkat daerah								Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat				
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang /bulan	2.583.007.574,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		1.801.742.066,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	267.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		320.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	104.040.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		86.175.740,60	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Presentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	61.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusi	ASN	-	2.200.000,00	

						Daerah									a yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat				
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	61.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	-			100 %	162.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN	-	1.298.000.000,00	
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	162.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		31.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				11 Orang	100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	ASN		165.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kegiatan penunjangan operasional perangkat daerah	-			100 %	94.910.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN	-	331.323.185,00	

	2	1 9	0 1	2. 0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 1	2. 0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	7.360.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 1	2. 0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	7.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 1	2. 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 1	2. 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		221.923.185,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	-			4 Unit	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN	-	22.128.484,40	
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		440.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		4.088.484,40	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan jasa penunjang operasional kantor	-			100 %	28.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN	-	53.482.495,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		50.182.495,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	222.690.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN	-	320.100.000,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	111.090.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		121.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		88.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	111.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dispora, ASN		22.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		22.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		11.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Dispora, ASN		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) + dan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	6 & 17%			5 & 15 %	154.802.500,00							6 & 7%	9.900.000,00	

	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1Orang			1 Orang	45.461.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	1Orang	7.700.000,00	
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor															
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				235 Orang	45.461.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula															
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota															
							Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan														
							Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi															
							Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

																masyarakat				
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda														
							Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1Orang			1 Lembaga	109.341.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	1Orang	2.200.000,00	
	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha														
							Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				3 Orang	47.992.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														

							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	61.349.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Oalahraga	30Prestasi			25 prestasi	2.547.305.000,00						30Prestasi	1.204.525.368,80	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prestasi (medali) tingkat Provinsi	-			2 Medali	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	-	3.300.000,00	
	2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha															
							Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				5 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar															
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																kehidupan masyarakat				
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang Terbina	-			2 Cabor	46.905.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	-	166.100.000,00	
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	-	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														

							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan															
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				800 Orang	46.905.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Prestasi (medali) tingkat Provinsi	-			5 medali	20.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	-	307.412.684,40	
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah															
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				17 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)															

							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				2 Pelatda	20.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				45 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																
							Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				15 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		4.112.684,40	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																
							Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang Olahraga yang Terbina	-			2 Cabor	900.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	-	393.312.684,40	
	2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	900.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi														
							Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				2 Organisasi	500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		41.112.684,40	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga yang terbina	-			2 Cabor	1.579.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat	-	334.400.000,00	
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	44.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2	1 9	0 3	2. 0 5	00 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi														
							Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 3	2. 0 5	00 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 3	2. 0 5	00 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	2	1 9	-			-	-	6 & 7%			-	0,00						6 dan 17 %	1.000.000,00	
	2	1 9	-	-		-	-	1lembaga			-	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyara	-	1lembaga	1.000.000,00	

																kat				
	2	19	-	-	-	-														
							Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				45 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	JUMLAH											**6.226.655.074,00**							**5.450.577.339,80**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai program-program yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan 12 Kegiatan dalam Mencapai 3 Program yang telah ditetapkan dengan Pagu Indikatif Sebesar 6.226.655.074,00

Yang direncanakan bersumber dari APBD Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Pada tahap pelaksanaan masih banyak ditemui permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkan beberapa hambatan dengan pokok permasalahan yang berkaitan.

Untuk ke depan Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan berupaya meningkatkan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini akan menjadi tolak ukur dan dipahami oleh seluruh pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga akan memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan, dengan harapan realisasi capaian kinerja dapat tercapai sesuai sesuai target yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana dengan baik.

Simpang Empat, Januari 2023

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman Barat

MEDIA FITRA, S.Pd
Nip. 197203141994121001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada RENSTRA 2021-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Agustus 2023
Kepala Dinas

MUHARRAM, S.Sos.,MM
Pembina TK I, IV/b
Nip. 19790920 200604 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan... 6 27
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... **47**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 50
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan..... 51
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024..... **71**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 93

BAB V PENUTUP .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barat pada APBD Tahun Anggaran 2022.....	7
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra RENJA PERANGKAT DAERAH s.d. Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat	11
Tabel 2.1.3	Penilaian Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	26
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat	28
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat	34
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	46
Tabel 3.1.1	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2020-2024.....	48
Tabel 3.1.2	Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI 2020-2024...	49
Tabel 3.2.1	Target Rencana Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	50
Tabel 3.3.1	Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	51
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disusunlah dokumen-dokumen perencanaan daerah termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam masing-masing Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain dari pada itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah mengamanatkan agar setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun tahunan.

Menindaklanjuti ketentuan dan sistematika perencanaan daerah sebagaimana dijelaskan di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang menyelenggarakan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan telah menyusun Rencana Kerja untuk tahun 2024 dengan memperhatikan capaian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang kearsipan dan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tujuan :

- Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
- Mewujudkan Pengelolaan Sistem Kearsipan pada Instansi Pemerintah di semua Tingkatan
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dengan sasaran strategis :

- Meningkatnya Minat Gemar Membaca Masyarakat
- Meningkatnya Pengelolaan Sistem Kearsipan pada Instansi Pemerintah di semua Tingkatan
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat adalah :
"Untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dengan RPJMD".

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan tertib system perencanaan pembangunan daerah;
2. Menciptakan perencanaan yang konsisten dan sinergis;
3. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efesien dan efektif;
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan dan Kearsipan;
5. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan Kearsipan;

Tujuan selanjutnya adalah agar Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan dan perkembangan global, kondisi keuangan, dan prognosis pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN
- *1.1 Latar Belakang*, Menguraikan pengertian ringkas Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perangkat Daerah K/L dan Renja Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- *1.2 Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- *1.3 Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- *1.4 Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,* memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,* memuat tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dan penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* bagian ini memuat tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Renja Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dinilai dengan membandingkan realisasi capaian program pembangunan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. Evaluasi capaian target kinerja juga menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memberi gambaran tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga, dapat ditelaah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya kondisi melebihi target kinerja program/kegiatan, agar selanjutnya dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 4 (Empat) program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp 4.660.131.179,- (Empat milyar enam ratus enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp.4.456.152.387,- (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan persentase daya serap sampai Desember 2022 adalah sebesar 95,62%.

Untuk lebih jelasnya, realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barat pada APBD Tahun Anggaran 2022

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		Fisik
			Rp	%	%
I.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**395.711.050**	**391.193.399**	**98,86**	
1.	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**334.601.100**	**332.582.599**	99,40	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.471.200	31.198.350	99,13	100,00
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	53.132.000	52.623.550	99,04	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	249.997.900	248.760.699	99,51	100,00
2.	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**61.109.950**	**58.610.800**	95,91	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	43.745.950	41.732.400	95,40	100,00
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	17.364.000	16.878.400	97,20	100,00
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.057.187.929**	**3.861.634.888**	**95,18**	
3.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.486.122.529	3.351.462.765	96,14	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.427.529	3.242.600.765	96,15	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.050.000	36.042.000	99,98	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.645.000	72.820.000	93,79	100,00
4.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.030.000**	**11.394.000**	81,21	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.030.000	11.394.000	81,21	100,00
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**230.276.250**	**228.556.403**	99,25	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.975.000	2.915.000	97,98	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.610.200	26.741.000	96,85	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.491.200	3.323.400	95,19	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.210.000	16.210.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.489.850	178.117.003	99,79	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.250.000	83,33	100,00
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**103.783.160**	**60.440.000**	58,24	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.763.160	42.900.000	98,03	100,00

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		Fisik
			Rp	%	%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.020.000	17.540.000	29,22	29,22
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**107.777.490**	**105.882.945**	98,24	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.777.490	88.882.945	97,91	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	17.000.000	100,00	100,00
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.198.500**	**103.898.775**	90,19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.838.500	77.858.775	89,66	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.360.000	26.040.000	91,82	100,00
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**153.403.200**	**151.238.450**	98,59	
9.	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**42.869.250**	**41.508.350**	96,83	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	21.691.250	20.396.000	94,03	100,00
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.178.000	21.112.350	99,69	100,00
10.	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**7.583.500**	**7.361.250**	97,07	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	7.583.500	7.361.250	97,07	100,00
11.	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**102.950.450**	**102.368.850**	**99,44**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	45.181.950	45.070.000	99,75	100,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	57.768.500	57.298.850	99,19	100,00
IV.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**53.829.000**	**52.085.650**	**96,76**	
12.	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**53.829.000**	**52.085.650**	96,76	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	53.829.000	52.085.650	96,76	100,00
	JUMLAH	**4.660.131.179**	**4.456.152.387**	**95,62**	**95,62**

Dari gambaran tabel di atas terlihat bahwa anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2022 yang tersebar pada 4 (empat) program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.660.131.179,- (Empat milyar enam ratus enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.4.456.152.387,- (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan persentase daya serap sampai Desember 2022 adalah sebesar 95,62%.

Adapun informasi yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (dibawah 75%) yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, dimana kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tidak terealisasi karena kurangnya perencanaan, yaitu tidak dianggarkannya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, dengan realisasi keuangan 29.22 % dan fisik 29.22 %.

Sehubungan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terpenuhi targetnya, dapat terlaksana pada tahun-tahun kedepan perencanaan.

II. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (diatas 75 %) antara lain:

1. Program Pembinaan Perpustakaan yang meliputi kegiatan :

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan, 1) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar nasional perpustakaan, 3) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan 1) Pengamanan Barang Milik Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan, 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. **Program Pengelolaan Arsip** dengan kegiatan :
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan 1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
   c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
4. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** dengan kegiatan :
   a. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang meliputi sub kegiatan 1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pencapaian target Renja Perangkat Daerah antara lain misalnya :

a. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
b. Tidak sesuainya biaya belanja barang dengan yang telah direncanakan
c. Kenaikan indek harga satuan barang
d. Adanya kejadian luar biasa (seperti: bencana banjir, gempa bumi dst)
e. Atau faktor lainnya

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang di rencanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 di sajikan pada tabel 2.1.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2. (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah Kunjungan Perpustakaan per Tahun**	**30.746**	**21.197 Pengunjung/ Tahun**	**30731 Pengunjung/ Tahun**	**30.885 Pengunjung/ Tahun**	**100,85**	**30.737 Pengunjung/ Tahun**	**82.819 Pengunjung/ Tahun**	**2,69**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten Dengan Kategori Baik**	**8 Perpustakaan**	**7 Perpustakaan**	**7 Perpustakaan**	**7 Perpustakaan**	**100,00**	**5 Perpustakaan**	**19**	**1,63**
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan Prasarana perpustakaan daerah	-	13 Unit	-	-	-	-	13 Unit	**0,0**
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	18 Perpustakaan	-	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	100,00	9 Perpustakaan	24	1,33
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh	Jumlah satuan pendidikan dasar yg mendapatkan pembinaan perpustakaan	-	5 Nagari	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	100,00	-	-	0,75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dgn Standar Nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	37 Perpustakaan		-	-	-	8 Perpustakaan	28 Perpustakaan	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka dengan kondisi baik	-	551 Eksemplar	-	-	-	-	4,154	2,88
						Jumlah pengadaan dan pengembangan bahan pustaka	-	3 Paket	-	-	-	-		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1440 Eksemplar	-	2103 Eksemplar 12 Paket	2103 Eksemplar 12 Paket	100,00	1500 Eksemplar 1 Paket		
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sekolah/Pustaka Yang dibina dalam gerakan budaya gemar membaca**	**42 Perpustakaan**	**9 SD 0 SMP 3 Perpustakaan Nagari**	**20 Perpustakaan**	**20 Perpustakaan**	**100,00**	**44 Perpustakaan**	**76**	**1,80**
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan	Jumlah satuan masyarakat yg mendapatkan sosialisasi budaya baca dan literasi melalui pelayanan perpustakaan keliling	-	3 Nagari	8 Pos Layanan	8 Pos Layanan	100,00	-		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Khusus serta Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan dasar yg mendapatkan sosialisasi budaya baca dan literasi melalui pelayanan perpustakaan keliling	-	-	12 Sekolah	12 Sekolah	100,00	-	36 Lokus	**0,94**
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	38 Lokus	3 Nagari	-	-	-	25 Lokus		
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Siswa 3 Perpustakaan Nagari	3 Siswa, 3 Perpustakaan Nagari	3 Siswa, 3 Perpustakaan Nagari	100,00	3 Orang	12	4,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1	1,00
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Naskah Kuno yang di lestarikan**	**1 Naskah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Naskah**	**-**	**-**
2	23	03	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno Milik Pemerintah Daerah**	**1 Dokumen**	-	-	-		1 Dokumen	-	-
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	-	**-**	**-**	**-**	1 Orang	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**3,00**
2	**24**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**3,00**
2	24	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	28 Orang	34 Orang	34 orang	100,00	31 Orang/ Bulan	93	2,90
2	24	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1 Orang	2 orang	2 Orang	100,00	2 Org 0 Dokumen	5	2,50
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 Bulan 3 Dokumen	9	3,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	**24**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**22.329 Unit**	**20.860**	**22.065**	**22.065**	**100%**	**22.184**	**65.109**	**2.91**
2	24	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0	0
						Jumlah Penyediaan makan minum pengamanan BMD (jaga malam)	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12	12	12
						Jumlah THL yang melakukan pengamanan BMD	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00	1	1	1
2	24	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	6	120
2	24	01	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**3 ASN**	-	**2 ASN**	-	-	**2 ASN**	**2**	**0.66**
2	24	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	-	-	-	2	2	0.66

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	**24**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**102**	**102**
2	24	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	6	6.00
2	24	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	3	3.00
2	24	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	3	3.00
2	24	01	2.06	05	Penyedian Barang Cetakan dan Penganggaran	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan	-	-	48440 lembar	48440 lembar	100,00	2 Paket	48.443	
						Jumlah Penyediaan Penggandaan	-	-	1 Paket	1 Paket	100,00	-	1	
						Jumlah penggandaan dokumen yang dibutuhkan		8000 Lembar					8.000	
						Jumlah Penyediaan blanko SPT,SPPD, kuitansi dan map	-	2 paket	-	-	-	-	2	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	-	-	-	-	17 Laporan	17	0.8
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	-	17 Kali	25 Kali	25 Kali	100,00	-	17	17 Kali
2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	1	1 Orang
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1	1.00
2	24	01	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Gedung Kantor**	**1 Unit/Pkt**	**-**	**1 Paket**	**1 Unit**	**100%**	**-**	**1**	**1,00**
						Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**23 Unit/Pkt**	**3 Unit/paket**	**-**	**-**		**8 Unit/Paket**	**11**	**3,67**
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	7 Unit	8	2.66
						Jumlah Pengadaan Hardisk	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1	1 Unit
						Jumlah Pengadaan Printer	-	1 Paket	-	-	-	1 Unit	1	1 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	24	01	207	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	2 Paket	1 Paket	50,00	-	1	1 Paket
2	**24**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**3.00**
2	24	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100,00	12 Bulan 1 Laporan	3	3.00
2	24	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan K3	-	2 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00	2 Orang	5	5 Orang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1	1 Laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	**24**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38 Unit**	**19 Unit**	**29 Unit**	**29 Unit**	**59,38**	**29 Unit**	**77**	**2,03**
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	8 Unit	8 unit	8 unit	100,00	8 Unit	24	4.33
						Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	-	1 Orang (Sopir)	2 Orang (Sopir)	2 Orang (Sopir)	100,00	3 Orang (Sopir)	6	6 Orang
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar kan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2	1,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	24	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10 Unit	21 unit	21 unit	100,00	21Unit	51	2.08
2	24	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP**	**58,49%**	**40,00**	**47,17%**	**47,17%**	**100%**	**52,83%**	**179.83**	**3.07**
2	24	02	201		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis yang di Kelola**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100,00**	**2 Jenis**	6	3,00
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Nagari yang melakukan Pengolahan dan Akses Arsip Dinamis/SIKD	-	-	-	-	-	0 Nagari	-	-
						Jumlah Perangkat Daerah dan Bagian yang melakukan Pengolahan dan Akses Arsip Dinamis/SIKD	-	42 Perangkat Daerah dan bagian	15 Perangkat Daerah dan Bagian	15 Perangkat Daerah dan Bagian	100,00	43 Perangkat Daerah dan Bagian	100 Perangkat Daerah	100 Perangkat Daerah
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 Berkas	-	-	-	-	300 Berkas	300 Berkas	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	24	02	201	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Kearsipan	-	10 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	100,00	32 Perangkat Daerah	65	65 Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	1.00
2	24	02	202		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten dengan Kondisi Baik**	**882 Berkas**	**1 Berkas**	**757 Berkas**	**757 Berkas**	**0,14**	**832 Berkas**	**1590**	**1,80**
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah asli Arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	-	-	-	-	700 Arsip	700 Arsip	2.00
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Nagari yang melakukan Pengolahan dan Akses Arsip Statis	-	-	-	-	-	1 Nagari	1 Nagari	0.00
						Jumlah Perangkat Daerah dan Bagian yang melakukan Pengolahan dan Akses Arsip Statis	-	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100,00	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	-	-	-	-	50 Arsip	50	1,00
						Jumlah penambahan arsip statis	-	1 Berkas	-	-	-	-	1	1,00
2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Imforamasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola**	**2 Aplikasi**	**2 Aplikasi**	**2 Aplikasi**	**2 Aplikasi**	**100%**	**2 Aplikasi**	**6**	**3.00**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Bagian yang melakukan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten melalui JIKN/SIKN	**-**	42 Perangkat Daerah dan Bagian	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	100,00	42 Perangkat Daerah	99 Perangkat Daerah	99 Perangkat Daerah
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	42 Pengguna	-	-	-	-	42 Pengguna	42	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan, Nagari, dan Sekolah yg dibina	-	28 Unit	28 Unit	28 Unit	100,00	34 Unit	34	34 Unit
						Jumlah peserta sosialisasi JRA	-	39 Orang	-	-	-	-	-	-
						Jumlah peserta sosialisasi peraturan ttg kearsipan	-	111 Orang	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten**	**70%**	**20,00**	**50%**	**50%**	**100%**	**60%**	**130**	**185,71**
2	**24**	**03**	**2**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yg digabung dan/atau dibubarkan**	**Jumlah Penyelamatan Arsip Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**1 Perangkat Daerah**	**2 Perangkat Daerah**	**2 Perangkat Daerah**	**2 Perangkat Daerah**	**100%**	**2 Perangkat Daerah**	**6**	**3,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1000 Arsip	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100,00	700 Arsip	2.100	2.1

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori **berhasil** walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,62	81,33	105,86
2.	Presentase Pertambahan Kunjungan Pemustaka	2,78	3,19	114,75
3.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,18	21,40	106,05
4.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	53,66	58,37	108,77
5.	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	69,95	56,50	81,86
6.	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	46,70	67,03	143,53
7.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai abhan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	80,83	81,67	101,03

Dari gambaran tabel di atas terlihat bahwa untuk capaian nilai LAKE masih kurang dari target, ini disebabkan :

1. Sarana dan prasarana di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pasaman Barat masih minim dan tidak sesuai dengan standar contoh LKD belum mempunyai Depo Arsip, rak arsip masih menggunakan kayu standarnya besi, ruang record center belum sesuai standar dll.
2. Ketersediaan arsiparis Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat belum ada
3. Terbatasnya jumlah arsiparis di LKD
4. Kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanakan program kearsipan
5. Kurangnya kesadaran pimpinan unit kerja pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat terkait pengelolaan arsip yang menjadi kewajibannya
6. Kurangnya sosialisasi Peraturan-peraturan kearsipan di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

Tingkat capaian tertinggi indikator kinerja adalah Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggung Jawaban Nasional dari target 46,70 % dan terealisasi sebesar 67,03 % dengan capaian 143,53 %, pada tahun 2022, capaian tertinggi kedua pada indikator Persentase pertambahan kunjungan pemustaka dari target pengunjung sebanyak 30.731 dan terealisasi sebanyak 30.885 pengunjung atau persentase kenaikan sekitar 3,19 % dengan capaian 114,75 % pada akhir tahun 2022, data pengunjung ini di dapat dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan

daerah sebanyak 30.885 pengunjung, tercapainya jumlah pengunjung disebabkan dengan adanya pelayanan puskel ke sekolah-sekolah SD dan kegiatan pembinaan perpustakaan nagari, perpustakaan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berkegiatan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan misalnya melaksanakan kegiatan di aula Perpustakaan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kearsipan dan bidang pemerintahan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Dinas yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021-2026. Jenis indikator yang dikaji sesuai tugas dan fungsi pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)
2. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
3. Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai abhan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat
4. Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Presentase Pertambahan Kunjungan Pemustaka
6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
7. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
8. Nilai SAKIP
9. Nilai Matiritas SPIP
10. Presentase Penurunan Temuan BPK atas Laporan Keuangan

Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2022 diuraikan pada Tabel 2.2.1 (TC.30).

Tabel 2.2.1 (TC-30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat.

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)			69,02	69,95	71,12	72,40	56,50	60,00	71,12	72,40	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional			44,34	46,70	49,06	52,36	66,55	67,03	49,06	52,36	
3	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai abhan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat			80,83	80,83	80,83	80,83	80,83	81,67	80,83	80,83	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	76,62	77,54	78,42	Baik	81,11	77,54	78,42	
5	Presentase Pertambahan Kunjungan Pemustaka			2,75	2,78	2,80	2,83	0,22	3,19	2,80	2,83	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			20,11	20,18	20,23	20,29	18,04	21,40	20.23	20,29	
7	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			53,15	53,66	54,21	54,82	51,11	58,37	54,21	54,82	
8	Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			B	B	B	B	B	B	B	B	
9	Nilai Maturitas SPIP			3	3	3	3	3,632	3	3	3	
10	Presentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			90	90	90	90	90	90	90	90	

Dari tabel 2.2.1 dapat dijelaskan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, ada satu indikator yaitu Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) masih belum tercapai dikarenakan Sarana dan prasarana di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pasaman Barat masih minim dan tidak sesuai dengan standar contoh LKD belum mempunyai Depo Arsip, rak arsip masih menggunakan kayu standarnya besi, ruang record center belum sesuai standar dll, Ketersediaan arsiparis Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat belum ada, terbatasnya jumlah arsiparis di LKD, kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanakan program kearsipan, kurangnya kesadaran pimpinan unit kerja pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat terkait pengelolaan arsip yang menjadi kewajibannya, kurangnya sosialisasi Peraturan-peraturan kearsipan di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat. Meski demikian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Barat masih harus berupaya dalam mencapai target hingga target tahun 2026. Berdasarkan tabel TC.30 di atas, sepuluh indikator tersebut mengalami peningkatan target capaian di tahun 2023. Peningkatan target capaian sejalan dengan terus meningkatnya anggaran, meningkatnya pemahaman SDM melalui bimbingan teknis yang diikuti, adanya ketegasan pimpinan untuk mengejar target capaian, dan orientasi untuk mencapai target agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, seperti adanya tumpang tindih prioritas program/kegiatan dan adanya perubahan regulasi dari pusat.

Dalam pencapaian target urusan Perpustakaan terutama untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat dan gemar membaca, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendatangkan Duta Baca Indonesia (DBI) pada bulan Februari 2023, adapun kegiatan yang dilakukan adalah Talkshow dan Pelatihan Kepenulisan bagi pelajar, mahasiswa, guru dan penulis yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat dan menghasilkan penulis-penulis handal, dimana pelatihan kepenulisan ini diikuti 30 orang peserta untuk didampingi selama 3 (tiga) bulan dengan menghasilkan satu buku untuk satu orang. Disamping itu DBI juga melaksanakan Safari Literasi kebeberapa sekolah SD, Tsanawiyah, Pesantren dan Rumah Baca Aia Tayo. Semoga dengan kedatangan DBI ini dapat meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Untuk meningkatkan layanan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat mengajukan usulan dana DAK Tahun 2024 untuk pengadaan gedung layanan perpustakaan dan juga pengadaan TIK, dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat masuk dalam lokasi prioritas pengadaan layanan gedung perpustakaan. Saat ini dalam tahap entryan usulan DAK pada Aplikasi Krisna. Anggaran yang diusulkan untuk pengadaan layanan perpustakaan sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan untuk TIK sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Untuk lokasi pengadaan gedung layanan perpustakaan daerah sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berada di Jalur 32 Pasaman Barat. Diharapkan dengan adanya gedung perpustakaan daerah bisa meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu membangun manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Peningkatan Gemar Membaca dengan cara :
   Promosi gemar membaca dengan memamfaatkan perpustakaan, membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat. Mengembangkan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca, sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya baca masyarakat dan masyarakat belajar, baik dari pustaka daerah maupun pustaka keliling.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan Budaya Sadar Arsip
   a. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemamfaatan arsip
   b. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia, sistem dan kelembagaan kearsipan
   c. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan arsip
   d. Ketersediaan ruang penyimpanan arsip yang terpisah dari kantor (Depo Arsip)
4. Mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
   Penerapan Sistem Informasi Perpustakaan untuk pengembangan dan peningkatan minat baca masyarakat perlu diadakannya e-library agar pemustaka bisa mengakses langsung buku yang dibutuhkan melalui internet. E-Library adalah sebuah sistem perpustakaan yang menggunakan media elektronik dalam menyampaikan informasi dan sumber daya yang dimilikinya. Untuk memudahkan Media elektronik yang digunakan ini diartikan secara luas bisa melalui komputer, telepon, Internet, web, dan lain-lain. Untuk memudahkan pemustaka dalam mendapatkan buku yang diinginkan, saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat telah membuat Aplikasi Pasbar Membaca dengan cara mendowload pada aplikasi playstore, didalam aplikasi Pasbar Membaca ini terdapat 962 judul buku atau 970 eksemplar atau bisa juga mendowload pada Aplikasi iPusnas, pada aplikasi ini bisa didapat buku apa saja yang dicari.
5. Perlunya gedung kantor yang terpisah untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Dalam mengamati isu-isu penting tersebut diatas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergi program dengan lintas Perangkat Daerah/Lembaga teknis yang mengelola perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Pasaman Barat melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum dapat dikatakan optimal, seperti sinergi program dengan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan perpustakaan sekolah. Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Pasaman Barat melatih sumber daya manusia untuk mengelola perpustakaan sekolah seperti mengadakan pembinaan perpustakaan sekolah dan nagari, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah membuka Klinik Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat untuk konsultasi dan koordinasi tentang bagaimana cara mengelola perpustakaan dan pengelolaan kearsipan. Klinik Perpustakaan dan Kearsipan ini melayani tiap hari pada jam kerja.

A. Permasalahan pelaksanaan Program Kegiatan Kearsipan adalah :
   a. Minimnya ketersediaan sarana dan prasaranan kearsipan, Kabupaten pasaman barat belum memiliki depo arsip, sehingga arsip-arsip statis yang ada di perangkat daerah lainnya belum bisa dikumpulkan di satu depo.
   b. Ketersediaan arsiparis Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten pasaman barat belum ada.
   c. Terbatasnya jumlah arsiparis di LKD
   d. Kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program kearsipan.
   e. Kurangnya kesadaran pimpinan unit kerja pada organisasi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman barat terkait pengelolaan kearsipan.
   f. Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan kearsipan di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
   g. Apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan masih rendah.
   h. Perangkat daerah sebagai pencipta arsip belum optimal mengadakan sarana dan prasarana kearsipan secara efektif.
   i. Pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan masih rendah.

Sedangkan permasalahan Program Pembinaan Perpustakaan adalah :
   a. Belum adanya gedung kantor yang terpisah dengan gedung pelayanan perpustakaan.
   b. Pengadaan bahan perpustakaan seperti koleksi buku maupun buku digital belum optimal
   c. Pembudayaan minat baca untuk usia dini belum optimal.
   d. Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat belum optimal.

B. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat.

1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasama Barat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik baik dari internal maupun eksternal organisasi yang menjadi tantangan, yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya perpustakaan dan kearsipan mengakibatkan buruknya pengelolaan perpustakaan dan arsip, merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga pembina kearsipan dan perpustakaan.
2. Tidak adanya dana untuk kemajuan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan, seperti gedung aula perpustakaan yang terpisah dengan kantor yang masih perlu kelanjutan pembangunannya, mobil perpustakaan keliling, gedung depo arsip, dll.
3. Belum optimalnya layanan perpustakaan digital dan keterbatasan koleksi digital.
4. Perpustakaan yang di nagari, sekolah dan di masyarakat belum optimal.

Dari tantangan diatas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan memaksimalkan tenaga yang ada dengan memberikan pelatihan atau bimtek kearsipan dan perpustakaan kepada tenaga sesuai urusan dan bidang tugasnya masing-masing untuk menjadikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai lembaga pembina kearsipan dan perpustakaan yang lebih baik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan berusaha untuk mendapatkan anggaran dari DAK ataupun APBN untuk membangun gedung pelayanan yang terpisah dengan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya yeng dibutuhkan untuk kearsipan dan perpustakaan.

Dan untuk pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan berusaha menyusun perencanaan penganggaran sesuai analisis kebutuhan belanja.

2. Peluang

a. Terbitnya undang-undang UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan beserta peraturan pelaksananya dan berubahnya status Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga kearsipan dan perpustakaan.

b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang pengalokasian dana ke desa atau nagari untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah khususnya perpustakaan.

c. Adanya perhatian dari pengambil kebijakan di Kabupaten Pasaman Barat terkait pengembangan perpustakaan dan kearsipan ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan diluar/dikecamatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sering diikutkan dalam kegiatan tersebut dengan memberikan pelayanan pustaka keliling.
Tingginya kebutuhan sebagian masyarakat terhadap informasi, buku dan bahan pustaka lainnya ditengah mahalnya harga perolehan, hal tersebut membuka peluang bagi lembaga perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan yang didukung layanan internet hingga ke tingkat kecamatan/desa, juga dapat diupayakan pendirian taman baca/sudut baca ditempat-tempat yang strategis di wilayah perkotaan dan kecamatan.

C. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perpustakaan daerah dan pengelolaan arsip daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi perpustakaan nagari.
2. Peningkatan gemar dan budaya baca masyarakat
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas serta penambahan sumber daya manusia (SDM) aparatur, dan mengirimkan aparatur yang ada untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip
5. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan seperti gedung kantor yang terpisah dengan gedung layanan perpustakaan (Gedung Lanjutan), perlunya gedung kantor yang terpisah dengan gedung penyimpanan arsip (Depo Arsip) serta sarana dan prasarana lainnya.
6. Peningkatan pengembangan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi baik urusan perpustakaan maupun kearsipan.
7. Meningkatkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
8. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pengelola perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan dan pengelola arsip di RENJA PERANGKAT DAERAH untuk menerapkan pengelolaan pustaka dan Arsip sesuai dengan aturan.

9. Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya layanan perpustakaan digital.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi yang melaksanakaan pelayanan pustaka daerah dan pusat arsip daerah juga berperan untuk melakukan pembinaan kearsipan serta mengembangkan minat baca masyarakat. Untuk menjalankan Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sangatlah membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta di tunjang dengan sarana dan prasarana yang mememadai/modren yang sesuaidengan standar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pustaka dan arsip.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp 4.187.893.367,00 (Empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2024. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari 5 program (teknis dan rutin), 15 Kegiatan dan 39 sub kegiatan yang direncanakan. Adapun telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel 2.4. (TC.31) berikut:

Tabel 2.4.1 (TC.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**350.000.000**	**PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**11.285.000.000**	
I.	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang**	**8 Perpustakaan**	**190.000.000**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang**	**8 Perpustakaan**	**530.000.000**	
1.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	40.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	18 Perpustakaan	150.000.000	
2.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dgn Standar Nasional perpustakaan	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	37 Perpustakaan	70.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dgn Standar Nasional perpustakaan	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	37 Perpustakaan	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1440 Eksem plar	80.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1440 Eksem plar	300.000.000	
II.	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca pertahun	**1028 Orang**	**160.000.000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Sekolah/Pusta ka Yang dibina dalam gerakan budaya gemar membaca**	**42 Perpus takaan**	**10.755.000.000**	
4.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab Pasa man Barat, Semua Kecama tan, Se mua Ke lurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi oada Satuan Pendidikan	30 Lokus	50.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab Pasa man Barat, Semua Kecama tan, Semua Kelura han	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi oada Satuan Pendidikan	38 Lokus	50.000.000	
5.	Pembangunan dan Pemeliha raan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecama tan, Semua Kelura han	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpus takaan	30.000.000	Pembangunan dan Pemeliha raan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecama tan, Semua Kelura han	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpus takaan	10.600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	25.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Orang yang Menda patkan Peng hargaan Gerakan budaya Gemar Mem baca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	25.000.000	
7.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Perpus takaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupa ten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpust akaan	30.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wila yah Kabupaten /Kota yang Dikembangkan	1 Perpus takaan	50.000.000	
8.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pa saman Barat, Pasa man, Lingku ang Aua	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatan	1 Orang	25.000.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pa saman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatan	1 Orang	30.000.000	
II.	**PROGRAM PELESTARIAN NASKAH KUNO**		**Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan**	**1 Naskah**	**20.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN NASKAH KUNO**		**Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan**	**1 Nas kah**	**30.000.000**	
III.	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kab/Kota**		**Jumlah Naskah Kuno Milik Pemerintah Daerah**	**1 Doku men**	**20.000.000**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kab/Kota**		**Jumlah Naskah Kuno Milik Pemerintah Daerah**	**1 Doku men**	**30.000.000**	
9.	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpa nan,perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kab Pasaman Barat, Semua Kecama tan, Se mua Kelu rahan	Jumlah Masya rakat yang Berperan Serta dalam Penyimpa nan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	20.000.000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kab Pasaman Barat, Semua Kecama tan,Se mua Kelu lurahan	Jumlah Masya rakat yang Berperan Serta dalam Penyim panan, Perawa tan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.538.893.367**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.065.348.806**	
IV.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**3.058.841.367**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**3,483,872,529**	
10.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pasbar, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	2.957.041.367	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	3,372,427,529	
11.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasbar, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	33,800,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN	2 Dokumen	33,800,000	
12.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Penguji/Verivikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	68.000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Penguji/ Verivikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	77,645,000	
V.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**22329 Unit**	**41.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**22329 Unit**	**23.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Doku men	35.000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Doku men	17,000,000	
14.	Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	6.000.000	
VI.	**Administrasian Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Pemenuhan Administrasian Kepegawaian**	**5 ASN**	**13.500.000**	**Administrasian Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Pemenuhan Administrasian Kepegawaian**	**5 ASN**	**18.000.000**	
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/ Kab, Semua Kabupa ten, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	13.500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/ Kab, Semua Kabupa ten, Semua Kel/ Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	18.000,000	
VII.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Kebutuhan Admi nistrasi Umum**	**100%**	**129.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Kebutuhan Admi nistrasi Umum**	**100%**	**174,000,000**	
16.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Paket Komponen Ins talasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
18.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	8.000.000	
19.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 Laporan	90,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordi nasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	125.000.000	
20.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Doku men	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Doku men	3.000.000	
VIII	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Pasaman , Lingku ang Aua**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**31 Unit/ Pkt**	**59.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Pasaman , Lingku ang Aua**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**7 Unit/ Pkt**	101.336.000	
21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	3 Unit	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingku ang Aua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	4 Unit	41.336.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Pengadaan Sarana dan Prsarana Gedung antor atau Bangunanan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prsarana Gedung antor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	30.000.000	
23.	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prsarana Gedung antor atau Bangunanan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Unit Sarana dan Pra sarana Gedung Kantor atau bangunanan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	30.000.000	
IX.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang**	**100%**	**103.902.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang**	**100%**	**112,877,777**	
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	90,777,777	
25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	23.902.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	22,100.000	
X.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemeliiharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40 Unit**	**133.650.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang di pelihara**	**38 Unit**	**152.262.500**	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	56.582.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	56,582,500	
27.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	38.437.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	42,050,000	
28.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	13.630.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	13,630,000	
29.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunana Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunana Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal Cukup**	**58,49%**	**219.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal Cukup**	**58,49%**	**204.874.260**	
XI.	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola**	**350 Berkas**	**64.000.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola**	**2 Jenis**	**105.000.000**	
31.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	350 Berkas	24.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 Berkas	40.000.000	
32.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	20.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	25.000.000	
33.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewengangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	20.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasaman Barat,semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewengangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Arsip Statis Daerah dengan kondisi Baik**	**882 Berkas**	**50.000.000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Arsip Statis Daerah dengan kondisi Baik**	**832 Berkas**	**62.000.000**	
34.	Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otientik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Salinan Otientik Naskah Asli Arsip terjaga yang Dikumpulkan dan disam pai kan kepada ANRI	18 Arsip	25.000.000	Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otientik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Salinan Otientik Naskah Asli Arsip terjaga yang Dikumpulkan dan Disampai kan kepada ANRI	22 Arsip	35.000.000	
35.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27 Arsip	25.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	22 Arsip	27.000.000	
XIII	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang di kelola**	**2 Aplikasi**	**105.000.000**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang di kelola**	**2 Aplikasi**	**99.874.260**	
36.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	42 Pengguna	35.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	42 Pengguna	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	70.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	64.874.260	
V.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten**	**70 %**	**60.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten**	**70 %**	**75.000.000**	
XIV	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	**750 Arsip**	**15.000.000**	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Pemusnahan Arsip dilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	**750 Arsip**	**20.000.000**	
38.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	750 Arsip	15.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	750 Arsip	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2024					Hasil Analis Kebutuhan Tahun 2024					KET
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Jumlah Penyelamatan Arsip Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2 RENJA PERANGKAT DAERAH	45.000.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Jumlah Penyelamatan Arsip Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2 RENJA PERANGKAT DAERAH	55.000.000	
39.	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	700 Arsip	45.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	700 Arsip	55.000.000	
					4.187.893.367					**15.660.223.066**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Kearsipan dan Perpustakaan, usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2023 yang telah dilaksanakan untuk tahun 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak ada, dapat disajikan dalam Tabel 2.5.1.

Tabel 2.5.1 (TC.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	N I H I L					

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Kebijakan dan program pembangunan daerah pada RPJMD 2021 – 2026, dimana Kearsipan dan Perpustakaan termasuk kepada Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik. Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik, serta media simpan khusus *(in special formats)*. Perbedaannya adalah bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai *information product*, yakni informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun Kearsipan mengelola informasi terutama *information by product*, yakni informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi.

Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa "perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" demikian pula sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan yang dialamatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa " tujuan kearsipan adalah :

a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipanan nasional
b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
e. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu
f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa
h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2020 – 2024, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas
2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Strategis
1	Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	A. Program Perpustakaan dan Literasi terdiri dari kegiatan : 1. Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara 2. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan 3. Pembinaan Pustakawan 4. Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan 5. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar 6. Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 7. Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 8. Pengelolaan Data dan Informasi 9. Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan 10. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus 11. Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi 12. Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi 13. Pengelolaan perpustakaan proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi.
			B. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: 1. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar. 2. Pengelolaan perpustakaan proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Strategis
			3. Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional. 4. Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional. 5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional 6. Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional

Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI
2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Program dan Kegiatan
1.	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip	1. Meningkatnya kepatuhan public terhadap kebijakan kearsipan dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	A. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, terdiri dari kegiatan : 1. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan 2. Pembinaan Kearsipan lingkup pusat 3. Pembinaan Kearsipan lingkup daerah wilayah timur 4. Pembinaan Kearsipan lingkup daerah wilayah barat 5. Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan 6. Pelayanan Jasa Kearsipan 7. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan 8. Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan
		2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional dengan Indikator Indeks Ketersediaan Arsip.	9. Akuisisi Arsip Nasional 10. Pengolahan Arsip Nasional 11. Preservasi Arsip Nasional 12. Pengolahan Arsip Tsunami dan Arsip Statis di daerah.

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Program dan Kegiatan
		3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	13.Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip 14. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan 15.Pengolahan Data dan Informasi Kearsipan
		4.Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	B. Program Dukungan Manajemen terdiri dari kegiatan: 1. Pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum 2. Pelayanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RENJA PERANGKAT DAERAH yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra RENJA PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Misi 1 dan Misi 2 Kepala Daerah, yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Target Rencana Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Pengelolaan Sistem Kearsipan pada Instansi Pemerintah Disemua Tingkatan		Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	%	72,40
		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Kearsipan pada Instansi Pemerintah di Semua Tingkatan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	%	52,36
			Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai abhan pertanggung pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah, pelayanan	%	80,83

			public dan kesejahteraan rakyat		
2.	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Social		IKM Perpustakaan	%	78,42
		Meningkatnya Minat gemar membaca Masyarakat	Presentase Pertambahan Kunjungan Pemustaka	%	2,83
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	20,29
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	54,82
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai	B
			Level Maturitas SPIP	Nilai	3
			Presentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persen	90

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Untuk tahun anggaran 2024, alokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebesar Rp 4,047,605,962,00 (Empat milyar empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Alokasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) diuraikan ke dalam program teknis dan program rutin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan 4 program yang diuraikan ke dalam 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pembinaaan Perpustakaan,
   ada 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
2. Program Naskah Kuno
   ada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
   ada 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan.
4. Program Pengelolaan Arsip
   ada 3 kegiatan, dan 5 sub kegiatan.

Tabel 3.3.1 (TC. 33)
Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								4.047.605.962					4.673.465.616	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.047.605.962					4.673.465.616	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								264.763.000					465.000.000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								256.763.000					445.000.000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								143.950.000					183.950.000	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	5 Perpustakaan	8 Perpustaka akan	20.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	30.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														**2.03**
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/Tahun	37 Perpustakaan	8 Perpustakaan	60.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	37 Perpustakaan	70.000.000	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	30746 Pengunjung/ Tahun	1440 Eksemplar	8 Perpustakaan	63.950.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1440 Eksemplar	83.950.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	02	2.01		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								112.813.000					261.050.000	
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														**2.03**
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/Tahun	30 Lokus	1028 Orang	58.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	70.000.000	
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	30746 Pengunjung/ Tahun	1 Perpustakaan	1028 Orang	4.763.000	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik,DAU yg Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	3 Orang	1028 Orang	8.424.200	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	20.000.000	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	3 Perpustakaan	1028 Orang	41.625.800	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	46.050.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	02	2.01	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	1 Orang	1028 Orang	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	25.000.000	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								8.000.000					20.000.000	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								8.000.000					20.000.000	
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
						Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan,Perawatan,Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno Milik Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Naskah	1 Orang	1 Naskah	8.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan,Perawatan,Pelestarian,dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	20.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								3.782.842.962					4.208.465.616	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.619.869.462					3.927.515.616	
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.302.319.102					3.379.604.554	
2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	33 Orang /bulan	100 %	3.169.059.102	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / bulan	3.253.704.554	
2	24	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	2 Dokumen	100 %	55.900.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	55.900.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	77.360.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	70.000.000	
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21.466.000					31.000.000	
2	24	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Dokumen	22329 unit	16.666.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	22329 unit	4.800.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.000.000	
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00					13.500.000	
2	24	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemen	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepega	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan,	100 %	3 Orang	100 %	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Pera	3 Orang	13.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Daerah	tasi Peraturan Perundang-Undangan	waian	Semua Kel/ Desa					Bidang Pendidikan		turan Perundang-Undangan			
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								119.309.695					160.411.062	
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	2.115.340	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	17.333.320	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
2	24	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	3.307.035	DAU yg Di tentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi	semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	100 %	18 Laporan	100 %	93.554.000	DAU yg Di tentukan Penggunaannya Bidang Pendidi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta	18 Laporan	124.411.062	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Daerah	si SKPD	Umum	sa					kan		si SKPD			
2	24	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Caku pan Pelaya nan Pe nunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatau sahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persen tase Pelaya nan Kebu tuhan Admini strasi Umum	- Kab. Pasa man Barat, Pasa man, Ling kuang Aua	100 %	500 Doku men	100 %	3.000.000	DAU yg Ditentu kan Penggu naanny a Bi dang Pendi dikan		Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Doku men	3.000.000	
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.000.000,00					68.000.000,00	
2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Caku pan Pelay anan Penun jang Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedia kan	Jumlah Penga daan Perala tan dan per eng kapan Kantor	- Kab. Pasa man Barat, Pasa man, Lingku ang Aua	100 %	1 Unit	31 Unit/ Pkt	1.000.000	DAU yang Diten tukan Peng guna annya Bidang Pendi dikan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedia kan	1 Unit	18.000.000	
2	24	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	31 Unit/ Pkt	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
2	24	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	27 Unit	31 Unit/ Pkt	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	20.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103.900.915					115.000.000	
2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	81.800.915	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	
2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	22.100.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								71.873.750,00					160.000.000	
2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	6 Unit	40 unit	41.951.250	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	60.000.000	
2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	2 Unit	40 unit	23.242.500	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
							nya												
2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	10 Unit	40 unit	6.680.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	
2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerin	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	40 unit	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	1 Unit	25.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Daerah	litasi	tah Daerah						dikan		si			
2	24	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	40 unit	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								162.973.500					220.950.000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								49.000.000					55.000.000	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	58.49 %	350 Berkas	350 Berkas	29.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	350 Berkas	32.000.000	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	2 Laporan	350 Berkas	20.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	23.000.000	
2/	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								24.996.900					55.000.000	
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten dengan Kondisi Baik	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	18 Arsip	882 Berkas	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	18 Arsip	27.000.000	
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten dengan Kondisi Baik	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	27 Arsip	882 Berkas	24.996.900	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27 Arsip	28.000.000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								88.976.600					110.950.000	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	42 Pengguna	2 Aplikasi	30.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	42 Pengguna	35.000.000	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	1 Laporan	2 Aplikasi	58.976.600	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	75.950.000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								0,00					60.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								0,00					60.000.000	
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
						% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelamatan Arsip Kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	70 %	700 Arsip	2 RENJA PERANGKAT DAERAH	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	700 Arsip	60.000.000	
												TOTAL	**4.047.605.962**					**4.673.465.616**	

Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PERANGKAT DAERAH) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan bidang urusan pemerintahan yaitu Bidang Urusan Kearsipan dan Bidang Urusan Perpustakaan. Untuk program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan serta rencana tahun 2024 yang meliputi lokasi program/kegiatan, target capaian kinerja, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan maju tahun 2025 sebagai berikut:

Dana APBD sebesar Rp. 4.047.605.962 dengan rincian :

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 3.169.059.102,-
- Honor Daerah/THL : Rp. 245.700.000,-
- Belanja Rutin : Rp. 632.846.860,-

dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1 (TC.33)
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								4.047.605.962					4.673.465.616	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.047.605.962					4.673.465.616	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								264.763.000					465.000.000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								256.763.000					445.000.000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								143.950.000					183.950.000	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan yg Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	5 Perpustakaan	8 Perpustaka	20.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Perpustakaan yg Dikembangkan di Tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	30.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														**2.03**
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/Tahun	37 Perpustakaan	8 Perpustakaan	60.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	37 Perpustakaan	70.000.000	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewu	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten dengan Kategori Berkembang	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	30746 Pengunjung/ Tahun	1440 Eksemplar	8 Perpustakaan	63.950.000	DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Pendidikan		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Me wu	1440 Eksemplar	83.950.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
							judkan Keberagaman Koleksi									judkan Keberagaman Koleksi			
2	23	02	2.01		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								112.813.000					261.050.000	
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														**2.03**
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/Tahun	30 Lokus	1028 Orang	58.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	70.000.000	
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Perpustakaan yg Dibangun di tempat-Tempat Umum yg	Jumlah masyarakat yg terlibat sosialisasi pembu	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua	30746 Pengunjung/ Tahun	1 Perpustakaan	1028 Orang	4.763.000	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik,DAU yg Diten		Jumlah Perpustakaan yg Dibangun di tempat-Tempat Umum yg	1 Perpustakaan	100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
							Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dayaan gemar membaca per tahun	Kuniang					tukan Penggunaannya Bidang		Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	3 Orang	1028 Orang	8.424.200	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	20.000.000	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
						Jumlah pengunjung perpus	Jumlah Perpustakaan Berbasis	Jumlah masyarakat yang	- Kab. Pasaman Barat,	30746 Pengunjung/ Tahun	3 Perpustakaan	1028 Orang	41.625.800	DAU yang Ditentukan		Jumlah Perpustakaan Berbasis	3 Perpustakaan	46.050.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						takaan per tahun	Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa					Penggunaannya Bidang Pendidikan		Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
2	23	02	2.01	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah masyarakat yang terlibat sosialisasi pembudayaan gemar membaca per tahun	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30746 Pengunjung/ Tahun	1 Orang	1028 Orang	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	25.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								8.000.000					20.000.000	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								8.000.000					20.000.000	
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
						Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan,Perawatan,Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno Milik Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Naskah	1 Orang	1 Naskah	8.000.000	DAU yg Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan,Perawatan,Pelestarian,dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	20.000.000	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								3.782.842.962					4.208.465.616	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.619.869.462					3.927.515.616	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.302.319.102					3.379.604.554	
2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	33 Orang /bulan	100 %	3.169.059.102	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / bulan	3.253.704.554	
2	24	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	2 Dokumen	100 %	55.900.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	55.900.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	77.360.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	70.000.000	
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21.466.000					31.000.000	
2	24	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yg dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Dokumen	22329 unit	16.666.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
2	24	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	22329 unit	4.800.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.000.000	
2	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00					13.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	4	1	5																
2	24	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	3 Orang	100 %	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	13.500.000	
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								119.309.695					160.411.062	
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	2.115.340	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
							Disediakan												
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	17.333.320	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
2	24	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang	100 %	1 Paket	100 %	3.307.035	DAU yg Ditentukan Penggunanya Bidang		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Daerah		Umum	Aua					Pendidikan					
2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Caku pan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Laporan	100 %	93.554.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	124.411.062	
2	24	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Caku pan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Persentase Pelayanan Kebutuhan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman,	100 %	500 Dokumen	100 %	3.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	500 Dokumen	3.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						tahan Daerah	pada SKPD	Administrasi Umum	Lingkuang Aua					annya Bidang Pendidikan		pada SKPD			
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.000.000,00					68.000.000,00	
2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	31 Unit/ Pkt	1.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.000.000	
2	24	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan	Jumlah Unit Sarana dan	Jumlah Pengadaan	- Kab. Pasaman Barat,	100 %	1 Unit	31 Unit/ Pkt	0,00	DAU yang Ditentukan		Jumlah Unit Sarana dan	1 Unit	30.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasaman, Lingkuang Aua					Penggunanya Bidang Pendidikan		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
2	24	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	27 Unit	31 Unit/ Pkt	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	20.000.000	
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103.900.915					115.000.000	
2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Caku pan Pelaya nan Penun jang Urusan Pemerin tahan Daerah	Caku pan Pelaya nan Penun jang Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Dise diakan	Caku pan Peme nuhan Penye diaan Jasa Penun jang	- Kab. Pasa man Barat, Pasa man, Ling kuang Aua	100 %	1 Lapo ran	100 %	81.800.915	DAU yang Diten tukan Peng guna annya Bidang Pendi dikan		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sum ber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Lapo ran	90.000.000	
2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Cakupan Pelaya nan Penun jang Uru san Pemerin tahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	Caku pan Peme nuhan Penye diaan Jasa Penun jang	- Kab. Pasa man Barat, Pasa man, Ling kuang Aua	100 %	1 Lapo ran	100 %	22.100.000	DAU yg Diten tukan Peng guna annya Bidang Pendi dikan		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Lapo ran	25.000.000	
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								71.873.750,00					160.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	6 Unit	40 unit	41.951.250	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	60.000.000	
2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	2 Unit	40 unit	23.242.500	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	10 Unit	40 unit	6.680.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharа	10 Unit	15.000.000	
2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	40 unit	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
2	2	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	4	1	9	11	atau Bangunan Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	40 unit	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								162.973.500,00					220.950.000,00	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								49.000.000					55.000.000	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,Semua kel/Des	58.49 %	350 Berkas	350 Berkas	29.000.000	DAU yg Ditentukan Penggunaan Bidang Pendidikan		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	350 Berkas	32.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	2 Laporan	350 Berkas	20.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	23.000.000	
2/	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								24.996.900					55.000.000	
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yg Dikumpulk	Jumlah Arsip Statis Daerah Kabu	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	58.49 %	18 Arsip	882 Berkas	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunanya		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang	18 Arsip	27.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Minimal CUKUP	an dan Disampaikan kepada ANRI	paten dengan Kondisi Baik	Semua Kel/Desa					Bidang Pendidikan		Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten dengan Kondisi Baik	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	58.49 %	27 Arsip	882 Berkas	24.996.900	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27 Arsip	28.000.000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								88.976.600					110.950.000	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Laya	Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Keca	58.49 %	42 Pengguna	2 Aplikasi	30.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunanya		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Laya	42 Pengguna	35.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Arsip Minimal CUKUP	nan Kearsipan Tk. Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Informasi Kearsipan yang dikelola	matan, Semua Kel/Desa					annya Bidang Pendidikan		nan Kearsipan Tk. Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
						% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.49 %	1 Laporan	2 Aplikasi	58.976.600	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	75.950.000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								0,00					60.000.000	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan								0,00					60.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Desa/Kelurahan														
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
						% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelamatan Arsip Kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	70 %	700 Arsip	2 RENJA PERANGKAT DAERAH	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	700 Arsip	60.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi Program Nasional/ Unggulan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
								TOTAL	**4.047.605.962**					**4.673.465.616**	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kearsipan dan perpustakaan pada tahun 2024. Yang pasti keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait.

Diperlukan upaya yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab agar Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, Meningkatnya minat dan gemar membaca masyarakat melalui layanan perpustakaan yang berkualitas dan terjangkau.

Maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan dengan demikian dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentunya Renja Perangkat Daerah ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2023
Kepala Dinas,

MUHARRAM, S.Sos.,MM
Pembina TK I, IV/b
Nip. 19790920 200604 1 007

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Renja Dinas Perikanan merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, melalui program Dinas Perikanan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan perikanan.

Rencana Kerja yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam mengoperasikan kegiatan setiap tahunnya dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappelitbangnda tahun 2024 yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Perikanana untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Perikanan.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Simpang Empat, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ZULFI AGUS, S.Pi
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19820831 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TABEL .....

SK TIM PENYUSUN RENJA .....

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan Hukum..... 2

1. 3. Maksud dan Tujuan 3

1. 4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 6

2. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Perikanan..... 6

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD . 14

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15

2. 5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat..... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 27

3. 1.Telaahan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 27

3. 2.Tujuan dan Sasaran Renja OPD 32

3. 3.Rencana Program dan Kegiatan..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD 39

4. 1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 39

BAB V PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023.....	7
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasama Barat.....	9
Tabel T-C. 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.....	16
Tabel 2.5	Hasil Musrenbang.....	22
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	23
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Perikanan.....	32
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja Dinas Perikanan Tahun 2024.....	33
Tabel T-C. 33	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	34
Tabel 4.1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	40

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan (2024), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Program.

Selanjutnya, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Renja Dinas Perikanan Pasaman Barat memiliki beberapa program yang dijalankan oleh bidang Budidaya dan Tangkap. Kedua bidang tersebut merupakan penggerak dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bidang perikanan untuk kesejahteraan ekonomi daerah. hal ini juga berkaitan dengan rencana kerja Kelautan dan perikanan di Sumatera Barat yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam berbagai bidang seperti Perikana Tangkap, Perikanan Budidaya, serta berbagai pantai dan pulau kecil yang dapat dijadikan jasa lingkungan. Sektor Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian Sumatera Barat mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sumber lapangan kerja sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan kelautan dan perikanan. Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk

pengembangan Perikanan Budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut.

Keterkaitan Renja Dinas Perikanan Pasaman Barat dan Renja Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat dengan memiliki tujuan akhir yaitu dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan Provinsi, tentunya hal ini dapat mendukung peran KKP sebagai salah satu kementrian atau lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. KKP telah membangun komunikasi dengan para *stakeholders*, pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang semakin kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya terus berupaya mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan dan perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Kepmendagri No 50-5889 Tahun 2021 Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perikanan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Program.
2. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
3. Untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

1.3 dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan

1.4 tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* Perangkat Daerah *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam

2.4 meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan

2.5 antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun

berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
(Matriks Program dan Kegiatan)

BAB V : PENUTUP

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat perikanan tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2016. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Program dan Kegiatan di Kabupaten Psaman Barat untuk itu sekiranya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Perikanan mendukung Program dan Kegiatan yang dialokasikan Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran untuk kemajuan masyarakat perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 5 (Lima) program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perikanan tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel T-C 29 berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Dinas Perikanan Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) th 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2023		Catatan
				Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	112.276 ton/thn	108.327 ton/thn	98.783 ton/thn	91%	109.411 ton/thn	103.940 ton/thn	95%	
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya (Ton/tahun)	6.275 ton/thn	6030 ton/thn	5825 ton/thn	96,6%	6.090 ton/thn	5.907 ton/thn	97%	
3	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jenis Keanekaragaman olahan hasil perikanan	5 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-3 Pembangunan Daerah periode 2021-2026, melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yakni:

1) Produksi perikanan tangkap, yang ditargetkan mencapai 103.940 ton/tahun pada tahun 2023. Hingga tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja yang telah terealisasi tinggi sebesar 91% yaitu sebesar 98.783 ton/tahun dari jumlah produksi yang ditargetkan sebesar 108.327 ton/tahun. Tidak tercapainya 100% target produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 disebabkan oleh cuaca yang ekstrim serta badai menyebabkan nelayan tidak bisa melaut sehingga hasil tangkapan jauh menurun. Selain itu kewenangan Kabupaten terkait perizinan kapal hanya sampai 10 GT sehingga banyak kapal-kapal besar menurunkan ukuran mesin kapalnya karena rumitnya pengurusan surat-surat kapal dengan ukuran mesin lebih kecil otomatis jangkauan wilayah penangkapan juga lebih kecil. Meskipun Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan baik kapal maupun alat tangkap ikan untuk nelayan. Dinas Perikanan juga melakukan upaya penguatan serta pengembangan kelembagaan maupun sumberdaya nelayan melalui bantuan sarpras dan juga pelatihan teknis penangkapan ikan ikut memacu pertumbuhan produksi ikan di subsektor penangkapan ikan ini
2) Produksi perikanan budidaya, ditargetkan hingga 6.090 ton/tahun pada tahun 2023.
   Pada tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja yang telah terealisasi sangat tinggi sebesar 96,06 % yaitu sebesar 5.825 ton/tahun dari jumlah produksi yang ditargetkan sebesar 6.030 ton/tahun. Tidak tercapainya 100 % target produksi perikanan budidaya ini dipengaruhi beberapa hal Kondisi alam yang tidak stabil seperti cuaca, curah hujan yang sangat tinggi, serta adanya larangan dari PSDA terhadap pembudidaya di saluran irigasi seperti di kecamatan Pasaman, Luhak Nan Duo, Kinali, Ujung Gading dan Koto Balingka. Meskipun Dinas Perikanan telah melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana BBI sehingga kebutuhan bibit ikan untuk dibudidayakan tersedia untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Selain itu, Dinas Perikanan juga melakukan upaya penguatan serta pengembangan usaha masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti bantuan pembuatan kolam percontohan Udang dan KAD, kolam terpal bibit dan pakan ikan ikut memacu pertumbuhan produksi ikan di subsektor budidaya ini.
3) Produksi ikan olahan, ditargetkan hingga 3 jenis olahan pada tahun 2023. Pada tahun 2022 realisasi persentase ikan olahan mencapai 100 yaitu 2 jenis olahan Perikanan.

Tabel 2.2.1 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Pasama Barat

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
	Produksi perikanan tangkap	**Program Pengembangan perikanan tangkap**	**Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)**	**112.464**	**115.298**	**107.254**	**109.411**	**105.981**	**106.193**	**96.768**	**98.000**	
		Kegiatan pengelolaan sumber daya ikan	Jumlah Kelompok Pengelola Lubuk larangan perairan umum	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	
		Kegiatan pengelolaan kapal perikanan	Jumlah tanda daftar kapal dan Logbook Kapal	60 td kapal	80 td kapal	100 td kapal	100 td kapal	60 td kapal	80 td kapal	100 td kapal	100 td kapal	
		Kegiatan pengelolaan kenelayanan	Jumlah KUB nelayan dilatih dan memiliki kartu nelayan	5 KUB	5 KUB	5 KUB	5 KUB	5 KUB	5 KUB	5 KUB	5 KUB	
	Produksi Perikanan Budidaya	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**	**Produksi perikanan budidaya (Ton/tahun)**	**6.694 Ton**	**6.973 ton**	**5.970 ton**	**6.090**	**6.227 Ton**	**5.911 ton**	**5.496**	**5.700**	

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
		Kegiatan pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dalam pengelolaan kesehatan ikan	40 pembudidaya ikan	50 pembudidaya ikan	50 pembudidaya ikan	50 pembudidaya ikan	40 pembudidaya ikan (97.64 %)	0	0		
		Kegiatan pengelolaan sistem perbenihan ikan	Jumlah unit perbenihan	0	2 unit	2 unit		(93,84 %)	2 unit BBI (99,97%)	2 unit BBI (99,97%)	2	
		Kegiatan pengelolaan kawasan produksi perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana kawasanan budidaya yang terfasilitasi	6 Unit	15 Unit	15 Unit		12 Pondakan (99,88 %)	10 Pondakan (99,93%)	10 Pondakan (99,93%)	10 Pondakan (99,93%)	Refocusin Anggaran Covid-19
		Kegiatan Optimalisasi sistem perbenihan ikan	Jumlah produksi benih ikan	2 jt ekor	2,2 Jt Ekor	2,2 Jt Ekor		1,870 jt ekor (99,09 %)	2, Jt Ekor	2, Jt Ekor	2, Jt Ekor	Sarana prasarana tidak berfungsi sedang dalam renovasi ,tidak maksimal produksinya
		Kegiatan pengelolaan	Jumlah kelompok yang	0	0	0		0	0	0	0	Tidak mencukupi

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
		produksi dan usaha pembudidaya ikan	difasilitasi pelatihan dan bantuan usaha									anggaran
	Produksi Ikan Olahan	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	**20,75 %**	**22,25 %**	**22,25 %**		**19,67 %**	**20,34%**	**20,34%**		**Isu pemakaian pestisida**
		Kegiatan penguatan daya saing hasil perikanan	jumlah Keguatan diversifikasi hasil olahan ikan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		3 Kegiatan (87,91 %)	1 Kegiatan (99,44%)	1 Kegiatan (99,44%)		Refocusing Anggaran Covid-19-Keg.Penas, Gemarikan, Fameran Awal Tahun,Pemaren Gemarikan
		Kegiatan peningkatan pengujian penerapan hasil perikanan	Jumlah produk hasil olahan yang bersertifikat	0	0	0		0	0	0	0	
		Kegiatan optimalisasi pabrik es	Jumlah produksi es	2000 batang	0	0		Kontrak Phk ketiga (84 jt)	Kontrak Phk ketiga	Kontrak Phk ketiga		KSO dg Yudi Fenra PAD 100.000.000,- (seratus

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
												Juta rupiah) pertahun lelang
		Kegiatan optimalisasi bangsal pengolahan ikan	Jumlah Kelompok yang dilatih	10 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok		10 Kelompok	3 Kelompok Pengolah (100%)	3 Kelompok Pengolah (100%)		
		Kegiatan Pengelolaan Data Perikanan	Jumlah laporan data statistik perikanan	0	0	0		0	0	0		
	Penguranganangka kemiskinan daerah	**Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan**	**Berkurangnya angka kemiskinan Kabupaten**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	**Angka kemiskinan kab**	
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB Nelayan yang dibantu	2 KUB (15 Nelayan)	5 KUB 50 Nelaya)	5 KUB 50 Nelaya)		2 KUB (15 Nelaya)	4 KUB (50 Nelaya) (99,84%)	4 KUB (50 Nelaya) (99,84%)		
		Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	Jumlah Kel Pembudidaya yang dibantu	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Peningkata	**Program Pelayanan**	Persentase Cakupan	100%	100%	100%		94.13%	99,04%	99,04%		

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
	kuntabilitas & kinerja Dinas Perikanan	**Administrasi Perkantoran**	pelayanan administrasi perkantoran									
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	100%	100%		93,33 %	99,31%	99,31%		
		Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	31 Unit	31 Unit	31 Unit		31 Unit (89,16 %)	31 Unit (97,85%)	31 Unit (97,85%)		
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Persentase Rapat Koordinasi yang diikuti	100%	100%	100%		**99,91 %**	99,95%	99,95%		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0		0	0	0	0	
		Program Peningkatan Disiplin	Jumlah Pekaian apparatur yg	0	0	0	0	0	0	0	0	

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
		Aparatur	tersedia									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%	100%	100%		97,67%	0%	0%		**Refocusing Anggaran Tgl 8 Mei 2020**
		Kegiatan Bimbingan teknis implmntasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Diklat	10 ASN	4 ASN	4 ASN		10 ASN (97,67 %)	0	0	0	**Refocusing Anggaran Covid-19 Tgl 8 Mei 2020**
		Program Peningkatan pengembangan sistm pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	**Tidak ada angaran yg ada anggarannya 2018**
		Program Penngkatan & pengembang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan inventarisasi asset	0	0	0		0	0	0		**Tidak ada angaran yg ada anggarannya 2018**

Untuk capaian target tahun 2022 pada umumnya mencapai 90% serta penyerapan anggaran diatas 95%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1) Penanggulan kemiskinan khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Pada umumnya nelayan di kawasan pesisir Pasaman Barat berkategori miskin. Hal ini dikarenakan para nelayan belum memiliki sarana dan prasaran alat tangkap perikanan yang memadai. Selain itu, rendahnya pengetahuan nelayan dalam proses pengajuan bantuan permodalan serta pemanfaatan. Oleh karena itu, sesuai dengan misi pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perikanan sebagai leading sektor pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di kawasan pesisir perlu melakukan peningkatan pengetahuan dan sarana serta prasarana pendukung bagi nelayan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat khususnya nelayan miskin.
2) Ketahanan pangan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk perikanan, peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.
3) Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui upaya konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana melalui pengembangan konservasi laut dan perairan, pengembangan SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2023, jumlah Plafon Belanja Operasi yang dialokasikan untuk Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 5.657.158.461,- (*Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*). Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel T-C. 31 berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Perikanan

No	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISA KEBUTUHAN				Catatan Penting (Penjelasan)
	Nama Program/Kegitan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kebutuhan Dana	Nama Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Belanja Operasi					Belanja Operasi				
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran**	**100%**	**3.331.062.402**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota**	**Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran**	**100%**	**3.336.328.527**	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 Dokumen**	**63.729.200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 Dokumen**	**63.729.200**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22.500.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	41.229.200	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	41.229.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.451.401.652**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.451.401.652**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.307.941.652	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.307.941.652	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	84.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	84.500.000	

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	58.960.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	58.960.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah**	**100%**	**27.700.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah**	**100%**	**27.700.000**	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.100.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.100.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah non PNS/THL yang melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.600.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	**Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN**	**100%**	**165.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN**	**100%**	**165.000.000**	

1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	5.000.000	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 orang	5.000.000	
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26 paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26 paket	150.000.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 orang	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 orang	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran, Tersedianya Administrasi Perkantoran, Terlaksananya**	**100%**	**143.442.050**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran, Tersedianya Administrasi Perkantoran, Terlaksananya**	**100%**	**144.043.300**	

			Rapat Koordinasi				**Rapat Koordinasi**			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.715.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.715.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 paket	31.064.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 paket	31.064.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	9.398.750	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.600.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.600.300	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasaman Barat	Jumlah fasilitas yang disediakan untuk tamu	-	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas yang disediakan untuk tamu	2 paket	-	

6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam/Luar Daerah Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	90.664.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	90.664.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang**	**100%**	**14.470.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang**	**100%**	**29.134.875**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi perkantoran	1 paket	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi perkantoran	4 paket	29.134.875	
2	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perkantoran	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	-	
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung	1 paket	9.470.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung	1 paket	-	

			gedung kantor				gedung kantor			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perkantoran**	**70%**	**366.899.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perkantoran**	**70%**	**366.899.500**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.100.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	86.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	86.700.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	258.099.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	258.099.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**98.420.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**88.420.000**	

1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	76.850.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	76.850.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	11.570.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	11.570.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	-	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**107.254 Ton**	**1.152.334.600**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**107.254 Ton**	**1.152.334.600**	

	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya Pemberdayaan Terhadap Kelompok Nelayan Kecil**	**17 Kelompok**	**1.124.494.100**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Terhadap Kelompok Nelayan Kecil**	**17 Kelompok**	**1.124.494.100**	
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	19 Orang	1.084.671.100	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	19 Orang	1.084.671.100	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	19 Kelompok	39.823.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	19 Kelompok	39.823.000	

3	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kec. Sungai Beremas , Kec. Sasak Ranah Pesisir dan Kec. Kinali**	**Jumlah data base kapal ukuran < 10 GT**	**411 Kapal**	**27.840.500**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah data base kapal ukuran < 10 GT**	**411 Kapal**	**27.840.500**	
4	Pelayanan Penerbitan Tanda daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kec. Sungai Beremas , Kec. Sasak Ranah Pesisir dan Kec. Kinali	Pelaksanaan sosialisasi pengurusan dokumen kapal ukuran < 10 GT	3 Kali	27.850.000	Pelayanan Penerbitan Tanda daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Pelaksanaan sosialisasi pengurusan dokumen kapal ukuran < 10 GT	3 Kali	27.850.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**5970 Ton**	**1.378.119.709**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**5970 Ton**	**1.828.119.709**	

		Kel/Desa								
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**5911 Ton**	**200.000.000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**5911 Ton**	**650.000.000**	
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	100.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Usaha Yang Terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok	100.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha Yang Terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok	550.000.000	

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan yang Dibantu**	**12 Pokdakan**	**1.178.119.709**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan yang Dibantu**	**12 Pokdakan**	**1.178.119.709**	
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	660.547.709	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	660.547.709	
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	338.364.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	338.364.000	

3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	179.208.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	179.208.000	
4	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	40 Orang	50.000.000	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Jumlah Pembudidaya Yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	40 Orang	50.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum**	**2 POKMASWAS**	**100.500.000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum**	**2 POKMASWAS**	**100.500.000**	

1	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota**	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota**	**50%**	**100.500.000**	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota**	**Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100.500.000**	
2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	100.500.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	100.500.000	

	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jenis Keaneka Ragaman Olahan Hasil Perikanan**	**2 Jenis**	**317.274.217**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jenis Keaneka Ragaman Olahan Hasil Perikanan**	**5 Jenis**	**318.398.884**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi usaha Mikro dan Kecil	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko**	**12 Bulan**	**133.151.000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi usaha Mikro dan Kecil**	**Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko**	**12 Bulan**	**133.151.000**	
1	Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam satu daerah kabupaten / kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	1 Dokumen	133.151.000	Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	1 Dokumen	133.151.000	

	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikannan bagi usaha usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko**	**2 Kali**	**61.123.217**	**Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikannan bagi usaha usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	**Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko**	**2 Kali**	**62.247.884**	
1	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	2 unit usaha	61.123.217	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	2 unit usaha	62.247.884	

	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah/ kota	**Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan serta fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan**	**4 poklahsar**	**123.000.000**	**Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah/ kota**	**Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan serta fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan**	**4 poklahsar**	**123.000.000**	
1	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota yang terfasilitasi	4 pelaku usaha	123.000.000	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota yang terfasilitasi	4 pelaku usaha	123.000.000	
	Jumlah				**6.279.290.928**	**Jumlah**			**6.735.681.720**	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat diharapkan Bapeda Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 7.812.016.965,- (*Tujuh milyar delapan ratus dua belas juta enam belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*). dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Perikanan dan RPJMD Periode 2021-2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Usulan program dari masyarakat yang disampaikan melalui musrembang maupun melalui proposal ke Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sudah tertampung dalam Rancangan RKPD Tahun 2023.

Hasil Musrenbang RKP-Nagari dari 11 (sebelas) Kecamatan tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 seperti nampak pada Tabel 2.5 dan Tabel T-C. 32 berikut ini:

Tabel 2.5
Hasil Musrenbang

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume Besaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Bantuan Pembuatan Kolam Terpal	Nagari Aia Gadang	1 paket	Usulan diterima dengan syarat proposal disesuaikan dengan kegiatan Rp.200.000.000,-
2	Bantuan Bibit Ikan (Lele, Nila, Mas, Gurame)	Nagari Aia Gadang	1 paket	Usulan diterima Rp. 200.000.000,-
3	Bantuan Pembuatan Kolam Terpal)	Nagari Parit	1 Paket	Usulan diterima Rp.500.000.000,-
4	Bantuan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Nagari Sasak	1 Paket	Usulan diterima Rp.100.000.000,-
5	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Mesin Diesel	Nagari Sasak	4 Kelompok	Usulan diterima Rp.100.000.000,-
6	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Mesin Long Tail	Nagari Sasak	4 Kelompok	Usulan diterima Rp.625.000.000,-
7	Bantuan Bibit Ikan (Lele, Nila, Mas, Gurame)	Nagari Sinuruik	1 Paket	Usulan diterima Rp.200.000.000,-
8	Bantuan Pembuatan Kolam Terpal)	Nagari Ujung Gading	1 Paket	Usulan diterima Rp.100.000.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional "Kemaritiman dan Kelautan" dan "Kedaulatan Pangan", maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

(1) Pertumbuhan,
(2) Pemerataan, dan
(3) Modernisasi.

Pertumbuhan yang dimakud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
   Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
   Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
   Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

a. Pengarusutamaan Gender
b. Pembangunan Kewilayahan
c. Adaptasi Perubahan Iklim
d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :

1) Memberantas *IUU Fishing*

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten

2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.

3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)

2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran

3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Perikanan

4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD

5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (d) Pakan mandiri dan obat ikan, (e) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (f) Pengembangan kawasan budidaya

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (*port to port* dan *fishing ground to port*), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi, (e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.

7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kuallitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (*market intelligence*)

8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.

3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP

4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pembangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).

5) Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan geneitka induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f) Peningkatan *Knowledge Base Management System.*

2. Kebijakan Lintas Bidang

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eseleon I di KKP dan antar pusat-daerah.

b. Pembangunan Kewilayahan
Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi **mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.** Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f) Sinergi pembagian kewenangan antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi kegiatan lintas sektor.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :

1. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

   Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a) Rehabilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan-pemasaran yang ramah lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (d) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.

2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim

   Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah :

1. Membangun budaya kerja yang profesional

   Langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNBP fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antar lembaga

2. Meningkatkan kualitas pengawasan internal

   Langkah yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	Kegiatan Pembangunan RKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penganguran seta Penanganan Daerah Tertinggal.	Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	Program pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/Kota	• Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil. • Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
2	Penurunan Penurunan Tinkat Kemiskinan dan Penganguran seta Penanganan Daerah Tertinggal.	Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	Program Pemberdayaan ikan kecil.	• Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemberdayaan ikan kecil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Perikanan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.Meningkatkan pertumbuhan Perekonomian dan Pemerataan pendapatan sektor perikanan	1.Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (ton)
	2.Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya
	3.Peningkatan jumlah POKMASWAS yang berbadan hokum	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum
	4.Peningkatan produksi ikan	Jumlah produksi ikan olahan (ton)
2.Penerapan tata kelola pemerintah professional,akuntabel dan Inovatif.	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah
		2.Peningkatan nilai SAKIP

3.3 Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan disentralisasi dan tugas perbantuan di bidang perikanan Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 5 (lima) program yang akan didukung oleh 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 berikut ini **:**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-4 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Perikanan Kab. Pasaman Barat Tahun 2024 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 5 program , 10 kegiatan dan 18 Sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 4.378.043.232.00** (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)* sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

4.1 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 5 (program) program yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan, 17 Sub kegiatan seperti terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel.4.1 Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Dinas Perikanan
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERNGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						4.378.043.232,00							3.925.201.494,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.289.225.640,00							3.828.501.494,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4.289.225.640,00							3.828.501.494,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	2.946.858.433,00						-	2.891.773.652;00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan*	9 Dokumen			9 Dokumen 100 %	61.695.000,00			-	Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	9 Dokumen	43.729.200;00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	9 Dokumen			7 Dokumen	20.966.000;00	- Kab Pasaman Barat, semua Kecamatan, Semua Kal /desa,	DANA TRANSFER UMUM – DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yng bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	9 Dokumen	22.500.000;00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2Laporan			2 Laporan	40.729.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	2 Laporan	21.229.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan Honorarium Pegawai Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	100persen			100 % 100 persen	2.421.726.113,00				Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		100persen	2.366.901.652,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20/14 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.366.246.113,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi	-	20/14 Orang/bulan	2.307.941.652,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen			13 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem	-	13 Dokumen	0.00	DINAS PERIKANAN

										UMUM		erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi				
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	55.480.00;00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi	-	2 Dokumen	58.960.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya pengadministrasian barang milik daerah Jumlah BMD yang dikelola Dinas Perikanan	100 Persen			100 Persen 383 Unit	0.00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi	-	100 Persen	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata	-	2 Dokumen	0.00	DINAS PERIKANAN

												kelola pem erintahan dan pelayanan publi				
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi	-	2 Dokumen	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	100persen			100 % 100 persen	0.00				Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi		100 PERSEN	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket			25 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	25 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan	2 Orang			2 Orang	0,00	- Kab. Pasaman	DANA TRANSFE	-	Meningkatkan kualitas	-	2 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN

			Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	R UMUM-DANA ALOKASI UMUM		tata kelola penyeleng g araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik				
	3.25.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyeleng g araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang			1 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyeleng g araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Orang	0,00	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran '- tersedianya administrasi perkantoran'- terlaksananya rapat koordinasi Persentase pemenuhan kebutuhan*	100persen			100 persen 100 %	132.741.320,00				Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata	-	100pers en	134.043.300,00	DINAS PERIKANAN

			pelayanan Administrasi dan operasional kantor									n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik				
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.715.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	4.715.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	31.095.520,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	31.064.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.386.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	7.600.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan	50 Laporan			100 Laporan	90.544.000,00	- Kab. Pasaman	DANA TRANSFE	-	Meningkatkan kualitas	-	50 Laporan	90.664.000,00	DINAS PERIKANAN

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	R UMUM-DANA ALOKASI UMUM		tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran*	100persen			100 % 100 persen	256.400.000,00				Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100persen	258.099.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	256.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata	-	1 Laporan	258.099.500,00	DINAS PERIKANAN

												kelola pem erintahan dan pelayanan publik				
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan BMD di Dinas Perikanan Terpeliharanya Barang milik daerah*	100persen			100 % 100 persen	74.296.000,00				Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		100persen	89.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			36 Unit	62.726.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	3 Unit	77.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			36 Unit	11.570.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	-	30 Unit	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)***	**659383Ton 659383Ton**			**110505 Ton**	**1.040.078.207,00**						**112276Ton 112276Ton**	**89.823.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksannya pemberdayaan terhadap kelompok*	22 kelompok			20 kelompok 377 Unit	1.040.078.207,00			-	Meningkatkan nilai tambah	-	22kelompok	89.823.000,0	DINAS PERIKANAN

			nelayan kecil Terbantunya sarana penangkapan ikan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				220 orang					dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem				
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang			210 Orang	1.040.078.207,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	50 Orang	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok			20 Kelompok	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem		10 Kelompok	39.823.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang				10 Unit Usaha	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua	DANA TRANSFE		Meningkatkan			0,00	DINAS PERIKANAN

			Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						Kecamatan, Semua Kel/Desa	R UMUM-DANA ALOKASI UMUM		nilai tambah dan produktifita s Pertania n, perkebun an , peternakan dan perikanan Penanggul angan kemiskinan dan pengha pusan kemisikina n ekstrem				
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	**36729Ton 36729Ton**			-	**302.289.000,00**						**6275T on 6275To n**	**713.753.842,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		-		Meningk atk an nilai tambah dan produktifita s Pertania n, perkebun an , peternakan dan perikanan Penanggul angan kemiskinan dan pengha pusan kemisikina n ekstrem	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak				0 Rekomend asi	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peternakan dan perikanan Penanggul angan kemiskinan dan pengha pusan kemisikina n ekstrem			0,00	DINAS PERIKANAN

			Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing													
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Peningkatan kapasitas dan kemampuan pembudidaya ikan kecil*	30759Ton			6151 Ton 7 Pembudidaya	34.080.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	6275Ton	425.389.842,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	350 Kelompok			7 Kelompok	34.080.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan pengha pusan kemisikinan ekstrem	-	9 Kelompok	425.389.842,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				0 Kelompok	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan	-		0,00	DINAS PERIKANAN

												pengha pusan kemisikina n ekstrem				
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan Yang Dibantu* *Jumlah sarana pembudidaya ikan yang dibantu*	17Pokdaka n			15 Pokdaka n 15 Pokdakan	268.209.000,00			-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peternakan dan perikanan Penanggul angan kemiskinan dan pengha pusan kemisikina n ekstrem	-	17Pokda kan	288.364.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.00 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit			2 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peternakan dan perikanan Penanggul angan kemiskinan dan pengha pusan kemisikina n ekstrem	-	18 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.00 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			2 Unit	263.209.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peternakan dan perikanan Penanggul angan kemiskinan dan	-	2 Unit	238.364.000,00	DINAS PERIKANAN

												pengha pusan kemisikina n ekstrem				
	3.25.04.2.04.00 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 Dokumen			5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan pengha pusan kemisiki nan ekstrem	-	15 Dokume n	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.00 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	225 Orang			40 Orang	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan pengha pusan kemisiki nan ekstrem	-	50 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum***	**5Pokmaswas 2POKMAS WAS**			**4 Pokmasw as 2 POKMAS WAS**	**0,00**						**5 Pokmas was 2POKM AS WAS**	**100.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	*Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum Terlaksananya Pengawasan*	100persen			4 POKMA S WAS 50 persen	**0,00**			-	Mening katk an nilai tambah dan produkti	-	100pers en	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN

		Dalam Kabupaten/Kota	*Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*									fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan pengha pusan kemisiki nan ekstrem				
	3.25.05.2.01.00 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen			0 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan pengha pusan kemisiki nan ekstrem	-	4 Dokume n	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan***	**5Jenis 5Jenis**			**3 Jenis**	**0,00**						**5Jenis 5Jenis**	**33.151.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko* *Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan*	12 bulan			12 bulan 1 Dokumen	0,00			-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan	-	12 bulan	33.151.000,00	DINAS PERIKANAN

												pengha pusan kemisiki nan ekstrem				
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen			1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan pengha pusan kemisiki nan	-	1 Dokume n	33.151.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Sertifikat kelayakan pengolahan UMKM dibidang Perikanan Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko*	2Kali			1 Kali 2 Kali	0,00			-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan perikan an Penang gul angan kemiski nan dan pengha pusan kemisiki nan		2Kali	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	2 Unit Usaha			0 Unit Usaha	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an nilai tambah dan produkti fita s Pertani an, perkebu nan , peterna kan dan		2 Unit Usaha	0,00	DINAS PERIKANAN

			Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko									perikanan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan				
	X	**NON URUSAN**						**88.817.592,00**							**96.700.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**88.817.592,00**							**96.700.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***				**100 %**	**88.817.592,00**							**96.700.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran '- tersedianya administrasi perkantoran'- terlaksananya rapat koordinasi Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi dan operasional kantor*	100persen			100 persen 100 %	2.117.592,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100persen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.117.592,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata		1 Paket	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN

												kelola pem erintaha n dan pelayan an publik				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran*	100persen			100 % 100 persen	86.700.000,00			-	Mening katk an kualitas tata kelola penyele ngg araan pem erintaha n daerah yang bersih, akuntab el dan berkuali tas Peningk ata n tata kelola pem erintaha n dan pelayan an publik		100pers en	86.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	86.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mening katk an kualitas tata kelola penyele ngg araan pem erintaha n daerah yang bersih, akuntab el dan berkuali tas Peningk ata n tata kelola pem erintaha n dan pelayan an publik		1 Laporan	86.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							**4.378.043.232,00**							**3.925.201.494,00**	

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Agustus 2023
Kepala Dinas Perikanan
Pasaman Barat

Zulfi Agus, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERIKANAN
Alamat Komplek BBI Sukamenanti
Kode Pos 26366 Fax (0753) 466170

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/ /DISKAN/IV/2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menegah daerah;
b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegitan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman

Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : (1) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2022;
(2) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : September 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ZULFI AGUS, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERIKANAN

Alamat Komplek BBI Sukamenanti

Kode Pos 26366 Fax (0753) 466170

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 050/ /DISKAN/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas PerikananKabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen

perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;

9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat 2023;

10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
11. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Simpang Empat

Pada tanggal :

April 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN

ZULFI AGUS, S.Pi

PEMBINA / IV.a

NIP. 19820831 200501 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Nomor : 050/ /DISKAN/2022
Tanggal : April 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Zulfi Agus, S.Pi	Kepala	Ketua
Ferrawati, S.Kom, MM	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Perikanan Budidaya		
Khairil Huda, SH	Kabid Perikanan Budidaya	Koordinator
Minda Elmayani, S.Pi	Kasubid Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
Afian Abdillah, ST	Kasubid Pembenihan	Anggota
Mesra Welly Ika Putri, S.Pi	Kasubid Produksi dan Usaha Budidaya	Anggota
Mita Rahayu, S.Pi	Analis Budidaya	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Perikanan Tangkap		
Syafrizal, S.Pi	Kabid Perikanan Tangkap	Koordinator
Lisma Erni, S.Pi	Kasubid Pengelolaan SDI dan Pengelolaan Penangkapan Ikan	Anggota
Adya Medilka, S.Pi	Kasubid Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Program		
Yosep Rikhardo, SE	Kabid Program	Koordinator
Rezi Wismora, S.TP. MM	Kasubid Data dan Informasi	Anggota
Vera Wati, S.Pi	Kasubid Penatausahaan Barang	Anggota

KEPALA DINAS PERIKANAN

ZULFI AGUS, S.Pi
PEMBINA / IV.a
NIP. 19820831 200501 1 006

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Agustus 2023
Kepala Dinas Perikanan
Pasaman Barat

Zulfi Agus, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERIKANAN
Alamat Komplek BBI Sukamenanti
Kode Pos 26366 Fax (0753) 466170

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/ /DISKAN/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas PerikananKabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Menimbang : e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas PerikananKabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

C. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

D. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

C. Kelompok Kerja

13. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024;
14. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
15. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
16. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
17. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
18. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;

21. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat 2024;
22. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
23. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
24. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

ZULFI AGUS, S.Pi
PEMBINA TK I / IV.b
NIP. 19820831 200501 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Nomor : 050/ /DISKAN/2023
Tanggal : 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Zulfi Agus, S.Pi	Kepala	Ketua
Mustafa Kamal, MA	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Perikanan Budidaya		
Khairil Huda, SH	Kabid Perikanan Budidaya	Koordinator
Minda Elmayani, S.Pi	Kasubid Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
Afian Abdillah, ST	Kasubid Pembenihan	Anggota
Mesra Welly Ika Putri, S.Pi	Kasubid Produksi dan Usaha Budidaya	Anggota
Mita Rahayu, S.Pi	Analis Budidaya	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Perikanan Tangkap		
Syafrizal, S.Pi	Kabid Perikanan Tangkap	Koordinator
Lisma Erni, S.Pi	Kasubid Pengelolaan SDI dan Pengelolaan Penangkapan Ikan	Anggota
Adya Medilka, S.Pi	Kasubid Kenelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Program		
Sutri Dahlena, SKM	Kabid Program	Koordinator
Rezi Wismora, S.TP. MM	Kasubid Data dan Informasi	Anggota
Vera Wati, S.Pi	Staf Program	Anggota

KEPALA DINAS PERIKANAN

ZULFI AGUS, S.Pi
PEMBINA / IV.a

NIP. 19820831 200501 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERIKANAN
Alamat Komplek BBI Sukamenanti
Kode Pos 26366 Fax (0753) 466170

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/ /DISKAN/IV/2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

d. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menegah daerah;
e. Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegitan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
f. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan.

Mengingat :

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
22. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

23. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
38. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : (3) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024;

(4) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ZULFI AGUS, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PARIWISATA

JL.KOMPLEK PERTANIAN PADANG TUJUH

RENJA (RENCANA KERJA)

DINAS PARIWISATA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA OPD….....

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN …….….. 1

1. 1. Latar Belakang ……..……...….. 1

1. 2. Landasan Hukum…….…….....……..... 3

1. 3. Masud dan Tujuan .....……..…. 5

1. 4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021……..……..

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata..……..…..... 9

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 30

2. 3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....…… 33

2. 4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD……... 36

2. 5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat..... 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....……....

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…….. 50

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD……. 53

3. 3. Rencana Program dan Kegiatan 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....…… 60

BAB V PENUTUP…….....…...…… 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata merupakan pedoman kerja bagi Dinas Pariwisata selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Dinas Pariwisata dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata.

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan (2023), indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Meningkatnya Daya Tarik Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Kreatif serta Meningkatnya Nilai Adat, Seni dan Budaya.

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat disusun secara terpadu, partisipatif, demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun. Adapun keterkaitan antara Rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat dengan Renja Kementerian dan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dimana pada Bab III Renja Dinas Pariwisata Pasaman Barat sudah memuat telaahan terhadap penetapan strategi dan arah kebijakan dari Kementerian dan Dinas Pariwisata Provinsi.

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renja Kementerian tahun 2024, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Dengan demikian agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Sumatera Barat maka arah kebijakan Pembangunan Pariwisata pada Renja Dinas Pariwisata Provinsi telah sejalan dengan arah dan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dimana program dan kegiatan pada Renja Provinsi menekankan pada peningkatan kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat, peningkatan pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Dalam strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi, salah satu Program Unggulan yaitu pengembangan Geopark Ranah Minang dimana Geopark Talamau termasuk salah satu Daya Tarik Wisata Unggulan yang telah ditetapkan Dispar Provinsi Sumbar melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019. Dengan demikian untuk tahun 2023 Dinas Pariwisata Pasaman Barat akan lebih fokus untuk pengembangkan Geopark Talamau dengan Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang memadai dalam mendukung target kedepannya agar Geopark Talamau dapat ditetapkan sebagai situs nasional bahkan internasional (UNESCO).

Pada Tahun 2023, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, maka urusan Kebudayaan berada pada Dinas Pariwisata. Dengan demikian maka perumusan kebijakan teknis serta pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kebudayaan menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
8. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Taman Bumi (Geopark);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara atau Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 96 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2021;
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pariwisata serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data-data kepariwisataan yang lengkap dan akurat
2. Terlaksananya event pariwisata tahunan, paket wisata , wisata religi, wisata alam pantai, dan usaha kuliner.
3. Terekseposnya potensi-potensi pariwisata lokal yang spesifik khususnya Geopark Talamau melalui pengembangan Geowisata
4. Legalisasi Pengembangan Kawasan Pariwisata dan potensi destinasi wisata Pasaman Barat setelah disahkannya Perda RIPPARDA
5. Menggali potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat
6. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017,

maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* OPD*,* memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* OPD*,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 4 (Empat) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp 5.466.015.258,- (Lima milyar empat ratus enam puluh enam ribu lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp 4.498.693.211-, (Empat milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah)

Anggaran Dinas Pariwisata tahun 2022 tersebar pada 4 (empat) bidang dan Sekretariat yang digunakan untuk membiayai 4 (Empat) program. Berikut rincian realisasi Empat program tersebut adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dengan pagu dana yang disiapkan Rp. 2.834.060.105,- dialokasikan untuk pembayaran gaji ASN

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran Rp. 2.502.060.685,- (88,28 %) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak ada permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 331.999.420,-

Solusi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di masa mendatang perlunya perencanaan yang matang dalam penyusunan anggaran untuk perhitugan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dengan pagu dana yang disiapkan Rp. 22.100.000 ,- dialokasikan untuk pembayaran belanja jasa THL

Realisasi

Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi anggaran Rp. 22.100.000 , - (100%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan inikarna kuangan dan fisik terealisasi 100%

b. PelaksanaanPenatausahaandan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp. 110.710.000,- dialokasikan untuk pembayaran honor pengelola keuangan

Realisasi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran Rp. 1 0 0 . 8 1 0 . 0 0 0 , - (91%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun masih terdapat sisa anggaran Rp 9.900.000

Solusi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di masa mendatang perlunya perencanaan yang matang dalam penyusunan anggaran.

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp.11.050.000,- alokasikan untuk pembayaran honor Tenaga Harian Lepas sebanyak 2 orang untuk melaksanakan administrasi dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pariwisata

Realisasi

Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Rp.11.050.000,-(100%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Dengan pagu dana Rp 4.800.000,- dialokasikan untuk pembayaran Honor Pengurus Barang dan honor Tenaga Harian Lepas sebanyak 1 orang untuk melaksanakan administrasi dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pariwisata.

Realisasi

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan realisasi anggaran Rp. 4.800.000,- (100%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena diperuntukkan untuk pembayaran Honor Pengurus Barang.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan pagu dana yang Rp 5 . 3 8 5 . 7 6 0 ,- dialokasikan untuk pembayaran alat alat listrik

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor dengan realisasi anggaran Rp. 5 . 3 8 5 . 7 6 0 ,- (100%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp. 33.482.200,- dialokasikan untuk pembayaran alat tulis kantor, benda pos, bahan computer, dll

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran Rp 33.478.300,- (99%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp24.025.000,- dialokasikan untuk pembayaran belanja cetak

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran Rp 24.010.250,- (99%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun terdapat sisa anggaran.

Solusi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dimasa mendatang perlunya perencanaan yang matang.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dengan pagu dana yang disiapkan Rp 203.557.550,- dialokasikan untuk pembayaran perjalan dinas dalam dan luar daerah serta Makan Minum Rapat

Realisasi

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran Rp 203.348.453,- (99 %) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp 51.411.080,- dialokasikan untuk pengadaan Laptop, komputer dan printer

Realisasi

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan realisasi anggaran Rp 50.059.000,- (99%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karna pengadaan terlaksanan dengan baik.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp 21.331.250,- dialokasikan untuk belanja tagihan air, listrik.

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran Rp 19.452.500,- (91 %) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun terdapat sisa anggaran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp 26.728.000,- dialokasikan untuk pembayaran belanja jasa kebersihan.

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran Rp 26.742.600,- (99,99 %) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp119.017.500,- dialokasikan untuk pembayaran Pajak kendaraan biaya pemeliharaan kendaraan dan Honor THL untuk sopir

Realisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran Rp 118.189.150,- (99 %) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun terdapat sisa anggaran.

Solusi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dimasa mendatang perlunya perencanaan yang matang.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu dana Rp 300.000.000 dialokasikan untuk pemeliharaan Gedung Kantor

Realisasi

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran Rp 277.593.650,- (93%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun terdapat sisa anggaran.

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Dengan pagu dana yang dianggarkan Rp 650.000.000,- dialokasikan untukpembuatan Dokumen Rencana Induk Geopark (RIG) pada Kawasan Geopark Talamau serta Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA)

Realisasi

Sub kegiatan ini terealisasi dengan anggaran Rp 189.798.750 (26%) dengan realisasi fisik kegiataan 60%.

Permasalahan

Pengadaan Dokumen RIPPARDA dan RIG batal dilaksanakan karna terkendala waktu penyusunan dokumen, karna lamanya waktu proses lelang di BLP.

Solusi

Untuk kelancaran proses penyusunan dokumen, sebaiknya dilaksanakan dari awal tahun perencanaan, sehingga waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk proses lelang di BLP sampai tersusunnya dokumen

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Dengan pagu dana yang dianggarkan Rp 213.729.863,- dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata di Pasaman Barat.

Realisasi

Sub kegiatan ini terealisasi dengan anggaran Rp 210.311.113 (98%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Pembangunan sarana prasarana berupa rambu peringatan di destinasi wisata sebanyak 6 unit dan pengadaan peralatan olahraga udara (paralayang) telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala

III. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri

Dengan pagu dana Rp 109.134.450,-dialokasikan untuk promosi pariwisata Pasaman Barat melalui media cetak dan elektronik serta peliputan event-event di tingkat Kabupaten dan Provinsi oleh Dispar Chanel

Realisasi

Sub Kegiatan ini terealisasi dengan realisasi anggaran Rp 108.653.250 (99%) Permasalahan Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun untuk kedepannya agar kegiatan promosi dapat ditingkatkan dengan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk promosi melalui media online dan peliputan langsung oleh kru Dispar Chanel

b. Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Dengan pagu anggaran Rp 428.358.700 dialokasikan untuk melaksanakan even-even pariwisata serta pengadaan peralatan kesenian untuk diserahkan ke sanggar-sanggar yang ada di Pasaman Barat. Realisasi anggaran Rp 398.913.650 (93%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Permasalahan

Tidak adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan karna even-even pariwisata telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2022 Dinas Pariwisata telah melaksanakan 5 even yaitu:

1) Pentas Seni dan Budaya Bulan Juni s/d September

2) Zero Waste Mountain Talamau Pada Agustus 2022

3) Lomba Antar Pelajar se Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Agustus 2022 pada agustus 2022

4) Pengibaran Bendera Merah Putih di Udara, sekaligus di Puncak Gunung Talamau dan Dasar laut Air Bangis Pada Agustus 2022

5) Fun Bike Adventure di Bukit Marando Pada Desember 2022

6) Kerjasama dengan Komunitas

a).SKIN

b).Motorcross

c).Camper Fun

e).Kopdar DFIN

IV. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan EkonomiKreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a. Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pagu dana Rp 155.639.000,-dialokasikan untuk pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata.

Realisasi

Realisasi anggaran Rp 151.585.450,- (97%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraaan PariwisataPagu dana Rp 183.590.750,-dialokasikan untuk pembinaan terhadap kelompok sadar wisata

Realisasi

Realisasi anggaran Rp 163.278.650,- (89%) dengan realisasi fisik kegiataan 100 %.

Bidang SDM Pariwisata mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan banyaknya pelatihan yang dilakukan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan

kelompok sadar wisata Pasaman Barat sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan terhadap ekonomi kreatif.

- Pelatihan kelompok Sadar wisata (Pokdarwis)

Pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama dengan Topik "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata se Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan di Puncak Galanggang. Pelatihan kedua dengan topik "Workshop Peningkatan Kapasitas Pokdarwis dalam Promosi Wisata berbasis digital se Kabupaten Pasaman Barat", yang dilaksanakan di Batang Kanian Nagari Rabijonggor. Masing masing kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta pada setiap pertemuan sebanyak 30 orang yang berasal dari Pokdarwis. Materi yang diberikan adalah peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk pengembangan Kepariwisataan. Narasumber berasal dari Propinsi yang merupakan pelaku usaha pariwisata Propinsi Sumatera Barat (Dewisnu), dan Perguruan tinggi yang terkait dengan kepariwisataan (UNP), Anggaran berasal dari APBD Dinas Pariwisata. Sampai dengan tahun 2022, sudah terbentuk 23 Pokdarwis yang ada di Pasaman Barat, 5 diantaranya dibentuk pada tahun 2022, 10 dibentuk pada tahun 2021 dan 8 terbentuk pada tahun 2020. Pasaman Barat mempunyai 76 Destinasi wisata, diharapkan seluruh destinasi dapat dikelola oleh pokdarwis,bekerjasama dengan nagari yang pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, entrepreneur baru seperti yang diharapkan.

- Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 kali :

1). Pelatihan untuk pelaku usaha ekonomi kreatif Pasaman Barat Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari pelaku ekonomi kreatif berbagai sub sektor, dilaksanakan selama 3 hari dan bertempat di Pulau Panjang (Air Bangis). Materi yang disampaikan pada pertemuan ini antara lain : membangun Branding, Pengemasan, Foto produk dll.

2). Workshop Pengembangan Produk Lokal (Lidi Sawit) berbasis inovasi pada sub sektor kriya. Banyaknya kebun sawit di Kabupaten Pasaman Barat, menjadikan Pasaman Barat kaya akan lidi Sawit, namun belum di Manfaatkan secara maksimal, untuk itu pada pelatihan ini pelaku ekonomi kreatif dilatih untuk

memanfaatkan lidi sawit menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomis. Kegiatan dilaksanakan di Kinali, dan peserta juga berasal dari nagari Kinali. Peserta berjumlah 30 orang, anggaran bersumber dari APBD Dinas Pariwisata. Berdasarkan informasi yang didapat pada Desember ini, produk yang dibuat sudah mendapatkan pasar yang baik, sehingga ada permintaan pelatihan serupa di Jorong Lubuak Landua. Diharapkan tersedia anggaran yang cukup untuk pelatihan pengembangan produk lokal seperti ini, mengingat masih banyak produk lokal yang belum termanfaatkan, seperti tongkol jagung dll.

3). Peningkatan Kapasitas pelaku usaha pariwisata di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Peserta pelatihan ini adalah pengelola rumah makan dan café yang ada di kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dengan tema Verifikasi Izin Berusaha Berbasis Risiko. Pada saat pelatihan ini pengelola rumah makan dan café yang berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie langsung mendaftarkan usahanya melalui aplikasi OSS, dan lulus verifikasi sebanyak 17 usaha. Bagi pengelola Usaha Pariwisata, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memudahkan mereka dalam pengurusan izin.

- Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Pasaman Barat

Pelatihan pengelolaan Desa Wisata, diikuti oleh Ketua Pokdarwis, Bamus, Ketua LKAAM, dan tokoh masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari. Kegiatan ini bertujuan agar Nagari, Bamus dan Pokdarwis bekerjasama untuk meningkatkan kepariwisataan di wilayahnya, sampai dengan cara membuat paket wisata. Dana berasal dari Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022. Seluruh Kegiatan yang sudah dilaksanakan dikoordinir oleh Pokdarwis setempat, sehingga pokdarwis mempunyai pengalaman dalam mengelola event/kegiatan karena Pokdarwis merupakan salah satu wadah untuk membentuk enterpreuner baru.

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinrja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		9 = 8/7 x 100%		10 = 8/5 x 100%		11 = 10/5 x 100%			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	Keuangan (%)		
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pariwisata**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**	**100%**	**19.087.402.804**	**100 %**	**2737.932.575**	**100%**	**3.634.848.445**	**100%**	**3.276.152.348**	**100%**	**3.276.152.348**	**100%**	**6.014.084.923**	**100**	**32**		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**16.202.809.912**	**100 %**	**2.267.192.178**	**100%**	**2.834.060.105**	**100%**	**2.502.060.685**	**100%**	**2.502.060.685**	**100%**	**4.769.252.863**	**100**	**29**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	17 Orang	15.241.597.840	18 orang	2.150.557.178	19 orang	2.701.250.105.	19 orang	2,150,557,178	19 orang	2.379.150.685	19 orang	**4.769.863**	100	**30**		
		Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	4 Orang	464.212..072	8 Orang THL	47.600.000	2 Orang THL	22.100.000	2 Orang THL	47,600,000	2 Orang THL	22.100.000	2 Orang THL	4.529.707.863	100	15		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	497.000.000	12 Bulan	69.035.000	12 Bulan	110.710.000	12 Bulan	69,035,000	12 Bulan	100.810.000	12 Bulan	69.700.000	100	34		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dispar**	430 Unit	268.500.000	**142 unit**	**39.800.000**	**438 unit**	**15.850.000**	**438**	**39,800,000**	**438 unit**	**15.850.000**	**438 unit**	169.845.000	100	21		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada Dinas Pariwisata	2 Orang	130.600.000	2 Orang THL	17.000.000	1 Orang THL	11.050.000	1 Orang THL	17,000,000	1 Orang THL	**11.050.000**	1 Orang THL	55.650.000	100	21		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Orang PNS dan 1 orang THL	137.900.000	1 Orang PNS (Pengurus Barang) 1 orang THL (Pembantu Pengurus Barang)	22.800.000	1 Orang PNS (Pengurus Barang) 1 orang THL (Pembantu Pengurus Barang)	4.800.000	1 Orang PNS (Pengurus Barang) 1 orang THL (Pembantu Pengurus Barang)	22,800,000	1 Orang PNS (Pengurus Barang) 1 orang THL (Pembantu Pengurus Barang)	**4.800.000**	1 Orang PNS (Pengurus Barang) 1 orang THL (Pembantu Pengurus Barang)	28.050.000	100	20		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.272.597.320**	**100 %**	**241.819.944**	**100%**	**266.450.510**	**100% 100%**		**100%**	**266.222.763**	**95**	**27.600.000**	**100**	**60**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	16.906.440	1 Paket	2.817.542	1 Paket	5.385.760	1 Paket	2,817,542	1 Paket	**5.385.760**	1 Paket	508.042.707				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	215.497.780	1 Paket	46.824.200	1 Paket	33.482.200	1 Paket	46,824,200	1 Paket	**33.478.300**	1 Paket	8.203.302				

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansidan map Dispar yang dibutuhkan	1 Paket	61.206.000	1 Paket	8.092.000	1 Paket	24.025.000	1 Paket	8,092,000	1 Paket	**24.010.250**	1 Paket	80.302.500				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah undangan rapat koordinasi dari pemerintah provinsidan pusat (K/L) yang diikuti 2. Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi	75 kali	978.987.100	1. 12 Kali 2. 12kali	184.086.202	1. 15 Kali 2. 15 kali	1. 15 Kali	100 2. 15 kali	184,086,202	100	**203.348.453**	1 paket	32.102.250				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan**	100%	**451.794.657**	7 Unit	46.246.926	100%	**51.411.080**	100%	46,246,926	100%	**50.059.000**	100%	**96.305.926**	**87**	**21**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronikpenunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	15 unit	**451.794.657**	7 Unit	46.246.926	7 Unit	**51.411.080**	7 Unit	46,246,926	7 Unit	50.059.000	7 Unit	**96.305.926**	87	**21**		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemenuhan penyediaanjasa layanan penunjang urusan**	100%	285.240.415	**100%**	**66.494.527**	**100%**	**48.059.250**	**100%**	**66,494,527**	**100%**	**46.177.100**	**100%**	112.671.627		40		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	60 Bulan	145.664.615	12 Bulan	40.565.327	12 Bulan	21.331.250	12 Bulan	40,565,327	12 Bulan	**19.452.500**	12 Bulan	60.017.827		41		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	10 Orang	139.575.800	2 Orang THL	25.929.200	2 Orang THL	26.728.000	2 Orang THL	25,929,200	2 Orang THL	**26.724.600**	2 Orang THL	52.653.800		38		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	100%	**606.460.000**	**12 unit**	**76.379.000**	**11 unit**	**419.017.500**	**11 unit**	**76,379,000**	**11 unit**	**395.782.800**	**11 unit**	**472.161.800**	54	**78**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajakdan KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	50 Unit 10 orang	497.130.000	1. 10 Unit (3 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) 2. 2 Orang THL	76.379.000	1. 11 Unit (4 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) 2. 2 Orang THL	119.017.500	1. 10 Unit (3 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) 2. 3 Orang THL	76,379,000	3. 11 Unit (4 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) 2 Orang THL	**118.189.150**	4. 11 Unit (4 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) 2 Orang THL	**194.568.150**		**39**		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	28 Unit	109.330.000	-	-	1 unit	300.000.000	1 unit	-	1 unit	**277.593.650**	1 unit	277.593.650				
2	**Meningkatnya Daya Tarik Destinasi dan Pemasaran Pariwisata**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)**	**5 DTW**	**4.596.595.400**	**6 Amenitas**	**678.816.918**	**2 DTW**	**954.443.913**	**2 DTW**	**678,816,918**	**2 DTW**	400.109.863	**2 DTW**	**1.078.926.781**	**85**	**23**		
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1 Kawasan Geopark	2.085.825.447	1 Kawasan	402.493.148	1 Kawasan Geopark	740.714.050	1 Kawasan geopark	402,493,148	1 Kawasan Geopark	189.798.750	1 Kawasan Geopark	**592.291.898**	100	**28**		
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan Geopark(Taman Bumi) yang ditetapkan	1 Kawasan	2.085.825.447	1 Kawasan	402.493.148	1 Kawasan	740.714.050	1 Kawasan	402,493,148	1 Kawasan	189.798.750	1 Kawasan	**592.291.898**	**100**	**28**		
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata	55 Unit	2.510.769.953	38 Unit	276.323.770	41 unit	**213.729.863**	42 Unit	276,323,770	41 unit	**210.311.113**	41 unit	**486.634.883**	**25**	**19**		
		Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yg dibangun di destinasi wisata	16 Unit	2.510.769.953	5 Unit	276.323.770	4 Unit	**213.729.863**	4 Unit	276,323,770	4 Unit	**210.311.113**	4 Unit	**486.634.883**	25	**19**		
3		**Program Pemasaran Pariwisata**	**1.Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2.PAD sektor pariwisata**		**1.335.653.288**	**4 Promosi**	**117.600.800**	**1.25.500 2.902.777**	**537.493.150**	1.61.256 2.140.497.750	**117,600,800**	**1.25.500 2.902.777**	**507.566.900**	**1.25.500**	**625.167.700**	**28**	**47**		

														0 0 2.902. 777					
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jenis media promosi (Website, Media Cetak dan Elektronik)	30 Promosi	**1.335.653.288**	4 Media	**117.600.800**	5 promosi	**537.493.150**	5 promosi	117,600,800	5 promosi	**507.566.900**	5 promosi	**625.167.700**	**16**	**47**		
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jenins media promosi (media cetak dan elktronik)	25 Media	1.077.653.288	1. 4 Media 2. 1 kali	**117.600.800**	4 media	109.134.450	4 media	117,600,800	4 media	**108.653.250**	4 media	**226.254.050**	16	**21**		
		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah even pariwisata dan atraksi kesenian pada destinasi wisata	14 kali	258.000.000	-	0%	5 kali	428.358.700	5 kali		5 kali	**398.913.650**	5 kali	**398.913.650**	35	**155**		
3	**Berkembangnya Industri Kreatif Daerah**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	Jumlah Pertumbuhan unit usaha ekonomi kreatif	28 %	**513.103.750**	4 IKM	89.293.200	15 %	**339.229.750**	**41 %**	**89,293,200**	15 %	**314.864.100**	41 %	**404.157.800**	**27**	**79**		
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan sumber daya manusia pariwisata yang handal	60%	**513.103.750**	2 kali	89.293.200	34 %	**339.229.750**	37 %	89,293,200	34 %	**314.864.100**	37 %	**404.157.800**	26.6	**79**		
		Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah pembinaan terhadap sub sektor ekonomi kreatif	29 kali	220.000.000	-	-	4 kali	155.639.000	4 kali		4 kali	**151.585.450**	4 kali	**3.000.000**	13	1		
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibina	20 Kelompok	293.103.750	5 Kelompok	89.293.200	8 Kelompok	183.590.750	8 Kelompok	89,293,200	8 Kelompok	**163.278.650**	8 Kelompok	**252.571.850**	40	**86**		
					25.532.754.742		**3.623.643.493**		**5.466.015.258**		**3,623,643,493**				**8.122.336.704**	**47.5**	**32**		

Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan serta 20 (dua puluh) sub kegiatan, dan besaran anggaran sesuai dengan APBD sebesar Rp 5.466,015.258,- (Lima milyar empat ratus enam puluh enam juta lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata, kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Adapun informasi yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dibawah 75% terdapat 1 yaitu sub kegiatan penetapan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diatas 75 %, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
   a. Administrasi keuangan perangkat daerah
   b. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
   c. Administrasi umum perangkat daerah
   d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   a. Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ Kota

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Faktor – faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pencapaian target OPD antara lain misalnya :

a. Terlambatnya pengesahan anggaran
b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang di tetapkan
c. Tidak sesuainya biaya belanja barang dengan yang telah direncanakan
d. Kenaikan indek harga satuan barang
e. Adanya kejadian luar biasa (seperti: bencana banjir, gempa bumi dst)
f. Atau faktor lainnya

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang di rencanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan, sasaran dan target indikator yang akan dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 dan target tahun 2024 sbb:

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,68	0,70	0,72	0,73	0,75	0,78	0,78
	1.Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	225.200	247.720	272.492	313.365	360.365	414.419	414.419
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,87	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8
	2.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	14%	15%	16%	17%	18%	20%	20%
2.Meningkatkan nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat		Cakupan Lembaga adat seni dan budaya yang dibina	61%	67%	72%	76%	82%	85%	85%
	3. Meningkatnya nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan nilai adat seni dan budaya	5	7	9	10	11	13	12
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata		Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3

		Persentase Penurunan Temuan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100 %	100%
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3
		Persentase Penurunan Temuan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100 %	100%

Tabel 2.1.4

Target Rencana Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Orang	247.720
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,2
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	%	15
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai	B
		Level Maturitas SPIP	Nilai	2
		Persentase Penurunan Temuan BPK	%	80 %

Realisasi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 untuk tingkat capaian tertinggi Pada indikator Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari target pengunjung sebanyak 247.720 orang dan terealisasi sebanyak 395.913 orang (159,82%). Kenaikan kunjungan ini terjadi karena telah dibukanya kembali lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Pasaman Barat setelah meredanya kasus Covid-19. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat juga telah berupaya melakukan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pasaman Barat, terutama kawasan Pohon Seribu Jorong Pondok di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Destinasi wisata potensial lainnya, seperti Pantai Sikabau juga telah berhasil menarik minat wisatawan lokal, terutama selama perayaan hari-hari besar keagamaan, perayaan tahun baru, dan hari libur lainnya.

Pada indikator kinerja Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif dari target 15% dan terealisasi menjadi 16,6%. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2022 Dinas Pariwisata telah melakukan pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif di Pasaman Barat, sehingga memiliki daya saing untuk memasarkan produk hasil dari pelaku usaha.

Indikator yang tidak mencapai target yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dimana dari target yang ditetapkan1,2%, terealisasi 0,207%. Total PAD yang diperoleh dari Hotel dan Rumah makan Rp 241.093.738 dari total PAD Kabupaten Pasaman Barat Rp 116.161.871.287,5,-. Penurunan bukan disebabkan karna rendahnya realisasi pajak dari sektor pariwisata (Hotel dan Rumah Makan), namun karena perbedaan perhitungan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Jadi pajak yang dipungut murni dari rumah makan/restoran.

Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.5 sebagai berikut :

Tabel 2.1.5
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	247.720 1,2%	395.913 0,27	159,82 % 17,3%	Sangat Baik Kurang
2	Persentase Peningkatan pertumbuhan unitusaha Ekonomi Kreatif	15 %	16,6 %	110,6 %	Sangat Baik
3	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	100 %	Sangat Baik
4	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %	Sangat Baik
5	Opini terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Baik

Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagaimana uraian pada Tabel 2.1.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 4 indikator;
- Terlaksana dengan prediket “kurang” sebanyak 1 indikator

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap program dan kegatan sektor pariwisata. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Pariwisata terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang pariwisata telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Dinas Pariwisata saat ini memang tidak dibebankan untuk memperoleh PAD, namun jika dilihat dari potensi Pariwisata Pasaman Barat yang memiliki banyak Destinasi Wisata yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor : 188.45/462/BUP.PASBAR/2022, diproyeksikan akan bisa memprolah PAD dari retribusi masuk objek wisata atau dari Pajak Hiburan. Destinasi wisata yang diperkirakan memiliki banyak jumlah kunjungan diantaranya Pohon Seribu dan Muaro Sasak, Sikabau dan Air Bangis, Pendakian Gunung Talamau, dan Wisata Religi Lubuak Landua. Perhitungan besaran Retribusi dan Pajak yang bisa diperoleh dari objek wisata berkaitan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung. Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisata sebanyak 272.492 wisatawan. Jika retribusi masuk objek wisata yang ditetapkan Rp 3.000 untuk dewasa dan Rp 1.500 untuk anak-anak maka diperkirakan retribusi yang akan diperoleh Rp 544.000.000. Jika pengelolaan wisata bekerjasama dengan Nagari dan Pokdarwis yang memungut retribusi, maka Pajak Hiburan 10% yang akan menjadi PAD diperkirakan sekitar Rp 54.400.000. Pajak sektor pariwisata lainnya yaitu Pajak Hotel dan Restaurant/Rumah Makan, saat ini telah menghasilkan PAD untuk Pasaman Barat yang pemungutannya langsung di kelola oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah. Tahun 2022 total PAD yang diperoleh adalah Rp. 241.093.738.

Tabel 2.2.1 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	Target Renstra Dinas Pariwisata				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		350.750	360.800	225.200	247.720	317.225	246.360	165.041	395.913	272.492	
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadapPAS				0,87%	1,2%			0,92%	0,207%	1,4%	
3	Persentase peningkatan pertumbuhanunit usaha ekonomi kreatif		9%	11%	14%	15%	9%	11%	15,%	16,6	16%	
4	Peningkatan nilai SAKIP		B	B	B	B	CC	B	B	B	B	
5	Level Maturitas SPIP		3	3	3	3	2	3	2	2	3	
6	Opini terhadap Laporan Keuangan/ Persentase penurunan temuan BPK		WTP	WTP	WTP	80%	WTP	WTP	75%	93%	85%	

2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kepariwisataan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategis dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Pasaman Barat itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah- daerah lain.
2. Lokasi objek wisata banyak berada di kawasan hutan lindung dan di kuasai oleh masyarakat. Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat belum dapat dikelola secara optimal, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta karena disebabkan objek wisata banyak berada di kawasan hutan lindung serta di kuasai oleh masyarakat.Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait serta sosialisasi kepada masyarakat.
3. Rendahnya Aksesibilitas Menuju ke Obyek Wisata. Secara umum kualitas jalan diKabupaten Pasaman Barat sudah baik,tetapi aksesibilitas menuju destinasi tertentu masih harus difokuskan lagi sehinga dibutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastuktur jalan menuju destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat .
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat. Dari 61 Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, yang tersentuh pembangunan sarana dan prasarana baru 17 destinasi wisata. Maka dapat di sampaikan bahwa lebih kurang 28 % yang baru tersentuh, dan untuk target pencapaian pembangunan sarana dan prasarana di butuhkan 72 % yang direncanakan lima tahun ke depan .
5. Belum terbina dan tertatanya usaha ekonomi kreatif di destinasi Kabupaten Pasaman Barat. Untuk meningkatkan pendapatan (income) masyarakat

dikawasan wisata dapat diakukan dengan melaksanakan pembinaan masyarakat setempat untuk mengelola dan menata kegiatan usaha ekonomi kreatif , sehinga lima tahun kedepan diharapkan tercapainya target PAD Kabupaten Pasaman Barat.

6. Kurangnya dokumen dalam pengambilan kebijakan sebagai arahan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat. Perlu penataan kelengkapan dokumentasi, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisataan Pasaman Barat.Serta harus ada pelatihan kepada stakeholder kepariwisataan untuk kegitan penataan dan pengembangan destinasi.
7. Rendahnya Daya Saing Usaha Kepariwisataan. Daya saing usaha pariwisata Kabupaten Pasaman Barat rendah, hal ini menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata, Promosi dan pemasaran. Sehingga memberikan implikasi pada pengeluaran wisatawan (tourist expenditure) di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menyediakan lebih banyak event atau atraksi pariwisata akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
8. Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata. Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ternyata banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal dalam penyajiannya.
9. Kurangnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi Diantara OPD Terkait. Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan untuk mewujudkan percepatan dalam penyusunan Program (Program bersama) bidang kepariwisataan antar OPD Kabupaten Pasaman Barat. Dalam Meningatkan pembinaan sarana prasarana objek wisata dibutkan kerja sama antar SKPD dan diawasi oleh tim percepatan pembangunan destinasi wisata yang dibentuk oleh Pemda
10. Pengembangan Kawasan Geopark Talamau yang saat ini sudah menjadi program unggulan di Provinsi Sumatera Barat, membutuhkan dukungan bersama agar bisa ditetapkan menjadi situs nasional bahkan internasional (UNESCO)

11. Peran Pelaku Budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup tinggi . inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.
12. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun dan menghasilkan seni dan karya budaya.
13. Pelestarian Warisan Budaya Belum Efektif Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dalam melindungi kekayaan warisan budaya.
14. Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, (1) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya indonesia sehingga representasi budaya indonesia diluar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan indonesia masih terbatas; (2) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promisi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa.
15. Pengembangan Sumber daya Kebudayaan belum Maksimal Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain, (1) terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang diyunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola dibidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

2.1. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2023 APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp 5.306.489.383 yang terdiri dari 1) Belanja Operasi Rp 4.536.389.383,- 2) Belanja

Modal Rp 770.100.000,- Artinya, struktur Dinas Pariwisata APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 akan didominasi oleh Belanja Operasi. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

OPD : Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	PASBAR	**Terpenuhinya lembaga adat, seni dan budaya yang dibina dalam masyarakat**	**78%**	**28.762.500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	PASBAR	**Terpenuhinya lembaga adat, seni dan budaya yang dibina dalam masyarakat**	**78%**	**125.000.000**	
1.	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisoonal yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota**	PASBAR	**Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina**	**55 Lembaga**	**28.762.500**	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kab/Kota**	PASBAR	**Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina**	**55 Lembaga**	**125.000.000**	
1.1	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	PASBAR	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	4 Objek	28.762.500	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	PASBAR	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	4 Objek	125.000.000	

II	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	PASBAR	**% seni dan budaya yang dilestarikan**	**60%**	**513.283.950**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	PASBAR	**% seni dan budaya yang dilestarikan**	**50%**	**110.000.000**	
1.	**KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PASBAR	**Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan**	**3 Tradisi**	**513.283.950**	**KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PASBAR	**Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan**	**3 Tradisi**	**110.000.000**	
1.1	SUB KEGIATAN Penetapan Cagar Budaya	PASBAR	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	5 Objek	513.283.950	SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	PASBAR	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	**3 Lembaga**	110.000.000	
III	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	PASBAR	**Sejarah lokal yang terdokumentasi**	**5 Dokumentasi**	0	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	PASBAR	**Sejarah lokal yang terdokumentasi**	**5 Dokumentasi**	175.000.000	
1.	**KEGIATAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PASBAR	**Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasi**	**5 Dokumentasi**	0	**KEGIATAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PASBAR	**Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasi**	**5 Dokumentasi**	175.000.000	

1.1	SUB KEGIATAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH	PASBAR	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	3 Dokumen	0	SUB KEGIATAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH	PASBAR	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	3 Dokumen	175.000.000	
IV.	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	PASBAR	**% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilstarikan**	**72%**	**40.499.550**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	PASBAR	**% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilstarikan**	**72%**	125.000.000	
1.	**KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN /KOTA**	PASBAR	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**9 Cagar**	**40.499.550**	**KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**	PASBAR	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**9 Cagar**	125.000.000	
1.1	SUB KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA Peringkat Kab/Kota	PASBAR	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	9 Cagar	40.499.550	SUB KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA	PASBAR	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	5 Objek	125.000.000	
V	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	PASBAR	**Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya**	**3 DTW**	**5.690.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	PASBAR	**Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya**	**3 DTW**	2.370.000.000	

1.	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**	PASBAR	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola**	**2 Destiasi**	**5.690.000**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**	PASBAR	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola**	**2 Destiasi**	**550.000.000**	
1.1	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	PASBAR	Jumlah Dokumen perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	4 Dokumen	5.690.000	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	4 Dokumen	**550.000.000**	
2.	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**PASBAR**	**Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola**	**1 kawasan Geopark**	**8.950.000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**PASBAR**	**Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola**	**1 kawasan Geopark**	**600,000,000**	
2.1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.950.000	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250,000,000	
2.2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	PASBAR	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	
3.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**	PASBAR	**Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata**	**47 unit**	**45.602.250**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	PASBAR	**Jumlah sarana dan prasarana yg telah dibangun di destinasi wisata**	**47 unit**	**1.000.000.000**	

3.1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 unit	45.602.250	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 unit	850.000.000	
3.2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	PASBAR	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	2 Laporan	14.900.000	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	PASBAR	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	2 Laporan	150.000.000	
4.	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**PASBAR**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah terstandarisasi**	**4 TDUP**	**4.052.500**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**PASBAR**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah terstandarisasi**	**4 TDUP**	**220.000.000**	
4.1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	80.000.000	

4.2	*Pembinaan dan Pengawasa untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan standar usaha resiko menengah rendah di Kab/Kota*	PASBAR	Jumlah usaha uang dibina dan diawasi	3 Usaha	0	*Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata*	PASBAR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwis	3 Laporan	75.000.000	
4.3	*Penyediaan layanan konsultasi pendaftaran perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata di tingkat Kab/Kota*	PASBAR	Jumlah dokumen layanan fasilitasi konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata di tingkat Kab/Kota	2 Dokumen	0	*Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata*	PASBAR	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	65.000.000	
4.4	*Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kab/Kota*	PASBAR	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	5 Laporan	4.052.500						
VI	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	PASBAR	**1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata**	**1.41.600 2. Rp 1.067.592.414**	**99.317.250**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	PASBAR	**3. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 1. PAD Sektor Pariwisata**	**1.41.600 2. Rp 1.067.592.414**	**415.000.000**	
1.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab**	PASBAR	**Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik**	**6 promosi**	99.317.250	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab**	PASBAR	**Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik**	**6 promosi**	**415.000.000**	

1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	39.476.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	175.000.000	
1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	37.765.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PASBAR	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	80,000,000	
1.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger	1 Dokumen	22.076.250	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger	1 Dokumen	60,000,000	
1.4	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dam Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dam Luar Negeri	PASBAR	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	55.000.000	
1.5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PASBAR	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PASBAR	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	45.000.000	

VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	PASBAR	**Persentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif**	**17%**	**76.624.500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	PASBAR	**Persentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif**	**17%**	**610.000.000**	
1.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	PASBAR	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang handal**	**22%**	**34.244.500**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	PASBAR	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang handal**	**22%**	**515.000.000**	
1.1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	15 Orang	0	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PASBAR	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20 Orang	90,000,000	
1.2	Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	PASBAR	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	22 Orang	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisa	22 Orang	80.000.000	
1.3	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	30 Orang	42.380.000	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa/siswa)	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Sisw	25 Orang	75,000,000	

1.4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagiTenaga Kerja bidang Pariwisata	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	34.244.500	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	125.000.000	
1.5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 laporan	0	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 laporan	70,000,000	
1.6	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	PASBAR	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati	15 Orang	0	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	PASBAR	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati	15 Orang	75.000.000	
2.	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	PASBAR	**Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki lisensi**	**25%**	**42.380.000**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	PASBAR	**Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki lisensi**	**25%**	**95,000,000**	
1.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	42.380.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PASBAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	95,000,000	

VIII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	DISPAR	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**3.336.383.330**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA**	DISPAR	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerag**	**100%**	**4.007.623.47 8**	DISPAR
1.	**Perencanaa npenganggg aran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	DISPAR	**Jumlah dokume n perenca an pengang garan yang disusun**	**6 Dokume n**	**57.481.000**	**Perencanaanpeng anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	DISPAR	**Jumlah dokumen perencaa n penganggg aran yang disusun**	**6 Dokume n**	**90.000.000**	DISPAR
	Penyusuna n dokumen perencanaa n perangkat daerah	DISPAR	Jumlah dokume n perenca naan perangk at daerah	6 Dokumen	32.658.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DISPAR	Jumlah dokumen perencana an perangkat daerah	6 Dokumen	50.000.00	DISPAR
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	DISPAR	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangk at daerah	2 Laporan	24.825.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	DISPAR	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	40.000.000	DISPAR
2.	**Administra si Keuangan Perangkat Daerah**	DISPAR	**Persent ase realisasi keuanga n**	**100%**	**2.869.411.4 85**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DISPAR	**Persentas e realisasi keuangan**	**100%**	**2.788.400.97 8**	DISPAR
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPAR	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	2,774.721.48 5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPAR	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	2,788.400.978	DISPAR
1.2	Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN	DISPAR	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	11.050.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN	DISPAR	Jumlah Dokmen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	45.900.000	DISPAR

1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	83.640.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	109.122.500	DISPAR
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	DISPAR	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata**	**438 Unit**	**26.050.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	DISPAR	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata**	**438 Unit**	**45.750.000**	DISPAR
1.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISPAR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.050.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISPAR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22,100,000	DISPAR
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPAR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPAR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	23.650.000	DISPAR
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DISPAR	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian**	**100%**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DISPAR	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian**	**100%**	**145,000,000**	DISPAR
1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISPAR	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISPAR	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	85.000.0000	DISPAR

1.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISPAR	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangn	5 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISPAR	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangn	5 Orang	60,000,000	DISPAR
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DISPAR	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**181.394.695**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DISPAR	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**286.950.000**	DISPAR
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISPAR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISPAR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.750.000	DISPAR
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.042.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.000.000	
1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	DISPAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISPAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.200.000	
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	25 laporan	124.752.195	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	25 laporan	175.000.000	

6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DISPAR	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan kantor**	**100%**	**32.848.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DISPAR	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan kantor**	**100%**	**75,000,000**	
1.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISPAR	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	32.848.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISPAR	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	75.000,000	
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	DISPAR	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**34.543.150**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DISPAR	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**41.000.000**	
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	20,493.150	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	20,500,000	
1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.050.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.500.000	
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DISPAR	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**134.655.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DISPAR	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor**	**100%**	**380.500.000**	

1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	108.555.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	80,500,000	
1.2	Pemeliharaan/ R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.100.000	Pemeliharaan/R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	

2.1. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Dinas Pariwisata Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Pariwisata

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	N I H I L					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke-3 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pariwisata, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas pariwisata Kab. Pasaman Barat Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 7 program dan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp 4.174.065.830,-** (Empat milyar Seratus Tujuh Puluh Empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PARIWISATAKAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pariwisata						4.174.065.830,00							8.462.300.978,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						582.546.000,00							595.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						582.546.000,00							595.000.000,00	
1	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terpenuhinya lembaga adat, seni dan budaya	88%			78 %	28.762.500,00						88%	145.000.000,00	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina	-			55 Lembaga adat seni dan budaya	28.762.500,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	145.000.000,00	
	2	22	02	2.0	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	28.762.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		145.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	% seni dan budaya yang dilestarikan % seni dan budaya yang dilestarikan	60%			50 % 50 %	513.283.950,00						60%	130.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan	3Tradisi (Minang,Jawa,Mandailing)			3 Tradisi (Minang, Jawa,Mandailing)	513.283.950,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	3Tradisi (Minang,Jawa,Mandailing)	130.000.000,00	
	2	22	03	2.0	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga			3 Lembaga	513.283.950,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	5 Lembaga	130.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN	Sejarah lokal yang terdokumentasi	10Dokumen			5 Dokume	0,00						10Dokumen	185.000.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasi	10Dokumentasi			5 Dokumentasi	0,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	10Dokumentasi	185.000.000,00	

0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	15 Dokumen			3 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	2 Dokumen	185.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN	% Benda, Situs dan Kawasan	75%			72 %	40.499.550,00						75%	135.000.000,00	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	30Cagar			9 Cagar	40.499.550,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	30Cagar	135.000.000,00	
0002	Penetapan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek			5 Objek	40.499.550,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	2 Objek	135.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.591.519.830,00							7.867.300.978,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.591.519.830,00							7.692.300.978,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan penunjang urusan	100%			100 %	3.336.383.330,00						100%	4.172.300.978,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun	6Dokumen			6 Dokumen	57.481.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	6Dokumen	110.000.000,00	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	32.656.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel	-	6 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			2 Laporan	24.825.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%			100 %	2.869.411.485,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	100%	2.949.400.978,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan			23 Orang/bulan	2.774.721.485,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	23 Orang/bulan	2.788.400.978,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen			1 Dokumen	11.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	1 Dokumen	46.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	83.640.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	1 Dokumen	115.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata	438Unit			438 Unit	26.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan	-	438Unit	46.650.000,00	

	3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	11.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	1 Dokumen	23.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	1 Laporan	23.650.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%			100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	100%	165.000.000,00	
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket			1 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan	-	1 Paket	95.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang			5 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel	-	12 Orang	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			100 %	181.394.695,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	100%	298.250.000,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	5.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Paket	5.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	51.042.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Paket	96.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Paket	11.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan			25 Laporan	124.752.195,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	22 Laporan	185.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%			100 %	32.848.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan	-	100%	75.000.000,00	

	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit			10 Unit	32.848.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	15 Unit	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%			100 %	34.543.150,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	100%	43.000.000,00	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	20.493.150,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penanggulangan kemiskinan dan	-	1 Laporan	21.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	14.050.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Laporan	22.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%			100 %	134.655.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	100%	485.000.000,00	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit			11 Unit	108.555.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan	-	11 Unit	85.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	26.100.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Unit	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
6	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	5DTW			3 DTW	79.194.750,00						5DTW	2.565.000.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	12Destinasi			2 Destinasi	5.690.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1Destinasi	600.000.000,00	
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	8 Dokumen			4 Dokumen	5.690.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan	-	2 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1Kawasan Geopark			1 kawasan geopark	8.950.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1Kawasan Geopark	600.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen			1 Dokumen	8.950.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	0 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang telah dibangun di destinasi wisata	53Unit			47 Unit	60.502.250,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggula	-	53Unit	1.110.000.000,00	

	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	16 Unit			4 Unit	45.602.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	4 Unit	950.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Laporan			2 Laporan	14.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	3 Laporan	160.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah terstandarisasi	6TDUP			4 TDUP	4.052.500,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	6TDUP	255.000.000,00	
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota															
							Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	30 Laporan			3 Usaha	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisat	-	10 Laporan	95.000.000,00	DINAS PARIWISATA

3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota														
						Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	60 Dokumen			2 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	20 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	4 Unit Usaha			5 Laporan	4.052.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	4 Unit Usaha	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Jumlah Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan 2. PAD sektor pariwisata	51.500 /1150000000Wisatawan/PAD			41.600 dan 1.067.592.414 orang dan Rp	99.317.250,00						51.500 /1150000000Wisatawan/PAD	470.000.000,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	5Promosi			6 promosi	99.317.250,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	5Promosi	470.000.000,00	

	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen			1 Dokumen	22.076.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen			1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3 Dokumen			2 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	5 Laporan			1 Kegiatan	37.765.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya	-	1 Laporan	90.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen			1 Promosi	39.476.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	1 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
8	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	% Kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	20%			17 %	76.624.500,00							20%	485.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	60%			22 %	34.244.500,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	60%	390.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	15 Laporan			4 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	3 Laporan	85.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	45 Orang			15 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	15 Orang	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	174 Orang			22 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	30 Orang	85.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	58 Orang			10 Orang	34.244.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	12 Orang	140.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki lisensi	50%			25 %	42.380.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisat	-	50%	95.000.000,00	

	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	15 Orang			30 Orang	42.380.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	5 Orang	95.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	-				-						0,00							175.000.000,00	
9	3	-	-			-	-	-			-	0,00						-	175.000.000,00	
	3	-	-	-		-	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	-	175.000.000,00	
	3	-	-	-	-	-															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	114 Orang			25 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	22 Orang	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA

	3	-	-	-	-	-														
							Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	74 Orang			20 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemisikinan ekstrem	-	15 Orang	95.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	JUMLAH											**4.174.065.830,00**							**8.462.300.978,00**	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, Juli 2023
Kepala Dinas

DECKY HARMIKO SAPUTRA, SH
NIP. 19791207 200312 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat menyusun Renja tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai

dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyusun Renja tahun 2024, didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan integrasi program kegiatan yang bersumber dari operasionalisasi program kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang juga diselaraskan dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021- 2026.
2. Prioritas terkait pembangunan pertanian dalam RKPD tahun 2024.
3. Review hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yang dapat menjadi acuan program kegiatan yang akan ditambahkan atau dilanjutkan untuk tahun 2024.
4. Input hasil Diskusi Kelompok Terbatas Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan hasil Musrenbang sebagai salah satu rangkaian proses dalam penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2024.
5. Beberapa isu yang berkembang baik pada skala nasional, provinsi ataupun daerah yang perlu diadopsi dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2024.

Berikut gambar yang menyajikan Bagan Alir Proses Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

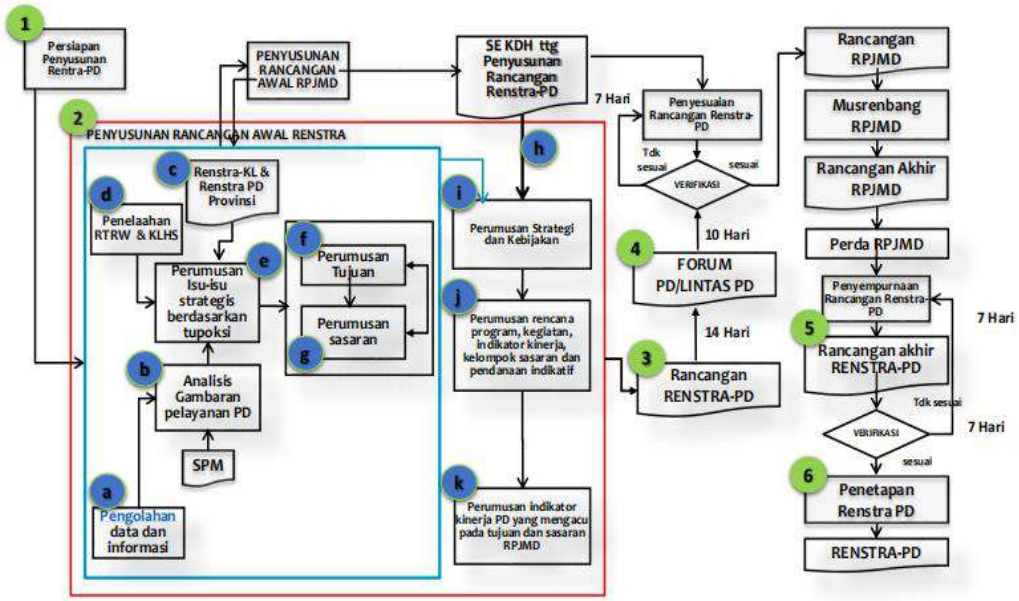

Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat harus berpedoman kepada Renstra maupun RKPD. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada Bab IV Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.

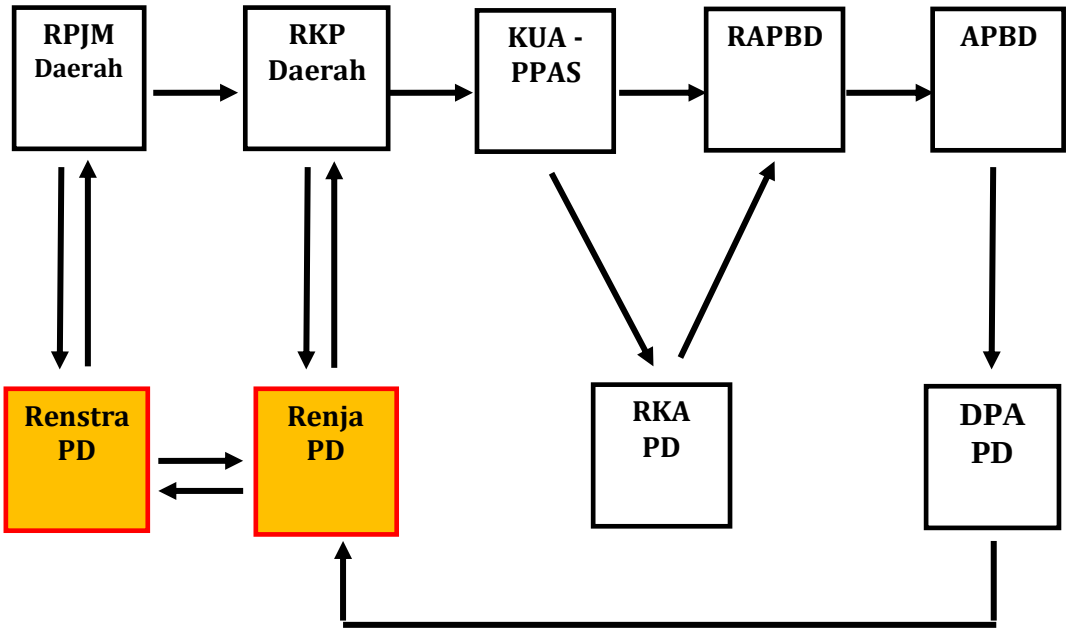

Gambar 1.2
Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi Strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga semua *stakeholder* dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat di bidang Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Perubahan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perubahan Nomenklatur terjadi karena Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan mengampu 3 sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sementara Dinas Perkebunan hanya mengampu 1 sub sektor yaitu perkebunan oleh karena itu dilakukan perubahan struktur organisasi sehingga proporsional beban kerja Perangkat Daerah seimbang. Mulai tahun 2023 kewenangan peternakan pindah ke Dinas Perkebunan dan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan Provinsi.

Selanjutnya, Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Renja Perangkat Daerah04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK 07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/212/ BUP-PASBAR/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana Pertanian, Penyuluh Pertanian.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 : *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 : *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

: *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang

1.3 maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

: *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan
1.4 dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 : *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra* Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 : *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 : *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daera*h, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 : *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 : *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 : *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 : *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 : *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 14 (Empat belas) Kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada umumnya realisasi program/kegiatan sudah mencapai target Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi padi pada tahun 2022 tidak mencapai terget hal disebabkan karena adanya luas baku sawah yang menurun dari 9.157 Ha menjadi 8.873 Ha selain itu terjadi alih fungsi lahan dari sawah ke komoditi lain misalnya di Kecamatan Kinali karena kurangnya pasokan air untuk sementara lahan sawah ditanami tanaman hortikultura.

Untuk komoditi jagung pada tahun 2022 produksinya sedikit menurun terdapat integrasi dengan sawit yang umurnya kurang dari 2 tahun. Namun jika sawit sudah berumur 2 tahun maka tidak bisa lagi ditanami jagung. Selain itu benih tidak tersedia dan pupuk mahal.

Produksi cabe tahun 2022 jauh dari target hal ini disebabkan iklim yang ekstrim seperti di Luhak Nan Duo hasil kurang maksimal, terjadi banjir di Ranah Batahan. Selain itu petani banyak yang menggunakan bibit turunan varietas lokal sehingga rentan terserang hama penyakit (antraknus dan layu fusarium).

Dapat diambil kesimpulan bahwa dari realisasi capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan interval nilai realisasi kinerja dikategorikan tinggi dengan nilai 87%.

TABEL 2.2.(TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026		RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				(Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahunn-1) (AKUMULASI 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				128.096.101.917		14.530.617.490		17.044.845.612		16.760.958.051		28.729.264.805		53.961.855.304		42,13
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) komoditas:		48.648.633.500		1.333.987.010		1.654.230.500		1.035.273.380				3.920.498.795		8,06
		Padi	126.007		109.883		117.343		95.753	-	119.980		119.980	-	95,22	
		Jagung	299.752		271.047		283.005		222.855	-	287.556		287.556	-	95,93	
		Cabai	9.828		9.591		9.648		5.223	-	9.693		9.693	-	98,63	
		Jeruk	10.420		14.579		9.888		7.027	-	9.892		9.892	-	94,93	
		Alpukat	5.396		17.141		3.396		12.618	-	3.896		3.896	-	72,20	
		Padi	4,90		4,8		4,70		4,8	-	4,75		4,8	-	97,96	
		Persentase ketersediaan bibit ternak (%)	31		26%		27%		27	-			27%	-	0,87	

		Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak (%)	45		15%		20%		20	-			20%	-	0,44	
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	212	17.979.280.000	119	296.737.141	30	235.500.000	30	870.224.780	35	1.511.336.725	35	2.768.298.646	16,51	15,40
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian	12	11.813.730.000	12	93.108.000	12	90.000.000	25	600.644.850	12	1.274.463.985	12	2.058.216.835	70,00	17,42
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12	6.165.550.000	12	203.629.141	12	145.500.000	25	269.579.930	12	236.872.740	12	710.081.811	70,00	11,52
	2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah benih unggul bersertifikat (ton)	30	6.115.155.000	5	67.867.150	5	48.730.500	-	62.920.200	5	6.185.034.130	5	247.297.030	16,67	4,04
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan (Varietas)	4	3.040.400.000	3	43.210.000	3	31.000.000	67	33.398.000	4	39.901.680	4	116.509.680	100,00	3,83

	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya	4	3.074.755.000	3	24.657.150	3	17.730.500	67	29.522.200	2	-	2	54.179.350	0,00	1,76
	3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan produksi ternak (ton)	10.230	24.554.198.500	1.690	969.382.719	1690	1.370.000.000	-	102.128.400		-		189.369.300	0,00	0,77
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota	1. Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat	8.576	24.554.198.500	1.414	969.382.719	1.420	1.370.000.000	-	102.128.400		-		1.071.511.119	0,00	4,36
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	1. JUT: 50 Km 2. Dam parit:35 unit 3. JITUT ; 100 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	4.145.384.000	1. JUT: 9 Km 2. Dam parit: 2 unit 3. JITUT ; 22 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	2.414.920.250	1. JUT: 10 Km 2. Dam parit:15 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	3.699.131.750	-	1.904.488.154	1. JUT: 7 Km 2. Dam parit:15 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	5.845.089.750	1. JUT: 7 Km 2. Dam parit:15 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	10.164.498.154	1.95% 2. 63% 3. 35% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100%	245,20

	1. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	0,6	1.786.700.000	0,2%	56.236.250	0,2%	136.400.000	-	131.607.306	0,2%	441.137.200	0,2%	628.980.756	0,33	35,20
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan	Jumlah dokumen yang disusun	1	1.500.000.000			1	50.000.000	-	40.292.071	1 dokumen	375.000.000	1	415.292.071	100,00	27,69
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	12	1.786.700.000	12	56.236.250	12	86.400.000	25	91.315.235	12 bulan	66.137.200	12	213.688.685	100,00	11,96
	2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	120	2.358.684.000	20	2.358.684.000	20	3.562.731.750	10	1.772.880.848	20 paket	5.403.952.550	20	9.535.517.398	16,67	404,27
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab (Ha)	100	2.530.000.000	2	378.274.000	20	419.710.550	-	483.910.000	20 Km	1.316.632.500	20	2.178.816.500	20,00	86,12

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun (Km)	25	6.940.473.281	9	1.735.010.000	5	200.000.000	-	74.924.000	7 Km	3.937.320.050	7	5.747.254.050	28,00	82,81
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara	11	6.650.000.000	-	-	3	1.869.912.300	-	-	11 BPP	11 BPP	11	-	100,00	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/dipelihara	11	6.956.722.500	-	-	3	1.073.108.900	-	1.214.046.848	15 unit	150.000.000	15 unit	1.364.046.848	2,35	19,61
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	3.773.259.125	55%	496.995.870	85%	515.966.500,0	47	563.872.314		4.037.185.975	55%	1.060.868.184	39,46	28,12
		Sapi	22.521		19.929		20.793		20.781	-			19.929	-	88,49	
		Kambing	16.138		14.056		14.750		14.801	-			14.056	-	87,10	
		Unggas	807.334		735.334		749.743		1.263.632	-			735.334	-	91,08	

	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) (bulan)	12	725.234.625	12,0	147.473.620	12,0	89.220.500,0	25	189.644.350		-	9,0	337.117.970	75,00	46,48
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit (kejadian)	5.261	725.234.625	5.261,0	147.473.620	5.261,0	89.220.500	40	189.644.350		-	4 THL 5.261 kejadian	337.117.970	39,99	46,48
	2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner	11,0	3.048.024.500	11,0	349.522.250	11,0	426.746.000	100	374.227.964		-	11,0	723.750.214	41,53	23,74
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan hewan	2	3.048.024.500	2	349.522.250	2	426.746.000	100	374.227.964		-		723.750.214	41,53	23,74
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		NA	-	55 THL 101 orang	-	NA	-	-	-	50 orang	-	55 THL 101 orang	-		

	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih	1. 5% 2.5%	19.051.428.357	1. 1% 2.1 %	1.967.582.892	1. 1% 2.1 %	2.880.065.000	-	4.696.692.968	1. 1% 2.1 %	1.725.726.610	1. 1% 2.1 %	8.390.002.470		44,04
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	11	19.051.428.357	11,0	1.967.582.892	11,0	2.880.065.000	11	4.696.692.968	11 BPP	1.725.726.610	11 BPP	8.390.002.470	50,00	44,04
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek	101,0	12.226.004.572	38,0	680.236.200	101,0	786.020.000	10	763.259.000	101 orang	1.319.838.280	55 THL 38 orang	2.763.333.480	50,00	22,60
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan	100,0	4.911.886.251	113,0	1.176.186.692	100,0	1.890.945.000	20	2.031.022.320	100 kelompok	100 kelompok	113 kelompok 13 THL	3.207.209.012	45,00	65,29
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	12	1.913.537.534	12,0	111.160.000	12,0	203.100.000	25	1.902.411.648	12 bulan	405.888.330	12 bulan 17 THL	2.419.459.978	70,00	126,44

	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional**	100%	52.477.396.935	100%	8.317.131.468	100%	8.295.451.862	25	8.560.631.235	100%	17.121.262.470	100%	30.425.987.701	75,00	57,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	320.138.000	100%	45.888.000	100%	48.840.000	2.000	53.517.800	100%	48.304.800	100%	147.710.600	75,00	46,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2021;	42	320.138.000	7,00	45.888.000	7	48.840.000	57	53.517.800	7 Dokumen	48.304.800	7,00	147.710.600	75,00	46,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	46.511.146.555	100%	7.727.712.679	100%	7.747.032.902	3.000	7.768.227.862	2 Dokumen	6.502.018.690	100%	21.997.959.231	46,75	47,30

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	79	45.422.898.555	79,00	7.569.932.679	79	7.547.272.902	100	7.562.492.862	100%	6.274.895.890	79 PNS	21.407.321.431	46,90	47,13
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	7	497.800.000	7,00	72.600.000	7	101.660.000	100	93.985.000	79 PNS	77.047.800	7 orang	243.632.800	38,79	48,94
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12	590.448.000	12,00	85.180.000	12	98.100.000	25	111.750.000	7 orang	150.075.000	12 bulan	347.005.000	42,79	58,77
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	1.315	452.850.000	1.315,00	51.872.000	1.315	55.210.000	-	65.545.000	12 Bulan	36.417.400	1.315 unit	153.834.400	44,99	33,97
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan	3	316.050.000	3,00	35.372.000	3	41.120.000	100	48.770.000	1.315 unit	23.160.000	3 THL	107.302.000	51,90	33,95
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	2	136.800.000	2,00	16.500.000	2	14.090.000	100	16.775.000	3 THL	13.257.400	2 ASN	46.532.400	24,84	34,01

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	48	166.228.000	48,00	11.208.150	48	8.412.000	17	25.004.000	2 ASN	174.442.000	48 orang	210.654.150	99,80	126,73
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya	44	85.826.500	-	824.000	-	-	-	-	48 orang	-	0 orang	824.000		0,96
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	24	80.401.500	4,00	10.384.150	24	8.412.000	33	25.004.000	225 ASN	55.582.100	4 orang	90.970.250	99,80	113,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	1.242.140.800	1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	187.419.650	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	192.541.960	1. 50% 2. 0% 3. 50%	290.093.989	44 orang	269.325.870	1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	746.839.509	36,22	60,13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1	16.450.000	1,00	1.950.000	1	8.742.000	50	6.292.000	4 orang	2.063.370	1 Paket	10.305.370	-	62,65

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan (paket)	1	461.127.800	1,00	76.110.600	1	52.292.960	50	102.302.900	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	84.000.300	1 Paket	262.413.800	50,30	56,91
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumahtangga (paket)	1	41.007.500	1,00	5.994.500	1	2.149.000	50	3.159.000	1 Paket	23.711.050	1 Paket	32.864.550	54,63	80,14
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan (paket)	1	155.295.500	1,00	25.295.500	1	13.060.000	50	15.250.000	1 Paket	15.530.000	1 Paket	56.075.500	39,43	36,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12	568.260.000	12,00	78.069.050	12	116.298.000	25	163.090.089	1 Paket	144.021.150	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	385.180.289	31,92	67,78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	77	341.678.380	2,00	12.678.380			-	20.150.000	1 Paket	341.678.380	2 Unit	374.506.760		109,61

	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	63	125.000.000	-	-			-	-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	125.000.000	-	125.000.000		100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran(unit)	12	124.678.380	2,00	12.678.380			-	20.150.000	4 Unit	-	2 Unit	32.828.380		26,33
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (paket)	6	92.000.000	-	-			-	-	2 Unit	92.000.000	-	92.000.000		100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	649.536.000	100%	75.846.478	100%	106.040.000	3.000	70.315.541	2 Unit	111.207.430	100%	257.369.449	26,42	39,62

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12	465.436.000	12,00	58.846.478	12	79.180.000	25	56.040.541	1 paket	75.394.100	12 Bulan	190.281.119	27,94	40,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor	1	184.100.000	1	17.000.000	1	26.860.000	50	14.275.000	100%	35.813.330	3 THL 1 Paket	67.088.330	21,97	36,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	166	2.793.679.200	166	204.506.131	166	137.375.000	48	267.777.043	12 Bulan	314.730.750	166 Unit	787.013.924	41,81	28,17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	74	598.550.000	74	108.550.000	74	94.900.000	47	97.300.000	2 THL 1 Paket	146.100.000	74 unit 3 THL	351.950.000	45,89	58,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	74	401.795.000	4,00	62.527.131	74	33.955.000	43	110.917.043	166 Unit	105.820.750	74 unit	279.264.924	29,04	69,50

	Lapangan															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan (unit)	2	254.120.000	-	-			-	-	74 unit 3 THL	-	-	-		0,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan (unit)	90	95.000.000	-	-		-	-	-	74 unit	-	-	-		0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	30	86.560.000	30,00	12.525.000	30	8.520.000	67	21.620.000	2 unit	23.130.000	30 unit	57.275.000	47,18	66,17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi	6	271.053.800	1,00	20.904.000			-	37.940.000	30 unit	39.680.000	1 paket	98.524.000		36,35
		TOTAL		**128.096.101.917**		**14.530.617.490**		**17.044.845.612**	**0**	**16.760.958.051**		**28.729.264.805**		**53.961.855.304**		**42,13**

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam pengentrian anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak kegiatan.
4. Kurangnya pengawasan terhadap tanggal kadaluarsa benih sehingga benih yang diterima petani ada yang sudah expire.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berkut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan kelapangan bersama BPSB dalam pemeriksaan benih
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7 Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutukan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor pertanian. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang pertanian telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.2.1 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Standar Nasional	Target			Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2021	2022	2024	2025	
1.	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura		(6,67)	5,13	41,53	(5,50)	(18,50)	1,07	1,86	
	Padi		114.980	117.343	2	109.883	95.753	121.230	123.654	
	Jagung		265.551	283.005	119.980	271.047	222.855	290.081	294.897	
	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya									
	Padi		4,65	4,70	4,8	4,80	4,90	4,8	4,9	
	Peningkatan produksi komoditas Tanaman									
	Cabai (Ton)		9.726	9.896	10.069	5.689	5.223	10.245	10.425	
	Jeruk (Ton)		9.718	9.888	9.892,00	10.198	7.027	10.065	10.241	
	Alpukat (Ton)		2.896	3.396	3.896	11.054	12.618	4.396	4.896	
2.	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :		1,98	1,94	1,9	1,98	1,94			Pindah ke Dinas Perkebunan
	Sapi		20.229	20.529	20.829	20.360	20.781	-	-	
	Kambing		14.266	14.476	14686,00	13.887	14.801	-	-	
	Unggas		735.334	749.743	764.134	1.188.499	1.263.632	-	-	
3.	Peningkatan nilai SAKIP		B (65)	B (68)	BB (71)	B (65)	BB (70)	BB (73)	BB (75)	
	Level Maturitas SPIP		2,11	2,35	2,5	2,11	2,35	3	>2,6	
	Jumlah Temuan BPK		7	6	5	6	4	4,0	3,0	

Capaian kinerja pelayanan DTPHP tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan produksi beberapa komoditi salah satunya padi dimana penurunan produksi padi, dari 109.883 ton pada Tahun 2021 menjadi 95.390 ton pada Tahun 2022. Penurunan ini sejalan dengan penurunan luas tanam komoditi padi, dari 22.956 hektar pada Tahun 2021 menjadi 19.906 hektar pada Tahun 2022. Penurunan produksi maupun luas tanam disebabkan oleh sejumlah permasalahan, antara lain terdapat bendungan di kecamatan gunung tuleh yang baru dibangun oleh PU melalui dana IPDMIP rusak kembali setelah hujan lebat. Selain itu di kecamatan talamau jaringan irigasi juga banyak yang rusak karena gempa tanggal 25 Februari 2022 sehingga petani ada yang beralih menanam komoditi lain.

Selain itu produksi jagung juga mengalami penurunan hal ini disebabkan karena petani Kabupaten Pasaman Barat fanatik dengan benih pioner 32 dimana saat itu benih tersebut langka di pasaran dan harga pupuk pun mahal. Petani tidak menanami lahannya sampai benih tersedia kembali. Selain itu jagung yang berintegrasi dengan sawit sudah tidak bisa ditanami lagi karena sawitnya sudah berumur lebih dari 2 tahun.

Untuk komoditi hortikultura seperti cabe mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021 hal ini disebabkan karena cuaca yang ekstrim (sering hujan) menyebabkan OPT cabe berkembang seperti lalat buah, ulat grayak, layu cendawan dan thrips sehingga cabe sehingga produksi sedikit menurun. Harga cabe menjadi mahal dipasaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Pasaman Barat terdapat kegiatan bantuan bibit cabe, pupuk dan pestisida namun pendropingan dilakukan sudah di akhir tahun sehingga untuk produksinya masuk ketahun 2023.

Dari komoditas peternakan pada umumnya meningkat dari tahun sebelumnya seperti sapi terjadi peningkatan padahal kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sedang mewabah hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran sapi dan kambing tinggi kemudian tahun 2021 juga ada bantuan sapi (32 ekor), kambing (32 ekor) dan unggas (1.350 ekor). Dalam pengendalian PMK langsung ditindaklanjuti dengan penutupan pasar ternak dan pengobatan secara intens oleh petugas terhadap ternak yang terkena PMK.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan produksi tanaman pangan salah satu yang menjadi penghambat adalah adanya alih fungsi lahan. Guna menghambat laju konversi lahan sawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 9 Tahun 2016.

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebagai komoditi andalan dan unggulan di Propinsi Sumatera Barat dalam penetapannya diatur oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-849-2019 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti juga dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.46/204/ DTPHP-III/2021 Tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, maka sentra-sentranya meliputi :

a) Kawasan Tanaman pangan
   - Padi meliputi Kec. Talamau, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang dan Kec. Ranah Batahan
   - Kawasan jagung meliputi Kec. Pasaman, Kec. Luhak Nan

Duo, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang
- Kawasan ubi jalar meliputi Kec. Talamau

b) Kawasan Hortikultura
- Kawasan jeruk meliputi Kec. Pasaman dan Kec. Lembah Melintang
- Kawasan sayur lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo
- Kawasan aneka cabai meliputi Kecamatan Talamau
- Kawasan buah lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo (alpukat)
- Kawasan manggis meliputi Kec. Talamau, Gunung Tuleh dan Pasaman

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat perhatian adalah:

a. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.
b. Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplemtasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari

pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian di wilayahnya.

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, visi dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura maka isu-isu stategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penyuluh
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
3. Peningkatan pendapatan petani melalui nilai tambah pertanian
4. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
5. Pengendalian serangan OPT dan dampak bencana
6. Alih fungsi lahan sawah ke komoditi lainnya dan konversi lahan pertanian
7. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal.

Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/ Kementerian

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang dihadapi antara lain sebagai berikut**:**

a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
c. Pengamanan produksi dari gagal panen akibat bencana dan serangan OPT.
d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
f. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
g. Kurangnya jumlah SDM.
h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.
k. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar dai Provinsi Sumatera Barat.
b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban APBD Provinsi dan Kabupaten.

c. Adanya usaha pengamanan produksi (asuransi padi dan sapi) dari pemerintah akibat gagal panen dampak serangan OPT dan bencana.
d. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta keterampilan petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang yang sudah banyak dilaksanakan melalui kegiatan IPDMIP.
f. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
g. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapta usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan (Perda LP2B sudah ada).
h. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi plasma nutfah kacang tanah dan padi gogo

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura bisa dilakukan secara intensifikasi dengan melakukan beberapa hal seperti melakukan pemupukan, ketersediaan air cukup, melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman, pemakaian bibit unggul, pengolahan tanah yang baik.
2. Dalam antisipasi konversi lahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sudah membuat perda LP2B tahun 2016 namun kondisi lahan saat ini sudah jauh

berbeda maka dilakukan updating peta LP2B kemudian tahun 2023 dianggarkan dana untuk revisi perda. Diharapkan dengan adanya perda dapat diterapkan sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan.

3. Penyuluh diharapkan dapat merubah mindset petani untuk mau melakukan minimal 2x tanam dalam setahun hal ini dapat meningkatkan produksi. Untuk menarik minat petani perlu diadakan acara2 ceremonial dengan menghadirkan Bupati/Pejabat lainnya. Misalnya dengan memberikan reward/doorprize kepada petani.
4. Setiap kecamatan hendaknya menggali potensi atau menetapkan satu komoditi unggulan yang berkelanjutan sehingga perangkat daerah dapat mengintervensi dana untuk melengkapi sarana dan prasarana serta pemasarannya. Namun pelaksanaannya harus sudah dimulai dari masyarakat itu sendiri.
5. Perlu adanya pendataan petani/buruh tani yang belum tergabung dalam kelompok tani karena sasaran bantuan adalah kelompok tani. Karena umumnya petani miskin adalah buruh tani sehingga butuh penanganan khusus dengan memberikan keahlian/sarana.
6. Memperbanyak penyuluh swadaya (berasal dari petani) sebagai kader penyuluh yang sudah dibekali keahlian sehingga dalam penanganan awal terhadap hama penyakit tanaman serta penyakit hewan sehingga jika ada kejadian penanganannya cepat diatasi saat petugas tidak ditempat.
7. Untuk melestarikan sumber daya genetik lokal perlu adanya keberlanjutan kegiatannya khususnya yang sudah ada pelepasan varietas seperti Kacang Tigo Ampek, Padi Sigudang dan Alpukat Giri Maju.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 24.543.385.658,- *(Dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)* tahun 2024. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat

RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Hasil Analisis Kebutuhan 2025		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								**25.971.060.116**			**28.545.866.128**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						**8.766.116.650**			**9.620.428.315**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah Dokumen Perencanaan						**62.000.000**			**68.200.000**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra, Renja, RTP, DPA, DPA Perubahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	5 dokumen	7 dokumen	55.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	60.500.000
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	12 laporan	7 dokumen	7.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**7.892.886.650**			**8.682.175.315**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	100 %	79 PNS	79 orang	7.688.763.416	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.457.639.758
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	100 %	7 orang	79 orang	109.123.234	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120.035.557
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	100 %	12 bulan	79 orang	95.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	104.500.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**35.000.000**			**27.500.000**
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	225 ASN	4 orang	10.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	-
02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	44 orang	4 orang	10.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11.000.000
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	4 orang	4 orang	15.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								**213.000.000**			**223.000.000**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	13.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.000.000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	57.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	62.700.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	17.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18.700.000
04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	26.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.600.000
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	12 bulan	12 bulan	100.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	110.000.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**48.000.000**			**52.800.000**
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	100 %	2 unit	2 unit	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	100 %	2 unit	2 unit	16.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17.600.000
03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	100 %	2 unit	2 unit	12.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**113.150.000**			**124.465.000**
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	100 %	12 laporan	12 bulan	50.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	100 %	4 laporan	12 bulan	43.150.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	47.465.000
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	100 %	4 laporan	12 bulan	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**321.080.000**			**353.188.000**
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	3 unit	77 unit	110.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	121.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	74 unit	77 unit	66.080.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	72.688.000

03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	2 unit	77 unit	60.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	66.000.000
04	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	30 unit	77 unit	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000
05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	30 unit	77 unit	15.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16.500.000
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	1 paket	77 unit	50.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								**5.700.000.000**			**6.270.000.000**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								**3.750.000.000**			**4.125.000.000**
01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 laporan	12 bulan	2.250.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	2.475.000.000
02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 laporan	12 bulan	1.500.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1.650.000.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								**1.950.000.000**			**2.145.000.000**
01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	3 VUB	3	650.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	715.000.000
02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 dokumen	3	600.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	660.000.000
03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 dokumen	3	700.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	770.000.000

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								**7.619.975.000**			**8.381.972.500**
	Pengembangan Prasarana Pertanian								**900.000.000**			**990.000.000**
01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Pasbar	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokuman)	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1 dokumen	0,20%	350.000.000	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	385.000.000
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pasbar	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	12 laporan	0,20%	550.000.000	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	605.000.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian								**6.719.975.000**			**7.391.972.500**
01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pasbar	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (unit)	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	6 paket	22 paket	1.200.000.000	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1.320.000.000
02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pasbar	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	12 paket		2.442.725.000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	2.686.997.500
03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Pasbar	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jumlah dam parit yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	5 paket		1.000.000.000	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1.100.000.000

04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Pasbar	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	3 paket		1.500.000.000	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1	1.650.000.000
05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pasbar	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	2 paket		577.250.000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1	634.975.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								**231.525.000**			**254.677.500**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								**231.525.000**			**254.677.500**
01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pasbar	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	10,10,8 %	520 ha 50 Orang	50 orang	140.525.000	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	154.577.500
02	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Pasbar	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	10,10,8 %	520 ha 50 Orang	50 orang	91.000.000	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	100.100.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								**3.653.443.466**			**4.018.787.813**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								**3.653.443.466**			**4.018.787.813**
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	101 orang	11 BPP	2.300.000.000	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	2.530.000.000
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	100 kelompok	11 BPP	721.312.242	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	793.443.466
03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	12 bulan	11 BPP	432.131.224	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	475.344.346
04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	12 bulan 17 THL	11 BPP	200.000.000	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	220.000.000
									25.971.060.116			**28.545.866.128**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 25.971.060.116,- *(Dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam belas rupiah)* tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan RPJMD Periode 2021-2026. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran tidak ada perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.3. (T-C. 32)
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Hasil Musrenbang

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1						2	3	4	5	6
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1 . % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas:padi, jagung) 4. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)		
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)		
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
						Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor, Cornsheller, Thresher, Sprayer, Rice Transplanter, Combine Harvester, dll)	Talamau		2 unit	Handtraktor
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)		
						Pengadaan dan Pelatihan Pupuk Organik	Lembah Melintang		1 paket	Pupuk
						Bantuan Benih Cabe	Talamau		1 paket	Benih Cabe
						Bantuan Benih Jagung	Talamau		1 paket	Benih Jagung

3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun		
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)		
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kinali	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	1 unit	Rehab Irigasi
3	27	03	2.02	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah jalan usaha tani yang dibangun		
						Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Talamau	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	1 paket	JUT
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih		
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian		
3	27	07	2.01	04		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan sekolah lapang (kali)		
						Pelatihan Petani/Peternak	Kinali		1 paket	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Adapun sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan prioritas pembangunan Propinsi terletak pada program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi “Sakato Plan” sedangkan untuk Dana Tugas Pembantuan dapat diusulkan melalui e-Proposal dan kegiatan DAK Penugasan melalui aplikasi e-Krisna. Sinkronisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Provinsi dan Kabupaten

NO	KEMENTERIAN PERTANIAN		DINAS TANAMAN PANGAN HORITKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	PROGRAM	**KEGIATAN**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

		Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian				Pembangunan Prasarana Pertanian
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan			PDRB per Kapita ADHB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (Rp.juta)	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46	36,17
			1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura		(6,67)	5,13	1,86	1,07	1,86	1,82
				Padi	147.471	114.980	117.343	119.980	121.230	123.654	126.007
				Jagung	262.510	265.551	283.005	287.556	290.081	294.897	299.752
				Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya							
				Padi	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
				Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):							
				Cabai (Ton)	9.558	9.726	9.896	10.069	10.245	10.425	10.607
				Jeruk (Ton)	9.718	9.718	9.888	9.892	10.065	10.241	10.420
				Alpukat (Ton)	2.396	2.896	3.396	3.896	4.396	4.896	5.396
			2 Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :	-1,81	1,98	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80
				Sapi	19.929	20.229	20.529	20.829	21.129	21.429	21.429
				Kambing	14.056	14.266	14.476	14.686	14.896	15.106	15.316
				Unggas	720.934	735.334	749.743	764.134	778.534	792.934	807.334
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DTPHP			Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
				Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
				Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2
			1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
				Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
				Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2

1.4 Program dan Kegiatan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 14 (Delapan belas) Kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan.

Tabel 3.3
Rekap Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan
		Jumlah Produksi Hortikultura (ton) komoditas:
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
		Persentase ketersediaan bibit ternak
		Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)
	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian
	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
	2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat
	3 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan
	4 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya
	5 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah varietas yang dimanfaatkan SDG nya
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun
	3. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)
	6 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah dokumen yang disusun
	7 Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B,	Jumlah dokumen yang disusun
	8 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya

	4. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)
	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab
	10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun
	11 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun
	12 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara
	13 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/dipelihara
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)
	5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	14 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT
	15 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah petani yang mendaftar Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) (Ha)
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih
	6. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian
	16 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek
	17 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan
	18 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
	19 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
	7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran
	20 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra, Renja, RTP, PK, RKA, RKA Perubahan), buku database
	21 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP)

	8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan
	22 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan
	23 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran
	24 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan
	9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola
	25 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada DTPHP
	26 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD
	10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
	27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
	28 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya
	29 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai
	11. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
	30 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor
	31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan
	32 Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
	33 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan
	34 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti
	12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD
	35 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel
	36 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran
	37 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor

	38 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor
	39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor
	14.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
	40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan
	41 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
	42 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan
	43 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan
	44 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara
	45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi

Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat yang dijabarkan dalam program-program prioritas Bupati Pasaman Barat
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya peningkatan SDM pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan 4 program pelaksanaan (eks-pembangunan).
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 kegiatan yang dijabarkan dalam 45 sub kegiatan.
3. Terdapat 1 sub kegiatan yang terkait Pengarusutamaan Gender yaitu sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Kegiatan tersebut secara eksplisif dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24.489.323.658,- *(Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)* tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun rencana program kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Fokus pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja; tertib administrasi dan pelaporan keuagan; serta sarana dan prasarana aparatur.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Fokus kegiatan pada peningkatan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu jumlah produksi tanaman pangan sebesar 411.311 Ton dan hortikultura sebesar 24.199 ton.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Fokus diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian. Kegiatan ini untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Fokus pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian sebesar 10% (pertanian) dan 8% (peternakan).
5. Program Penyuluhan Pertanian Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian baik kelembagaan petani maupun kelembagaan penyuluh. Peningkatan kapasitas petani juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sector pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu Persentase peningkatan kelas kelompok tani dan penyuluh sebesar 1%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasaman Barat serta Renstra tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, DAK, dll) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 5 (Lima) program yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp.12.447.113.026,- *(Dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu dua puluh enam rupiah)* tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 (T-C. 33)
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura								12.447.113.026,00					12.540.350.386,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								12.447.113.026,00					12.540.350.386,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								12.447.113.026,00					12.540.350.386,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.621.190.323,00					5.714.427.683,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								53.895.000,00					56.895.000,00
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	48.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	48.895.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	8.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.717.956.403,00					4.733.013.603,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	79 Orang/bulan	100 %	4.505.890.803,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	4.505.890.803,00
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	100 %	78.685.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	77.047.800,00

3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	133.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.075.000,00
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								41.457.400,00					36.417.400,00
3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1315 unit	28.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	23.160.000,00
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	1315 unit	13.257.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.257.400,00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								35.227.000,00					70.482.100,00
3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	225 Paket	48 orang	9.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	225 Paket	9.900.000,00
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	44 Dokumen	48 orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	44 Dokumen	5.000.000,00
3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Orang	48 orang	20.327.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	55.582.100,00

3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								261.918.010,00					245.614.820,00
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	2.063.370,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.063.370,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	84.017.580,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84.000.300,00
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	24.037.810,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.711.050,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	15.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.530.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	136.269.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	144.021.150,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20.850.000,00					20.850.000,00
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	57 unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00

3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	57 unit	9.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.600.000,00
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	57 unit	11.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.250.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								142.919.010,00					142.919.010,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	75.394.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.394.100,00
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	31.711.580,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	31.711.580,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	35.813.330,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	35.813.330,00

3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								346.967.500,00					408.235.750,00
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	166 unit	146.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	146.100.000,00
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	166 unit	44.552.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	105.820.750,00
3	27	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	166 unit	22.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	22.750.000,00
3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	166 unit	9.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	9.270.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	166 unit	84.615.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	84.615.000,00
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	166 unit	39.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.680.000,00

3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1.055.749.940,00					1.055.749.940,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								975.000.000,00					975.000.000,00
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
						"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29,30,154847,271978,9502,12653,2958 ton	1 Laporan	40 unit	775.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	775.000.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
						"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe,	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29,30,154847,271978,9502,12653,2958 ton	1 Laporan	40 unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	200.000.000,00

3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							80.749.940,00					80.749.940,00
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
						"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe,	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih sumber yang tersedia (Kg)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29,30,154847,271978,9502,12653,2958 ton	1 Dokumen	5 kg	20.308.260,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	20.308.260,00
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													
						"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe,	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih sumber yang tersedia (Kg)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29,30,154847,271978,9502,12653,2958 ton	1 Dokumen	5 kg	20.540.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	20.540.000,00

3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman												
						"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe,	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah benih sumber yang tersedia (Kg)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29,30,154847,271978,9502,12653,2958 ton	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	5 kg	39.901.680,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	39.901.680,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								4.351.181.793,00					4.351.181.793,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								56.980.000,00					56.980.000,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase peningkatan Indeks Pertanaman (%)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,u	12 Laporan	0,2 %	46.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	46.980.000,00
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Persentase peningkatan Indeks Pertanaman (%)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,unit,unit	1 Dokumen	0,2 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	10.000.000,00

3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								4.294.201.793,00					4.294.201.793,00
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,unit,unit	12 Unit	20 paket	2.962.679.293,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	2.962.679.293,00
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,unit,unit	5 Unit	20 paket	4.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	4.890.000,00
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,unit,unit	3 Unit	20 paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,u	2 Unit	20 paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
						Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,8,15,20,11,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,	6 Unit	20 paket	1.316.632.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6 Unit	1.316.632.500,00

3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									10.000.000,00				10.000.000,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									10.000.000,00				10.000.000,00
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
						% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,20,9 %	520 Ha	10 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	520 Ha	5.000.000,00
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
						% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,20,9 %	50 Laporan	10 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50 Laporan	5.000.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									1.408.990.970,00				1.408.990.970,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									1.408.990.970,00				1.408.990.970,00
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
						1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1-1 %	0 Unit	110 Kali	1.239.001.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	1.239.001.040,00

3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
						1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1-1 %	100 Unit	110 Kali	149.999.930,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Unit	149.999.930,00
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
						1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1-1 %	11 Unit	110 Kali	9.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	9.990.000,00
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
						1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1-1 %	11 Unit	110 Kali	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Unit	10.000.000,00
												TOTAL	**12.447.113.026,00**					**12.540.350.386,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat disusun sebagai pedoman operasional Program Kegiatan Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan berdasarkan Evaluasi Program Kegiatan tahun-tahun lalu sebagai dasar untuk menentukan strategi teknis kedepan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura untuk menuju kedaulatan pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja ini bersifat indikatif sehingga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan aturan atau kebijakan yang baru sesuai dengan peraturan yang ada sehingga diharapkan perubahan yang terjadi membuat Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat menjadi lebih sempurna sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Sukomananti, 2023
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat

drh. DODDY SAN ISMAIL, MM
Pembina TK I/IV.b
NIP. 19860331 201101 1 001

RENJA
(Rencana Kerja)

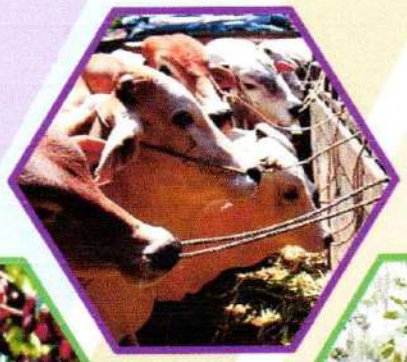

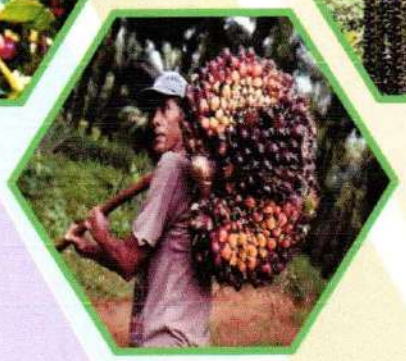

2024

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Kabupaten Pasaman Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 24

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan 27

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 57

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 57

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 62

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 68

BAB V PENUTUP 78

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan pembangunan tahunan ini selanjutnya akan disebut dengan Rencana Kerja dengan singkatan Renja. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD juga mengacu pada Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang harus memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah agar dapat mencapai sasaran pembangunan daerah, yang mana pada penyusunannya mengaju pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementerian Pertanian RI dan Provinsi. Proses penyusunan dokumen perencanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan disesuaikan dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pertanian khususnya sub sektor perkebunan dan peternakan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Perkebunan dan Peternakan, Produksi Perkebunan dan Peternakan, Penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular), serta Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil serta Penyuluhan Bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya, Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD juga perincian target kinerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang mana nantinya akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 seperti yang terlampir pada bagan berikut ini:

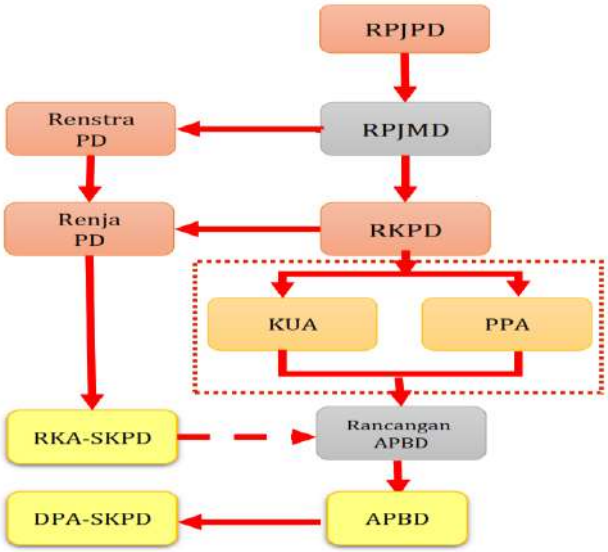

Gambar 1. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta sebagai perangkat untuk menciptakan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perkebunan dan peternakan pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang perkebunan dan perkebunan.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 .

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,* memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program,

kegiatan dan sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat mengalami perubahan nomenklatur dengan dasar Peraturan Daerah Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga Dinas Perkebunan pada tanggal 3 Januari 2023 berubah menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun 2022 masih dilakukan untuk Dinas Perkebunan program/kegiatan sub sektor perkebunan sedangkan evaluasi tahun sebelumnya untuk sub sektor peternakan dibahas oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sebagai Dinas pengampu peternakan pada tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 13 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang

selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perkebunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C. 29
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6x 100%)*	*9*	*10*	*11 = (10/4)*
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah(%)**	**100%**	**16%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**42 %**	**42**
			2 . 0 1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**60%**	**60**

				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disbun yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2022-2026; Renja Tahun 2022-2026; RTP Tahun 2022-2026; PK Tahun 2022-2026 dan Jumlah dokumen statistik perkebunan	42	7	7	7	100	7	19	45
						Jumlah Non PNS (THL) penunjang penyusunan dokumen perencanaan	-	3 THL	3 THL	-	100	3 THL	2	66
				07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Disbun yang disusun (Dokumen LKPJ- LPPD Tahun 2021-2025; LAKIP Tahun 2021-2025)	12	2	2	100%	100	2	6	50
			2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**16%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**42**	**42**

				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	34	34	32	32	100	34	39	114
						Jumlah PPPK yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	4	8	8	8	100	8	4	100
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT) Penunjang Administrasi Perkantoran	8	8	8	8	100	12	10	125
						Jumlah Non PNS (THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	11	9	11	9	81	12	10	91
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	1	1	1	1	100	1	1	100
				04	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12	16	12	12	100	12	5	42
			2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Disbun**	**100%**	**69**	**69**	**69**	**100**	**40%**	**40**	**40**
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
						Jumlah Non ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100

			2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Bintek**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**0,00%**	0
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	1164	-	-	-		291	0	0
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	40	-	-	-	-	5	0	0
			2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**38%**	**38**
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	6	1	1	1	100	1	3	50
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Disbun yang dibutuhkan	6	1	1	1	100	1	3	50
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	12	12	12	12	100	185	5	42
						Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti	12	12	12	12	100	185	5	42

					3 Unit	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12	12	12	12	100	185	5	42
			2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	37	7	-	-	0%	100%	**7**	**18.92**
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		5	-	-	-	0%	2	0	0
				03	Pengadaan Gedung Kantor		1	-	-	-	-	-	0	0
				05	Pengadaan Mebeuleur		18	-	-	-	0%	5	0	0
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13	7	-	-	0%	2	7	54
			2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**42%**	**42**
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12	12	12	12	100	100%	42	50
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3	2	2	2	2	100	100%	3	150
						Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	6	1	1	1	100	100%	2.5	42

			2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	**69**	**69**	**41**	**40**	**57**	**100%**	**40**	**58**
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan pembayaran pajak/KIR	3	3	3	3	100	3	2	66
						Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	2	2	2	1	50	2	2	100
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	41	41	41	17	41	41	30	73
				10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	69	20	20	29	69	40	58
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi	69							

3	**27**	**02**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (Komoditas : Sawit, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Nilam, Kelapa hibrida, Pinang)	**2.827.944**	**2.886.470,03**	2.793.097	**84,25**	**103.36**	2.804.248	**102,07%**	**102**
			2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase realisasi kegiatan APBN**	**85%**	**85%**	**85%**	**70,00%**	**41**	**2.804.248**	**85,00%**	**85**
				01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan poktan di bidang perkebunan	100%	75%	80%	70%	0	1	100	100
				02	Pendampingan penggunaan Sarana pendukung Pertanian	1. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan	4	3	4	2	50	1	3	75
						2. Penggunaan sarana pendukung pertanian Tersedianya fasilitas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12	12	12	12	100	12	5	42
			2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupten/Kota**	Luas Kebun Induk yang dipelihara	**14**	**14**	**14**	**14**	**100**	**3**	**7**	**50**

				02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas kebun induk karet yang dipelihara	14	14	14	14	100	14	7	50
						Luas kebun entres karet yang dipelihara	1	1	1	-	100	1	1	100
3	**27**	**03**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun**	**69**	**20,78**	**69**	**50**	**172**	**69 Km**	**70.78**	**102**
			2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase pengembangan prasarana pertanian (%)**	**50%**	**50%**	**50%**	**97%**	**130**	**85%**	**50,00%**	**43**
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian/peremajaan sawit rakyat	12	12	12	8	66	69	5	42
			2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase Penyediaan prasarana pertanian (&)	**80%**	**9.15%**	**97,00%**	**80%**	**100**	69	**38.75%**	**31**
				09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Panjang jalan produksi	227	20,78%	-	97,00%	100	38	20.78	9
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		227	-	50	-		50	50	23

3	**27**	**05**			**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian**	**30%**	**10 %**	**10 %**	**100%**	**80**	**8%**	**10,00%**	**33**
			2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**11**	**11**	**11**	**3**	**72**	**47,50%**	**3**	**27**
				01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	450	25	75	30	53	75	100	22
3	27	06			**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm oil)**	**80%**	**0,00%**	**36.67%**	**100%**	**50**	**47.5%**	**26%**	33%
			2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat PUP**	**18**	**-**	**8**	**4**	**50**	**47.5%**	**6**	**33**
				03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang dievaluasi dan dinilai	18	-	8	4	50	11	6	33
3	**27**	**07**			**Program penyuluhan pertanian**	**1. % peningkatan kelas kelompok tani 2. % penyuluh dan petani yang terlatih**	**7 dan 7**	**1 dan 1**	**1 dan 1**	**1%**	**100**	**1% 1%**	**2.8**	**41**

			2.01		**Pelaksanaan penyuluh pertanian**	**Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Perkebunan yang dilaksanakan**	**5**	**1**	**1**	**0,75**	**75**	**1**	**2.5**	**50**
				01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tersusunya Programa Penyuluhan Pertanian Dinas Perkebunan (1 Dokumen) Terlaksananya Pelatihan Bagi Penyuluh untuk komoditi perkebunan Terlaksananya Training Penyuluh Pertanian Terlaksananya Supervisi Penyuluh pertanian	1 32 12	1 14 12	1 32 12	1 29 3	-	11	26	81

				02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan petani Jumlah Kelompok Wanita Tani yang Melaksanakan Kegiatan PUG Terlaksananya PEDA/PENAS TANI	18 2 11 1	11 1 3	18 1 11	11 1 2	100	19	19	105
				03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Tersedianya materi penyuluhan tersedianya kelengkapam penyuluh	1 1	-	-	-	-	1	-	0
				04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani di Kecamatan (BUMP	11	-	-	-	-	3	-	0
				05	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	5	-	-	-	-	1	-	0
3	27	4			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85%	-	-	-		85%	40,00%	

3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Frekuensi Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	12					12	-	
				01	Pengendalian penanggulangan penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12					12	-	
3	27	4	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan jasa Medik Veteriner	11					-	-	
				02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2					-	-	

Dari Tabel T-C.29 dapat dilihat pada tahun 2022 terdapat 6 (Enam) program prioritas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil pencapaian target kinerja dari 6 (Enam) program tersebut adalah 3 (tiga) Program tercapai sangat tinggi, 2 (dua) Program tercapai tinggi dan 2 (dua) program tercapai sedang. Program-program yang targetnya tercapai sangat tinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program yang targetnya tercapai tinggi adalah Program penyuluhan pertanian. Selain terpenuhinya kriteria penilai sangat tinggi dan tinggi terdapat kriteria sedang yaitu Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Perizinan Usaha Pertanian.

Terdapatnya program baru di Dinas Perkebunan dan Peternakan akibat nomenklatur Perangkat Daerah yang berubah pada 3 Januari 2023 yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Tahun 2023 program ini belum bisa dievaluasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk evaluasi kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena keterbatasan APBD yaitu sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Pengadaan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeuleur, Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian, Pembentukan Badan Usaha Milik Petani, serta Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan pada tahun 2022 namun karena anggaran yang tidak memadai untuk pelaksana kegiatan tersebut sehingga tidak dilaksanakan maka menyebabkan indikator sasaran kinerja tidak tercapai.
2. Tidak terdaftarnya kelompok tani penerima bantuan dalam aplikasi Simluhtan sehingga Kelompok tani penerima bantuan tersebut tidak bisa menerima bantuan pupuk yang telah dianggarkan.
3. Satuan harga pupuk tidak disesuaikan setelah kenaikan harga BBM sehingga tidak terjangkaunya harga pupuk dipasaran.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain sebagai berkut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Memastikan kelompok tani penerima bantuan pupuk, maupun jalan produksi telah terdaftar dalam aplikasi simluhtan
3. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
4. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Perangkat Daerah.
5. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana Perangkat Daerah.
6. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
8. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan dan sinkronisasi kebutuhan dengan anggaran, harga barang/jasa SSH yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor perkebunan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2022 Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang perkebunan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disebabkan bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja Dinas Perkebunan tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Realisasi anggaran Dinas Perkebunan pada tahun 2022 sebesar 91.88 % dan realisasi fisik sebesar 97.12 %.

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2) Masih kurang terjalinnya sinergisitas program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.2.1 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Sasaran/IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Peningkatan/Penurunan produksi komoditi perkebunan (%)			2.23	2.25	2.65	3.00	5,67	5.29	2.65	3.00	
	- Kelapa Sawit(%)			2.22700	2.24700	2.64600	2.99530	5.66800	5.29	2.64600	2.99530	
	- Kopi Arabika(%)			0.00001	0.00001	0.00003	0.00005	0.00004	0.00006	0.00003	0.00005	
	- Kopi Robusta(%)			0.00061	0.00061	0.00065	0.00067	0.00079	0.00087	0.00065	0.00067	
	- Nilam(%)			0.00066	0.00066	0.00090	0.00140	0.00131	0.00196	0.00090	0.00140	
	- Kelapa dalam(%)			0.00140	0.00140	0.00174	0.00178	0.00206	0.00215	0.00174	0.00178	
	- Kelapa Hibrida(%)			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	
	- Pinang(%)			0.00032	0.00032	0.00068	0.00080	0.00033	0.00035	0.00068	0.00080	
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Nilai SAKIP			B	B	B	BB	B	B	B	BB	
4	Level Maturitas SPIP			2.11	2.35	2.48	2.6	2.8	3.125	2.48	2.6	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang harus diperhatikan yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan dan peternakan daerah di masa datang. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1) Akselerasi Food Estate.
2) Perubahan iklim global (global climate change)
3) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan
4) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perkebunan/peternakan dan penyuluh.
5) Hilirisasi industri kelapa sawit
6) Meningkatkan upaya kemitraan antara perusahaan perkebunan dan kelembagaan pekebun yang baik.
7) Belum terbangunnya Science/Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.
8) Nilai tukar petani masih rendah.
9) Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk hasil perkebunan daerah.
10) Peningkatan populasi ternak
11) Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal

Upaya penyelenggaraan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Pasaman Barat masih mengalami beberapa permasalahan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah khususnya alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan ini salah satu caranya dengan membentuk daerah lokus Food Estate.

Food Estate merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Program Food Estate menjadikan sektor pertanian sebagai ujung tombak perekonomian daerah. Konsep dasar program Food Estate adalah keterpaduan sektor dan subsektor dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional didukung oleh sumberdaya manusia.yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Oleh sebab itu, keterlibatan dan peran aktif para

pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat petani, akademisi sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan Food Estate, sebagai konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, organisasi dan manajemen modern, serta pemberdayaan masyarakat adat/ lokal dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan kawasan Lumbung Pangan *(Food Estate)* Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun 2021 dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Pertama, penumbuhan kawasan Food Estate di Kecamatan Kinali (Klaster I), Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh dan Sungai Aur (Klaster Pendukung). Kedua adalah tahap pengembangan kawasan Food Estate dan ketiga adalah tahap mandiri dan berkelanjutan. Adapun usulan kegiatan Food Estate yang akan dilaksanakan untuk pembangunan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Pasaman Barat adalah Pengembangan Komoditas Peternakan: Sapi, Kambing, Unggas.

Program *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Adapun konsep pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pasaman Barat yang diusulkan adalah integrasi antara padi, jagung dan sapi berlokasi di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Sungai Aur dan Gunung Tuleh dan Ranah Batahan. untuk mewujudkan akselerasi *Food Estate*, maka perlu dilakukan:

1. Penyediaan alat dan mesin pertanian (pra tanam dan pasca panen);
2. Ketersediaan benih unggul;
3. Peningkatan kapasitas penyuluh di lapangan;
4. Adanya jaminan pasar;
5. Pengembangan ternak sapi;
6. Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik;
7. Penanganan pasca panen dan pengemasan hasil;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pakan ternak (bahan baku jagung).

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dikaitkan sebagai pemicu pemanasan global. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit dituding menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan global yang semakin memperparah perubahan iklim global. Berdasarkan fakta ilmiah perkebunan

kelapa sawit dapat menjadi solusi penurunan emisi dan mencegah pemanasan global yang berkepanjangan. Perkebunan kelapa sawit berperan sebagai paru-paru ekosistem karena memiliki kemampuan carbon sink dan mampu memproduksi biofuel/bioenergi rendah emisi yang dapat dimanfaatkan sebagai subsitusi energi fosil.

Hilirisasi industri sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditi berbasis agro daerah Kabupaten Pasaman Barat seperti kelapa sawit berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Hilirisasi industri kelapa sawit mampu menyerap hasil produksi petani dan meningkatkan kesejahteraan petani swadaya. Aktivitas hilirisasi industri kelapa sawit memberikan multiplier efffect dan menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Jumlah Plafon Belanja Operasi Sementara yang diusulkan Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2024 pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp. 24.035.346.446,- (Dua puluh empat milyar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan pada Rancangan Akhir Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat menerima plafon anggaran sebesar Rp. 5.420.003.804,- (Lima milyar empat ratus dua puluh juta tiga ribu delapan ratus empat rupiah). Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**5,198,087,453**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**5.420.003.804**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Pasaman Barat**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**80.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaman Barat**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.468.389.204**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	24.776.500
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	35.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	12.677.500

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4,516,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.035.311.684**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	4.151.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	3.692.967.084
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	280.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	328.422,100
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	13.922.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	0,00

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola**	**69 Unit**	**35.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola**	**69 Unit**	**13.498.900**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	35.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.498.900
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10 Orang**	**0,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	291 Stel	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	291 Stel	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**220.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**185.510.700**

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	43.084.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	130.926.400
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**49,587,453**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6 Unit**	**0,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00
	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25,587,453	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan**	**100 %**	**108,500,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan**	**100 %**	**95.587.670**

	Urusan Pemerintah Daerah	**dan Peternakan**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Urusan Pemerintah Daerah**		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.865.560
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.722.110
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**139,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Perkebunan**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69 Unit**	**101.026.250**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	68.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	58.696.260
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	41 unit	26.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	41 unit	23.000.000

	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	19.330.000
2.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ketersediaan Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak Ketersediaan Bibit Ternak**	**282097 5 Ton 40 % 30 %**	**2,321,975,181**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ketersediaan Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak Ketersediaan Bibit Ternak**	**29,30,281 4005,154 847,2719 78,9502,1 2653,295 8 ton**	**429.222.000**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah Produksi Tanaman Komoditi Perkebunan**	**282097 5 Ton**	**1,500,000,000**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah Produksi Tanaman Komoditi Perkebunan**	**85 %**	**29.400.000**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	1,000,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	1,000,000,000

	Pendampingan penggunaan Sarana pendukung Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	500,000,000	Pendampingan penggunaan Sarana pendukung Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	29.400.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupten/Kota	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah Produksi Tanaman Komoditi Perkebunan**	**2814005Ton**	**821,975,181**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupten/Kota**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah Produksi Tanaman Komoditi Perkebunan**	**14 Hektar**	**399.822.000**
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	821,975,181	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	399.822.000
3.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**	**69 Km**	**14,321,280,062**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**	**69,8,15,20,11,7,1,1,1 km,km,unit,km,unit,unit,unit,unit,unit,unit**	**116.885.000**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**	**69 Km**	**4,321,280,062**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**	**50 %**	**26.885.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	4,321,280,062	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	26.885.000

	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**	**69 Km**	**10.000.000.000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**	**80 %**	**90.000.000**
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	10.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	90.000.000
4.	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian**	**20 %**	**231,525,000**	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian**	**20,20,9 %**	**28.463.500**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah SDM Petani yang Ditingkatkan**	**11 Kecamatan**	**231,525,000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah SDM Petani yang Ditingkatkan**	**11 Kecamatan**	**28.463.500**
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150 Ha	231,525,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	150 Ha	28.463.500

								Dikendalikan		
5.	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**% Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**85%**	**727.650.000**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Dinas Perkebunan**	**% Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**85%**	**179.073.900**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**12 Bulan**	**27.650.000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perkebunan**	**Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**12 Bulan**	**26.214.450**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit	12 Laporan	27.650.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit	12 Laporan	26.214.450
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**11 Kecamatan**	**700.000.000**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perkebunan**	**Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**11 Kecamatan**	**152.859.450**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pasaman Barat	Jumlah lokasi pelayanan hewan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	700.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pasaman Barat	Jumlah lokasi pelayanan hewan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	152.859.450

6.	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Persentase Perusahaan yang Memiliki Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil**	**58.33%**	**34,728,750**	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Persentase Perusahaan yang Memiliki Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil**	**58.33%**	**14.835.000**
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Persentase Perusahaan yang Memiliki Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil**	**58.33%**	**34,728,750**	**Pasar Kabupaten/Kota**	**Dinas Perkebunan**	**Persentase Perusahaan yang Memiliki Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil**	**13 Perusahaan**	**14.835.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	23 Laporan	34,728,750	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	23 Laporan	14.835.000
7.	**Program penyuluhan pertanian**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Peningkatan Kelas Kelompok Tani Penyuluh dan Petani yang Terlatih**	**1 % 1 %**	**1,927,750,000**	**Program penyuluhan pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Peningkatan Kelas Kelompok Tani Penyuluh dan Petani yang Terlatih**	**1-1 %**	**183.135.200**
	Pelaksanaan penyuluh pertanian	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**Penyuluh Perkebunan yang Terlatih**	**30 Orang**	**1,927,750,000**	**Pelaksanaan penyuluh pertanian**	**Dinas Perkebunan**	**Penyuluh Perkebunan yang Terlatih**	**1 Tahun**	**183.135.200**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit	800,750,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit	158.143.150

	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Unit	427,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Unit	24,992.050
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	250,000,000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	600,000,000
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 Unit	225,000,000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 Unit	600,000,000
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Unit	225,000,000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Unit	600,000,000
	Jumlah				**24,762,996,446**	**Jumlah**				**5.420.003.804**

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 membutuhkan alokasi dana sebesar Rp 24.762.996.446,- (Dua puluh empat milyar tujuah ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah,-) untuk melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 17 (Tujuh belas) Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai rancangan awal Renja tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan dan target Renstra Periode 2021-2026. Tetapi karena keterbatasan ketersedian anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.420.003.804,- (Lima milyar empat ratus dua puluh juta tiga ribu delapan ratus empat rupiah). Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.420.003.804,- pada tahun 2024 terjadi kekurangan pada Tambahan Penghasilan Pegawai, Biaya Operasional Kantor, honorarium PTT dan tenaga harian lepas, biaya pemeliharaan peralatan dan kendaraan dinas yang minim serta tidak tertampungnya usulan aspirasi masyarakat dan usulan pokir DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan serta tugas pembantuan, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi salah satu instansi teknis strategis pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka usulan program dari masyarakat menjadi salah satu program utama Dinas Perkebunan dan Peternakan yang diakomodir melalui kegiatan musrenbang dan juga isu-isu penting yang berkembang dari masyarakat. Usulan masyarakat berasal dari usulan aspirasi hasil musrenbang Kecamatan dan usulan pokir Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat.

Ada 24 usulan dari usulan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan sebanyak 104 dari usulan pokir.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun**		
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Persentase penyediaan prasarana pertanian (%)**		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
3	27	03	2.02	00 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
					Pembangunan/ Perbaikan Jalan Produksi	Jalan Usaha Tani Bung Hatta, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Jalan Usaha Tani Kejorongan Labuh Lurus, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Sampiang Rumah Kancia Ujung Tanah Kejorongan Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Pematangtaun ke pembibitan, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Kejorongan Labuh Lurus, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, Kec. Sungai Bremas		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD

						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Kampung Alang, Kelurahan Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sigalangan, Kelurahan Parit, Kec. Koto Balingka		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Tamiang Ampalu, Kelurahan Parit, Kec. Koto Balingka		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Simaninggir, Kelurahan Parit, Kec. Koto Balingka		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Batang lapu, Kelurahan Parit, Kec. Koto Balingka		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Guo, Kelurahan Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Tanjung Durian, Kelurahan Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sialang, Kelurahan Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisia		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Simpang Gadang, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Lubuk Juangan, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sopo Bawak, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sarasah Talang, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Kasik Putih, Kelurahan		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun

						Sungai Aua, Kec. Sungai Aur			2024 Sesuai SIPD
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sakato Jaya, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sakato Jaya, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024
						DS Paninjuan Tombang Jarung Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						Jorong Rao-Rao, Nagari Batahan,Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Jorong Situmang kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Bandar Nag. Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						Jorong Padang Timbalun, Kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		200 m	Usulan Pokir
						Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						jorong rantau panjang, nagari sasak, kec. sasak ranah pasisia, Kab. Pasaman Barat		160 m	Usulan Pokir
						air haji kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Rao Rao, Nagari batahn, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						Kelompok Tani Pulau Saiyo Jr Lubuak Sariak Kajai Kec Talamau,		1 Paket	Usulan Pokir

						Kab. Pasaman Barat			
						Jorong Sukamenanti Aua kuniang Kec Pasaman, Kab. Pasaman Barat		50 m	Usulan Pokir
						Batang Tombang Simpang Gadanag, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Muara Paraman, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Banjar Ampolu sigocar, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Gugung Pioner Simpang Gadang, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Kampung Ale Lamo, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Air Soyiek, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Rantau Deras, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Simpang Tiga Alin, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Rimbo Dangka, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Perkebunan Gotong Royong, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Perkebunan air Duku, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Perkebunan Air Tabu, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Jorong Tombang kec. talamau, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						kampung baru lubuk landur nagari aur kuning kec. pasaman, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						kajai kec. talamau, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Pasaman, Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Siduampan, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Pasa Lamo, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir

						DS Paninjuan Tombang Jarung Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						Jorong Rao-Rao, Nagari Batahan,Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Jorong Situmang kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Bandar Nag. Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						Jorong Padang Timbalun, Kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		200 m	Usulan Pokir
						Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						kecamatan kinali, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						jorong rantau panjang, nagari sasak, kec. sasak ranah pasisia, Kab. Pasaman Barat		160 m	Usulan Pokir
						air haji kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Rao Rao, Nagari batahn, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						Kelompok Tani Pulau Saiyo Jr Lubuak Sariak Kajai Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Sukamenanti Aua kuniang Kec Pasaman, Kab. Pasaman Barat		50 m	Usulan Pokir
						Batang Tombang Simpang Gadanag, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Muara Paraman, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Banjar Ampolu sigocar, Kab.		500 m	Usulan Pokir

						Pasaman Barat			
						Gugung Pioner Simpang Gadang, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Kampung Ale Lamo, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Air Soyiek, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Rantau Deras, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Simpang Tiga Alin, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Rimbo Dangka, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Perkebunan Gotong Royong, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Perkebunan air Duku, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Perkebunan Air Tabu, Kab. Pasaman Barat		500 m	Usulan Pokir
						Jorong Tombang kec. talamau, Kab. Pasaman Barat		1000 m	Usulan Pokir
						kampung baru lubuk landur nagari aur kuning kec. pasaman, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						kajai kec. talamau, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Pasaman, Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Siduampan, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Pasa Lamo, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						air haji, kecamatan sungai aur, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Paroman, kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir

3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		1. ***% ketersediaan bibit ternak*** ***2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak*** ***3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang)***		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		Luas kebun induk yang dipelihara		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
3	27	02	2.02	00 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
					Pengadaan bibit ternak/sapi/ kambing/unggas	Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Jorong Padang Halaban, Kelurahan Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisia		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Jorong Sungai Tanang, Kelurahan Sungai Aua, Kec. Sungai Aur		1 Paket	Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
						Sasak Ranah pasisie, Kec. sasak Ranah pasisie, kab. pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong maligi, Kec Sasak Ranah Pasisie, kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Pasa lamo, Kec Sasak ranah pasisie, kab. Pasaman Barat,		1 Paket	Usulan Pokir

						Kab. Pasaman Barat			
						Jorong Pasa lamo, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Pasa lamo, Kec. Sasak Ranah pasisie, kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Pasa lamo, Kec Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Desa baru jorong Padang halaban, Kec sasak ranah pasisie, kab Pasaman barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Nagari Sasak, Kec Sasak Ranah pasisie. Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Padang Halaban, Kec. Sasak Ranah Pasisie, kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong padang halaban, kec sasak ranah pasisie, kab. Pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong bandar baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong bandar Baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Padang Jaya, Nagari Persiapan Maligi, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Talao Pagang Jorong Rantau Panjang, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Simpang Tigo Bedeng, nagari Koto Baru, Kec Luhak Nan Duo, Kab.		1 Paket	Usulan Pokir

						Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat			
						Jorong Bandar Baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Padang Halaban, kec Sasak Ranah Pasisie, kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong malasiro, nagari Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong bandar baru, Kec Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Enam koto nagari kinali, Kec Kinali, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong padang halaban, Kec sasak ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Pasa lamo, Kec Sasak Ranah Pasisie. Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong pasa lamo, Kec Sasak ranah pasisie, kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						jorong pasa lamo, kec. sasak ranah pasisie, kab. pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Padang Halaban, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong bandar baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong padang Halaban, Kec. Sasak Ranah pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir

						Jorong Kapa Selatan, Kec Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Nagari Lingkuang Aua Baru Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kapa, Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						jorong Parit Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Mulyorejo, Nagari Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kelompok Tani Pulau Saiyo Lubuak Sariak Kajai Kec Talamau, Kab. Pasaman Barat		10 ekor	Usulan Pokir
						Jr Tanjuang Pangka Lingkuang Aua Kec Pasaman, Kab. Pasaman Barat		10 ekor	Usulan Pokir
						Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		20 ekor	Usulan Pokir
						Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		4000 ekor	Usulan Pokir
						Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		20 ekor	Usulan Pokir
						Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 paket	Usulan Pokir
						Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		150 ekor	Usulan Pokir
						Kec. Luhak Nan duo, Kab. Pasaman Barat		200 ekor	Usulan Pokir

						Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Lubuk gadang Kecamatan Koto balingka, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kelompok Mitra Bersama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kelompok Harapan Jaya, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Bandar Baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kelompok Tani Jaya, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Bandar baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
					Pelatihan Petani/Peternak	Jorong Mudiak Labuah, Nagari Kinali, Kec. Kinali			Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 Sesuai SIPD
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		Persentase realisasi kegiatan APBN		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
3	27	02	2.01	00 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		Usulan Aspirasi dan Usulan Pokir
					Pengadaan bibit unggul kelapa sawit, pinang, kelapa, kopi dan komoditi perkebunan	Kecamatan Pasaman dan Talamau, Kab. Pasaman Barat		3 paket	Usulan Pokir
						Padang Lawas Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
						Jorong Bandar Baru, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		1 Paket	Usulan Pokir
					Pengadaan pupuk NPK,	Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo,		250	Usulan Pokir

					Urea dan jenis pupuk	Kab. Pasaman Barat		karung	
						Keltan Bukit Berseri Jorong Kampung Randah Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat		1 paket	Usulan Pokir
						Kelompok Tani Kampung III Mahakya Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		1 paket	Usulan Pokir
						Nagarai maha karya, Kab. Pasaman Barat		200 karung	Usulan Pokir
						Nag. Maha Karya, Kab. Pasaman Barat		200 karung	Usulan Pokir
						Kp III Jrg Mahakarya Nag Mahakarya, Kab. Pasaman Barat		200karung	Usulan Pokir
						Alamat Kp III Jrg Mahakarya Nag Mahakarya., Kab. Pasaman Barat		150 karung	Usulan Pokir
						Kp.II jrg.Mahakarya.Nag Mahakarya, Kab. Pasaman Barat		200 karung	Usulan Pokir
						Kp 5.Jrg Mahakarya.Nag Mahakarya., Kab. Pasaman Barat		200 karung	Usulan Pokir
						Durian III batang.Jrg Simpang Tiga.Nag Simpang Tiga., Kab. Pasaman Barat		100 karung	Usulan Pokir
						Durian III batang jrg Simpang Tiga Nag. Simpang Tiga., Kab. Pasaman Barat		150 karung	Usulan Pokir
						Inti .I.jrg Sarik.Nag.Sarik., Kab.		200	Usulan Pokir

						Pasaman Barat		karung	
						Inti II.jrg Sarik .Nag .Sarik, Kab. Pasaman Barat		200 karung	Usulan Pokir
						Nag. Maha karya, Kab. Pasaman Barat		150 karung	Usulan Pokir
						Nag. Mahakarya, Kab. Pasaman Barat		150 karung	Usulan Pokir
						Nagari mahakarya, Kab. Pasaman Barat		100 karung	Usulan Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Berdasarkan Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 - 2024, yakni:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai misi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

“Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, mewujudkan kesejahteraan petani, mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntable, profesional dan berintegritas tinggi”

Sedangkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2020-2024 adalah

"Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak, meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak, mengembangkan usaha di bidang

peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan"

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan dan peternakan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan dan produksi peternakan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi pada perkebunan tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional sedangkan untuk peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh .

2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihiliriasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.

3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional.

Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang salin bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Penetapan dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2020 – 2024 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan ditingkat Daerah yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam pembangunan perkebunan. 6 (enam) kegiatan ditingkat Direktorat Jenderal, yaitu:

1) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;

   Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas

tanaman perkebunan, yang pada akhirnya menigkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

2) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;

   Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

3) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;

   Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

5) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan;

Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

6) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Visi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah

"Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak"

Misi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

- Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak
- Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan

- Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

Program-program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Program-program Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan berperan dalam mendukung pencapaian target misi 3 dan sasaran 4 dengan turunan tujuan untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan. Misi 3 yaitu mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan tujuan 4 yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan. Tujuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan ini kemudian diuraikan ke dalam sasaran dan target kinerja sasaran per tahun yang menjadi pokok perhatian dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2024 dapat dilihat pada sasaran kinerja tahun 2024 pada tabel sasaran renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sub sektor perkebunan			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1. % Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditi perkebunan	**2,23**	**2,25**	**2,65**	**3,00**	**3,25**	**3,50**
			Kelapa Sawit	2,227	2.247	2.646	2.9953	3.244	3.4924
			Kopi Arabika	0,00001	0.00001	0.00003	0.00005	0.00008	0.00010
			Kopi Robusta	0,00061	0.00061	0.00065	0.00067	0.00070	0.00072
			Nilam	0,00066	0.00066	0.00090	0.00140	0.00150	0.00160
			Kelapa Dalam	0,00140	0.00140	0.00174	0.00178	0.00192	0.00214
			Kelapa Hibrida	-	-	-	-	0.00090	0.00190
			Pinang	0,00032	0.00032	0.00068	0.00080	0.00090	0.00114
		2. Peningkatan produksi ternak	% Peningkatan populasi komoditas peternakan	1,98	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80
			Sapi	19.929	20.793	21.225	21.657	22.089	22.521
			Kambing	14.056	14.750	15.097	15.444	15.791	16.138
			Unggas	735.334	749.743	764.134	778.534	792.934	807.334
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
			2. Level Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
			3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, program-program yang direncanakan Dinas Perkebunan da Peternakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tertuang dalam 7 (Tujuh) program yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 33 (Tiga puluh tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Pengadaan Mebel
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Pengguna Sarana Pertanian
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Pengembangan Prasarana Pertanian
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
   b. Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
      - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
   b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

6. Program Perizinan Usaha Pertanian
   a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

7. Program Penyuluhan Pertanian
   a. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
      - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
      - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
      - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
      - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**5.420.003.804,00**							**27.167.914.153,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.420.003.804,00**							**27.167.914.153,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.420.003.804,00**							**27.167.914.153,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**4.468.389.204,00**						**100 %**	**5.220.068.328,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran*	100 %			100 %	37.454.000,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	100 %	80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	24.776.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		45.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12.677.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		35.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi keuangan*	100 %			100 %	4.035.311.684,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	100 %	4.517.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.692.967.084,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	4.152.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	328.422.100,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	280.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.922.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola*	69 Unit			69 Unit	13.498.900,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	69 Unit	35.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.498.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		35.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek*	40 Orang			10 Orang	0,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	10 Orang	55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				291 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		35.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran*	100 %			100 %	185.510.700,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	100 %	220.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.084.300,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	130.926.400,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	130.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANG KAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*	37 Unit			6 Unit	0,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	7 Unit	52.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		27.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor*	100 %			100 %	95.587.670,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	100 %	109.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.865.560,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		63.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36.722.110,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		46.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara*	69 Unit			69 Unit	101.026.250,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	69 Unit	152.068.328,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	58.696.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	77.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	23.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	28.068.328,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	19.330.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	47.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)***	**31,45,28279 44,158535,2 76713,9552, 12853,3858 ton**			**29,30,28140 05,154847,2 71978,9502, 12653,2958 ton**	**429.222.000,00**						**31,45,28279 44,158535,2 76713,9552, 12853,3858 ton**	**2.000.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase realisasi kegiatan APBN*	85 %			85 %	29.400.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	85 %	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	29.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas Kebun Induk yang dipelihara*	14 Hektar			14 Hektar	399.822.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	14 Hektar	1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				6 Dokumen	399.822.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-		1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun***	**69,50,15,20, 11,7,1,1,1,1 km,km,unit, km ,unit,unit ,unit,unit,unit,unit**			**69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 k m,km,unit,km ,unit,unit,unit,unit,unit,unit**	**116.885.000,00**						**69,50,15,20, 11,7,1,1,1,1 km,km,unit, km ,unit,unit ,unit,unit,unit,unit**	**14.750.918.464,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase pengembangan prasarana pertanian (%)*	50 %			50 %	26.885.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	50 %	4.750.918.464,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	26.885.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-		4.750.918.464,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase penyediaan prasarana pertanian (%)*	80 %			80 %	90.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	80 %	10.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	90.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-		10.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular***	**85 %** **85 %**			**85 %**	**179.073.900,00**						**85 %** **85 %**	**727.650.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah WabahPenyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS)*	12 Bulan			12 Bulan	26.214.450,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	12 Bulan	27.650.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	26.214.450,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-	27.650.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner*	12 Kecamatan			11 Kecamatan	152.859.450,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	12 Kecamatan	700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	152.859.450,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-		700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)***	**30,30,10 %**			**20,20,9 %**	**28.463.500,00**						**30,30,10 %**	**243.101.250,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah lokasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	11 Kecamatan			11 Kecamatan	28.463.500,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	11 Kecamatan	243.101.250,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				150 Ha	28.463.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		243.101.250,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)***	**80 %**			**58.33 %**	**14.835.000,00**						**80 %**	**36.465.188,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat PUP*	18 Perusahaan			13 Perusahaan	14.835.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah petani	-	18 Perusahaan	36.465.188,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				23 Laporan	14.835.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah	-		36.465.188,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

											petani				
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih***	**7-7 %**			**1-1 %**	**183.135.200,00**						**1-1 %**	**4.189.710.923,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Perkebunan yang dilaksanakan*	1 Tahun			1 Tahun	183.135.200,00			-	Peningkatan nilai tambah petani	-	1 Tahun	4.189.710.923,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Unit	158.143.150,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		2.750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				22 Unit	24.992.050,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan nilai tambah petani	-		1.439.710.923,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	J U M L A H							**5.420.003.804,00**							**27.167.914.153,00**	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun anggaran 2024. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja tahun 2024 ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak dan stakeholder yang terkait.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan serta tugas pembantuan, diharapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat berkontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan dan peternakan serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat dengan menghasilkan komoditas perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Sukomananti, Juli 2023

Plt. KEPALA,

RONI HENDRI EKA PUTRA

Pembina / IV.a

NIP.19770809 200604 1 013

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45/ /BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;

7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat 2024;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023 Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : Maret 2023

BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI

Lampiran 1 Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/ /BUP-PASBAR/2023
Tanggal : Maret 2023
Tentang : Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
Ketua	Roni Hendri Eka Putra, S.Hut	Kepala
Sekretaris	Asri Yarsi, SP	Analis Statistik
Kelompok Kerja Sekretariat		
Koordinator	Yopi Indra, S.AP	Analis Keuangan Daerah dan Pusat
Anggota	Nofriyanti, S.ST	Analis Kepegawaian
Anggota	Artina Puspita, S.Si	Statistisi
Kelompok Kerja Bidang Perkebunan		
Koordinator	Afrizal, SP, M.Si	Kabid Perkebunan
Anggota	Zairil Andri, SP	Pengawas Benih Tanaman
Anggota	MHD. Zulfikar, STP, M.Si	Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan
Anggota	Aulivia Andre, SP	Pengawas Benih Tanaman
Kelompok Kerja Bidang Peternakan		
Koordinator	Ikhsan Radika, SP	Kabid Peternakan
Anggota	Dian Eka Apriani, S.Pt	Pengawas Bibit dan Produksi Ternak
Anggota	Jumiarti, S.Pt	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas
Kelompok Kerja Bidang Prasarana dan Sarana		
Koordinator	Tabrani, S.Ag	Kabid Prasarana dan Sarana
Anggota	Sri Muryani, SP	Pengawas Mutu Hasil
Anggota	M. Zulfikar Yusuf Nst,SP	Analis Kebijakan
Anggota	Nurul Vadilla, S.TP	Analis Pengolah Hasil Pertanian
Anggota	Dwi Asti Purnama, SP	Analis Lahan Pertanian
Kelompok Kerja Bidang Penyuluhan		
Koordinator	Ermin Damanik, SP	Kabid Penyuluhan
Anggota	Yunita, S.Pt	Analis Kebijakan

Anggota	Desi Novianti, SP	Analis Kebijakan
Anggota	Rizki Painan Putra, SE	Analis Kebijakan

BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024

Jln. Soekarno Hatta-Padang Tujuh Tlp. (0753) 4611810 FAX (0753) 4611810

Simpang Empat Pasaman Barat

DAFTAR ISI

			Halaman
DAFTAR ISI			i
KATA PENGANTAR			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematis Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**		8
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
	2.2	Ananlisas Kinerja Pelayanan OPD	11
	2.3	Isu –Isu Penting penyenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	14
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
	2.5	Penelaahaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	29
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN OPD**		30
	3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Propinsi dan Nasional	30
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	31
	3.3	Program dan Kegiatan	34
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**		35
BAB V	**PENUTUP**		43

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 yang berisikan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan teramasuk juga Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renja ini disusun dengan mempedomani Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanan yakni perencanan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/I non struktural/fungsional dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan distribusi terhadap hasil-hasil Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Juli 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DASRIAL, S.Sos
NIP. 19691216 200604 1 002

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan (2023), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sekretariat DPRD Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

memiliki arti penting karena memfasilitasi Lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat.

Selanjutnya, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024. Oleh sebab itu, kualitas Renja sangat menentukan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, Renja juga menjadi salah satu dokumen yang mendeskripsikan kemampuan Sekretariat DPRD dalam melihat permasalahan kemudian disusun, dikelompokan, diorganisasikan, diimplementasikan, dikendalikan serta dievaluasi setiap capaian output dan outcome pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusunan dan perencanaan penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut :

1. Pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
5. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka rencana Kerja ini diharapkan dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang OPD, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* OPD *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* OPD, Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Pengukuran Kinerja adalah sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam menwujudkan Visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 2 (dua) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretaiat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2023. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat pada tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2024) disajikan pada table 2.1.1 sebagai Berikut :

Tabel 2.1.1. (T-C.29)

EVALUASI HASIL RKPD PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode 2						Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)	
									Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)
1	*2*	*3*						*5*	*6*		*7*		*8*		*12*		*13= 9/8x 100*		*14= 7+13*		*15= 14/6 x 100*		*16*	*17*
I	**1.Meningkatkan Akuntabilitasi Kinerja Sekretariat DPRD**	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**26.490.286.006**	**100%**	**27.484.740.926**	**100%**	**83.739.199.030**	**100%**	**24.693.807.820**	**100%**	**24.693.807.820**	**100%**	**52.178.548.746**	**942**	**1.294**	**100%**	100%
1		**4**	**02**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**3.289.475.318**	**100%**	**2.987.030.329**	**100%**	**3.529.864.666**	**100%**	**3.024.562.299**	**100%**	**3.024.562.299**	**100%**	**6.011.592.628**	**1,9**	**3,2**	**100%**	100%
		4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan tunjangan	29 Orang	2.978.215.318	29 Orang	2.860.680.329	29 Orang	3.244.724.666	29 Orang	2.750.867.299	29 Orang	2.750.867.299	29 Orang	5.611.547.628	1,4	1,9	**100%**	100%
		4	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	311.260.000	12 bulan	126.350.000	12 bulan	285.140.000	12 bulan	273.695.000	12 bulan	273.695.000	12 bulan	400.045.000	0,5	1,3	**100%**	100%
2		**4**	**02**	**01**	**2**		**Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang milik Daerah yang dikelola Sekretariat DPRD**	**202 Unit**	**19.200.000**	**202 Unit**	**15.350.000**	**100%**	**4.800.000**	**202 Unit**	**4.800.000**	**202 Unit**	**4.800.000**	**202 Unit**	**20.150.000**	**0,8**	**1,0**	**100%**	100%
		4	02	01	2,03	06	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 orang PNS (Pengurus Barang) dan 1 Orang THL (Pembantu pengurus Barang)	19.200.000	1 orang PNS (Pengurus Barang) dan 1 Orang THL (Pembantu pengurus Barang)	15.350.000	2 orang	4.800.000	2 orang	4.800.000	2 orang	4.800.000	2 orang	20.150.000	0,8	1,0	**100%**	100%
3		**4**	**02**	**01**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN Yang mengikuti BINTEK**	**29 Orang**	**1.204.162.000**	**29 Orang**	**96.119.000**	**100%**	**128.580.000**	**29 Orang**	**81.957.800**	**29 Orang**	**81.957.800**	**29 Orang**	**178.076.800**	**0,1**	**0,2**	**100%**	100%
		4	02	01	2,05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	5 Orang	250.000.000	5 Orang		2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	-	-	**100%**	100%
		4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Bintek atau Diklat Pim	15 Orang	954.162.000	15 Orang	96.119.000	10 orang	128.580.000	10 orang	81.957.800	10 orang	81.957.800	10 orang	178.076.800	0,1	0,2	**100%**	100%
4		**4**	**02**	**01**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**100%**	**5.467.669.822**	**100%**	**703.699.298**	**100%**	**795.488.866**	**100%**	**658.712.258**	**100%**	**658.712.258**	**100%**	**1.362.411.556**	**1,1**	**1,9**	**100%**	100%

		4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Penerangan dan Alat Instalasi Listrik Penujang Operasional Kantor	1 Paket	425.413.696	1 Paket	52.483.348	1 paket	42.205.346	1 paket	41.683.758	1 paket	41.683.758	1 paket	94.167.106	0,2	0,2	**100%**	100%
		4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Dibutuhkan	1 Paket	265.988.600	1 Paket	128.658.900	1 paket	160.468.800	1 paket	159.645.700	1 paket	159.645.700	1 paket	288.304.600	0,6	1,1	**100%**	100%
		4	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	1 Paket	1.268.740.000	1 Paket	28.840.000	1 paket	196.516.000	1 paket	191.606.000	1 paket	191.606.000	1 paket	220.446.000	0,0	0,2	**100%**	100%
		4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Cetakan Yang dibutukan Sekretariat DPRD	1 Paket	1.547.645.126	1 Paket	200.533.750	1 paket	165.132.500	1 paket	130.694.500	1 paket	130.694.500	1 paket	331.228.250	0,1	0,2	**100%**	100%
		4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12 Kali	1.959.882.400	12 Kali	293.183.300	24 kali	231.166.220	24 kali	135.082.300	24 kali	135.082.300	24 kali	428.265.600	0,2	0,2	**100%**	100%
5		**4**	**02**	**01**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Untuk Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD**	**80 Buah**	**8.528.830.266**	**80 Buah**	**1.221.517.000**	**100%**	**567.397.580**	**80 Buah**	**555.629.148**	**80 Buah**	**555.629.148**	**80 Buah**	**1.777.146.148**	**0,3**	**0,5**	**100%**	100%
		4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor Penujang Operasional Kerja	80 Buah	3.215.980.000	80 Buah	619.874.000	80 unit	370.057.580	80 unit	360.639.148	80 unit	360.639.148	80 unit	980.513.148	0,2	0,3	**100%**	100%
		4	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Paket	5.312.850.266	3 Paket	601.643.000	2 paket	197.340.000	2 paket	194.990.000	2 paket	194.990.000	2 paket	796.633.000	0,1	0,1	**100%**	100%
6		**4**	**02**	**01**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor**	**100%**	**2.240.446.600**	**100%**	**774.490.183**	**100%**	**1.257.627.810**	**100%**	**1.200.615.504**	**100%**	**1.200.615.504**	**100%**	**1.975.105.687**	**1,27**	**2,25**	**100%**	100%
		4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sumber Daya air, Listrik dan Internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	1.551.421.600	12 Bulan	416.064.943	12 bulan	384.002.810	12 bulan	352.171.335	12 bulan	352.171.335	12 bulan	768.236.278	0,3	0,5	**100%**	100%
		4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor DPRD dan Rumah Dinas DPRD	1 Paket	689.025.000	1 Paket	358.425.240	1 paket	873.625.000	1 paket	848.444.169	1 paket	848.444.169	1 paket	1.206.869.409	0,9	1,8	**100%**	100%
7		**4**	**02**	**01**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Sekretariat DPRD**	**186 Unit**	**5.630.252.000**	**186 Unit**	**793.499.750**	**100%**	**824.700.380**	**186 Unit**	**655.711.805**	**186 Unit**	**655.711.805**	**186 Unit**	**1.449.211.555,0**	**0,3**	**0,7**	**100%**	100%
		4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Di Pelihara	22 Unit	2.403.952.000	22 Unit	422.847.750	22 unit	338.326.000	22 unit	309.684.805	22 unit	309.684.805	22 unit	732.532.555	0,2	0,3	**100%**	100%
		4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	226.300.000	158 unit		158 unit	98.035.000	158 unit	26.455.000	158 unit	26.455.000	158 unit	26.455.000	-	0	**100%**	100%
		4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan yng terpelihara dan direhab	6 Unit	3.000.000.000	6 unit	370.652.000	6 unit	388.339.380	6 unit	319.572.000	6 unit	319.572.000	6 unit	690.224.000	0,1	0,2	**100%**	100%

8		**4**	**0 2**	**0 1**	**2, 2**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Keuangan Dan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**	**100%**	**80.250.000**	**100%**	**15.773.788.565**	**100%**	**16.489.092.694**	**100%**	**13.500.327.296**	**100%**	**13.500.327.296**	**100%**	**29.274.115.861**	**456,5**	**609,4**	**100%**	100%
		4	0 2	0 1	2, 1 5	0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD yang Mendapat Kan Gaji Dan Tunjangan	40 Orang	50.250.000	40 orang	15.480.528.565	40 orang	16.099.092.694	40 orang	13.220.163.296	40 orang	13.220.163.296	40 orang	28.700.691.861	437	571	**100%**	100%
		4	0 2	0 1	2, 1 5	0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Pimpinan dan Anggta DPRD	200 Stel	15.000.000	200 Stel	293.260.000	200 stel	310.000.000	200 stel	280.164.000	200 stel	280.164.000	200 stel	573.424.000	19,6	38,2	**100%**	100%
		4	0 2	0 1	2, 1 5	0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Personil Yang Melaksanakan Medical Check Up	40 Orang	15.000.000	40 Orang		40 orang	80.000.000	40 orang	-	40 orang	-	40 orang	-	-	-	**100%**	100%
9		**4**	**0 2**	**0 1**	**2, 2**		**Layanan Administrasi DPRD**	**1. Jumlah Penyediaan Makan/ Minum Rapat DPRD 2. Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD**	**1. 12 Kali 2. 36 Kali**	**30.000.000**	**1. 12 Kali 2. 36 Kali**	**5.119.246.801**	**1. 12 Kali 2. 36 Kali**	**6.166.620.100**	**1. 12 Kali 2. 36 Kali**	**5.011.491.710**	**1. 12 Kali 2. 36 Kali**	**5.011.491.710**	**1. 12 Kali 2. 36 Kali**	**10.130.738.511**	**479,4**	**675,4**	**100%**	100%
		4	0 2	0 1	2, 1 6	0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah makan/minum rapat DPRD serta bertambahnya masukan masukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah NON PNS (THL) yang akan Memfasilitasi DPRD	1. 23 Orang 2. 12 kali	15.000.000	1. 23 Orang 2. 12 kali	4.607.290.301	12 kali,12 orang	5.386.620.100	12 kali, 12 orang	4.242.720.710	12 kali, 12 orang	4.242.720.710	12 kali,12 orang	8.850.011.011	423,9	590,0	**100%**	100%
		4	0 2	0 1	2, 1 6	0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	12 kali	15.000.000	12 kali	511.956.500	12 bulan	780.000.000	12 bulan	768.771.000	12 bulan	768.771.000	12 bulan	1.280.727.500	55,5	85,4	**100%**	100%
II	**2. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi DPRD**	**4**	**0 2**	**0 2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	100%	**7.191.590.300**	100%	**10.820.684.965**	100%	**76.441.808.092**	100%	**12.888.796.086**	100%	**12.888.796.086**	100%	23.709.481.051,00	100%	34,2	**100%**	100%
10		**4**	**0 2**	**0 2**	**2**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Ranperda yang dibahas**	**7 Ranperda**	**52.650.000**	**7 Ranperda**	**1.125.000**	**100%**	**1.711.259.200**	**100%**	**752.516.550**	**100%**	**752.516.550**	**100%**	**753.641.550**	**11,19**	**14,31**	**100%**	100%
		4	0 2	0 2	2, 0 1	0 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas	7 Ranperda	52.650.000	7 Ranperda	1.125.000	10 ranperda	1.711.259.200	10 ranperda	752.516.550	10 ranperda	752.516.550	10 ranperda	753.641.550	11,19	14,31	**100%**	100%
11		**4**	**0 2**	**0 2**	**2**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran**	**2 Dokumen**	**333.835.000**	**2 Dokumen**	**234.461.250**	**100%**	**268.403.600**	**2 Dokumen**	**224.876.000**	**2 Dokumen**	**224.876.000**	**2 Dokumen**	**459.337.250**	**1,4**	**2,8**	**100%**	100%
		4	0 2	0 2	2, 0 2	0 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Pembasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	166.917.500	1 Dokumen	122.672.750	1 dokumen	136.823.200	1 dokumen	115.246.000	1 dokumen	115.246.000	1 dokumen	237.918.750	0,7	1,4	**100%**	100%
		4	0 2	0 2	2, 0 2	0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1 Dokumen	166.917.500	1 Dokumen	111.788.500	1 dokumen	131.580.400	1 dokumen	109.630.000	1 dokumen	109.630.000	1 dokumen	221.418.500	0,7	1,3	**100%**	100%

12		**4**	**02**	**02**	**2**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1. Jumlah Bimtek yang diikuti anggota dewan 2. Persentase peningkatan kemampuan profesional pimpinan dan anggota melalui Bimtek /Pelatihan**	**100%**	**3.746.915.000**	**100%**	**3.181.710.365**	**100%**	**4.267.030.100**	**100%**	**3.771.084.809**	**100%**	**3.771.084.809**	**100%**	**6.952.795.174**	**3,7**	**5,8**	**100%**	100%
		4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek/ Diklat	41 Orang	2.578.090.000	41 Orang	2.045.025.365	41 orang	2.987.530.100	41 orang	2.588.306.809	41 orang	2.588.306.809	41 orang	4.633.332.174	1,11	1,80	**100%**	100%
		4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1. Jumlah Produk Kebijakan Pimpinan dan Anggota Terpublikasi 2. Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD	1. 40 Kegiatan 2.12 Dokumentasi	832.825.000	1. 40 Kegiatan 2.12 Dokumentasi	800.685.000	1.40 kegiatan 2.12 dokumentasi	943.500.000	1.40 kegiatan 2.12 dokumentasi	846.778.000	1.40 kegiatan 2.12 dokumentasi	846.778.000	1.40 kegiatan 2.12 dokumentasi	1.647.463.000	1,2	2,0	**100%**	100%
		4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	336.000.000	8 Orang	336.000.000	8 orang	336.000.000	8 orang	336.000.000	8 orang	336.000.000	8 orang	672.000.000	1,4	2,0	**100%**	100%
13		**4**	**02**	**02**	**2,1**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimputan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**1.628.940.000**	**100%**	**1.273.525.000**	**100%**	**1.470.972.600**	**100%**	**1.271.362.000**	**100%**	**1.271.362.000**	**100%**	**2.544.887.000,0**	**1,4**	**2,2**	**100%**	100%
		4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Terawasinya Pembangunan di Daerah	24 objek pengawasan	112.640.000	24 objek pengawasan	34.471.500	24 objek pengawasan	137.619.600	24 objek pengawasan	32.380.000	24 objek pengawasan	32.380.000	24 objek pengawasan	66.851.500	0,3	0,6	**100%**	100%
		4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses	3 Kali	1.516.300.000	3 Kali	1.239.053.500	3 kali	1.333.353.000	3 kali	1.238.982.000	3 kali	1.238.982.000	3 kali	2.478.035.500	1,1	1,6	**100%**	100%
14		**4**	**02**	**02**	**2,1**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Laporan Kerjasama antar Daerah**	**12 Kali**	**1.429.250.300**	**12 Kali**	**6.129.863.350**	**12 Kali**	**9.195.798.400**	**12 Kali**	**6.868.956.727**	**12 Kali**	**6.868.956.727**	**12 Kali**	**12.998.820.077,00**	**6,5**	**9,1**	**100%**	100%
		4	02	02	2,07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah persetujuan kerjasama antar Daerah di Fasilitasi	12 Kali	1.429.250.300	12 Kali	6.129.863.350	12 kali,	9.195.798.400	12 kali,	6.868.956.727	12 kali,	6.868.956.727	12 kali,	12.998.820.077	6,5	9,1	**100%**	100%
								TOTAL		**33.681.876.306**		**38.305.425.891**		**46.677.635.996**		**37.582.603.906,00**							**100%**	100%

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp46.677.635.996,00 (empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluhlima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). Alokasi tahun 2022 digunakan untuk mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mewujudkan sistem pelayanan yang berkualitas. Penggunaan anggaran Sekretariat DPRD pada tahun 2022 diuraikan ke dalam 2 (dua) program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Berdasarkan tabel T-C.29, progress dan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 sebesar Rp37.582.603.906,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) atau terealisasi sebesar 80,51%. Sementara masih terdapat anggaran sebesar Rp9.095.032.090,00 (sembilan milyar Sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu Sembilan puluh rupiah) atau tidak terealisasi sebesar 19,49%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan pada tahun 2022 ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan pagudana sebesar Rp9.095.032.090,00 terdiri dari sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagudana sebesar Rp197.340.000,00
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp388.339.380,00
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar Rp80.000.000,00

Sedangkan kegiatan yang kurang efektif pelaksanaannya terdiri dari kegiatan:

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagudana sebesar Rp231.166.220,00 terealisasi sebesar Rp135.082.300,00 atau sebesar 58,44%
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagudana sebesar Rp98.035.000,00 terealisasi sebesar Rp26.455.000,00 atau sebesar 26,99%
3. Pembahasan rancangan ranperda dengan pagudana sebesar Rp1.711.259.200,00 terealisasi sebesar Rp752.516.550,00 atau sebesar Rp43,97%

4. Kunjungan kerja dalam daerah dengan pagudana sebesar Rp137.619.600,00 dengan realisasi sebesar Rp32.380.000,00 atau sebesar Rp23,53%
5. Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah dengan pagudana sebesar Rp9.195.798.400,00 terealisasi sebesar Rp6.868.956.727,00 atau sebesar 74,70%

Rendahnya realisasi APBD TA.2022 dikarenakan penganggaran tiket pesawat direncanakan dengan menggunakan pesawat jalur transit namun dipelaksanaan hanya 1 (satu) kali penerbangan sehingga realisasi tidak efektif.

Tabel 2.1.2.

Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2022

Indikator Kinerja				Target	Realisasi Target	% Capaian Kinerja (realisasi fisik)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota					100%
	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	29 orang	
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 dokumen	15 dokumen	100%
	b.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
	c.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%
		4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	2 orang	100%
		5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	100%
	d		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100%
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100%
		8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan kebersihan kantor	1 paket	1 paket	100%
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100%
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kali	14 kali	100%
	e		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%
		11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80 unit	80 unit	100%
		12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 paket	-	0%
	f		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%
		13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	1 paket	100%
	g		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%
		15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	22 unit	100%
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158 unit	22 unit	100%
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	-	100%
II.	Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					100%

	h		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			100%
		18	Pembahasan Rancangan Perda	10 ranperda	3 ranperda	100%
	i		Pembahasan Kebijakan Anggaran			100%
		19	Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	100%
		20	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	100%
	j		Peningkatan Kapasitas DPRD			100%
		21	Pendalaman Tugas DPRD	41 orang	41 orang	100%
		22	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	41 kegiatan	41 kegiatan	100%
		23	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	100%
	k		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100%
		24	Kunjungan Kerja dalam Daerah	24 objek pengawasan	24 pengawasan	100%
		25	Pelaksanaan Reses	3 kali	2 kali	67%
	l		Pembahasan Kerja Sama Daerah			100%
		26	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	12 kali	12 kali	100%
	m		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100%
		27	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40 orang	40 orang	100%
		28	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	200 stel	200 stel	100%
		29	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	40 orang	-	0%
	n		Layanan Administrasi DPRD			100%
		30	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 kali	12 kali	100%
		31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	12 bulan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-5 Pembangunan Daerah periode 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, melalui pencapaian tujuan meningkatkan penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan linmas dengan target indikator utama, yakni:

Meningkatnya jumlah produk hukum yang ditetapkan, yang ditargetkan mencapai 7 Perda pada tahun 2024.

Hingga tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja sudah mencapai 100% yaitu sebanyak 7 Perda. Terwujudnya capaian kinerja tersebut mempunyai arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD, sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk menetapkan Produk hukum dalam hal penetapan Perda yang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sejauh ini hal tersebut sudah berjalan lancar dan baik.

Secara garis besar kinerja Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat terkait dengan pelaksanaan urusan mewujudkan pemerintahan yang transpran dan akuntabel telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target						KET
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Peran Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Fungsi DPRD		Persentase Penetapan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Peran Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Pembahsan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
			Level Maturitas	2	2	3	3	3	3	3	
			Persentase Penurunan temuan BPK	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	
			Persentase Layanan Administrasi Sekretariat DPRD Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat	Nilai Sakip	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
			Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3	
			Persentase Penurunan Temuan BPK	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	
			Persentase Layanan Administrasi Sekretariat DPRD Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari seluruh pejabat yang terlibat di Sekretariat DPRD
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengirimkan aparatur perencana untuk mengikuti pendidikan bidang perencanaan, sehingga diperoleh aparatur perencana yang berkualitas
3. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah, baik dari segi waktu maupun substansi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempedomani segala regulasi terkait proses dan prosedur perencanaan pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja yang terukur dan dapat dilaksanakan.
4. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat OPD maupun di tingkat kabupaten, atau pemerintahan yang lebih tinggi.

Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat berperan sebagai koordinator dalam proses perencanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat. Untuk itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat selain berkoordinasi dengan seluruh Anggota dan Pimpinan DPRD terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait. Untuk itu, aparatur perencana yang ada di Sekretarait DPRD Kab. Pasaman Barat harus melakukan fungsi ganda, selain menjalankan Tupoksi utama di tingkat Kabupaten, sementara Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi untuk Pembangunan Daerah, seperti:

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada

kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD
4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk tahun 2024, diproyeksikan bahwa APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp35.436.792.436,00

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-C.31
Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD :
Sekretariat DPRD
Kab.Pasaman
Barat

No.	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Kab. Pasaman Barat**	**Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Persentase Pelayanan Administrasi dan Keuangan DPRD (%)**		**27.462.223.436**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Persentase Pelayanan Administrasi dan Keuangan DPRD (%)**		**30.039.953.656**	
1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	**4.370.655.212**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	**3.500.289.805**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kab.Pasaman Barat	Tersedianya Gaji PNS dan Tunjngan ASN.	29 orang	3.475.645.212		Tersedianya Gaji PNS dan Tunjngan ASN.	29 orang	3.275.789.805	
2)	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	55 orang	577.850.000		Jumlah Non PNS (THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	55 orang	-	
3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Pasaman Barat	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	317.160.000		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	224.500.000	
2	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Milik**	**100%**	**14.400.000**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**8.400.000**	

			Daerah pada Perangkat Daerah							
4)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Pasaman Barat	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Barang Milik Daerah OPD	2 orang	14.400.000		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Barang Milik Daerah OPD	2 orang	8.400.000	
3	**Kegiatan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	Kab. Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**	**178.082.400**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**	**160.080.000**	
5)	Sub Pengandaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD yang Membutuhkan Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya	69 orang	-		Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD yang Membutuhkan Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya	69 orang	-	
6)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan	5 orang	7.500.000		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan	5 orang	7.500.000	
7)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Diklat	10 orang	170.582.400		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Diklat	15 orang	152.580.000	
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	**619.559.720**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	**523.670.866**	
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	67.258.750		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	33.155.346	
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pasaman Barat	Jumlah ATK yang Dibutukhan	1 paket	**260.031.570**		Jumlah ATK yang Dibutukhan	1 paket	**76.748.800**	
10)	Sub Kegiatan Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	157.793.000		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	123.200.000	
11)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Cetakan yang Dibutuhkan Sekretariat DPRD	1 paket	-		Jumlah Cetakan yang Dibutuhkan Sekretariat DPRD	1 paket	-	
12)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat (K/R) yang Diikuti	24 kali	**134.476.400**		Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat (K/R) yang Diikuti	24 kali	**290.566.720**	

5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase terpenuhinya Kegiatan Pununjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	474.397.170		**Persentase terpenuhinya Kegiatan Pununjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	500.000.000	
13)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya	3 unit	-		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya	3 unit	-	
14)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainya	80 unit	232.337.170		Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainya	80 unit	250.000.000	
15)	Sub Kegiatan Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Paaman Barat	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	3 paket	242.060.000		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	3 paket	250.000.000	
6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**930.652.640**		**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.212.025.791**	
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	454.402.640		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	454.400.791	
17)	Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	476.250.000		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	1.757.625.000	
7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**100%**	701.849.000		**Persentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**100%**	715.361.000	
18)	Sub Kegiatan Peneydiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kab.Pasaman Barat**	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	22 unit	322.124.000		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	22 unit	310.626.000	
19)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158 unit	104.775.000		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158 unit	104.735.000	
20)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah pemeliharan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	6 unit	274.950.000		Jumlah pemeliharan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	6 unit	300.000.000	

21)	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Terpelihara dan yang Direhab	1 paket	-		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Terpelihara dan yang Direhab	1 paket	-	
8.	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	16.988.889.194		**Persentase Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	16.623.832.694	
22)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	40 orang	16.678.889.194		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	40 orang	15.863.832.694	
23)	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	200 stel	310.000.000		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	200 stel	680.000.000	
24)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check UP	**Kab.Pasaman Barat**	Jumlah Personil yang Melaksanakan Medical Check UP	40 orang	-		Jumlah Personil yang Melaksanakan Medical Check UP	40 orang	80.000.000	
9.	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**3.183.738.100**		**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**5.796.293.500**	
25)	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Makan/Minum DPRD Serta Bertambahnya Masukan Masukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Non PNS (THL) yang Akan Memfasilitasi Rapat DPRD	12 kali, 12 orang	2.403.738.100		Jumlah Makan/Minum DPRD Serta Bertambahnya Masukan Masukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Non PNS (THL) yang Akan Memfasilitasi Rapat DPRD	12 kali, 12 orang	5.016.293.500	
26)	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan	780.000.000		Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 kali	780.000.000	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Tugas Dan Fungsi DPRD**		**7.974.569.000**		**Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Tugas Dan Fungsi DPRD**		**15.385.993.950**	

10.	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,.**	**100%**	**1.641.729.600**		**Persentase Terpenuhnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,.**	**100%**	**1.605.504.800**	
27)	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**Kab.Pasaman Barat**	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 ranperda	1.641.729.600		Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 ranperda	1.605.504.800	
11	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Pembahsan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**343.118.150**		**Persentase Terpenuhnya Pembahsan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**321.998.000**	
28)	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	172.174.150		Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	160.999.000	
29)	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pembahsan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	170.944.000		Jumlah Pembahsan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	160.999.000	
30)	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	-	
31)	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	-	
32)	Sub Kegiatan Pembahasan Lapor Semester	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Lapor hasil Realisasi Pelaksanaan APBD Persentase	1 dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Lapor hasil Realisasi Pelaksanaan APBD Persentase	1 dokumen	-	
33)	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penanggung Jawaban APBD	1 dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penanggung Jawaban APBD	1 dokumen	-	
12	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhnya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**2.750.190.600**		**Persentase Terpenuhnya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**3.858.260.000**	
34)	Pendalaman Tugas DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	41 orang	1.912.820.000		Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	41 orang	3.093.260.000	
35)	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 kegiatan, 12 dokumentasi	837.370.600		Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 kegiatan, 12 dokumentasi	765.000.000	

36)	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	-		Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	-	
37)	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	-		Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	-	
13	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Penyerapan dan Pengimpunan Aspirasi Masyarakat.**	**100%**	**1.448.470.000**		**Persentase Terpenuhnya Penyerapan dan Pengimpunan Aspirasi Masyarakat.**	**100%**	**1.778.717.100**	
38)	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	24 objek pengawasan	161.975.000		Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	24 objek pengawasan	137.619.600	
35)	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pokok Pikiran DPRD	40 Rangkap	-		Jumlah Pokok Pikiran DPRD	40 Rangkap	-	
36)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	1.286.495.000		Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	1.641.097.500	
14	**Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Pembahasan Kerja Sama Daearh**	**100%**	**1.791.060.650**		**Persentase Terpenuhnya Pembahasan Kerja Sama Daearh**	**100%**	**7.821.514.050**	
37)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuaan Kerjasama Daerah	12 kali	1.791.060.650		Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuaan Kerjasama Daerah	12 kali	7.821.514.050	
JUMLAH					**35.436.792.436**				**45.425.947.606**	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana untuk tahun 2024 sebesar **Rp45.425.947.606** dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat dan RPJMD Periode 2021- 2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat adalah melaksanakan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pasaman Barat mempunyai arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannnya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat.

Sekretariat DPRD Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat, tetapi DPRD memfasilitasi DPRD dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Sekretariat DPRD mempunyai kegiatan Hearing dan Reses untuk memfasilitasi DPRD dalam mengumpulkan aspirasi dan usulan program dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, ada 5 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, yakni:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan mulai dari kementerian/lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta pemberantasan korupsi.
3. Penegakan pilar demokrasi, dengan fokus terhadap penegakan hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balance*, perlindungan terhadap warga negara secara non-discriminatif.
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, untuk menjamin kepastikan hukum bagi seluruh warga negara
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2021-2026) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera

Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2021-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET						KET
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi DPRD		Persentase Penetapan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Dokumen Penganggaran tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
			Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3	
			Persentase Penurunan temuan BPK	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	
			Persentase Layanan Administrasi Sekretariat DPRD Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
			Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3	
			Persentase Penurunan temuan BPK	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	
			Persentase Layanan Administrasi Sekretariat DPRD Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat selaku Melayani dan Mempasilitasi Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 2 (Dua) program yang terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan, dan 36 (Tiga Puluh Enam) sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD TA. 2024

dan PRAKIRAAN Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Sekretariat DPRD								35.436.792.436,00					35.965.168.322,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								35.436.792.436,00					35.965.168.322,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD								35.436.792.436,00					35.965.168.322,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								27.462.223.436,00					28.104.268.322,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.370.655.212,00					3.897.225.318,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman,	100 %	29 Orang /bulan	100 %	3.475.645.212,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.978.215.318,00

						n pemerintah daerah			Aua Kuniang									
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	55 Dokumen	100 %	577.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55 Dokumen	607.750.000,00
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	12 Dokumen	100 %	317.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	311.260.000,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								14.400.000,00					19.200.000,00
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	2 Laporan	202 Unit	14.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.200.000,00

						daerah												
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								178.082.400,00					1.235.212.000,00
4	02	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100%	69 Paket	29 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	31.050.000,00
4	02	01	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100%	5 Orang	29 Orang	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	250.000.000,00
4	02	01	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100%	15 Orang	29 Orang	170.582.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	954.162.000,00

4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								619.559.720,00					5.467.669.822,00
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	1 Paket	100 %	67.258.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	425.413.696,00
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	1 Paket	100 %	260.031.570,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	265.988.600,00
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	1 Paket	100 %	157.793.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.268.740.000,00
4	02	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

			6	5													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	1 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.547.645.126,00
4	02	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	1 Laporan	100 %	134.476.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.959.882.400,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								474.397.170,00					8.605.837.582,00
4	02	01	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	3 Unit	80 buah	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00
4	02	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	80 Unit	80 buah	232.337.170,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	3.512.980.000,00
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	3 Unit	80 buah	242.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.032.857.582,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								930.652.640,00					2.240.446.600,00
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Uruasan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	12 Laporan	100 %	454.402.640,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.551.421.600,00
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Uruasan Kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	1 Laporan	100 %	476.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	689.025.000,00
4	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							701.849.000,00					6.533.677.000,00
4	02	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	22 Unit	186 Unit	322.124.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	2.403.952.000,00
4	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	22 Unit	186 Unit	104.775.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	226.300.000,00

4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	6 Unit	186 Unit	274.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.000.000.000,00
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sekretariat DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	1 Unit	186 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	903.425.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								16.988.889.194,00					75.000.000,00
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Keuangan Dan Tersediannya Pakaian Dinas dan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	40 Orang/Bulan	100 %	16.678.889.194,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	45.000.000,00

								Atribut DPRD										
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Keuangan Dan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100%	200 Paket	100 %	310.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 Paket	15.000.000,00
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
						Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Keuangan Dan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100%	40 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	15.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								3.183.738.100,00					30.000.000,00
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1. Jumlah Penyediaan Makan/ Minum Rapat DPRD 2. Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1. 36 2. 12 Orang/Kali	2.403.738.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	15.000.000,00
4	02	01	2.16	004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1. Jumlah Penyediaan Makan/ Minum Rapat DPRD 2. Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	12 Paket	1. 36 2. 12 Orang/Kali	780.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								7.974.569.000,00					7.860.900.000,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								1.641.729.600,00					1.105.004.700,00
4	02	02	2.01	002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													

						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	7 Ranperda	1.641.729.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	1.105.004.700,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								343.118.150,00					333.835.000,00
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	172.174.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	126.917.500,00
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	170.944.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	126.917.500,00

4	02	02	2.02	003	Pembahasan APBD												
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	20.000.000,00
4	02	02	2.02	004	Pembahasan APBD Perubahan												
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	20.000.000,00
4	02	02	2.02	005	Pembahasan Laporan Semester												

						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	20.000.000,00
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Anggaran	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	20.000.000,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								2.750.190.600,00					3.756.915.000,00
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Kemampuan Profesional Pimpinan dan Anggota melalui Bimtek/P	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	100 %	40 Dokumen	100 %	1.912.820.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40 Dokumen	2.578.090.000,00

								elatihan	esa									
4	02	02	2.04	004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Peningkatan Kemampuan Profesional Pimpinan dan Anggota melalui Bimtek/Pelatihan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	10.000.000,00
4	02	02	2.04	005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Peningkatan Kemampuan Profesional Pimpinan dan Anggota melalui Bimtek/Pelatihan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	336.000.000,00
4	02	02	2.04	008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													

						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Peningkatan Kemampuan Profesional Pimpinan dan Anggota melalui Bimtek/Pelatihan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	837.370.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	832.825.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								1.448.470.000,00					1.628.940.000,00
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	100 %	161.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	92.640.000,00
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	40 Dokumen	20.000.000,00

4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses												
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	1.286.495.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.516.300.000,00
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								1.791.060.650,00					1.036.205.300,00
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah													
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Kerjasama antar Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Kali	1.791.060.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dokumen	1.036.205.300,00
TOTAL													**35.436.792.436,00**					**35.965.168.322,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Secara umum, rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 2 (dua) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub bagian dengan total kebutuhan dana sebesar Rp35.436.792.436,00 *(Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)*, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD: Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD 2024				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Kab. Pasaman Barat**	**Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Persentase Pelayanan Administrasi dan Keuangan DPRD (%)**		**27.462.223.436**
1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	**4.370.655.212**
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kab.Pasaman Barat	Tersedianya Gaji PNS dan Tunjngan ASN.	29 orang	3.475.645.212
2)	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	55 orang	577.850.000
3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Pasaman Barat	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	317.160.000

2	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**14.400.000**
4)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Pasaman Barat	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Barang Milik Daerah OPD	2 orang	14.400.000
3	**Kegiatan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	Kab. Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**	**178.082.400**
5)	Sub Pengandaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD yang Membutuhkan Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya	69 orang	-
6)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan	5 orang	7.500.000
7)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Diklat	10 orang	170.582.400
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	**619.559.720**
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	67.258.750
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pasaman Barat	Jumlah ATK yang Dibutukhan	1 paket	**260.031.570**
10)	Sub Kegiatan Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	157.793.000

11)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Cetakan yang Dibutuhkan Sekretariat DPRD	1 paket	-
12)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat (K/R) yang Diikuti	24 kali	**134.476.400**
5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase terpenuhinya Kegiatan Pununjang Operasional Perangkat Daerah**	**100%**	474.397.170
13)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya	3 unit	-
14)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainya	80 unit	232.337.170
15)	Sub Kegiatan Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Paaman Barat	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	3 paket	242.060.000
6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**930.652.640**
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	454.402.640
17)	Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	476.250.000
7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**100%**	701.849.000

18)	Sub Kegiatan Peneydiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kab.Pasaman Barat**	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	22 unit	322.124.000
19)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158 unit	104.775.000
20)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Kab.Pasaman Barat	Jumlah pemeliharan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	6 unit	274.950.000
21)	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Terpelihara dan yang Direhab	1 paket	-
8.	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	16.988.889.194
22)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	40 orang	16.678.889.194
23)	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	200 stel	310.000.000
24)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check UP	**Kab.Pasaman Barat**	Jumlah Personil yang Melaksanakan Medical Check UP	40 orang	-
9.	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**3.183.738.100**
25)	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Makan/Minum DPRD Serta Bertambahnya Masukan Masukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Non PNS (THL) yang Akan Memfasilitasi	12 kali, 12 orang	2.403.738.100

			Rapat DPRD		
26)	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan	780.000.000
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Tugas Dan Fungsi DPRD**		**7.974.569.000**
10.	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,.**	**100%**	**1.641.729.600**
27)	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**Kab.Pasaman Barat**	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 ranperda	1.641.729.600
11	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Pembahsan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**343.118.150**
28)	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	172.174.150
29)	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pembahsan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	170.944.000
30)	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	-
31)	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	-

32)	Sub Kegiatan Pembahasan Lapor Semester	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Lapor hasil Realisasi Pelaksanaan APBD Persentase	1 dokumen	-
33)	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penanggung Jawaban APBD	1 dokumen	-
12	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kab.Pasaman Barat**	**Persentase Terpenuhnya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**2.750.190.600**
34)	Pendalaman Tugas DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	41 orang	1.912.820.000
35)	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 kegiatan, 12 dokumentasi	837.370.600
36)	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	-
37)	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	-
13	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Penyerapan dan Pengimpunan Aspirasi Masyarakat.**	**100%**	**1.448.470.000**
38)	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	24 objek pengawasan	161.975.000
35)	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pokok Pikiran DPRD	40 Rangkap	-

36)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	1.286.495.000
14	**Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Kab.Pasaman Barat	**Persentase Terpenuhnya Pembahasan Kerja Sama Daearh**	**100%**	**1.791.060.650**
37)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuaan Kerjasama Daerah	12 kali	1.791.060.650
JUMLAH					**35.436.792.436**

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Pasaman Batat sebagai Penyelenggaraan Pelayan yang Prima Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DASRIAL,S.Sos
NIP. 19691216 200604 1 002

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANGDA)
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 832 /BUP-PASBAR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua
   1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
   2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

B. Sekretaris
   1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
   2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
   3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
   4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2024;
10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
11. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 kepada pimpinan.

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/832/BUP-PASBAR/2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Harlina Syahputri, SH, MM	Kepala	Ketua
Dr. Ikhwanri, M.Pd	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
Sasmita Siregar, S.Si, M.Eng	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Koordinator
Ombun Rahmi, S.Si, M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
Alhadi, S.STP	Perencana Ahli Muda	Anggota
Renita, S. Hut	Perencana Ahli Muda	Anggota
Armellia Prima Yuna, S.Hut	Perencana Ahli Muda	Anggota
Rodhiyah, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan		
Yusva Yetti, SH, MM	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
Delniriawati, SE	Peneliti Ahli Muda	Anggota
Yonerita, ST, MM	Peneliti Ahli Muda	Anggota
Jovi Ramanda, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Supria Widodo, S.AP	Analis Program Pembangunan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Budaya		
Mhd. Faisyal Lubis, SKM, MPH	Kabid Sosial dan Budaya	Koordinator
Astra, S.IP, ME	Perencana Ahli Muda	Anggota
Rafki Junaidi, SKM	Perencana Ahli Muda	Anggota
Andhika Manggala, S.STP	Perencana Ahli Muda	Anggota
Lili Syariyenti, SKM	Analis Perencanaan Aparatur	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah		
Surahdi, S.Si	Kabid Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Koordinator
Yunilasari Dedni, ST	Perencana Ahli Muda	Anggota
Hermanto, SP	Perencana Ahli Muda	Anggota
Nurlaili, ST	Perencana Ahli Muda	Anggota
Atika Sandra Junaidi, ST	Analis Tata Ruang	Anggota

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Renja disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Bappelitbangda tahun 2024 memuat hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Melalui tahapan perencanaan pembangunan ini, diharapkan rencana kerja Perangkat Daerah dapat diukur, dikendalikan, dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan yang nantinya dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Simpang Empat, Agustus 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM
NIP. 19780618 200212 2 005

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappelitbangda 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 29

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat 47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD 48

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 50

3.3 Rencana Program dan Kegiatan 53

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD 61

BAB V PENUTUP 74

Daftar Tabel

Tabel 2.1.1 (T.C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun 2023 12
Tabel 2.2.1 Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 22
Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat 24
Tabel 2.4 (T.C-31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat 31
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat 49
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024 51
Tabel 3.3 (T.C-33) Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat 54
Tabel 4.1 (T.C-33) Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan wajib menjalankan sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Adapun tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Sistem perencanaan pembangunan akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan, baik di pemerintah Pusat maupun Daerah.

Untuk menjalankan sistem perencanaan pembangunan, Kepala Bappelitbangda menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas

enam tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Renja BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Bappelitbangda.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, maupun penelitian dan pengembangan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat;

5. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
6. Sebagai pedoman Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Bappelitbangda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

1) memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
3) berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
4) program dan kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* Perangkat Daerah *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan

dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2022 dan Capaian Renstra BAPPELITBANGDA

Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas yang terangkum ke dalam 4 (empat) program untuk mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai realisasi terhadap capaian program pembangunan sesuai target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, pelaksanaan evaluasi Renja bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun pelaksanaan rencana kerja, hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun rencana dan penganggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja tahun 2022. Sementara, evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2023 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappelitbangda pada tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2022, Bappelitbangda melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan rencana anggaran sebesar Rp6.547.451.263,00 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah). Pelaksanaan program tersebut realisasi sebanyak Rp6.113.035.271,00 (enam milyar seratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh satu rupiah) atau sebesar 93,37%. Angka ini lebih besar dari realisasi tahun 2021 yang hanya terealisasi sebesar 90,10%. Hal ini sejalan dengan

membaiknya kondisi pandemi *Covid-19* di Indonesia dan berkorelasi positif terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022. Selain itu, pada tahun 2022, kondisi fiskal daerah Kabupaten Pasaman Barat cenderung membaik dan turut memberikan dorongan positif dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan, subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda. Kondisi ini berdampak positif terhadap kenaikan serapan anggaran Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat sebesar 3,27%. Pelaksanaan program-program Bappelitbangda tahun 2022 secara rinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan dalam program ini berupa belanja rutin, administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan dan pengadaan. Target anggaran pada program ini sebesar Rp4.960.181.826,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp4.723.581.172,00 atau terealisasi sebesar 95%. Ada delapan kegiatan dalam program ini, yaitu :

   1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Program ini berupa kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Besaran anggaran yang direncanakan adalah Rp427.089.771,00 pada pelaksanaannya anggaran yang terealisasi sebesar Rp400.414.137,00 atau terealisasi sebesar 94%. Ada dua kegiatan dalam program ini, yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini mencakup kinerja dua bidang yang ada dalam struktur organisasi Bappelitbangda, yaitu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp975.178.616,00 dan yang terealisasi sebesar Rp820.690.043,00 atau terealisasi sebesar 84%. Adapun kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

   Ada dua kegiatan dalam program ini, yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Besaran biaya yang dianggarkan pada program ini sebesar Rp185.001.050,00 sementara anggaran yang terealisasikan sebesar Rp168.349.919,00 atau terealisasi sebesar 91%.

Secara umum, realisasi kinerja keuangan Bappelitbangda tahun 2022 berada di bawah 100% atau masih tersedia sekitar 6,63% anggaran yang tidak diserap. Tidak terserapnya anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama, hal ini terjadi karena kelebihan perhitungan kebutuhan target anggaran di beberapa sub kegiatan, dibeberapa sub kegiatan. Kedua, dibeberapa sub kegiatan lain terdapat pembayaran narasumber yang tidak dapat dibayarkan. Ketiga, di bidang sekretariat terdapat beberapa pengadaan unit barang yang tidak direalisasikan pemeliharaannya karena kondisi BMD masih relative baik pada sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah.

Selain realisasi keuangan, capaian kinerja fisik, Bappelitbangda adalah sebesar 95%. Berdasarkan prediket kinerja (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) Bappelitbangda mendapatkan prediket kinerja *Sangat Tinggi*, dengan nilai interval 91%≤ 100%. Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja

Bappelitbangda pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.1. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
								6.391.925.340		**5.888.579.463**	**100%**	**6.547.451.263**	**90,12%**	**6.113.035.271**	**95%**	**93%**		**6.151.421.530**		**6.151.421.530**		
5	**01**							**5.727.726.160**	**-**	**5.816.099.743**	**100%**	**6.362.450.213**	**97,46%**	**5.944.685.352**		**93%**	**100%**	**5.704.321.940**	**100%**	**5.704.321.940**	**100%**	**100%**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**4.620.065.160**		**4.510.576.651**	**100%**	**4.960.181.826**	**75%**	**4.723.581.172**	**103,00%**	**95%**	**100%**	**4.584.321.940**	**100%**	**4.584.321.940**	**100%**	**100%**
4	*03*	*01*	*01*																			
5	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Nilai SAKIP BAPPEDA***	***9 dok***	***23.386.500***	***8 dok***	***23.386.500***	**8 dok**	**50.872.000**	**8 dok**	***47.798.500***	***100%***	**94%**	***10 dok***	***35.116.200***	***8 dok***	***35.116.200***	***100,00%***	***100%***
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	*7 dok*	13.819.000	*6 dok*	13.819.000	6 dok	28.996.000	6 dok	*27.940.050*	*100*	*96%*	8 dok	18.228.000	8 dok	18.228.000	100%	100%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	9.567.500	2 dok	9.567.500	2 dok	21.876.000	2 dok	*19.858.450*	*100*	*91%*	2 laporan	16.888.200	2 laporan	16.888.200	100%	100%
5	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Peresentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA***	***100%***	***3.705.273.295***		***3.812.616.536***	**100%**	**3.765.338.346**	**100%**	***3.606.399.149***	***100%***	**96%**	***75%***	***3.706.954.535***	***75%***	***3.706.954.535***	***100%***	***100%***
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang	3.514.168.295	32 orang	*3.606.511.536*	31 orang	3.534.028.346	32 orang	*3.400.584.149*	*100*	*96%*	31 orang	3.500.849.535	31 orang	3.500.849.535	100%	100%
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	124.655.000	12 bulan	*139.655.000*					-	*0%*	1 dok	139.655.000	1 dok	139.655.000	-	-
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penataausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	66.450.000	12 bulan	*66.450.000*	12 bulan	231.310.000	12 bulan	*205.815.000*	*100*	*89%*	1 dok	66.450.000	1 dok	66.450.000	100%	100%
5	***01***	***01***	***2.03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Level Maturitas SPIP BAPPEDA***	***589 unit***	***54.850.000***		***54.850.000***	**589 unit**	**37.800.000**	**589 unit**	**37.070.000**	***100%***	**98%**	***589 unit***	***57.592.500***	***589 unit***	***57.592.500***	***100%***	***100%***
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik Darah SKPD	1 dok	29.400.000	2 orang	29.400.000	2 orang	29.400.000	2 orang	28.670.000	*100*	*98%*	1 dok	30.870.000	1 dok	30.870.000	*100%*	100%
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	25.450.000	3 orang	25.450.000	2 orang	8.400.000	3 orang	*8.400.000*	*100*	*100%*	1 laporan	26.722.500	1 laporan	26.722.500	*100%*	100%
5	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Level Maturitas SPIP BAPPEDA***	***6 orang***	***204.630.000***		**-**	**62 orang**	**342.744.550**	**-**	**309.544.751**	***101***	***90%***	***3 level***	***162.636.500***	***3 level***	***162.636.500***	***100%***	***100%***
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Diinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	31 paket	49.500.000			-	-				-	31 paket	49500000	31 paket	49500000		
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	30.000.000	-	-	31 orang	73.166.950	31 orang	*69.582.100*	*100*	95%	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	100%	*100%*

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan	55 orang	95.000.000	-	-	55 orang	203.065.850	55 orang	*182.312.900*	*100*	90%	55 orang	50.000.000	55 orang	50.000.000	100%	100%
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-udangan	4 orang	30.130.000	-	-	8 orang	66.511.750	9 orang	*57.649.751*	*113*	87%	6 orang	31.636.500	6 orang	31.636.500	100%	*100%*
5	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Level Maturitas SPIP BAPPEDA***	***100%***	***261.237.365***	***12 kali***	***240.402.365***	**100%**	**358.283.140**	**100%**	***341.479.282***	***100%***	***95%***	***3 level***	***264.073.830***	***3 level***	***264.073.830***	***100%***	***100%***
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	4.911.500	1 Paket	4.911.500	1 paket	14.892.940	1 paket	*14.492.520*	*100*	*97%*	1 paket	4.002.075	1 paket	4.002.075	100%	100%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	29.072.080	1 Paket	29.072.080	1 paket	30.000.000	1 paket	*29.386.800*	*100*	*98%*	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	100%	100%
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	9.026.785	1 Paket	9.026.785	1 paket	14.982.200	1 paket	*10.348.400*	*100*	*69%*	1 paket	7.379.655	1 paket	7.379.655	100%	100%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	18.227.000	1 Paket	18.227.000	1 paket	21.987.000	1 paket	*17.259.205*	*100*	*78%*	1 paket	22.692.100	1 paket	22.692.100	100%	100%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	200.000.000	12 kali	179.165.000	12 kali	276.421.000	12 kali	*269.992.357*	*100*	*98%*	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	100%	100%
5	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Level Maturitas SPIP BAPPEDA***	***2 unit***	***30.000.000***	***1 unit***	***27.500.000***	**7 unit**	**76.277.290**	**9 unit**	***72.323.909***	***129%***	***95%***	***3 level***	***25.000.000***	***3 level***	***25.000.000***	***100%***	***100%***
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan					-	-	-	-		-	0	18.000.000	0	18.000.000		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	30.000.000	*1 unit*	*27.500.000*	7 unit	76.277.290	9 unit	*72.323.909*	*129*	95%	1 unit	7.000.000	1 unit	7.000.000	100%	100%
5	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Level Maturitas SPIP BAPPEDA***	***100%***	***135.550.000***		***123.662.500***	**100%**	**111.810.250**	**100%**	***111.204.297***	***100%***	***99%***	***3 level***	***135.550.000***	***3 level***	***135.550.000***	***100%***	***100%***
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	107.100.000	12 bulan	102.012.500	12 bulan	84.760.250	12 bulan	*84.154.297*	*100*	*99%*	1 laporan	107.100.000	1 laporan	107.100.000	100%	100%
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	28.450.000	*2 orang*	*21.650.000*	2 orang	27.050.000	2 orang	*27.050.000*	*100*	*100%*	1 laporan	28.450.000	1 laporan	28.450.000	100%	100%
5	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Level Maturitas SPIP BAPPEDA***	***57 unit***	***205.138.000***		***228.158.750***	**100%**	**217.056.250**	**100%**	***197.761.284***	***95%***	***91%***	***3 level***	***197.398.375***	***3 level***	***197.398.375***	***100,00%***	***100%***
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pejaknya	22 unit	150.413.000	1. 23 unit 2. 4 orang	*190.541.250*	1. 23 unit 2. 4 orang	177.331.250	23 unit 4 orang	*165.704.284*	*100*	*93%*	22 unit	147.673.375	22 unit	147.673.375	100%	100%
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	39.725.000	32 unit	*37.617.500*	44 unit	39.725.000	40 unit	*32.057.000*	*91*	*81%*	51 unit	39.725.000	51 unit	39.725.000	100%	100%

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	15.000.000	-	-	-	-	-	-			1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	-	-
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**519.344.269**	**100%**	**427.089.771**	**100%**	**400.414.137**	**-**	**94**	**97%**	**400.000.000**	**97%**	**400.000.000**	**100%**	**100%**
5	***01***	***02***	***2.01***		***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP***	***8 dok***	***295.000.000***	***9 dok***	***502.709.069***	**9 dok**	**335.244.571**	**9 dok**	***314.264.494***	***100%***	***94%***	***85%***	***320.000.000***	***85%***	***320.000.000***	***100%***	***100%***
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan Teknokratik)	1 dok	50.000.000	3 dok	61.000.000	3 dok	65.000.000	3 dok	*54.528.600*	*100*	*84%*	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	100%	100%
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	1 BA	10.000.000														
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*33 BA*	5.000.000	*1 dok*	5.000.000	1 dok	1.065.000	1 dok	*1.065.000*	*100*	*100%*	*20 BA*	5.000.000	*20 BA*	5.000.000	*100%*	*100%*
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	37.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	14.404.000	1 dok	*14.186.800*	*100*	*98%*	1 BA	37.000.000	1 BA	37.000.000	*100%*	*100%*
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	100 usulan	20.000.000	1 dok	18.800.000	1 dok	13.998.000	1 dok	*13.968.000*	*100*	*100%*	110 usulan	25.000.000	110 usulan	25.000.000	*100%*	*100%*
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dok	173.000.000	3 dok	*387.909.069*	2 dok	240.777.571	3 dok	*230.516.094*	*100*	*96%*	3 dok	203.000.000	3 dok	203.000.000	100%	100%
5	***01***	***02***	***2.02***		***Analisis Data dan Informai Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP***	***100%***	***50.000.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***85%***	***50.000.000***	***85%***	***50.000.000***	***100%***	***100,00%***
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 dok	20.000.000	-	-	-		-	-	-	-	10 masukan	20.000.000	10 masukan	20.000.000	100	100
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 buku	30.000.000			-		-	-	-	-	1 buku	30.000.000	1 buku	30.000.000	100	100
5	***01***	***02***	***2.03***		***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase capaian IKU daerah***	***3 dok***	***35.000.000***		***16.635.200***	**1 dok**	**91.845.200**	**1 dok**	***86.149.643***	***100%***	***94%***	***100%***	***30.000.000***	***100%***	***30.000.000***	***100%***	***100%***
5	*01*	*02*	*2.03*	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 laporan	35.000.000	1 dok	16.635.200	1 dok	91.845.200	1 dok	86.149.643	100	94%	4 laporan	30.000.000	4 laporan	30.000.000	100%	100%
5	***01***	***02***	***2.04***		***Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Daerah***	***Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah***	***3 dok***	***20.000.000***		***786.178.823***	**-**	**975.178.616**	**-**	***820.690.043***	***100%***	***84%***	***100%***	***720.000.000***	***100%***	***720.000.000***	***100%***	***100%***

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
5	***01***	***02***	***2.04***	***02***	***Penerapan Sistem Informasi Pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Daerah***	***Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Daerah di bidang Pembangunan Daerah***	***3 dok***	***20.000.000***														
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik**	**90%**	**707.661.000**		**786.178.823**	**-**	**975.178.616**	**-**	**820.690.043**	**-**	**84**	**85%**	**720.000.000**	**85%**	**720.000.000**	**100%**	**100%**
5	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah***	***100%***	***350.000.000***		***218.586.400***	***100%***	***278.474.000***	***100%***	***224.798.780***	***100%***	***81%***	***85%***	***350.000.000***	***85%***	***350.000.000***	***100%***	***100%***
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	60.000.000	*95%*	*58.298.000*	2 dok	29.999.500	95%	*28.084.350*	*0*	*94%*	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	*100%*	*100%*
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang menyusun perencanaan dengan baik			-	-	100%	50.000.000	-	*41.678.850*	*100*	*83%*	31 PD	75.000.000	31 PD	75.000.000	100%	*100%*
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	80.000.000	1. 2 kali 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 3 kali 5. 1 dok	*30.065.950*	1. 1 dok 2. 3 kali	73.494.450	1. 1 dok 2. 3 kali	*64.075.850*	*1. 100%* *2. 100%*	*87%*	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	100%	100%
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	2 laporan	40.000.000	2 dok	*7.813.800*	-	-			-	*0%*	-	-	-	-	-	-
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Data Manajmen Stunting (Aksi 6) 2. Dokumen Analisis Situasi (Aksi 1) 3. Dokumen RAD PUG 4. Dokumen Rencana Kerja (Aksi2) 5. Pengelolaan aplikasi SISTER 6. Terlaksananya Rembuk Stunting	-	-	1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 1 dok 5. 1 app 6. 1 kali	*85.039.850*					-	*0%*	-	-	-	-	-	-
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 laporan	50.000.000	1. 1 dok 2. 100% 3. 4 kali	*37.368.800*	1. 1 dok 2. 4 kali 3. 100%	24.996.950	1. 1 dok 2. 100% 3. 4 kali 4. 4 kali	*19.606.400*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%*	*78%*	31 PD	50.000.000	31 PD	50.000.000	100%	100%
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1 laporan	120.000.000	-	-	1. 38 kali 2. 8 Aksi	99.983.100	-	*71.353.330*	*1. 100%* *2. 100%*	*71%*	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	100%	100%

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
5	***01***	***03***	***2.02***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah***	***100%***	***40.000.000***		***446.202.423***	***100%***	***246.713.774***	***100%***	***216.929.640***	***100%***	***88%***	***85%***	***80.000.000***	***85%***	***80.000.000***	***100%***	***100%***
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	10.000.000	*3 kali*	*26.378.650*	3 kali	164.999.874	3 kali	*146.563.240*	*100*	*89%*	1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	100%	100%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	1 laporan	5.000.000														
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	1 laporan	5.000.000														
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	15.000.000	*1. 40 DI* *2. 3 kali* *3. 10 kali*	*419.823.773*	1. 3 kali 2. 1 kali 3. 1 SK	81.713.900	1. 40 Daerah Irigasi (DI) 2. 3 kali 3. 10 kali	70.366.400	100	*86%*	1 dokumen	40.000.000		40.000.000	100%	100%
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 laporan	5.000.000														
5	***01***	***03***	***2.03***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah***	***100%***	***317.661.000***		***121.390.000***	***100%***	***449.990.842***	***100%***	***378.961.623***	***100%***	***84%***	***85%***	***290.000.000***	***85%***	***290.000.000***	***85%***	***100%***
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dok	200.000.000	*4 kali*	*36.690.800*	4 kali	99.991.500	4 kali	*88.288.980*	*100*	*88%*	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	100%	100,00%
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 laporan	40.000.000	10 lokasi	46.200.000	1. 2 kali 2. 1 SK Penetapan Lokasi	109.999.562	10 lokasi	*77.241.450*	*100*	*70%*	9 PD	190.000.000	9 PD	190.000.000	100%	100%
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	1 laporan	10.000.000														
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dok	50.000.000	6 kali	38.499.200	1. 2 kali 2. 1 SK PKP	239.999.780	6 kali	*213.431.193*	*100*	*89%*	1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	100%	100%

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	1 laporan	7.661.000														
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	1 laporan	10.000.000														
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**85%**	**664.199.180**		**72.479.720**	**100%**	**185.001.050**	**50%**	**168.349.919**	**50**	**-**	**80%**	**447.099.590**	**80%**	**447.099.590**	**80%**	**100%**
5	***05***	***02***	***2.01***		***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***Persentase implementasi kelitbangan***	***100%***	***494.199.180***		***-***	***-***	***70.001.000***	***-***	***66.216.853***	***100***	***-***	**100%**	**297.099.590**	**100%**	**297.099.590**	***100%***	***0%***
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	1 laporan	*217.099.590*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0 dok*	*217.099.590*	*0 dok*	*217.099.590*	-	-
5	05	02	2.01	013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 rekomendasi	*150.000.000*														
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik			-	-	12 kali	70.001.000	-	*66.216.853*	*100*	*95*	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	*100%*	*100%*
5	05	02	2.01	014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	127.099.590														
5	***05***	***02***	***2.04***		***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***Kategori capaian Innovation Goverment Award (IGA)***	***100%***	***170.000.000***	***25 inovasi***	***72.479.720***	**50 inovasi**	**115.000.050**	**30 inovasi**	***102.133.066***	***60***	***89%***	***Sangat Inovatif***	***150.000.000***	**Sangat Inovatif**	***150.000.000***	***100%***	***100%***
5	*05*	*02*	*2.04*	*01*	*Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*1 dok*	*500.000*														
5	*05*	*02*	*2.04*	*02*	*Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*	*1 laporan*	*500.000*														
5	*05*	*02*	*2.04*	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 laporan	168.500.000	25 inovasi	*72.479.720*	50 inovasi	115.000.050	30 inovasi	*102.133.066*	*60*	*89%*	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	100%	*100%*

Kode					PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
5	*05*	*02*	*2.04*	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	1 laporan	500.000														

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen pimpinan
2. Tersedianya anggaran
3. Adanya komitmen bersama untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala

Faktor Penghambat

1. Belum tersedianya data yang akurat
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang Kelitbangan
3. Masih kurangnya anggaran di bidang kelitbangan dan inovasi
4. Rendahnya jumlah usulan musrenbang
5. Adanya perubahan regulasi
6. Bencana alam (gempa bumi pada bulan Februari 2022)

Simpang Empat, Agustus 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)
Kabupaten Pasaman Barat

Harlina Syahputri, S.H., M.M.
NIP. 19780618 200212 2 005

tatan :

1 Kode Program, kegiatan, Sub Kegiatan
2 Program dan Kegiatan serta Indikator sesuai dengan PMDN 13
3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator sesuai dengan PMDN Pemuktahiran
4 Target Renstra Kinerja dan Keuangan Tahun 2022
5 Realisasi Kinerja dan Keuangan s/d Tahun 2019
6 Target Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2020
7 Realisasi Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2020
8 Tingkat capaian Kinerja dan keuangan Tahun 2020 (perbandingan realisasi tahun 2020 dengan Target 2020)
9 Target Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2021
10 Realisasi capaian Kinerja dan Keuangan (jumlah Kolom 5,7 dan 9)
11 Perbandingan antara realisasi capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Tahun 2021 dengan target 2021

Berdasarkan data Tabel 2.1 (T.C-29) di atas, hasil evaluasi Renja Bappelitbangda Tahun 2022, dijabarkan sebagai berikut :

1. Bappelitbangda telah melaksanakan 4 (empat) program bidang Perencanaan Pembangunan termasuk bidang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan.
2. Dari 37 sub kegiatan, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu: Pertama, pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 90,91% dari target pemeliharaan sebanyak 44 unit namun hanya terealisasi sebanyak 40 unit. Hal ini dikarenakan beberapa BMD kondisinya masih relatif baik dan/atau standar biaya yang ada kurang dari harga di pasaran saat belanja tersebut dibutuhkan sehingga tidak bisa direalisasikan. Kedua, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). Target kinerja fisik sub kegiatan ini sebanyak 2 dokumen, tapi belum ada dokumen yang dicetak namun proses pembuatan dokumennya sudah dilaksanakan. Ketiga, pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif. Pada sub kegiatan ini target kinerja fisik sebanyak 50 inovasi, namun yang dapat terealisasikan hanya 30 inovasi. Hal ini disebabkan sudah banyak inovasi yang sudah mencapai batasnya sehingga mengakibatkan total skor nilai masih rendah. Selain itu, masih banyak inovasi di OPD yang belum memenuhi semua indikator penilaian dan kurang lengkapnya dokumen pendukung indikator penilaian menjadi penyebab banyaknya OPD yang tingkat kematangan inovasinya dinilai kurang.
3. Terdapat 34 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan, pertama adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan angka sebesar 101,06% yaitu sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Daerah sebesar 112,5% dari target 8 orang yang mengikuti bimbingan, yang terlaksana menjadi 9 orang. Kedua, kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang semula memiliki target 7 unit kemudian realisasinya menjadi 9 unit.
5. Dengan telah dilakukannya berbagai perbaikan kinerja dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka pada tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat mendapat peringkat Harapan II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 dari Provinsi Sumatera Barat. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi actual yang dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif dan terukur serta dapat dilaksanakan.

Perkiraan capaian target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022:

1. Untuk pencapaian target Renstra 2021-2026, Bappelitbangda telah melaksanakan 6 sasaran dengan 8 indikator sasaran yang dituangkan dalam 4 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada tahun 2022.
2. Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappelitbangda periode 2021-2026. Dari 4 program, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menjadi satu-satunya program yang mencapai target 100% dikarenakan kegiatan hanya pada pengeluaran rutin. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan baru mencapai 27%. Target yang direncanakan pada akhir periode adalah 67 dokumen, yang baru terpenuhi adalah 18 dokumen. Begitu pula pada program Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses pencapaian target pada akhir periode.

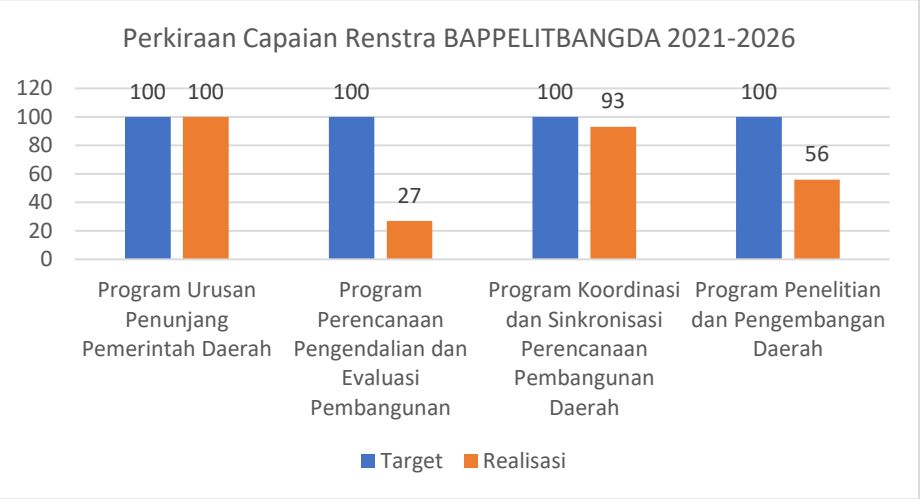

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2022, BAPPEDA mengalami perubahan nomenklatur menjadi BAPPELITBANGDA sesuai Perbup Nomor 63 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan daerah meliputi:

a. Merumuskan perencanaan strategis pada bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;
b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;
c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

e. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
f. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
g. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
h. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata Kerja Bappelitbangda meliputi bidang :

1) Sekretariat
2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
5) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pada RPJMD tahun 2021-2026, Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi I RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan tiga tujuan strategis pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

Tabel 2.2.1.
Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan BAPPELITBANGDA
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan sistem pembangunan daerah yang berkualitas 3. Mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah

Uraian tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala BAPPELITBANGDA yang dituangkan

dalam Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T.C-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra BAPPELITBANGDA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah			80%	85%	90%	95%	74,42				
2	Persentase capaian IKU daerah			100%	100%	100%	100%	93,61				
3	Persentase capaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP			80%	85%	90%	95%	77,50				
4	Persentase implementasi kelitbangan			85%	90%	95%	100%	100				
5	Kategori capaian *Innovation Government Award* (IGA)			Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif				
6	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA			B	B	BB	BB	BB				
7	Level Maturitas SPIP BAPPELITBANGDA			3	3	3	3	3				
8	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPELITBANGDA			50%	75%	75%	100%	75%				

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 sasaran dengan 8 indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat. Pencapaian target kinerja sasaran strategis 1 diukur melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang diukur melalui persentase jumlah OPD dengan hasil penilaian dokumen perencanaan minimal baik berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan OPD tahun 2022 yang dilaksanakan oleh masing-masing PIC OPD yang ada pada Bappelitbangda terdapat 32 OPD yang memiliki dokumen perencanaan dengan hasil penilaian minimal baik (3 OPD dengan nilai sangat baik dan 29 OPD dengan nilai baik), sisa lainnya adalah 10 OPD dengan nilai buruk dan 1 OPD bernilai sangat buruk, sehingga masih membutuhkan pendampingan/pembinaan lebih intensif dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaannya. Beberapa faktor yang menyebakan rendahnya kualitas perencanaan OPD, diantaranya:

1) OPD belum memahami dan/atau menaati sepenuhnya kaidah penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana telah diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2) Beberapa OPD dalam melaksanakan penyusunan Renja tidak sepenuhnya tertib mempedomani RPJMD dan Renstra yang telah disusun;
3) Adanya intervensi dari pihak eksternal yang berpadu dengan lemahnya komitmen pada level pimpinan OPD turut mempengaruhi konsistensi perencanaan yang seharusnya selaras menjadi kurang selaras;
4) Lemahnya pemahaman dan kapasitas SDM perencana yang melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan OPD.

Namun demikian terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat dijadikan peluang bagi OPD dalam melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, diantaranya:

1) Mekanisme penyetaraan jabatan fungsional perencana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional mendorong SDM aparatur perencana kedepannya menjadi lebih profesional dan terhindar dari kemungkinan pergantian SDM perencana OPD akibat mutasi yang seringkali menjadi faktor penyebab perbedaan pemahaman OPD dalam menjalankan aspek perencanaan pada instansinya;
2) Banyaknya peluang yang diberikan pemerintah daerah bagi aparatur perencana OPD dalam meningkatkan kapasitasnya melalui keikutsertaan pada berbagai Bimtek/Diklat terkait perencanaan;

3) Sistem perencanaan daerah saat ini telah diatur mekanismenya secara baku melalui aplikasi (SIPD) yang secara bertahap dapat mengoreksi inkonsistensi yang sering terjadi selama proses perencanaan hingga penganggaran.

Pencapaian target kinerja sasaran strategis 2 diukur melalui ketercapaian target IKU tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap capaian IKU pada tahun 2022 memberikan hasil yang dikategorikan baik. Dari 12 sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RPJMD Pasaman Barat Tahun 2021-2026 rata-rata tercapai sebesar 93,61% yang diukur melalui 27 indikator kinerja. Baiknya hasil yang diperoleh didorong oleh makin baiknya komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan makin meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA dan pimpinan daerah.

Pencapaian target kinerja sasaran strategi 3 diukur melalui pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP Kabupaten Pasaman Barat oleh Kementerian PAN-RB yang dirilis pada tahun 2022. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/880/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2021 adalah 62,24 (Predikat B) dengan rincian pada komponen perencanaan kinerja memperoleh skor 23,25 dari bobot 30 (terealisasi dari target sebesar 77,50%). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Jika dibandingkan pada hasil penilaian tahun sebelumnya yakni 61,26 dengan nilai pada komponen perencanaan sebesar 23,24. Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwasanya sudah terjadi kenaikan skor sebesar 0,98 poin atau meningkat sebesar 1,6%. Meskipun hasil evaluasi tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang titik lemah perencanaan OPD yang menjadi faktor penghambat perbaikan sistem perencanaan pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah, diantaranya:

1) Belum adanya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
2) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, *terukur/measurable,* relevan dan cukup;
3) Terdapat ketidakselarasan antara indikator pada tingkat Perangkat Daerah antara Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Utama, sehingga tidak tergambar kinerja yang ingin dicapai;
4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja *(cascading),* namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi dan belum berdasarkan *logical framework.*

Beberapa hal yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan, baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah, sebegai berikut:

1) Melakukan review dan perbaikan kembali dokumen perencanaan melalui mekanisme Perubahan Renstra OPD yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai upaya akomodisasi terhadap perubahan nomenklatur OPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Susunan Perangkat Daerah, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan menjawab isu strategis yang ada serta memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
2) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan pada Perangkat Darah untuk memastikan keselarasan dan kesesuaiannya, khususnya antara Rencana Strategis, Perjanjiann kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
3) Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascading*) dan melakukan penjabaran *crosscutting* dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Menyusun kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
5) Memastikan seluruh indikator kinerja baik di Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah memiliki definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan terhadap substansi indikator kinerjanya.

Untuk pencapaian target kinerja sasaran strategi 4 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terdapat 3 kajian yang dilakukan oleh OPD. Capaian realisasi pada strategi ini adalah 100%. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Litbang sebagai penanggungjawab strategi ini adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penulisan kajian. Meski begitu masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kajian ini, karena masih banyak OPD yang gagal dalam tahap perencanaan kajian dan kajian yang telah dilakukan belum ditindaklanjuti. Sementara untuk pencapaian target kinerja sasaran strategi 5 belum terjadi peningkatan dari tahun 2021 atau masih berada pada kategori inovatif, sehingga pada tahun ini akan masih terlapor belum tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat menginput sebanyak 30 inovasi OPD pada Aplikasi IGA dengan skor indeks 42,83. Dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,51 poin. Pada ajang penggghargaan *Innovative Governement Award* (IGA) tahun 2022 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berada pada peringkat 232 dari 415 kabupaten/kota. Peningkatan nilai tersebut terjadi karena adanya peningkatan antusiasme OPD untuk melaksanakan kegiatan inovasi dan pemahaman akan pentingnya inovasi juga meningkat. Selain itu, di tahun 2022 Bappelitbangda gencar melakukan sosialiasi pentingnya inovasi dan membangun *Klinik Inovasi* sebagai wadah bagi OPD untuk konsultasi dan berkoordinasi terkait inovasi. Meski mendapatkan peningkatan nilai, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan rangking yang sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berada di rangking 212 dari 415 kabupaten. Hal ini dikarenakan dalam penginputan *Innovative Government Award* (IGA) 2022, masih banyak inovasi di OPD yang belum memenuhi semua indikator penilaian serta kurang lengkapnya dokumen pendukung indikator penilaian menjadi penyebab banyaknya OPD dengan tingkat kematangan inovasi dinilai masih kurang.

Untuk pencapaian kinerja 6, 7 dan 8 terkait dukungan OPD terhadap capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP dan SPIP OPD serta upaya dalam penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda, maka secara garis besar tercapai dengan penilaian yang termasuk kategori sangat baik (tercapai melebihi target yang ditetapkan). Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor 700/1396/Inspekt./2022 menunjukkan dari 31 OPD yang dievaluasi terdapat 14 Perangkat Daerah (PD) yang

memperoleh nilai BB, salah satunya adalah Bappelitbangda. Sisa OPD yang lain mendapatkan nilai B. Begitupun pada evaluasi SPIP dan upaya terhadap penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda juga tercapai dengan realisasi sesuai target (100%).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1) Upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan penataan ruang melalui ketaatan terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan (sesuai aturan yang berlaku, selaras dan sinkron antar dokumen perencanaan lainnya)
3) Optimalisasi penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang berkualitas.
4) Fasilitasi dan penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melalui penguatan Dewan Riset Daerah.
5) Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
6) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat.

Bappelitbangda berperan sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya karena keterbatasan SDM dan APBD serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. Masih ditemukan kegiatan yang muncul di Renja OPD namun tidak terdapat dalam kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Akibatnya, beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan pengalokasian anggaran karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan/atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Masih ditemukan kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).

3. Masih rendahnya hasil Musrenbang RKPD yang dapat diakomodir (kurang dari 30%) akibat berbagai kendala seperti, terbatasnya kemampuan fiskal daerah, tidak terpenuhinya persyaratan teknis, tidak sesuainya usulan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan daerah, hingga komitmen OPD yang masih rendah untuk mengakomodir usulan masyarakat tersebut.
4. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan karena keterbatasan APBD.
5. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Masih rendahnya jumlah kajian dan tindak lanjut hasil kajian pada Perangkat Daerah.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal Renja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp6.267.164.750,00 (*enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).** Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin), 16 Kegiatan dan 41 sub kegiatan yang direncanakan. Tetapi di tahapan akhir penyusunan Renja pagu yang dibutuhkan meningkat disebabkan adanya tambahan kebutuhan untuk mendanai beberapa belanja sub kegiatan yang mengakomodir penyusunan dokumen:

1) Dokumen Teknokratik RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Periode 2025-2045
2) Rancangan awal RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Periode 2025-2045
3) RKPD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025
4) Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024
5) Dokumen Musrenbang
6) Buku Profil Kabupaten Pasaman Barat
7) Dokumen monitoring dan evaluasi RKPD dan DAK Kabupaten Pasaman Barat
8) Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)

Adapun telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. (T.C-31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir)				Catatan Penting (Penjelasan)
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase pelayanan penunjang Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.635.065.160**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pelayanan penunjang Pemerintah Daerah**	**100%**	**44.809.918.362**	
1)	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan BAPPEDA**	**9 dok**	**23.386.500**	**Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan BAPPEDA**	**9 dok**	**44.328.000**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 laporan	13.819.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	22.864.000	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 dok	9.567.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	21.464.000	

2)	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai BAPPEDA**	**100%**	**3.720.273.295**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai BAPPEDA**	**100%**	**3.730.091.025**	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah orang yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.514.168.295	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.515.201.025	
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	139.655.000	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	125.850.000	
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	66.450.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	89.040.000	
3)	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola BAPPEDA**	**589 unit**	**54.850.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola BAPPEDA**	**589 unit**	**59.241.000**	
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	29.400.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	31.225.000	

7.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	25.450.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	28.016.000	
4)	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah peserta Diklat / Bimtek**	**100%**	**204.630.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah peserta Diklat / Bimtek**	**100%**	**250.494.000**	
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	31 paket	49.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	31 paket	49.600.000	
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3 orang	28.136.500	
10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundan-undangan	25 orang	95.000.000	Sosialisasi Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundan-undangan	55 orang	119.360.000	
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	30.130.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	53.397.500	

5)	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor**	**100%**	**261.237.365**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor**	**100%**	**270.835.297**	
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4.911.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.800.000	
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Tangga	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	29.072.080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000	
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	9.026.785	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	12.907.797	
15.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	18.227.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	19.550.000	
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	206.577.500	

6)	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta serta peralatan / perlengkapan kantor**	**2 unit**	**30.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta serta peralatan / perlengkapan kantor**	**3 unit**	**58.459.290**	
17.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	29.303.500	
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	29.155.790	
7)	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**135.550.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100%**	**165.390.750**	
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	107.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	127.878.750	
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	28.450.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	37.512.000	

			yang disediakan							
8)	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**58 Unit**	**205.138.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**57 Unit**	**231.079.000**	
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	150.413.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	175.394.000	
22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 Unit	39.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 Unit	35.845.000	
23.	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	19.840.000	
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase kualitas perencanaan bernilai baik**	**100%**	**485.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kualitas perencanaan bernilai baik**	**100%**	**687.828.450**	

9)	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab. Pasaman Barat**	**10 dok**	**400.000.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab. Pasaman Barat**	**9 dok**	**582.820.350**	
24.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3 dok	50.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 dok	56.197.000	
25.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	85.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	10.000.000	
26.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	5.000.000	
27.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah berita acara musrenbang tingkat kabupaten	1 BA	37.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang tingkat kabupaten	2 BA	37.000.000	
28.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	100 usulan	20.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	100 usulan	20.000.000	
29.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang	4 dok	203.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang ditetapkan	4 dok	454.623.350	**Penyusunan RPJD dan Rancangan Teknokratik RPJMD**

	Daerah Kabupaten/Kota		ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			Daerah Kabupaten/Kota	(RPJPD/RPJMD/RKPD)			
10)	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat**		**100%**	**50.000.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100%**	**50.000.000**	
30.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dok	20.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dok	20.000.000	
31.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 buku	30.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 buku	30.000.000	
11)	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah**	**3 dok**	**35.000.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah**	3 laporan	35.000.000	

32.						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	20.000.000	
33.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 laporan	35.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	15.000.000	
12)						**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplemtasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**20.008.100**	**Kegiatan baru pada Perubahan Renstra**
34.						Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	20.008.100	**Sub Kegiatan baru pada pada Perubahan Renstra**
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik**	**100%**	**660.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik**	**100%**	**794.379.940**	

13)	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase kesesuaian program pembangunan bidang sosial dan budaya dengan dokumen perencanaan**	**100%**	**350.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase kesesuaian program pembangunan bidang sosial dan budaya dengan dokumen perencanaan**	**100%**	**380.331.900**	
35.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dok	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	40.000.000	
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	80.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	99.999.150	
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	40.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	40.000.000	

38.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	49.992.150	
39.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	120.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	150.340.600	
14)	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase kesesuaian program pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah dengan dokumen perencanaan daerah**	**100%**	**40.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase kesesuaian program pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam**	**100%**	**70.877.690**	

40.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	40.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	44.686.510	
41.						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 laporan	4.674.300	
42.						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	3.954.000	
43.						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	13.665.880	

44.						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	3.897.000	
15)	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase kesesuaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan**	**100%**	**270.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase kesesuaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan**	**100%**	**343.170.350**	
45.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktut yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktut yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	288.909.800	
46.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	210.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	32.099.550	

47.						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	2.849.600	
48.						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	8.402.400	
49.						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	7.661.000	
50.						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.248.000	
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase ketersediaan data statistik dan kajian pembangunan daerah**	**100%**	**447.099.590**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan data statistik dan kajian pembangunan daerah**	**100%**	**347.072.850**	

16)	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**	**Kab. Pasaman Barat**	**Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan**	**100%**	**297.099.590**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan**	**100%**	**210.184.600**	
51.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	217.099.590					
						Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	100.273.200	
52.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	1 laporan	80.000.000					
						Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	109.911.400	

17)	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kab. Pasaman Barat**	**Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan dalam ajang *Innovation Goverment Award (IGA)* Tahun 2022**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan dalam ajang *Innovation Goverment Award (IGA)* Tahun 2022**	**Sangat Inovatif**	**136.888.250**	
53.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 laporan	150.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 laporan	136.888.250	
	Jumlah				**6.227.164.750**				**6.639.199.602**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penelahaan usulan program dari masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Berdasarkan penjelasan tersebut, Bappelitbangda Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat terkait tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, yakni sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tranformasi pelayanan publik.

Sementara itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa prioritas RPJMD pada kurun waktu 2021-2026 adalah pembangunan yang mendukung 7 misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 5 program unggulan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Adapun program unggulan Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2021-2026, diantaranya:

1. Sumbar Religius dan Berbudaya
2. Sumbar Sehat dan Cerdas
3. Sumbar Sejahtera
4. Sumbar Berkeadilan
5. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-Government*).

Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2024 tertuang pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
I	**Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**	1. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas
		2. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	2. Pengentasan kemiskinan
		3. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	3. Perluasan peluang pekerjaan 4. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal
II	**Pengembangan wilayah untuk mengurangi**	4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang	5. Perluasan peluang pekerjaan 6. Mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan

	kesenjangan dan menjamin pemerataan	berkeadilan dan berkelanjutan	berkualitas
III	**Meningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing**	5. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	7. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat 8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
IV	**Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan**	6. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	9. Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya 10. Masyarakat yang rukun dan berkeadilan
V	**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar**	7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	11. Pengentasan kemiskinan 12. Perluasan Kesempatan Kerja 13. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal
VI	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**	8. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	14. Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana
VII	**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	9. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	15. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel 16. Mewujudkan Birokrasi yang efisien dan efektif 17. Mewujudkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran berikut indikator yang ingin dicapai Bappelitbangda Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan	1.	Optimaliasi kinerja perencanaan pembangunan	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
			2.	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Persentase capaian IKU daerah
			3.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappelitbangda yang kompeten dan akuntabel	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP
2.	Mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	4.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan
			5.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Kategori capaian *Innovation Government Award* (IGA)
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BAPPELITBANGDA	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA			
		Level Maturitas SPIP Bappelitbangda			
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas			

		laporan keuangan BAPPELITBANGDA			
			6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA
					Level Maturitas SPIP BAPPELITBANGDA
					Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2024 sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang;
2) Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan;
3) Mengoptimalkan penerapan integrasi SIPD;
4) Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan;
5) Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah;
6) Penerapan kerangka belanja kegiatan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam SIPD;
7) Pemanfaatan data dan informasi yang valid, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu Data;
8) Peningkatan SDM organisasi;

9) Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi;
10) Peningkatan kualitas SOP yang dipedomani;
11) Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani;
12) Peningkatan pengelolaan BMD Renja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024;
13) Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan;

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Bappelitbangda sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, maka Bappelitbangda memiliki peran strategis untuk memastikan keselarasan program pembangunan yang direncanakan. Selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappelitbangda juga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan. Selain aspek perencanaan, Bappelitbangda memiliki fungsi esensial dalam penelitian dan pengembangan daerah. Aspek penelitian dan pengembangan daerah dibutuhkan dalam seluruh aspek perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bappelitbangda tentunya didukung dengan program penunjang urusan pemerintah daerah.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Bappelitbangda Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang ke dalam 4 program dengan 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019).

Tabel 3.3. (T-C.33)

Program dan Kegiatan BAPPELITBANGDA Kab. Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								6.639.199.602,00					6.279.495.801,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6.639.199.602,00					6.279.495.801,00
5	01				PERENCANAAN								6.292.126.752,00					6.003.896.211,00
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.809.918.362,00**					**4.681.265.811,00**
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								44.328.000,00					33.444.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	9 Dokumen	22.864.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17.360.000,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	9 Dokumen	21.464.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	16.084.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.730.091.025,00					3.756.216.446,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji,tunjangan dan honorarium pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	31 Orang/bulan	100 %	3.515.201.025,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.550.111.446,00
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji,tunjangan dan honorarium pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	125.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139.655.000,00
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji,tunjangan dan honorarium pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	89.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	66.450.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								59.241.000,00					54.850.000,00
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	674 Unit	31.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.400.000,00
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	674 Unit	28.016.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.450.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								250.494.000,00					204.630.000,00
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	31 Paket	62 orang	49.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	49.500.000,00
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	62 orang	28.136.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	55 Orang	62 orang	119.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	95.000.000,00
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Orang	62 orang	53.397.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	30.130.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								270.835.297,00					261.237.365,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	6.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.911.500,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.072.080,00
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	12.907.797,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.026.785,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	19.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.227.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	206.577.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								58.459.290,00					30.000.000,00
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	2 unit	29.303.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 unit	29.155.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.390.750,00					135.550.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	127.878.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	107.100.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	37.512.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.450.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								231.079.000,00					205.338.000,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	22 Unit	57 unit	175.394.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	150.613.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	34 Unit	57 unit	35.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	39.725.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	57 unit	19.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**687.828.450,00**					**602.630.400,00**
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								582.820.350,00					494.630.400,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	1 Dokumen	9 dokumen	56.197.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	66.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	1 Berita Acara	9 dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	12.000.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	33 Berita Acara	9 dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	5.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	98 % 100 %	2 Berita Acara	9 dokumen	37.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	37.000.000,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	100 Usulan	9 dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100 Usulan	20.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	4 Dokumen	9 dokumen	454.623.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	354.630.400,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								50.000.000,00					50.000.000,00
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													

						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	20.000.000,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	1 Buku	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	30.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								35.000.000,00					38.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	2 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	38.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	0,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								20.008.100,00					20.000.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
						Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 98 %	3 Dokumen	100 %	20.008.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**794.379.940,00**					**720.000.000,00**
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								380.331.900,00					350.000.000,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	60.000.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	99.999.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	80.000.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													

						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	49.992.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	50.000.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	150.340.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	120.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								70.877.690,00					135.000.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	44.686.510,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50.000.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	4.674.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	15.000.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	3.954.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	13.665.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50.000.000,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													

						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	3.897.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								343.170.350,00					235.000.000,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	288.909.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	60.000.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	32.099.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	50.000.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	2.849.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	8.402.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	55.000.000,00
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	7.661.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	50.000.000,00
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	3.248.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	10.000.000,00
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**347.072.850,00**					**275.599.590,00**
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								210.184.600,00					122.099.590,00
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													

						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Rekomendasi	100 %	100.273.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0,00
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	0 Rekomendasi	100 %	100.273.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0,00
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Laporan	100 %	109.911.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	122.099.590,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								136.888.250,00					153.500.000,00
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi OPD yang didaftarkan pada ajang IGA	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Laporan	53 inovasi	136.888.250,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	153.500.000,00
												TOTAL	**6.739.472.802,00**					**6.279.495.801,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2021-2026. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda program, kegiatan, dan sub kegiatan harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappelitbangda sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 4 program (teknis dan rutin), 17 Kegiatan dan 53 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp6.639.199.602,00 (*enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah*)**. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        1) Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD
        2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas dan Fungsi
3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2) Pelaksanaan Konsultasi Publik
3) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
   2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
   1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
      1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
      2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
      4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
      5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
   b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
2) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1. (T-C.33)

Tabel 4.1. (T.C-33)

Program dan Kegiatan BAPPELITBANGDA Kab. Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								6.639.199.602,00					6.279.495.801,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6.639.199.602,00					6.279.495.801,00	
5	01				PERENCANAAN								6.292.126.752,00					6.003.896.211,00	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.809.918.362,00**					**4.681.265.811,00**	
					Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah													
					Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda				BB									
						Level Maturitas SPIP Bappelitbangda				3									
						Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Bappelitbangda				75%									
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								44.328.000,00					33.444.000,00	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	9 Dokumen	22.864.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17.360.000,00	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	9 Dokumen	21.464.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	16.084.000,00	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.730.091.025,00					3.756.216.446,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji,tunjangan dan honorarium pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	31 Orang/bulan	100 %	3.515.201.025,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.550.111.446,00	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji,tunjangan dan honorarium pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	125.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139.655.000,00	
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji,tunjangan dan honorarium pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	89.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	66.450.000,00	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								59.241.000,00					54.850.000,00	
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	674 Unit	31.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.400.000,00	
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	674 Unit	28.016.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.450.000,00	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								250.494.000,00					204.630.000,00	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	31 Paket	62 orang	49.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	49.500.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	62 orang	28.136.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	55 Orang	62 orang	119.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	95.000.000,00	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Orang	62 orang	53.397.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	30.130.000,00	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								270.835.297,00					261.237.365,00	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	6.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.911.500,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.072.080,00	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	12.907.797,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.026.785,00	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	19.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.227.000,00	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	206.577.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								58.459.290,00					30.000.000,00	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	2 unit	29.303.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 unit	29.155.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.390.750,00					135.550.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	127.878.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	107.100.000,00	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	37.512.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.450.000,00	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								231.079.000,00					205.338.000,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	22 Unit	57 unit	175.394.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	150.613.000,00	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	34 Unit	57 unit	35.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	39.725.000,00	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	57 unit	19.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**687.828.450,00**					**602.630.400,00**	
					Tujuan : Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan				90%									
					Sasaran : 1. Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90%									
					2. Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian IKU Daerah				100%									
					3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbangda yang Kompeten dan Akuntabel	Persentase Pencapaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP				90%									
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								582.820.350,00					494.630.400,00	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	1 Dokumen	9 dokumen	56.197.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	66.000.000,00	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	1 Berita Acara	9 dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	12.000.000,00	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	33 Berita Acara	9 dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	5.000.000,00	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	98 % 100 %	2 Berita Acara	9 dokumen	37.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	37.000.000,00	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	100 Usulan	9 dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100 Usulan	20.000.000,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	4 Dokumen	9 dokumen	454.623.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	354.630.400,00	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								50.000.000,00					50.000.000,00	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	20.000.000,00	
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	1 Buku	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	30.000.000,00	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								35.000.000,00					38.000.000,00	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	2 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	38.000.000,00	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 % 100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	0,00	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								20.008.100,00					20.000.000,00	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
						Persentase OPD dengan ketercapaian IKU Perangkat Daerah sesuai target daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 98 %	3 Dokumen	100 %	20.008.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**794.379.940,00**					**720.000.000,00**	
					Tujuan : Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan				90%								
					Sasaran : 1. Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90%								
					2. Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian IKU Daerah				100%								
					3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbangda yang Kompeten dan Akuntabel	Persentase Pencapaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP				90%								
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								380.331.900,00					350.000.000,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	60.000.000,00	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	99.999.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	80.000.000,00	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	40.000.000,00	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	49.992.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	50.000.000,00	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dengan dokumen Perencanaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	150.340.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	120.000.000,00	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								70.877.690,00					135.000.000,00	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	44.686.510,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50.000.000,00	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	4.674.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	15.000.000,00	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	3.954.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.000.000,00	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	13.665.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50.000.000,00	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	3.897.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	10.000.000,00	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								343.170.350,00					235.000.000,00	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	288.909.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	60.000.000,00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	32.099.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	50.000.000,00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	2.849.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	10.000.000,00	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	100 %	8.402.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	55.000.000,00	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	7.661.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	50.000.000,00	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
						Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	100 %	3.248.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	10.000.000,00	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**347.072.850,00**					**275.599.590,00**	
					Tujuan : Mengimplementasikan Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah				85%									
					Sasaran : 1. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Implementasi Kelitbangan				85%									
					2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah	Kategori Capaian *Innovation Government Award* (IGA)				Sangat Inovatif									
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								210.184.600,00					122.099.590,00	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Rekomendasi	100 %	100.273.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0,00	
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	0 Rekomendasi	100 %	100.273.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0,00	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Laporan	100 %	109.911.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	122.099.590,00	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								136.888.250,00					153.500.000,00	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kodefikasi
						Capaian/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi OPD yang didaftarkan pada ajang IGA	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	1 Laporan	53 inovasi	136.888.250,00	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	153.500.000,00	
												TOTAL	**6.739.472.802,00**					**6.279.495.801,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 memuat evaluasi Renja Bappelitbangda tahun 2022, tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya untuk tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Bappelitbangda, maka dari itu, terdapat penyempurnaan dalam indikator kinerja Bappelitbangda yang lebih mudah terukur dalam pencapaian target indikatornya. Dokumen Renja ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi capaian kinerja Bappelitbangda yaitu meningkatnya keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan, penilaian capaian IKU dan SAKIP, peningkatan implementasi kelitbangan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Renja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja juga diharapkan dapat menjadi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Diharapkan perencanaan pembangunan dapat disusun lebih sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan dinamis terhadap perubahan yang simultan terjadi, sehingga aspek *high risk* development dapat dicegah dan ditangani.

Simpang Empat, Agustus 2023
Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Pasaman Barat

Harlina Syahputri, SH, MM
NIP. 19780618 200212 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA AKHIR (RAN-AKHIR) TAHUN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031; dan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; sebagai pedoman untuk ditindak lanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah perlu memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran dalam mencapai sasaran program dan kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan aset daerah maka secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja OPD sebagai kebutuhan kegiatan pelaksanaan tahun 2024. Bahwa untuk pengukuran kinerja,serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun RENJA BKAD tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan informasi lintas bidang dan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi guna mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan secara optimal.

Semoga Rencana Kerja ini dapat berjalan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Simpang Empat, Agustus 2023

Kepala BKAD

Kabupaten Pasaman Barat

MAIBONNI, SE

NIP. 19720503 200604 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**Pendahuluan**	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-1
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu**	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD	II-1
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKAD	II-7
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD	II-8
	2.4 Telaahan Terhadap Rancangan awal RKPD	II-9
	2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	II-34
BAB III	**Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan**	
	3.1 Telaah Renstra Kementrian RI	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	III-5
	3.3 Rencana Program dan Kegiatan	III-6
BAB IV	**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**	IV-1
BAB V	**Penutup**	V-1

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode satu tahun.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan Tahun Anggaran 2024. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dan tahun berjalan, program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2024. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan tahun yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di setiap bidang, baik Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Bidang Barang Milik Daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan;

4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan

1.2 Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,

1.3 peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

1.4 OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi

2.2 program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD, memuat kajian terhadap

2.3 capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat

2.4 sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian

2.5 program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk menganalisis realisasi capaian target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah. Evaluasi capaian kinerja tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann tiga program yang terdiri dari 14 kegiatan 50 sub kegiatan. Tahun 2024 melaksanakan tiga program yang terdiri dari 14 kegiatan 56 sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan Renja yang telah disusun pada tahun anggaran 2023. Evalusi pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (Tahun Anggaran 2023) disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pencapaian Renstra BKAD s.d. Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Badan Keuangan dan Aset Daerah Pasaman Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Akumulasi 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
Meningkatkan akuntabilitas kinerja				1. Nilai SAKIP 2. Level maturnitas SPIP 3. Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK		1. B 2. 3.82,18 3. 75%	1. B 2. 3 3. 75%	1. 2. 3. 86,40		1. B 2. 3 3. 75%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja			1. Nilai SAKIP 2. Level maturnitas SPIP 3. Persentase		1. B 2. 3.82,18 3. 75%	1. B 2. 3 3. 75%	1. 2. 3. 86,40		1. B 2. 3 3. 75%		

								Penurunan Jumlah Temuan BPK								
		5	0 2	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100,00	100%		
		5	0 2	0 1	2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100,00	100%		
		5	0 2	0 1	2 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100,00	100%		
		5	0 2	0 1	2 . 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola BPKD	18 orang	-	3 orang	3 orang	100,00	3 orang		
		5	0 2	0 1	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	300 orang	-	50 orang	2 orang	4,00	50 orang		
		5	0 2	0 1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100,00	100%		
		5	0 2	0 1	2 . 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	108 unit	-	18 unit	18 unit	-	18 unit		

		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	-	100%	100%	100,00	100%		
		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	684 unit	-	114 unit	114 unit	100,00	114 unit		
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien								Opini BPK atas laporan keuangan daerah		WTP	WTP	WTP	100,00	WTP		
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien							Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu/Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai		-				1 bulan		
		04	05	17			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	30 hari sebelum APBD	-	30 hari sebelum APBD	30 hari sebelum APBD	100,00	30 hari sebelum APBD		

		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan dokumen penganggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah	1150 dokumen	-	230 dokumen	230 dokumen	100,00	230 dokumen		
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah	44 SKPD	-	44 SKPD	44 SKPD	100,00	44 SKPD		
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	43 SKPD	-	43 SKPD	43 SKPD	100,00	43 SKPD		
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya tranfer dana bantuan keuangan kepada nagari, dana desa, bagi hasil pajak/retribusi	100%	-	100%	100%	100,00	100%		
		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah data sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang dikelola	53 SKPD	-	53 SKPD	53 SKPD	100,00	53 SKPD		

Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah								Opini BPK atas laporan keuangan daerah						WTP		
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah							Persentase OPD dengan Penataan BMD ssuai dengan SOP						100%		
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP						100%		
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP						100%		

Simpang Empat, Agustus 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Maibonni, SE

Nip. 19720503 200604 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-1 Pembangunan Daerah periode 2021-2026. Target kinerja capaian program Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yang ditargetkan tingkat capaianya 100% tingkat capaiannya 100%.

Tabel 2.2 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Tujuan: Opini BPK atas laporan keuangan daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	1. Penatausahaan dan pengadministrasian belanja Rill sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Penertiban penatausahaan dan pengelolaan BMD yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
	Indikator Sasaran 1: 1. Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu/Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai			1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	Target tercapai karena penetapan APBD dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri dalam negeri
	Indikator Sasaran 1: 2. Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan			14%	12%	10%	8%			10%	8%	
	Indikator Sasaran 1: 3. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD			-15%	-	-10%	-8%			-10%	-8%	
	Indikator Sasaran 1: 4. Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun Sebelumnya			8%	6%	6%	5%			6%	5%	

	Indikator Sasaran 1: 5. Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum			75%	77%	77%	79%			77%	79%	
	Indikator Sasaran 2: Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
2	Indikator Tujuan 2: 1. Nilai SAKIP Level			B	B	B	B			B	B	Dalam Proses Penilaian
	Indikator Tujuan 2: 2. Level maturitas SPIP			3	3	3	3	3,132		3	3	
	Indikator Tujuan 2: 3. Penurunan Jumlah Temuan BPK			75%	75%	100 %	100 %	82,18%	86,40%	100 %	100 %	
	Indikator Tujuan 2: 4. Indeks Kepuasan Masyarakat				80	80	80			80	80	
	Indikator Sasaran 1. Nilai SAKIP Level			B	B	B	B			B	B	
	Indikator Sasaran 2. Level maturitas SPIP			3	3	3	3	3,132		3	3	Dalam Proses Penilaian
	Indikator Sasaran 3. Penurunan Jumlah Temuan BPK			75%	75%	100 %	100 %	82,18%	86,40%	100 %	100 %	
	Indikator Sasaran: 4. Indeks Kepuasan Masyarakat				80	80	80			80	80	

Berdasarkan hasil tabel diatas tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan skala intensitas kinerja berdasarkan kriteria penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 untuk sasaran Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu/Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai dengan interval nilai realisasi kinerja 100% kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1) Meningkatnya kepatuhan PD dalam melaksanakan realisasi APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran kas

yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel

2) Meningkatkan koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbasis kinerja, tepat sasaran serta tepat waktu.
3) Dibentuknya sistim atau saluran distribusi elektronik pengeloaan keuangan daerah yang terkoneksi secara online melalui data best antara.
4) Mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan cara meningkatkan tata kelola keuangan OPD dan Aset Daerah.
5) Peningkatan kepedulian pengelolaan BMD bagi seluruh PD baik dalam bentuk perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan.
6) Peningkatan pengelolaan asset daerah melalui peningkatan system informasi pengolahan data, pembukuan dan pelaporan, serta peningkatan informasi perencanaan kebutuhan asset.
7) Masih kurang tertibnya pengelolaan asset daerah terutama asset bos dan aset tanah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2024, jumlah rencangan awal yang dialokasikan untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 182.571.649.300,- (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: BPKD Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**41.536.914.162**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**30.656.003.836**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**132.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**84.867.750**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	77.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	53.414.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	2 dokumen	55.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	2 laporan	31.453.500	

			daerah				daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase realisasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**38.503.066.878**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**28.531.915.231**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/bulan	25.863.750.878	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 Orang /bulan	25.479.284.817	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa tugaas ASN	12 bulan 19 orang	12.400.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa tugaas ASN	12 Dokumen	2.870.975.264	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	206.316.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	160.680.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	33.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	20.975.150	

			Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah barang milik daerah yang dikelola BPKD**	**3 orang**	**50.875.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang dikelola BPKD**	**3 orang**	**38.472.000**	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	34.375.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	38.472.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**50 orang**	**545.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**50 orang**	**359.780.100**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan dan	2 Orang	160.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan dan	2 Orang	269.224.250	

			Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	165.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	220.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	90.555.850	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**400.914.250**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**355.334.700**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	22.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	7.470.000	

			Kantor yang disediakan				Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	110.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	68.734.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	19.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	9.873.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Paket	5.841.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Paket	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	27.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	19.299.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	204.773.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	249.957.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**18 unit**	**847.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**15 unit**	**594.452.700**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	**476.838.500**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2 paket	275.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	117.614.200	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	275.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	297.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	100 %	**362.362.594**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	100 %	**201.999.255**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	308.000.594	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	180.999.255	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 orang	22.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	21.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	2 orang	32.362.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	0 Laporan	0	

			disediakan				disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**114 unit**	**695.695.440**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**114 unit**	**489.182.100**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit 4 orang	200.695.440	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 Unit	194.998.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	95 Unit	220.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	95 Unit	96.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	1 paket	275.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	1 Unit	197.433.600	

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		**Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu**	**30 hari sebelum APBD**	**138.678.526.333**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu**	**30 hari sebelum APBD**	**122.052.820.681**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan dokumen penganggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah**	**230 dokumen**	**1.085.898.090**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan dokumen penganggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah**	**12 dokumen**	**1.258.581.400**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	86.963.250	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	148084.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	90.005.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	148.409.500	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang	54 Dokumen	19.220.850	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang	0 Dokumen	0	

			diverifikasi				diverifikasi			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	54 Dokumen	21.505.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	0 Dokumen	0	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	54 Dokumen	10.984.400	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	0 Dokumen	0	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	54 Dokumen	11.440.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah peraturan daerah tetang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	420.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tetang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	446.995.500	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan		Jumlah peraturan daerah tetang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2 Dokumen	327.584.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Jumlah peraturan daerah tetang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2 Dokumen	338.438.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dokumen	74.791.200	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dokumen	176.653.500	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	2 Dokumen	8.790.650	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	0 Dokumen	0	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan	2 Dokumen	4.803.040	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan	0 Dokumen	0	

			anggaran belanja daerah				anggaran belanja daerah			
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	2 Dokumen	9.900.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**	**44 SKPD**	**464.675.140**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**	**44 SKPD**	**625.141.600**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 laporan 20 laporan	44.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen	70.000.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	212 Dokume	28.234.140	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	200 Dokume	70.000.000	

			Kas dan SPD				Kas dan SPD			
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	10 Dokumen	19.800.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	0 Dokumen	0	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	94 Dokumen	27.291.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47 Dokumen	140.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kasa Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	12 Dokumen 12 Dokumen	29.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kasa Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	24 Laporan	100.000.000	

	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Kasa Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kasa Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	12 Dokumen	29.700.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	0 Dokumen	0	

			Kas				Kas			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	16.500.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	0 Dokumen	0	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungj	2 Dokumen	70.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungj	2 Dokumen	40.555.100	

			awaban Sub Kegiatan				awaban Sub Kegiatan			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2000 Dokum 10000 Doku 10000 Doku	200.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	100 Orang	204.586.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah**	**43 OPD**	**516.500.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah**	**43 OPD**	**639.567.200**	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	57.915.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	34.032.700	

	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset,kewajiban, equitas, Pendapatan dan Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan beban		Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset,kewajiban, equitas, Pendapatan dan Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan beban	10 Dokumen	224.208.600	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset,kewajiban, equitas, Pendapatan dan Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset,kewajiban, equitas, Pendapatan dan Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan beban	2743 Dokumen	357.435.950	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah laporan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10 Laporan	30.712.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10 Laporan	59.458.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	2 Dokumen	52.277.500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	2 Dokumen	43.229.800	

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota			Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota			
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 peraturan	22.000.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	24.199.700	
	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan	4 Dokumen	11.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan	4 Dokumen	12.099.450	

			penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	80.386.900	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	69.830.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.290.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikui Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	1 kali	13.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikui Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	63 Orang	13.992.250	

			Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota				Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota			
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD kabupaten/kota yang dibina	20 BLUD	10.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD kabupaten/kota yang dibina	20 Lembaga	9.998.900	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Terlaksananya tranfer dana bantuan keuangan kepada nagari, dana desa, bagi hasil pajak/retribusi**	**100 %**	**136.522.480.703**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya tranfer dana bantuan keuangan kepada nagari, dana desa, bagi hasil pajak/retribusi**	**100 %**	**119.420.912.731**	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Perusahaan	21.678.800	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	15.940.100	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan	19 nagari	124.699.576.057	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan	1 Laporan	109.149.179.038	

			Penyaluran Bantuan Keuangan				Penyaluran Bantuan Keuangan			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 kali	8.031.586.718	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	6.232.363.415	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	19 nagari	3.769.639.128	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	23.430.178	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**Jumlah data sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang dikelola**	**53 SKPD**	**88.972.400**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah data sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang dikelola**	**53 SKPD**	**108.617.750**	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	54 Dokumen	32.991.200	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	54 Dokumen	43.792.500	

			Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	108 Orang	55.981.200	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	25 Orang	64.825.250	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**	**100%**		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**	**100%**	**568.328.540**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**			**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**	**100%**	**568.328.540**	

	Penyususnan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun			Penyususnan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	36.771.000	
	PenyusunPerencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			PenyusunPerencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	64.279.500	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	46.358.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	44.172.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	35 Laporan	210.514.500	

			Daerah				Daerah			
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	67.547.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	39.195.540	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	53 Orang	59.491.000	
				180,215,440,495				**152.277.153.057**		

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada alokasi dana pada ranwal sebesar Rp. 153.277.153.057,- (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah). Pengurangan ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan plafon anggaran yang diberikan oleh Bappelitbangda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Sesuai dengan urusan yang ditetapkan perundangan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai fungsi penunjang bidang keuangan sehingga tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Renstra Kementerian Republik Indonesia

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif" dengan misi yang dicapai sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk pencapaian tujuan, Kementerian Keuangan RI telah menetapkan sepuluh sasaran strategis untuk tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daera dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
   a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
   b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
   c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
   a. Organisasi dan SDM yang optimal;
   b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
   c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
   d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman Barat menunjang pelaksanaan tujuan Kementrian Keuangan nomor 3 dan 4 dengan sasaran strategis permasing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan 3, Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
   a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
2. Tujuan 4, Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali dengan sasaran strategis:
   a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;

b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 "*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*".

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman Barat mendukung pelaksanaan Misi Ketiga Kementerian Dalam Negeri di Pasaman Barat yakni "Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas".

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman Barat mendukung pelaksanaan tujuan T3 Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Pasaman Barat yakni tujuan "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah", dengan sasaran yang ingin di capai adalah "Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas". Adapun ukur/indikator dari sasaran tersebut terdiri dari:

1. Indeks Pengawasan Internal;
2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

3.1.3 Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/17/DPKD-2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah "Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, Bersih, dan Profesional". Untuk mewujudkan visi

tersebut dirumuskan misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara berkualitas; melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara Konsisten; melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat mendukung pelaksanaan ketiga misi tersebut, serta tujuan dan sasaran strategis serta indikator yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak daerah. - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah. - Persentase Konstribusi PAD terhadap total pendapatan.
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah	- Persentase Ketepan waktu penyaluran dana transfer - Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan pajak daerah	- Indek Kepuasan masyarakat - Persentase pengurangan jumlah komplain masyarakat.
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Opini BPK - Persentase Tepat waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBDP - Persentase Pertang gungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD
3	Terwujudnya Peningkatan kualitas APBD Kab/Kota	Meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota	- Rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan - Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan - Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan - Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai

No	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 Melaksanakan Peningkatan dan	1. Belum optimalnya peningkatan	1.Masih belum optimalnya peremajaan	Tersedianya peraturan daerah tentang

	Pengelolaan Pendapatan Daeraah Secara Berkualitas Program Peningkatan Pendapatan Daerah	pendapatan daerah 2. Perlunya peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kab/Kota 3. Belum meratanya kuantitas dan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah 4. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolan keuangan 5. Perlunya penerapan teknologi informasi dalam angka efisiensi dan efektifitas pelayanan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 6. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendapatan pajak daerah	SDM yang berkualitas 2.Masih lambatnya penyesuaian infastruktur dan kelengkapan pelayanan 3.Masih sedikit aparatur yang ikut dalam diklat fungsional pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 4.Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan 5.Masih belum optimalnya penerapan reward dan punishment	pengelolaan keuangan daerah 2.Adanyaa pengalaman empirik dari aparat di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 3.Tersedianmya anggaraan yanag cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangana daerah 4.Adanyaa kebisaan dan kesiapan SDM/Aparatur dalam melaksanakan tugas 5.Sikap tenggang rasa antara sesama aparatur cukup tinggi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2024
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP

	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, efektif dan Efisien	Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu /Paling lama 1 bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai	1 Bulan
		Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	10%
		Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-10%
		Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	6%
		Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum	77%
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPKD		Nilai SAKIP	B
		Level Maturnitas SPIP	3
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKD	Nilai SAKIP	B
		Level Maturnitas SPIP	3
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Secara umum, rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 3 (Tiga) program yang terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan 56 Sub Kegiatan. Berdasarkan tabel rumusan rencana program dan kegiatan di bawah terdapat perbedaan indikator keluaran, dan untuk pagu indikatif yang berbeda dibuat berdasarkan renstra BPKD Tahun 2021-2026. Berikut ini rencana program dan kegiatan BKAD yang tercantum dalam sistem informasi pemerintah daerah:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**153.277.153.057,00**							**183.442.935.773,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN**						**153.277.153.057,00**							**183.442.935.773,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**153.277.153.057,00**							**183.442.935.773,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan***	**100 %**			**100 %**	**30.656.003.836,00**						**100 %**	**41.625.727.895,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %			100 %	84.867.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 %	159.720.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen			6 Dokumen	53.414.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	6 Dokumen	93.170.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			2 Laporan	31.453.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Laporan	66.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi keuangan perangkat daerah*	100 %			100 %	28.531.915.231,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 %	38.642.755.393,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			45 Orang/bulan	25.479.284.817,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	45 Orang/bulan	26.353.183.033,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	2.870.975.264,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	12 Dokumen	12.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen			5 Dokumen	160.680.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	5 Dokumen	249.642.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen			1 Dokumen	20.975.150,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Dokumen	39.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dikelola BPKD*	18 orang			3 Orang	38.472.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	3 orang	48.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	38.472.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	48.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek*	300 Orang			50 Orang	359.780.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	50 Orang	629.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang			2 Orang	269.224.250,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Orang	363.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	104 Orang			14 Orang	90.555.850,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	14 Orang	266.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah*	100 %			100 %	355.334.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 %	491.953.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	7.470.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Paket	26.620.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	68.734.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Paket	133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	9.873.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Paket	23.958.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**				**PRIORITAS**		**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	19.299.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Paket	33.275.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256 Laporan			46 Laporan	249.957.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	46 Laporan	275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*	108 Unit			15 Unit	594.452.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	10 Unit	432.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**				**PRIORITAS**		**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit			3 Unit	476.838.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Unit	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit			15 Unit	117.614.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	10 Unit	332.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor*	100 %			100 %	201.999.255,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 %	379.158.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN			
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	180.999.255,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	12 Laporan	340.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			2 Laporan	21.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Laporan	39.158.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara*	684 Unit			114 Unit	489.182.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	114 Unit	841.791.482,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**				**PRIORITAS**		**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 Unit			17 Unit	194.998.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	17 Unit	242.841.482,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin *Lainnya yang Dipelihara*	570 Unit			95 Unit	96.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	95 Unit	266.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	197.433.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Unit	332.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN**	***Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)***	**30 hari sebelum APBD**			**30 hari sebelum APBD**	**122.052.820.681,00**						**30 hari sebelum APBD**	**141.288.153.478,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan dokumen penganggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah*	508 Dokume n			12 Dokumen	1.258.581.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	12 Dokumen	1.340.088.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen			2 Dokumen	148.084.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	165.926.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen			2 Dokumen	148.409.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	165.375.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dokumen			2 Dokumen	446.995.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	463.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen			2 Dokumen	338.438.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	347.287.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24 Dokumen			4 Dokumen	176.653.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	4 Dokumen	198.450.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah koordinasi pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah*	44 SKPD			44 SKPD	625.141.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	44 SKPD	694.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	158 Dokumen			24 Dokumen	70.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	24 Dokumen	75.020.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1224 Dokumen			200 Dokumen	70.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	200 Dokumen	38.720.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	376 Dokumen			47 Dokumen	140.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	47 Dokumen	110.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	120 Laporan			24 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	24 Laporan	107.690.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS NASIONAL**	**PRIORITAS DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15 Dokumen			2 Dokumen	40.555.100,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	157.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	380 Orang			100 Orang	204.586.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 Orang	205.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah*	43 SKPD			43 SKPD	639.567.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	43 SKPD	682.086.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72 Laporan			12 Laporan	34.032.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	12 Laporan	63.706.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, *Pendapatan-LO, dan Beban*	14172 Dokumen			2743 Dokumen	357.435.950,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2743 Dokumen	302.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60 Laporan			10 Laporan	59.458.450,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	10 Laporan	72.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen			2 Dokumen	43.229.800,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	71.390.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
			Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen			1 Dokumen	24.199.700,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Dokumen	26.620.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	24 Dokumen			4 Dokumen	12.099.450,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	4 Dokumen	13.310.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen			2 Dokumen	69.830.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	91.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Dokumen			1 Dokumen	15.290.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	252 Orang			63 Orang	13.992.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	63 Orang	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	20 Lembaga			20 Lembaga	9.998.900,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	20 Lembaga	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya tranfer dana bantuan keuangan kepada nagari, tranfer dana bagi hasil pajak/retribusi, belanja bantuan tidak terduga, dan pernyataan modal*	100 %			100 %	119.420.912.731,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 %	138.440.758.228,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil *Analisis Investasi Pemerintah* *Daerah*	6 Laporan			1 Laporan	15.940.100,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Laporan	21.780.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan			1 Laporan	109.149.179.038,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Laporan	124.995.893.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	26 Laporan			5 Laporan	6.232.363.415,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	5 Laporan	8.761.821.203,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	4.023.430.178,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Laporan	4.661.263.345,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah data sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang dikelola*	53 SKPD			53 SKPD	108.617.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	53 SKPD	130.680.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	54 Dokumen			54 Dokumen	43.792.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	54 Dokumen	52.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	316 Orang			25 Orang	64.825.250,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	25 Orang	78.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK**	***Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai SOP***	**100 %** **100 %**			**100 %**	**568.328.540,00**						**100 %** **100 %**	**529.054.400,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP*	100 %			100 %	568.328.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	100 %	529.054.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang *Disusun*	8 Dokumen			2 Dokumen	36.771.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	37.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan *Barang Milik Daerah*	8 Dokumen			2 Dokumen	64.279.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	2 Dokumen	65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan			1 Laporan	46.358.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Laporan	47.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan			1 Laporan	44.172.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	1 Laporan	43.054.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**				**PRIORITAS**		**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	140 Laporan			35 Laporan	210.514.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	35 Laporan	195.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16 Laporan			4 Laporan	67.547.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	4 Laporan	67.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

			Jumlah Laporan Barang Milik *Daerah yang Disusun*	12 Laporan			3 Laporan	39.195.540,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	3 Laporan	40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212 Orang			53 Orang	59.491.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkat	-	53 Orang	35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH							**153.277.153.057,00**							**183.442.935.773,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berupa Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, yang terakomodir pada kegiatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI), sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Tujuan/Sasaran Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Pent	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capa	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Da		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				153,277,153,0				183,442,935,7	
					Tujuan : akuntabilitas kinerja BPKD	1. Nilai SAKIP 2. Level maturnitas 3. Persentase Jumlah Temuan BPK 4. Indeks mutu pelayanan OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. B 2. 3 3. 100% 4. B	30,656,003,836	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		1. B 2. 3 3. 100% 4. B	41,625,727,895	
					Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKD	1. Nilai SAKIP 2. Level maturnitas 3. Persentase Jumlah Temuan BPK 4. Indeks mutu pelayanan OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. B 2. 3 3. 100% 4. B	30,656,003,836	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		1. B 2. 3 3. 100% 4. B	41,625,727,895	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100%	30,656,003,836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	41,625,727,895	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100%	84,867,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	159,720,000	

5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	6 dokumen	53,414,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	93,170,000	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 laporan	31,453,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	66,550,000	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan perangkat daerah**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**100%**	**28,531,915,231**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	**38,642,755,393**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	45 orang /bulan	25,479,284,817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 orang /bulan	26,353,183,033	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa tugaas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	12 dokumen	2,870,975,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	12,000,000,000	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	5 dokumen	160,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	249,642,360	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 dokumen	20,975,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	39,930,000	

5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang dikelola BPKD**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**3 orang**	**38,472,000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**3 orang**	**48,400,000**	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 dokumen	38,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	48,400,000	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**50 orang**	359,780,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**50 orang**	629,200,000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 orang	**269,224,250**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	**363,000,000**	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	14 orang	90,555,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 orang	266,200,000	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**100%**	355,334,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	491,953,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 paket	7,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	26,620,000	

5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 paket	**68,734,500**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	**133,100,000**	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 paket	9,873,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	23,958,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 paket	19,299,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	33,275,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	46 laporan	249,957,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 laporan	275,000,000	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**15 unit**	594,452,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**15 unit**	432,750,000	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	3 unit	476,838,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	100,000,000	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya		15 unit	117,614,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	332,750,000	

5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**100%**	**201,999,255**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100%**	**379,158,020**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	**180,999,255**			12 laporan	**340,000,000**	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 orang	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	39,158,020	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**114 unit**	489,182,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**114 unit**	841,791,482	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	17 unit	194,998,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 unit	242,841,482	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	95 unit	**96,750,000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 unit	**266,200,000**	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 unit	197,433,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	332,750,000	

					Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	**Opini BPK atas laporan keuangan daerah**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**WTP**	**122,052,820,681**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**WTP**	**141,288,153,478**	
					Sasaran : Meningkatkan Pengelola an Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	**Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu/Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	**Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran**	**1,258,581,400**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai**	**1,340,088,750**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**30 hari sebelum APBD**	**122,052,820,681**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**30 hari sebelum APBD**	**141,288,153,478**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan dokumen penganggaran pendapatan belanja**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**12 dokumen**	**1,258,581,400**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**12 dokumen**	**1,340,088,750**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 dokumen	148,084,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	165,926,250	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 dokumen	148,409,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	165,375,000	
5	02	02	21	07	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan tetang APBD dan peraturan kepala tentang penjabaran APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	446,995,500	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		2 dokumen	463,050,000	

5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah peraturan daerah tetang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurah	2 dokumen	338,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	347,287,500	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	4 dokumen	176,653,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	198,450,000	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah koordinasi pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**44 SKPD**	**625,141,600**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**44 SKPD**	**694,540,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	24 dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 dokumen	75,020,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	200 dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 dokumen	38,720,000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 dokumen	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 dokumen	110,110,000	

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kasa Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 laporan	107,690,000	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	40,555,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	157,300,000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 orang	204,586,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	205,700,000	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**43 SKPD**	**639,567,200**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**43 SKPD**	**682,086,500**	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	12 Laporan	34,032,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	63,706,500	

5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset,kewajiban, equitas, Pendapatan dan Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurah	2743 dokumen	357,435,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2743 dokumen	302,500,000	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Jumlah laporan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	10 Laporan	59,458,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	72,600,000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	43,229,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	71,390,000	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawa	Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 dokumen	24,199,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	26,620,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	4 dokumen	12,099,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	13,310,000	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 dokumen	69,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	91,960,000	

5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 dokumen	15,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	15,000,000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikui Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	63 orang	13,992,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		63 orang	15,000,000	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD kabupaten/kota yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	20 lembaga	9,998,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 lembaga	10,000,000	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya tranfer dana bantuan keuangan kepada nagari, dana desa, bagi hasil pajak/retribusi**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 laporan	**119,420,912,731**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	**138,440,758,228**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 laporan	15,940,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	21,780,000	
5	02	02	2.04	09	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	5 laporan	109,149,179,038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 laporan	124,995,893,680	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 laporan	6,232,363,415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	8,761,821,203	

5	02	02	2.05		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	53 SKPD	4,023,430,178	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 SKPD	4,661,263,345	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah data sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang dikelola**	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	**53 SKPD**	**108,617,750**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			**130,680,000**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	54 dokumen	43,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 dokumen	52,030,000	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	25 orang	64,825,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 orang	78,650,000	
					Tujuan: Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	**Opini BPK atas laporan keuangan daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua**		**554,054,400**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**554,054,400**	
					Sasaran: Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua**		**554,054,400**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**554,054,400**	
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua**		**568,328,540**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**529,054,400**	

5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai dengan SOP**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua**	**100%**	**568,328,540**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**37,000,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyususnan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	2 dokumen	36,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	65,000,000	
5	02	03	2.01	03	PenyusunPerencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	2 dokumen	64,279,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	47,000,000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 laporan	46,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	43,054,400	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 laporan	44,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	195,000,000	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	35 laporan	210,514,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 laporan	67,000,000	

5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	4 laporan	67,547,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	40,000,000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	3 laporan	39,195,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan	35,000,000	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	53 orang	59,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 orang	35,000,000	
TOTAL									**153,277,153,0**				**183,442,935,7**	

Simpang Empat, Agustus 2023

Kepala BKAD Kabupaten Pasaman Barat

MAIBONNI, SE

NIP. 10720503 200604 1 001

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intens antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Saran dan masukan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program-program pembangunan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Agustus 2023
Kepala BKAD
Kabupaten Pasaman Barat

MAIBONNI, SE
NIP. 19720503 200604 1 001

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat

1.5. Latar Belakang

mswordcoverpages.com

DAFTAR ISI

Halaman

BAB 1 PENDAHULUAN **5**
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penyusunan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 **13**
13
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 23
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 36
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 41
2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat **42**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 42
50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
3.3. Program dan Kegiatan **58**
66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra SKPD	16
Tabel 2.	Capaian Program Penunjang	20
Tabel 3.	Capaian Program Kepegawaian Daerah	22
Tabel 4.	Capaian Program Pengembangan SDM	24
Tabel 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM	27
Tabel 6.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
Tabel 7.	Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi BKPSDM	49
Tabel 8.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	50
Tabel 9.	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat	58

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan dimaksudkan untuk tersedianya suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perencanaan pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan turunan dari Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renja tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Hal ini Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Simpang Empat, Juli 2023

Plt. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat

Dr. ADRIANTO,S.Ag.M.Pd
Nip. 19781110 200901 1 007

resmi daerah yang berisi penjabaran dari program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk Menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan dan mengolah data serta informasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPSDM yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPSDM dan tahap penyajian rancangan Renja BKPSDM. Proses penyusunan Renja BKPSDM diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDM. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDM dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDM menetapkan Renja BKPSDM untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDM pada tahun 2024.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

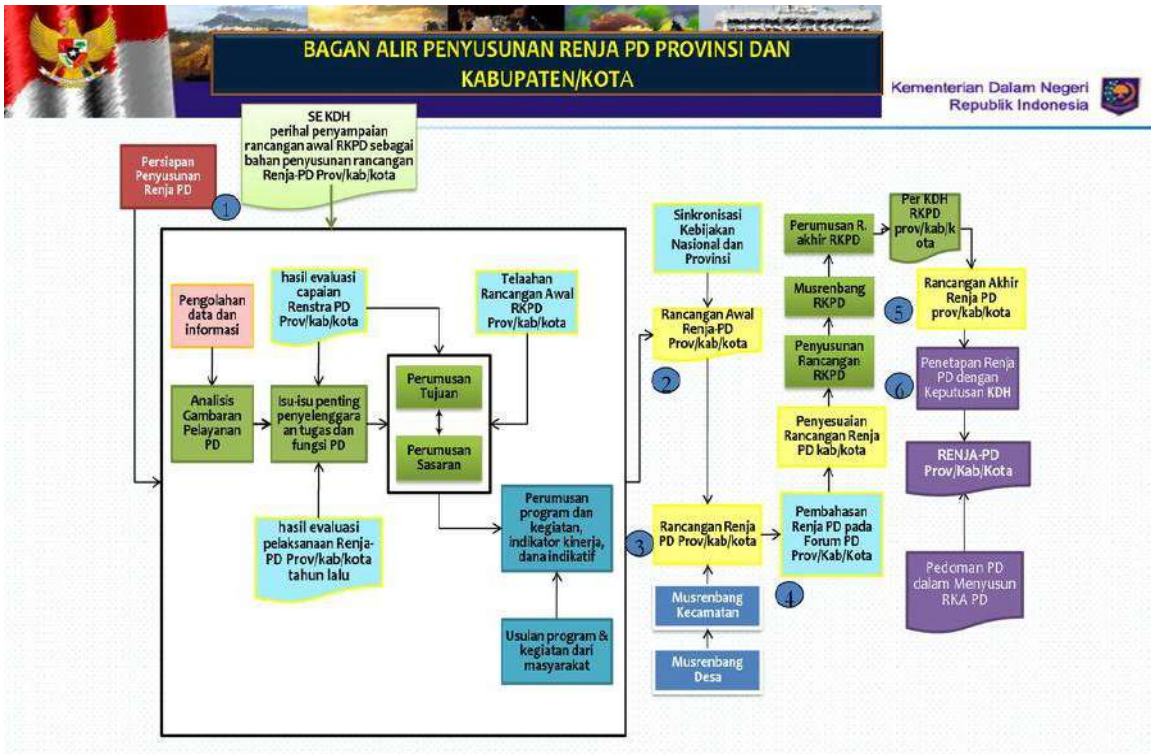

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasaman Barat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

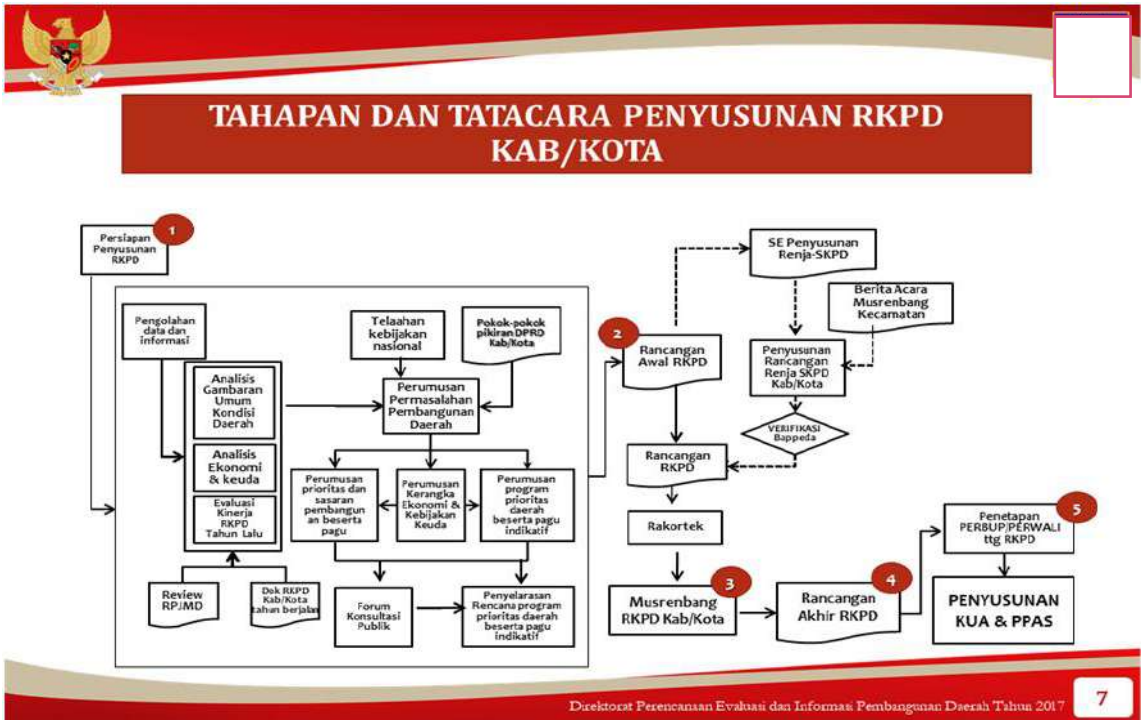

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Perencanaan SDM erat kaitannya dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Perencanaan SDM.Faktor Internal terdiri dari berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Antara lain sumber daya manusia, sistem informasi dan manajemen organisasi dan koordinasi antar bidang, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. dalam hal ini faktor eksternal yang berpengaruh adalah Teknologi serta Politik dan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan

dokumen dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses penyusunan dokumen anggaran tersebut di atas, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran (*budget preparation*) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penganggararan terdiri dari pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran OPD yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan *(stakeholder*) agar dapat dihasilkan APBD yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasaman Barat merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026 **"*Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera*".** Dari 5 (lima) misi pada Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, pada misi pertama (satu) merupakan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan BKPSDM yaitu "***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif*".**

1.6. Landasan Hukum

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/ 039/BKPSDM/2023 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

1.7. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2024;
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 yaitu:

a. Menselaraskan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Rentrsa Perangkat Derah dan Renja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat adalah menyediakan dokumen Rencana Kerja, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dalam rangka :

a. Peningkatan pelayanan kepegawaian

b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional
c. Peningkatan kapabilitas ASN

1.8. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan. Adapun sistematika penulisan Renja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sub bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat DaerahPermasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
   Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
   Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Program dan Kegiatan
   Berisikan penjelasan mengenai:
   a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, contohnya: Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
      1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
      2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
      3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
   c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kerja berupa rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaanindikatif.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlumendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2022

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

2.6. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah program -program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun - tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi memuat kajian terhadap realisasi kinerja Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan. Pada Tahun 2022 mengampu dua urusan yaitu:

Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang terbagi dalam tiga Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya terealisasi 44,11% atau sebesar Rp. 23.425.400,00 dari total anggaran Rp. 53.112.000,00. Hal ini disebabkan Dari 3 orang yang direncanakan untuk mengikuti bimtek/diklat fungsional ternyata hanya 1 orang yang mengikuti, 2 orang gagal karena kesalahan prosedur pendaftaran.
2. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK hanya terealisasi 52,63% atau sebesar Rp. 177.186.016,00 dari total anggaran Rp. 336.668.302,00. Hal disebabkan oleh kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi Kepegawaian ASN terutama pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang tidak terlaksana akibat penundaan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan asn tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/2296/M.SM.01.00/22 tanggal 2 November 2022 tentang Tanggapan atas Surat Bupati Pasaman Barat No. 800.1471/XI/BKPSDM-2022 bahwa Menteri PANRB menyetujui Kabupaten Pasaman Barat hanya mengadakan PPPK tenaga guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan.

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Ada beberapa program /kegiatan memenuhi target kinerja, yaitu :

A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
   a. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan ujian kedinasan sebanyak 39 orang
   b. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 49.998.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.123.650,- atau 92,25 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

Program ini terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
   a. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penetapan pejabat fungsional sebanyak 3 kali kegiatan
   b. Realisasi Kegiatan
   Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 28.271.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.162.757,- atau 78,39 % dengan realisasi fisik sebanyak 78,39 %.
   c. Permasalahan dan Solusi
   Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
2. Pembinaan Disiplin ASN
   a. Kegiatan ini merupakan pembinaan disiplin ASN terhadap pelanggaran dan kasus cerai. Tahun 2022, ada 12 Kasus yang terdiri dari 1 Kasus Penyalahgunaan wewenang, 4 Kasus Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan 7 Kasus Dugaan Tipikor
   b. Realisasi Kegiatan
   Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 49.284.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.102.300,- atau 89,49 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
   c. Permasalahan dan Solusi
   Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
3. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   a. Kegiatan ini merupakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan mengupdate database PNS Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4640 orang.
   b. Realisasi Kegiatan
   Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp33.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.023.142,- atau 91,65 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
   c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

4. Pengelolaan Data Kepegawaian
   a. Kegiatan ini merupakan merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada pegawai untuk memfasilitasi pengurusan Kartu kepegawaian dengan target 100 kartu dan kartu suami / istri sebanyak 300 kartu
   b. Realisasi Kegiatan
      Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 28.725.000,- dan realisasi sebesar Rp. 26.997.051,- atau 93,98 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
   c. Permasalahan dan Solusi
      Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
5. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   a. Kegiatan ini merupakan pengelolaan kenaikan pangkat ASN pada periode April dan Oktober, berkas kenaikan pangkat yang dikelola dan disetujui selama tahun 2022 sebanyak 745 SK dari 862 berkas yang diusulkan
   b. Realisasi Kegiatan
      Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 60.292.605,- dan realisasi sebesar Rp. 50.736.998,- atau 84,15 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
   c. Permasalahan dan Solusi
      Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
6. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   a. Kegiatan ini merupakan koordinasi administrasi pemberhentian ASN dengan pensiun sebanyak 65 SK dan pemberhentian karena permintaan sendiri sebanyak 6 SK.
   b. Realisasi Kegiatan
      Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 27.015.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.273.850,- atau 89,85 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
   c. Permasalahan dan Solusi
      Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

7. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
    a. Kegiatan ini merupakan pelayanan kepada anggota korpri yang berupa bantuan-batuan bagi pegawai dan keluarga.
    b. Realisasi Kegiatan
       Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 49.114.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.332.588,- atau 78,05 % dengan realisasi fisik sebanyak 78,05 %.
    c. Permasalahan dan Solusi
       Pada kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN ada kegiatan RAT yang tidak terlaksana karena kegiatan lain yang harus dilaksanakan sesuai perintah Bupati .
8. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    a. Kegiatan ini menilai kinerja pegawai pemda Pasaman Barat yang dilakukan bersama BKN dengan target 3 dokumen per orang sebanyak 4640 orang
    b. Realisasi Kegiatan
       Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 186.369.052,- dan realisasi sebesar Rp. 115.186.191,- atau 61,81 % dengan realisasi fisik sebanyak 90 %.
    c. Permasalahan dan Solusi
       Karena dokumen pertanggungjawaban anggaran kegiatan tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan, untuk kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam pelaksanaan kegiatan,
9. Pengelolaan Mutasi ASN
    a. Kegiatan ini mengelola mutasi ASN, selama tahun 2022 telah diterbitkan 132 SK kenaikan jabatan fungsional,163 SK mutasi tempat tugas. 1 SK Perpindahan Jabatan, 4 SK Penyesuain Tunjangan, 52 SK Pengangkatan Pertama, 30 SK Pengangkatan Kembali, 68 SK Pemberhentian Fungsional
    b. Realisasi Kegiatan
       Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp 34.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.609.990,-- atau 74,27 % dengan realisasi fisik sebanyak 74,27 %.
    c. Permasalahan dan Solusi
       Realisasi keuangan yang rendah disebabkan anggaran perjalanan dinas yang tidak digunakan, karena anggaran perubahan .
10. Pengelolaan Promosi ASN
    a. Kegiatan ini mengelola promosi ASN, telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 30 kali, dengan 713 orang peserta yang

dilantik. Terdiri dari 377 orang pejabat fungsional, 6 orang JPT Pratama, 174 orang pejabat administrator, 136 orang pejabat pengawas dan 13 orang kepala sekolah

b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp 636.491.000,- dan realisasi sebesar Rp. 477.828.951,-- atau 75,07% dengan realisasi fisik sebanyak 75,07%.

c. Permasalahan dan Solusi
Kegiatan evakusi jabatan tinggi pratama baru bisa dilaksanakan bulan desember. Evalusi terlaksana atas perintah bupati dan koordinasi dengan KASN, BKN.

11. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
    a. Kegiatan ini mengelola tanda jasa bagi ASN dan telah dikelola sebanyak 319 buah Satya Lencana.
    b. Realisasi Kegiatan
    Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp 38.490.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.285.200,-- atau 99,47% dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
    c. Permasalahan dan Solusi
    Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
    a. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan LPJ CPNS dengan target peserta berjumlah 166 orang.
    b. Realisasi Kegiatan
    Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.095.549.009,- dan realisasi sebesar Rp. 995.952.869,- atau 90,91 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
    c. Permasalahan dan Solusi
    Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;

1. Untuk target kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dan realisasi lebih dari 75%, tidak ditemukan kendala yang berarti.
2. Pada program/ kegiatan yang tidak tercapai dengan faktor – faktor sebagai berikut :
   a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya terealisasi 44,11% atau sebesar Rp. 23.425.400,00 dari total anggaran Rp. 53.112.000,00. Hal ini disebabkan Dari 3 orang yang direncanakan untuk mengikuti bimtek/diklat fungsional ternyata hanya 1 orang yang mengikuti, 2 orang gagal karena kesalahan prosedur pendaftaran secara *online.*
   b. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK hanya terealisasi 52,63% atau sebesar Rp. 177.186.016,00 dari total anggaran Rp. 336.668.302,00. Hal ini disebabkan surat Bupati Pasaman Barat kepada Menteri PANRB dengan nomor : 800/1417/XI/BKPSDM-2022 tanggal 2 November 2022 bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat hanya melaksanakan pengadaan PPPK guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan karena adanya keterbatasan anggaran.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya adalah bahwa dalam pelaksanaan progam, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan perencanaan dan menyusun jadwal kegiatan yang menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan.

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a. Menyusun target kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta mengantisipasi segala hambatanhambatan yang mungkin timbul dalam mencapai sasaran.

b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung pencapaian sasaran.
c. Mempercepat pelaksanaan yang mungkin dapat dilaksanakan pada semester pertama untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
d. Melakukan perubahan terhadap target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
e. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
f. Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar pencapaiannya maksimal.

Adapun realisasi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					(Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Daerah tahun (n-2) (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (AKUMULASI 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4) *100
01	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTANAN**															
01 . 2.02	**KEPEGAWAIAN**															
01 . 2.02 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan sarana prasarana pendukung pelayanan**	**100%**	**30.411.030.123**	**16,96%**	**5.156.331.590**	**100%**	**5.804.546.991**	**88,83%**	**5.156.331.590**	88,83%	**100%**	**5.087.086.706**	**50,64%**	**15.399.749.886**	**50,64%**
01 . 2.02 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja OPD**	**100%**	**25.330.096.066**	**54 orang**	**3.748.112.782**	**56 orang**	**4.250.561.868**	**54 orang**	**3.748.112.782**	88,18%	**100%**	**4.284.268.584**	**46,51%**	**11.780.494.148**	**46,51%**
01 . 2.02 . 03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	249 Orang/Bulan	22.591.107.875	42 orang	3.328.348.782	42 orang	3.806.476.868	42 orang	3.328.348.782	87,44%	42 orang/bulan	3.847.418.584	113 orang/bulan	10.504.116.148	46,50%
01 . 2.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72 Dokumen	2.070.230.411	14 orang 12 bulan	307.474.000	16 orang 12 bulan	323.600.000	14 orang 12 bulan	307.474.000	95,02%	12 Dokumen	330.850.000	6 Dokumen	945.798.000	45,69%
01 . 2.05 . 11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	72 Dokumen	668.757.780	12 orang 12 bulan	112.290.000	12 orang 12 bulan	120.485.000	12 orang 12 bulan	112.290.000	93,20%	12 Dokumen	106.000.000	6 Dokumen	330.580.000	49,43%
01 . 2.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**294.628.420**	**7,95%**	**23.425.400**	**2 orang**	**53.112.000**	**44,11%**	**23.425.400**	44,11%	**100%**	**34.000.000**	**27,44%**	**80.850.800**	**27,44%**
01 . 2.06 . 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	14 Orang	212.128.420	1 orang	23.425.400	2 orang	53.112.000	1 orang	23.425.400	44,11%	2 orang	34.000.000	6 orang	80.850.800	38,11%
01 . 2.06 . 02	Penyediaan Pakaian dinas	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	82.500.000							#DIV/0!	2 paket	30.000.000		30.000.000	36,36%
01 . 2.06 . 05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.713.657.966**	**24,73%**	**423.777.483**	**100%**	**438.104.526**	**96,73%**	**423.777.483**	96,73%	**100%**	**272.908.237**	**65,38%**	**1.120.463.203**	**65,38%**
01 . 2.06 . 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	107.616.303	2 paket	14.350.500	2 paket	14.627.958	2 paket	14.350.500	98,10%	2 paket	14.790.000	5 paket	43.491.000	40,41%
01 . 2.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	605.996.385	2 paket	224.055.250	2 paket	237.625.068	2 paket	224.055.250	94,29%	2 paket	97.518.237	5 Paket	545.628.737	90,04%

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4) *100
01 . 2.08 . 01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	144.889.468	2 paket	22.859.000	2 paket	22.920.000	2 paket	22.859.000	99,73%	2 paket	23.600.000	4 Paket	69.318.000	47,84%
01 . 2.08 . 02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	855.155.810	30 Kali	162.512.733	30 kali	162.931.500	30 Kali	162.512.733	99,74%	10 Laporan	137.000.000	85 Laporan	462.025.466	54,03%
01 . 2.08 . 04	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran**	**100%**	**1.880.582.160**	**12,88%**	**242.259.550**	**12 bulan**	**313.674.403**	**77,23%**	**242.259.550**	77,23%	**100%**	**302.780.000**	**18 Bulan**	**787.299.100**	**41,86%**
01 . 2.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	9.834.195	2 paket	3.090.000	2 paket	3.690.000	2 paket	3.090.000	83,74%	2 Laporan	1.500.000	5 Laporan	7.680.000	78,09%
01 . 2.09 . 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 Laporan	1.124.992.026	12 bulan	93.082.118	12 bulan	160.835.771	12 bulan	93.082.118	57,87%	12 Laporan	179.280.000	30 Laporan	365.444.236	32,48%
01 . 2.09 . 05	Penyediaan masa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 Laporan	745.755.939	2 Paket	146.087.432	2 paket	149.148.632	2 Paket	146.087.432	97,95%	12 Laporan	122.000.000	10 Laporan	414.174.864	55,54%
01 . 2.09 . 06	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerinTAH**	**Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**	**100%**	**1.192.065.511**	**60,30%**	**718.756.375**	**100%**	**749.094.194**	**95,95%**	**718.756.375**	95,95%	**100%**	**193.129.885**	**136,79%**	**1.630.642.635**	**136,79%**
01 . 2.09 . 09	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	146 Unit	438.136.644	25 Unit	57.127.275	25 unit	71.267.000	25 Unit	57.127.275	80,16%	25 Unit	71.999.885	54 Unit	186.254.435	42,51%
02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Paket	36.099.954			2 paket	1.000.000			0,00%	2 Unit	5.800.000		5.800.000	16,07%
02 . 2.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	680 Unit	312.887.015	45 Unit	52.284.500	45 unit	59.676.000	45 Unit	52.284.500	87,61%	120 unit	50.270.000	98 Unit	154.839.000	49,49%
02 . 2.01 . 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Paket	404.941.898	2 Unit	609.344.600	2 unit	617.151.194	2 Unit	609.344.600	98,74%	2 unit	65.060.000	5 Unit	1.283.749.200	317,02%
02 . 2.01 . 03	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)**	**87**	**5.350.145.178**	**20,93%**	**1.119.689.913**	**84**	**1.571.055.959**	**71,27%**	**1.119.689.913**	71,27%	**65**	**780.000.000**	**56,44%**	**3.019.379.826**	**56,44%**
02 . 2.01 . 06	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**36 Dokumen**	**2.620.458.499**	**3 Dokumen**	**317.451.984**	**3 dokumen**	**498.306.302**	**3 Dokumen**	**317.451.984**	63,71%	**3 dokumen**	**399.562.178**	**6 Dokumen**	**1.034.466.146**	**39,48%**
02 . 2.01 . 08	Penyusunan Rencana Kebutuhan, tenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan untuk pengadaan ASN	6 Dokumen	136.455.000	2 Dokumen	19.639.337	2 dokumen	22.934.000	2 Dokumen	19.639.337	85,63%	2 Dokumen	22.000.000	5 Dokumen	61.278.674	44,91%
02 . 2.01 . 10	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	4235 Dokumen	1.772.952.708	2 Dokumen	177.186.016	2 dokumen	336.668.302	2 Dokumen	177.186.016	52,63%	680 Dokumen	268.565.678	31 Dokumen	622.937.710	35,14%
02 . 2.01 . 11	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	900 Dokumen	124.050.000	150 Sk	24.273.850	150 sk	27.015.000	150 Sk	24.273.850	89,85%	150 Dokumen	20.000.000	08 Dokumen	68.547.700	55,26%
02 . 2.02	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	227.087.500	1 Kali	38.332.588	1 kali	49.114.000	1 Kali	38.332.588	78,05%	1 Lembaga	35.000.000	3 Lembaga	111.665.176	49,17%
02 . 2.02 . 01	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	18 Dokumen	190.670.000	3 Dokumen	31.023.142	3 dokumen	33.850.000	3 Dokumen	31.023.142	91,65%	3 Dokumen	28.000.000	9 Dokumen	90.046.284	47,23%
02 . 2.02 . 02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1800 Dokumen	169.243.291	300 dokumen	26.997.051	300 dokumen	28.725.000	300 dokumen	26.997.051	93,98%	300 Dokumen	25.996.500	867 Dokumen	79.990.602	47,26%
02 . 2.02 . 03	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah dokumen mutasi, kepangkatan dan promosi ASN**	**18 Dokumen**	**1.700.941.273**	**2 dokumen**	**554.175.940**	**3 dokumen**	**731.263.605**	**2 dokumen**	**554.175.940**	75,78%	**3 dokumen**	**230.519.322**	**3 dokumen**	**1.338.871.202**	**78,71%**
02 . 2.02 . 07	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	1063 Dokumen	179.872.500	300 SK	25.609.990	300 sk	34.480.000	300 SK	25.609.990	74,27%	185 Dokumen	29.000.000	766 Dokumen	80.219.980	44,60%
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	4200 Laporan	195.999.000	700 SK	50.736.999	700 sk	60.292.605	700 SK	50.736.999		700 Laporan	31.600.000	838 Laporan	133.073.998	67,90%
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	18 Dokumen	1.325.069.773	1 kali 2 kali	477.828.951	1 kali 2 kali	636.491.000	1 kali 2 kali	477.828.951	75,07%	2 Dokumen	169.919.322	3 Dokumen	1.125.577.224	84,94%

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4) *100
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN**	**12 Dokumen**	**434.140.886**	**1 Dokumen**	**50.488.298**	**2 dokumen**	**67.343.000**	**1 Dokumen**	**50.488.298**	74,97%	**2 dokumen**	**49.994.500**	**3 Dokumen**	**150.971.096**	**34,77%**
02 . 2.03	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang									10 Orang	20.000.000		20.000.000	#DIV/0!
02 . 2.03 . 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	120 Dokumen	310.112.595	150 Orang 20 Berkas	28.325.541	150 orang 20 berkas	39.072.000	150 Orang 20 Berkas	28.325.541	72,50%	20 Dokumen	29.998.000	315 Dokumen	86.649.082	27,94%
02 . 2.03 . 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	1063 Dokumen	124.028.291	50 Dokumen	22.162.757	50 dokumen	28.271.000	50 Dokumen	22.162.757	78,39%	185 Dokumen	19.996.500	201 Dokumen	64.322.014	51,86%
02 . 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**18 Dokumen**	**594.604.520**	**3 Dokumen**	**197.573.691**	**3 dokumen**	**274.143.052**	**3 Dokumen**	**197.573.691**	72,07%	**3 dokumen**	**99.924.000**	**6 Dokumen**	**495.071.382**	**83,26%**
02 . 2.04 . 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	24000 Dokumen	191.442.020	2 Dokumen	115.186.191	2 dokumen	186.369.052	2 Dokumen	115.186.191	61,81%	4000 Dokumen	34.924.000	3262 Dokumen	265.296.382	138,58%
02 . 2.04 . 05	Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	900 Orang	186.075.000	150 sertifikat	38.285.200	150 srtifikat	38.490.000	150 sertifikat	38.285.200	99,47%	150 Orang	30.000.000	432 Orang	106.570.400	57,27%
02 . 2.04 . 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	120 Orang	217.087.500	20 Kasus	44.102.300	20 kasus	49.284.000	20 Kasus	44.102.300	89,49%	20 Orang	35.000.000	48 Orang	123.204.600	56,75%
03	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTANAN**															
03 . 2.02	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**4,2**		**2,80%**		**2,80%**		**2,80%**			**3,8%**		**3,80%**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**4,2%**	**5.722.000.000**	**17,41%**	**995.952.869**	**2,8%**	**1.095.549.009**	**90,91%**	**995.952.869**	90,91%	**2,8%**	**800.000.000**	**48,79%**	**2.791.905.738**	**48,79%**
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1024 Orang	**5.722.000.000**	166 Orang	**995.952.869**	166 orang	**1.095.549.009**	166 Orang	**995.952.869**	90,91%	160 orang	**800.000.000**	**405 Orang**	**2.791.905.738**	**48,79%**
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	1024 Orang	5.722.000.000	166 Orang	995.952.869	166 orang	1.095.549.009	166 Orang	995.952.869	90,91%	160 orang	800.000.000	405 Orang	2.791.905.738	48,79%

2.7. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahap evaluasi kinerja:

1. Instansi Pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
2. Indeks Profesionalitas ASN
3. Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan

Adapun realisasi pada masing – masing program sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut adalah realisasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 :

Tabel 2
Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator	Target Capaian	Realisasi
			2022	2022
1	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM			
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM			
		Nilai SAKIP	B (65)	77,02%
		Level Maturitas SPIP	2,11	3,132
		% penurunan temuan BPK	80%	41,70%
		Indeks Profesionalitas ASN	84%	67,07%

Pada table diatas terlihat realisasi untuk target nilai sakip 77,02 % melebihi target 65%. Melebihi target juga terlihat pada level maturitas SPIP dengan realisasi 3,132. Pada point persentase penurunan temuan BPK dari target 80 % hanya terealisasi 41,70%, sedangkan indeks profesionalitas ASN dengan target 84 % terealiasasi 67,07%.

Dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Rendahnya IP ASN tahun 2022 sebanyak 67,07% dengan kategori rendah padahal ada kenaikan target sebanyak 84 %, sehingga nilai capaian IP ASN sangat rendah. Pada Kabupaten Pasaman Barat disebabkan rendahnya capaian pengembangan kompetensi melalui diklat, pelatihan dan seminar, selain peningkatan kinerja dan disiplin ASN Target pada renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 adalah sebanyak 84%, dengan persentase pencapaian sebanyak 79,85 %.

Perlu penguatan dan inovasi pada aspek kepegawaian sesuai dengan mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Terlebih dengan jumlah pegawai yang terus mengalami *minus growth* dihadapkan tuntutan kondisi era industry 4.0 sehingga tujuan dalam manajemen ASN ini adalah meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

Diperlukan adanya pengganggaran pada diklat dan pelatihan, serta mendorong ASN untuk mengikuti diklat, pelatihan dan seminar secara mandiri untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN pada Kabupaten Pasaman Barat. Selain peningkatan kompetensi, penerapan displin dan peningkatan kinerja ASN perlu diatur dalam Peraturan dan kebijakan daerah yang mengalami perubahan sejalan dengan peraturan – peraturan dari pusat juga mengalami perubahan.

Namun dalam internal organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat pencapaian kinerja layanan organisasi. Kelemahan organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ;
2. Belum terbangunnya integrasi sistem informasi database kepegawaian secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di bidang Teknologi Information (TI);
3. Belum terbangunnya merit system dimana penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih belum bisa diukur berdasarkan kompetensi.

Maka untuk pencapaian Indeks Profesionalitas ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tantangannya adalah sebagai berikut :

1. Integrasi Sistem Data , Migrasi menuju Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam integrasi data
2. Kebijakan Peningkatan Kualifikasi Kompetensi ASN ,
   a. Peningkatan Kualitas Diklat dan Lembaganya
   b. Kebijakan Diklat alternative
   c. Peningkatan Kualitas Diklat Mandiri
3. Penyempurnaan Ukuran Kinerja ,
   a. Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
   b. Penguatan Peta Strategi Pencapaian Outcame Puncak
   c. Membangun IKI ASN yang berdampak
4. Penguatan Disiplin dan *Talent Angegment* , Penguatan Evaluasi Disiplin dan budaya keja yang mendorong *Talent Engegment* Profesionalitas ASN dicapai melalui penerapan sistem rekrutmen yang terbuka dan obyektif, penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi, meningkatnya kompetensi ASN, meningkatnya kinerja

ASN, meningkatnya motivasi & talent engagement, sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Merit dan PERMENPAN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta

2.2.2. Program Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Kepegawaian Daerah merupakan program yang menunjang Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai). Dengan persentase pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)sebesar 78,91% tapi dengan persentase pencapaian anggaran 63,71%. Hal disebabkan oleh kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi Kepegawaian ASN terutama pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang tidak terlaksana akibat penundaan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan asn tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/2296/M.SM.01.00/22 tanggal 2 November 2022 tentang Tanggapan atas Surat Bupati Pasaman Barat No. 800.1471/XI/BKPSDM-2022 bahwa Menteri PANRB menyetujui Kabupaten Pasaman Barat hanya mengadakan PPPK tenaga guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan.

Tabel 3
Capaian Program Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator	Target Capaian	Realisasi
			2022	2022
2	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional			
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai) (%)	90%	78,91%

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2016. Adapun penerima pelayanan publik yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia adalah masyarakat, pegawai/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi pemerintah.

Pada periode pengukuran Tahun 2022, Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengukuran Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) mengambil responden sejumlah 130 (seratus Tiga puluh) responden. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dalam rangka menilai kualitas kinerja pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengedarkan kuesioner kepada pengguna layanan yang datang.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengambil penerima pelayanan publik sebagai responden berjumlah 130 orang diperoleh **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 78,91%** dengan katagori untuk **Mutu Pelayanan " B "** dan **Kinerja Unit Pelayanan** dengan katagori **BAIK.** Sedang Nilai Rata-rata IKM per urusan pelayanan diperoleh sebesar **3,16.**

Nilai rata-rata IKM ke 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah dinilai oleh responden diketahui bahwa unsur biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terendah pada unsur perilaku pelaksana.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama maka sesuai Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 – 2026 maka disusun program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja tersebut.

Secara empiris birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Birokrasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan oleh karena itu saat ini banyak digaungkan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Profesional memiliki makna ahli dalam bidang yang ditekuninya. ASN dikatakan profesional jika ASN tersebut mampu menunjukkan keahlian pada posisi yang sekarang di jabat baik jabatan pimpinan, dministrator, pengawas, fungsional, maupun jabatan pelaksana. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi .Saat ini pembinaan ASN sudah diarahkan untuk dapat mewujudkan ASN yang profesional, memiliki wawasan luas, memiliki kemampuan dan kapabilitas dengan kualitas tinggi yang setara dan seimbang baik di pusat maupun daerah. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembinaan berdasarkan norma, dan prosedur operasional standar yang berlaku secara nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti rekrutmen dan pengembangan karier yang bias kepentingan politik dan gender. Untuk itu perlu dilakukan check and balance terhadap wewenang pejabat politik dan pejabat karier tertinggi dalam mengangkat,

memindahkan, dan memberhentikan pegawai serta membatasi keterlibatan ASN dalam politik praktis.
Kapasitas pegawai yang terlihat dari perilaku keseharian dalam organisasi menentukan profesionalitas ASN. Profesionalitas merupakan perihal profesi; keprofesian; kemampuan untuk bertindak secara professional . Semakin baik kemampuannya maka semakin baik juga karier ASN.

Berikut ini program dan kegiatan yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 ;

1. Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi Kepegawaian ASN
    a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, tenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
    b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
    c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
    d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
    e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    f. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
    a. Pengelolaan Mutasi ASN
    b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
    c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
    a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
    b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
    c. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    b. Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai
    c. Pembinaan Disiplin ASN

2.2.3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal Pasal 21 huruf (e) dan Pasal 22 huruf (d) disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak memperoleh pengembangan kompetensi.
Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Tabel 4
Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator	Target Capaian 2022	Realisasi 2022
3	Tujuan : Meningkatkan Kapabillitas Aparatur Sipil Negara			
	Sasaran : Meningkatnya kapabilItas Aparatur Sipil Negara			
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan	2,8%	2,8%

Efektivitas organisasi dan manajemen pemerintahan negara sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang berperan di dalamnya. Dalam hubungan ini, tanpa ASN yang memiliki persyaratan kompetensi maka dalam suatu sistem administrasi negara akan mengalami kegagalan dalam mengemban misinya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan persyaratan mutlak bagi terbangunnya sistem dan proses administrasi negara yang mampu mewujudkan berbagai dimensi nilai yang terkandung di dalamnya Pada prinsipnya penyelenggaraan diklat dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi, kinerja, dan pengembangan karier ASN. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis dan jenjang diklat harus dilakukan secara sistematis dan terencana sesuai dengan kebutuhan dan syarat jabatan. Diklat merupakan suatu kegiatan organisasi yang merupakan salah satu mata rantai yang penting dalam proses mencapai visi dan misi organisasi.

Pada tahun 2022, dengan target 2,8% sebanyak 166 orang, terealiasi 100 %, yang merupakan diklat prajabatan.

Pada tahun kedepannya, peningkatan kapabilitas ASN melalui diklat akan lebih ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tuntutan zaman yang mengharuskan ASN terus meningkatkan kompetensinya sehingga pelayanan masyarakat akan lebih professional dan akuntabel.

Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan masih kurang diterima oleh pegawai sehingga menyebabkan fungsi pelayanan pemerintah menjadi kurang efektif. Untuk meningkatkan kompetensi ASN, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mungkin dan layak dikembangkan oleh pemerintah agar kualitas SDM aparaturnya bisa meningkat.

Hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, memadai, dan dirancang dengan baik. Diklat yang diselenggarakan pada dasarnya berorientasi pada peningkatan kompetensi guna menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Diklat dan Pelatihan bisa menjadi jembatan karir bagi PNS dalam menapaki jenjang karirnya. Secara umum ada dua jenis diklat yang harus diikuti oleh PNS, yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS

menjadi PNS yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dan kompetensi dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, serta bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Mengikuti Diklat dan Pelatihan sangat penting dalam pengembangan karir PNS, terutama Diklat Dalam Jabatan. Diklat Dalam Jabatan terdiri dari tiga jenis, yaitu: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis. Diklat kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Sedangkan bagi PNS yang ingin mengembangkan karir dalam jabatan fungsional, harus terlebih dahulu mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu, seperti pustakawan, guru, dosen, peneliti, dan sebagainya. Sedangkan diklat teknis diberikan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administratif dan tugas teknis.

Hak hak untuk ASN untuk mendapatkan pengembangan karier dari pemerintah masih kurang memadai.Ada pun juga lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas yang kian hari kian kompleks serta menghadapi pada persaingan global, maka dibutuhkan SDM aparatur (ASN) yang profesional. Idealnya, kebutuhan tersebut dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan pegawai, penilaian kinerja, promosi, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, renumerasi, terminasi dan penerapan peraturan disiplin pegawai. Sejalan dengan transformasi peran SDM dari professional menjadi strategik menuntut adanya pengembangan SDM berbasis kompentensi agar kontribusi kinerja SDM terhadap organisasi menjadi jelas dan terukur. Mengingat program pengembangan SDM adalah program yang berkesinambungan maka dalam pelaksanaannya diperlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan agar dapat mendukung keberhasilan peningkatan kinerja organisasi .

Barbagai strategi pengembangan SDM aparatur (ASN) yang berbasis kompetensi dapat dilakukan, antara lain:

1. Strategi CBHRM merupakan salah satu strategi atau pendekatan baru dalam memetakan kinerja SDM yang mengarah pada profesionalisme dengan mendasarkan pada kompetensi, yang tersusun dalam direktori kompetensi serta profil kompetensi per posisi;

2. Strategi Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) adalah system pendidikan dan pelatihan yang menawarkan upaya peningkatan kinerja SDM dan organisasi melalui kompetensi yang dapat menciptakan karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan;
3. Strategi yang menggunakan Metode *assessment center* yaitu sebuah proses, prosedur atau metode pendekatan untuk menilai dan mengukur kompetensi orang. Strategi/ metode ini merupakan salah satu sarana/ alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM seperti rekruitmen, promosi, mutasi dan pengembangan karir pegawai.

Tabel 5 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI				CATATAT ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan sarana prasarana pendukung pelayanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**92,07%**	**88,83%**	**48,70%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja OPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,83%	88,18%	62,28%	100%	100%	100%	
2	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,57%	44,11%	58,90%	100%	100%	100%	
3	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,89%	96,73%	29,21%	100%	100%	100%	
4	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	77,70%	77,23%	37,64%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,79%	97,95%	48,28%	100%	100%	100%	
II	**Program Kepegawaian Daerah**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)**	**87**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**80,22%**	**78,91%**	**85**	**86**	**87**	**87**	
1	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
2	Jumlah dokumen mutasi, kepangkatan dan promosi ASN			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
3	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
4	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**2,3**	**2,8**	**3,3**	**3,8**	**4**	**4,2**	**2,12**	**2,8**	**160 Orang**	**166 Orang**	**166 Orang**	**166 Orang**	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan karier melalui pendidikan dan pelatihan										-					
IV.	**Indikator Kinerja Utama**										-					
1	Indeks Profesionalitas ASN			70	70	75	75	80	80	67,13	67,07	75	75	80	80	
2	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (%)			87	90	90	90	90	90	80,22	78,91	90	90	90	90	
3	% Aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan			2,3	2,8	3,3	3,8	4	4,2	2,12	2,8	3,3	3,8	4	4,2	

2.8. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan.

Mengingat pentingnya memahami isu-isu strategis, maka diperlukan pencermatan yang mendalam agar dapat mengidentifikasi isu-isu strategis, identifikasi isu strategis ini dilakukan dengan analisi internal maupun eksternal.
Analisa internal berupa identifikasi permasalahan pembanguan sedangkan analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD untuk lim tahun mendatang. Dari hasil analisa internal dan eksternal selanjutnya dibahas dalam FGD dan dilakukan pembobotan terhadap isu-isu strategis tersebut sehingga diperoleh isu-isu strategis yang paling mendasar yang akan dihadapi dalam 5 tahun kedepan.
Penentuan isu-isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
2. Peningkatan pelayanan kepegawaian;
3. Peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
4. Peningkatan kompetensi dan pengembangan karir aparatur;

Adapun permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah Undang-Undang No5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
3. Belum optimalnya dalam penggunaan analisa jabatan sebagai dasar dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia
4. Perlunya optimalisasi penerapan system merit;

5. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait yang selalu dinamis sesuai dengan perubahan kebijakan di tingkat pusat;
6. Masih terdapat *Missmatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta;
7. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
8. Adanya faktor eksternal lain seperti kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penyetaraan jabatan yang kemudian merubah banyak sekali proses bisnis dan tata kerja organisasi;
9. Belum maksimalnya penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/A*I), dalam seluruh layanan kepegawaian dalam merespon dinamika dan perubahan organisasi di masa industri 4.0;
10. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan digitalisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi;
11. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bab II tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dijelaskan bahwa perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
12. Penghapusan tenaga honorer resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Lalu, di dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur berbagai ketentuan, yaitu:
    a. Pasal 96 ayat 1, PPPK dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan

pengangkatan pegawai non PNS dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 99 ayat 2, pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

13. Penangguhan pengangkatan PPPK untuk tenaga teknis dan teanag Kesehatan sesuai dengan Surat Menteri PANRB No. B/2296/M.SM.01.00/22 tanggal 2 November 2022 tentang Tanggapan atas Surat Bupati Pasaman Barat No. 800.1471/XI/BKPSDM-2022 bahwa Menteri PANRB menyetujui Kabupaten Pasaman Barat hanya mengadakan PPPK tenaga guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan, hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk penyediaan gaji PPPK yang akan direkrut.
14. Menyikapi netralitas ASN dalam kegiatan Politik pada tahun 2024 pelanggaran terkait netralitas ASN, dalam Surat Keputusan Bersama telah diklusterkan jenis potensi pelanggaran yang dimungkinkan terjadi berdasarkan pengalaman pemilihan umum tahun sebelumnya. Jenis hukuman dibedakan kedalam 2 jenis pelanggaran yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Setiap PNS yang terbukti menjadi anggota/pengurus partai politik secara otomatis akan diberhentikan secara tidak dengan hormat. Sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf c UU 5 tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dapat disebutkan sebagai berikut :

1. **Kekuatan (*Strenght*):**
   a. Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat yang jelas.
   b. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.
   c. Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat guna mencapai visi Kabupaten Pasaman Barat.
   d. Adanya aturan yang menjadi pengendali dan pengawasan ASN pada tahun politik
2. **Kelemahan (*Weakness*) :**
   a. Sistem informasi kepegawaian yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
   b. Pengelolaan dan pengembangan data masih lemah.

c. Belum optimalnya aktualisasi dari sumber daya aparatur yang ada. Terdapat perbedaan antara kompetensi ASN dengan penempatan jabatan di Unit Kerja Perangkat Daerah

3. Peluang (*Opportunity*):

a. Pelaksanaan sistem penataan data kepegawaian yang terintegrasi;
b. Peningkatan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional melalui pendidikan dan pelatihan;
c. Pengembangan sistem dan aplikasi informasi kepegawaian dalam rangka
peningkatan pelayanan kepegawaian secarala online;
d. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
e. Penerimaan dan penempatan calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
f. Adanya teknologi yang dapat mendukung pengelolaan kepegawaian yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja BKPSDM pada era globalisasi.
g. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDM (UU-PP-Perpres-Permen-Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian)

4. Tantangan (*Challenge*) :

a. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
b. Perubahan organisasi perangkat daerah akan berdampak pada penataan dan pengelolaan jabatan dan sumber daya manusia yang ada;
c. Masih adanya pelanggaran disiplin PNS;
d. Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi;
e. Belum maksimalnya penerapan system merit sebagai salah satu bentuk reformasi biroksi;
f. Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian dengan aplikasi kepegawaian lainnya;
g. Situasi dan kondisi politik nasional dan lokal dalam komitmen pengembangan SDM aparatur;
h. Belum tepatnya penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi
i. Belum terpetakannya jenis jabatan pelaksana dari setiap pegawai ASN
j. egenap ASN dituntut komitmennya untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, dan sesudah pemilu dan pemilihan. Setiap ASN juga dituntut menghindari konflik kepentingan dan praktik intimidasi; menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan

ujaran kebencian serta berita bohong; serta menolak politik uang dan menolak segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

5. **Rekomendasi :**
   a. Mengikutsertakan ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke dalam pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional baik yang dibiayai dari APBD maupun APBN.
   b. Mendorong ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kompetensi baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan klasikal dan non klasikal.
   c. Membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem informasi dari lembaga terkait.
   d. Menerapkan sistem *merit* dalam manajemen kepegawaian serta memperjelas sistem *reward* dan *punishment* bagi ASN.
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS untuk menjaga netralitas ASN

2.9. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, target/tolak ukur dan besaran dan yang dibutuhkan.

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD sebagai berikut

Tabel 6 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan sarana prasarana pendukung pelayanan**	**100%**	**5.115.757.573**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan sarana prasarana pendukung pelayanan**	**100%**	**5.115.757.573**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan serta jumlah non PNS yang menerima jasa**	**100%**	**4.272.798.545**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan serta jumlah non PNS yang menerima jasa**	**100%**	**4.272.798.545**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/bulan	3.814.106.045	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/bulan	3.814.106.045	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	347.392.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	347.392.500	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	111.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	111.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100&**	**35.700.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100&**	**35.700.000**	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	2 orang	35.700.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	2 orang	35.700.000	
	Penyediaan Pakaian dinas		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	52.500.000	Penyediaan Pakaian dinas		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	52.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**286.553.649**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**286.553.649**	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.529.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.529.500	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	102.394.149	Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	102.394.149	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	24.780.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	24.780.000	
8	Penyel engg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	143.850.000	Penyel engg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	143.850.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran**	**100%**	**317.919.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran**	**100%**	**317.919.000**	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	1.575.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	1.575.000	
10	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	188.244.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	188.244.000	
11	Penyediaan masa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	128.100.000	Penyediaan masa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	128.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**	**100%**	**202.786.379**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**	**100%**	**202.786.379**	
12	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit	75.599.879	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit	75.599.879	
13	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	6.090.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	6.090.000	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120 unit	52.783.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120 unit	52.783.500	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	68.313.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	68.313.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)**	**83**		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)**	**83**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**6 dokumen**	**427.794.087**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**6 dokumen**	**427.794.087**	
16	Penyusunan Rencana Kebutuhan, tenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan untuk pengadaan ASN	1 Dokumen	23.100.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, tenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan untuk pengadaan ASN	1 Dokumen	23.100.000	
17	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	680 Dokumen	290.247.762	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	680 Dokumen	290.247.762	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana**
18	Koordin asi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	21.000.000	Koordin asi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	21.000.000
19	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	36.750.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	36.750.000
20	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	3 Dokumen	29.400.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	3 Dokumen	29.400.000
21	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	300 Dokumen	27.296.325	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	300 Dokumen	27.296.325
	Mutasi dan Promosi ASN		**Jumlah dokumen mutasi, kepangkatan dan promosi ASN**	**3 Dokumen**	**242.045.288**	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Jumlah dokumen mutasi, kepangkatan dan promosi ASN**	**3 Dokumen**	**242.045.288**
22	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	185 Dokumen	30.450.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	185 Dokumen	30.450.000
23	Pengelolaan Ken aikan Pangkat ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	700 Laporan	33.180.000	Pengelolaan Ken aikan Pangkat ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	700 Laporan	33.180.000
24	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	2 Dokumen	178.415.288	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	2 Dokumen	178.415.288
	Pengembangan Kompetensi ASN		**Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN**	**2 dokumen**	**73.494.225**	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN**	**2 dokumen**	**73.494.225**
25	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	30.000.000			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	30.000.000
26	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	20 Dokumen	22.497.900	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	20 Dokumen	22.497.900
27	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	185 Dokumen	20.996.325	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	185 Dokumen	20.996.325

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**3 dokumen**	**96.666.400**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**3 dokumen**	**96.666.400**	
28	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4000 Dokumen	28.416.400	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4000 Dokumen	28.416.400	
29	Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	150 Orang	31.500.000	Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	150 Orang	31.500.000	
30	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	20 Orang	36.750.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	20 Orang	36.750.000	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTANAN					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTANAN**					
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**3,8%**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	Kabupaten Pasaman Barat	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**3,8%**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**160 orang**	**800.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Kabupaten Pasaman Barat	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan**	**160 orang**	**800.000.000**	
31	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	160 orang	800.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	160 orang	800.000.000	

2.10. Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat merupakan perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepegawaian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat . Oleh sebab itu untuk tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat .

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional dan sesuai PMDN No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, dimana secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang telah disinkronkan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan serta sesuai PMDN No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 2 (dua) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. **Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia**
   Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020 – 2024 yaitu : *"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".*
   Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:
   a. Profesional artinya,
      1. Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,
      2. Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
         serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah

yang
baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

c. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu:
   a) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   b) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam
      melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara

Dalam Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 adalah *Meningkatnya Profesionalitas ASN*. Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu *Mewujudkan Aparatur yang Profesional*.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu "*Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong "*.
Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.
Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kementerian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional dan Kompetetif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;

4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, AKuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap, yaitu:

1. **Integritas**
   Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam ASN Kementerian PANRB harus melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten Antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika.
2. **Profesional**
   Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.
3. **Akuntabel**
   Dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.
4. **Melayani** Melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus menempatkan menterian /Lembaga/Pemda lain sebagai pihak yang harus didahulukan.
5. **Kolaboratif**
   Kolaboratif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB saling membuka diri, menerima pendapat orang lain dan saling menghargai.
6. **Inovatif**
   Inovatif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB melakukannya dengan cara yang baru, kreatif, inventif, dan imaginatif, mengikuti perkembangan terkini, tidak anti terhadap perubahan.
7. K**esempurnaan (Komitmen pada Kualitas)**
   Dalam kesempurnaan mengandung makna bahwa dalam bekerja, dibutuhkan ketekunan sekaligus ketepatan, agar menghasilkan keluaran yang maksimal, dengan tingkat kesalahan nol persen.

Komitmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam visi BKN dalam renstra 2020-2024, yaitu:"*Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya".*

Visi tersebut merupakan visi Presiden nomor 8 (delapan) dengan melaksanakan arahan Presiden Nomor 4 (empat) yaitu "Penyederhanaan Birokrasi" dan agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public dengan mewujudkan pengelolaan ASN yang professional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsive dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan. Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mencakup beberapa arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dengan strategi meliputi:
    1. Penguatan implementasi manajemen ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan nasional, pengembangan pola karir nasional, dan pelaksanaan manajemen ASN yang memperhatikan kekhususan daerah dan masyarakat. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui : (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan (c) Penyusunan pola karir instansional;
    2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi; (b) implementasi arsitektur SPBE instansi; dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi;
    3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional;

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetepkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu; (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik; (c) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di UPP tertentu; (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik; (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D

b. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, dengan strategi meliputi:
    1. Penataan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (pusat, pusat-daerah, daerah-daerah), intra institusi pemerintah, dalam bentuk pemetaaan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (*Institutional Mapping*) dan penyusunan SOP strategis per dimensi pembangunan;
    2. Penguatan mekanisme kerjasama dengan non-pemerintah, dalam bentuk pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan;
    3. Pengarusutamaan kebijakan SPBE di seluruh K/L/Pemerintah Daerah.
c. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional dengan strategi meliputi:
    1. Penataan organisasi pemerintah berbasis prioritas pembangunan nasional, dalam bentuk restrukturisasi desain kelembagaan pemerintah pusat dan daerah *(structure follow strategy*);
    2. Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang handal dan efektif, melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi serta penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.
d. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik, dengan strategi meliputi:
    1. Pemanfaatan *Information and Communication Technologies (ICT*) dalam pelayanan publik, dalam bentuk penguatan penerapan *e- services* dan pemenuhan standar pelayanan publik;
    2. Pemanfaatan Big Data dalam pelayanan publik, dalam bentuk optimalisasi pemanfaatan data bersama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik;
    3. Kerjasama multipihak dalam pelayanan publik yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat, dalam bentuk pengembangan

kerjasama pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaran pelayanan *publik (co-production*);
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah Tertinggal,Terdepan dan Terluar (3T), dalam bentuk perluasan pelayanan terpadu/terintegrasi;
5. Peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan pelayanan publik, dalam bentuk penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu agenda pembangunan (agenda pembangunan ke-7) yakni; Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan tujuan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Pencapaian agenda pembangunan tersebut di capai melalui:
1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri,
5. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola, yakni:
1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi system perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Selain itu di dalam agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan disebutkan bahwa salah satu arah

kebijakannya adalah Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter diantaranya melalui Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup:

1. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan
2. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward)* dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Di dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016, salah satu Gerakan Revolusi Mental adalah Program Gerakan Indonesia Melayani. BKN sebagai lembaga negara yang melakukan pembinaan manajemen ASN dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, bentuk dukungan yang diberikan adalah membangun sebuah sistem pengembangan karier PNS.

BKN mendorong instansi pemerintah agar di dalam pengembangan karier PNS tidak hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah saja tetapi juga mempertimbangan integritas dan moralitas sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 2. Integritas yang dimaksud diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan moralitas yang dimaksud diukur dari penerapan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Maka BKN akan mengeluarkan *guidance* dalam bentuk Peraturan Kementerian PAN & RB tentang penerapan integritas dan moralitas serta Peraturan Kepala BKN terkait penerapan integritas dan moralitas dalam pengembangan karier PNS. Kemudian langkah selanjutnya BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian akan melakukan pengukuran sampai sejauh mana instansi menerapkan integritas dan moralitas di dalam pengembangan karier PNS.

Sejumlah produk hukum sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) yaitu :

1. Manajemen PNS
2. Manajemen PPPK
3. Penilaian Kinerja & Disiplin
4. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas
5. Pensiun
6. Korps Pegawai ASN
7. Badan Pertimbangan ASN

Selain itu terdapat substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yaitu:

1. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
2. Sekolah Kader
3. Jenis Jabatan Fungsional tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dari kalangan Non-PNS di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain
5. Pelaksanaan mutasi pada tingkat nasional
6. Pemberian tugas belajar
7. Tata cara pemberian penghargaan

Substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui Peraturan Kementerian PAN & RB

1. Tata cara pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja
2. Tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan mekanisme kerja Panitia Seleksi Nasional Pengadaan calon PNS
4. Tata cara pemberian kuasa dalam pemberhentian dari Jabatan Administrasi
5. Pedoman penyusunan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural
6. Klasifikasi jabatan
7. Tata cara pengusulan dan penetapan Jabatan Fungsional
8. Tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
9. Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional
10. Penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional danhubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Mengacu kepada hal tersebut di atas, khususnya dalam bidang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, berikut adalah arah kebijakan dan strategi penyusunan Kerangka Regulasi BKPSDM dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien:

1. Melaksanakan *Regulatory Impact Assessment* terhadap regulasi yang telah ada yang kemudian akan menjadi bahan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014. Penyesuaian tersebut adalah dengan melakukan revisi baik secara parsial ataupun menyeluruh;

2. Membentuk regulasi yang baru dengan landasan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab, tugas, fungsi, dan kewenangan BKPSDM di bidang Manajemen ASN. Pembentukan regulasi yang baru disesuaikan dengan tugas dan kewenangan BKPSDM untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan manajemen ASN.
3. Terbitnya SE MenPAN-RB tentang status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu poin mendasar dalam SE yang ditandangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 itu adalah honorer ditiadakan pada 28 November 2023, dan yang ada hanyalah PNS dan PPPK. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai **kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.** Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, perlu inovasi dan pemahaman tentang peningkatan kompetensi ASN

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam stretegi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond serta continuously improve*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 oleh Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat ,maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja *(performance indicator*) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud.

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional
3. Meningkatkan Kapabillitas Aparatur Sipil Negara

B. Sasaran

Dalam perumusan sasaran strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misinya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional
3. Meningkatnya Kapabillitas Aparatur Sipil Negara

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 7. di bawah ini :

Tabel 7. (T-C.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif										
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM		Nilai SAKIP	B (60,82)	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Level Maturitas SPIP	1,86	1,98	2,11	2,25	2,35	2,48	2,6	>2,6
			Persentase penurunan temuan BPK (%)	75	75	80	85	90	95	100	100
			Indeks Profesionalitas ASN	58	70	70	75	75	80	80	80
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai) (%)	0,8125	83	84	85	86	87	87	87
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai) (%)	0,8125	83	84	85	86	87	87	87
3	Meningkatkan Kapabillitas Aparatur Sipil Negara		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	2,3%	2,3%	2,8%	3,3%	3,8%	4%	4,2%	4,2%
		Meningkatnya kapabilltas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	2,3%	2,3%	2,8%	3,3%	3,8%	4%	4,2%	4,2%

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Visi Kabupaten Pasaman Barat adalah :***" Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera"*** dengan Poin Misi :

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BKPSDM dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif, sesuai dengan misi pertama Kabupaten Pasaman Barat maka pengimplementasian kebijakan Reformasi Biroksi dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai Renja BKPSDM Tahun 2024.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input)* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai rancangan awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 .

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 8. (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	03				**KEPEGAWAIAN**								**5.648.521.028**					**5.718.009.811**
					Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM													
					Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM													
						Nilai SAKIP				**BB (71)**							**BB (73)**	
						Level Maturitas SPIP				**2,6**							**>2,6**	
						Persentase penurunan temuan BPK (%)				**90**							**95**	
						Indeks Profesionalitas ASN				**75%**							**75%**	
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.539.498.149**					**4.888.936.766**
5	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.729.859.039**					**4.029.118.557**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	100 %	42 OB	42 OB	3.083.019.039	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.892.255.590
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	BKPSDM	100 %	12 Dok	12 Dok	506.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	354.340.350
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM	100 %	12 Dok	12 Dok	140.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	113.526.000
5	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**46.765.600**					**36.414.000**
5	03	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	BKPSDM	100 %	2 orang	2 orang	46.765.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	36.414.000
5	03	01	2.05	11	Penyediaan Pakaian dinas	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BKPSDM	100 %	2 paket	2 paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
5	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**306.490.000**					**298.175.222**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersedianya komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	100 %	2 paket	100 %	10.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	21.730.590
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	100 %	2 paket	100 %	122.502.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	104.442.032
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	100 %	2 paket	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.275.600
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	100 %	10 Laporan	100 %	173.881.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	146.727.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**254.743.510**					**318.386.880**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	100 %	2 Laporan	100 %	4.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.606.500
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	100 %	12 Laporan	100 %	126.515.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	192.008.880
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	BKPSDM	100 %	12 Laporan	100 %	124.128.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	124.771.500
5	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**201.640.000**					**206.842.107**
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	100 %	25 Unit	100 %	89.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77.111.877
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah mebel yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan mebel	BKPSDM	100 %	2 Unit	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.211.800
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	100 %	120 unit	100 %	68.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	53.839.170
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM	100 %	2 unit	100 %	43.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	69.679.260
5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**1.086.681.150**					**840.000.000**
					Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional													
					Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional													
						Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (%)				**90**							**90**	
5	03	02	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**320.236.650**					**427.794.087**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan untuk pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	BKPSDM	65%	1 Dok	1 Dok	36.027.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	23.100.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	65%	680 Dok	680 Dok	150.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	290.247.762

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	03	02	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	75%	150 Dok	150 Dok	27.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	21.000.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	BKPSDM	75%	1 Lembaga	1 Lembaga	40.377.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	36.750.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	75%	3 Dok	3 Dok	35.116.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	29.400.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian	BKPSDM	75%	300 Dok	300 Dok	30.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	27.296.325
5	03	02	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**								**447.236.000**					**242.045.288**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN	BKPSDM	75%	185 Dok	185 Dok	34.823.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	30.450.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat	BKPSDM	75%	700 Laporan	700 Laporan	57.572.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	33.180.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	75%	2 Dok	2 Dok	354.841.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	178.415.288
5	03	02	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**110.806.000**					**73.494.225**
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas ASN			10 Orang	10 Orang	33.657.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	30.000.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	75%	20 Dok	20 Dok	40.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	22.497.900
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Terfasilitasinya pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKPSDM	75%	185 Dok	185 Dok	36.954.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	20.996.325
5	03	02	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**208.402.500**					**96.666.400**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	75%	4000 Dok	4000 Dok	97.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	28.416.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi ASN	BKPSDM	75%	150 Orang	150 Orang	47.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	85%	31.500.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Meningkatnya disiplin ASN	BKPSDM	75%	20 Orang	20 Orang	63.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	85%	36.750.000
5	04				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**302.076.840**					**840.000.000**
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**302.076.840**					**840.000.000**
					Tujuan 3 : Meningkatkan kapabilItas ASN													
					Sasaran 3 : Meningkatnya kapabilItas ASN													
						Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan				**3,8 %**							**4,0 %**	
5	04	02	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**302.076.840**					**840.000.000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	Terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	BKPSDM	3,8 %	160 Orang	166 Orang	302.076.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	4,0 %	840.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan merupakan perpaduan perencanaan yang :

1. Partisipatif
2. Dari atas *(top-down*)
3. Dari bawah *(bottom-up).*

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026.
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pelayanan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih "*Holistik Integratif*": sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak eksklusif dan konservatif.
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pelayanan kepegawaian. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pelayanan kepegawaian di Kabupaten Pasaman Barat jelas dan terjaga.

6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran legislatif.
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat menjadi optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan"*Rolling – Plan*".
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBD dapat diarahkan untuk :
   a. Meningkatkan jangkauan sasaran organisasi.
   b. Meningkatkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Pasaman Barat .

Adapun program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 adalah :

I. **Program penunjang** yang mendukung program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026, yaitu sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM	
Sasaran	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	
Indikator	:	Nilai SAKIP	B (71)
	:	Level Maturitas SPIP	2,6
	:	Persentase penurunan temuan BPK (%)	90
	:	Indeks Profesionalitas ASN	75%

Anggaran tahun 2024 sebanyak Rp. 5.626.179.299,- sedangkan anggaran 2025 sebanyak Rp. 5.219.940.149,- mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebanyak Rp. 406.239.150,- atau 7,78%

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung
   Merupakan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS (TPP) yang dibayarkan kepada PNS atas pekerjaan yang dilakukan setiap bulannya.
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerahmerupakan program yang memiliki indikator kinerja terwujudnya administrasi keuangan perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

3. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
   b. Penyediaan Pakaian dinas
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Mebel
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Kepegawaian Daerah

Tujuan	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional	
Sasaran	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional	
Indikator	:	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (%)	90

Anggaran tahun 2024 sebanyak Rp. 1.086.681.150,- dan anggaran 2025 sebanyak Rp. 840.000.000,- berarti mengalami kenaikan pendanaan sebanyak Rp. 246.681.150,- atau 29,36%

Kepegawaian adalah sumber daya manusia yang bekerja pada suatu organisasi, baik sebagai pegawai pemerintahan maupun perusahan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sedangkan Manajemen Kepegawaian merupakan sebuah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik tujuan-tujuan individu ataupun organisasi.
Pada Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026, terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
f. Pengelolaan Data Kepegawaian

2. Mutasi dan Promosi ASN
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengelolaan Mutasi ASN
   b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
   b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
   c. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   b. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
   c. Pembinaan Disiplin ASN

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	:	Meningkatkan kapabilitas ASN	
Sasaran	:	Meningkatnya kapabilitas ASN	
Indikator	:	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	3,8%

Anggaran tahun 2024 sebanyak Rp. 302.076.840,- sedangkan anggaran 2025 sebanyak Rp. 840.000.000,- mengalami penurunan pada tahun 2025 sebanyak Rp. 537.923.160,- atau 64,04% hal ini sebabkan kegiatan Latsar CPNS pada tahun 2024 tidak dilaksanakan.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Pendanaan indikatif pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 9. dibawah ini :

Tabel 9.
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	03				**KEPEGAWAIAN**								**5.648.521.028**					**5.718.009.811**
					Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM													
					Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM													
						Nilai SAKIP				**BB (71)**							**BB (73)**	
						Level Maturitas SPIP				**2,6**							**>2,6**	
						Persentase penurunan temuan BPK (%)				**90**							**95**	
						Indeks Profesionalitas ASN				**75%**							**75%**	
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.539.498.149**					**4.888.936.766**
5	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.729.859.039**					**4.029.118.557**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	100 %	42 OB	42 OB	3.083.019.039	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.892.255.590
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	BKPSDM	100 %	12 Dok	12 Dok	506.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	354.340.350
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM	100 %	12 Dok	12 Dok	140.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	113.526.000
5	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**46.765.600**					**36.414.000**
5	03	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	BKPSDM	100 %	2 orang	2 orang	46.765.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	36.414.000
5	03	01	2.05	11	Penyediaan Pakaian dinas	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BKPSDM	100 %	2 paket	2 paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
5	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**306.490.000**					**298.175.222**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersedianya komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	100 %	2 paket	100 %	10.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	21.730.590
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	100 %	2 paket	100 %	122.502.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	104.442.032
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	100 %	2 paket	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.275.600
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	100 %	10 Laporan	100 %	173.881.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	146.727.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**254.743.510**					**318.386.880**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	100 %	2 Laporan	100 %	4.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.606.500
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	100 %	12 Laporan	100 %	126.515.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	192.008.880
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	BKPSDM	100 %	12 Laporan	100 %	124.128.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	124.771.500
5	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**201.640.000**					**206.842.107**
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	100 %	25 Unit	100 %	89.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77.111.877
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah mebel yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan mebel	BKPSDM	100 %	2 Unit	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.211.800
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	100 %	120 unit	100 %	68.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	53.839.170
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM	100 %	2 unit	100 %	43.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	69.679.260
5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**1.086.681.150**					**840.000.000**
					Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional													
					Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional													
						Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (%)				90							90	
5	03	02	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**320.236.650**					**427.794.087**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan untuk pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	BKPSDM	65%	1 Dok	1 Dok	36.027.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	23.100.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	65%	680 Dok	680 Dok	150.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	290.247.762

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	03	02	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	75%	150 Dok	150 Dok	27.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	21.000.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	BKPSDM	75%	1 Lembaga	1 Lembaga	40.377.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	36.750.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	75%	3 Dok	3 Dok	35.116.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	29.400.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian	BKPSDM	75%	300 Dok	300 Dok	30.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	27.296.325
5	03	02	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**								**447.236.000**					**242.045.288**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN	BKPSDM	75%	185 Dok	185 Dok	34.823.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	30.450.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat	BKPSDM	75%	700 Laporan	700 Laporan	57.572.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	33.180.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	75%	2 Dok	2 Dok	354.841.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	178.415.288
5	03	02	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**110.806.000**					**73.494.225**
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas ASN			10 Orang	10 Orang	33.657.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	30.000.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	75%	20 Dok	20 Dok	40.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	22.497.900
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Terfasilitasinya pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKPSDM	75%	185 Dok	185 Dok	36.954.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	20.996.325
5	03	02	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**208.402.500**					**96.666.400**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	75%	4000 Dok	4000 Dok	97.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	65%	28.416.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi ASN	BKPSDM	75%	150 Orang	150 Orang	47.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	85%	31.500.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Meningkatnya disiplin ASN	BKPSDM	75%	20 Orang	20 Orang	63.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	85%	36.750.000
5	04				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**302.076.840**					**840.000.000**
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**302.076.840**					**840.000.000**
					Tujuan 3 : Meningkatkan kapabilitas ASN													
					Sasaran 3 : Meningkatnya kapabilitas ASN													
						Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan				**3,8 %**							**4,0 %**	
5	04	02	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**302.076.840**					**840.000.000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	Terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	BKPSDM	3,8 %	160 Orang	166 Orang	302.076.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	4,0 %	840.000.000

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Simpang Empat, Juli 2023

Plt. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat

Dr. ADRIANTO,S.Ag.M.Pd
Nip. 19781110 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada RENSTRA 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, 04 Juli 2023
Plt. I N S P E K T U R

EMNITA NADIRUA, SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750813 200604 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. 1. Latar Belakang..... 1
1. 2. Landasan Hukum..... 2
1. 3. Maksud dan Tujuan..... 4
1. 4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 7
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkar Daerah 23
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 25
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 28
2. 5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat 38
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023..... 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

BAB V PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Realisai Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat.....	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022.....	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat	21
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat	26
Tabel 3.1	Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi Inspektorat Tahun 2023.....	36
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	39
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	45

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini merupakan uraian lebih mendetail dari rencan-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 1 (satu) tahun.

Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat sesuai tugas dan fungsi lembaga, memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

Selanjutnya, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan memperhatikan serta menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK RI, BPKP dan Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini melibatkan instansi terkait dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat dan diharapkan nantinya akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui

Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Rencana Kerja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Inspektorat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur pengawas pembangunan daerah;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan program, kegiatan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan pengertian ringkas Renja, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dan penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini memuat tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

3.3 Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Inspektorat yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat . Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pada Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan. Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Kabupaten ; dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target Perangkat Daerah antara lain misalnya :

a. Rendahnya kesadaran organisai perangkat daerah dalam menerapkan sistem pengendalian internal;
b. Belum terbangunnya sistem pengendalian internal yang handal dan terintegrasi;
c. Masih belum optimalnya SPIP;
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana;
e. Belum optimalnya penangganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

Capaian realisasi keuangan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten pada tahun 2022 sebesar **93,99%** dari pagu dana total sebesar **Rp 10.622.515.277,-** *(Sepuluh milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)* dan terealisasi sebesar **Rp 9.984.506.247,-** *(Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).*

Adapun rakapitulasi kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan Inspektorat adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) kegiatan untuk penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran tersedia sebesar **Rp 8.858.487.453,-** (*Delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)* yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oelh sub kegiatan *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* .Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik, pagu anggaran tersedia sebesar **Rp 110.019.500** (*Seratus sepuluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah)***,-.** Adapun realisasi keuangan kegiatan ini sebesar **Rp 107.563.900,-** *(Seratus tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **97,77%.**

Target sub kegiatan ini adalah 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini adalah sangat berhasil 100%. Adapun dokumen yang telah terealisasi antara lain LKJIP 2021, LPPD dan LKPD 2021, DPA 2022, RKPD 2022, RENJA Perubahan 2022, RKAP 2022, RENJA 2023, DPAP 2022 dan RKA 2023.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pagu anggaran tersedia sebesar **Rp 7.346.818.886,-***(Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).* Adapun realisasi keuangan sebesar **Rp 7.297.712.896,-** *(Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar

99,33%. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja kegiatan ini terealisasi sangat tinggi terutama pada sub kegiatan *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* dengan target 40 orang terealisasi 81 orang yaitu sangat berhasil sebesar 202%. Terdiri dari belanja Gaji pokok, tunjangan berdasarakan beban kerja dan tunjangan berdasarkan kondisi kerja. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan oleh penambahan jumlah ASN Inspektorat CPNS tahun 2022. Sedangkan sub kegiatan *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* target yang ditetapkan 25 orang dan terealisasi 25 orang sehingga capaian kinerja yaitu 100%. Terdiri dari belanja Honorarium PNS & Belanja jasa lainnya (cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, PTT lainnya).

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan baik, pagu anggaran tersedia sebesar **Rp 542.329.950,-**.*(Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp 523.013.298,-** *(Lima ratus dua puluh tiga juta tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **96,44%.** Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* target nya 25 orang dan terealisasi 25 orang sehingga capaian kinerja sangat berhasil yaitu 100% untuk pelaksanaan diklat pembentukan fungsional Auditor dan PPUPD pada sesuai jenjang karier, Diklat sertfikasi khusus seperti Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE), Certifeid Risk Manajement Officer (CRMO), Certified Governance Accounting Association (CGAA) dan bimbingan teknis penunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat seperti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Probity Audit.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan baik, pagu anggaran sebesar **Rp622.233.170,-** *(Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).* Adapun

realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp604.455.252,-** *(Enam ratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan ini sebesar **97,14%.**

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* dengan target 1 paket terdiri dari belanja bola lampu, kabel dan peralatan listrik, baterai, terealisasi 1 paket atau sangat berhasil yaitu 100%. Sub kegiatan *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* target 1 paket terdiri dari belanja alat-alat kebersihan, alat tulis kantor, benda POS, serta Belanja Modal Pendingin ruangan, Laptop dan scanner. Kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket atau 100% terdiri dari belanja alat tulis kantor dan cetak. Didukung juga oleh sub kegiatan *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* dengan target 40 kali dan terealisasi 50 kali atau 125% terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi terkait urusan pengawasan dan kegiatan lain yang menunjang urusan pengawasan, yang diikuti oleh Inspektur dan pejabat di lingkungan Inspektorat Kabupaten .

5. ***Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah.***

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya pengadaan mebel, pagu anggaran sebesar **Rp 43.000.000,-** *(Empat puluh tiga juta rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp41.128.000,-** *(Empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **95,65%.**

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja kegiatan ini adalah sangat berhasil yaitu 100% atas realisasi target kinerja 2 paket dan terealisasi 2 paket. Terdiri dari belanaj pengadaan mebel Meja rapat susun 1 set dan kursi rapat eselon 11 unit.

6. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan baik, pagu anggaran sebesar **Rp183.763.600,-** *(Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).* Adapun realisasi

keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp173.140.400,-** *(Seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **94,22%.**

Secara umum kegiatan ini juga terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini di dukung oleh sub kegiatan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%, teridiri dari belanja tagihan air dan listrik selama 12 bulan pada tahun 2022. Sub kegiatan *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* target 150 unit terealisasi 100 unit atau terealiasi sebesar 75%, terdiri dari belanja pemeliharaan Personal Computer, Laptop dan Printer. Rendahnya relaisasi pada sub kegiatan ini disebabkan karena perangkat laptop, printer dan scanner masih baru pengadaan tahun 2021 dan 2022 Peralatan kantor yang perlu pemeliharaan yaitu mesin pendingin atau AC. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* target 1 paket terealisasi 1 paket atau 100% terdiri dari belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.

7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan baik, pagu anggaran sebesar **Rp117.550.671,-***(Seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp111.473.549,-***(Seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **94,83%.**

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kegiatan ini didukung dengan sub kegaitan *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* target 24 unit dan terealisasi 20 unit atau sebesar 83% terdiri dari belanja pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua. Tahun 2022 total kendaraan semula 24 unit menjadi 20 unit karena kendaraan roda empat berkurang 2 unit di serahkan ke BAPD untuk dipakai oleh Perangkat Daerah lain dan 2 kendaraan roda dua rusak berat menunggu proses penghapusan.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan untuk penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran tersedia sebesar **Rp1.142.101.500,-** *(Satu milyar seratus empat puluh dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)* yakni :

1. ***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, pengawasan desa serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan baik, pagu anggaran sebesar **Rp929.486.000,-** *(Sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp559.841.311,-** *(Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **60,23%.** Kegiatan ini terlaksana dengan baik namun ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Target kinerja sub kegiatan ini 30 obrik dan terealisasi hanya 5 obrik atau sebesar 17% dianggap tidak berhasil. Rendahnya realisasi kinerja subkegiatan ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan kurangnya jumlah APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan serta kurangnya pemahaman tentang Audit Kinerja. Untuk melaksanakan audit kinerja yang optimal memerlukan waktu rata-rata 100 hari penugasan. Ruang lingkup Audit Kinerja meliputi pengelolaan Perangkat Daerah keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah /Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang merupakan kinerja utama serta proses penatausahaan (administrasi) dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang. Sehingga tidak mungkin dilaksanakan audit kinerja sebanyak 30 obrik sesuai target karena ada penugasan lain sesuai PKPT yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Target kinerja sub kegiatan ini 50 obrik dan terealisasi hanya 30 obrik atau sebesar 60%. Belum optimalnya realisasi kinerja subkegiatan ini disebabkan karena target yang

ditetapkan terlalu tinggi dan kurangnya jumlah APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan.

c. Pengawasan Desa
Target kinerja sub kegiatan ini 4 laporan dan terealisasi 19 laporan atau sebesar 475%. Sangat tingginya realisasi kinerja subkegiatan ini disebabkan karena target yang ditetapkan tidak tepat karena jumlah desa di Kabupaten sebanyak 19 Desa dan sesuai mandatory KPK dalam pedoman *Monitoring center for Prevention* (MCP) dan telah dituangkan dalam PKTP tahun 2022, untuk dilaksanakan pengawasan keuangan seluruh desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Target subkegiatan ini yaitu 100% namun sampai dengan Desember tahun 2022 realiasai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 70% dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 66%, maka rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 68% . Dijelaskan pada table berikut:

Realisasi Tindak Lanjut Inspektorat Tahun 2022

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut (%)
1.	Badan Pemeriksa Keuangan RI	70
2.	Inspektorat Kabupaten	66
Rata-rata		**68**

Penyebab tidak tercapinya target secara maksimal dikarenakan beberapa faktor antara lain:
- Kurang kesadaran penangungjawab temuan untuk segera menindak lanjuti sesuai aturan yaitu Peraturan Peerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Pemerintah Daerah dimana dijelaskan bahwa Rekomendasi temuan wajib di tindak lanjuti paling lama 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima
- Rendahnya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan sanksi dan hukuman bagi ASN yang masih memiliki tunggakan temuan,

- Tidak adanya ketegasan terhadap pihak ketiga yang bertanggungjawab atas temuan sehingga menyisakan tunggakan temuan tahun sebelumnya
- Rekomendasi tidak bisa ditindak lanjuti karena cacat temuan
- Laporan hasil pemeriksaan terbit di bulan Desember tahun 2022, menyebabkan tindak lanjut tidak optimal pada akhir tahun.

2. ***Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu***

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu dengan baik, pagu anggaran sebesar **Rp212.615.500,-***(Dua ratus dua belas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp116.440.570,-** *(Seratus enam belas juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **54,77%**.

Realisasi kinerja kegiatan cukup baik yaitu sebesar 77% dari target yang ditetapkan 30 kasus terealisasi 23 kasus. Kasus yang dilakukan audit dengan tujuan tertentu bersumber dari pengaduan masyarakat atas penyalahgunaan wewenang atas pengelolaan keuangan daerah atau negara, pelanggaran disiplin pegawai dan permintaan khusus dari Aparat Penegak hukum atas kasus yang di tangani.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan untuk perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan pagu anggaran sebesar **Rp299.073.318,-** *(Dua ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah)* yakni:

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dengan baik, pagu anggaran tersedia sebesar **Rp270.576.000,-***(Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp224.244.090,-** *(Dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **82,88%.**

Capaian relaisasi kinerja kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini didukung oleh Subkegiatan *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan* target 4 kali

dan terealisasi 3 kali atau sebesar 75%. Terdiri dari kegiatan Pemantauan tindak lanjut BPK semester I dan II tahun 2022, serta Gelar pengawasan daerah pada akhir tahun 2022.

Subkegiatan *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan* dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen atau 100%. Terdiri dari dokumen penilaian maturitas SPIP, Leveling APIP dan Penilaian SAKIP oleh KemenPANRB. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai 61,26 atau prediket B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan Perangkat Daerah di kabupaten menunjukan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggraaan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah cukup baik namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada kabupaten tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Barat tercapai Maturitas SPIP 3,132 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (Terdefinisi).

Leveling APIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Barat tercapai level 2,8.

2. Pendampingan Asistensi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, serta koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan baik, pagu anggaran tersedia sebesar **Rp244.122.000,-***(Dua ratus empat puluh empat juta serratus dua puluh dua ribu rupiah).* Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar **Rp225.492.823,-** *(Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)* dengan pencapaian terlaksananya kegiatan sebesar **92,37%.**

Realisasi kinerja kegiatan sangat baik dan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Subkegiatan yang mendukung yaitu *Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Birokrasi* target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan atau besesar 100% yaitu laporan evaluasi penilaian reformasi birokrasi atas 10 Perangkat Daerah sampel di kabupaten Pasaman Barat. Tujuan Reformasi Birokrasi ini adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional

dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Subkegiatan *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* target 5 laporan dan terealisai 4 laporan yaitu terdiri dari pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Program pencegahan korupsi terintegrasi KPK, Program Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, Pelaporan kegiatan Penyuluhan Anti Korupsi. Sedangkan kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan Pencanangan Zona Integritas.

Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalammewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan realisasi Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman barat yang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana berikut ini :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan guna menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dalam memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indicator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja pada tingkat sasaran

Merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori capaian kinerja yaitu :

1) <55% kategori kurang berhasil
2) 55%- 70% kategori cukup berhasil
3) 71% - 85% kategori berhasil
4) 86%- 100% dan <100% kategori sangat berhasil

b. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari :

1) Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran) ;
2) Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik ;
3) Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung ;
4) Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan atau ebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.

c. Dasar Pembobotan

Sasaran Stategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi tersebut dijabarkan kepada seluruh kebijakan program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Penetapan bobot antar indikator, kegiatan, program dan antar kebijakan sebagai berikut :

1) Indikator yang menunjukan outcome (hasil) diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator yang menunjukan input dan output ;
2) Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi;
3) Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi diberi bobot yang tinggi ;
4) Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggungjawab instansi yang dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot lebih tinggi dari Indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali.

Sementara ini untuk Indikator *benefit* dan *impact* belum diukur hanya baru pada Indikator kinerja *outcome*.

2. Indikator Kinerja

Dalam mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasi. Perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Nilai capaian masing-masing

indikator ini selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.

3. Target dan Capaian Kinerja

Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman barat Tahun 2020 terlebih dahulu dilihat bagaimana Target Kinerja dari masing-masing kegiatan yang tercantum dalam Rencana Inspektorat Kabupaten Pasaman barat Tahun 2020, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman barat Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) Akumulasi 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
6	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**0**	**100 %**	**98,12 %**	**99,06**	**100 %**		
6	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan**	**100 %**	**0**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**		
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	0	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen		
6	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**100 %**	**0**	**100 %**	**107,6 %**	**106,2**	**100 %**		
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima dan Tunjangan ASN	80 Orang	**0**	40 Orang	81 Orang	112,5	80 Orang/ Bulan		
6	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Orang	0	68 Dokumen	25 Orang	100	68 Dokumen		
6	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**44 Orang**	**0**	**43 Orang**	**25 Orang**	**58,14**	**65 Orang**		

6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0	25 Orang	25 Orang	100	50 Orang		
6	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**100 %**	**0**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**		
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket		
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	1Paket	1 Paket	100	2 Paket		
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket		
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	0	40 Kali	40 Kali	100	75 Laporan		
6	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana dan prasarana yang di bangun**	**5 Paket**	**0**	**2 Paket**	**2 Paket**	**100**	**0**		
6	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penggadaan Mebel	0 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100	0		
6	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor**	**100 %**	**0**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**		
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Komunikasi Listrik dan Air untuk Operasional Kantor	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Laporan		
6	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	90 Unit	0	150 Unit	150 Unit	100	1 Laporan		

6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100	12 Laporan		
6	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara**	**80 Unit**	**0**	**60 Unit**	**98 Unit**	**163,4**	**60 Unit**		
6	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakanya	15 Unit	0	24 Unit	20 Unit	83,34	16 Unit		
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit		
6	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**5 %**	**0**	**6 %**	**6 %**	**100**	**7 %**		
6	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Objek pemeriksaan pengawasan Internal dan persentase pemantauan kinerja**	**115 Obrik**	**0**	**90 Obrik**	**110 Obrik**	**183,34**	**100 %**		
6	01	02	2	01	01	Pengawasan KInerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Obrik	0	30 Obrik	5 Obrik	200	8 Laporan		
6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75 Obrik	0	50 Obrik	30 Obrik	100	54 Laporan		
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	0	4 Laporan	19 Laporan	100	19 Laporan		
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 %	0	100 %	68 %	100	24 Dokumen		
6	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penyelesaiaan kerugian daerah yang**	**100 %**	**0**	**100 %**	**83,34 %**	**83,34**	**100 %**		

							ditangani dan persentase Obrik kasus yang ditanggapi								
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Kasus	0	30 Kasus	23 Kasus	83,34	50 Laporan		
6	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase terlaksananya program perumusan kebijakan pendampingan dan Asistensi**	**30 Perangkat Daerah**	**0**	**20 Perangkat Daerah**	**9 Perangkat Daerah**	**45 %**	**20 Perangkat Daerah**		
6	**01**	**03**	**2**	**01**		**Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Meningkatnya nilai leveling APIP, SPIP, SAKIP dan persentase penyelesaiaan kerugian daerah**	**3 Level**	**0**	**3 Level**	**2 Level**	**66,67**	**3 Level**		
6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Kali	0	4 Kali	4 Kali	100	4 Rakomendasi		
6	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100	0		
6	**01**	**03**	**2**	**02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan**	**100 %**	**0**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**		
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100	0		
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Laporan	0	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Kegiatan		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat menjadi salah satu Lembaga yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan yaitu Misi yang Pertama. Misi Pertama adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif dan sasaran yang akan dicapai adalah Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah dan tugas perbantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi , pemantauan dan kegitan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan Koorsinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2022 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Capaian
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas			0 OPD	0 OPD	0 OPD	2 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	2 OPD	
2	OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3			0 OPD	0 OPD	0 OPD	10 OPD	0 OPD	32 OPD	0 OPD	10 OPD	
3	OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B			0 OPD	0 OPD	0 OPD	4 OPD	0 OPD	32 OPD	0 OPD	4 OPD	
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan			60%	65%	70%	75%	56,25%	68%	70%	75%	
5	Nilai SAKIP Inspektorat			B	B	B	BB	B	B	B	BB	
6	Level Maturitas SPIP Inspektorat			Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3.132	Level 3	Level 3	
7	Level Tingkat Kapabilitas APIP			Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2,8	Level 3	Level 3	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat kategorinya tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan. Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Isu Strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan/atau memiliki dampak jangka Panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Fungsi pengawasan berperan utama dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP sangat sentral dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan permasalahan / hambatan sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
b. Rendahnya kesadaran organisasi perangkat daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
c. Belum terbangunnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang handal dan terintegrasi;
d. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih belum optimal;
e. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang belum optimal.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera, Inspektorat Kabupaten berfokus pada Misi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif.

Tehadap capaian RPJMD Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten yaitu berkenaan Maturitas SPIP dengan capaian Level 2 dengan skor 2,8273, Kapabilitas APIP dengan capaian Level 2 Plus, Survey Penilain Integritas dengan capaian 63,33% dan *Monitoring Center for Prevention (MCP)* dengan capaian 56%. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten sebagai Aparatur Pengawasan.

Tantangan dan Peluang Meningkatkan Pelayanan pada Perangkat Daerah.

1. Tantangan

Inspektorat Kabupaten sesuai dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2021-2026 memiliki tantangan untuk membantu Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang professional dan inovatif dengan tujuan meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif serta sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk dapat tercapainya Misi tersebut maka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan pemerintahan harus ditingkatkan dan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme agar tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten antara lain:

a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Pengendalian intern pada Organisasi Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik;
d. Tuntutan Kinerja yang belum optimal sementara kebutuhan anggaran dan prasarana belum tercukupi dalam pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Pengendalian Intern Pemerintah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan;
e. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Organisasi Perangkat daerah.

2. Peluang

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten yaitu:

a. Adanya mandatory penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Isnpektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

b. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari tata Kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak pertisipasif dan tidak demokratis menjadi tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipasif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat ddalam pelayanan publik maupun kinerja Pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan :

i. Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
ii. Mempertahankan peraihan opini WTP;
iii. Senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah;
iv. Perlunya penguatan peran Inspektorat.

c. Dukungan Pihak Internal APIP dan Eksternal

Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan diklat/bimtek dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten .

Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system)* dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

d. Sumber Daya Manusia yang Berintegritas

Inspektorat Kabupaten Pasaman telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan,berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah:

1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk mempertahankan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada level 3 (menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dantelah selaras dengan sstandar, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi/advis pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
2. Pelaksanaan Maturitas SPIP terintegrasi yang dilaksanakan atas kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap 10 Perangkat daerah yang menjadi sampel untuk pelaksanaan Maturitas SPIP;
3. Peningkatan pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
4. Mewujudkan Inspektorat sebagai *consultant partner.*

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pempbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja Perangkat Daerah), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 disusun dengan mempedomani :

1) RPJPN Tahun 2005-2025,
2) RPJPD Propinsi Sumatera Barat ,
3) RPJPD Kabupaten 2005-2025,
4) RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026,
5) Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026.

Hal ini menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023, dapat dilihat berdasarkan tabel Berikut:

Commented [LL1]:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catt. Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**				**9,448,666,361**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**				**10,088,339,229**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**104,818,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**85,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	69,893,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	70,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	10,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	34,925,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	5,000,000	

2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,290,649,257**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,463,339,144**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ bulan	7,914,489,257	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ bulan	8,063,339,144	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	376,160,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	400,000,000	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**229,830,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**515,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	229,830,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	485,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	10,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	20,000,000	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**438,416,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**600,000,000**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,995,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	160,950,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	400,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75 Laporan	202,471,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75 Laporan	150,000,000	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**184,773,504**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**185,000,000**	
	Pengadaan Mebel	Kab.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	75.000.000	Pengadaan Mebel	Kab.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	75,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	84,973,504	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	85,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24,800,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25,000,000	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**125,652,050**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**120,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,955,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	90 Laporan	69,105,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	12 Laporan	70,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46,592,050	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**74,527,050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**120,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	74,527,050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	100,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**756,289,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**1,338,562,750**	
8.	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**606,329,000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**985,359,750**	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	112,900,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	298,620,500	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	74 Laporan	226,889,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	74 Laporan	300,000,000	
	Pengawasan Desa	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	19 Laporan	151,540,000	Pengawasan Desa	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	19 Laporan	254,489,250	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	115,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	132,250,000	
9.	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**149,960,000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**353,203,000**	

	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	25 Laporan	-	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	25 Laporan	85,000,000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	149,960,000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	268,203,000	
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**199,996,500**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**567,305,900**	
10.	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**79,999,750**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**264,805,900**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomen-dasi	79,999,750	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Peppngawasan	Kab.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomen-dasi	149,805,900	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomen-dasi	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomen-dasi	115,000,000	
11.	**Pendampingan dan Asistensi**				**119,996,750**	**Pendampingan dan Asistensi**				**302,500,000**	

	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Birokrasi	32 Perangkat Daerah	-	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Birokrasi	32 Perangkat Daerah	110,000,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kabupaten	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Verifikasi dan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	119,996,750	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kabupaten	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Verifikasi dan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	192,500,000	
	Jumlah				**10,404,951,861,-**	**Jumlah**				**11,994,207,879,-**	

2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, usulan program pengawasan tidak ada karena Inspektorat sebagai Organisasi perangkat daerah bidang pengawasan tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat pengawasan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi:
   a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
   b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
   c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   d. Reviu Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah;
   e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
   f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
   g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal
   h. Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
   i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
   j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
   k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan;
   l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance,clean government* dan pelayanan publik, meliputi :
   a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
   b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   c. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
   d. Pembangunan zona integritas;
   e. Pengendalian gratifikasi;
   f. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
   g. Penanganan pengaduan masyarakat;
   h. Penguatan Whistle Blowing System;
   i. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
   j. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP);

k. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
l. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
   a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
   b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
   c. Koordinasi program pengawasan;
   d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

Dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah peningkatan disiplin kinerja pegawai, pengelolaan disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada Renja 2024 yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi Inspektorat
Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024
1.	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP			**3 Level** **2,48**
			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	**4 PD**
				PD dengan Nilai SPIP Minimal 3	**10 PD**
				PD dengan Nilai SAKIP Minimal B	**10 PD**
				Porsentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	**75 %**
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1. Nilai SAKIP Inspektorat 2. Level Maturitas SPIP Inspektorat			**BB** **3 Level**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	**BB**
				Level Maturitas SPIP Inspektorat	**3 Level**

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Inspektorat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengawasan berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengawasan untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi : **Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.**

Inspektorat mempunyai fungsi mewujudkan Pasaman Barat Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan inovatif. Secara umum rencana program Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 (Sebelas) kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   - Pengawasan Desa
   - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
   - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
   - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi
   - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
   - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINRAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN /SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indkator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah**		**100%**	**9,448,666,361**			**100%**	**7.808.989.883**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan**		**100%**	**104,818,000**			**100%**	**85.000.000**
6	**01**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	8 Dokumen	69,893,000	APBD		8 Dokumen	70.000.000
6	**01**	**01**	**2.01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat	20 Dokumen	-	APBD		20 Dokumen	10.000.000
6	**01**	**01**	**2.01**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	10 Laporan	34,925,000	APBD		10 Laporan	5.000.000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**		**100%**	**8,290,649,257**			**100%**	**6.183.989.883**

6	**01**	**01**	**2.02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	80 Orang/ bulan	7,914,489,257	APBD		80 Orang/ bulan	5.783.079.782
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	25 Dokumen	376,160,000	APBD		25 Dokumen	400.000.000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek**		**44 Orang**	**229,830,000**			**100%**	**515.000.000**
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	25 Orang	229,830,000	APBD		25 Orang	485.000.000
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	40 Orang	-	APBD		40 Orang	10.000.000
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	15 Orang	-	APBD		15 Orang	20.000.000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan**		**100%**	**438,416,500**			**100%**	**600.000.000**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	9,995,000	APBD		1 Paket	10.000.000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	2 Paket	160,950,000	APBD		2 Paket	400.000.000

6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	-	APBD		1 Paket	15.000.000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	65,000,000	APBD		1 Paket	25.000.000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	50 Laporan	202,471,500	APBD		50 Laporan	150.000.000
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sarana Prasarana yang Dibangun**		3 Paket	**184,773,504**			4 Paket	**185.000.000**
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat	3 Unit	75.000.000	APBD		3 Unit	75.000.000
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	4 Unit	84,973,504	APBD		4 Unit	85.000.000
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	3 Unit	24,800,000	APBD		3 Unit	25.000.000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor**		**100%**	**125,652,050**			**100%**	**120.000.000**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan	9,955,000	APBD		12 Laporan	10.000.000

6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	90 Laporan	69,105,000	APBD		90 Laporan	70.000.000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Laporan	46,592,050	APBD		1 Laporan	40.000.000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang DIpelihara**		**65 Unit**	**74,527,050**			**70 Unit**	**120.000.000**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	15 Unit	74,527,050	APBD		100%	100.000.000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	2 Unit	-	APBD		2 Unit	10.000.000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat	1 Unit	-	APBD		1 Unit	20.000.000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penurunan Temuan BPK**		**6%**	**756,289,000**			**6%**	**1.042.687.000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Objek Pemeriksaan Pengawasan Internal dan Presentase Pemantauan Kinerja**		105 Obrik	**606,329,000**			105 Obrik	**832.687.000**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	8 Laporan	112,900,000	APBD		8 Laporan	425.687.000

6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	74 Laporan	226,889,000	APBD		74 Laporan	227.000.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	19 Laporan	151,540,000	APBD		19 Laporan	65.000.000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	4 Dokumen	115,000,000	APBD		4 Dokumen	115.000.000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelesaiaan Kerugian Daerah yang Ditangani dan Presentase Obrik Kasus yang Ditanggapi**		**100%**	**149,960,000**			**100%**	**220.000.000**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Inspektorat	25 Laporan	-	APBD		25 Laporan	85.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	30 Laporan	149,960,000	APBD		30 Laporan	135.000.000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Jumlah PD yang dapat Dilakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi**		**20 PD**	**199,996,500**			**20 PD**	**505.266.000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Meningkatnya Nilai Leveling APIP, SPIP, SAKIP dan Presentase Penyelesaiaan Kerugian Daerah**		**3 Level**	**79,999,750**			**3 Level**	**230.266.000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	4 Rekomen-dasi	79,999,750	APBD		4 Rekomen-dasi	130.266.000

6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	3 Rekomen-dasi	-	APBD		3 Rekomen-dasi	100.000.000
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilakukan**		**100%**	**119,996,750**			**100%**	**117.500.000**
6	01	03	2.02	02	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	32 Perangkat Daerah	-	APBD		32 Perangkat Daerah	100.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	4 Kegiatan	119,996,750	APBD		4 Kegiatan	17.500.000
J U M L A H									**10,404,951,861,-**				**9.274.532.782,-**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun 2024 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip *save guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			**Tingkat Kapabilatas APIP**					**3 Level**				**3 Level**	
			Level Maturitas SPIP					**2,35 Level**				**2,48 Level**	
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		**Jumlah PD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas**					**0 PD**				**2 PD**	
			PD dengan Nilai SPIP Minimal 3					**10 PD**				**10 PD**	
			PD dengan Nilai SAKIP Minimal 3					**4 PD**				**4 PD**	
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan					**70%**				**70%**	
		6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**756,289,000**		**1,052,687,000**
		6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**606,329,000**		**832,687,000**
		6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	8 Laporan	100 %	112,900,000	8 Laporan	425,687,000
		6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	74 Laporan	100 %	226,889,000	74 Laporan	227,000,000

		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase penurunantemuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	19 Laporan	100 %	151,540,000	19 Laporan	65,000,000
		6	01	02	2.01	07	Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EValuasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	4 Dokumen	100 %	115,000,000	4 Dokumen	115,000,000
		6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**149,960,000**		**220,000,000**
		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya program penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase penyelesaian kerugian daerah yang ditangani dan persentase kasus obrik yang ditanggapi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Laporan	100 %	-	25 Laporan	85,000,000
		6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya program penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian daerah yang ditangani dan persentase kasus obrik yang ditanggapi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan	100 %	149,960,000	30 Laporan	135,000,000
		6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**199,996,500**		**347,766,000**
		6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**79,999,750**		**230,266,000**

		6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah PD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya nilai leveling APIP, SPIP, SAKIP dan persentase penyelesaian kerugian daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 PD	4 Rekomen-dasi	3 level	79,999,750	4 Rekomen-dasi	130,226,000
		6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknisdi Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah PD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya nilai leveling APIP, SPIP, SAKIPdan persentase penyelesaian kerugian daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 PD	3 Rekomen-dasi	3 level	-	3 Rekomen-dasi	100,000,000
		6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**119,996,750**		**117,500,000**
		6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persenatase terlaksananya program perumusan kebijakan , pendampingandan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingandan Asistensi yang dilakukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Perangkat Daerah	100 %	-	32 Perangkat Daerah	100,000,000
		6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persenatase terlaksananya program perumusan kebijakan , pendampingandan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pendampingandan Asistensi yang dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	100 %	119,996,750	4 Kegiatan	17,500,000
		6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9,448,666,361**		**7,874,079,782**
		6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**104,818,000**		**85,000,000**

		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 dokumen	100 %	69,893,000	8 dokumen	70,000,000
		6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	100 %	-	10 dokumen	10,000,000
		6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	34,925,000	10 Laporan	5,000,000
		6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,290,649,2573**		**6,183,079,782**
		6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang/ Bulan	100 %	7,914,489,257	80 Orang/ Bulan	5,783,079,782
		6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	376,160,000	25 Dokumen	400,000,000

		6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**229,830,000**		**510,000,000**
		6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Cakupan pelayan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	229,830,000	25 Orang	485,000,000
		6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	-	40 Orang	10,000,000
		6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 orang	100 %	-	15 orang	15,000,000
		6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**438,416,500**		**665,000,000**
		6	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PenerganBangunan Kantor	persentase terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	9,995,000	1 paket	10,000,000
		6	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	100 %	160,950,000	2 paket	410,000,000

		6	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kantor yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	-	1 paket	15,000,000
		6	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	65,000,000	1 paket	25,000,000
		6	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	202,471,500	50 Laporan	200,000,000
		6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**184,773,504**		**185,000,000**
		6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	75,000,000	3 Unit	75,000,000
		6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	84,973,504	4 Unit	85,000,000

		6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	24,800,000	3 Unit	25,000,000
		6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**125,652,050**		**120,000,000**
		6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	9,955,000	12 Laporan	10,000,000
		6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 Laporan	100 %	69,105,000	90 Laporan	70,000,000
		6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jasa Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	46,592,050	1 Laporan	40,000,000
		6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**74,527,050**		**120,000,000**

		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yangterpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	74,527,050	15 Unit	90,000,000
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yangterpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	-	2 Unit	10,000,000
		6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	-	1 Unit	20,000,000
		TOTAL													**10,404,951,861**		**9.274.532.782**

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intens antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, 04 Juli 2023
Plt. I N S P E K T U R

EMNITA NADIRUA, SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750813 200604 2 005

KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN KOTO BALINGKA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada RENSTRA 2021-2026 Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Parit, Juli 2023
Camat Koto Balingka

BAHRUL ILMI, S. Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19670119 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022 9

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 19
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 28
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI 36
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA 37
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

BAB V PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 2021-2026 memuat tentang rencana pembangunan jangka menengah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Lintas satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Nagari. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing) , komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Koto Balingka disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya Kecamatan Koto Balingka yang Beriman, Bermartabat, Sejahtera, Cerdas dan berwawasan Lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Koto Balingka selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentnag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anata Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011— 2031;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Balingka adalah :

- Sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Koto Balingka dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat wewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Rencana Kerja Kecamatan Koto Balingka dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Nagari serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing Nagari sesuai kewenangannya.
- Untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kantor Camat Koto Balingka serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Koto Balingka adalah :

- Sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Koto Balingka yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Merencanakan strategi dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan yang semakin komplit, mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik, memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Koto Balingka, meningkatnya koordinasi dan pembinaan, meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal, meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (Stakeholders), sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas – tugas Camat berikutnya.
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
- Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunsn perencanaan dan penganggaran OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun Nagari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Koto Balingka Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Koto Balingka

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Kantor Camat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) Program yang terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Koto Balingka tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2024 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2023. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Kantor Camat Koto Balingka tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Koto Balingka pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Camat Koto Balingka tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Kantor Camat Koto Balingka pada tahun 2022 sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp.631.175.548,-
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sebesar Rp176.800.000,-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 807.975.548,- dengan terealisasi sebesar Rp. 767.045.800,- (94.93 %)

c. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 94.93 % Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini hanya ada pegawai Tenaga Harian Lepas Kantor Camat Koto Balingka yang mengundurkan diri, dan Pegawai ASN yang menjadi Pj.Wali Nagari yang tidak mengambil Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mengakibatkan capaian tidak 100%..

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undang Sebesar Rp.-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. –

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp.0,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 33.083.100,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sebesar Rp.8.125.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 186.561.923,-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.227.770.023 dengan terealisasi sebesar Rp. 227.005.950,- (99,66 %) sisa dana Rp. 764.073

c. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 99,66%, Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 15.000.000,-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dengan terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- (100%)

c. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 100%, Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp. 3.612.500,-

d. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 3.612.500,- dengan terealisasi sebesar Rp. 3.524.250,- (97,56 %) sisa dana Rp.88.250,-

e. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 97,56%, Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sebesar Rp. 18.842.250,-
- Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 31.000.000,-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 49.842.250,- dengan terealisasi sebesar Rp. 49.378.000,- (99,07 %) sisa dana Rp.464.250,-

c. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 99,07 % Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sebesar Rp. 0,-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 0,- dengan terealisasi sebesar Rp. 0,-

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

a. Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan Sebesar Rp. -

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. –

c. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan Refocussing dan realokasi Anggaran disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Pemberdayaan Desa

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sebesar Rp. 6.361.100,-

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sebesar Rp. 45.255.000,-

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 51.616.100,- dengan terealisasi sebesar Rp. 50.41.300,- (97,68%) sisa dana Rp. 1.196.800,-

c. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 97,68 %, Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sebesar Rp. -
- Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenagan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal

b. Realisasi pelaksaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.-

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada di anggarkan.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasilan, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 7.625.000,-
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Sebesar Rp.414.986.000,-

b. Realisasi pelaksaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.422.611.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 421.783.500,- (99.80 %) sisa dana Rp.827.500,-

c. Permasalahan dan Solusi

Capaian evaluasi kinerja yaitu **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 99.80 %, Secara umum tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp. -.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. -

b. Realisasi pelaksaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. -

Tabel 2.1.1 (T-C.29)
Rekapitulsasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023
Kecamatan Koto Balingka
Kabupaten Pasaman Barat

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun 2025		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Terpenuhuinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	99.14%	100%	96,12%	96,12%	100%	84.650%	80%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai (termasuk PTT dan THL	100%	99.90%	100%	94,93%	94,93%	100%	100 %	100%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	99.66%	99.66%	100%	99,66%	100%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor	100%	97.99%	100%	97.56%	97.56%	100%	100%	100%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharan Barang Milik Daerah	100%	98.08%	100%	99.07%	99.07%	100%	100%	100%	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.7 Nilai	0%	IKM	85.7 Nilai	85.7	85 Nilai	86 Nilai	88 Nilai	

9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.7 Nilai	0%	100%	0%	0%	85	86	100%	
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	85.7 Nilai	0%	100%	0%	0%	85	86	100%	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	99.80%	100%	97,68%	97,68%	100%	100%	100%	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	99.80%	100%	97,68%	97,68%	100%	100%	100%	
13	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase koordinasi dan trantibum yang difasilitasi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase upaya penyelenggaraan ketentraman umum yang dikoordinasi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	99,80%	99,80%	100%	100%	100%	
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (PHBN, PHBI, MTQ)	100%	100%	100%	99,80%	99,80%	100%	100%	100%	
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
18	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase nagari yang dibina dan diawasi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Koto Balingka merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Koto Balingka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Koto Balingka ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Koto Balingka.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Koto Balingka, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran. Sedangkan ijin HO dan IMB yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih relatif kecil. Hal tersebut karena masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus ijin-ijin tersebut dan ini menjadi tantangan pemerintah kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Koto Balingka dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja :

Tabel 2.2. (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Balingka

Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kec. Koto Balingka				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM			100%	100%	100%	100%	95 %	98%	100%	100%	
2	Opini BPK atas laporan keuangan daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Publik Kecamatan			-	2	2	3	-	2	3	3	

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Koto Balingka dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indicator – indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kecamatan. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD teknis. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena

mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sementara pada saat yang sama dukungan anggaran kecamatan masih belum berbanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan OPD setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan berokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatan perhatian dan capaian ideal di masa-masa mendatang.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang.
3. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.
4. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dll sumber daya keprofesionalan.
5. Wilayah Kecamatan Koto Balingka yang cukup luas dan masih lemahnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai ;

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan / kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD

4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan : keterbukaan informasi melalui media sosial dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah

Peluang : perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi melalui media sosial

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Memaksimalkan kemampuan sdm aparatur yang ada di kecamatan dan memanfaatkan media terutama media sosia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang berikan oleh Kantor Camat Koto Balingka.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4. (T.C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Kecamatan Koto Balingka

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Kantor Camat Koto Balingka	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusabn Pemerintah Daerah**	**100 %**	**754.889.739**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusabn Pemerintah Daerah**	**100 %**	**868.843.222**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Koto Balingka**	**100 %**	**110.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Koto Balingka**	**100 %**	**565.438.472**	
	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	50.000.000	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bula n	444.458.472	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	71.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	30.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	49.980.000	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**65.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**15.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Koto	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut**	30 Paket	15.000000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	17 Paket	10.800.000,-	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Unadangan	Balingka Kantor Camat Koto Balingka	**Kelengkapannya** Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Unadangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	4.500.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**141.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**228.139.750**	
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	36.000.000	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Kantor Camat Koto Balingka**	Jumlal paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	36.000.000	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**1 Paket**	**41.231.750**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	5.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket	0	
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Kegiatan yang disediakan makanan dan minuman jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600 Laporan	69.000.000	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang disediakan makanan dan minuman jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600 laporan	183.908.000	
4	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Koto Balingka	**Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana**	100 %	130.000.000	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana**	100 %	35.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	

	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	15.000.000,-	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Cakupan Pemenuhan Layanan jasa Penunjang Operasional Kantor**	**100%**	**135.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan jasa Penunjang Operasional Kantor**	100%	5.780.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.780.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kantor Camat KotoBalingka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	20 laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0	0	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana**	**100 %**	**139.889.739**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	100 %	39.185.000,-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajak nya	8 Unit	39.889.739	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajak nya	8 Unit	20.655.000.-	

	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yag dipelihara	30 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yag dipelihara	10 Unit	3.650.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Gedung kantor pembangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Jumlah Gedung kantor pembangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	14.880.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**100 %**	**2.080.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**100 %**	**11.250.000**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Pelayanan Masyarakat Tepat waktu**	**100%**	**1.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**Persentase Pelayanan Masyarakat Tepat waktu**	**100%**	**9.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	9.000.000	
2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**1.080.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**2.250.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlaha Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	5 Laporan	1.080.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlaha Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	5 Laporan	2.250.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan**	**100 %**	**2.080.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan**	**100 %**	**20.205.000**	

			Masyarakat Desa			**DESA**	**Masyarakat Desa**			
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**	**100%**	**2.080.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**	**100%**	**8.550.000.**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.040.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8.550.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporaan	11.655.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Koordinasi Trantibun yang Difasilitasi**	**100 %**	5.202.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**Persentase Koordinasi Trantibun yang Difasilitasi**	**100 %**	**5.285.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi**	**100 %**	**5.202.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi**	**100 %**	**5.285.00,-**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2.702.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3.785.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	5 Laporan	2.500.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	5 Laporan	1.500.000	

			Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan PHBN/PHBI**	**100 %**	**513.513.921**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan PHBN/PHBI**	**100 %**	88.100.000,-	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (PHBN dan PHBI)**	100%	513.513.921	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (PHBN dan PHBI)**	100%	88.100.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	256.756.961	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	29.000.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	20 Dokumen	256.756.960	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	20 Dokumen	59.100.000	

			Instansi Vertikal			Instansi Vertikal	Instansi Vertikal			
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Nagari yang Dibina dan diawasi**	**100%**	**2.500.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**2.500.000**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kantor Camat Koto Balingka**	**Persentase Nagari yang Dibina dan diawasi**	**100%**	**2.500.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Nagari yang Dibina dan diawasi**	**100%**	**2.500.000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Koto Balingka	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	2.500.000,-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	2.500.000	
JUMLAH					**1.230.225.660**				**996.183.222,-**	

2.5. Penelahaan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Kantor Camat Koto Balingka tidak memiliki usulan program dari masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Agenda tersebut dilaksanakan menggunakan strategi dengan menetapkan prioritas pada 3 dimensi pembangunan, yaitu:

a. Dimensi pembangunan manusia: Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Mental / Karakter.
b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: - Kedaulatan Pangan - Kedaulatan Energi dan Kelistrikan - Pariwisata dan Industri - Kemaritiman dan Kelautan
c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan - Antar Wilayah Desa - Pinggiran - Luar Jawa - Kawasan Timur

Dari sembilan agenda prioritas RPJMN Tahun 2021 – 2025 yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Koto Balingka adalah agenda dua dan delapan yaitu Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta Melakukan revolusi karakter bangsa. Kecamatan Koto Balingka telah menyusun program seperti Program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.

Pada tahap sekarang memasuki tahapan RPJM ke 2 (2021-2026) secara umum adalah peningkatan daya saing produk dan hubungan regional, pengembangan pariwisata dan industri kecil, penuntasan wajib belajar 12 tahun, selanjutnya dijabarkan kedalam bidang pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Agama dan Budaya, difokuskan pada:
   - Pencerahan Agama dan Adat
   - Kualitas Sarana Peribadatan
   - Jumlah dan kualitas sekolah berasrama
   - Kualitas manajemen sekolah bernuansa Islam
2. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan, difokuskan pada:
   - Aparatur yang bersih dan bebas KKN
   - Penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi
   - Penyuluhan hukum dan hak asasi manusia
   - Pembenahan manajemen pegawai
   - Kinerja SOTK
   - Sistem database untuk internal dan eksternal
3. Pembangunan Ekonomi, difokuskan pada:
   - Teknologi pertanian tepat guna
   - Peran science/technopark dalam pengembangan produk inovatif
   - Kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut
   - SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut
   - Peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata
4. Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
   - Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan nagari yang melaksanakan agroforestri
   - Pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri
5. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia
   - Pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional

- Sekolah kejuruan menghasilkan
- Penetapan 12 sekolah berasrama

6. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
   - Mantapnya penataan ruang wilayah
   - Pengembangan flora dan fauna dalam kawasan konservasi
   - Pengawasan ketat terhadap pencemaran air dan udara oleh industri

Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu misi untuk pencapaian visi tersebut adalah mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di atas antara lain meningkatnya kompetensi aparatur daerah, meningkatnya kinerja aparatur daerah. Salah satu Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian misi di atas adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan yang diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud : tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, terciptanya pemerintahan yang bersih dan professional, terlaksananya pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan terwujudnya aparatur pemerintah yang professional dan bebas KKN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Kantor Camat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Koto Balingka Tahun 2023 seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Kantor Camat Koto Balingka Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2024	2025
Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Level Maturitas SPIP	-	2	2	3	3	3
		Nilai WBK-WBBM						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.70%	91,17%	94,06%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Koto Balingka berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (Dua belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah 3. Administrasi Umum Perangkat Derah

		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Peyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah.
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Keromendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama OPD : Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebuatuhan dan/Pagu Indikatif
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka,Parit**	**100%**	**868.843.222**	APBD	**100%**	**1.104..220.000,-**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Koto Balingka**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**565.438.472,-**	**APBD**	**100%**	**628.920.000,-**
	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	17 Orang	444.458.472,-	APBD	17 Orang	500.000.000,-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	13 Dokumen	71.000.000,-	APBD	13 Dokumen	71.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	20 Dokumen	49.980.000,-	APBD	20 Dokumen	57.920.000,-
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengurus Barag yang Menerima Honor**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**0,-**	**APBD**	**1 Orang**	**0,-**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang yang menerima Honor	Kab. Pasaman	1 Orang	0,-	APBD	1 Orang	0,-

			Barat, Koto					
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka,Parit**	**100 %**	**15.300.000,-**	APBD	**100 %**	**25.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka,Parit	17 Paket	10.800.000,-	APBD	17 Paket	10.800.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	2 Orang	4.500.000	APBD	2 Orang	10.000.000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**1 Paket**	**228.139.750,-**	**APBD**	**1 Paket**	**249.500.000,-**
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	1 Paket	3.000.000,-	APBD	1 Paket	4.500.000,-
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	1 Paket	41,231,750,-	APBD	1 Paket	45.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	0 Paket	0,-	APBD	0 Paket	0,-
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penytelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	600 Laporan	183.908.000,-	APBD	600 Laporan	200.000.000,-

5	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100 %**	**15.000.000,-**	**APBD**	**100 %**	**115.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	0 Unit	0	APBD	2 Unit	50.000.000,-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	0 Unit	0	APBD	2 Unit	15.000.000,-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumalh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5 Unit	15.000,000	APBD	5 Unit	50.000,000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	100 %	5.780.000,-	APBD	100 %	13.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	12 Laporan	5.780.000,-	APBD	12 Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	0 Laporan	0,-	APBD	5 Laporan	1.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	0 Laporan	0,-	APBD	5 Laporan	2.000.000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100 %**	**39.185.000**	**APBD**	**100 %**	**77.000.000,-**

	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajak nya	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	8 Unit	20.655.000,-	APBD	8 Unit	22.000.000,-
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka,Parit	10 Unit	3.650.000	APBD	5 Unit	5.000.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Jumlah Gedung kantor pembangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka,	1 Unit	14.880.000,-	APBD	1 Unit	50.000.000,-
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**11.250.000**	**APBD**	**100%**	**4.000.000**
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentasi Capaian Kinerja Pelayanan**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100 %**	**9.000.000**	**APBD**	**100 %**	**1.000.000**
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5 Laporan	9.000.000	APBD	5 Laporan	1.000.000
9	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100 %**	**2.250.000**	**APBD**	**100 %**	**3.000.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5 Laporan	2.250.000	APBD	5 Laporan	3.000.000
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100 %**	**20.205.000**	**APBD**	**100 %**	**20.000.00,-**

10.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100 %**	**20.205.000**	**APBD**	**100 %**	**20.000.000,-**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	9 Lembaga	48.550.000	APBD	30 Lembaga	10.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	20 Laporan	11.655.000	APBD	20 Laporan	10.000.000
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Trantibun yang diFasilitasi**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**5.285.000,-**	**APBD**	**100%**	**5.306.040,-**
11	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**5.285.000,-**	**APBD**	**100%**	**5.306.040,-**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5 Laporan	3.785.000,-	APBD	5 Laporan	2.806.040,-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5 Laporan	1.500.000	APBD	5 Laporan	2.500.000,-
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	100%	88.100.000,-	APBD	100%	110.000.000,-

12.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (PHBN**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	100 %	88.100.000,-	APBD	100 %	110.000.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	1 Kegiatan	29.000.000,-	APBD	1 Kegiatan	60.000.000,-
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	20 Dokumen	59.100.000,-	APBD	20 Dokumen	50.000.000
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Nagari yang dibina dan diawasi**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**2.500.000**	**APBD**	**100%**	**2.500.000**
13.	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit**	**100%**	**2.500.000**	**APBD**	**100%**	**2.500.000**

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, semua Kelurahan	3 Dokumen	2.500.000,-	APBD	3 Dokumen	2.500.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DEARAH

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Koto Balingka berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Koto Balingka memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja kecamatan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan di tingkat pusat dan titindaklanjuti dengan peraturan ditingkat daerah. Hal penting yang diperlukan adalah koordinasi antara instansi terkait serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan termasuk di dalamnya masyarakat. Proses penyusunan antara lain dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasikan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda yang diusulkan masyarakat dengan program kegiatan OPD tingkat kabupaten.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kecamatan Koto Balingka selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah dapat terwujud secara optimal.

Parit, Juli 2023
Camat Koto Balingka

BAHRUL ILMI,S.Pd
Pembina IV/a
NIP.19670119 198903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian dalam hal kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan memperhatikan Renja Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun

2011-2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Badan Kesbangpol pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik.
2. Mewujudkan pemahaman Etika Budaya Politik serta mendorong terwujudnya stabilitas politik yang demokratis dan dinamis.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan tercegahnya konflik.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan

setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi perangkat daerah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kesbangpol

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja perangkat daearah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 12 kegiatan dalam 6 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya. Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian sasaran dalam 6 indikator kinerja (outcome/output) dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Badan Kesbangpol tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesbangpol pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja perangkat daerah dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) thn 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023				Cat.
										Target renja perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi renja perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	01	02		Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapat pemantapan ideologi	20	129,296,557	0.42	76,124,300	5	132,622,700	0.03	142,923,500	0.006	100	7	117,275,789	7.45	336,323,589	0	3	
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4	129,296,557	4	76,124,300	4	132,622,700	5	142,923,500	100	100	4	117,275,789	13	336,323,589	3	3	
8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	70	137,033,617	68	1,149,710,324	68	1,247,862,124	70	1,242,140,274	100	100	68	416,016,170	100	2,807,866,768	1	20	
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	1	137,033,617	2	1,149,710,324	2	1,247,862,124	3	1,242,140,274	100	100	1	416,016,170	6	2,807,866,768	6	20	
8	01	04		Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Terdaftar dan Aktif dalam Pembangunan	45	112,278,600	20	88,335,250	45	102,197,850	60	122,288,627	100	100	30	124,293,530	100	334,917,407	2	3	

Tabel 2.1.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja perangkat daerah dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) thn 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023				Cat.
										Target renja perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi renja perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terdaftar	59	112,278,600	59	88,335,250	59	102,197,850	59	122,288,627	100	100	59	124,293,530	100	334,917,407	2	3	
8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan kasus konflik	5	112,278,600	-	173,437,050	5	161,907,700	17	248,724,382		100	5	101,840,000	21.67	524,001,432	4	5	
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang difasilitasi	2	112,278,600	2	173,437,050	2	161,907,700	2	248,724,382	100	100	2	101,840,000	6	524,001,432	3	5	
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase konflik yang ditangani	100	43,681,697	76.27	569,226,900	100	1,134,751,838	100	780,100,177	100	100	100	101,840,000	100	1,451,167,077	1	33	
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang ditangani	100	43,681,697	76.27	569,226,900	100	1,134,751,838	100	780,100,177	100	100	100	101,840,000	100	1,451,167,077	1	33	

KEPALA BADAN KESBANGPOL

DEFI IRAWAN, S.Pd

PEMBINA TK. I/IV b

NIP. 19660403 199103 1 009

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Kinerja Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Indikator Kinerja				Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
I	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**					
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idesologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		4 Kali	5 Kali	100 %
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100 %
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	150 Orang	100 %
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100 %
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kali	-	-
II	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**					
	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitisi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		2 Kali	3 Kali	100 %
		3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 orang	150 Orang	100 %
		4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 parpol	12 parpol	100 %
III	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**					
	3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1 Kali	1 Kali	100 %
		5	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 kali	1 kali	100 %

Indikator Kinerja				Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
IV	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**					
	4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		2 Kali	6 Kali	100%
		6	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kali	5 Kali	100%
		7	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 0rang	50 orang	100%
V	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**					
	5	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	100 %
		8	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Kali	2 Kali	100 %
		9	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Kali	2 Kali	100 %
		10	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	100 %
VI	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100 %	100 %
		10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 PNS	17 PNS	94 %
		11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 PTT 31 THL	4 PTT 12 THL	100 %
		12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		168 Unit	168 Unit	100 %
		13	Penatausaha Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	1 Orang	100 %
	8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	2 Orang	40 %
		14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	2 Orang	40 %
	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100 %

Indikator Kinerja				Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
		15	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100 %
		16	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100 %
		17	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100 %
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali	100 %
	10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 Unit	5 Unit	100 %
		19	Pengadaan Mebel	1 Unit	5 Unit	100 %
	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%
		20	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. 2 Orang THL 2. 12 Bulan	1. 2 Orang THL 2. 12 Bulan	100 %
	12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		47 Unit	47 Unit	47 Unit
		22	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	14 Unit	100 %
		23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	100 %
		24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	27 Unit	27 Unit

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program teknis dan 1 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan dan dengan jumlah subkegiatan yang dilaksanakan sebanyak 24 subkegiatan.Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 7 indikator sasaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	Sangat Baik
2	Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	5%	0,03 %	1 %	Buruk
3	Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	20%	60%	100%	Baik
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	68%	68 %	68 %	-
5	Nilai SAKIP Kesbangpol	C	BB	100 %	Sangat Baik
6	Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Level 2	Level 3	100 %	Sangat Baik
7	Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50	0 %	100%	Sangat Baik

Hasil capaian atas 7 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagaimana uraian pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 4 indikator dan terlaksana dengan prediket “baik” sebanyak 1 indikator dan buruk sebanyak 1 indikator. Dapat dijelaskan bahwa indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan realisasi capaiannya 0,03 disebabkan keterbatasan anggaran, sedangkan jumlah siswa SMP dan SMA tahun 2022 sebanyak 48.120 orang, sehingga realisasi capaiannya kecil. Untuk indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2022 realisasi capaiannya 0, hal ini disebabkan pada tahun 2022 tidak ada pemilu sehingga realisasi capaiannya 0.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan perubahan pad-a Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Sedangkan Fungsi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemfasilitasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden , Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
5. Pembinaan kegiatan di bidang penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah, organisasi kemasyarakatan, wawasan kebangsaan,
6. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
7. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pada RPJMD tahun 2021-2026, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi I RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kesbangpol dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Kesbangpol yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Kesbangpol Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2022 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2023 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase konflik sosial yang ditangani			100	100	100	100	100		100	100	
2	Persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan			5	7	10	15	0,03		10	15	
3	Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan			25	30	35	40	60		35	40	
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu			68	68	70	70	-		70	70	
5	Nilai SAKIP Kesbangpol			B	B	BB	BB	BB		BB	BB	
6	Level Maturitas SPIP KesbangpolP			3	3	3	3	3		3	3	
7	Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol			50	75	75	100	0		75	100	

Berdasarkan tabel T-C.30 dapat dijelaskan bahwa indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan realisasi capaiannya 0,03 disebabkan keterbatasan anggaran, sedangkan jumlah siswa SMP dan SMA tahun 2022 sebanyak 9.828 orang, sehingga realisasi capaiannya kecil. Untuk indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2022 realisasi capaiannya 0, hal ini disebabkan pada tahun 2021 tidak ada pemilu sehingga realisasi capaiannya 0.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Melakukan pembinaan kemampuan masyarakat dalam rangka deteksi dini penanganan konflik sosial dan SARA,
2. Pengembangan dan pembinaan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan,
3. Masih rendahnya peran ormas yang aktif dalam pembangunan,
4. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu penting dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi vertikal terkait berhubungan dengan konflik untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula untuk memberikan wawasan awal dalam proses pemilihan umum serta memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat juga memberikan bekal bela Negara serta kerta kesadaran akan bahayanya narkoba kepada siswa SMA di Kabupaten Pasaman Barat.

Kesbangpol berperan sebagai mata dan telinga Bupati Pasaman Barat dan sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam pelaksanaannya karena keterbatasan SDM dan APBD dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi;
2. Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis dalam deteksi dini permasalahan;
4. Masih adanya keterlambatan pencairan bantuan partai politik;
5. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak semua kegiatan dapat tertampung dalam APBD;
6. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kapasitas perencanaan memadai.

Adapun peluang yang ada di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah :

1. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat;
2. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berorganisasi dan berpolitik melalui lembaga swadaya masyarakat, yayasan maupun partai politik;
4. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan *Good Governance* dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan sebuah peluang dan kekuatan bagi Badan Kesbangpol untuk pengembangan pelayanan OPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.908.248.468,- (*Tiga milyar Sembilan ratus delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2024. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 6 program (teknis dan rutin) dan 12 kegiatan serta 29 sub kegiatan yang direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2,819,841,528	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3,101,825,681	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Kesbangpol	4 Dokumen	30,200,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Kesbangpol	4 Dokumen	33,220,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	26,150,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	28,765,000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	4,050,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	4,455.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	100%	1,925,236,193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	100%	2,117,759,812	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	1,574,186,193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	1,731,604,812	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	234,650,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	258,115,000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	116,400,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	128,040,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola Kesbangpol	168 unit	17,550,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola Kesbangpol	168 unit	19,305,000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17,550,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19,305,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100%	64,020,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100%	70,422,000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	10,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	11,880,000	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	53,220,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	58,542,000	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	576,941,150	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	634,635,265	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25,217,250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	27,738,975	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	25000000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	27,500,000	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	26,615,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29,276,500	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,108,900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	550,119,790	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	100%	39,914185	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	100%	43,905,604	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	24,856,185	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	27,341,804	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	15,058,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	16,563,800	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor	100%	89,780,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor	100%	98,758,000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,862,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28,448,750	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	63,917,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70,309,250	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	100%	76,200,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	100%	83,820,000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	35,525,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	39,077,500	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	16,655,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	18,320,500	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	24,020,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	26,422,000	
2	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapat pemantapan ideologi	10%	483,528,635	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapat pemantapan ideologi	10%	531,881,499	
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 kali	483,528,635	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 kali	531,881,499	
20	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	19,990,000	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	91,989,000	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	51,640,000	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	56,804,000	
22	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	21,310,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	23,441,000	
23	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	5,100,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	5,610,000	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	385.488.635	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	424,037,499	
25	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	12 Keluarga	0	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	12 Keluarga	0	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	70%	51,511,153,801	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	70%	56,662,269,181	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	2 kali	51,511,153,801	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	2 kali	56,662,269,181	
26	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	49,898,000	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	54,887,800	
28	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	12 Orang	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	12 Orang	0	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	51,461,255,801	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	56,607,381,381	
30	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	0	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang melaporkan keberadaannya	35 Ormas	81,095,000	Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang melaporkan keberadaannya	35 Ormas	89,204,500	
			Persentase Ormas yang Terdaftar dan Aktif dalam Pembangunan	35%				Persentase Ormas yang Terdaftar dan Aktif dalam Pembangunan	35%		
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	1 Kali	81,095,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	1 Kali	89,204,500	
31	Penyusunan program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	Penyusunan program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	
33	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	59 Orang	81,095,000	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	59 Orang	89,204,500	
34	Pelaksanaan koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	12 Orang	0	Pelaksanaan koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	12 Orang	0	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	1 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	1 Laporan	0	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya		Penurunan kasus konflik	5%/thn	101,562,000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya		Penurunan kasus konflik	5%/thn	111,718,200	
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang difasilitasi	2 kali	101,562,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang difasilitasi	2 kali	111,718,200	
36	Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	
38	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 Orang	56,182,000	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 Orang	61,800,200	
39	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	45,380,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	49,918,000	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik		Persentase konflik yang ditangani	100%	219,738,000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik		Persentase konflik yang ditangani	100%	241,711,800	
13	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase konflik yang ditangani	100%	219,738,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase konflik yang ditangani	100%	241,711,800	
41	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	17.822.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	19,604,200	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	17.822.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	19,604,200	
43	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	51,110,000	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	56,221,000	
44	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16 Orang	43,760,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16 Orang	48,136,000	

Tabel 2.2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	11,000,000	
46	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	79,224,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasaman Barat, Kec. Pasaman, Lingkuang Aua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	87,146,400	
Jumlah					55,216,918,964					60,738,610,860	

2.5. Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pokir DPRD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum terdapat pada program ke- 3 yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
2. Fasilitasi Politik dalam negeri
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Fasilitasi kewaspadaan nasional
5. Bina idiologi, karakter dan wawasan kebangsaan
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat jendral Politik dan Pemerintahan Umum.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
	1. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi pelayanan publik	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama masyarakat serta pengembangan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kebudayaan	1. Peningkatan pengamalan ajaran agama, nilai-nilai luhur dan budaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Kesbangpol Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
Menciptakan masyarakat yang aman dan tentram	Penurunan SARA konflik sosial ekonomi			5%/tahun
		Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	100
			Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	10
			Jumlah ormas yang melaorkan keberadaannya	35
			Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	35
		Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	70
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol			BB
	Level Maturitas SPIP Kesbangpol			3
	Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol			75
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	B
			Level Maturitas SPIP Kesbangpol	3
			Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	75

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat “Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera“.

Misi Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026:

1) Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing;
2) Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
3) Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan melayani;
4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan;
5) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olahraga pemuda Pasaman Barat;
6) Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT;
7) Membangun sarana tempat membaca Alquran (Pondok Alquran);
8) Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapat air bersih;
9) Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah;
10) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat;
11) Membangun jalan yang menghubungkan kejorongan yang berada di pinggir laut menuju ibukota kecamatan;
12) Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut;
13) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah;
14) Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut;
15) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan;
16) Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak senergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;

17) Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat;
18) Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi wisuda;
19) Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat;
20) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapat pengobatan gratis yang berkualitas dan mudah mendapat obat-obatan;
21) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni;
22) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejorongan transmigrasi;
23) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga;
24) Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai.

Dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat disusun untuk menunjang misi 19 Bupati yakni mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada tujuan 2 yaitu pembangunan mental dan pengamalan agama masyarakat serta pengembangan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kebudayaan, sasaran 4 yaitu terwujudnya masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai adat budaya. Program urusan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat untuk menunjang sasaran 4 ini adalah:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang memuat kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 554.172.635,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta

Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terbagi kedalam 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 51.640.000,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 21.810.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah Rupiah)
d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. Rp5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)
e. Pelaksanaam Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 456.132.635 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang memuat kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp.

51.511.153.801,- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah) yang terbagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.898.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 51.461.255.801,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Delapan Ratus Satu Rupiah)

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang memuat kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 81.095.000 (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memuat kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 101.562.000,- (Seratus Satu Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terbagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 56.182.000,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 45.380.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang memuat kegiatan Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan anggaran sebesar Rp. 174.094.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terbagi kedalam 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 51.110.000,- (Lima Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

b. Pelaksanaan Koordinas di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp43.760.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp79.224.000,- (Tujuah Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Kelima program urusan tersebut dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu tidak adanya konflik bernuansa suku, agama, ras dan

antar golongan (SARA) dan konflik ekonomi. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								55.216.918.964,00					3.548.789.330,00
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								55.216.918.964,00					3.548.789.330,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								55.216.918.964,00					3.548.789.330,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.794.841.528,00					2.616.332.916,00
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30.200.000,00					39.765.000,00
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Kesbangpol	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	5 Dokumen	4 Dokumen	26.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	28.765.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Kesbangpol	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	3 Laporan	4 Dokumen	4.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.925.236.193,00					2.022.477.812,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	18 Orang/bulan	100 %	1.574.186.193,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.731.604.812,00
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	234.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	227.975.000,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase realisasi keuangan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	116.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	62.898.000,00
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17.550.000,00					33.000.000,00
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Kesbangpol	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	168 Unit	17.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								64.020.000,00					22.000.000,00
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	18 Paket	100 %	10.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	11.000.000,00
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	5 Orang	100 %	53.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	11.000.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								551.941.150,00					266.493.844,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	25.217.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.793.844,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.200.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	26.615.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.000.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	500.108.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	192.500.000,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								39.914.185,00					65.841.804,00
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	3 Unit	6 Unit	24.856.185,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	27.341.804,00
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/ perlengkapan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	3 Unit	6 Unit	15.058.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38.500.000,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								89.780.000,00					80.517.756,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	25.862.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.317.756,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	63.917.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46.200.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								76.200.000,00					86.236.700,00
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	14 Unit	100 %	35.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	44.645.975,00
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Unit	100 %	16.655.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.967.725,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	27 Unit	100 %	24.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.623.000,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								554.172.635,00					205.772.993,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								554.172.635,00					205.772.993,00
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10 %	1 Dokumen	4 Kali	19.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	24.919.400,00
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10 %	1 Dokumen	4 Kali	51.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	57.717.000,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10 %	50 Orang	4 Kali	21.310.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	24.574.000,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10 %	50 Orang	4 Kali	5.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	17.270.000,00
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10 %	1 Laporan	4 Kali	456.132.635,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	0,00
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara													
						% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10 %	1 Keluarga	4 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	81.292.593,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								51.511.153.801					110.000.000,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								51.511.153.801					110.000.000,00
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	70 %	0 Dokumen	2 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	70 %	1 Dokumen	2 Kali	49.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	55.000.000,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	70 %	0 Orang	2 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	0,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	70 %	12 Orang	2 Kali	51.461.255.801,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	55.000.000,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	70 %	0 Laporan	2 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	0,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								81.095.000,00					92.378.000,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								81.095.000,00					92.378.000,00
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	35 % 35 Ormas	0 Dokumen	1 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	35 % 35 Ormas	0 Dokumen	1 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	35 % 35 Ormas	59 Orang	1 Kali	81.095.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	59 Orang	92.378.000,00
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	35 % 35 Ormas	0 Orang	1 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	0,00
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	35 % 35 Ormas	0 Laporan	1 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	0,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								101.562.000,00					190.103.861,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								101.562.000,00					190.103.861,00
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Penurunan Kasus Konflik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 %/ Tahun	0 Dokumen	2 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Penurunan Kasus Konflik	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 %/ Tahun	0 Dokumen	2 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Penurunan Kasus Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 %/Tahun	18 Orang	2 Kali	56.182.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 Orang	97.440.200,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Penurunan Kasus Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 %/ Tahun	100 Orang	2 Kali	45.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	92.663.661,00
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Penurunan Kasus Konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 %/ Tahun	0 Laporan	2 Kali	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								174.094.000,00					334.201.560,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								174.094.000,00					334.201.560,00
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Persentase konflik yang ditangani	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase konflik yang ditangani	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Persentase konflik yang ditangani	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase konflik yang ditangani	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Persentase konflik yang ditangani	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang ditangani	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	20 Orang	100 %	51.110.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	19.604.200,00
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Persentase konflik yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang ditangani	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	0,00

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Persentase konflik yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang ditangani	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	0,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase konflik yang ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik yang ditangani	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	79.224.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	294.993.160,00
TOTAL													**55.216.918.964,00**					**3.548.789.330,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun ke-2 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni menciptakan masyarakat yang aman dan tentram yang diukur melalui jumlah konflik di Pasaman Barat dan persentase penurunan angka kriminalitas. Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diterjemahkan dalam 3 sasaran melalui pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Kesbangpol, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat Tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 29 subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kesbangpol Kab. Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 55,216,918,964,-** (*Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					Tujuan 1 : Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram	**Penurunan Konflik SARA Konflik Sosial Ekonomi**								
					Sasaran 1: Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	**Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi**								
						Persentase Masyarakat yang Paham tentang Wawasan Kebangsaan								
						Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam Pembangunan								
8					**Pemerintahan Umum**									
8	**01**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**				**55,216,918,964**				**4,299,073,315**	
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapat pemantapan ideologi**		**70%**	**554,172,635**			**70%**	**531,881,499**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah sosialisasi yang difasilitasi**		**2 kali**	**554,172,635**			**2 kali**	**531,881,499**	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	19,990,000	DAU		1 Dokumen	21,989,000	
8	01	02	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	51,640,000	DAU		1 Dokumen	56,804,000	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	12 Orang	21,310,000	DAU		12 Orang	23,441,000	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	12 Orang	5,100,000	DAU		12 Orang	5,610,000	
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	456,132,635	DAU		1 Laporan	424,037,499	
8	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	12 keluarga	-	DAU		12 keluarga	-	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada**		**70%**	**51,511,153,801**			**70%**	**56,662,269,181**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah sosialisasi yang difasilitasi**		**2 Kali**	**51,511,153,801**			**2 Kali**	**56,662,269,181**	
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	49,898,000	DAU		1 Dokumen	54,887,800	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	12 Orang	-	DAU		12 Orang	-	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	12 Orang	51,461,255,801	DAU		12 Orang	56,607,381,381	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	-	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah ormas yang melaporkan keberadaannya**		**35 Ormas**	**81,095,000**			**40 Ormas**	**89,204,500**	
						Persentase Ormas yang Terdaftar dan Aktif dalam Pembangunan		**35%**				**40%**		
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah pelaksanaan pembinaan ormas yang difasilitasi**		**1 Kali**	**81,095,000**			**1 Kali**	**89,204,500**	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah yang disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah yang disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	59 Orang	81,095,000	DAU		59 Orang	89,204,500	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	12 Orang	-	DAU		12 Orang	-	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	-	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Penurunan kasus konflik**		**5%/thn**	**101,562,000**			**5%/thn**	**111,718,200**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang difasilitasi		**2 kali**	**101,562,000**			**2 kali**	**111,718,200**	
8	01	05	2.01	01	Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	-	
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	-	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	18 Orang	56,182,000	DAU		18 Orang	61,800,200	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 Orang	45,380,000	DAU		100 Orang	49,918,000	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	-	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik**	**Persentase konflik yang ditangani**		**100%**	**174,094,000**			**100%**	**241,711,800**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik yang ditangani**		**100%**	**174,094,000**			**100%**	**241,711,800**	
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	19,604,200	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	19,604,200	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	20 Orang	51,110,000	DAU		20 Orang	56,221,000	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	16 Orang	43,760,000	DAU		16 Orang	48,136,000	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	11,000,000	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	79,224,000	DAU		1 Dokumen	87,146,400	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**2,819,841,528**			**100%**	**3,101,825,681**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Kesbangpol**		**4 Dokumen**	**30,200,000**			**4 Dokumen**	**33,220,000**	
8	01	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 Dokumen	26,150,000	DAU		5 Dokumen	28,765,000	
8	01	01	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	3 Laporan	4,050,000	DAU		3 Laporan	4,455,000	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan			**1,925,236,193**				**2,117,759,812**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	18 Orang/bulan	1,574,186,193	DAU		18 Orang/bulan	1,731,604,812	
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	234,650,000	DAU		1 Dokumen	258,115,000	
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Dokumen	116,400,000	DAU		1 Dokumen	128,040,000	
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola Kesbangpol			**17,550,000**				**19,305,000**	
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	17,550,000	DAU		1 Laporan	19,305,000	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian			**64,020,000**				**70,422,000**	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	18 Paket	10,800,000	DAU		18 Paket	11,880,000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	5 orang	53,220,000	DAU		5 orang	58,542,000	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			**551,94,150**				**634,635,265**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 paket	25,217,250	DAU		1 paket	27,738,975	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 paket	0	DAU		1 paket	27,500,000	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 paket	26,615,000	DAU		1 paket	29,276,500	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	500,108,900	DAU		1 Laporan	550,119,790	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan/perlengkapan kantor			**39,914,185**				**43,905,604**	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	7 Unit	24,856,185	DAU		7 Unit	27,341,804	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	3 unit	15,058,000	DAU		3 unit	16,563,800	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor			**89,780,000**				**98,758,000**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	25,862,500	DAU		1 Laporan	28,448,750	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 Laporan	63,917,500	DAU		1 Laporan	70,309,250	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor			**76,200,000**				**83,820,000**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	14 unit	35,525,000	DAU		14 unit	39,077,500	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1 unit	16,655,000	DAU		1 unit	18,320,500	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	27 unit	24,020,000	DAU		27 unit	26,422,000	

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting

1. Fokus kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik adalah mendukung peningkatan persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi, mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, mendukung peningkatan partisipasi ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan, mendukung penurunan kasus konflik serta mendukung persentase konflik sosial yang ditangani, dengan ruang lingkup tugas mencakup deteksi dini potensi gejolak yang mengancam keamanan dan keutuhan bangsa, pemantapan pemahaman demokrasi masyarakat serta upaya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
2. Beratnya beban tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tidak relevan dengan anggaran yang dialokasikan. Untuk tahun 2024, anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 55,216,918,964,-** (*Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) untuk menunjang program program urusan dengan target kinerja yang tinggi, yakni peningkatan persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, peningkatan partisipasi ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan, penurunan kasus konflik serta persentase konflik sosial yang ditangani, yang idealnya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dari segala aspek.
3. Hingga tahun kelima RPJMD 2016–2021, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan kegiatan pencegahan dini dan deteksi dini yang dilakukan sebatas mencakup pelaksanaan berupa sosialisasi dan pembekalan, rapat rapat koordinasi terkait isu strategis daerah, serta pemantauan ke lapangan untuk menghimpun data faktual. Keterbatasan anggaran juga membuat Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat tidak leluasa melakukan inovasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program kerja,

serta tidak memadai utuk melengkapi peralatan pendukung tugas, khususnya untuk kepentingan pemantauan (intelijen), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pun belum maksimal dilakukan, karena keterbatasan ruang gerak dan dukungan sumber daya.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, lembaga asing di daerah pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri.
2. Tugas tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan melaksanakan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berupa penghimpunan data dan kondisi faktual yang dikoordinasikan dengan kesbangpol kabupaten atau jajaran terkait di daerah.
3. Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan sejumlah pembekalan dan sosialisasi untuk pemantapan pemahaman aparatur maupun masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Simpang Empat, Juli 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DEFI IRAWAN, S.Pd
PEMBINA TK.I/ IVb
NIP. 196604031991031009

PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT

DOKUMEN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KINALI
Tahun 2024

Kinali sayang tak sudah - 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Tahun 2024 telah selesai disusun dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kinali Tahun 2024 ini secara teknis mempedomani kaidah-kaidah peyusunan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rancangan Renja Kecamatan Kinali tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan penyelenggaran pemerintahan umum.

Rencana Kerja Kecamatan Kinali Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan kecamatan yang berisi tujuan, sasaran, target capaian dan indikator kinerja sampai dengan perencanaan dan penganggaran tahun 2024. Dokumen Renja tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahapan pembangunan selanjutnya seperti, penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Anggaran Kecamatan Kinali tahun 2024 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Rencana Kerja Kecamatan Kinali tahun 2024 ini.

Kinali, 20 Juni 2023

CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

SAPARUDDIN, S.Ag
Penata Tk I/III.d
NIP. 19780110 200801 1 003

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I :	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II :	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kinali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kinali	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	25
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Kinali	26
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III :	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	32
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kinali	33
	3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV :	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	36
BAB V :	**PENUTUP**	51
Lampiran 1		

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023 Kecamatan Kinali	11
Tabel 2.2	Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021	19
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	28
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Kinali Tahun 2024	35
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kinali	38

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (*guideline*) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan yang merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Mengingat Renja merupakan bagian dari RKPD, dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJM Nasional, RKP Tahun 2024, RPJP Kabupaten Pasaman Barat, RPJPD Kabupaten pasaman Barat, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, dan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024. Penyusunan Renja OPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal Renja, rancangan Renja, rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Nagari. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (*buttom up planning* , komprehensif, mengakomodir berbagai

kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya Kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Kecamatan Kinali memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kecamatan Kinali serta bentuk sinergitas program dan kegiatan antara jenjang pemerintah, pemerintah daerah dan kecamatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan kecamatan, program pembangunan, kegitan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta penyusunan KUA dan PPAS serta DPA Kecamatan Kinali;
4. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pasanam Barat tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Latar Belakang

1.1 Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD.

Landasan Hukum

1.2 Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan

1.3 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

Sistematika Penulisan

1.4 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, yang disesuaikan menurut OPD masing-masing, dengan format Tabel T-C.30

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable DevelopmentGoals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Kinali*

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5 Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 *Program dan Kegiatan*

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian SDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kinali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kinali

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1.2.Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1.4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1.5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   2.2.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
   3.1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Kinali tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Kinali tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Kinali pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kinali tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Kecamatan Kinali pada tahun 2022 Serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2022
Kecamatan Kinali

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
I	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**89%**	**80%**	**87%**	**95,55%**	**110%**	**100%**	**90%**	**90%**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan publik	89%	95%	100%	96,97%	96,97%	100%	90%	90%	
a	*Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan (PATEN)*	**89%**	1 tahun	*1 tahun*	*1 tahun*	96,970%	100%	95%	95%	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian kinerja pelayanan publik pelimpahan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	94,12%	94,12%	100%	90%	90%	
a	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan*	*Jumlah Fasilitasi Pemungutan Pendapatan Daerah (PAD) yang dilimpahkan kepada kecamatan*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 tahun*	94,12%	100%	90%	90%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
II	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,62%**	**99,62%**	**100%**	**95%**	**95%**	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kinerja pemberdayaan masyarakat\ desa dalam pembangunan	100%	95%	100%	99,62%	99,62%	100%	95%	95%	
a	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan*	*1 kali*	1 kali	*1 kali*	*1 kali*	100%	1 keg	1 keg	100%	
b	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah faslitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (PKK)*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 tahun*	*99,24%*	*1 keg*	*1 keg*	100%	
III	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Trantibum yang difasilitasi**	**100%**	95%	-	-	-				Tidak dimuat dalam Renja 2023
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	95%	-	-	-				Tidak dimuat dalam Renja 2023
a	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah fasillitasi penyelenggaraan trantibum bersama Forkompimca*	*1 tahun*	-	-	-	-				Tidak dimuat dalam Renja 2023

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
IV	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa**	**100%**	95%	**100%**						Tidak dimuat dalam Renja 2023
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan administrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa	100%	-	-	-	-				Tidak dimuat dalam Renja 2023
a	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah fasilitasi dan verifikasi pencairan keuangan dana nagari*	*1 tahun*	-	-	-	-				Tidak dimuat dalam Renja 2023
V	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	95%	**100%**		95%	100%	90%	90%	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)	100%	100%	100%	98,15%	98,15%	100%	95%	95%	
a	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta*	*Jumlah fasilitasi terhadap Tim Paskibraka Kecamatan*	*100%*	*1 kali*	*100%*	*100%*	*100%*	1 kali	1 kali	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
b	*Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	*Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ*	*2 kali*	2 kali	*2 kali*	*2 kali*	96,29%	2 kali	2 kali	100%	
VI	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**		95%	**100%**		95%	100%	95%	95%	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Kinali	**100%**	95%	100%	98,33%	98,33%	100%	95%	95%	
a	*Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN Kecamatan Kinali*	100%	13 bulan	*14 bulan*	*14 bulan*	100%	100%	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
b	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah penyediaan penunjang operasional kecamatan dan penyediaan belanja honorarium PTT/THL*	*13 bulan*	95%	*1 tahun*	1 tahun	95%	20 orang	20 orang	100%	
c	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah pemenuhan honorarium pengelola keuangan*	*1 tahun*	*12 bulan*	*12 bulan*	*12 bulan*	100%	*5 orang*	5 orang	100%	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta diklat/bimtek	*12 bulan*	4 orang	-	-	-	100%	90%	90%	Tidak dimuat dalam Renja 2023
a	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan*	*Jumlah ASN yeng mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai*	5 orang	4 orang	-	-	-	10 orang	5 orang	50%	Tidak dimuat dalam Renja 2023
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	*5 orang*	95%	100%	99,36%	99,360%	100%	95%	95%	
a	*Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor*	*Jumlah penyediaan komponen listrik kantor*	100%	1 paket	*1 paket*	*1 paket*	99,360%	1 paket	1 paket	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
b	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*1 paket*	*12 bulan*	*12 bulan*	*12 bulan*	99,67%	*1 paket*	1 paket	100%	
c	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 paket*	*1 paket*	98,29%	*60 cetakan*	20 cetakan	66%	
d	*Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 tahun*	*1 tahun*	97,96%	*230 kali*	200 kali	87%	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit ;	8 unit ;	8 unit ;	*8 unit*	99,61%	*100%*	85%	85%	
a	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor*	*8 unit*	8 unit ;	*8 unit*	*8 unit*	99,61%	5 unit	5 unit	100%	
b	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	-		-	-	-	*1 paket*			Tidak dimuat dalam Renja 2023
c	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	-		-	-	-	*1 paket*			Tidak dimuat dalam Renja 2023
5	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang oprasional kantor	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
a	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik*	*12 bulan*	*12 bulan*	*12 bulan*	*12 bulan*	100,0%	*12 bulan*	12 bulan	100%	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik kanntor	100%	95%	100%	79,68%	79,68%	100%	90%	90%	
a	*Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas*	*12 bulan*	95%	*12 bulan*	*12 bulan*	79,68%	*8 unit*	8 unit	100%	

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Tabel 2.2.

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE
			ANGGARAN	REALISASI	
	2	3	4	5	6
I	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**10.850.000**	**10.250.000**	***94,47%***
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan publik	*1.500.000*	*1.450.000*	*96,67%*
a	*Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan (PATEN)*	*1.500.000*	*1.450.000*	*96,67%*
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan	*9.350.000*	*8.800.000*	*94,12%*
a	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan*	*9.350.000*	*8.800.000*	*94,12%*
II	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**36.115.000**	**35.864.800**	**99,31%**
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kinerja pemberdayaan masyarakat\ desa dalam	36.115.000	35.864.800	99,31%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE
			ANGGARAN	REALISASI	
	2	3	4	5	6
		pembangunan			
a	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan*	3.300.000	3.300.000	100%
b	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah faslitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (PKK)*	32.815.000	32.564.800	99,24%
III	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**104.495.000**	**101.225.000**	**96,87%**
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)	104.495.000	101.225.000	96,87%
a	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah fasilitasi terhadap Tim Paskibraka Kecamatan*	16.300.000	16.300.000	100%
B	*Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	*Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ*	88.195.000	84.925.000	96,29%
IV	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**1.193.837.492**	**1.081.366.105**	**90,58%**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Kinali	*688.645.000*	*584.065.000*	*84,92%*
a	*Penyediaaan Gaji dan*	*Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN*	555.942.700	550.631.528	99,04%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE
			ANGGARAN	REALISASI	
	2	3	4	5	6
	Tunjangan ASN	*Kecamatan Kinali*			
B	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah penyediaan penunjang operasional kecamatan dan penyediaan belanja honorarium PTT/THL*	244.400.000	244.400.00	100%
c	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah pemenuhan honorarium pengelola keuangan*	55.620.000	55.620.000	100%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta diklat/bimtek	*0*	*0*	*0%*
a	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan*	*Jumlah ASN yeng mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai*	0	0	0%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	166.579.742	163.550.505	98,18%
a	*Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor*	*Jumlah penyediaan komponen listrik kantor*	*1.731.530*	*1.720.500*	*99,36%*
b	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*19.110.200*	*19.048.800*	*99,76%*
C	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan*	*5.860.012*	*5.760.000*	*98,29%*
d	*Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi*	*139.874.000*	*137.022.005*	*97,96%*
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	7.579.250	7.550.000	99,61%
A	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor*	*7.579.250*	*7.550.000*	*99,61%*
5	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang oprasional kantor	7.225.000	7.225.000	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE
			ANGGARAN	REALISASI	
	2	3	4	5	6
A	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik*	*7.225.000*	*7.225.000*	*100%*
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik kanntor	*23.788.500*	*18.955.600*	*79,68%*
A	*Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas*	23.788.500	18.955.600	79,68%
JUMLAH			**1.345.837.492**	**1.081.366.105**	**90,58%**

Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Beberapa faktor yang mengakibatkan target program dan kegiatan serta sub kegiatan tidak terlaksana dengan baik, diantaranya:

- Bangunan gedung kantor yang sudah lama dan mengalami kerusakan, sehingga ikut melemahkan semangat kerja pegawai
- Kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang maksimalnya penyelenggaran kegiatan administrasi perkantoran.
- Sarana dan prasarana pelayanan Adminduk mengalami kerusakan
- Anggaran yang sangat minim untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik.
- Pandemi covid-19 yang masih melanda sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran untuk kecamatan

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD

1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Profesional
3. Indeks Kepatuhan pelayanan publik

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Perlu peningkatan sumberdaya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan, sehingga sebanding dengan beban kerja yang semakin meningkat
   - Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur
   - Perlunya rehabilitasi ruang rapat/aula yang lebih representatif
   - Perlunya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi di setiap bidang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Perlu penambahan anggaran, sehingga terpenuhinya Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan mesin
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - Perlu anggaran untuk peningkatan kapaitas SDM aparatur guna peningkatan semangat kerja
4. Program Fasilitasi Penguat Peran Kecamatan
   - Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
   - Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran terutama dalam memberikan Pelayana Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   - Perlu adanya pembinaan Organisasi Wanita dalam Pembangunan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Kinali merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Kinali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Kinali ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Kinali.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Kinali, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kinali dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja, diantaranya meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kinali dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnyadengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja sasaran kecamatan dapat dilihat dari aspek sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;

3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Adapun kinerja Pelayanan Kecamatan Kinali tahun 2023 terdiri dari 4 Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur yang dipelihara
   - Persentase rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi yang diikuti
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - Jumlah ASN yang mengikuti bimtek
4. Program Fasilitasi Penguat Peran Kecamatan
   - Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan
   - Jumlah Kegiatan MTQ yang difasilitasi
   - Persentase kepemilikan Adminduk
   - Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sosial Pemerintah
   - Jumlah Organisasi Wanita dalam pembangunan yang dibina
   - Persentase pencapaian target PBB
   - Jumlah Kegiatan PHBN yang difasilitasi
   - Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan Tim Ramadhan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah Kecamatan. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Menyediakan sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dan sumber daya keprofesionalan.
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan, sehingga tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin meningkat ;
3. Meningkatkan kualitas sebagian sumberdaya aparatur Pemerintahan;
4. Karena ketersediaan anggaran yang belum memadai, maka dalam melakukan program pembangunan peran serta masyarakat diikutsertakan;
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi ;
6. Meningkatkan pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar OPD, baik antar Kabupaten dengan kecamatan, maupun di tingkat bawah dengan nagari-nagari ;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran terutama dalam memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Kinali*

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten pasaman Barat tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kinali Tahun 2021–2026. Program dan Kegiatan pada rancangan awal Renja Kecamatan Kinali tahun 2024 ini mengacu sepenuhnya pada program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kinali tahun ke-4 (tahun 2024). Namun pada Rancangan Akhir Renja tahun 2024 ini, terdapat beberapa program dan kegiatan pada rancangan awal yang tidak direncanakan mengingat pagu alokasi yang tidak tersedia serta indikator kinerja yang tidak signifikan untuk menunjang tujuan pembangunan kecamatan.

Kecamatan Kinali Kabupaten pasaman Barat dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kinali dituntut untuk siap dan sanggup

membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang langsung diajukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalan subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU (Rp.)	OPD TUJUAN
BIDANG INFRASTRUKTUR									
1	Perbaikan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jembatan Gantung	Pembangunan Jembatan	Jorong Limpato, Kab. Pasaman Barat	200 m	1.500.00.000	Dinas PUPR
2	Perbaikan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan TPT Sungai dan Pembangunan Kawasan Muaro Mandiangin	Pembangunan TPT Sungai	Jorong Mandiangin, Kab. Pasaman Barat	1 paket	2.000.000.000	Dinas PUPR
3	Perbaikan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jembatan Batang Masang	Pembangunan Jembatan	Jorong Katiagan Kab. Pasaman Barat	1 paket	2.000.000.000	Dinas PUPR
4	Peningkatan Konektivitas Antar-Wilayah	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan TPT Sungai	Pembangunan TPT Sungai	Jorong Mudiak Labuah, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas PUPR

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU (Rp.)	OPD TUJUAN
5	Peningkatan Konektivitas Antar-Wilayah	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Jembatan Pertupangan	Pembangunan Jembatan	Jorong Langgam Saiyo, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas PUPR
6	Peningkatan Konektivitas Antar-Wilayah	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Jorong Tandikek, Kab. Pasaman Barat	1 paket	1.500.000.000	Dinas PUPR
7	Perbaikan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Silambau Jorong Langgam Sepakat, Kab. Pasaman Barat	1,2 km		Dinas PUPR
8	Peningkatan Konektivitas Antar-Wilayah	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Jorong Ampek Koto, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas PUPR
9	Peningkatan Konektivitas Antar-Wilayah	Pengentasan Kemiskinan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan (Non Status)	Pembangunan Jalan	Jorong Koto Gadang, Kab. Pasaman Barat	1 km	1.000.000.000	Dinas PUPR
10	Peningkatan Konektivitas Antar-Wilayah	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Lubuk Karak Jorong Langgam, Kab. Pasaman Barat	2 km		Dinas PUPR

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU (Rp.)	OPD TUJUAN
BIDANG EKONOMI									
1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Pengembangan Sarana Pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Basung Indah Jorong Langgam, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Peningkatan SDM Pertanian	Pelatihan olahan pangan	Pelatihan olahan pangan	Air Meruap Jorong Sigunanti, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
3	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Peningkatan SDM Pertanian	Pelatihan Petani/Peternak	Pelatihan Petani/Peternak	jorong mudiak labuah, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Peningkatan SDM Pertanian	Pelatihan Petani/Peternak	Pelatihan Petani/Peternak	Mudiak Labuah, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Program Peningkatan SDM Pariwisata	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Air Meruap Jorong Sigunanti, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas Pariwisata

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU (Rp.)	OPD TUJUAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA									
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah Tingkat SD	Pembangunan Pagar Sekolah Tingkat SD	Kampung Kurai Jorong Sigunanti, Kab. Pasaman Barat	1 paket		Dinas Pendidikan
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pembangunan sarana Prasarana olahraga	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki)	PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki)	Mudiak Labuah, Kab. Pasaman Barat	1 unit	400.000.000	Dinas Pemuda Olahraga
3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya	Program pengembangan kebudayaan	Pengadaan alat kesenian sanggar	Pengadaan alat kesenian sanggar	Langgam Sepakat, Kab. Pasaman Barat	1 paket	40.500.000	Dinas Pariwisata
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan RKB SD	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	Kampung Kurai Jorong Anam Koto Utara, Kab. Pasaman Barat	1 unit	159.700.000	Dinas Pendidikan
5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat yang Agamais dan Berbudaya	Sekretariat Daerah	Bantuan Dana Renovasi/ Pembangunan serta Perlengkapan Pondok Tahfizd	Pembangunan serta Perlengkapan Pondok Tahfizd	Mudiak Labuah, Kab. Pasaman Barat	1 unit		Sekretariat Daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 mempedomani tema dan sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2024, serta memperhatikan Rencana pembangunan jangak menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021.

Dampak terjadinya pandemi global *Covid-19* dan perlambatan ekonomi nasional dan dunia sangat terasa pada arah pembangunan daerah yang akan datang. Penurunanan perekonomian global mengakibatkan ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah pada tahun 2020 hingga 2022 menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kebangkitan ekonomi nasional masih menjadi perhatian dalam penentuan tema pembangunan pemerintah pada RKP 2024.

Memeperhatikan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan memperhatikan kondisi factual terkini, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, ditetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun fokus pembangunan tahun 2024 dijabarkan dalam Prioritas Nasional:

1. Prioritas Nasional 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan.
2. Prioritas Nasional 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Prioritas Nasional 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Prioritas Nasional 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. Prioritas Nasional 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Prioritas Nasional 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan, setelah ditetapkan tema pembangunan pemerintah sebagaimana pada RKP tahun 2024, memperhatikan tema pembangunan daerah (RKPD) Propinsi Sumatera Barat

tahun 2024 “Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan tema pembangunan RKPD Tahun 2024 adalah ” Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berketahanan”, dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan diantaranya:

1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan
2. Peningkatan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana
3. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian peternakan dan perikanan
4. Pengentasan kemiskinan
5. Mendorong pertumbuhan dan pemulihan dunia usaha dan ekonomi kreatif,
6. Peningkatan pengamalan ajaran agama
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Kecamatan sebagai perangkat kewilayahan mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kinali

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada *logical framework* (cascading) yang telah disusun berdasarkan fungsi Kecamatan dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi I RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditetapkan 3 (tiga) tujuan strategis pembangunan Kecamatan Kinali Tahun 2016-2021.

Setelah ditetapkan tujuan, maka diturunkan menjadi sasaran. Sasaran kecamatan ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, berfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat dikukur dan dapat diwujudkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu satu tahun.

Maka secara rinci tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Kinali Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan
			Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kinali memiliki 6 (enam) Program, 12 (duabelas) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publilk Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			3. Program Koordinasi Ketentra	4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
			man dan Ketertiban Umum	Umum
			4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah 10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 11. Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Kecamatan Kinali untuk tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**.**

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Kinali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KECAMATAN KINALI						**1.176.131.475,00**							**1.558.341.767,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**895.301.500,00**							**1.229.856.967,00**
	7,01	**KECAMATAN**						**895.301.500,00**							**1.229.856.967,00**
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**735.291.500,00**						**100 %**	**921.751.334,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Kinali* *Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Kinali*	100 %			100 % 100 %	589.800.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	638.528.000,00
	7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	532.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		585.608.000,00
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	57.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		52.920.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran*	100 %			100 %	130.471.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	203.367.067,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.380.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		1.496.680,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	53.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerahyang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tatakelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	11.825.640,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	129.038.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		190.044.747,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor*	48 unit			8 unit	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	8 unit	30.066.992,00
	7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	5 Unit	30.066.992,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang oprasional kantor*	100 %			100 %	8.670.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	19.789.275,00
	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	8.670.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Laporan	19.789.275,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	6.350.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerahyang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tatakelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	30.000.000,00
	7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	6.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		30.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 % 95 %**			**85.7 Nilai**	**6.760.000,00**						**100 % 86 %**	**30.445.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase capaian kinerja pelayanan publik*	100 % 100 %			100 %	2.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 % 100 %	25.000.000,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase capaian kinerja pelayanan publik pelimpahan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	4.160.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	5.445.000,00
	7.01.02.2.04 .0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	4.160.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		5.445.000,00
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa***	**100 %**			**100 %**	**48.450.000,00**						**100 %**	**37.925.800,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kinerja pemberdayaan masyrakatan desa dalam pembanguan*	100 %			100 %	43.750.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	31.655.800,00
	7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	43.750.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		31.655.800,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.700.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	Masyar akat	-	6.270.000,00
	7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	4.700.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		6.270.000,00
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat***	**100 %**			**100 %**	**2.800.000,00**						**100 %**	**6.555.000,00**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 %			-	2.800.000,00			-	-	-	100 %	6.555.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.555.000,00
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**96.600.000,00**						**-**	**206.559.833,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)*	-			100 %	96.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerahyang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tatakelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	-	206.559.833,00
	7.01.05.2.01 .0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	37.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		140.559.833,00
	7.01.05.2.01 .0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				2 Dokumen	59.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		66.000.000,00
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa***	**100 %**			**100 %**	**5.400.000,00**						**100 %**	**26.620.000,00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Nagari yang dibina dan diawasi Persentase pembinaan administrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa*	100 %			100 % 100 %	5.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	26.620.000,00
	7.01.06.2.01 .0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen			8 Dokumen	5.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Dokumen	26.620.000,00
	X	**NON URUSAN**						**280.829.975,00**							**328.484.800,00**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**280.829.975,00**							**328.484.800,00**
1	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**280.829.975,00**						**100 %**	**328.484.800,00**
	X.XX.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Kinali Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Kinali*	100 %			100 %100 %	257.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerahyang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tatakelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	266.500.000,00
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	257.400.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		266.500.000,00
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah peserta diklat/bimtek* *Jumlah peserta diklat/bimtek*	30 orang			5 orang 5 orang	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Perluasan Kesempatan Kerja	-	5 orang	30.000.000,00
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Perluasan Kesempatan Kerja	-		30.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran*	100 %			100 %	23.429.975,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	31.984.800,00
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	23.429.975,00	- Kab. Pasaman Barat, Kinali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-		31.984.800,00
	J U M L A H							**1.176.131.475,00**							**1.558.341.767,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kinali Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada pada Kecamatan Kinali.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 di Kecamatan Kinali. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini bergantung kepada alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 serta dibutuhkan kerjasama semua pihak/*stakeholder* yang terkait untuk terwujudnya pembangunan di Kecamatan Kinali.

Tentu saja, dokumen ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana kerja di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kinali Tahun 2024 ini yang dapat kami susun, semoga Rencana Kerja menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Kinali Tahun 2024.

Kinali, 20 Juni 2023

CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

SAPARUDDIN, S.Ag
Penata Tk I/III.d
NIP. 19780110 200801 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah sebagai usaha mewujudkan *good governance*, dibutuhkan adanya seperangkat pedoman penyelenggaraan administrasi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, baik secara kelembagaan maupun dalam kegiatan tim kerja.Melalui program-program yang diusulkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini, Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie bermaksud untuk memaksimalkan langkah kerja sesuai fungsi, wewenang dan tugas pokok dari Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Syukur Alhamdulillah, Akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie tahun 2024.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Sasak, Juni 2023

C A M A T

YENI TUNIDA, S.Pd, M.Si
NIP. 19680201 199005 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		**i**
Daftar Isi		**ii**
BAB I	**Pendahuluan**	**1**
	1.1 Latar Belakang	**1**
	2.1 Landasan Hukum	**3**
	3.1 Maksud Dan Tujuan	**5**
	4.1 Sistematika Penulisan	**6**
BAB II	**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu**	**9**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kantor Camat	**9**
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Opd	**13**
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd	**14**
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	**15**
BAB III	**Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**	**21**
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	**21**
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Opd	**22**
	3.3 Program Dan Kegiatan	**23**
BAB IV	**Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**	**25**
	Program Dan Kegiatan	**25**
BAB V	**Penutup**	**37**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 –2025 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan

dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2021 Tahun 2026 memuat tentang rencana pembangunan jangka menengah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, Lintas satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Nagari. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing), komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja OPD merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan kabupaten.

Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang Beriman, Bermartabat, Sejahtera, Cerdas dan berwawasan Lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi-fungsi yang diemban oleh Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie adalah :
   - Sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat wewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
   - Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Nagari serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing Nagari sesuai kewenangannya.
   - Untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie adalah :
   - Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dan bersih.
   - Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan.
   - Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun Nagari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Memuat factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD.

BAB V : PENUTUP

5.1 Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie tahun 2024 memuat pencapaian target kinerja tahun 2024 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2024. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie tahun 2024 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2024), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie pada tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2024) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD:
Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2024		Cat
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai(termasuk PTT dan THL)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adminstrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		administrasi dan operasional perkantoran									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan layanan Jasa Penunjang operasional Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 Nilai**	**85,7 Nilai**	**86 Nilai**	**85,7 Nilai**	**86 Nilai**	**85,7 Nilai**	**86 Nilai**	**85,7 Nilai**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan desa yang dioordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman umum yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase nagari yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (PHBN, PHBI, MTQ)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Sasak Ranah Pasisie ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran. Sedangkan ijin HO dan IMB yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih relatif kecil. Hal tersebut karena masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus ijin-ijin tersebut dan ini menjadi tantangan pemerintah kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kecamatan.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD teknis. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sementara pada saat yang sama dukungan anggaran kecamatan masih belum berbanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan OPD setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan capaian ideal di masa-masa mendatang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dalam bidang kegiatan OPD dapat diidentifikasi permasalahan dan menjadi isu penting sebagai berikut :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sasak Ranah Pasisie belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang.
4. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.
5. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.
6. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dll sumber daya keprofesionalan.
7. Wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang cukup luas dan masih lemahnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai ;

Selain dari keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

Tabel. T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan kecamatan Yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP Kecamatan	C	B	B	B	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Level Maturitas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kecamatan	Persentase terpenuhinya Pelayanan publik Kecamatan	91,17 %	94,06 %	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Aan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase Peningkatan Intensifikasi PBB	81%	84%	85%	85%	86%	88%

TABEL 6.1 / T-C. 27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penangnggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publilk Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	S.1.1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78%		80%		82%		85%		88%		89%		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84,5 Ikm**	**10.000.000**	**85.Ikm**	**11.000.000**	**85.7 Ikm**	**12.100.000**	**86 Ikm**	**13.310.000**	**86 Ikm**	**14.641.000**	**86 Ikm**	**61.051.000**	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan publik	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.100.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	32.100.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan (PATEN)*		*6.000.000*		*6.000.000*		*6.100.000*		*7.000.000*		*7.000.000*		*32.100.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian kinerja pelayanan publik pelimpahan pemerintahan daerah	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	6.310.000	100%	7.641.000	100%	28.951.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	*Jumlah Fasilitasi Pemungutan Pendapatan Daerah (PAD) yang dilimpahkan kepada kecamatan*		*4.000.000*		*5.000.000*		*6.000.000*		*6.310.000*		*7.641.000*		*28.951.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**32.000.000**	**100%**	**35.200.000**	**100%**	**38.720.000**	**100%**	**42.592.000**	**100%**	**46.851.200**	**100%**	**195.363.200**	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kinerja pemberdayaan masyarakat\ desa dalam pembangunan	100%	32.000.000	100%	35.200.000	100%	38.720.000	100%	42.592.000	100%	46.851.200	100%	396.831.500	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan*		*10.000.000*		*8.000.000*		*8.500.000*		*12.000.000*		*10.000.000*		*48.500.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah faslitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (PKK)*		*22.000.000*		*27.200.000*		*30.220.000*		*30.592.000*		*36.851.200*		*146.863.200*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Trantibum yang difasilitasi**	**100%**	**4.500.000**	**100%**	**4.950.000**	**100%**	**5.445.000**	**100%**	**5.989.500**	**100%**	**6.588.450**	**100%**	**27.472.950**	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	4.500.000	100%	4.950.000	100%	5.445.000	100%	5.989.500	100%	6.588.450		27.472.950	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah fasillitasi penyelenggaraan trantibum bersama Forkompimca*		*4.500.000*		*4.950.000*		*5.445.000*		*5.989.500*		*6.588.450*		*27.472.950*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa**	**100%**	**13.000.000**	**100%**	**14.300.000**	**100%**	**15.730.000**	**100%**	**42.303.000**	**100%**	**35.933.300**	**100%**	**121.266.300**	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan administrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa	100%	13.000.000	100%	14.300.000	100%	15.730.000	100%	42.303.000	100%	35.933.300	100%	121.266.300	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*		*0*		*0*		*0*		*25.000.000*		*25.000.000*		*50.000.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*		*6.000.000*		*7.000.000*		*7.730.000*		*7.303.000*		*933.300*		*28.966.300*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*		*7.000.000*		*7.300.000*		*8.000.000*		*10.000.000*		*10.000.000*		*42.300.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
T. 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%		100%		100%		100%				**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
	S.2.1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%		100%		100%		100%				**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**80.000.000**	**100%**	**88.000.000**	**100%**	**96.800.000**	**100%**	**106.480.000**	**100%**	**117.128.000**	**100%**	**488.408.000**	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	100%	117.128.000	100%	488.408.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ*		*80.000.000*		*88.000.000*		*96.800.000*		*106.480.000*		*117.128.000*		*488.408.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
T.3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih			**Nilai SAKIP Kecamatan**	B		B		B		BB		BB		BB		
			Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	S.3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		**Nilai SAKIP Kecamatan**	B		B		B		BB		BB		BB		
			Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.098.850.000**	**100%**	**1.120.827.000**	**100%**	**1.143.243.540**	**100%**	**1.166.108.411**	**100%**	**1.189.430.579**	**100%**	**5.718.459.530**	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	100%	776.528.000	100%	776.528.000	100%	786.528.000	100%	796.528.000	100%	816.528.000	100%	3.952.640.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN Kecamatan Sasak Ranah Pasisie*		*505.608.000*		*505.608.000*		*511.192.000*		*511.192.000*		*531.428.000*		*2.565.028.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah penyediaan penunjang operasional kecamatan dan penyediaan belanja honorarium PTT/THL*		*217.100.000*		*217.100.000*		*217.100.000*		*225.336.000*		*217.100.000*		*1.093.736.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah pemenuhan honorarium pengelola keuangan*		*53.820.000*		*53.820.000*		*58.236.000*		*60.000.000*		*68.000.000*		*293.876.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta diklat/bimtek	100%	29.680.000	100%	32.648.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	152.328.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	*Jumlah ASN yeng mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai*		*29.680.000*		*32.648.000*		*30.000.000*		*30.000.000*		*30.000.000*		*152.328.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	209.402.000	100%	214.414.854	100%	239.205.519	100%	241.705.519	100%	244.710.156	100%	1.149.438.048	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan komponen instalansilistrik/penerangan bangunan kantor	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*		*2.000.000*		*2.500.000*		*3.500.000*		*3.000.000*		*3.000.000*		*14.000.000*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*		*25.984.800*		*77.000.000*		*75.000.000*		*77.000.000*		*77.000.000*		*331.984.800*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*		*7.825.640*		*10.008.204*		*15.000.000*		*16.000.000*		*19.000.000*		*67.833.844*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*		*173.591.560*		*175.921.850*		*190.705.519*		*190.705.519*		*190.710.519*		*921.634.967*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	100%	45.000.000		58.296.146	100%	35.000.000		44.374.892	100%	34.692.423	100%	217.363.461	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor*		*45.000.000*		*58.296.146*		*35.000.000*		*44.374.892*		*34.692.423*		*217.363.461*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang oprasional kantor	100%	7.800.000	100%	8.500.000	100%	17.510.021	100%	18.500.000	100%	18.500.000	100%	70.810.021	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik*		*7.800.000*		*8.500.000*		*17.510.021*		*18.500.000*		*18.500.000*		*70.810.021*	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik kanntor	100%	30.440.000	100%	30.440.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	175.880.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas*		*30.440.000*		*30.440.000*		*35.000.000*		*35.000.000*		*45.000.000*		175.880.000	**Kec. Sasak Ranah Pasisie**

BAB III

TUJUAN, SASARAN KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ada 7 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yakni:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititik beratkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititik beratkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualialitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktifitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5) Memperkuat insfrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2016-2021) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Berdasarkan misi Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Level Maturitas SPIP	-	2	2	3	3	3
		Nilai WBK-WBBM						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	96%	97%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 6 (Enam) Program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) Kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Peyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah.
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Keromendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Nomor 6 Tahun 2016 (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sasak Ranah Pasisie bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasaman Barat yang disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE KAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE						**928.190.332,00**							**1.377.142.911,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**928.190.332,00**							**1.377.142.911,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**928.190.332,00**							**1.377.142.911,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**835.932.832,00**						**100 %**	**1.166.108.411,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai (termasuk PTT dan THL)*	100 %			100 %	564.843.890,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN PTT dan THL	100 %	796.528.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Dokumen			13 Orang/bulan	361.763.890,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN PTT dan THL	5 Dokumen	511.192.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen			9 Dokumen	152.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN PTT dan THL	2 Dokumen	225.336.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Orang			20 Dokumen	50.580.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN PTT dan THL	50 Orang	60.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan administrasi kepegawaian*	100 %			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan PTT	100 %	30.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan PTT		30.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi dan operasional perkantoran*	100 %			100 %	190.338.482,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	100 %	241.705.519,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.499.050,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		4.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	28.876.782,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	31.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	13.675.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	16.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	144.287.650,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	190.705.519,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*	100 %			8 Unit	22.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyedia Barang dan Jasa	100 %	44.374.892,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	22.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyedia Barang dan Jasa		44.374.892,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor*	100 %			100 %	8.999.460,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyedia Barang dan Jasa	100 %	18.500.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.999.460,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyedia Barang dan Jasa		18.500.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan barang milik daerah*	100 %			100 %	39.751.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Kantor Camat	100 %	35.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	39.751.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Kantor Camat		35.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**86 Nilai**			**85.7 nilai**	**9.000.000,00**						**86 Nilai**	**13.310.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 %			100 %	4.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	100 %	7.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			5 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	5 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan*	12 Laporan			100 %	4.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Masyarakat	12 Laporan	6.310.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

												publik				
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan			12 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	12 Laporan	6.310.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa***	**100 %**			**100 %**	**20.300.000,00**						**100 %**	**42.592.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*persentase pemberdayaan desa yang dikoordinasikan*	100 %			100 %	20.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	100 %	42.592.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			2 Laporan	12.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	2 Laporan	30.592.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***persentase koordinasi dan trantibum yang difasilitasi***	**100 %**			**100 %**	**5.427.500,00**						**100 %**	**5.989.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*persentase upaya penyelenggaraan ketentraman umum yang dikoordinasikan*	100 %			100 %	5.427.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	100 %	5.989.500,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan			10 Laporan	5.427.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	10 Laporan	5.989.500,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum***	**100 %**			**100 %**	**34.300.000,00**						**100 %**	**106.840.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (PHBN, PHBI, MTQ)*	100 %			100 %	34.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	100 %	106.840.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	12.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		35.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				2 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	6.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		6.840.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**23.230.000,00**						**100 %**	**42.303.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*persentase nagari yang dibina dan diawasi*	100 %			100 %	23.230.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Nagari	100 %	42.303.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	8.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Nagari	5 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	7.730.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Nagari	5 Dokumen	7.303.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen			4 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Nagari	0 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
	J U M L A H							**928.190.332,00**							**1.377.142.911,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja kecamatan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan di tingkat pusat dan ditindaklanjuti dengan peraturan ditingkat daerah. Hal penting yang diperlukan adalah koordinasi antara instansi terkait serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan termasuk di dalamnya masyarakat. Proses penyusunan antara lain dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasikan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda yang diusulkan masyarakat dengan program kegiatan OPD tingkat kabupaten.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah dapat terwujud secara optimal.

Sasak, Juli 2023
C A M A T

YENI TUNIDA, S.Pd, M.Si
NIP. 19680201 199005 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
Jl. Banda Baru – Padang Halaban No. Telp. (0753)
Sasak – Pasaman Barat

KEPUTUSAN CAMAT SASAK RANAH PASISIE

No : 188/ 13 / KEP/ CRSP/VII-2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

CAMAT SASAK RANAH PASISIE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Sasak Ranah Pasisie.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisitem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daaerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan;

16. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Rencana Kerja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024

2. Rencana Kerja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sasak
Pada tanggal : Juli 2023

CAMAT,

YENI TUNIDA, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19680201 199005 2 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip.

Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2024

KANTOR CAMAT

KECAMATAN PASAMAN

KABUPATEN PASAMAN

KATA PENGANTAR

Untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah sebagai usaha mewujudkan *good governance*, dibutuhkan adanya seperangkat pedoman penyelenggaraan administrasi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, baik secara kelembagaan maupun dalam kegiatan tim kerja.Melalui program-program yang diusulkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini, Kantor Camat Pasaman bermaksud untuk memaksimalkan langkah kerja sesuai fungsi, wewenang dan tugas pokok dari Kantor Camat Kecamatan Pasaman.

Syukur Alhamdulillah, Akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kantor Camat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Kantor Camat Pasaman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Kantor Camat Pasaman tahun 2024.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Kecamatan Pasaman.

Simpang Empat, Juni 2023

C A M A T

JON ENDRI.S.ST.Pi
NIP. 19700115 199303 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		**i**
Daftar Isi		**ii**
BAB I	**Pendahuluan**	**1**
	1.1 Latar Belakang	**1**
	2.1 Landasan Hukum	**3**
	3.1 Maksud Dan Tujuan	**5**
	4.1 Sistematika Penulisan	**6**
BAB II	**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu**	**9**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kantor Camat	**9**
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Opd	**13**
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd	**14**
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	**15**
BAB III	**Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**	**21**
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	**21**
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Opd	**22**
	3.3 Program Dan Kegiatan	**23**
BAB IV	**Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**	**25**
	Program Dan Kegiatan	**25**
BAB V	**Penutup**	**37**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 –2025 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan

dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2021 Tahun 2026 memuat tentang rencana pembangunan jangka menengah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, Lintas satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Nagari. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing), komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja OPD merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan kabupaten.

Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Pasaman disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya Kecamatan Pasaman yang Beriman, Bermartabat, Sejahtera, Cerdas dan berwawasan Lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi

yang diemban oleh Kantor Camat Pasaman selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Pasaman perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Pasaman adalah :
   - Sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kantor Camat Kecamatan Pasaman dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat wewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
   - Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Pasaman dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Nagari serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing Nagari sesuai kewenangannya.
   - Untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kantor Camat Pasaman serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kantor Camat Kecamatan Pasaman adalah :
   - Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dan bersih.
   - Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan.
   - Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun Nagari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Memuat factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD.

BAB V : PENUTUP

5.1 Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Pasaman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Pasaman

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Kantor Camat Pasaman Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Pasaman tahun 2024 memuat pencapaian target kinerja tahun 2024 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2024. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Kantor Camat Pasaman tahun 2024 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2024), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Pasaman pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Camat Pasaman tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Kantor Camat Pasaman pada tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2024) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD:
Kantor Camat Pasaman

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2024		Cat
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kinerja pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	**23 Jorong**	**23 Jorong**	**23 Jorong**	**23 Jorong**	**100%**	**23 Jorong**	**23 Jorong**	**23 Jorong**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	23 Jorong	23 Jorong	23 Jorong	23 Jorong	100%	23 Jorong	23 Jorong	23 Jorong	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	100%	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase nagari yang dibina dan diawasi	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	100%	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Pasaman merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pasaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pasaman ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pasaman.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Pasaman, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran. Sedangkan ijin HO dan IMB yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih relatif kecil. Hal tersebut karena masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus ijin-ijin tersebut dan ini menjadi tantangan pemerintah kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pasaman dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pasaman dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;

2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kecamatan.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD teknis. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sementara pada saat yang sama dukungan anggaran kecamatan masih belum berbanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan OPD setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan berokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatan perhatian dan capaian ideal di masa-masa mendatang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Kecamatan Pasaman dalam bidang kegiatan OPD dapat diidentifikasi permasalahan dan menjadi isu penting sebagai berikut :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.

2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Pasaman belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang.
4. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.
5. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.
6. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dll sumber daya keprofesionalan.
7. Wilayah Kecamatan Pasaman yang cukup luas dan masih lemahnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai ;

Selain dari keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Kantor Camat Pasaman tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

Tabel. T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pasaman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan kecamatan Yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP Kecamatan	C	B	B	B	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Level Maturitas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kecamatan	Persentase terpenuhinya Pelayanan publik Kecamatan	91,17 %	94,06 %	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Aan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase Peningkatan Intensifikasi PBB	81%	84%	85%	85%	86%	88%

TABEL 6.1 / T-C. 27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penangnggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publilk Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	S.1.1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78%		80%		82%		85%		88%		89%		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**84,5 Ikm**	**26.000.000**	**85.Ikm**	**28.600.000**	**85.7 Ikm**	**31.460.000**	**86 Ikm**	**34.606.000**	**86 Ikm**	**38.066.600**	**86 Ikm**	**158.586.600**	**Kec. Pasaman**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan publik	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	16.000.000	100%	19.000.000	100%	20.000.000	100%	83.000.000	**Kec. Pasaman**
		Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan (PATEN)*		*14.000.000*		*14.000.000*		*16.000.000*		*19.000.000*		*20.000.000*		*83.000.000*	**Kec. Pasaman**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian kinerja pelayanan publik pelimpahan pemerintahan daerah	100%	12.000.000	100%	14.600.000	100%	15.460.000	100%	15.606.000	100%	18.066.600	100%	75.732.600	**Kec. Pasaman**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	*Jumlah Fasilitasi Pemungutan Pendapatan Daerah (PAD) yang dilimpahkan kepada kecamatan*		*12.000.000*		*14.600.000*		*15.460.000*		*15.606.000*		*18.066.600*		*75.732.600*	**Kec. Pasaman**
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**71.500.000**	**100%**	**78.650.000**	**100%**	**86.515.000**	**100%**	**95.166.500**	**100%**	**396.831.500**	**Kec.Pasaman**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kinerja pemberdayaan masyarakat\ desa dalam pembangunan	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	78.650.000	100%	86.515.000	100%	95.166.500	100%	396.831.500	**Kec. pasaman**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan*		*33.000.000*		*36.500.000*		*35.000.000*		*44.000.000*		*48.000.000*		*196.500.000*	**Kec. pasaman**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah faslitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (PKK)*		*32.000.000*		*35.000.000*		*43.650.000*		*42.515.000*		*47.166.500*		*200.331.500*	**Kec. pasaman**
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Trantibum yang difasilitasi**	**100%**	**5.000.000**	**100%**	**5.500.000**	**100%**	**6.050.000**	**100%**	**6.655.000**	**100%**	**7.320.500**	**100%**	**30.525.500**	**Kec. pasaman**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	6.050.000	100%	6.655.000	100%	7.320.500		30.525.500	**Kec. pasaman**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah fasillitasi penyelenggaraan trantibum bersama Forkompimca*		*5.000.000*		*5.500.000*		*6.050.000*		*6.655.000*		*7.320.500*		*30.525.500*	**Kec. pasaman**
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa**	**100%**	**18.000.000**	**100%**	**19.800.000**	**100%**	**21.780.000**	**100%**	**23.958.000**	**100%**	**26.353.800**	**100%**	**109.891.800**	**Kec. pasaman**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan administrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa	100%	18.000.000	100%	19.800.000	100%	21.780.000	100%	23.958.000	100%	26.353.800	100%	109.891.800	**Kec. pasaman**
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah fasilitasi dan verifikasi pencairan keuangan dana nagari*		*18.000.000*		*19.800.000*		*21.780.000*		*23.958.000*		*26.353.800*		*109.891.800*	**Kec. pasaman**
T. 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%		100%		100%		100%				
	S.2.1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%		100%		100%		100%				
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**86.120.000**	**100%**	**94.732.000**	**100%**	**104.205.200**	**100%**	**114.625.720**	**100%**	**126.088.292**	**100%**	**525.771.212**	**Kec. pasaman**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)	100%	86.120.000	100%	94.732.000	100%	104.205.200	100%	114.625.720	100%	126.088.292	100%	525.771.212	**Kec. pasaman**
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ*		*86.120.000*		*94.732.000*		*104.205.200*		*114.625.720*		*126.088.292*		*525.771.212*	**Kec. pasaman**
T.3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik dan Bersih			**Nilai SAKIP Kecamatan**	B		B		B		BB		BB		BB		
			Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	S.3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		**Nilai SAKIP Kecamatan**	B		B		B		BB		BB		BB		
			Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.247.096.914**	**100%**	**1.272.038.852**	**100%**	**1.297.479.629**	**100%**	**1.323.429.222**	**100%**	**1.349.897.806**	**100%**	**6.489.942.429**	**Kec. pasaman**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Pasaman	100%	900.788.514	100%	900.788.518	100%	903.786.264	100%	903.816.264	100%	906.786.264	100%	4.515.965.829	**Kec. pasaman**
		Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN Kecamatan pasaman*		*190.200.000*		*190.200.000*		*191.200.000*		*191.210.000*		*192.210.000*		*955.020.000*	**Kec. pasaman**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah penyediaan penunjang operasional kecamatan dan penyediaan belanja honorarium PTT/THL*		*52.920.000*		*52.920.000*		*53.920.000*		*53.930.000*		*54.930.000*		*268.620.000*	**Kec. pasaman**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah pemenuhan honorarium pengelola keuangan*		*657.668.514*		*657.668.518*		*658.666.264*		*658.676.264*		*659.646.264*		*3.292.325.829*	**Kec. pasaman**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta diklat/bimtek	100%	37.000.000	100%	47.000.000	100%	48.800.000	100%	67.000.000	100%	77.000.000	100%	274.100.000	**Kec. pasaman**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	*Jumlah ASN yeng mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai*		*37.000.000*		*25.200.000*		*27.000.000*		*45.200.000*		*55.200.000*		*186.900.000*	**Kec. pasaman**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*		-		*21.800.000*		*21.800.000*		*21.800.000*		*21.800.000*		*87.200.000*	**Kec. pasaman**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100%	237.053.400	100%	247.000.000	100%	235.200.000	100%	247.000.000	100%	247.000.000	100%	1.213.253.400	**Kec. pasaman**
		Penyediaan komponen instalansilistrik/penerangan bangunan kantor	*Jumlah penyediaan komponen listrik kantor*		*7.000.000*		*8.000.000*		*8.000.000*		*8.000.000*		*8.000.000*		*39.000.000*	**Kec. pasaman**
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	*Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*		*75.000.000*		*77.000.000*		*75.000.000*		*77.000.000*		*77.000.000*		*381.000.000*	**Kec. pasaman**
		Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi*		*155.053.400*		*162.000.000*		*152.200.000*		*162.000.000*		*162.000.000*		*793.253.400*	**Kec. pasaman**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	100%	17.400.000		0	100%	24.900.000		20.000.000	100%	21.900.000	100%	66.800.000	**Kec. pasaman**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor*		-				*24.900.000*		*20.000.000*		*21.900.000*		*66.800.000*	**Kec. pasaman**
		Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang oprasional kantor	100%	37.455.000	100%	37.450.334	100%	39.893.365	100%	47.812.958	100%	55.311.542	100%	217.923.199	**Kec. pasaman**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik*		*37.455.000*		*37.450.334*		*39.893.365*		*47.812.958*		*55.311.542*		*217.923.199*	**Kec. pasaman**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik kanntor	100%	17.400.000	100%	39.800.000	100%	44.900.000	100%	37.800.000	100%	41.900.000	100%	181.800.000	**Kec. pasaman**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas*		*17.400.000*		*19.900.000*		*24.900.000*		*28.900.000*		*31.900.000*		123.000.000	**Kec. Pasaman**
		Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	-	-		*19.900.000*		*20.000.000*		*8.900.000*		*10.000.000*		*58.800.000*	**Kec. Pasaman**

BAB III
TUJUAN, SASARAN KECAMATAN PASAMAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ada 7 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yakni:

1) Memperkuat ketahanan ekonimi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititik beratkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yan dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititik beratkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualialitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktifitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5) Memperkuat insfrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6) Membangun lingkunagn hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7) Memperkuat stabilitas politi, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2016-2021) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pasaman

Berdasarkan misi Kantor Camat Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Pasaman Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Kantor Camat Pasaman Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2024	2025
Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Level Maturitas SPIP	-	2	5	5	5	5
		Nilai WBK-WBBM						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.70%	91,17%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Pasaman berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 6 (Enam) Program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) Kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Peyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah.
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Keromendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Pasaman berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Nomor 6 Tahun 2016 (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kecamatan pasaman bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasaman Barat yang disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas Kegiatan) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PASAMAN						**1.677.268.147,00**							**1.589.788.942,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.677.268.147,00**							**1.589.788.942,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.677.268.147,00**							**1.589.788.942,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**-**			**100 Persen**	**1.225.468.147,00**						**-**	**1.323.429.222,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Kecamatan Pasaman*	-			100 Persen	936.270.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	903.816.264,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24/12 Orang/bulan	691.550.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		658.676.264,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	191.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		191.210.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	53.520.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		53.930.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Peserta diklat/bimtek*	-			100 Persen	42.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	67.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	21.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		21.800.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	21.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		45.200.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran*	-			100 Persen	150.498.147,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	247.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		8.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		77.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	95.498.147,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		162.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-			10 Unit	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor*	-			100 Persen	31.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	47.812.958,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		47.812.958,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan barang milik kantor*	-			100 Persen	44.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	37.800.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	24.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.900.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		8.900.000,00	KECAMATAN PASAMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**-**			**85,7 IKM**	**22.000.000,00**						**-**	**34.606.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Capaian Kinerja* *Pelayanan Publik*	-			100 Persen	12.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	19.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik Pelimpahan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	10.000.000,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	15.606.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		15.606.000,00	KECAMATAN PASAMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa***	**-**			**100 Persen**	**37.000.000,00**						**-**	**86.515.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Pesentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan*	-			100 Persen	37.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	86.515.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		44.000.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat *di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		42.515.000,00	KECAMATAN PASAMAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Koordinasi Trantibum yang difasilitasi***	**-**			**100 Persen**	**4.000.000,00**						**-**	**6.655.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi*	-			100 Persen	4.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	6.655.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.655.000,00	KECAMATAN PASAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**-**			**100 Persen**	**378.000.000,00**						**-**	**114.625.720,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)*	-			100 Persen	378.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	114.625.720,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	378.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		114.625.720,00	KECAMATAN PASAMAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintahan Desa***	**-**			**100 Persen**	**10.800.000,00**						**-**	**23.958.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pembinaan Administrasi dan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	10.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	23.958.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	10.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		23.958.000,00	KECAMATAN PASAMAN
	J U M L A H							**1.677.268.147,00**							**1.589.788.942,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Pasaman memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja kecamatan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan di tingkat pusat dan titindaklanjuti dengan peraturan ditingkat daerah. Hal penting yang diperlukan adalah koordinasi antara instansi terkait serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan termasuk di dalamnya masyarakat. Proses penyusunan antara lain dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasikan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda yang diusulkan masyarakat dengan program kegiatan OPD tingkat kabupaten.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kecamatan Pasaman selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah dapat terwujud secara optimal.

Simpang Empat, Juni 2023
C A M A T

JON ENDRI.S.ST.Pi
NIP. 19700115 199303 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN PASAMAN

Jl. M. Natsir – Simpang empat No. 169 Telp. (0753) 65717
Kode Pos 26366

KEPUTUSAN CAMAT PASAMAN

No : 065 / KEP/ C-PAS/2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

CAMAT PASAMAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengeah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah, Bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen

b. perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf 'a' diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3 Undang-undangNomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
20 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21 Surat Keputusan Camat Pasaman Nomor 900/42/SK/C-PAS/2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKA N

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan

Pasaman untuk periode 1 (ssatu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024

2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Simpang Empat
Padatanggal : Februari 2023

CAMAT,

JON ENDRI. S.ST.Pi
NIP. 19700115 199303 1 006

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala BPKD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah peranannya semakin penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangakan kebutuhan dan krakteristik yang dimiliki wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kecamatan Gunung Tuleh serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan kegiatan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran kebijakan, program pokok, kegiatan dan sub kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi dengan visi dan misi Kabupaten Pasaman Barat oleh kondisi daerah dan indikasi kegiatan pada Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat selama 1 (satu) tahun dan untuk tahun mendatang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan maupun lima tahunan pada periode 2021 – 2026;
4. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efesien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Menguraikan gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

1.2 *Landasan Hukum*

Menguraikan peraturan perundang – undangan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024.

Maksud dan Tujuan

1.3 Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024.

Sistematika Penulisan

1.4 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II **:** EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menguraikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

berisikan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat untuk dilaksanakan Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Menguraikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menguraikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan , Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV **:** RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berupa matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Tuleh bertujuan untuk menilai apakah program-program Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Kecamatan Gunung Tuleh yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Tuleh. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan yaitu :

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
   1. Kegiatan Administrasi Keuangan
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Sub kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
      3) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
   2. Administrasi Umum perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Untuk melihat evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu akan disampaikan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan (Tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Gunung Tuleh pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023 Kecamatan Gunung Tuleh disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Kecamatan Gunung Tuleh

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
				Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =6+8	10=9/4
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100%	97,54	97,54 %	100%	98,77	98,77%
	Kegiatan Administrasi Keuangan	*Persentase Realisasi Keuangan*	95 %	94%	90,19	95,94 %	95%	92,59	97,46%
	Sub Kegiatan Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Org/ bln	195 Org/ bln	195 Org/ bln	100 %	195 Org/ bln	390 Org/ bln	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264 Dok	132 Dok	132 Dok	100 %	132 Dok	132 Dok	100%

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	*Persentase penataan administrasi kepegawaian*	90	%	80 %	80%	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang	0	0	0	4	100	50%
	Administrasi Umum perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 Paket	100 %
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 Paket	100 %
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	100 %

	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	765	Laporan	350 Lap	35 Lap	100%	350 Lap	765 Lap	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	15	Unit	9 Unit	0	0	9 Unit	9 Unit	60%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	9 Unit	0	0	9 Unit	9 Unit	60%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana*	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	24 Lap	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	32	Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	32 Unit	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	22	100%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	5 Unit	5 unit	100%	5 Unit	10	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan Masyarakat	84,5	%	84,5%	84,5%	100%	84,5%	84,5%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	96	%	96%	96%	100%	96%	96%	100%
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Lap	24 lap	24 lap	100%	24 lap	48 lap	100 %
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	%	100%	0	0	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Lap	2 Lap	2 Lap	100%	10 lap	12 Lap	100%

III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	%	100%	100	00%	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	62	Kegiatan	32 Kegiatan	32	100%	31 Kegiatan	62 Kegiatan	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	40	Lembaga	20	20	100%	20	40	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	60	Lap	30 Lap	30 Lap	100%	30 lap	60 Lap	100%
IV	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	12	Kegiatan	4 Kegiatan	4Keg	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400	Org	200 Org	200 Org	100%	200 Org	400 Org	100%

	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI								
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	Lap	4 Lap	4 lap	100%	5 Lap	9 lap	100%
V	*Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa terlaksa	12	Keg	2 keg	2 keg	100%	10 keg	12 keg	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dok	2 Dok	2 Dok	100%	10 Dok	12 Dok	100%

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum terlaksana*	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	12	Keg	2 keg	2 Keg	100%	10 keg	12 keg	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Dok	2 Keg	2 Keg	100%	10 Dok	12 keg	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gunung Tuleh sampai dengan Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat dari tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Proyeksi tahun		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	14
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	97,54 %	100%	100%	Target belum tercapai
	Kegiatan Administrasi Keuangan	*Persentase Realisasi Keuangan*			94	95%	95%	95%	95%	90,19 %	100%	100%	Target belum tercapai
	Sub Kegiatan Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			195 Org/Bln	195 Org/Bln	195 Org/Bln	195 Org/Bln	195 Org/Bln	195 Org/Bln	195 Org/Bln	195 Org/Bln	Target tercapai
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			132 Dok	132 Dok	132 Dok	132 Dok	132 Dok	132 Dok	12 Org	12 Org	Target tercapai
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan			12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Target tercapai

	/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	*Persentase penataan administrasi kepegawaian*			82,5%	85%	90 %	92,5%	95%	80%	88 %	90%	Target belum tercapai
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	0	4 Orang		Target belum tercapai
	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*			0	0	25 Paket	25 Paket	25 Paket	0	0	0	Target belum tercapai
	Administrasi Umum perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
	Penyediaan komponen instalansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Target tercapai

	listrik/penerangan bangunan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Target tercapai
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Target tercapai
	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			315 Lap	350 Lap	450 Lap	460 Lap	500 Lap	315 Lap	350 Lap	450 Lap	Target tercapai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan*			0 Unit	10 Unit	50 Unit	15 Unit	15 Unit	0	6 Unit Unit	10 Unit	Target belum tercapai
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	10 Unit	50 Unit	15 Unit	15 Unit	0	6 Unit	10 Unit	Target belum tercapai

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana*			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	Target tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*			17 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	17 Unit	18 Unit	18 Unit	Target tercapai
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Target tercapai

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	Target tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			0 Unit	O Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	1 Unit	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan Masyarakat			84,5 %	85%	85,7%	86%	86%	84,5%	85 %	85%	Target tercapai
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu			95	96%	97%	98%	99%	95%	96%	97%	Target tercapai
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			24 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	24lap	24 Lap	24 Lap	Target tercapai
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan	Persentase terlaksananya Urusan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai

	Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2 Lap	10 lap	10 lap	10 lap	10 lap	10 Lap	10 lap	10 lap	Target tercapai
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*			20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	Target tercapai

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*			30 Lap	30 keg	31 Lap	31 Lap	31 Lap	30 Lap	30 keg	31 Lap	Target tercapai
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan*			4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Target tercapai
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan			200 Org	200 Org	500 Org	500 Org	500 Org	200 Org	200 Org	500 Org	Target tercapai

	Negara R I Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI											
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			3 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	Target tercapai
	Program Pembinaan dan Pengawasan	*Persentase pembinaan dan pengawasan*			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai

	Pemerintahan Desa	*Pemerintah Desa*											
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa terlaksana*			2 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	2 keg	10 Keg	10 Keg	Target tercapai
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			2 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	2 Dok	10 Dok	10 Dok	Target tercapai
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum terlaksana*			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum terlaksana			2 Keg	10 keg	10 keg	10 keg	10 keg	2 keg	10 keg	10 keg	Target tercapai
	Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas			2 Lap	10 Lap	10	10	10 Lap	2 Lap	10	10	Target tercapai

	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Lap	Lap			Lap	Lap	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar program Kecamatan Gunung Tuleh dapat dicapai pada tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 seluruh target program hampir dapat dicapai.

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak di antisipasi.

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah bidang urusan kewilayahan yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat terdapat berbagai masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan sasaran pembangunan di Kecamatan Gunung Tuleh seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Perioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Gunung Tuleh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Belum terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Minimnya inovasi dalam pelayanan publik
			Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik
		Belum Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	Rendahnya kualitas SDM dan profesionalitas ASN
			Sarana Prasarana pelayanan yang kurang memadai
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan

			wilayah.
		Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Belum maksimalnya sinergitas dengan POLRI,TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan
		Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Belum adanya standar pelayanan publik kecamatan
2.	Belum terwujudnya masyarakat yang agamais dan berbudaya	Belum maksimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih kurangnya kegiatan keagamaan dimasyarakat
			Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

OPD : KECAMATAN GUNUNG TULEH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
I	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.210.019.181	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.210.019.181
1.	*Kegiatan Administrasi Keuangan*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase Realisasi Keuangan*	*100%*	840.881.100	*Kegiatan Administrasi Keuangan*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase Realisasi Keuangan*	*100%*	840.881.100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/ Bln	583.631.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/ Bln	583.631.000
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132 Dok	178.750.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132 Dok	178.750.000
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	78.500.100	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	78.500.100
2.	*Administrasi Kepegawaian*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase penataan administrasi kepegawaian*	100%	39.644.633	*Administrasi Kepegawaian*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase penataan administrasi kepegawaian*	100%	39.644.633

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	20.206.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	20.206.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	19.438.633	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	19.438.633
3.	*Administrasi Umum perangkat Daerah*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*	100%	201.612.903	*Administrasi Umum perangkat Daerah*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*	100%	201.612.903
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.605.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.605.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	18.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Lap	180.443.548	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Lap	180.443.548

4.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kab. Pasaman Barat	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	50 Unit	56.944.800	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kab. Pasaman Barat	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	50 Unit	56.944.800
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	56.944.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	56.944.800
5.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana*	*100%*	12.600.000	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab. Pasaman Barat	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana*	*100%*	12.600.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000
6.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab. Pasaman Barat	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	*18 Unit*	50.499.900	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab. Pasaman Barat	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	*18 Unit*	50.499.900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	18.852.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	18.852.250

	Dinas Jabatan					Dinas Jabatan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	24.547.650	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.547.650
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pasaman Barat	Indek kepuasan Masyarakat	100%	14.300.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pasaman Barat	Indek kepuasan Masyarakat	100%	14.300.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	*100%*	*4.000.000*	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	*100%*	*4.000.000*
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	24 Dok	*4.000.000*	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	24 Dok	*4.000.000*
2.	*Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	Kab. Pasaman Barat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	*12 Lap*	2.515.000	*Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	Kab. Pasaman Barat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	*12 Lap*	2.515.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	2.515.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	2.515.000
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Pasaman Barat	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa	100%	29.337.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Pasaman Barat	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa	100%	29.337.000
1.	*Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Kab. Pasaman Barat	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa	100%	29.337.000	*Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Kab. Pasaman Barat	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa	100%	29.337.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	9.387.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	9.387.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31 Lap	19.950.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31 Lap	19.950.000

IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum terlaksana	100%	2.310.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum terlaksana	100%	2.310.000
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	10 lap	2.310.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	10 lap	2.310.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Lap	2.310.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Lap	2.310.000
V.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab. Pasaman Barat	Persentase Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum	100%	140.350.000	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab. Pasaman Barat	Persentase Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum	100%	140.350.000
1.	*Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	3 Kegiatan	140.350.000	*Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	3 Kegiatan	140.350.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia	500 Orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia	500 Orang	50.000.000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	109.830.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	109.830.000
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%	2.310.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		2.310.000

1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa terlaksa	10 Kegiatan	2.310.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa terlaksa	10 Kegiatan	2.310.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	2.310.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	2.310.000
	JUMLAH				1.390.841.181	JUMLAH				1.390.841.181

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa rencana anggaran belanja Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024 masih rendah disebabkan rendahnya alokasi DAU dari APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk Kecamatan Gunung Tuleh setiap tahunnya. Walaupun dengan anggaran yang sangat rendah diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk rencana kegiatan tahun 2024 telah ditampung dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan Tahun 2023 dan telah disampaikan dalam daftar usulan kegiatan pada musrembang tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan dari masyarakat yang telah dibahas pada musrembang Kabupaten dan telah disetujui akan menjadi rencana kerja Perangkat Daerah Teknis.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 terdiri dari pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tema RKP tahun 2024 yang diangkat pemerintah adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN)

Tujuh Prioritas Nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan sebagai perangkat kewilayahan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada RKP tahun 2024 dan telaahan terhadap tugas kecamatan, pemerintah kecamatan sebagai perangkat kewilayahan pada kabupaten mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional untuk Transformasi Pelayanan Publik .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Gunung Tuleh konsisten dengan tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah strategi dan perbaikan - perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi tersebut seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Kondisi awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran tahun ke						Ket
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunung Tuleh	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Tuleh	NA	NA	B	B	BB	BB	A	
			Level Maturitas SPIP	NA	NA	3	3	3	4	4	
			Persentase temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	NA	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	83 %	84,5 %	85%	85,7 %	86 %	86 %	
3.	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	NA	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024 terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan seperti dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Program	Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Kegiatan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunung Tuleh	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100% 100%	*Administrasi Keuangan*	*Persentase Realisasi Keuangan*	*100%*
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	195 Orang/ bulan
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132 Dokumen
					Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
					Administrasi Kepegawaian	*Persentase penataan administrasi kepegawaian*	90 %
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	4 Orang
					Pengadaan Pakaian dinas dan atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 paket

					Administrasi Umum perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*	100%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan*	50 Unit
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah*	*100%*

					Pemerintahan Daerah	*daerah terlaksana*	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	*18 Unit*
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	85,7	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	*98%*

kecamatan	pelayanan kecamatan	Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85,7 %	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	24 Laporan
					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	*100%*
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	100%	*Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa desa	100%
						Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	32 kegiatan
			Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	31 laporan

					Kecamatan	Wilayah Kecamatan	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum terlaksana	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	10 kegiatan
			Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa terlaksana	10 Kegiatan
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen
Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100%	*Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan*	5 Kegiatan

			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum	100%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia	200 orang
					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PRANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	*LOKASI*	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	*10*	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN GUNUNG TULEH						985.867.752							1.425.700.664	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**985.867.752**							**1.425.700.664**	
	7.01	**KECAMATAN**						**985.867.752**							**1.425.700.664**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**868.984.752**						**100 %**	**1.232.291.064**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan*	95 %			100 %	610.230.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	95 %	840.881.100	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1027 Orang/bulan			195 Orang/ bulan	422.150.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	221 Orang/ bulan	583.631.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	756 Dokumen			132 Dokumen	137.500.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunungt uleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	156 Dokumen	178.750.000	KECAMAT AN GUNUNG TULEH
	7.01.01. 2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen			12 Dokumen	50.580.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunung tuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	12 Dokumen	78.500.100	KECAMATA N GUNUNG TULEH
	7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penataan administrasi kepegawaian*	95 S %			92,5 %	16.100.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	95 %	41.410.565	KECAMATA N GUNUNG TULEH
	7.01.01. 2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1Paket	926.350	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	2.605.200	KECAMATA N GUNUNG TULEH
	7.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	17.812.153	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	22.000.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	5 Paket			1 Paket	8.550.000	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	8.820.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2182 Laporan			450 Laporan	160.230.249	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	450 Laporan	189.465.725	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang diadakan*	90 Unit			50 Unit	4.000.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	15 Unit	61.778.474	KECAMATAN GUNUNG TULEH

	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit			5 Unit	4.000.000	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	15 Unit	61.778.474	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana*	100 %			100 %	6.988.500			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	13.230.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	6.988.500	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	13.230.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	89 Unit			18 Unit	44.147.500			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	18 Unit	52.100.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH

	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit			12 Unit	15.817.500	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Unit	18.852.250	KECAMATAN GUNUNGTULEH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit			7 Unit	3.530.000	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	5 Unit	7.100.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	24.800.000	- Kab. PasamanBarat, Gunung tuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	1 Unit	26.147.750	KECAMATAN GUNUNG TULEH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**86 %**			**85.7 IKM 85,7 %**	**2.100.000**						**86 %**	**7.240.750**	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	*persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu*	100 %			98 %	1.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	4.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106 Laporan			24 Laporan	1.500.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	24 Laporan	4.500.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase terlaksanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	100 %			100 %	600.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	2.740.750	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan nLain yang Dilimpahkan	48 Laporan			12 Laporan	600.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	2.740.750	KECAMATAN GUNUNG TULEH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakatdesa***	**100 %**			**100 %**	**34.733.000**						**100 %**	**30.803.850**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa*	100 %			100 %	34.733.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	100 %	30.803.850	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Lembaga Kemasyarakatan			20 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	- Kab. PasamanBarat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	20 Lembaga Kemasyarakatan	9.858.350	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	154 Laporan			31 Laporan	27.733.000,	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	31 Laporan	20.945.500	KECAMATAN GUNUNG TULEH
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum terlaksana***	**100 %**			**100 %**	**600.000**						**100 %**	**2.425.500**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana*	42 kegiatan			10 Kegiatan	600.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	10 kegiatan	2.425.500	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42 Laporan			10 Laporan	600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	10 Laporan	2.425.500,00	KECAMATAN GUNUNG TULEH

5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 %**			**100 %**	**77.950.000**						**100 %**	**150.514.000**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan*	24 kegiatan			5 Kegiatan	77.950.000,00			-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	5 kegiatan	150.514.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2300 Orang			500 Orang	19.550.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	500 Orang	33.145.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20 Dokumen			4 Dokumen	58.400.000	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah Peningkata n keamanan dan ketertiban serta peng amalan agama dalam kehidupan masyarakat	-	4 Dokumen	117.369.000	KECAMATAN GUNUNG TULEH
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa***	**100 %**			**100 %**	**1.500.000**						**100 %**	**2.425.500**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	*Jumlah fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa terlaksana*	42 kegiatan			10 Kegiatan	1.500.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	10 kegiatan	2.425.500	KECAMATAN GUNUNG TULEH

	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42 Dokumen			10 Dokumen	1.500.000	- Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik	-	10 Dokumen	2.425.500	KECAMATAN GUNUNG TULEH
	J U M L A H							**985.867.752**							**1.425.700.664**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan akhir Renja Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan rangkaian penyusunan perencanaan tahunan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 juga merupakan kelanjutan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gunung Tuleh perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan semua Program dan kegiatan mengikuti Petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Kewajiban Kecamatan Gunung Tuleh untuk mengimplementasikan Pencapaian tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.
   b. Kecamatan Gunung Tuleh berkewajiban menyusun Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024 yang berpedoman kepada Renja Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024 dan RKPD Kabupten Pasaman Barat Tahun 2024.
   c. Dalam rangka melaksanakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Gunung Tuleh Tahun 2024, Wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Renja tahun berikutnya.

3. Rencana Tindak Lanjut

   Renja Kecamatan Gunung Tuleh selain sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Gunung Tuleh.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rancangan Akhir Renja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif antar semua pihak sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Simpang Tiga Alin, 9 Agustus 2023
Camat Gunung Tuleh

MUHAMMAD GHOR,SPD,MM
NIP. 19741118 200501 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 2
1.1. LATAR BELAKANG 2
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 10
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 12
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI 12
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA 13
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN 14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB V PENUTUP 21

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 –2025 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 -2026 memuat tentang rencana pembangunan jangka menengah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program

Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Lintas satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 -2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Nagari. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (bottom up planing) , komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja OPD merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Lembah Melintang disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya Kecamatan Lembah Melintang yang Beriman, Bermartabat, Sejahtera, Cerdas dan berwawasan Lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Lembah Melintang selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Lembah Melintang adalah :
   - Sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Lembah Melintang dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat wewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
   - Rencana Kerja Kecamatan Lembah Melintang dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Nagari serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing Nagari sesuai kewenangannya.

2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Lembah Melintang adalah :
   - Sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Lembah Melintang yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
   - Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong

timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, maupun Penelitian dan Pengembangan
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
- Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 , maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunsn perencanaan dan penganggaran OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun Nagari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Lembah Melintang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Anggarannya memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaiah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Lembah Melintang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Lembah Melintang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Kantor camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Lembah Melintang Tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja Tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 . Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (Tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Lembah Melintang pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor camat Lembah Melintang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Kecamatan Lembah Melintang pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Terdiri atas 4 (empat) Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Cakupan pemenuhan urusan administrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota, indikator masukan yaitu Jumlah dana yang disediakan total ***Rp.943.327.496***,- dan terealisasi sebesar ***Rp.900.979.387,- atau 96 %*** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	984.720.788,-	910.060.800,-	92%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	200.063.850,-	199.572.460,-	100%
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	17.000.000,-	17.000.000,-	100%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.193.500,-	14.974.273,-	92%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	49.170.500,-	47.479.350,-	97%

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Terdiri atas 1 satu) Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), indikator masukan yaitu Jumlah dana yang disediakan total ***Rp. 434.000***,- dan terealisasi sebesar ***Rp. 434.000,- atau*** **100*%*** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%	434.000,-	434.000,-	100%

	dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Persentase peningkatan pemberdayaan masyarajat desa dan kelurahan, Indikator masukan ***Rp. 28.380.500,-*** dan terealisasi sebesar ***Rp. 28.379.000,-*** atau ***100%*** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	28.380.500,-	28.379.000,-	100%

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan indikator capaian program berupa Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator masukan yaitu dana total ***Rp. 88.600.000,-*** dan realisasi sebesar ***Rp. 88.600.000,-*** *atau* ***100*** % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	88.600.000,-	88.600.000,-	100%

Dana yang dianggarkan tahun 2022 sebesar ***Rp.1.384.563.138,-*** dan terealisasi sebesar ***Rp 1.306.499.883,-*** *atau* ***94,36 %***.

Dengan demikian pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Lembah Melintang dapat disimpulkan baik dengan persentase pencapaian sebesar **94,36 %.**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

Ujung Gading, Juli 2023

Camat Lembah Melintang

ARPAN, S.Pd

NIP. 19690105 199210 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Lembah Melintang merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Lembah Melintang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Lembah Melintang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Lembah Melintang, pengumuman yang ditempel langsung serta surat pemberitahuan kepada Nagari dan Jorong.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Lembah Melintang, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran. Sedangkan IMB yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih relatif kecil. Hal tersebut karena masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus ijin-ijin tersebut dan ini menjadi tantangan pemerintah kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lembah Melintang dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Lembah Melintang dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembah Melintang

Kabupaten Pasaman Barat

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 20223 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82	83	85	85,7	80	81	82	83	
2	Nilai SAKIP Kecamatan			C	C	C	CC	C	C	C	CC	
3	Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti			60%	60%	65%	70%	60%	60%	65%	70%	
4	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD teknis. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan dari bupati kurang didukung anggaran kecamatan sesuai beban tugasnya, menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatan perhatian di masa-masa mendatang.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

1. Wilayah kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Berkurangnya anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Lembah Melintang karena APBD Kabupaten difokuskan pada Penanganan Pencegahan COVID-19 sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan.
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubiler, dan peralatan lainnya masih kurang.
4. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati sehingga terjadi tumpang tindih.
5. Wilayah Kecamatan Lembah Melintang yang cukup luas dan berkembang mendapatkan anggaran yang belum proporsional untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan / kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD
4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan : keterbukaan informasi melalui media sosial dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberika oleh instansi-instansi pemerintah

Peluang : perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi melalui media sosial

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

f. ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Memaksimalkan kemampuan sdm aparatur yang ada di kecamatan dan memanfaatkan media terutama media sosia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang berikan oleh Kantor Camat Lembah Melintang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Lembah Melintang

TABEL TC - 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2024
KEBUPATEN PASAMAN BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBITUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**	**100%**	**910,283,190**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**	**100%**	**1,001,311,509**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	717,620,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	789,382,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Cakupan terpenuhinya Kebutuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	100%	122,655,690	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Cakupan terpenuhinya Kebutuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	100%	134,921,259	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%	39,780,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%	43,758,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,670,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9,537,000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	21,557,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	23,713,250	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**80%**	**2,300,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**80%**	**2,530,000**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor Camat Lembah Melintang	Persentase Pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	100%	2,300,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor Camat Lembah Melintang	Persentase Pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	100%	2,530,000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100%**	**30,862,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100%**	**33,948,200**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah kegiatan Koordinasi Pemberdayaan desa yang difasilitasi	100%	30,862,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah kegiatan Koordinasi Pemberdayaan desa yang difasilitasi	100%	33,948,200	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**3,500,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**3,850,000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	3,500,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lembah Melintang	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	3,850,000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**125,550,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Lembah Melintang**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**138,105,000**	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Lembah Melintang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	125,550,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lembah Melintang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	138,105,000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**26,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kantor Camat Lembah Melintang**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**28,600,000**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Lembah Melintang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	26,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Lembah Melintang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	28,600,000	
TOTAL					**1,098,495,190**					**1,208,344,709**	

Camat Lembah Melintang

ARPAN, S.Pd
NIP. 19690105 199210 1 002

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 Pemerintah dalam menetapkan tema RKP mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022 serta kebijakan pembangunan tahun 2024 .

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 , pemerintah menetapkan tema pembangunan RKP 2024 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sesuai dengan Visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan memperhatikan kondisi factual terkini, Pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan Tahun 2024 , maka pemerintah menetapkan arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2024 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Dalam rangka menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah menetapkan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik;

Kecamatan sebagai perangkat kewilayahan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada RKP Tahun 2024 dan telaahan terhadap tugas kecamatan, pemerintah kecamatan sebagai perangkat kewilayahan pada kabupaten mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional untuk Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, dan mendukung pengoordinasian prioritas nasional untuk Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan misi Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 -2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lembah Melintang	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Lembah Melintang berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 5 (lima) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAMA PERANGKAT : KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7					UNSUR KEWILAYAHAN				**1,098,495,190**				**1,450,693,741**
7	**01**				KECAMATAN				**1,098,495,190**				**1,450,693,741**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**910,283,190**				**1,182,792,723**
7	**01**	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**717,620,000**				**947,544,959**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	18 Orang/bulan	488,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		18 Orang/bulan	640,544,959
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Dokumen	171,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	246,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Dokumen	57,720,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	61,000,000
7	**01**	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**				**6,500,000**
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	3 Orang	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Orang	6,500,000
7	**01**	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**122,655,690**				**148,564,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	5 Paket	281,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Paket	800,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Paket	24,090,690	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Paket	18,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Paket	3,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Paket	9,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Laporan	94,984,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	120,764,000

7	**01**	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**39,780,000**				**38,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	5 Unit	39,780,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	38,000,000
7	**01**	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**8,670,000**				**18,583,764**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Laporan	8,670,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	18,583,764
7	**01**	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**21,557,500**				**23,600,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	9 Unit	18,717,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9 Unit	16,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	9 Unit	2,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9 Unit	7,600,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**2,300,000**				**6,540,534**
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**2,300,000**				**6,540,534**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Laporan	2,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6,540,534
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**30,862,000**				**65,219,000**
7	**01**	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**30,862,000**				**65,219,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading		7,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9 Lembaga Kemasyarakatan	14,219,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	2 Laporan	23,862,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Laporan	51,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3,500,000**				**6,655,000**
7	**01**	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**3,500,000**				**6,655,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Laporan	1,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3,355,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Laporan	1,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3,300,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**122,550,000**				**165,528,484**
7	**01**	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**122,550,000**				**165,528,484**

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	200 Orang	76,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200 Orang	80,528,484
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	3 Dokumen	49,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	85,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**26,000,000**				**23,958,000**
7	**01**	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**26,000,000**				**23,958,000**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	12 Laporan	26,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	23,958,000
TOTAL										**1,098,495,190**			**1,450,693,741**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Kecamatan Lembah Melintang untuk Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Lembah Melintang Sub Unit Oragnisasi : 7.01.0.00.0.00.14.000 Kecamatan Lembah Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7																UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01				KECAMATAN						1,098,495,190								1,450,693,741	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						910,283,190								1,182,792,723	
7	01	01		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						717,620,000								947,544,959	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN				18 Orang/bulan	488,550,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 Orang/bulan	640,544,959	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	171,350,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	246,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	57,720,000		Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		12 Dokumen	61,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0								6,500,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		3 Orang	6,500,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						122,655,690				Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			148,564,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	281,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		5 Paket	800,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan				12 Paket	24,090,690	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		12 Paket	18,000,000	Kecamatan Lembah Melintang

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	12 Paket	3,300,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	12 Paket	9,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	94,984,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	12 Laporan	120,764,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			39,780,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		38,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	5 Unit	39,780,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	5 Unit	38,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,670,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		18,583,764	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,670,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	12 Laporan	18,583,764	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			21,557,500			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan		23,600,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerorangandDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	9 Unit	18,717,500	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	9 Unit	16,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	9 Unit	2,840,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	9 Unit	7,600,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,300,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		6,540,534	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang Ada di Kecamatan			2,300,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		6,540,534	

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 Laporan	2,300,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	12 Laporan	6,540,534	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30,862,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		65,219,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30,862,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		65,219,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7,000,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	9 Lembaga Kemasyarakatan	14,219,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	23,862,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	2 Laporan	51,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,500,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		6,655,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3,500,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		6,655,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,750,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Laporan	3,355,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	1,750,000	Kab. Pasaman Barat, LembahMelintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- DanaAlokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			122,550,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		165,528,484	

7	01		05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah			122,550,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan		165,528,484	
7	01		05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	76,550,000	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	200 Orang	80,528,484	Kecamatan Lembah Melintang
7	01		05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan TidakDilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah danTidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	49,000,000	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan	3 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Lembah Melintang
7	01		06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			26,000,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		23,958,000	
7	01		06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			26,000,000			Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		23,958,000	
7	01		06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	26,000,000	Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas tata kelola pelenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasPeningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Laporan	23,958,000	Kecamatan Lembah Melintang
							TOTAL		1,098,495,190					1,450,693,741	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun berpedoman kepada rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Melintang tahun 2021 -2026 yang mengacu pada Visi Misi Bupati Pasaman Barat " Terwujudnya Pasman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan" dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembah Melintang yang memuat kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Lembah Melintang. Renja sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Lembah Melintang didalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua Program dan kegiatan mengikuti Petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kewajiban Lembah Melintang berkewajiban untuk mengimplementasikan Pencapaian tujuan, sasaran, Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja (Renja) Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024 serta diselaraskan RKPD kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 .
b. Kecamatan Lembah Melintang berkewajiban menyusun Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024 yang berpedoman kepada Renja Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 .
c. Dalam rangka melaksanakan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2024 , wajib dilaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 .

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Kecamatan Lembah Melintang selain sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Lembah Melintang. Untuk dapat merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja kecamatan Lembah Melintang tahun 2024 .

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Ujung Gading, Juli 2023

Camat Lembah Melintang

ARPAN,S.Pd

NIP. 19690105 199210 1 002

KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN RANAH BATAHAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada RENSTRA 2021-2026 Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Silaping, Juli 2023
Camat Ranah Batahan

KHAIRUDDIN, S. Pd., M. Si
Pembina / IV.a
NIP. 19670715 200701 1 041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022 9

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 19
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 28
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI 36
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA 37
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

BAB V PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2021 memuat tentang rencana pembangunan jangka

menengah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Lintas satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Nagari. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing) , komprehensif, mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Batahan disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya Kecamatan Ranah Batahan yang Beriman, Bermartabat, Sejahtera, Cerdas dan berwawasan Lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Ranah Batahan selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17) Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perintah Daerah tahun 2024 .

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ranah Batahan adalah :

- Sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Ranah Batahan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat wewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Rencana Kerja Kecamatan Ranah Batahan dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Nagari serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing Nagari sesuai kewenangannya.
- Untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kantor Camat Ranah Batahan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ranah Batahan adalah :

- Sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Ranah Batahan yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman

yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
- Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunsn perencanaan dan penganggaran OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun Nagari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Ranah Batahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Ranah Batahan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Kantor Camat Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 4 (empat) program yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Ranah Batahan tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Ranah Batahan tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Ranah Batahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Camat Ranah Batahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rencana realisasi capaian kinerja Kantor Camat Ranah Batahan pada tahun 2023 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan Peyedian Gaji dan Tujangan ASN dengan Pagu dana yang disiapkan Rp.453.350.000,- dialokasikan untuk peyedian gaji dan tunjangan ASN, Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan :

Kegaiatan Peyediaan Gaji dan tunjangan ASN Realisasi diharapkan Anggaran Rp. 453.350.000,- (terealisasi 100 %).

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN dengan pagu dana sebesar Rp. 158.950.000,- dialokasikan untuk kegiatan ,Peyedian pelaksanaan tugas ASN kantor Camat Ranah Batahan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 158.950.000,-(sebesar 100 %)

3. Pelaksanaan Penatauhasaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.820.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keungan SKPD diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp. 50.820.000,- (senilai 100 %)

1.2 Administrasi Barang Milik Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Penata usahaan barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.800.000 ,-dialokasikan untuk kegiatan honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,- (senilai 100 %)

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.Penyedian Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kegiatan Peyedian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 4.024.000,-dialokasikan untuk kegiatan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor diharapkan terealisasi sebesar Rp. 4.024.000,- (senilai 100 %)

2. Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 31.599.648,-dialokasikan untuk Kegiatan Peyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor diharapkan terealisasi sebesar Rp. 31.599.648,- (senilai 100 %)

3. Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pagu anggaran untuk Kegiatan Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan digabungkan pada kegiatan Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 156.095.000,-dialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi diharapkan terealisasi sebesar Rp. 156.095.000,- (senilai 100 %)

1.4 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diharapkan terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- (senilai 100 %)

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 6.502.500,- dialokasikan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diharapkan terealisasi sebesar Rp. 6.502.500,- (senilai 100 %)

1.6 Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 21.417.500,- dialokasikan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 21.417.500,- (senilai 100 %)

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 61.167.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diharapkan terealisasi sebesar Rp. 61.167.000,- (senilai 100 %)

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Kegiatan ini dianggarkan untuk makanan dan minuman rapat, sewa tenda dan sewa sound system untuk kegiatan Musrenbang Kecamatan, dengan total pagu sebesar Rp.5.500.000,- Dapat terealisasi sebesar Rp. 5.500.000,- (senilai 100 %)

Permasalahan:

Tidak ada masalah signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan ini

Solusi;--.

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 30.560.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamatan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 30.560.000,- (senilai 100 %)

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 64.250.000,-

dialokasikan Untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) diharapkan terealisasi sebesar Rp. 64.250.000,- (senilai 100 %)

2. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Keweangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Keweangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 35.750.000,-dialokasikan Untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), MTQ dan Safari Ramadhan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 35.750.000,- (senilai 100 %)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023

Kecamatan Ranah Batahan

Nama OPD : Kecamatan Ranah Batahan Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2023		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***100%***	***100.00%***	***100%***	45%	97.86%	100%	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan gaji, tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Ranah Batahan**	***100%***	***100%***	***100%***	44%	96.53%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	195 orang/bulan	204 orang/bulan	170 orang/bulan	156 orang/bulan	89.59%	195 orang/bulan	195 orang/bulan	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	111 dokumen	192 dokumen	111 dokumen	111 dokumen	100%	384 dokumen	384 dokumen	100%	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%	48 dokumen	48 dokumen	100 %	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Pengurus Barang yang menerima Honor**	***1 orang***	***1 orang***	***1 orang***	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang yang menerima Honorarium	1 Org	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%	
4	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran**	***100%***	***100.%***	***100%***	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	100%	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	97.61%	12 laporan	12 laporan	100%	
	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**	***100%***		***100%***	100%	100%	100%	100%	100%	

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit		2 unit	2 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan***	***12 laporan***	***99.97%***	***12 laporan***	12 laporan	95.59%	12 laporan	12 laporan	100%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	99.97%	12 laporan	12 laporan	98.59%	12 laporan	12 laporan	100%	
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara***	***100%***	***92.89%***	***100%***	20%	95.05%	100%	100%	100%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	93.13%	7 unit	7 unit	90.12%	7 unit	7 unit	100%	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	92.64%	3 unit	3 unit	99.98%	3 unit	3 unit	100%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan	***Persentase kinerja Pemberdayaan desa***	***100%***	***100%***	***100%***	100%	100%	100%	100%	100%	

	Pemberdayaan Desa	***dalam Pembangunan***									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100%	30 lembaga	30 lembaga	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks kepuasan Masyarakat**	**100%**	***100%***	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan (PHBN/PHBI)***	***100%***	***100%***	***100%***	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika	150 orang	100 orang	100 orang	100 Orang	100 %	150 orang	150 orang	100%	

	Negara Kesatuan Republik Indonesia	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yan bukan merupakan Kewenagan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yan bukan merupakan Kewenagan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Ranah Batahan merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Ranah Batahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Ranah Batahan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Ranah Batahan.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Ranah Batahan, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran. Sedangkan ijin HO dan IMB yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih relatif kecil. Hal tersebut karena masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus ijin-ijin tersebut dan ini menjadi tantangan pemerintah kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ranah Batahan dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Ranah Batahan dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Batahan

Kabupaten Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota									**97.86%**			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**96.53%**			
	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	93,45%	89.59%	100%	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	2 orang	3 Orang	-	-	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**100%**			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang yang menerima Honor			1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	99,80%	100%	100%	100%	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	99,88%	100%	100%	100%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	90,99%	97,61%	100%	100%	
	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah												
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
		penunjang operasional perangkat daerah											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan**								**95,59%**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			100%	100 %	100%	100%	99,97%	98,59%	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**								**95,05%**			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan dan pajak kendaraaan yang dibayarkan			22 unit	100%	100%	100%	93,13%	90,12%	100%	100%	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Jumlah Fasilitas Kantor Yang dipelihara			1 unit	100%	100%	100%	92,64%	99,98%	100%	100%	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									100%			

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan												
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			20 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									**100%**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				5 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertibam Umum	Persentase koordinasi trantibum yang di fasilitasi											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi											
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa											
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan administrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-	-	-	100%	-	-	100%	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-	-	-	100%	-	-	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kecamatan. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD teknis. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sementara pada saat yang sama dukungan anggaran kecamatan masih belum berbanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan OPD setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan berokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatan perhatian dan capaian ideal di masa-masa mendatang.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang.
3. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.

4. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dll sumber daya keprofesionalan.
5. Wilayah Kecamatan Ranah Batahan yang cukup luas dan masih lemahnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai ;

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan / kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD
4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan : keterbukaan informasi melalui media sosial dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah

Peluang : - perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi melalui media sosial

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Memaksimalkan kemampuan sdm aparatur yang ada di kecamatan dan memanfaatkan media terutama media sosia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang berikan oleh Kantor Camat Ranah Batahan.

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Kecamatan Ranah Batahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Kantor Camat Ranah Batahan	**Cakupan Pelayanan Urusabn Pemerintah Daerah**	**100 %**	**846.438.851**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan Pelayanan Urusabn Pemerintah Daerah**	**100 %**	**948.725.648**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Ranah Batahan**	**100 %**	**772.085.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Ranah Batahan**	**100 %**	**663.120.000**	
	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/Bulan	505.085.000	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/Bulan	453.350.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	384 Dokumen	169.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111 Dokumen	158.950.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	48.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	50.820.000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Jumlah Pengurus Barag yang Menerima Honor**	**1 Orang**	**9.600.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengurus Barag yang Menerima Honor**	**1 Orang**	**4.800.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Pengurus Barang yang menerima Honor	**12 Laporan**	**9.600.000**	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang yang menerima Honor	**1 Orang**	4.800.000	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Kantor Camat**	**Presentase terpenuhinya**	**100%**	**11.000.000**	**Administrasi Kepegawaian**	**Presentase terpenuhinya**		0	

	Daerah	**Ranah Batahan**	**kegiatan administrasi perangkat daerah**			**Perangkat Daerah**	**kegiatan administrasi perangkat daerah**			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	**3 Orang**	**11.000.000**	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran**	**1 Paket**	**69.253.851-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**191.718.648**	
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4.024.000	
6	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Kantor Camat Ranah Batahan**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**1 Paket**	**13.235.851**	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**1 Paket**	**31.599.648**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		0	
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Laporan Penytelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penytelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	156.095.000	
7	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Ranah Batahan	**Persentase terpenuhinya Kegiatan Penunnjang Operasional Perangkat Daerah**	100 %	15.000.000	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Kegiatan Penunnjang Operasional Perangkat Daerah**	100 %	21.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumalh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumalh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	21.000.000	
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100%	4.500.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan	6.502.500	

			yang disediakan				yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	6.502.500	
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Ranah Batahan	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	100 %	15.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	100 %	82.584.500	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajak nya	7 Unit	7.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajak nya	7 Unit	21.417.500	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Gedung kantor pembangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	7.500.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Jumlah Gedung kantor pembangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	61.167.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Ranah Batahan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	85 IKM	968.000	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	85 IKM	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor Camat Ranah Batahan	**Persentasi Capaian Kinerja Pelayanan**	100 %	500.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentasi Capaian Kinerja Pelayanan**	100 %	0	
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	500.000	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan	0 Laporan	0	

			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Presentase capaian kinerja pelayanan public pelimpahan pemerintah daerah**	**100%**	**468.000**	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Presentase capaian kinerja pelayanan public pelimpahan pemerintah daerah**		0	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	468.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan		0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Ranah Batahan	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100 %	9.220.200	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100 %	36.060.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Ranah Batahan	**Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**	100%	9.220.200	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**	100%	36.060.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	30 Lembaga	4.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	30 Lembaga	5.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporaan	4.720.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporaan	30.560.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Presentase koordinasi Trantibum yang difasilitasi**	**1000%**	**6.050.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase koordinasi Trantibum yang difasilitasi**		0	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentramandan ketertiban umum	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Presentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan**	**1000%**	**6.050.000**	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentramandan ketertiban umum**	**Presentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan**		0	

			ketertiban umum yang difasilitasi				**ketertiban umum yang difasilitasi**			
	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	1000%	6.050.000	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan		0	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kantor Camat Ranah Batahan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100 %	590.058.046	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100 %	100.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Ranah Batahan	**Persentase Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (PHBN dan PHBI)**	100%	590.058.046	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (PHBN dan PHBI)**	100%	100.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	64.250.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah Dokumen semua urusan Pemerintahan yang	4 Dokumen	440.058.046	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan	Jumlah Dokumen semua urusan Pemerintahan yang	4 Dokumen	35.750.000	

	kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
	PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**4.840.000**	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Kantor Camat Ranah Batahan**	**Presentase pembinaan adminstrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa**	**100%**	**4.840.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Presentase pembinaan adminstrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa**		0	
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kantor Camat Ranah Batahan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan desa	12 Dokumen	4.840.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan desa		0	
JUMLAH					**1.457.575.097**				**1.105.785.648**	

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Kantor Camat Ranah Batahan tidak memiliki usulan program dari masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahap sekarang memasuki tahapan RPJM ke (2021-2026) secara umum adalah peningkatan daya saing produk dan hubungan regional, pengembangan pariwisata dan industri kecil, penuntasan wajib belajar 12 tahun, selanjutnya dijabarkan kedalam bidang pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Agama dan Budaya, difokuskan pada:
   - Pencerahan Agama dan Adat
   - Kualitas Sarana Peribadatan
   - Jumlah dan kualitas sekolah berasrama
   - Kualitas manajemen sekolah bernuansa Islam
2. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan, difokuskan pada:
   - Aparatur yang bersih dan bebas KKN
   - Penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi
   - Penyuluhan hukum dan hak asasi manusia
   - Pembenahan manajemen pegawai
   - Kinerja SOTK
   - Sistem database untuk internal dan eksternal
3. Pembangunan Ekonomi, difokuskan pada:
   - Teknologi pertanian tepat guna
   - Peran science/technopark dalam pengembangan produk inovatif
   - Kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut
   - SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut
   - Peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata
4. Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
   - Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan nagari yang melaksanakan agroforestri
   - Pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri
5. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia
   - Pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional
   - Sekolah kejuruan menghasilkan
   - Penetapan 12 sekolah berasrama
6. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
   - Mantapnya penataan ruang wilayah

- Pengembangan flora dan fauna dalam kawasan konservasi
- Pengawasan ketat terhadap pencemaran air dan udara oleh industri

Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu misi untuk pencapaian visi tersebut adalah mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di atas antara lain meningkatnya kompetensi aparatur daerah, meningkatnya kinerja aparatur daerah. Salah satu Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian misi di atas adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan yang diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud : tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, terciptanya pemerintahan yang bersih dan professional, terlaksananya pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan terwujudnya aparatur pemerintah yang professional dan bebas KKN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Kantor Camat Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ranah Batahan Tahun 2024 seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Kantor Camat Ranah Batahan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Level Maturitas SPIP	-	2	2	3	3	3

		Nilai WBK-WBBM						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.70%	91,17%	94,06%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Ranah Batahan berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (enam) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah 4. Administrasi Umum Perangkat Derah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Peyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di

		Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah.
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Keromendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama OPD : Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebuatuhan dan/Pagu Indikatif
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan**	**100%**	**898.529.982,-**	APBD	**100%**	**1.587.437,-**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatan Ranah Batahan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	100%	629.170.000,-	APBD	100%	926.245.286,-
2	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	200 orang/Bulan	453.350.000,-	APBD	195 orang/Bulan	668.846.886,-
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	26 Dokumen	125.000.000,-	APBD	384 Dokumen	208.208.000,-
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	48 Dokumen	50.820.000,-	APBD	48 Dokumen	49.190.400,-
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurus Barag yang Menerima Honor	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	1 Orang	4.800.000,-	APBD	1 Orang	9.600.000,-

6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pad SKPD	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	12 Laporan	4.800.000,-	APBD	1 Orang	9.600.000,-
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	100 %	000,-	APBD	100 %	27.250.000,-
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	3 Orang	000,-	APBD	4 Orang	27.250.000,-
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	1 Paket	197.451.482,-	APBD	1 Paket	268.328.032,-
10	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	1 Paket	5.637.482,-	APBD	100%	10.104.132,-
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	1 Paket	31.802.000,-	APBD	100%	40.612.000,-
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	1 Paket	000,-	APBD	100%	24.927.100,-
13	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penytelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan,	12 Laporan	160.012.000,-	APBD	100%	192.684.800,-

			Batahan					
14	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kegiatan Penunnjang Operasional Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	100 %	30.350.000,-	APBD	100 %	22.000.000,-
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	1 Unit	30.350.000,-	APBD	100%	22.000.000,-
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	100 %	36.758.000,-	APBD	100 %	60.824.170,-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	7 Unit	24.917.500,-	APBD	100 %	40.810.000,-
18	Pemeliharaan/Rehabilitasasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	3 Unit	11.841.000,-	APBD	100 %	20.014.170,-
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan**	**85 IKM**	5.600.000,-	**APBD**	**92 IKM**	**6.593.400,-**
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentasi Capaian Kinerja Pelayanan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	100 %	5.600.000,-	APBD	92 %	6.593.400,-

2	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Laporan	5.600.000,-	APBD		6.593.400,-
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan**	**100 %**	**52.145.000,-**	**APBD**	**100 %**	**73.436.000,-**
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	100 %	52.145.000,-	APBD	100 %	73.436.000,-
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	16.245.000,-	APBD	100 %	21.670.000,-
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Laporan	35.900.000,-	APBD	100 %	51.766.000,-
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Trantibum yang difasilitasi**	**Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan**	**100 %**	**4.200.000,-**	**APBD**	**100 %**	**7.500.000,-**
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	100 %	4.200.000,-	APBD	100 %	**7.500.000,-**

2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Laporan	4.200.000,-	APBD	100%	7.500.000,-
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan**	**100 %**	**66.500.000,-**	**APBD**	**92 %**	**151.751.000,-**
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (PHBN dan PHBI)	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	100 %	66.500.000,-	APBD	100 %	104.836.480,-
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	150 Orang	25.000,000,-	APBD	100 %	43.236.480,-
3	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Dokumen	41.500,000,-	APBD	100 %	61.600.000,-

4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumentasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Dokumen	000,-	APBN	100 %	12.000.000,-
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa**	**Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan**	**100 %**	**6.300.000,-**	**APBD**	**100 %**	**34.000.000,-**
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi dan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	100 %	6.300.000,-	APBD	100 %	34.000.000,-
2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Dokumen	6.300.000,-	APBD	100 %	11.000.000,-
3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Dokumen	000,-		100 %	9.000.000,-
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, semua Kelurahan	12 Dokumen	000,-		100 %	14.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DEARAH

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Ranah Batahan berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (enam) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN RANAH BATAHAN KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN RANAH BATAHAN						**1.033.274.982,00**							**1.552.577.368,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.033.274.982,00**							**1.552.577.368,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.033.274.982,00**							**1.552.577.368,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah***	**100%**			**100 %**	**898.529.982,00**						**100%**	**1.314.211.488,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai kecamatan ranah batahan*	100 %			100 %	629.170.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	926.245.286,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	243 Orang/bulan			200 Orang/bulan	453.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	221 Orang/bulan	668.846.886,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	360 Dokumen			26 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	360 Dokumen	208.208.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			48 Dokumen	50.820.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	48 Dokumen	49.190.400,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*jumlah pengurus barang yang menerima honor*	1 Orang			1 Orang	4.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Orang	9.600.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	4.800.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	9.600.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase terpenuhinya kegiatan administrasi perangkat daerah*	100 %			100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	27.250.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang			3 Orang	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	3 Orang	27.250.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran*	1 Paket			1 Paket	197.451.482,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	268.292.032,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.637.482,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	10.104.132,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	31.802.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	40.612.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	1 Paket	24.927.100,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	160.012.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	192.648.800,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah*	100 %			100 %	30.350.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	22.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	30.350.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	4 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persetase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara*	100 %			100 %	36.758.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	60.824.170,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			7 Unit	24.917.500,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	7 Unit	40.810.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	11.841.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	3 Unit	20.014.170,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks kepuasan masyarakat***	**95% 95IKM**			**85 IKM**	**5.600.000,00**						**95% 95IKM**	**6.593.400,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase capaian kinerja pelayanan*	100 % 95 %			100 %	5.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 % 95 %	6.593.400,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	5.600.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	6.593.400,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat desa***	**100%**			**100 %**	**52.145.000,00**						**100%**	**73.436.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan*	100 %			100 %	52.145.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	73.436.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan			30 Lembaga Kemasyarakatan	16.245.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	30 Lembaga Kemasyarakatan	21.670.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	35.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	51.766.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi trantribum yang difasilitasi***	**100%**			**100 %**	**4.200.000,00**						**100%**	**7.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi*	100 %			100 %	4.200.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	7.500.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	4.200.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	12 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Indeks kepuasan masyarakat***	**100%**			**100 %**	**66.500.000,00**						**100%**	**116.836.480,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan (PHBN dan PHBI)*	-			100 %	66.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	116.836.480,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	25.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		43.236.480,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	41.500.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		61.600.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	-			**100 %**	**6.300.000,00**						-	**34.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*persentase pembinaan administrasi dan keuangan kepada pemerintahan desa*	-			100 %	6.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	34.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	6.300.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		14.000.000,00	KECAMATAN RANAH BATAHAN
	JUMLAH							**1.033.274.982,00**							**1.552.577.368,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Ranah Batahan memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja kecamatan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan di tingkat pusat dan titindaklanjuti dengan peraturan ditingkat daerah. Hal penting yang diperlukan adalah koordinasi antara instansi terkait serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan termasuk di dalamnya masyarakat. Proses penyusunan antara lain dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasikan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda yang diusulkan masyarakat dengan program kegiatan OPD tingkat kabupaten.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kecamatan Ranah Batahan selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah dapat terwujud secara optimal.

Silaping, Juli 2023
Camat Ranah Batahan

KHAIRUDDIN, S.Pd,M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19670715 200701 141

KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KINERJA
(RENJA)

KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada RENSTRA 2021-2026 Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

Sungai Beremas, 10 Juli 2023
Camat Sungai Beremas

ASRINAL, SPd
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP. 197212202000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 9

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 14
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 16
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI 19
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA 21
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB V PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026.

Dengan demikian Renja OPD merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku OPD kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani Nagari dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beremas disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya Kecamatan Sungai Beremas yang Beriman, Bermartabat, Sejahtera, Cerdas dan berwawasan Lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Sungai Beremas selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

1.2 .Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

16) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beremas adalah :
   - Sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Sungai Beremas dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat wewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
   - Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beremas dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Nagari serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing Nagari sesuai kewenangannya.

2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beremas adalah :
   - Sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Sungai Beremas yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
   - Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).
   - Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, maupun Penelitian dan Pengembangan
   - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
   - Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunsn perencanaan dan penganggaran OPD

Maksud dan Tujuan

1.3 Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun Nagari.

Sistematika Penulisan

1.4 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat

sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Sungai Beremas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Sungai Beremas

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Kantor Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Sungai Beremas tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Kantor Camat Sungai Beremas tahun 2024 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2024), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Sungai Beremas pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Camat Sungai Beremas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Kantor Camat Sungai Beremas pada tahun 2023 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Administrasi keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu dana yang disiapkan Rp.655.135.000,- dialokasikan untuk penyediaan Gaji dan tunjangan ASN,Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi diharapkan anggaran Rp. 655.135.000,- (terealisasi 100 %).

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu dana sebesar Rp. 185.750.000,-dialokasikan untuk kegiatan , Penyedian Pelaksanaan tugas ASN kantor Camat Sungai Beremas diharapkan terealisasi sebesar Rp. 185.750.000,- (sebesar 100 %)

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.400.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp. 71.400.000,- (senilai 100 %)

1.2 . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.400.000.- dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan diharapkan dapat teralisasi sebesar Rp. 11.400.000.- (senilai 100%)

2.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.- dialokasikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat teralisasi sebesar Rp. 4.500.000.- (senilai 100%)

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor.

Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.483.930,- dialokasikan untuk kegiatan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor diharapkan terealisasi sebesar Rp. 3.483.930,- (senilai 100 %).

2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Kegiatan Penyedian Peralatan dan perlengkapan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 35.470.375,-dialokasikan untuk kegiatan Peralatan dan perlengkapan Alat Tulis Kantor diharapkan terealisasi sebesar Rp. 35.470.375,- (senilai 100 %).

3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu Anggaran Rp. 15.000.000.- dialokasikan untuk kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000.- (senilai 100 %).

4.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Anggaran Rp. 135.944.000,- dialokasikan untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diharapkan terealisasi sebesar Rp. 135.944.000,- (senilai 100 %).

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Anggaran Rp. 27.057.960,-dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya diharapkan terealisasi sebesar Rp. 27.057.960,- senilai (100 %)

1.5 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Anggaran Rp. 15.374.800,-dialokasikan untuk Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya Air dan Listrik diharapkan terealisasi sebesar Rp. 15.374.800,- (senilai 100 %).

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 22.615.000,- dialokasikan untuk Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 22.615.000,- (senilai 100 %).

2. Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu angggaran sebesar Rp 11.170.000,- dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp 11.170.000,- (senilai 100 %)

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Penyelenggaran urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 18.375.000,- untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 18.375.000,- (senilai 100 %)

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dianggarkan sebesar Rp. 980.000,- untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat diwilayah kecamatan diharapkan terealisasi sebesar Rp. 980.000,- (senilai 100 %)

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan.

a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa.

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa dianggarkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan pagu sebesar Rp. 6.782.350,- Diharapkan terealisasi sebesar Rp. 6.782.350,- (senilai 100 %)

b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan dianggarkan untuk belanja penggantian transportasi, makanan dan minuman rapat/sidang kegiatan PKK dengan pagu sebesar Rp. 28.120.000,- diharapkan terealisasi sebesar Rp. 28.120.000,- (senilai 100 %)

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 970.000.- diharapkan terealisasi sebesar Rp. 970.000.- (senilai 100%)

V. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

a. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantafkan pengamalan Pancasila pelaksanaan UUD

1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa berupa Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dianggarkan sebesar Rp. 32.050.000,- diharapkan terealisasi sebesar Rp. 32.050.000,- (senilai 100 %).

b. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

Kegiatan peningkatan PHBI dan tim ramadhan dianggarkan sebesar Rp 25.750.000,- diharapkan terealisasi sebesar Rp 25.750.000,- (senilai 100%)

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dianggarkan sebesar Rp. 970.000.- diharapkan terealisasi sebesar Rp. 970.000.- (senilai 100%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Sungai Beremas merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Sungai Beremas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Sungai Beremas ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Sungai Beremas.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan

tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Pada Kecamatan Sungai Beremas, pelayanan masyarakat dominan pada pelayanan KTP, KK dan akta kelahiran. Sedangkan ijin HO dan IMB yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih relatif kecil. Hal tersebut karena masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus ijin-ijin tersebut dan ini menjadi tantangan pemerintah kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sungai Beremas dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sungai Beremas dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SUNGAI BEREMAS s/d TAHUN 2022
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kode					Urusan /Bidang Urusana Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**									
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat**									

					Daerah								
7	01	01	2. 02	01	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	100%	100%	95%	95%	100%	295%	73.75%
7	01	01	2. 02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	18 orang	100%	100%	91%	91%	100%	291%	72.75%
7	01	01	2. 02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	7 orang	100%	100%	98%	98%	100%	298%	74.50%
7	**01**	**01**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
7	01	01	2. 05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	18 orang	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%
7	01	01	2. 05	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	1 0rang	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%

7	**01**	**01**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
7	01	01	2. 06	01	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 item	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%
7	01	01	2. 06	02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	100%	100%	99%	99%	100%	299%	74.75%
7	01	01	2. 06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40 cetakan 22000 lembar	100%	100%	96%	96%	100%	296%	74.00%
7	01	01	2. 06	09	penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 kegiatan 550 kali	100%	100%	98%	98%	100%	298%	74.50%
7	01	01	2. 07		**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**									
7	01	01	2. 07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%

7	01	01	2. 08		**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**									
7	01	01	2. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	100%	100%	86%	86%	100%	286%	71.50%
7	01	01	2. 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7	01	01	2. 09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	100%	100%	76%	76%	100%	276%	69.00%
7	01	01	2. 09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**									

7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**									
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	80%	80%	80%	80%	100%	80%	240%	60.00%
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**									
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	80%	80%	80%	80%	100%	80%	240%	60.00%
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**									

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 Kegiatan	100%	100%	86%	86%	100%	286%	71.50%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	100%	100%	99%	99%	100%	299%	74.75%
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**									
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	100%	100%	99%	99%	100%	299%	74.75%

7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	100%	100%	99%	99%	100%	299%	74.75%
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**									
7	01	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									

7	01	06	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan da Pengawasan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75.00%

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Beremas

Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM (standar Nasional)	IKK	Target Renstra Sungai Beremas				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			100%	100%	100%	100%					
	Nilai SAKIP Kecamatan			B	B	B	BB					
	Level Maturitas Kecamatan			100%	100%	100%	100%					

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

b. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan OPD lainnya (badan,dinas dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa OPD lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kecamatan. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kewenangan yang berbeda antara OPD kecamatan dengan OPD teknis. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sementara pada saat yang sama dukungan anggaran kecamatan masih belum berbanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan OPD setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan berokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatan perhatian dan capaian ideal di masa-masa mendatang.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Berkurangnya anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sungai Beremas karena APBD Kabupaten difokuskan pada penangulangan Covid-19 sehingga belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang.

4. Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.
5. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dll sumber daya keprofesionalan.
6. Wilayah Kecamatan Sungai Beremas yang cukup luas dan masih lemahnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai ;

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan / kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD
4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan : keterbukaan informasi melalui media sosial dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberika oleh instansi-instansi pemerintah

Peluang : - perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi melalui media sosial

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Memaksimalkan kemampuan sdm aparatur yang ada di kecamatan dan memanfaatkan media terutama media sosia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang berikan oleh Kantor Camat Sungai Beremas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Kantor Camat Sungai Beremas tidak memiliki usulan program dari masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Agenda tersebut dilaksanakan menggunakan strategi dengan menetapkan prioritas pada 3 dimensi pembangunan, yaitu:

a. Dimensi pembangunan manusia: Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Mental/Karakter.
b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: - Kedaulatan Pangan - Kedaulatan Energi dan Kelistrikan - Pariwisata dan Industri - Kemaritiman dan Kelautan
c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan - Antar Wilayah Desa - Pinggiran - Luar Jawa - Kawasan Timur

Dari sembilan agenda prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sungai Beremas adalah agenda dua dan

delapan yaitu Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta Melakukan revolusi karakter bangsa. Kecamatan Sungai Beremas telah menyusun program seperti Program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.

Pada tahap sekarang memasuki tahapan RPJM (2021-2026) secara umum adalah peningkatan daya saing produk dan hubungan regional, pengembangan pariwisata dan industri kecil, penuntasan wajib belajar 12 tahun, selanjutnya dijabarkan kedalam bidang pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Agama dan Budaya, difokuskan pada:
   - Pencerahan Agama dan Adat
   - Kualitas Sarana Peribadatan
   - Jumlah dan kualitas sekolah berasrama
   - Kualitas manajemen sekolah bernuansa Islam
2. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan, difokuskan pada:
   - Aparatur yang bersih dan bebas KKN
   - Penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi
   - Penyuluhan hukum dan hak asasi manusia
   - Pembenahan manajemen pegawai
   - Kinerja SOTK
   - Sistem database untuk internal dan eksternal
3. Pembangunan Ekonomi, difokuskan pada:
   - Teknologi pertanian tepat guna
   - Peran science/technopark dalam pengembangan produk inovatif
   - Kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut
   - SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut
   - Peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata
4. Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
   - Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan nagari yang melaksanakan agroforestri
   - Pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri
5. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia
   - Pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional
   - Sekolah kejuruan menghasilkan
   - Penetapan 12 sekolah berasrama

6. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
   - Mantapnya penataan ruang wilayah
   - Pengembangan flora dan fauna dalam kawasan konservasi
   - Pengawasan ketat terhadap pencemaran air dan udara oleh industri

Dari sasaran pokok dan arah kebijakan diatas yang berhubungan dengan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sasaran dua. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah membuat program dan kegiatan untuk mendukung sasaran pokok dan arah kebijakan tersebut seperti Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu misi untuk pencapaian visi tersebut adalah mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di atas antara lain meningkatnya kompetensi aparatur daerah, meningkatnya kinerja aparatur daerah. Salah satu Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian misi di atas adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan yang diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud : tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, terciptanya pemerintahan yang bersih dan professional, terlaksananya pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan terwujudnya aparatur pemerintah yang professional dan bebas KKN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Kantor Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sungai Beremas Tahun 2024 seperti tertuang pada table berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Kantor Camat Sungai Beremas Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatn	Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
			Nilai SAKIP Kecamatan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat
3.	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umm	Cakupan pelaksanaan urusan pemeritahan umum

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Sungai Beremas berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 06 (enam) program yang terdiri dari 12 (Dua belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum perangkat daerah. 4. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah. 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah. 6. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah
2.	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah.
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DEARAH

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Kantor Camat Sungai Beremas berusaha untuk mendukung seluruh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kantor Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam Enam (6) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel TC. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasaman barat

Nama perangakat Daerah : Kecamatan Sungai Beremas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**912,285,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**912,285,000**	
2	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Beremas	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	655,135,000	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Beremas	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	655,135,000	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	18 orang	185,750,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	18 orang	185,750,000	

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	7 orang	71,400,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	7 orang	71,400,000	
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**15,900,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				15,900,000	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Sungai Beremas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	18 orang	11,400,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Sungai Beremas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	18 orang	11,400,000	
7	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sungai Beremas	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	1 0rang	4,500,000	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sungai Beremas	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	1 0rang	4,500,000	
8	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**189,898,305**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				189,898,305	

9	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Sungai Beremas	Jumlah paket komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 item	3,483,930	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Sungai Beremas	Jumlah paket komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 item	3,483,930	
10	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sungai Beremas	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	35,470,375	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sungai Beremas	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	35,470,375	
11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sungai Beremas	Jumlah paket barang cetakan dan pengganda an yang disediakan	40 cetakan 22000 lembar	15,000,000	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sungai Beremas	Jumlah paket barang cetakan dan penggand aan yang disediakan	40 cetakan 22000 lembar	15,000,000	
12	penyelenggaraa n Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Beremas	Jumlah laporan Penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 kegiatan 550 kali	135,944,000	penyelenggara an Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Beremas	Jumlah laporan Penyeleng garaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 kegiatan 550 kali	135,944,000	

13	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**27,057,960**	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				27,057,960	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Beremas	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	27,057,960	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Beremas	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	27,057,960	
15	**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**15,374,800**	**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				15,374,800	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Beremas	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	15,374,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Beremas	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	15,374,800	
17	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**33,785,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				33,785,000	

18	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sungai Beremas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	22,615,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sungai Beremas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	22,615,000	
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sungai Beremas	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	11,170,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sungai Beremas	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	11,170,000	
20	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**19,355,000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				19,355,000	
21	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di**				**18,375,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang**				18,375,000	

	Kecamatan					**ada di Kecamatan**					
22	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Beremas	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	80%	18,375,000	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Beremas	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	80%	18,375,000	
23	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**				**980,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**				980,000	
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Sungai Beremas	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	80%	980,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Sungai Beremas	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	80%	980,000	
25	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**				**34,902,350**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**				34,902,350	

	Kelurahan					**Kelurahan**					
26	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**34,902,350**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				34,902,350	
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungai Beremas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 Kegiatan	6,782,350	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungai Beremas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 Kegiatan	6,782,350	
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Beremas	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	28,120,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Beremas	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	28,120,000	
29	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**				**57,800,000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**				57,800,000	

	Umum					**Umum**					
30	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**57,800,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				57,800,000	
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sungai Beremas	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal	1 Kegiatan	32,050,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sungai Beremas	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	1 Kegiatan	32,050,000	

			Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
32	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	25,750,000	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi	2 Kegiatan	25,750,000	

								Vertikal			
33	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**970,000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				970,000	
34	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sungai Beremas	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	970,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sungai Beremas	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	970,000	
35	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**				**970,000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**				970,000	

	Desa					**Desa**					
36	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan da Pengawasan Pemerintahan Daerah	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	970,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan da Pengawasan Pemerintahan Daerah	Sungai Beremas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	970,000	

Tabel 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Beremas

Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	
I	**Belanja Operasi**						
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Sungai Beremas**	**18 ASN**	**1.194.301.065,-**	**APBD**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji Tunjangan dan Honorarium Pegawai Kecamatn	Kantor Camat Sungai Beremas		912.285.000,-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian**	Kantor Camat Sungai Beremas	1 paket	15.900.000,-		
	Administrasi umum Perangkat Daerah.	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kantor Camat Sungai Beremas	100 %	189.898.305,-		
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kantor Camat Sungai Beremas	7 Unit	27.057.960,-		
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan kebutuhan komunikasi, listrik, dan air untuk kebutuhan kantor	Kantor Camat Sungai Beremas	100%	15.374.800,-		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kantor Camat Sungai Beremas	100%	33.785.000,-		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kantor Camat Sungai Beremas**	**80%**	**19.355.000,-**	**APBD**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Kantor Camat Sungai Beremas	80%	18.375.000,-		
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Kantor Camat Sungai Beremas	80%	980.000,-		
	Program Pembedayaaan masyarakat Desa dan Dan Kelurahan	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kantor Camat Sungai Beremas**	**100 %**	**34.902.350.-**	**APBD**	
	Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi tratibum yang difasilitasi**	**Kantor Camat Sungai Beremas**	**100%**	**970.000,-**	**APBD**	
	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kantor Camat Sungai Beremas**	**100 %**	**57.800.000,-**	**APBD**	
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**Kantor Camat Sungai Beremas**	1 Kegiatan	**970.000,-**	**APBD**	
	Jumlah				**1.308.298.415,-**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja kecamatan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan di tingkat pusat dan titindaklanjuti dengan peraturan ditingkat daerah. Hal penting yang diperlukan adalah koordinasi antara instansi terkait serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan termasuk di dalamnya masyarakat. Proses penyusunan antara lain dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasikan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda yang diusulkan masyarakat dengan program kegiatan OPD tingkat kabupaten.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sungai Beremas selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah dapat terwujud secara optimal.

Sungai Beremas, 10 Juli 2023
Camat Sungai Beremas

ASRINAL, SPd
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP.197212202000121002

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

KECAMATAN LUHAK NAN DUO

KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/286 /BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2011-2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan

4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

C. Anggota

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/kelurahan yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024;
10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
11. Melaksanakam seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024; dan

12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 kepada pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/286 /BUP-PASBAR/2023
Tanggal : 31 Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Resta Amelda Putri, S.STP, MM	Camat	Ketua
Sutrisno, S.Kom	Sekretaris Camat	Sekretaris
Yenni Tunida, S.Pd, MM	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
Muhammad Haris Ezyoni, S.STP	Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum	Anggota
Suhenri, SH	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
Thomi Permana, S.Sos	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
Esi Sri Hayati, SE	Kasi Administrasi dan Kependudukan	Anggota
Hariono, A.Md	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota
Yusdi, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Luhak Nan Duo dalam kurun waktu tahun 2024.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tahun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Luhak Nan Duo, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Luhak Nan Duo tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Sungai Talang, 4 Juli 2023
Camat Luhak Nan Duo

SUTRISNO, S. Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19720515 201001 1 012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan Renja Perangkat Daerah dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, dan Penelitian dan Pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selanjutnya, Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan

pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

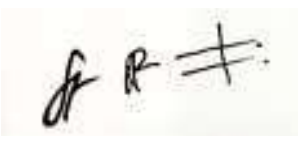

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan.
18. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/286/BUP-PASBAR/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian

kinerja Kecamatan Luhak Nan Duo serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, maupun Penelitian dan Pengembangan
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
3. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan dokumen perencanaan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen ROPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

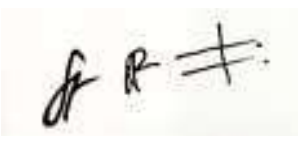

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat

2.2 Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

2.3 Nomor 38 Tahun 2007.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan

2.4 pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD

2.5 dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,* memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 *Program dan Kegiatan,* memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

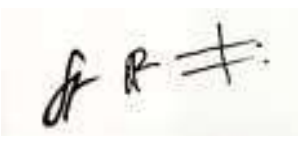

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun Lalu dan Capaian Renja Kecamatan Luhak Nan Duo

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Luhak Nan Duo tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Luhak Nan Duo tahun 2022 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Luhak Nan Duo pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Luhak Nan Duo tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

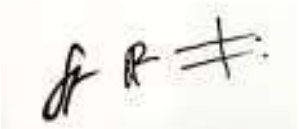

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2022

Kecamatan Luhak Nan Duo

Nama OPD : Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2024		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	40 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	100%	20 orang/bulan	80 orang/bulan	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	100%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	100%	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	40 Paket	100%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	4 Orang	100%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	6 Orang	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan dan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	

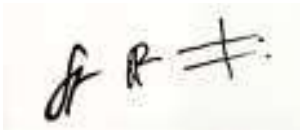

	Penggandaan	penggandaan yang disediakan									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300 laporan	600 laporan	300 laporan	300 laporan	100%	300 laporan	1.200 laporan	100%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**2 unit**	**7 unit**	**2 unit**	**0 unit**	**100%**	**2 unit**	**11 unit**	**100%**	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	7 unit	2 unit	0 unit	0%	2 unit	11 unit	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***12 laporan***	***12 laporan***	***12 laporan***	***12 laporan***	***100%***	***12 laporan***	***12 laporan***	***100%***	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara***	***100%***	***92.89%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	7 unit	7 unit	5 unit	100%	7 unit	7 unit	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit	25 unit	100%	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	0%	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks kepuasan Masyarakat**	**85 Nilai**	**84.5 Nilai**	**85 Nilai**	**85 Nilai**	**100%**	**85.5 Nilai**	**85.5 Nilai**	**100%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	***Persentase Realisasi Pencatatan Target Dokumen Kependudukan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Persentase realisasi pendapatan dari sektor IMB***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga Kemasyarakatan	100%	4 lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga Kemasyarakatan	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DIFASILITASI**	**100%**	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 orang	100 orang	50 orang	50 orang	100%	200 orang	200 orang	100%	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yan bukan merupakan Kewenagan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yan bukan merupakan Kewenagan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

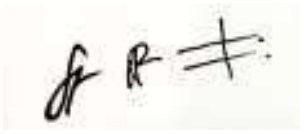

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

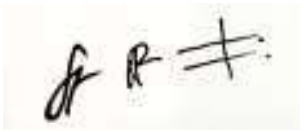

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-1 Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif melalui 5 (lima) indikator utama yakni :

1) Menjadikan masyarakat Luhak Nan Duo yang agamis

   Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada masyarakat, maka pemerintah kecamatan Luhak Nan Duo melaksanakan program : peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dengan kegiatan Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Kecamatan, Dengan adanya berbagai lomba agama pada MTQ akan memacu semangat juang generasi muda baik melalui MDA/TPA untuk lebih memahami serta menghayati tentang agama.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

   Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemerintah kecamatan Luhak Nan Duo melakukan kegiatan beberapa kegiatan seperti meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelaksanaan bimtek, menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai melalui pengadaan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor, dan menyediakan pakaian dinas aparatur.

   Untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat maka dilaksanakan pelayanan secara terpadu yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Yang memberikan pelayanan seperti Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran,Rekomendasi pindah dan Perizinan. Untuk pelayanan KTP masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, ini terjadi karena kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti seringnya kerusakan jaringan. Namun dengan kerjasama dengan Dinas Capil Pelayanan langsung (Kusus untuk KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) kepada masyarakat juga digiatkan. Adapun permasalahan yang sering terjadi karena masih kurangnya semangat masyarakat dalam mengurus perizinan.

3) Meningkatkan transparansi, konsistensi, integrasi serta peran serta masyarakat dalam perancanaan pembangunan

   Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemerintah kecamatan Luhak Nan Duo melaksanakan kegiatan musrenbang ditingkat kecamatan dalam setiap tahun, dalam kegiatan ini diundang para pemuka masyarakat, tokoh Adat serta anggota DPRD yang berasal dari Kecamatan Luhak Nan Duo, kegiatan ini berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah kecamatan Luhak Nan Duo juga melalui peringatan hari HUT RI mengadakan Pelaksanaan upacara Bendera yang anggota Paskibanya berasal dari generasi muda khususnya murid SLTA.

4) Meningkatkan Peran serta wanita dalam kesejahteraan Keluarga

   Dalam hal ini pemerintah kecamatan Luhak Nan Duo melakukan kegiatan melalui kerja sama PKK Kecamatan dan juga Bundo Kanduang Kecamatan, dalam kegiatan ini kegiatan PKK diketuai oleh Istri Camat Luhak Nan Duo, kegiatan ini juga memanfaatkan kerjasama dengan kader serta tenaga kesehatan setempat.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Luhak Nan Duo

Kabupaten Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen HasilPenyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	20 Paket	20 Paket	-	-	20 Paket	20 Paket	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti osialisasi PeraturanPerundang-Undangan			-	-	2 orang	3 Orang	-	-	2 orang	3 Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	2 orang	3 Orang	-	-	2 orang	3 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi mum perangkat daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	

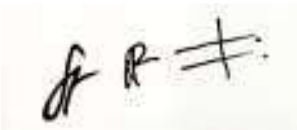

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
		dan Konsultasi SKPD											
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**			**4 Unit**	**5 Unit**	**3 Unit**	**5 Unit**	**4 Unit**	**5 Unit**	**3 Unit**	**5 Unit**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	5 Unit	3 Unit	5 Unit	4 Unit	5 Unit	3 Unit	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

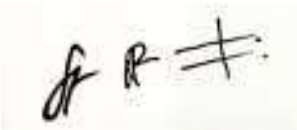

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan dan pajak kendaraaan yang dibayarkan			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna lainnya	Jumlah Fasilitas Kantor Yang dipelihara			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Indeks kepuasan Masyarakat**			**84 Nilai**	**84.5 Nilai**	**85 Nilai**	**85.5 Nilai**	**84 Nilai**	**84.5 Nilai**	**85 Nilai**	**85.5 Nilai**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Realisasi Pencatatan Target Dokumen Kependudukan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertibam Umum	**Persentase koordinasi trantibum yang di fasilitasi**					**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan			50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			-	-	**100%**	**100%**	-	-	**100%**	**100%**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			-	-	**100%**	**100%**	-	-	**100%**	**100%**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
		Aset Desa											
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah Kecamatan. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Menyediakan sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, dan sumber daya keprofesionalan.
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan, sehingga tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin meningkat ;
3. Meningkatkan kualitas sebagian sumberdaya aparatur Pemerintahan;
4. Karena ketersediaan anggaran yang belum memadai, maka dalam melakukan program pembangunan peran serta masyarakat diikutsertakan;
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi ;
6. Meningkatkan pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar OPD, baik antar Kabupaten dengan kecamatan, maupun di tingkat bawah dengan nagari-nagari ;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran terutama dalam memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 plafond anggaran untuk Kecamatan Luhak Nan Duo sebesar Rp. 1.135.346.280,- yang terdiri dari :

1) Belanja Pegawai Rp. 510.034.960,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 523.893.950,-
3) Belanja Modal Rp. 43.697.370,-

Artinya, struktur anggaran untuk Kecamatan Luhak Nan Duo pada tahun 2024 didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal anggaran Tahun 2024 Kecamatan Luhak Nan Duo dapat disajikan pada Tabel berikut :

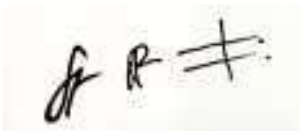

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.255.091.737**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.020.346.280**	
01.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**917.270.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**691.254.960**	
01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	688.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	510.034.960	
01.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	170.950.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123.500.000	
01.01.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.720.000	

01.03	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**35.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**33.960.000**	
01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.600.000	
01.03.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	9.611.000	
01.03.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	14.749.000	
01.04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**183.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**182.281.950**	
01.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.965.200	
01.04.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.900	
01.04.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.850	

01.04.04	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	149.317.000	
01.04.05	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indonesia	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.000.000	
01.05	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**3 Unit**	**55.821.737**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**3 Unit**	**43.697.370**	
01.05.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	55.821.737	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.697.370	
01.06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**20.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**19.941.000**	
01.06.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	19.941.000	

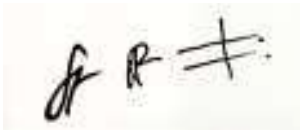

01.07	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100%**	**44.000.000**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100%**	**49.211.000**	
01.07.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan DibayarkanPajaknya	7 Unit 7 Unit	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan DibayarkanPajaknya	7 Unit 7 Unit	26.301.000	
01.07.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	12.990.000	
01.07.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	9.920.000	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85.7 Nilai**	**7.500.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85.7 Nilai**	**12.500.000**	

02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase realisasi pencatatan target dokumen kependudukan**	**94%**	**7.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase realisasi pencatatan target dokumen kependudukan**	**94%**	**7.500.000**	
02.01.01	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliayah kecamatan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.500.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.500.000	
02.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase realisasi pendapatan dari sektor IMB**	**100%**	**5.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase realisasi pendapatan dari sektor IMB**	**100%**	**5.000.000**	
02.02.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.000.000	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa**	**100%**	**27.500.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa**	**100%**	**27.500.000**	

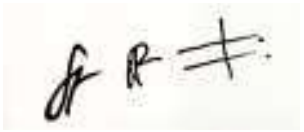

03.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**27.500.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**27.500.000**	
03.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	7.500.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	7.500.000	
03.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Koordinasi Trantibum yang Difasilitasi**	**100%**	**5.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Trantibum yang Difasilitasi**	**100%**	**5.000.000**	
04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**5.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**5.000.000**	

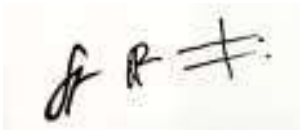

04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Persentase Kegiatan Penanggulangan PEKAT	100%	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Penanggulangan PEKAT	100%	5.000.000	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**110.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**45.000.000**	
05.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**110.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**45.000.000**	

05.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	80.000.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	15.000.000	
05.01.02	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	20.000.000	

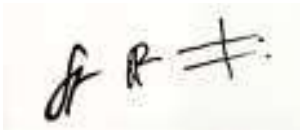

05.01.03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**25.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**25.000.000**	
06.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kantor Camat Luhak Nan Duo**	**Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**25.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**25.000.000**	
06.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	5.000.000	
06.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	5.000.000	

06.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	5.000.000	
06.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Luhak Nan Duo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	10.000.000	
JUMLAH					**1.435.091.737**				**1.135.346.280**	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. **1.135.346.280** (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Kecamatan Luhak Nan Duo dan RPJMD Periode 2021-2026.

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan dari Masyarakat

Pada tabel berikut ini merupakan hasil kajian terhadap Pogram/Kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan di Kecamatan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Nagari-Nagari yang langsung diajukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi di Kecamatan, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat Nagari.

Usulan Program/Kegiatan ini juga disesuaikan dengan isu-isu penting didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Perangkat Daerah : Kecamatan Luhak Nan Duo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Status
1	30-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Pertanian	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Jorong sungai talang adanya memiliki satu jalan usaha tani penghubung sungai talang ke padang laweh yang di jadikan akses jalan usaha tani oleh masyarakat	Jorong sungai talang, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Diterusakan : OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
2	30-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	tidak adanya di kawasan pemukiman tersebut saluran pengaliran yang mendukung untuk mengatasi genangan jika musim hujan	Jorong Sungai Talang, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diterima akan diteruskan ke OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
3	30-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto	Pertanian	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Jorong sungai talang memiliki memiliki satu jalan usaha tani penghubung sungai talang ke kampung 3	Jorong Sungai Talang, Kab. Pasama	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Rekomendasi : Diteruskan : OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamat

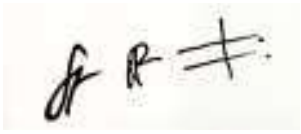

			Baru			mahakarya yang di jadikan akses jalan usaha tani oleh masyarakat untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat sekitar	n Barat								an
4	30-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Jorong sungai talang memiliki satu jembatan penghubung dari sungai talang ke padang laweh yang mana jembatan ini nantinya digunakan bagi masyarakat untuk jalan usaha tani sehingga d butuhkan akses jembatan yang memadai	jorong sungai talang, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Status jembatan berada pada jalan non status, agar di inventarisir kedalam jalan kabupaten? Lengkapi dengan kesiapan lahan dan surat Pembebasan lahan apabila pembangunan diluar aset pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
5	30-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan (Non Status)	Jorong sungai talang memiliki satu tempat ibadah mushalla yaitu mushalla al ikhlas yang terletak jauh dari lintas ,	Jorong Sungai Talang, Kab. Pasama	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait, kewenangan	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamat

			Baru			sehingga warga kejorongan sungai talang yang ingin beribadah ke mushalla al ikhlas tsb untuk melaksanakan ibadah sangat jauh dan jalan yang begitu belum mendukung secara umum	n Barat				n Ruang	n Ruang	jalan non status dengan melengkapi kesiapan lahan dan surat pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		an
6	31-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Jalan akan di rencanakan akan di rabata beton sehingga membuat posisi jalan akan lebih tinggi dr pada rumah dan mengakibatkan banjir jika hujan	Jorong Jambak, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait, kewenangan jalan non status dengan melengkapi kesiapan lahan dan surat pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
7	31-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa	Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi	jalan penghubung dari kampung 4, 1 dan 2 sampai saat ini mengalami banyak	Kampung I Mahakarya,	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Perumahan, Kawasan	Dinas Perumahan, Kawasan	Rekomendasi : Diteruskan : Kewenangan jalan Non	NON BELANJA TRANS	Diteruskan ke Musrenbang

			Koto Baru			kerusakan, sehingga masyarakat banyak mengalami kendala dalam beraktivitas terutama di bidang pertanian, Perkebunan dan perekonomian	Kab. Pasaman Barat				Permukiman dan Pertanahan	Permukiman dan Pertanahan	status dan lengkapi proposal dan kesiapan lahan dan serah terima aset jika di luar aset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	FER	Kecamatan
8	31-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	jalan banyuwagi yang menghubungkan RT III ke RT IV di RK I Kampung II Mahakarya yang dilalui warga banyak terdapat genangan-genangan air ketika hujan dan lubang-lubang, sehingga dari segi aspek kehidupan serta perkembangan penduduk masyarakat banyak mengalami kendala dalam beraktivitas terutama di bidang pertanian, perekonomian dan pendidikan	Kampung II Mahakarya, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait, kewenangan jalan non status dengan melengkapi kesiapan lahan dan surat pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
9	31-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kabupaten/ Kota	banyak nya keberagaman baik suku, agama di lingkungan jorong giri maju sehingga membutuhkan	Kejorongan Giri Maju, Kab. Pasama	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait dengan	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamat

			Baru			gedung serba guna untuk terciptanya kerukunan dan kebersamaan antar masyarakat dalam segala bidang	n Barat				n Ruang	n Ruang	melengkapi kesiapan lahan dan surat pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		an
10	31-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Jalan Mbah Salleh merupakan jalan yang cukup ramai dilalui oleh masyarakat Kondisi jalan mbah salleh saat ini sangat jauh dari kata layak sebab sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, di beberapa bagian jalan sudah tidak ada lagi koral yang menutupi jalan, tinggal jalan tanah yang ketika hujan akan seperti kubangan kerbau	Dusun III Jorong Pujorahayu, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
11	31-12-2022	Nagari Koto Baru	Kepala Desa Koto Baru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Sebagian besar masyarakat dusun 2 dan dusun 3 Jorong Pujorahayu harus berputar cukup jauh ketika ingin pergi ke dusun tetangga. Padahal jarak ke dua dusun tidak	Kejorongan Pujorahayu dusun II, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait dengan melengkapi kesiapan lahan dan surat	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

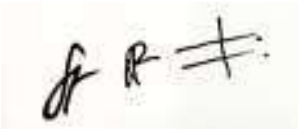

						lah jauh, diperlukan jalan alternatif warga untuk memudahkan akses warga sebab jalan utama yang harus ditempuh harus berputar dan rusak parah							pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		
12	31-12-2022	Nagari Kapa	Kepala Desa Kapa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Malasiro - Lubuk Gadang	Kurang Lancarnya Akses Jalan Warga Lubuak Gadang karna adanya jalan yg Rusak sepanajng 1 Km	Lubuak gadang Jorong Malasiro, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Kapa	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diterima akan diteruskan ke OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
13	31-12-2022	Nagari Kapa	Kepala Desa Kapa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Kurang Lancarnya akses Jalan Ke Pematang Jambu karna Jembatan masih terbuat dari Kayu.	Pematang Jambu Kapa Utara, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Kapa	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait, kewenangan jalan non status dengan melengkapi kesiapan lahan dan surat pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
1	31-	Nagar	Kep	Pekerjaa	Peningkatan dan	Kurang Lancarnya Jalan	Padang	Luhak	Kapa	Kabupaten	Dinas	Dinas	Rekomendasi :	NON	Diterusk

4	12-2022	i Kapa	ala Desa Kapa	n Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan Padang Panjang - Kp. Jambu	Pemukiman Masyarakat di Padang Panjang ke Pematang Jambu	Panjang Jorong Lubuak Pudiang, Kab. Pasaman Barat	Nan Duo		/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan diterima akan diteruskan ke OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER	an ke Musrenbang Kecamatan
15	31-12-2022	Nagari Kapa	Kepala Desa Kapa	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase pada Kawasan Perumahan	Kalau Hujan Lebat Turun Kawasan ini akan tergenang Air dan dapat Merusak Badan Jalan.	Kapa timur, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Kapa	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan diterima akan diteruskan ke OPD terkait Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
16	31-12-2022	Nagari Kapa	Kepala Desa Kapa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan MCK	Kurang Lancarnya aktifitas masyarakat dalam Menjalan kan Ibadah di Mesjid Jati Kapa Timur Karna tidak adanya MCK.	Kapa timur, Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	Kapa	Kabupaten /Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Usulan akan diteruskan ke OPD terkait dengan melengkapi kesiapan lahan dan surat pembebasan lahan apabila pembangunan diluar asset Pemda. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 Pemerintah dalam menetapkan tema RKP mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2023 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023, pemerintah menetapkan tema pembangunan RKP 2024 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan memperhatikan kondisi factual terkini, Pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka pemerintah menetapkan arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2024 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

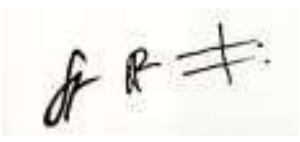

Dalam rangka menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah menetapkan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik;

Kecamatan sebagai perangkat kewilayahan mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada RKP tahun 2024 dan telaahan terhadap tugas kecamatan, pemerintah kecamatan sebagai perangkat kewilayahan pada kabupaten mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional untuk Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, dan mendukung pengoordinasian prioritas nasional untuk Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan misi Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Nilai	84.5 Nilai	85 Nilai	85.7 Nilai	86 Nilai	86 Nilai
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Nilai	84.5 Nilai	85 Nilai	85.7 Nilai	86 Nilai	86 Nilai
2	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih		Nilai SAKIP Kecamatan	C	B	B	B	BB	BB
			Persentase temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Luhak Nan Duo	Nilai SAKIP Kecamatan	C	B	B	B	BB	BB
			Persentase temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Secara umum, rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (Lima) program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) kegiatan serta 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan rincian Rumusan rencana program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel T.C 3.3 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasaman Barat

Unit Organisasi : Kecamatan Luhak Nan Duo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Luhak Nan Duo								**1.135.346.280,00**					**1.574.000.000,00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								**1.135.346.280,00**					**1.574.000.000,00**
7	**1**				**KECAMATAN ADMINISTRASI**								**1.135.346.280,00**					**1.366.000.000,00**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.020.346.280,00**					**1.366.000.000,00**
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**691.254.960,00**					**930.000.000,00**
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang/bulan	100 %	510.034.960,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang /bulan	690.000.000,00
7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	123.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.000.000,00
7	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Realisasi Keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	57.720.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**33.960.000,00**					**50.000.000,00**
7	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	9.600.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	15.000.000,00
7	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	100 %	9.611.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15.000.000,00

7	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	14.749.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**182.281.950,00**					**249.000.000,00**
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.965.200,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	19.999.900,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahaan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.999.850,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda a n yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahaan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	300 Laporan	100 %	149.317.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggara a n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	200.000.000,00
7	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahaan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pe natausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**43.697.370,00**					**60.000.000,00**
7	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	1 Unit	43.697.370,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19.941.000,00**					**25.000.000,00**
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	19.941.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49.211.000,00**					**52.000.000,00**
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	100 %	26.301.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	25.000.000,00
7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Unit	100 %	12.990.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.000.000,00
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	100 %	9.920.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	2 Unit	12.000.000,00
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**12.500.000,00**					**14.000.000,00**
7	**1**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**7.500.000,00**					**8.000.000,00**
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase realisasi pencatatan target dokumen kependudukan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.7 Nilai	1 Laporan	94 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.000.000,00
7	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**5.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase realisasi pendapatan dari sektor IMB	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.7 Nilai	1 Laporan	94 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	6.000.000,00
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**27.500.000,00**					**33.000.000,00**
7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**27.500.000,00**					**33.000.000,00**

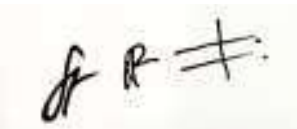

7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000,00
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**5.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	**1**	**4**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**5.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

						Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.000.000,00
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**45.000.000,00**					**126.000.000,00**
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**45.000.000,00**					**126.000.000,00**
7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

						Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 100 %	200 Orang	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem antapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Und ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemert ahanan dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	90.000.000,00
7	1	5	2	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

						Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	25.000.000,00
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**25.000.000,00**					**29.000.000,00**
7	**1**	**6**	**2**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**25.000.000,00**					**29.000.000,00**
7	1	6	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													

						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													

						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	11.000.000,00
TOTAL													**1.135.346.280,00**					**1.574.000.000,00**

Sungai Talang, 4 Juli 2023
Camat Luhak Nan Duo

SUTRISNO, S. Kom
Penata TK. I/ III.b
NIP. 19720515 201001 1 012

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD Tahun 2024 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip safe guarding yaitu transparansi , akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya kegiatan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) kegiatan serta 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan, dengan rincian Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Luhak Nan Duo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Luhak Nan Duo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Luhak Nan Duo								**1.135.346.280,00**					**1.574.000.000,00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								**1.135.346.280,00**					**1.574.000.000,00**
7	**1**				**KECAMATAN ADMINISTRASI**								**1.135.346.280,00**					**1.366.000.000,00**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.020.346.280,00**					**1.366.000.000,00**
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**691.254.960,00**					**930.000.000,00**
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang/bulan	100 %	510.034.960,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang /bulan	690.000.000,00
7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

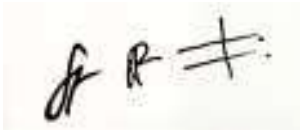

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	123.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.000.000,00
7	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Realisasi Keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	57.720.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**33.960.000,00**					**50.000.000,00**
7	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Paket	100 %	9.600.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	15.000.000,00
7	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	100 %	9.611.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15.000.000,00

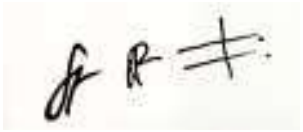

7	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	14.749.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**182.281.950,00**					**249.000.000,00**
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.965.200,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	19.999.900,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahaan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.999.850,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda a n yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahaan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	300 Laporan	100 %	149.317.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggara a n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	200.000.000,00
7	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahaan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pe natausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**43.697.370,00**					**60.000.000,00**
7	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	1 Unit	43.697.370,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19.941.000,00**					**25.000.000,00**
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	19.941.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00
7	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49.211.000,00**					**52.000.000,00**
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	100 %	26.301.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	25.000.000,00
7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Unit	100 %	12.990.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.000.000,00
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	100 %	9.920.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	2 Unit	12.000.000,00
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**12.500.000,00**					**14.000.000,00**
7	**1**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**7.500.000,00**					**8.000.000,00**
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase realisasi pencatatan target dokumen kependudukan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.7 Nilai	1 Laporan	94 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.000.000,00
7	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**5.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase realisasi pendapatan dari sektor IMB	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.7 Nilai	1 Laporan	94 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	6.000.000,00
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**27.500.000,00**					**33.000.000,00**
7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**27.500.000,00**					**33.000.000,00**

7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000,00
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**5.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	**1**	**4**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**5.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

						Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.000.000,00
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**45.000.000,00**					**126.000.000,00**
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**45.000.000,00**					**126.000.000,00**
7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

						Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 100 %	200 Orang	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem antapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Und ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemert ahanan dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	90.000.000,00
7	1	5	2	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

						Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	25.000.000,00
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 % 100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**25.000.000,00**					**29.000.000,00**
7	**1**	**6**	**2**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**25.000.000,00**					**29.000.000,00**
7	1	6	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													

						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													

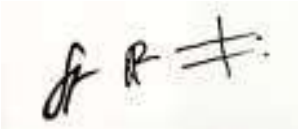

						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	11.000.000,00
TOTAL													**1.135.346.280,00**					**1.574.000.000,00**

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Sungai Talang, 4 Juli 2023
Camat Luhak Nan Duo

SUTRISNO, S. Kom
Pembina TK. I/ III.b
NIP. 19720513 201001 1 012